

barata indonesia

PT BARATA INDONESIA (Persero)

INTEGRASI KOMPETENSI CAPAI LEBIH TINGGI

Competence
Integration,
Achieving
Higher

LAPORAN TAHUNAN

2018

Annual Report





2017

KERJA KERAS, KERJA CERDAS, MENUJU TERATAS *Work Hard, Work Smart, Be The Top*

Di tengah persaingan usaha yang semakin ketat, PT Barata Indonesia (Persero) dengan pas menutup tahun 2017 dengan peningkatan capaian Kinerja yang signifikan. Setelah menyelesaikan tahun 2016 yang merupakan periode konsolidasi di segala aspek dan penancangan semangat tumbuh berkesinambungan, Manajemen melanjutkan kinerja tahun 2017 dengan strategi yang lebih tajam untuk memfasilitasi pencapaian target yang semakin tinggi. Jajaran Manajemen mengajak semua karyawan untuk bekerja lebih keras memaksimalkan seluruh potensi serta bekerja lebih cerdas mengoptimalkan peluang yang ada dengan tetap fokus pada visi dan misi Perusahaan. Pemerintah dengan kebijakan percepatan program Infrastruktur prioritas, khususnya penancangan peningkatan lokal konten menjadi peluang besar yang dimanfaatkan Manajemen sepanjang tahun 2017. Koridor kerja keras dan kerja cerdas berhasil menciptakan efisiensi dan inisiatif-inisiatif terobosan operasional bernilai tambah yang mengantarkan PT Barata Indonesia (Persero) berada pada capaian kinerja tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Daya saing menjadi lebih kuat di berbagai bidang usaha menjadikan PT Barata Indonesia (Persero) sebagai BUMN Industri Berat yang diperhitungkan di dunia industri tanah air

In the midst of increasingly fierce competition, PT Barata Indonesia (Persero) closed 2017 with a significant increase in performance. After completing 2016 which was a period of consolidation in all aspects and the launching of a sustainable growth spirit, Management continued its performance in 2017 with a sharper strategy to facilitate the achievement of increasingly high targets. The Management Board invites all employees to work harder to maximize all their potential and work smarter to optimize the opportunities that exist by staying focused on the Company's vision and mission. The government with a priority infrastructure acceleration program policy, particularly the launching of local content enhancements has become a great opportunity that has been utilized by Management throughout 2017. The corridor of smart work and smart work has succeeded in creating efficiency and value-added operational breakthrough initiatives that led PT Barata Indonesia (Persero) to the highest performance achievement in the last five years. Competitiveness is stronger in various business fields, making PT Barata Indonesia (Persero) a state-owned heavy industry that is considered in national industrial scope.



2018

INTEGRASI KOMPETENSI, CAPAI LEBIH TINGGI *Competence Integration, Achieving Higher*

Dinamika perekonomian global yang berdampak pada kondisi ekonomi di dalam negeri, tidak menghentikan langkah PT Barata Indonesia (Persero) dalam menggapai prestasi. Dengan perolehan nilai penjualan yang mencapai Rp 2,18 Triliun (meningkat 82,4% terhadap 2018) dengan laba bersih sebesar Rp 67,8 Milyar (meningkat 31,4% terhadap 2018), telah membuktikan PT Barata Indonesia (Persero) mampu mencatat pertumbuhan kinerja yang meningkat signifikan serta membuktikan hasil kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh elemen di dalam perusahaan membuahkan hasil yang maksimal.

Tahun 2018 membawa tantangan yang tidak kecil bagi PT Barata Indonesia (Persero). Namun berbagai tantangan tersebut mampu dihadapi dan diolah oleh PT Barata Indonesia (Persero) melalui penerapan upaya-upaya strategis berupa strategi integrasi kompetensi.

Kebijakan integrasi kompetensi ini didukung dengan penataan bisnis proses yang tepat serta implementasi yang terukur telah membawa perusahaan tetap berada dalam jalur menuju pertumbuhan yang positif.

Ke depannya PT Barata Indonesia (Persero) akan lebih mengukuhkan langkah dengan tetap konsisten pada penguatan bisnis di bidang usaha fokus pada produk yang dikelompokkan dalam bisnis Food, Energy, Water dan Industri Penunjang lainnya. Kombinasi keahlian sumber daya, manajemen yang inovatif dan pengalaman industri akan membawa PT Barata Indonesia (Persero) mampu mencapai performa yang terus meningkat guna mewujudkan kemajuan industri dan pembangunan Indonesia yang lebih baik.

The dynamics of the global economy which impacted domestic economic conditions, not stopped PT Barata Indonesia (Persero) from reaching its achievements. With the sales value reaching Rp 2.18 Trillion (increased by 82.4% against 2018) with a net profit of Rp 67.8 billion (increased by 31.4% against 2018), PT Barata Indonesia (Persero) has been able to record significant performance growth and proving the results of hard work and smart work from all elements in the Company produce maximum results.

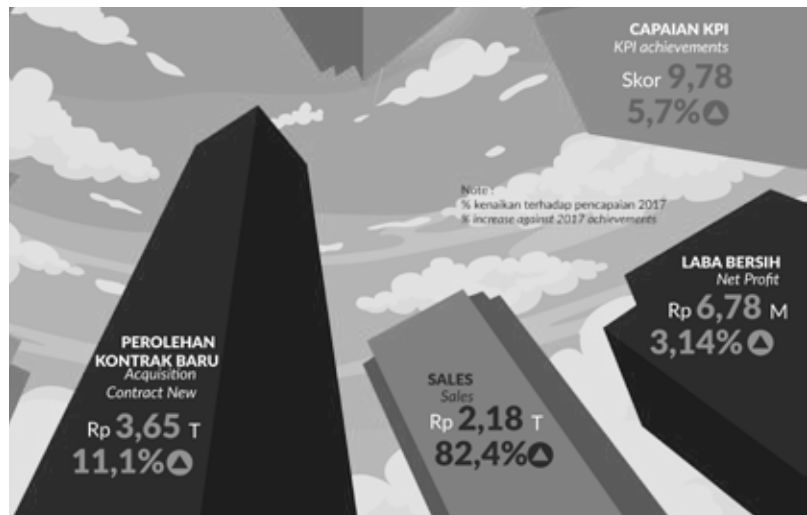
2018 brings various challenges for PT Barata Indonesia (Persero). However, these can be dealt with and processed by PT Barata Indonesia (Persero) through the implementation of strategic efforts in the form of integration competency strategies.

This competency integration policy is supported by structuring the right business processes and measurable implementations that have kept the Company on the path to positive growth.

In the future, PT Barata Indonesia (Persero) will strengthen its steps while remaining consistent in strengthening business by focusing in the Food, Energy, Water and other Supporting Industries businesses sectors. The combination of resource expertise, innovative management and industry experience will bring PT Barata Indonesia (Persero) capable of achieving ever-increasing performance in order to realize better industrial and development progress in Indonesia.

DAFTAR ISI *Table of Contents*

i	KESINAMBUNGAN TEMA <i>Theme's Continuity</i>
1	DAFTAR ISI <i>Table of Contents</i>
21	PENCAPAIAN PENTING TAHUN 2018 <i>2018 Important Achievement</i>
23	KEUNGGULAN KAMI <i>Our Advantages</i>



26	KILAS KINERJA 2018 <i>The 2018 Performance Highlight</i>
27	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING <i>Financial Highlights</i>
36	IKHTISAR OBLIGASI DAN EFEK LAINNYA Bond Information
36	IKHTISAR SAHAM <i>Share Highlight</i>
37	PERISTIWA PENTING 2018 <i>2018 Significant Events</i>
43	PENGHARGAAN 2018 <i>2018 Awards</i>



46	LAPORAN MANAJEMEN <i>Managements Reports</i>
47	LAPORAN DEWAN KOMISARIS <i>Board of Commisioners' Report</i>
57	LAPORAN DEWAN DIREKSI <i>Board of Directors' Report</i>
67	SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2018 <i>Statement Letter From Members Of Board Of Commisioners And Directors For Responsibility On 2018 Annual Report</i>



70

PROFIL PERUSAHAAN*Company Profile*

71

DATA PERUSAHAAN

Company Data

73

MAKNA LOGO, FILOSOFI, DAN MOTTO PERUSAHAAN

Logo Meaning, Philosophy, And Motto Of The Company

84

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

Company Background In Brief

85

JEJAK LANGKAH

Milestone

87

BIDANG USAHA

Line Of Business

91

STRUKTUR ORGANISASI

Organization Chart

93

VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Vision, Mission, And Corporate Values

95

NILAI PERUSAHAAN

Corporate Values

96

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Corporate Values Implementation

97

IDENTITAS & RIWAYAT HIDUP SINGKAT DEWAN

KOMISARIS

Board Of Commissioners' Profile In Brief

103

IDENTITAS DAN RIWAYAT HIDUP DIREKSI

Identity And Brief Curriculum Vitae Of Board Of Directors

108

PROFIL ESELON I

Echelon I Profile

116

DIVISI

Division

118

JUMLAH KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN

KOMPETENSI KARYAWAN

Number Of Employees And Competency Development Of Employees

123

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholders Composition

124

KRONOLOGI OBLIGASI DAN EFEK LAINNYA

Bonds and Other Securities chronology

124

KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM

Share Issuance Chronology

127

LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN

Capital Market Supporting Institutions

129

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Reward And Certifications

131

WILAYAH KERJA

Work Area

133

ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN

Offices Address

135

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

Information On Company Website

137

DATA PELATIHAN ORGAN PERSEROAN

Data Of Training Of Company's Organ

140

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS*Supporting Business Review*

141

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

153

TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology

DAFTAR ISI *Table of Contents*



162 ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN *Management Discussion & Analysis*

163	TINJAUAN EKONOMI <i>Economy Overview</i>
167	TINJAUAN INDUSTRI <i>Industrial Overview</i>
171	TINJAUAN OPERASIONAL <i>Operational Overview</i>
171	TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA <i>Operational Overview Per Business Segment</i>
175	TINJAUAN KINERJA KEUANGAN <i>Financial Performance Overview</i>
181	ANALISIS KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG, KOLEKTIBILITAS PIUTANG, DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA <i>Analysis Of The Ability To Pay Debts, Collectability Of Accounts Receivable, And Other Financial Ratios</i>
219	PERBANDINGAN REALISASI 2017 DAN 2018 <i>Comparison of 2017 and 2018 Realization</i>
232	ASPEK PEMASARAN <i>Marketing Aspect</i>
233	KEBIJAKAN DEVIDEN DAN JUMLAH DEVIDEN <i>Dividend Policy and Amount</i>
238	PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN YANG DILAKSANAKAN PERUSAHAAN (ESOP/MSOP) <i>Share Ownership Program By and/or Corporate Managed Management (ESOP/MSOP)</i>
239	REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM (DALAM HAL PERUSAHAAN MASIH DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA <i>Actual Use of Funds from The Public Offering (In The Company's Issues Still Required to Submit a Fund Realization Issuance Report)</i>

246

TATA KELOLA PERUSAHAAN *Corporate Governance*

247	KOMITMEN PENERAPAN GCG <i>Statement in Good Corporate Governance</i>
248	DASAR HUKUM PENERAPAN GCG DI PERUSAHAAN <i>Legal Basis Of GCG Implementation</i>
250	STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN <i>Corporate Governance Structure</i>
251	TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN GCG <i>Objectives and Benefits of GCG Implementation</i>
253	PRINSIP-PRINSIP GCG <i>GCG Principles</i>
255	PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE <i>Code of Corporate Governance</i>
258	ASESMEN TERHADAP PENERAPAN GCG PERUSAHAAN <i>Assessment On The Implementation Of Corporate GCG</i>
259	HASIL PENILAIAN PENERAPAN GCG SETIAP TAHUN (PENGUKURAN IMPLEMENTASI GCG) <i>GCG Assessment Results Every Year (GCG Implementation Assessment)</i>
289	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM <i>General Meeting Of Shareholders</i>
302	DEWAN KOMISARIS <i>Board Of Commissioners</i>
318	KOMISARIS INDEPENDEN <i>Independent Commissioner</i>
319	DIREKSI <i>Board Of Directors</i>
331	KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI <i>Remuneration Policy For Board Of Commissioners And Board Of Directors</i>

333	HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI <i>Affiliation Of Board Of Commissioners And Board Of Directors</i>	375
334	INFORMASI RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI <i>Information On Concurrent Positions Of Board Of Commissioners And Board Of Directors</i>	381
335	KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI <i>Diversity Of Composition Of Board Of Commissioners And Board Of Directors</i>	384
337	ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS <i>Supporting Organs Of Board Of Commissioners</i>	386
349	ORGAN PENDUKUNG DIBAWAH DIREKSI <i>Supporting Organs under the Board of Directors</i>	386
		388
		389

MANAJEMEN RISIKO <i>Risk Management</i>	
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL <i>Internal Control System</i>	
FUNGSI KEPATUHAN <i>Compliance Function</i>	
AKSES INFORMASI DAN DATA PERSEROAN <i>Access to Company Information and Data</i>	
PERKARA PENTING <i>Important Cases</i>	
BENTURAN KEPENTINGAN <i>Conflict Of Interest</i>	
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN <i>Whistleblowing System</i>	



398 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN *Corporate Social Responsibility*

399	PENDAHULUAN <i>Preliminary</i>
400	DASAR KEBIJAKAN <i>Policy Basis</i>
401	RUANG LINGKUP <i>Scope</i>
402	ANGGARAN DAN REALISASI <i>Cost Of CSR Program</i>

403	CAPAIAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2018 <i>2018 Corporate Social Responsibility Achievement</i>
405	PROGRAM KEMITRAAN & BINA LINGKUNGAN BARATA INDONESIA <i>Barata Indonesia Partnership & Development Program</i>
407	TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA <i>Corporate Social Responsibility In The Employment, Occupational Health and Safety Field</i>
412	KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) <i>Occupational Health And Safety (K3)</i>
414	TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP PELANGGAN <i>Corporate Social Responsibility To Customer</i>



415

LAPORAN KEUANGAN *Financial Report*

No.	KRITERIA Criteria	PENJELASAN Explanation	HALAMAN Page
I.	UMUM <i>General</i>		
1.	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris. <i>Annual report is presented in good and proper Indonesian language and is recommended to be presented in English.</i>		✓
2.	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca. <i>Annual report is printed with good quality with font type and size that is easy to read.</i>		✓
3.	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas. <i>Annual report is printed with good quality with font type and size that is easy to read.</i>	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka 2. Samping 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman <i>Company name and the year of the annual report are disclosed in:</i> 1. <i>Front Cover;</i> 2. <i>Side;</i> 3. <i>Back Cover; and</i> 4. <i>Each page</i>	✓
4.	Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan <i>Annual report clearly discloses corporate identities</i>	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir. <i>Including the most recent annual report and at least the last 4 years.</i>	✓
II.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING <i>Key Financial Data Highlights</i>		
1.	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun <i>Information on the Company's business results in the form of comparison for 3 (three) financial years or since the starting of business if less than 3 (three) years</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain: a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) serta laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain secara total. <i>Information includes among others:</i> 1. <i>Sales/revenues;</i> 2. <i>Profit (loss);</i> a. <i>Attributable to owners of the Company;</i> b. <i>Attributable to non-controlling interests;</i> 3. <i>Total profit (loss) and other comprehensive income;</i> a. <i>Attributable to owners of the Company; and</i> b. <i>Attributable to non-controlling interests; and</i> 4. <i>Earnings (loss) per share.</i> <i>Note: If the Company does not have any subsidiaries, the Company presents profit (loss) and the profit (loss) and other comprehensive income in total.</i>	27
2.	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. <i>Information on the Company's financial position in the comparative period of 3 (three) financial years or since the starting of business if less than 3 (three) years.</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas. <i>Information includes among others:</i> 1. <i>Total Investment in Associate Company;</i> 2. <i>Total Assets;</i> 3. <i>Total Liabilities; and</i> 4. <i>Total Equity;</i>	28

3.	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. <i>Financial ratios in the comparative period of 3 (three) financial years or since the starting of business if less than 3 (three) years.</i>	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan. <i>Information includes 5 (five) financial ratios that are general and relevant with the industry of the Company.</i>	30
4.	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik* <i>Shares price information in tables and graphs*</i>	1. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Jumlah saham yang beredar; b. Kapitalisasi pasar; c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan d. Volume perdagangan. 2. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan dan volume perdagangan saham. Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. <i>1. Information in table form which includes: a. Total outstanding shares; b. Market capitalization; c. Highest, lowest, and closing shares price; and d. Trade Volume 2. Information in graphic form includes at least closing price and trade volume of shares. For every quarter in the last 2 (two) financial years</i>	36
5.	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir* <i>Information on outstanding bonds, sukuk or convertible bonds in the last 2 (two) financial years*</i>	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk. <i>Information includes: 1. Total outstanding bonds/sukuk/convertible bonds; 2. Interest/yield rate; 3. Maturity date; and 4. Bons/sukuk ratings</i>	36
III.	LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Management Report		
1.	Laporan Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Report</i>	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. <i>Includes matters as follows: 1. Assessment on the Board of Directors performance regarding the management of the Company and the assessment basis; 2. Outlooks on the Company's business prospects prepared by the Board of Directors and the considerations; 3. Assessment on the performance of committees under the Board of Commissioners; and 4. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reasons of the change.</i>	47
2.	Laporan Direksi <i>Board of Directors Report</i>	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala yang dihadapi perusahaan; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Penerapan tata kelola perusahaan; dan 4. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 5. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. <i>Includes matters as follows: 1. Analysis on the Company's performance, which includes, strategic policy, a comparison between the results achieved with targeted, and the constraints faced by the Company; 2. Analysis on business prospects; 3. Corporate governance implementation; and 4. Assessment on the performance of the committees under the Board of Directors (if any); and 5. Changes in the composition of the Board of Directors members (if any) and the reasons for the change.</i>	57

3.	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi <i>Signatures of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors</i>	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. <i>Includes matters as follows:</i> 1. <i>Signatures are outlined in a separate sheet;</i> 2. <i>Statement that the Board of Commissioners and Board of Directors are fully responsible for the correctness of the Annual Report's contents;</i> 3. <i>Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors by mentioning the name and position; and</i> 4. <i>Written explanation in a separate letter from the concerned in the event of a member of the Board of Commissioners or Board of Directors who did not sign the annual report, or a written explanation in a separate letter from other members in the absence of an appropriate written explanation from the concerned.</i>	68
IV.	PROFIL PERUSAHAAN <i>Company Profile</i>		
1.	Nama dan alamat lengkap perusahaan <i>Name and complete address of the Company</i>	Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website. <i>Information includes name and address, postal code, telephone number, facsimile number, email and website.</i>	71
2.	Riwayat singkat perusahaan <i>Brief History of the Company</i>	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada). Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan <i>Includes date/year of establishment, name, and company name change (if any).</i> Note: if the Company never changes its name, should be disclosed	71
3.	Bidang usaha <i>Business Line</i>	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. <i>Descriptions regarding:</i> 1. <i>Business activities of the Company according to the last Articles of Association;</i> 2. <i>Business activities that are carried out; and</i> 3. <i>Products and/or services produced.</i>	87
4.	Struktur Organisasi <i>Organization Structure</i>	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi. <i>In chart form, includes name and position at least until one structure level below the Board of Directors.</i>	91
5.	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan <i>Vision, Mission, and Corporate Culture</i>	Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki perusahaan. <i>Includes:</i> 1. <i>The Company's Vision;</i> 2. <i>The Company's Mission;</i> 3. <i>Description that the vision and mission have been approved by the Board of Directors/Board of Commissioners; and</i> 4. <i>Statement on corporate culture of the Company</i>	93
6.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris <i>Identity and brief biography of the Board of Commissioners</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan. <i>Information includes:</i> 1. <i>Name;</i> 2. <i>Position (including position in other companies or institutions);</i> 3. <i>Age;</i> 4. <i>Domicile;</i> 5. <i>Education (Field Studies and Educational Institutions);</i> 6. <i>Work Experience (Position, Institutions, and Serving Period);</i>	97

7.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi <i>Identity and brief biography of the Board of Directors</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan. <i>Information includes:</i> 1. Name; 2. Position (including position in other companies or institutions); 3. Age; 4. Domicile; 5. Education (Field Studies and Educational Institutions); 6. Work Experience (Position, Institutions, and Serving Period); and 7. Appointment history as the Board of Commissioners member in the Company	103
8.	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan) <i>Total employees (comparative of 2 years) and description of competence development (e.g. aspects of education and training of employees)</i>	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan. <i>Includes among others:</i> 1. Affiliate relationship between members of the Board of Directors with fellow Board of Directors members; 2. Affiliate relationship between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; 3. Affiliate relationship between members of the Board of Directors with Main and/or controlling Shareholders; 4. Affiliate relationship between members of the Board of Commissioners with fellow members of the Board of Commissioners; and 5. Affiliate relationship between members of the Board of Commissioners with Main and/or controlling Shareholders. Note: if there are no intended affiliate relationship, should be disclosed.	118
9.	Komposisi Pemegang saham <i>Shareholders Composition</i>	Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; b. Nama Komisaris dan Direktur yang memiliki saham; dan c. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. <i>Includes among others:</i> 1. Details of Shareholders name that includes 20 largest shareholders and percentage of ownership; 2. Details of Shareholder and percentage of ownership include: a. Shareholders name who own 5% or more shares; b. Name of the Board of Commissioners and Board of Directors who own shares; and c. Public shareholders group with respective shares ownerships of less than 5%.	123
10.	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi <i>List of Subsidiaries/Associate Entities/Joint Venture Company/Special Purpose Vehicle</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). <i>Information includes among others:</i> 1. Name of the subsidiaries and/or associates; 2. Shares ownership percentage; 3. Description of the business line of subsidiaries and/or associate entities; and 4. Description of the operational status of subsidiaries and/or associate entities (have been operating or not yet operating).	124
11.	Struktur grup perusahaan <i>Group structure</i>	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV). <i>Group structure of the company in chart form that describes its subsidiaries, associate entities, joint venture, and special purpose vehicle (SPV).</i>	n/a

12.	Kronologis pencatatan saham* <i>Chronology of shares listing*</i>	Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan saham; 2. Jenis tindakan korporasi (<i>corporate action</i>) yang menyebabkan perubahan jumlah saham; 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; dan 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. <i>Includes among others:</i> 1. <i>Chronology of shares listing;</i> 2. <i>Type of corporate actions which led to changes in total shares;</i> 3. <i>Changes in total shares from the start of listing until the end of the financial year; and</i> 4. <i>Name of the exchanges on which the Company's shares is listed.</i>	124
13.	Kronologis pencatatan efek lainnya* <i>Chronology of other securities*</i>	Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan efek lainnya; 2. Jenis tindakan korporasi (<i>corporate action</i>) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya; 3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; 4. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 5. Peringkat efek. <i>Includes among others:</i> 1. <i>Chronology of other securities;</i> 2. <i>Type of corporate actions which led to changes in total other securities;</i> 3. <i>Changes in total other securities from the start of listing until the end of the financial year; and</i> 4. <i>Name of the exchanges on which the Company's other securities is listed.</i> 5. <i>Securities Ratings.</i>	124
14.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal* <i>Name and address of supporting professionals*</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. <i>Information includes among others:</i> 1. <i>Name and address of Share Registrar/parties who administer the Company's shares;</i> 2. <i>Name and address of Public Accounting Firm; and</i> 3. <i>Name and address of securities rating company</i>	127
15.	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional <i>Awards received in the last financial year and/ or certifications that are still valid in the last financial year both national and international.</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikat; 2. Tahun perolehan; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). <i>Information includes among others:</i> 1. <i>Awards and/or certifications name;</i> 2. <i>Year of the awards</i> 3. <i>Appreciator and/or certifier; and</i> 4. <i>Validity period (for certifications).</i>	129
16.	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) <i>Name and address of subsidiaries and/or branch offices or representative offices (if any)</i>	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang perwakilan, agar diungkapkan. <i>1. Contains information among others:</i> 2. <i>Name and address of subsidiaries; and</i> 3. <i>Name and address of branch/representative offices.</i> <i>Note: if the Company does not have any subsidiaries/branches representatives, should be disclosed.</i>	131
17.	Informasi pada Website Perusahaan <i>Information on the Company's Website</i>	Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Struktur grup perusahaan (jika ada); 3. Analisis kinerja keuangan; 4. Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir); dan 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi. <i>Includes at least:</i> 1. <i>Information of shareholders until the end individual owners;</i> 2. <i>Group structure of the company (if any);</i> 3. <i>Financial performance analysis;</i> 4. <i>Annual financial statements (last 5 years); and</i> 5. <i>Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors.</i>	135
V.	ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN <i>Management</i>		

1.	Tinjauan operasi per segmen usaha <i>Operational overview by business segment</i>	Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas. <i>Contains description of:</i> 1. <i>Explanation of each business segment.</i> 2. <i>Performance by business segment, among others:</i> a. <i>Production;</i> b. <i>Increase/decrease in production capacity;</i> c. <i>Sales/revenues; and</i> d. <i>Profitability.</i>	163, 175
2.	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan <i>Description on the Company's financial performance</i>	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain; dan 5. Arus kas. <i>Financial performance analysis that includes comparison between the financial performance for the year with to the previous year and the cause of the increase/decrease (in the form of narrative and tables), among others:</i> 1. <i>Current assets, noncurrent assets, and total assets;</i> 2. <i>Current liabilities, noncurrent liabilities, and total liabilities;</i> 3. <i>Equity;</i> 4. <i>Sales/revenues, expenses and income (loss), other comprehensive income, and total profit (loss) and other comprehensive income; and</i> 5. <i>Cash flow</i>	181
3.	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan <i>Discussion and analysis of the ability to pay debt and receivable collectibility level of the Company, by presenting relevant ratio calculation in accordance with the industrial types of the Company.</i>	Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang. <i>Explanation about:</i> 1. <i>Ability to pay debt, both short-term and long-term; and</i> 2. <i>Receivable collectibility level.</i>	219
4.	Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>) <i>Discussion on capital structure and management policy on capital structure.</i>	Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>) dan dasar pemilihan kebijakan tersebut. <i>Explanation about:</i> 1. <i>Details of capital structure consisting of interest-based debt and equity; and</i> 2. <i>Management policy on the capital structure policy and election basis for such policy.</i>	124
5.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal pada tahun buku terakhir <i>Discussion on material commitments for capital goods investment in the last financial year.</i>	Penjelasan tentang: 1. Tujuan dari ikatan tersebut; 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 3. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. <i>Explanation about:</i> 1. <i>Purpose of such commitments;</i> 2. <i>Sources of funds that are expected to fulfill such commitments;</i> 3. <i>Currency that becomes denominated; and</i> 4. <i>Measures planned by the Company to protect the risk of related foreign currency.</i> Note: <i>if the Company does not have any commitments related to capital goods</i>	164, 170

6.	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir <i>Discussion on capital goods investments realized in the last financial year.</i>	Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan. <i>Explanation about:</i> 1. <i>Type of capital goods investment;</i> 2. <i>Objective of capital goods investment; and</i> 3. <i>Value of capital goods investment issued in the last financial year.</i> Note: if there are no realization of capital goods investment, should be disclosed.	195
7.	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai(realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan <i>Information on comparison between the targets at the beginning of the financial year with the results achieved (realization), and targets or projections to be achieved for the next year regarding revenues, profits, and others that are considered important for the Company</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang. <i>Information includes among others:</i> 1. <i>Comparison between the targets at the beginning of the financial year with the results achieved (realization).</i> 2. <i>Targets and projections to be achieved within 1 (one) year ahead.</i>	226
8.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan <i>Information and material fact that occur after the date of accountant report</i>	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan. <i>Description of significant events after the date of accountant report including its impact on the performance and risk of business in the future.</i> Note: if there are no significant events after the date of accountants report, should be disclosed.	37
9.	Uraian tentang prospek usaha perusahaan <i>Description on the Company's business prospects</i>	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industridan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya. <i>Description on the Company's prospects associated with the industry and economy in general added with quantitative supporting data from trusted data sources.</i>	53, 63
10.	Uraian tentang aspek pemasaran <i>Description on marketing aspect</i>	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar. <i>Description on marketing aspect for products and/or services of the Company, among others, marketing strategy and market share.</i>	233
11.	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir <i>Description on dividend policy and the amount of cash dividends per share and the amount of dividend per year declared or paid during the last 2 (two) financial years.</i>	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya. <i>Includes description about:</i> 1. <i>Dividend distribution policy;</i> 2. <i>Total dividend distributed;</i> 3. <i>Amount of cash dividend per share;</i> 4. <i>Payout ratio; and</i> 5. <i>Date of the announcement and payment of cash dividends, for each year.</i> Note: if there are no dividend distributions, should be disclosed the reasons.	238
12.	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) <i>Employee and/or Management Stock Option Program (ESOP/ MSOP) conducted by the Company</i>	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan. <i>Includes descriptions about:</i> 1. <i>Total ESOP/MSOP shares and the realization;</i> 2. <i>Time period;</i> 3. <i>Requirements of eligible employees and/or management; and</i> 4. <i>Exercise price.</i> Note: if there are no intended programs, should be disclosed.	239

13.	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)* <i>Realization use of proceeds from public offering (in terms where the Company is still obliged to submit the realization report on the use of proceeds from public offering)*</i>	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). <i>Includes descriptions about:</i> 1. Total proceeds; 2. Plan for the use of proceeds; 3. Details of the use of proceeds; 4. Proceeds balances; and 5. Approval date of GMS/General Meeting of Bondholders on changes in the use of proceeds (if any).	240
14.	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/ atau transaksi dengan pihak afiliasi* <i>Information on material transactions contain conflict of interest and/or transactions with affiliated party*</i>	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan. <i>Includes descriptions about:</i> 1. Name of the parties who performed transaction and the nature of affiliate relationship; 2. Explanation on the transaction fairness; 3. Reasons for the transaction; 4. Realization of transaction during the last financial year period; 5. The Company's policy related with review mechanisms on the transaction; and 6. Compliance to the related regulations and provisions. Note: if there are no intended transactions, should be disclosed.	363
15.	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan <i>Description on legislation amendment affecting significantly to the Company</i>	Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang undangan dan dampaknya terhadap perusahaan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan. <i>Description includes among others: legislation amendment and impacts on the Company.</i> Note: if there no changes in accounting policies, should be disclosed.	243
16.	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir <i>Description on changes in accounting policies applied by the Company in the last financial year</i>	Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan. <i>Description includes among others: legislation amendment and impacts on the Company.</i> Note: if there no changes in accounting policies, should be disclosed.	LK - 14
17.	Informasi kelangsungan usaha <i>Information on business continuity</i>	Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku. <i>Disclosures of information about:</i> 1. Matters that potentially have significant effects on the Company's business continuity in the last financial year; 2. Management assessment on matters in figures 1; and 3. Assumptions used by the management in conducting assessment. Note: if there are no matters that potentially have significant effects on the Company's business continuity in the last financial year, should be disclosed the assumptions underlying the management to believe that there are no matters that potentially have significant effects on the Company's business continuity in the financial year.	77

VI. TATA KELOLA PERUSAHAAN <i>Good Corporate Governance</i>		
1. Uraian Dewan Komisaris <i>Description on the Board of Commissioners</i>	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris atau program orientasi bagi Komisaris baru; dan 3. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris). <i>Description includes among others:</i> 1. <i>Scope of work and responsibilities of each member of the Board of Commissioners;</i> 2. <i>Training program in order to improve the competence of the Board of Commissioners and orientation program for new members of the Board of Commissioners; and</i> 3. <i>Disclosures on Board Charter (guidelines and work rules of the Board of Commissioners).</i>	302
2. Informasi mengenai Komisaris Independen <i>Information on Independent Commissioner</i>	Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. <i>Includes among others:</i> 1. <i>Determination criteria of Independent Commissioner; and</i> 2. <i>Statement on independence of each Independent Commissioner.</i>	318
3. Uraian Direksi <i>Description on the Board of Directors</i>	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi atau program orientasi bagi Direksi baru; dan 3. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Direksi). <i>Description includes among others:</i> 1. <i>Scope of work and responsibilities of each member of the Board of Directors;</i> 2. <i>Training program in order to improve the competence of the Board of Directors and orientation program for new members of the Board of Directors; and</i> 3. <i>Disclosures on Board Charter (guidelines and work rules of the Board of Directors).</i>	319
4. Assessment terhadap Dewan Komisaris dan Direksi <i>Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors</i>	Mencakup antara lain: 1. Prosedur pelaksanaan <i>assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; 2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan <i>assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; dan 3. Pihak yang melakukan <i>assessment</i>. <i>Includes among others:</i> 1. <i>Assessment procedures on the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors;</i> 2. <i>Criteria used in the assessment on the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors; and</i> 3. <i>Assessors.</i>	333
5. Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Description on remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors.</i>	Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Direksi; dan 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi. <i>Includes among others:</i> 1. <i>Disclosures of remuneration determinations procedure of the Board of Commissioners;</i> 2. <i>Disclosures of remuneration determinations procedure of the Board of Directors;</i> 3. <i>Remuneration structure that indicates the type and amount of short-term benefits, post-employment, and/or other long-term benefits for each member of the Board of Commissioners;</i> 4. <i>Remuneration structure that indicates the type and amount of short-term benefits, post-employment, and/or other long-term benefits for each member of the Board of Directors;</i> 5. <i>Disclosures of remuneration determinations indicator of the Board of Directors.</i>	331
6. Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi <i>Frequency and attendance level of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Directors and joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. Untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan. <i>Information includes among others:</i> 1. <i>Meetings Date;</i> 2. <i>Meetings Participants; and</i> 3. <i>Meetings Agenda.</i> <i>For each meeting of the Board Commissioners, Board of Directors, and joint meetings.</i>	312

7.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu <i>Information on the main and controlling shareholders, both directly and indirectly, until the individual owners.</i>	Dalam bentuk skema atau diagram, kecuali untuk BUMN yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah. <i>In the form of scheme or diagram, except for SOEs that are entirely owned by the government.</i>	123
8.	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/ atau pengendali <i>Disclosures of affiliate relationships between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Main and/or controlling Shareholders.</i>	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan. <i>Includes among others:</i> 1. <i>Affiliate relationship between members of the Board of Directors with fellow Board of Directors members;</i> 2. <i>Affiliate relationship between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;</i> 3. <i>Affiliate relationship between members of the Board of Directors with Main and/or controlling Shareholders;</i> 4. <i>Affiliate relationship between members of the Board of Commissioners with fellow members of the Board of Commissioners; and</i> 5. <i>Affiliate relationship between members of the Board of Commissioners with Main and/or controlling Shareholders.</i> Note: <i>if there are no intended affiliate relationship, should be disclosed.</i>	333
9.	Komite Audit <i>Audit Committee</i>	Mencakup antara lain: 1. Nama dan jabatan anggota komite audit; 2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. <i>Includes among others:</i> 1. <i>Name and position of audit committee members;</i> 2. <i>Qualifications of education and work experience of audit committee members;</i> 3. <i>Independence of audit committee members;</i> 4. <i>Description of duties and responsibilities;</i> 5. <i>Brief report of audit committee activities; and</i> 6. <i>Meetings frequency and attendance level of audit committee.</i>	339
10.	Komite/ Fungsi Nominasi dan/ atau Remunerasi <i>Nomination and/ or Remuneration Committee</i>	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite/ fungsi nominasi dan/ atau remunerasi; 2. Independensi komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite/fungsi nominasi dan/ atau remunerasi; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite/fungsi nominasi dan/ atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite/fungsi nominasi dan/ atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi. <i>Includes among others:</i> 1. <i>Name, position, and brief biography of nomination and/or remuneration committee members;</i> 2. <i>Independence of nomination and/or remuneration committee;</i> 3. <i>Description of duties and responsibilities;</i> 4. <i>Description of the nomination and/or remuneration committee activities;</i> 5. <i>Meetings frequency and attendance level of the nomination and remuneration committee;</i> 6. <i>Statement on on the nomination and/or remuneration guidelines; and</i> 7. <i>Succession policy of the Board of Directors.</i>	342
11.	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan <i>Other committees under the Board of Commissioners owned by the Company</i>	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. <i>Includes among others:</i> 1. <i>Name, position, and brief biography of other committees members;</i> 2. <i>Independence of other committees;</i> 3. <i>Description of duties and responsibilities;</i> 4. <i>Description on other committees activities; and</i> 5. <i>Meetings frequency and attendance level of other committees.</i>	341

12.	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan <i>Description on duties and functions of Corporate Secretary</i>	Mencakup antara lain: 1. Nama, domisili, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan; dan 3. Program pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi sekretaris perusahaan. <i>Includes among others:</i> 1. <i>Name, domicile, and brief position history of the corporate secretary;</i> 2. <i>Description of corporate secretary duties; and</i> 3. <i>Training programs in order to develop the competence of corporate secretary</i>	349
13.	Informasi mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya <i>Information on General Meeting of Shareholders (GMS) in the previous year</i>	Dalam bentuk tabel mencakup antara lain: 1. Keputusan RUPS tahun sebelumnya; 2. Realisasi hasil RUPS tahun sebelumnya pada tahun buku; dan 3. Alasan dalam hal terdapat keputusan RUPS yang belum direalisasikan. <i>In table form includes among others:</i> 1. <i>GMS resolutions in the previous year;</i> 2. <i>Realization of GMS results in the previous year in the financial year; and</i> 3. <i>Reasons for any GMS resolutions that have yet to be realized</i>	289
14.	Uraian mengenai unit audit internal <i>Information on internal audit unit</i>	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan unit audit internal; dan 6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit internal. <i>Includes among others:</i> 1. <i>Name of the head of internal audit unit;</i> 2. <i>Total employees (internal auditors) in the internal audit unit;</i> 3. <i>Certifications as internal audit professionals;</i> 4. <i>Position of internal audit unit within the corporate structure;</i> 5. <i>Brief report of the internal audit unit activity; and</i> 6. <i>Parties who appoint/dismiss the head of internal audit unit.</i>	354
15.	Akuntan Publik <i>Public Accountant</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan. <i>Information includes among others:</i> 1. <i>Name and year of public accountant who audits the annual financial statements for the last 5 years;</i> 2. <i>Name and year of Public Accounting Firm who audits the annual financial statements for the last 5 years;</i> 3. <i>Amount of fee of each type of service provided by a public accountant in the last financial year; and</i> 4. <i>Other services provided by the accountant other than audit services of the annual financial statements in the last financial year.</i> Note: <i>if there are no other services intended, should be disclosed.</i>	361
16.	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan <i>Description on the Company's risk management</i>	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan Upaya untuk mengelola risiko tersebut. <i>Includes among others:</i> 1. <i>Explanation on risk management system applied by the Company;</i> 2. <i>Explanation on evaluation conducted on the effectiveness of the risk management system;</i> 3. <i>Explanation on risks faced by the Company; and</i> 4. <i>Efforts to manage these risks.</i>	375
17.	Uraian mengenai sistem pengendalian internal <i>Description on internal control system</i>	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO - <i>internal control framework</i>); dan 3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern. <i>Includes among others:</i> 1. <i>Brief explanation on the internal control system, among others, include both financial and operational control;</i> 2. <i>Explanation of suitability of the internal control system with the internationally recognized framework (COSO - internal control framework); and</i> 3. <i>Explanation of the evaluation conducted on the effectiveness of internal control systems.</i>	381

18.	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan lingkungan hidup <i>Description on corporate social responsibility related with environment</i>	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan; dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. <i>Includes information about:</i> 1. <i>Policies established by the management; and</i> 2. <i>Activities performed. related to environmental programs associated with the Company's operations, such as the use of materials and energy that are environmentally friendly and can be recycled, waste treatment systems, consideration of environmental aspects in the provision of credit to customers, and others.</i> 3. <i>Certifications in environmental field owned.</i>	407
19.	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja <i>Description on corporate social responsibility related with s Employment, Occupational Health and Safety</i>	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan. terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, dan lain-lain. <i>Includes information about:</i> 1. <i>Policies established by the management; and</i> 2. <i>Activities performed. related to employment practices, occupational health and safety, such as gender equality and employment opportunities, occupational facilities and safety, employee turnover rates, occupational accidents level, and others.</i>	407
20.	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan <i>Description on corporate social responsibility related with social and community development</i>	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan; dan 3. Biaya yang dikeluarkan. terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain. <i>Includes information about:</i> 1. <i>Policies established by the management; and</i> 2. <i>Activities performed.</i> 3. <i>Cost incurred. related to social and community development, such as the use of local labor, community empowerment, refinement of social facilities and infrastructures, other donation forms, and others</i>	405
21.	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen <i>Description on corporate social responsibility related with responsibility to the customers</i>	Mencakup antara lain: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan. terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain. <i>Includes among others:</i> 1. <i>Policies established by the management; and</i> 2. <i>Activities performed. related to product responsibility, such as the health and safety of consumers, product information, facilities, amount and countermeasures on consumer complaints, and others.</i>	416
22.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan <i>Legal proceedings faced by the Company, subsidiaries, and members of the Board of Commissioners and Board of Directors who serve at the annual report period.</i>	Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan. <i>Includes among others:</i> 1. <i>Principal litigation/accusation;</i> 2. <i>Settlement status of litigation/accusation;</i> 3. <i>Effect on the Company's conditions; and</i> 4. <i>Administrative sanctions imposed on the Company, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by the relevant authorities (capital markets, banking and others) in the last financial year (or contained a statement of not imposed on administrative sanctions).</i> Note: in the absence of litigation, should be disclosed.	386
23.	Akses informasi dan data perusahaan <i>Access of information and data of the Company</i>	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya. <i>Description on the availability of access to information and data of the Company to the public, for example through the website (in Indonesian and English), mass media, mailing lists, newsletters, analyst meetings, and others.</i>	386

24.	Bahasan mengenai kode etik <i>Discussion on the Code of Conduct</i>	Memuat uraian antara lain: 1. Isi kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Jenis sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik; dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan <i>Includes a description, among others:</i> 1. <i>Code of Conduct contents;</i> 2. <i>Disclosures that the code of conduct applies to all levels of the organization;</i> 3. <i>Dissemination of the code of conduct;</i> 4. <i>Type of sanctions for any violations of the code of conduct; and</i> 5. <i>Total violations of the code of conduct and sanctions given in the last financial year.</i> Note: if there are no violations of the code of conduct in the last financial year, should be disclosed.	257
25.	Pengungkapan mengenai whistleblowing system <i>Disclosures of whistleblowing system</i>	Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan <i>Contains a description of the whistleblowing system mechanisms, among others:</i> 1. <i>Submission of violations report;</i> 2. <i>Protection for whistleblower;</i> 3. <i>Handling of complaints;</i> 4. <i>Parties which manages the complaint; and</i> 5. <i>Total complaints received and processed in the last financial year and the follow-ups.</i> Note: if there are no complaints received in the last financial year, should be disclosed	389
26.	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Policy on diversity of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors</i>	Uraian kebijakan Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya <i>Description of the Company's policy on diversity of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors in education (field of study), work experience, age, and gender.</i> Note: if there is no such policy, should be disclosed the reasons and considerations	335
VII. INFORMASI KEUANGAN <i>Financial Information</i>			
1.	Surat Pernyataan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan* <i>Statement Letter of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on Responsibility for Financial Statements*</i>	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. <i>Compliance with the relevant regulations on the Responsibility for Financial Statements</i>	LK
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan <i>Independent auditors' opinion on the financial statements</i>		LK
3.	Deskripsi Auditor Independen di Opini <i>Independent Auditors' description in Opinion</i>	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. <i>Description contains about:</i> 1. <i>Name & signature;</i> 2. <i>Date of Audit Report; and</i> 3. <i>License numbers of Public Accounting Firm and Public Accountant.</i>	LK

4.	Laporan keuangan yang lengkap <i>Complete financial statements</i>	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). <i>Contains a complete financial statements elements:</i> 1. <i>Statements of financial position;</i> 2. <i>Statements of profit or loss and other comprehensive income;</i> 3. <i>Statements of changes in equity;</i> 4. <i>Statements of cash flows;</i> 5. <i>Notes to financial statements</i> 6. <i>Comparative information concerning the previous period; and</i> 7. <i>Statements of financial position at the beginning of the previous period when an entity applies an accounting policy retrospectively or makes restatement of financial statement items, or when the entity reclassifies its financial statement items (if relevant).</i>	LK
5.	Perbandingan tingkat profitabilitas <i>Profitability level comparison</i>	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. <i>Comparison of performance/profit (loss) for the year with the previous year.</i>	LK
6.	Laporan Arus Kas <i>Cash Flow Statements</i>	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. <i>Fulfill the following provisions:</i> 1. <i>Grouping into three categories of activity: operating, investing, and financing;</i> 2. <i>Use of direct method to report cash flows from operating activities;</i> 3. <i>Separation between cash receipts or cash disbursements for the year on activities of operating, investing and financing; and</i> 4. <i>Disclosure of non-cash transactions should be included in the notes to the financial statements.</i>	LK
7.	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi <i>Accounting Policy Highlights</i>	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan. <i>Includes at least:</i> 1. <i>Compliance statement against Financial Accounting Standards (SAK);</i> 2. <i>Basis of measurement and preparation of financial statements;</i> 3. <i>Income tax;</i> 4. <i>Employee benefits; and</i> 5. <i>Financial Instruments.</i>	LK
8.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi <i>Disclosures of related party transactions</i>	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas. <i>Matters disclosed among others:</i> 1. <i>Name of related parties, and the nature and relationships with related parties;</i> 2. <i>Transaction value and percentage against total related income and expense; and</i> 3. <i>Total balances and percentage against total assets or liabilities.</i>	LK

9.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan <i>Disclosures related to taxation</i>	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. <i>Matters to be disclosed:</i> 1. <i>Fiscal reconciliation and current income tax expense calculations;</i> 2. <i>Explanation of the relationship between expense (income) of tax and accounting profit;</i> 3. <i>Statement that Taxable Income (LKP) of reconciliation results used as basis for filling the Annual Notification Letter of Annual Income Tax of Agency;</i> 4. <i>Details of assets and liabilities of deferred tax acknowledged in the financial position statements for each periods presented, and total expense (income) of deferred tax acknowledged in the income statement if the amount is not visible from the total assets or liabilities of deferred tax acknowledged in the financial position statements; and</i> 5. <i>Disclosure of presence or absence of a tax dispute.</i>	LK
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap <i>Disclosures related to Fixed Assets</i>	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. <i>Matters to be disclosed:</i> 1. <i>Depreciation method used;</i> 2. <i>Description on accounting policies selected between the revaluation model and the cost model;</i> 3. <i>Significant method and assumptions used in estimating the fair value of fixed assets (for revaluation model) or disclosure of the fair value of fixed assets (for cost model); and</i> 4. <i>Reconciliation of the gross carrying amount and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and end of the period by showing: additions, subtraction and reclassification.</i>	LK
11.	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi* <i>Disclosures related to operating segments*</i>	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/ atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. <i>Matters to be disclosed:</i> 1. <i>General information including factors used to identify reportable segment;</i> 2. <i>Information on income, assets, and liabilities of reportable segment;</i> 3. <i>Reconciliation of total revenues, income of reportable segment, assets, liabilities, and other material elements against relevant amount in the entity; and</i> 4. <i>Disclosures on the entity level, which includes information about products and/or services, geographical areas and major customers.</i>	LK
12.	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan <i>Disclosures related to Financial Instruments</i>	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Kebijakan manajemen risiko; 4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. <i>Matters to be disclosed:</i> 1. <i>Details of financial instruments owned based on its classification;</i> 2. <i>Fair value and the hierarchy for each class of financial instruments;</i> 3. <i>Risk management policy;</i> 4. <i>Explanation of risks related to financial instruments: market risk, credit risk and liquidity risk; and</i> 5. <i>Analysis of risks related to financial instruments quantitatively.</i>	LK
13.	Penerbitan laporan keuangan <i>Issuance of financial statements</i>	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi <i>Matters disclosed:</i> 1. <i>Date of the financial statements authorized for issue; and</i> 2. <i>Party responsible to authorize the financial statements.</i>	LK





*PLTU Right View Edit

EKUITAS
Equity

Rp **1,20 T**
5,5%▲

KESEHATAN
Health

Sehat "A" **70,25**
5,1%▼

PERINGKAT
Rank



BBB



5A2

**PEROLEHAN
KONTRAK BARU**
*Acquisition
Contract New*

Rp **3,65 T**
11,1%▲

ASSET
Asset

Rp **4,55 T**
54,0% ▲

CAPAIAN KPI
KPI achievements

Skor **9,78**
5,7% ▲

Note :
% kenaikan terhadap pencapaian 2017
% increase against 2017 achievements

LABA BERSIH
Net Profit

Rp **6,78 M**
3,14% ▲

SALES
Sales

Rp **2,18 T**
82,4% ▲

1. KOMPETENSI BIDANG PEMBANGKIT LISTRIK MENGUAT, PASCA AKSI KORPORASI AKUISISI SIEMENS-CILEGON

Pada bulan Agustus tahun 2018, PT Barata Indonesia (Persero) mengeksekusi aksi korporasi dengan mengakuisisi asset pabrik komponen turbin milik Siemens di Cilegon. Keberadaan pabrik baru ini memperkuat Barata di bisnis Pembangkit Listrik, yang merupakan salah satu dari sisi bisnis Energi Perseroan. Di Pabrik ini order-order lokal dan internasional komponen pembangkit tenaga listrik seperti *condenser, combustion chamber, low pressure outer & inner casing, stationary & blade rings* dan masih banyak lainnya, diproduksi dengan merujuk standard kualitas internasional. Hal ini dengan cepat telah ikut andil dalam menyumbangkan penjualan terutama dari sisi ekspor.

2. KAPASITAS PRODUKSI PABRIK FOUNDRY MENINGKAT

Pada tahun 2018 Perseroan berhasil meningkatkan kapasitas produksi pabrik *foundry* atau pengecoran yang pada tahun 2016 masih pada angka 12 ribu ton per tahun menjadi 15 ribu ton per tahun. Hal ini disebabkan oleh dilakukannya peremajaan peralatan produksi secara bertahap yang pendanaannya diperoleh dari program Penyertaan Modal Nasional Tahun Anggaran 2016. Perseroan masih akan terus meningkatkan kapasitas pabrik *foundry*, mengimbangi potensi pasar yang masih cukup besar, yaitu menuju target kapasitas 21 ribu ton per tahun pada tahun 2021.

Efek positif dari peningkatan kapasitas produksi ini secara signifikan langsung menaikkan omzet komponen *foundry* untuk komponen perkeretaapian guna meningkatkan pasokan ke pasar lokal ke sesama BUMN yaitu PT KAI (Persero) dan PT INKA (Persero). Selain itu, pasar ekspor bidang yang sama juga meningkat signifikan yaitu mencapai 225%, memenuhi kebutuhan customer di Amerika, Canada, Afrika dan Asia.

1. Competence in Power Plant Field Strengthened, Post Corporate Action: Siemens-Cilegon Acquisition

In August 2018, PT Barata Indonesia (Persero) conducted corporate action by acquiring Siemens turbine component factory assets in Cilegon. The existence of this new plant strengthens Barata in Power Plant business, which is one of the Company's business. In this factory local and international orders of electric power generators components such as condensers, combustion chambers, low pressure outer & inner casings, stationary & blade rings etc., are manufactured by referring to international quality standards. This has quickly contributed to sales, especially from the export scope.

2. Foundry Plant Production Capacity increased

In 2018 the Company succeeded in increasing foundry factories production capacity which was still at 12 thousand tons per year in 2016 to 15 thousand tons per year. This was due to the gradual rejuvenation of production equipment with funding obtained from National Capital Participation Program for 2016. The Company will continue to increase its foundry plant capacity, to counterbalance the considerable market potential, namely towards 21 thousand tons target capacity per year in 2021.

The positive effect of this increase in production capacity significantly increased foundry component turnover for railway component to increase supply to the local market to other SOEs, namely PT KAI (Persero) and PT INKA (Persero). In addition, the export market of the same sector also increased significantly, reaching 225%, to meet customer's needs in America, Canada, Africa and Asia.

3. 3PENGUATAN BRANDING & IMAGE

Perseroan memberikan perhatian khusus kepada hal Branding dan Image. Berbagai upaya dilakukan yaitu berupa perbaikan aspek teknis dan non teknis di internal. Hal ini diimbangi dengan *road show* yang dilakukan oleh *High Level Management* ke para *customer* untuk mempromosikan kembali kondisi Perseroan yang makin membaik dan siap memberikan layanan dengan kualitas terbaik. Seiring dengan upaya tersebut, *image* Perseroan terus dibentuk dengan melakukan berbagai propaganda media yang berhasil secara utuh mengembalikan kepercayaan *customer* dan mitra kerja.

Kondisi membaik ini secara nyata meningkatkan aspek lainnya yaitu peningkatan sales menjadi RP 2,18 Triliun (meningkat 82,4% terhadap capaian 2017). Hal ini tidak luput dari penyediaan modal kerja dari partner perbankan yang juga meningkat menjadi Rp 2,1 Triliun dari kondisi tahun 2017 sebesar Rp 800 Milyar.

4. PENGUATAN ASPEK HUMAN CAPITAL

Perseroan mencatat terdapat peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mampu mensupport operasional teknis dan non teknis. Berbagai aktifitas peningkatan kompetensi berupa asesmen serta *training-training inhouse* dan *outhouse* dilakukan secara terstruktur. Selain itu, sumber daya manusia sebagai hasil akuisisi pabrik komponen turbin secara cepat menyediakan tenaga teknis ahli di bidang pembangkit listrik dan langsung diprogramkan proses alih budaya & teknologi, memperkuat posisi Perseroan dalam mengeksekusi order-order yang masuk.

3. Strengthening Branding & Image

The Company pays special attention to its Branding and Image. Various efforts were made, such as improvement of technical and non-technical aspects on the internal. This was counterbalanced by road shows conducted by High Level Management to customers to re-promote the Company improved condition and its readiness to provide excellent quality services. Along with these efforts, the Company's image continues to be created by conducting various media propaganda which fully succeeded in restoring customer trust and work partners.

This improved condition significantly improved other aspects, such as increase in sales to Rp. 2.18 Trillion (increased by 82.4% against 2017 achievement). This was inseparable from the provision of working capital from banking partners which also increased to Rp. 2.1 Trillion from 2017 which was Rp. 800 Billion.

4. Strengthening Human Capital aspects

The Company noted that there was an increase in the quality and quantity of human resources who capable to support technical and non-technical operations. Various competency enhancement activities in the form of assessments and internal and external trainings are conducted in structurally. Additionally, human resources as the result of turbine component factories acquisition quickly provided expert technical personnel in the field of electricity generation, culture and technology transfer process was immediately programmed strengthening the Company's position in executing incoming orders.



The background is a composite image. The left half shows a close-up of a person's hand using a laptop's trackpad, with the laptop keyboard visible below. The right half shows a white, draped fabric, possibly a shirt or jacket, against a light background. A large, semi-transparent blue number '01' is overlaid on the top right, spanning across the boundary between the two images.

01

KILAS KINERJA 2018

*The 2018 Performance
Highlight*

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Financial Highlights

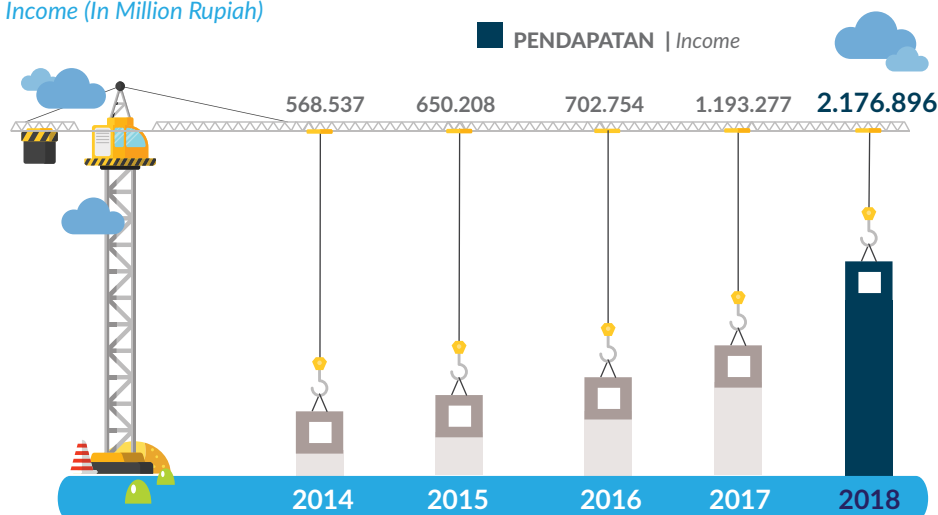
X Rp Juta | Million

URAIAN Description	2014	2015	2016	2017	2018
Aset Lancar <i>Current Assets</i>	597.879	669.963	1.349.312	2.183.410	3.573.897
Jumlah Aset <i>Total Assets</i>	860.202	1.314.832	2.077.984	2.919.247	4.547.362
Jumlah Liabilitas <i>Total Liabilities</i>	808.375	992.814	1.126.806	1.919.184	3.352.337
Jumlah Ekuitas <i>Total Equity</i>	51.827	322.018	951.178	1.000.063	1.195.025
Pendapatan <i>Revenue</i>	568.537	650.208	702.754	1.193.277	2.176.896
Beban Keuangan <i>Financial Cost</i>	(57.053)	(9.040)	(22.349)	(10.044)	(5.272)
Laba Bersih <i>Net Profit</i>	(96.561)	12.544	20.253	51.615	67.807

X Rp Juta | Million

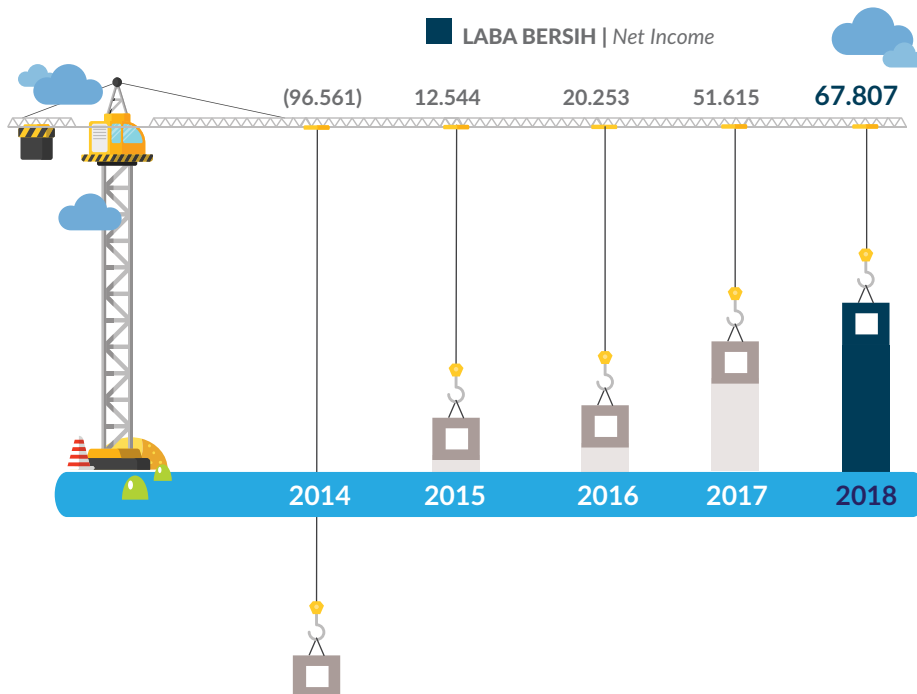
URAIAN Description	2014	2015	2016	2017	2018
Current Ratio (%)	95,40	93,33	166,66	155,81	125,80
Debt Equity Ratio (x)	15,60	3,08	1,18	1,92	2,81
Debt To Total Asset (x)	0,94	0,76	0,54	0,66	0,74
Net Profit Margin (%)	-16,98	1,93	2,88	4,33	3,11
ROA (%)	-11,23	0,95	0,97	1,77	1,49
ROI (%)	-9,99	4,25	3,10	3,77	4,55

PENDAPATAN (Rp Juta)
Income (In Million Rupiah)



	2014	2015	2016	2017	2018
■ PENDAPATAN Income	568.537	650.208	702.754	1.193.277	2.176.896

LABA BERSIH (Rp Juta)
Net Profit (In Million Rupiah)



	2014	2015	2016	2017	2018
LABA BERSIH Net Income	(96.561)	12.544	20.253	51.615	67.807

POSISI KEUANGAN

Balance Sheet

X Rp Juta | Million

URAIAN Description	2014	2015	2016	2017	2018
JUMLAH ASET TOTAL ASSETS	860.202	1.314.832	2.077.984	2.919.247	4.547.362
Aset Lancar Current Assets	597.879	669.963	1.349.312	2.183.410	3.573.898
Aset Tidak Lancar Fixed Assets	262.323	644.869	728.672	735.837	973.464
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS TOTAL EQUITY & LIABILITIES	860.202	1.314.832	2.077.984	2.919.247	4.547.362
JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES	808.375	992.814	1.126.806	1.919.184	3.352.337
Liabilitas Jangka Pendek Short Term Liabilities	626.719	717.860	809.611	1.401.315	2.841.044
Liabilitas Jangka Panjang Long Term Liabilities	181.656	274.954	317.195	517.869	511.293
Ekuitas Equity	51.827	322.018	951.178	1.000.063	1.195.025

LABA RUGI KOMPREHENSIF

Comprehensive Income

(dalam Juta rupiah) | (in Million Rupiah)

URAIAN Description	2014	2015	2016	2017	2018
Penjualan Bersih <i>Revenue</i>	568.537,26	650.207,63	702.754,27	1.193.277,45	2.176.895,53
Harga Pokok Penjualan <i>Cost of Good Sold</i>	561.665,98	582.272,67	613.221,95	1.073.232,70	1.976.461,60
Laba Kotor <i>Gross Profit</i>	6.871,28	67.934,96	89.532,32	120.044,75	200.433,93
Laba/(Rugi) Usaha <i>Operating Income/(Loss)</i>	(50.934,66)	34.800,84	49.357,01	79.521,59	153.196,98
Beban Keuangan <i>Financial Cost</i>	(57.053,34)	(9.039,80)	(22.349,08)	(10.044,00)	(5.272,23)
Laba sebelum pajak <i>Income before tax</i>	(107.988,00)	25.761,04	27.007,92	69.477,58	147.924,75
Laba Bersih <i>Net Profit</i>	(96.561,17)	12.544,29	20.252,56	51.615,02	67.806,66
Total Penghasilan komprehensif <i>Total comprehensive income</i>	(5.667,47)	385.442,11	(10.804,90)	(5.951,38)	(5.041,83)
Laba/(Rugi) Tahun berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk <i>Income/(Loss) for the Year Attributable to Owner of the Parent</i>	(96.561,17)	12.544,29	20.252,56	51.615,02	67.806,66
Laba/(Rugi) Tahun berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Nonpengendali <i>Income/(Loss) for the Year Attributable to Non-controlling Interests</i>	-	-	-	-	-
Jumlah Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Entitas Induk <i>Total Comprehensive Income/(Loss) for the Year Attributable to Owners of the Parent</i>	(102.228,64)	397.986,40	9.447,66	45.663,64	62.764,83
Jumlah Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Nonpengendali <i>Nonpengendali Total Comprehensive Income/(Loss) for the Year Attributable to Non-controlling Interests</i>	-	-	-	-	-

MODAL KERJA BERSIH

Net Working Capital

(dalam Juta rupiah) | (in Million Rupiah)

URAIAN Description	2014	2015	2016	2017	2018
Modal Kerja Bersih <i>Net Working Capital</i>	(28.839)	(47.897)	539.700	782.094	732.854

RASIO – RASIO

Ratio – Ratio

(dalam Juta rupiah) | (in Million Rupiah)

URAIAN Description	2014	2015	2016	2017	2018
RASIO LIKUIDITAS (%)					
Rasio Lancar <i>Current Ratio</i>	95,40	93,33	166,66	155,81	125,80
Rasio Kas <i>Cash Ratio</i>	10,58	11,70	74,98	71,84	26,66
RASIO PROFITABILITAS (%)					
Rasio Margin Laba/(Rugi) kotor <i>Gross Profit Margin Ratio (GPM)</i>	1,21	10,45	12,74	10,06	9,21
Rasio Marjin Laba/(Rugi) Usaha <i>Operating Profit Margin Ratio (OPM)</i>	(8,96)	5,35	7,02	6,66	7,04
Rasio Marjin Laba/(Rugi) Bersih <i>Net Profit Margin Ratio (NPM)</i>	(16,98)	1,93	2,88	4,33	3,11
Rasio Pengembalian atas Ekuitas <i>Return on Equity Ratio (ROE)</i>	(102,33)	3,79	2,19	5,58	6,40
Rasio Total Hutang terhadap Investasi <i>Total Liabilities To Investment Ratio (ROI)</i>	(9,99)	4,25	3,10	3,77	4,55
RASIO SOLVABILITAS (Kali)					
Rasio Total Hutang terhadap Ekuitas <i>Debt To Equity Ratio (DER)</i>	15,60	3,08	1,18	1,92	2,81
Rasio Total Hutang terhadap Assets <i>Debt To Assets Ratio (DAR)</i>	0,94	0,76	0,54	0,66	0,74
RASIO AKTIVITAS					
Rasio Perputaran Persediaan (Hari) <i>Inventory Turn Over (Day)</i>	51,49	45,82	56,03	51,37	69,82
Rasio Perputaran Piutang (Hari) <i>Collection Period (Day)</i>	95,58	107,76	97,86	99,42	63,20
Rasio Perputaran Total Aset (%) <i>Total Assets Turn Over Ratio (%)</i>	72,83	52,82	34,16	42,23	50,06

PENJUALAN

Sales

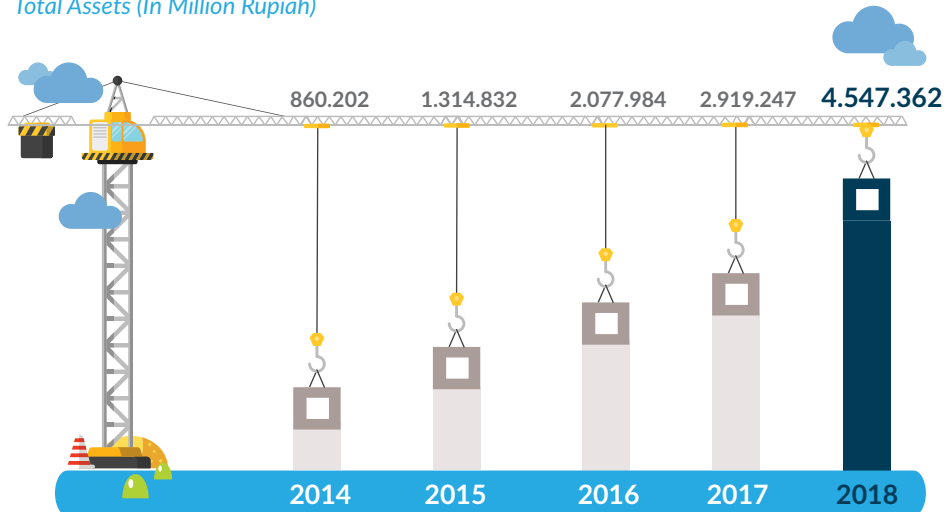
(dalam Juta rupiah) | (in Million Rupiah)

No.	UNIT USAHA Business Unit	2014	2015	2016	2017	2018
A	DIVISI INDUSTRI GULA & AGRO	-	-	-	-	1.177.456
B	DIVISI MINYAK & GAS	-	-	-	-	210.885
C	DIVISI PEMBANGKIT	-	-	-	-	81.281
D	DIVISI SUMBER DAYA AIR	262.398	238.457	254.675	313.186	233.834
E	DIVISI IND KOMP & PERMESINAN	228.333	355.996	285.791	501.041	412.275
F	DIVISI KONTRUKSI	77.806	55.754	162.288	379.050	-
G	DIVISI KOMPONEN TURBIN	-	-	-	-	61.166
TOTAL <i>Total</i>		568.537	650.208	702.754	1.193.277	2.176.896

POSISI KEUANGAN

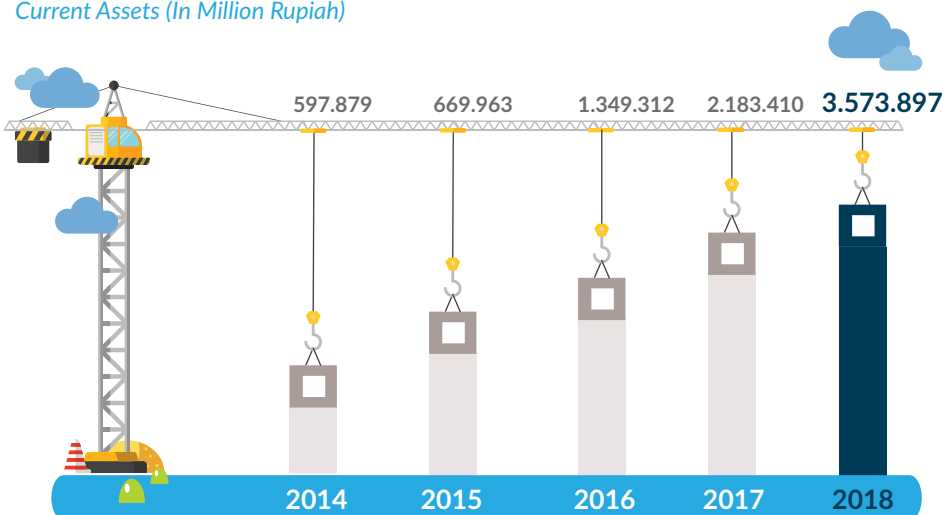
Financial Position

JUMLAH ASET (Rp Juta)
Total Assets (In Million Rupiah)



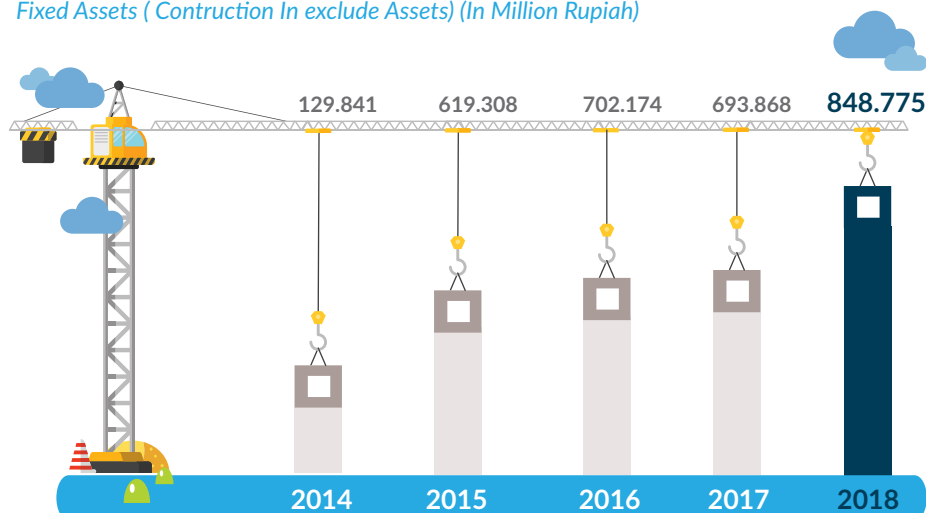
	2014	2015	2016	2017	2018
JUMLAH ASET <i>Total Assets</i>	860.202	1.314.832	2.077.984	2.919.247	4.547.362

ASET LANCAR (Rp Juta)
Current Assets (In Million Rupiah)



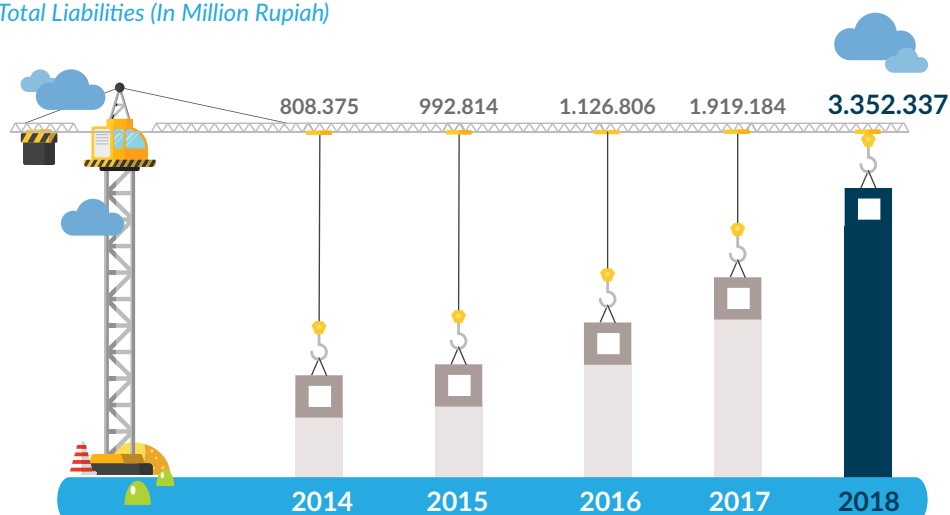
	2014	2015	2016	2017	2018
ASET LANCAR <i>Current Assets</i>	597.879	669.963	1.349.312	2.183.410	3.573.897

ASET TETAP (exclude Aset Dalam Konstruksi) (Rp Juta)
Fixed Assets (Construction In exclude Assets) (In Million Rupiah)



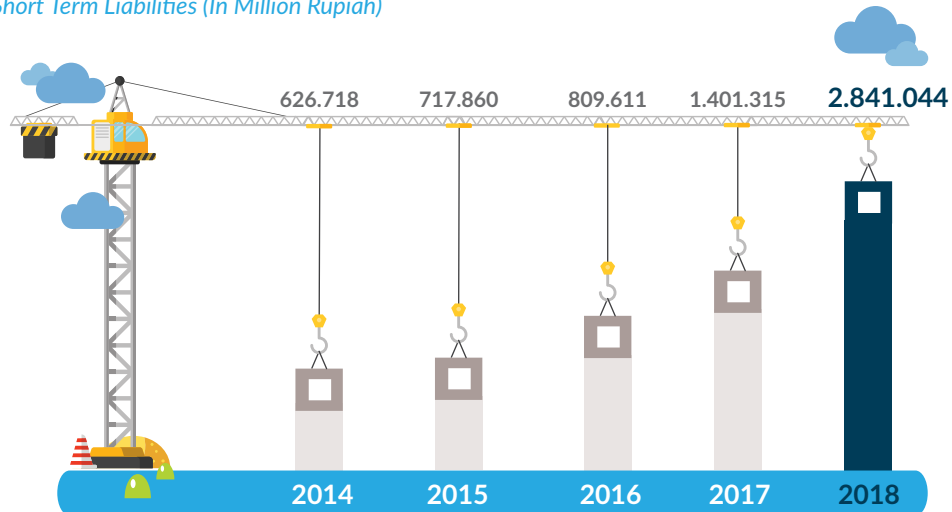
	2014	2015	2016	2017	2018
■ ASET TETAP (exclude Aset Dalam Konstruksi) <i>Fixed Assets (Construction In exclude Assets)</i>	129.841	619.308	702.174	693.868	848.775

LIABILITAS (Rp Juta)
Total Liabilities (In Million Rupiah)



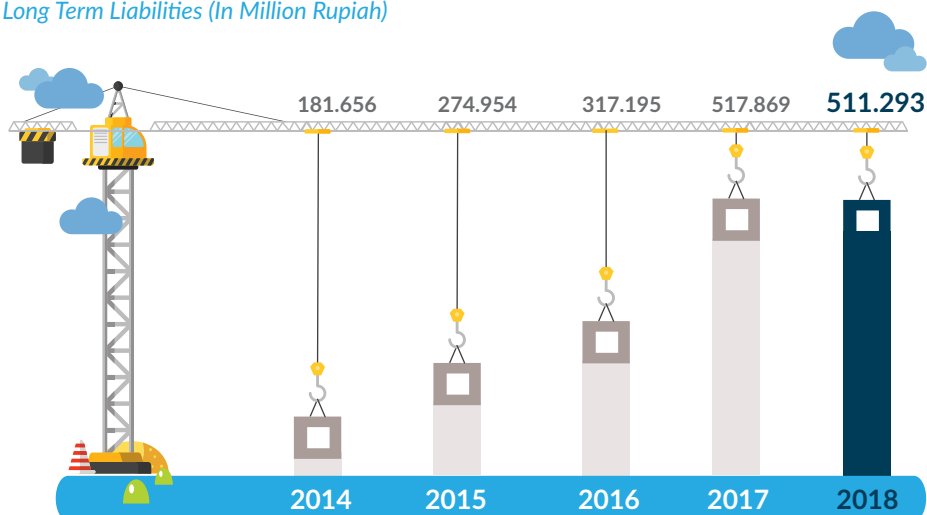
	2014	2015	2016	2017	2018
■ LIABILITAS <i>Total Liabilities</i>	808.375	992.814	1.126.806	1.919.184	3.352.337

LIABILITAS JANGKA PENDEK (Rp Juta)
Short Term Liabilities (In Million Rupiah)



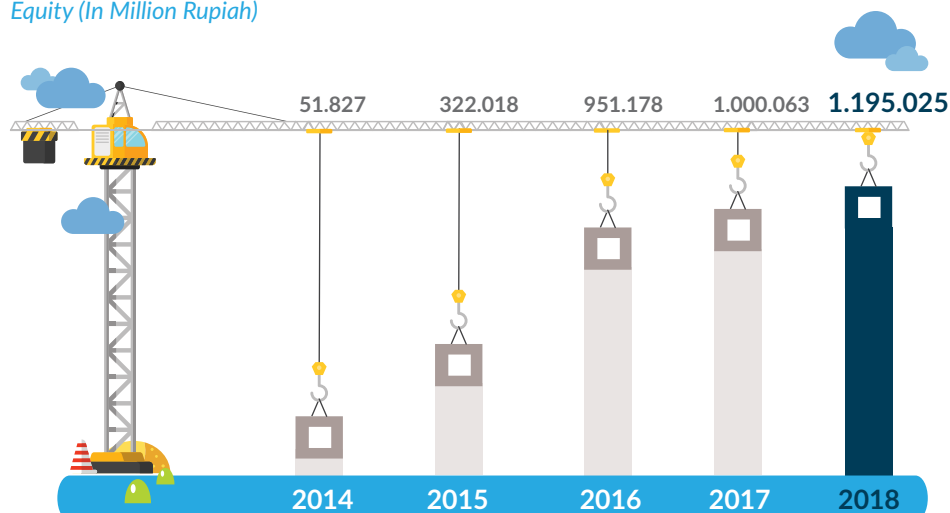
	2014	2015	2016	2017	2018
LIABILITAS JANGKA PENDEK <i>Short Term Liabilities</i>	626.718	717.860	809.611	1.401.315	2.841.044

LIABILITAS JANGKA PANJANG (Rp Juta)
Long Term Liabilities (In Million Rupiah)



	2014	2015	2016	2017	2018
LIABILITAS JANGKA PANJANG <i>Long Term Liabilities</i>	181.656	274.954	317.195	517.869	511.293

EKUITAS (Rp Juta)
Equity (In Million Rupiah)

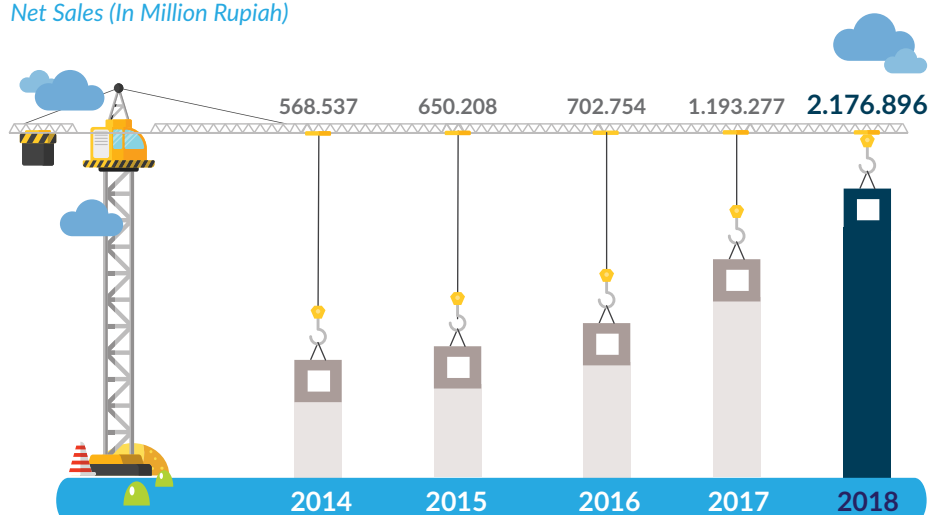


	2014	2015	2016	2017	2018
EKUITAS Equity	51.827	322.018	951.178	1.000.063	1.195.025

LABA RUGI

Profit & Loss

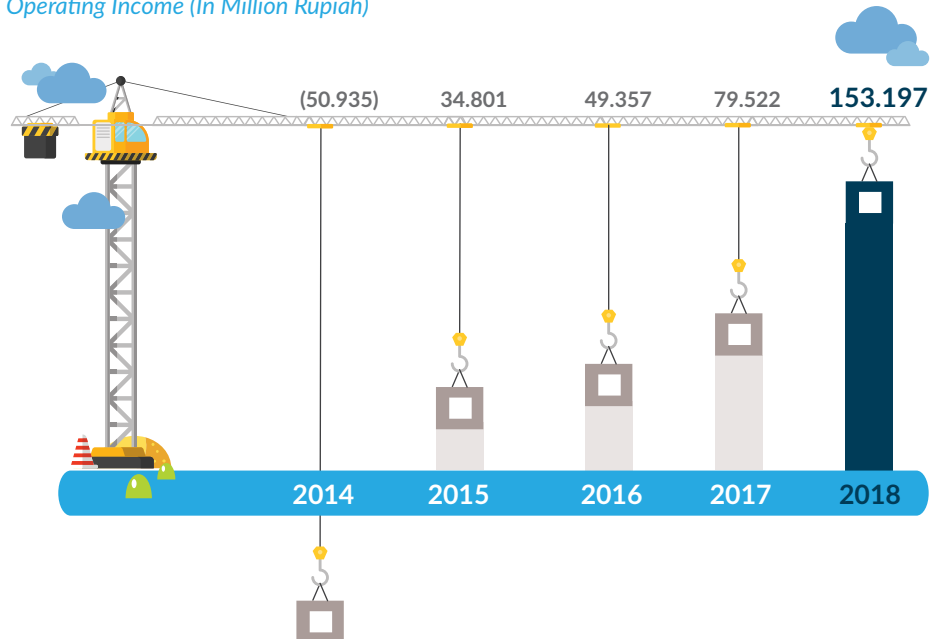
PENDAPATAN USAHA (Rp Juta)
Net Sales (In Million Rupiah)



	2014	2015	2016	2017	2018
PENDAPATAN USAHA Net Sales	568.537	650.208	702.754	1.193.277	2.176.896

LABA USAHA (Rp Juta)

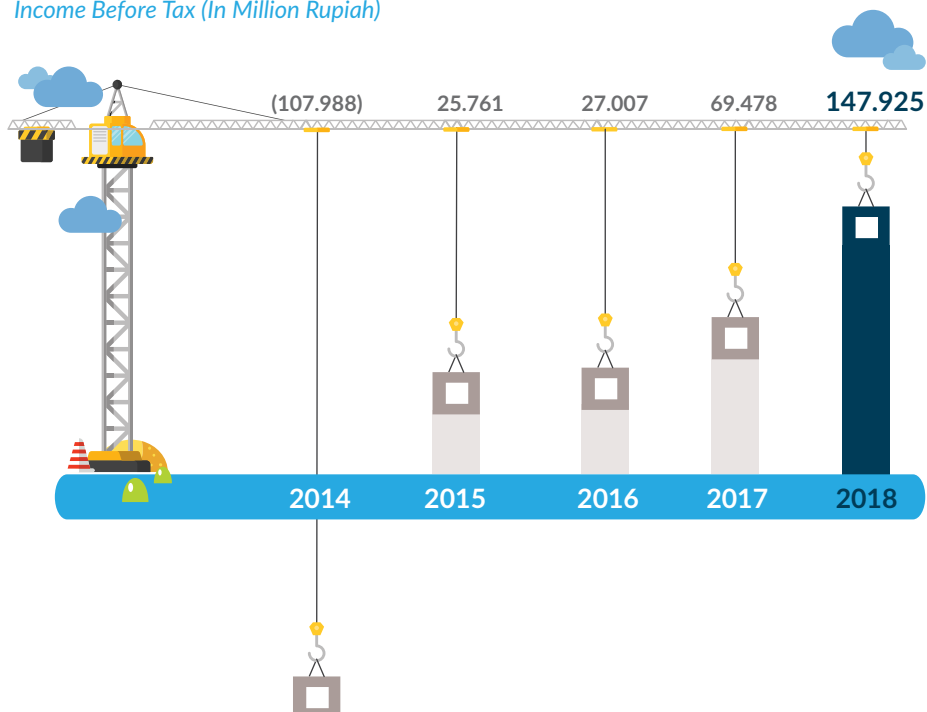
Operating Income (In Million Rupiah)



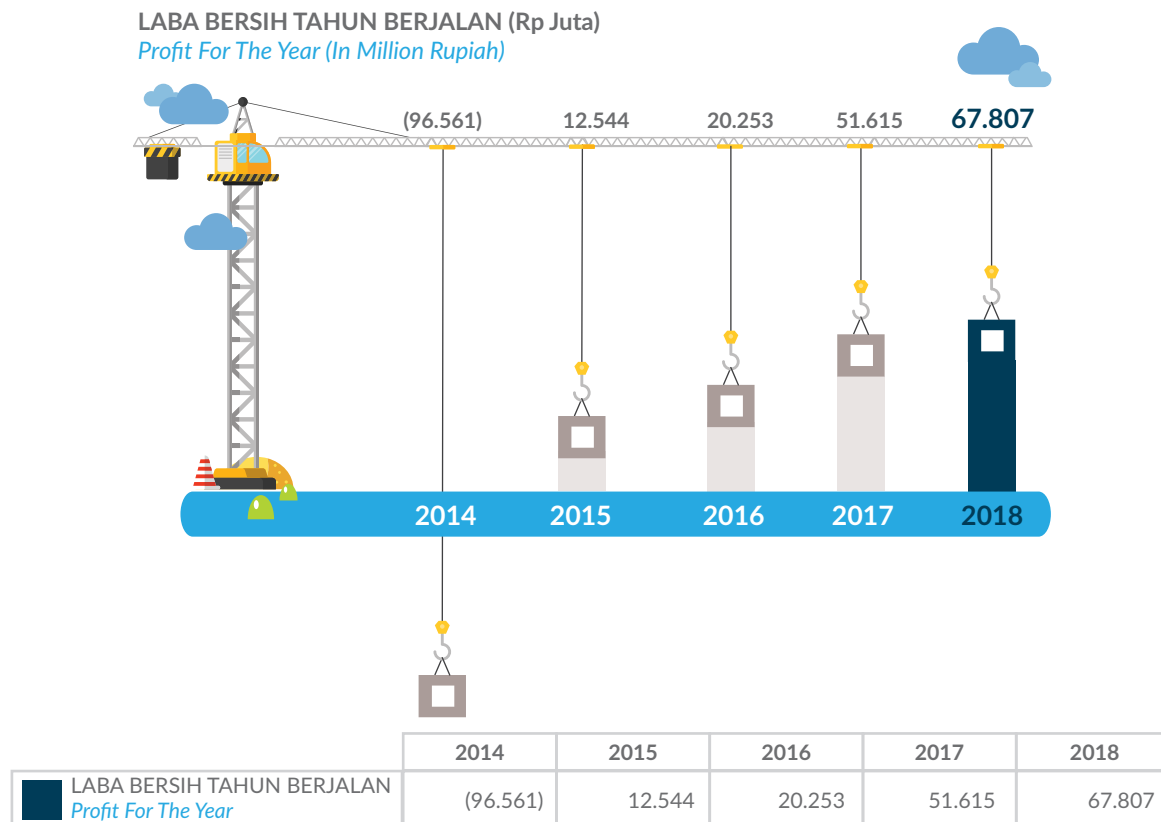
	2014	2015	2016	2017	2018
LABA USAHA <i>Operating Income</i>	(50.935)	34.801	49.357	79.522	153.197

LABA SEBELUM PAJAK (Rp Juta)

Income Before Tax (In Million Rupiah)



	2014	2015	2016	2017	2018
LABA SEBELUM PAJAK <i>Income Before Tax</i>	(107.988)	25.761	27.007	69.478	147.925



IKHTISAR SAHAM *Share Highlight*

Saat ini PT Barata Indonesia (persero) belum terdaftar sebagai perusahaan Go Public. Seluruh modal saham dimiliki oleh Republik Indonesia.

At present PT Barata Indonesia (Persero) has not been registered as a Go Public company. All share capital is owned by the Republic of Indonesia.

URAIAN <i>Description</i>	2015	2016	2017	2018
Jumlah Saham (lembar) <i>Number of Shares (sheet)</i>	143,203	143,203	762,915	762,915
Harga Per Lembar Saham (Rp) <i>Price per Sheet (Rp)</i>	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Modal Saham <i>Shares Capital</i>	143,203,000,000	143,203,000,000	762,915,000,000	762,915,000,000

IKHTISAR OBLIGASI DAN EFEK LAINNYA *Bond Information*

No.	Tipe Efek <i>Type of Effects</i>	Nilai <i>Value</i>	Interest Rate	Due Date	Rating 2018
1.	Medium Term Notes (MTN) Seri A PT Barata Indonesia (persero) 2017	Rp 200,000,000,000	9.25%	7 Desember 2020	Pefindo : idBBB
2.	Medium Term Notes (MTN) Seri B PT Barata Indonesia (persero) 2017	Rp 100,000,000,000	9.15%	15 Maret 2021	Pefindo : idBBB

*Tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.

** Has no bonds / sukuk / convertible bonds that are still in circulation during the last 2 (two) financial years.*

PERISTIWA PENTING 2018

2018 Significant Events



1. Pakta Integritas - 2 Jan 2018

1. Integrity Pact - Jan 2, 2018

Mengawali pergantian tahun Direksi PT Barata Indonesia (Persero) melakukan Pelantikan Pejabat Eselon I & Penandatanganan Pakta Integritas serta Target Kinerja 2018 di Gedung Serbaguna Kantor Pusat Gresik, Selasa (2/1). Pada kegiatan tersebut Barata Indonesia melakukan pelantikan sembilan (9) pejabat Eselon I yang akan mengisi pos-pos pada struktur organisasi perusahaan. Total ada empat belas (14) pejabat Eselon I yang berada di Barata Indonesia . *Began the new year for the Board of Directors of PT Barata Indonesia (Persero) inaugurated Echelon I and Integrity Pact Signing as well as 2018 Performance Target at the Multipurpose Building at Gresik Headquarters, Tuesday (2/1). In this event Barata Indonesia inaugurated nine (9) Echelon I officials who were going to fill out posts on the company. In total there are fourteen (14) Echelon I officials who are in Barata Indonesia..*



2. MOU dengan Inka Komponen Kereta Api - 19 Jan 2018

2. MOU with Inka Railway Components - Jan 19, 2018

PT Barata Indonesia (Persero) dan PT INKA (Persero) melakukan penandatanganan MOU terkait kerjasama komponen Kereta Api. MOU tersebut dilakukan di depan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan.

PT Barata Indonesia (Persero) and PT INKA (Persero) signed MOU regarding Railway component cooperation. The MOU is carried out in front Coordinating Minister for Maritime Affairs of the Republic of Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan.



3. MOU pembangunan 2 PLTM di Sumut - 22 Jan 2018

3. MOU for the construction of 2 PLTM in North Sumatra - Jan 22, 2018

PT Barata Indonesia (Persero) melakukan penandatanganan kontrak dengan PT Berkah Alam Lestari Energi, anak perusahaan PT Terregra Asia Energy Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan, untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Batang Toru 3 (2x5) MW yang berlokasi di Kecamatan Pahaejulu, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

PT Barata Indonesia (Persero) signed a contract with PT Berkah Alam Lestari Energi, a subsidiary of PT Terregra Asia Energy Tbk, a company engaged in renewable energy, for the construction of the Toru 3 (2x5) MW Mini Hydro Power Plant (PLTM) located in the District Pahaejulu, North Tapanuli Regency, North Sumatra.



4. Pelantikan Dirop Baru - 23 Jan 2018

4. Inauguration of New Dirop - Jan 23, 2018

Kementerian BUMN, selaku pemegang saham melakukan pengangkatan Bobby Sumardiat Atmosudirjo yang sebelumnya menjabat sebagai

Direktur Operasi PT Pindad (Persero) menjadi Direktur Operasi PT Barata Indonesia (Persero).

Ministry of BUMN, as the shareholder, appointed Bobby Sumardiat Atmosudirjo, who previously served as Director of Operations at PT Pindad (Persero) as Operations Director of PT Barata Indonesia (Persero).



5. Mitra Strategis Siemens AG - 20 Maret 2018
5. *Strategic Partners of Siemens AG - March 20, 2018*

Barata Indonesia dan Siemens AG akan melakukan kerjasama di bidang unit turbin dimana Barata Indonesia akan menjadi mitra strategis bagi turbin yang diproduksi oleh Siemens AG, khususnya untuk Industri Gula.

Barata Indonesia and Siemens AG will collaborate in turbine units scope where Barata Indonesia will become a strategic partner for turbines produced by Siemens AG, especially for the Sugar Industry.



6. Sinergi Dengan PTPN III - 9 Mei 2018
6. *Synergy with PTPN III - May 9, 2018*

PT Barata Indonesia (Persero) bekerjasama dengan PT Perkebunan Nusantara III (persero) Holding dalam penyediaan dan perawatan sarana produksi serta pemanfaatan limbah scrap di pabrik milik PTPN III Holding beserta anak perusahaan

PT Barata Indonesia (Persero) cooperates with PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding in the supply and maintenance of production facilities and utilization

of scrap waste at PTPN III Holding's factories and subsidiaries



7. Penandatanganan Penerapan SAP - 16 Mei 2018
7. *Signing of SAP Implementation - May 16, 2018*

PT Barata Indonesia (Persero) memulai pengaplikasian sistem manajemen informasi berbasis teknologi menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP) dengan software SAP. Pengaplikasian SAP itu ditandai dengan Kick Off Meeting sebagai tahap dimulainya pengerjaan dan pengimplementasian sistem ERP (Enterprise Resource Planning) di Kantor Pusat Barata Indonesia,

PT Barata Indonesia (Persero) starts technology-based information management systems implementation using Enterprise Resource Planning (ERP) with SAP software. SAP implementation was marked by Kick Off Meeting as the commencement stage and implementation of ERP (Enterprise Resource Planning) system at Barata Indonesia Head Office,



8. Pengangkatan Komisaris Baru - 21 Juni 2018
8. *Appointment of New Commissioners - June 21, 2018*

Sam Herodian yang menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur Sarana & Prasarana diangkat sebagai Komisaris baru PT Barata Indonesia (Persero). Sementara Katno ditetapkan sebagai Komisaris Independen perusahaan.

Sam Herodian who served as Expert Staff to the Minister

of Agriculture for Infrastructure, Facilities & amp; Infrastructure was appointed as a new Commissioner of PT Barata Indonesia (Persero). While Katno was appointed as an Independent Commissioner of the company.



9. Akuisisi Pabrik Komponen Turbin Siemens Cilegon - 2 Agustus 2018
9. *Acquisition of Siemens Turbine Component Factory Cilegon - August 2, 2018*

PT Barata Indonesia (Persero) mengakuisisi pabrik Siemens Power dan Gas-Turbine Components yang berada di Cilegon, Banten. Akuisisi tersebut ditandai dengan penandatanganan "Asset Purchase Agreement" (APA) antara Barata dan PT Siemens Indonesia di Lantai 6 Gedung Kementerian BUMN pada Kamis, 2 Agustus 2018.

PT Barata Indonesia (Persero) acquired Siemens Power and Gas-Turbine Components factories in Cilegon, Banten. The acquisition was marked by the signing of the "Asset Purchase Agreement" (APA) between Barata and PT Siemens Indonesia on the 6th Floor of the Ministry of BUMN Building on Thursday, August 2, 2018.



10. Best CEO Strategic Alliance dan Strategic Pertumbuhan II Anugerah BUMN Awards 2018 - 10 Agustus 2018
10. *Best CEO Strategic Alliance and Strategic Growth II Award for BUMN Awards 2018 - August 10, 2018*

PT Barata Indonesia (Persero) berhasil meraih Penghargaan pada acara Anugerah BUMN 2018. Barata Indonesia memenangkan BUMN terbaik ke 2 pada Kategori Strategi Pertumbuhan serta CEO Terbaik pada Kategori Excellence in Strategic Alliance *PT Barata Indonesia (Persero) won the Award at the Anugerah event BUMN 2018. Barata Indonesia won the second best BUMN in the Growth Strategy Category and the Best CEO in the Excellence in Strategic Alliance Category*



11. Penandatanganan Kontrak Pabrik Gula dan Bioethanol Gempolkrep dengan PTPN X
11. *Signing Contract of Sugar and Bioethanol Factory Gempolkrep With PTPN X*

PT Barata Indonesia kembali mendapatkan kontrak proyek Pabrik Gula dan Bioethanol. Barata Indonesia melakukan penandatanganan kontrak dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X untuk pengerjaan proyek Pabrik Gula (PG) Gempolkrep serta Pabrik Bioethanol yang terletak di Mojokerto, Jawa Timur milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X).

PT Barata Indonesia again obtained a Sugar Factory project contract. Barata Indonesia signed a contract with PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X to work on the Gempolkrep Sugar Factory (PG) project and the Bioethanol Factory located in Mojokerto, East Java owned by PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X).



12. Peresmian Divisi Komponen Turbin - 1 Oktober 2018
12. *Inauguration of the Turbine Component Division - October 1, 2018*

PT Barata Indonesia (Persero) meresmikan Divisi Komponen Turbin di Cilegon pada Senin (1/10). Sekaligus menandai beralihnya operasional Divisi Komponen Turbin secara penuh dibawah manajemen PT Barata Indonesia (Persero) yang sebelumnya dibawah naungan SIEMENS Indonesia.

PT Barata Indonesia (Persero) inaugurated the Turbine Component Division in Cilegon on Monday (1/10). At the same time marking the shift in operation of the Turbine Component Division in full under the management of PT Barata Indonesia (Persero) which was previously under the auspices of SIEMENS Indonesia.



13. MOU Barata, BBI, Pindad Kerjasama Manufaktur - 3 Oktober 2018

13. *MOU Barata, BBI, Pindad Manufacturing Cooperation - October 3, 2018*

Dalam ajang IBD EXPO 2018 Tiga perusahaan BUMN yakni PT Barata Indonesia (Persero) PT BBI (Persero) serta PT Pindad (Persero) melakukan MOU untuk melakukan Kerjasama di bidang Manufaktur. Partisipasi Barata Indonesia Dalam IMF - 8 Oktober 2018

In 2018 IBD EXPO event, three state-owned companies, namely PT Barata Indonesia (Persero) PT BBI (Persero) and PT Pindad (Persero), carried out an MOU to cooperate in manufacturing.



14. Penandatanganan *Head Of Agreement* PJB, Barata, Pindad, PAL - 11 Oktober 2018

14. *Signing of PJB Head Of Agreement, Barata, Pindad, PAL - 11 October 2018*

PT Barata Indonesia (Persero) mengikuti ajang bergengsi *Annual Meeting IMF World Bank 2018* yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali, 8 – 14 Oktober 2018., Barata Indonesia turut memamerkan produk – produk andalannya di Indonesia Pavilion yang merupakan kerja sama antara BUMN yang juga melibatkan sejumlah Kementerian yang menjadi jendela bagi ribuan delegasi IMF-Bank Dunia untuk melihat potensi Indonesia, baik dari sisi investasi, pariwisata dan keindahan alam, pencapaian infrastruktur, komoditas, hingga keragaman budaya dan seni Tanah Air.

PT Barata Indonesia (Persero) participated in the prestigious 2018 IMF World Bank Annual Meeting held in Nusa Dua Bali, 8-14 October 2018. Barata Indonesia also exhibited its flagship products in the Indonesia Pavilion which is a collaboration between SOEs that also involving a number ministries is a window for thousands of IMF-World Bank delegates to see Indonesia's potential, both in terms of investment, tourism and natural beauty, the achievement of infrastructure, commodities, and cultural and artistic diversity of the country.



15. *Head of Agreement Siemens* untuk MPP, Barata,PAL Pindad - 2 November 2018

15. *Siemens Head of Agreement for MPP, Barata, PAL Pindad - November 2, 2018*

Bersama dengan dua perusahaan BUMN lainnya yakni PT PAL (Persero) dan PT Pindad (Persero), Barata Indonesia melakukan penandatanganan *Head of Agreement* dengan PJB untuk memproduksi *Mobile Power Plant* yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah - daerah terpencil.

After carrying out the Barata Indonesia (Persero) Head of Agreement together with PT PAL (Persero) and PT Pindad

(Persero), synergized with PT Siemens Indonesia to realize the Mobile Power Plan.



16. Head of Agreement Siemens untuk MPP, Barata, PAL Pindad - 2 November 2018

16. Signing of PJB Head Of Agreement, Barata, Pindad, PAL - November 2, 2018

Setelah melakukan *Head of Agreement* Barata Indonesia (Persero) bersama dengan PT PAL (Persero) dan PT Pindad (Persero), bersinergi dengan PT Siemens Indonesia untuk mewujudkan *Mobile Power Plan*.

Together with two other state-owned companies namely PT PAL (Persero) and PT Pindad (Persero), Barata Indonesia signed a *Head of Agreement* with PJB to produce *Mobile Power Plant* which will be used to meet electricity needs in remote areas.



17. Barata - Pelindo IV, Kerjasama Peralatan Pelabuhan - 5 November 2018

17. Barata - Pelindo IV, Port Equipment Cooperation - November 5, 2018

PT Barata Indonesia (Persero) siap mendukung PT Pelabuhan IV (Persero) menjaga kestabilan *dwelling time* pelabuhan Makassar melalui penyediaan fasilitas alat angkut angkut pelabuhan di Makassar New Port. *PT Barata Indonesia (Persero) is ready to support PT Pelabuhan IV (Persero) to maintain the stability of the dwelling time of Makassar port through the provision of*

port lift facilities in Makassar New Port.



18. Magang Bersertifikat - 21 November 2018

18. Certified Internship - November 21, 2018

PT Barata Indonesia (Persero) melakukan launching program Magang Bersertifikat yang dilakukan pada Rabu 21 November 2018. Barata Indonesia menyambut 9 Mahasiswa dan Mahasiswi dari berbagai jurusan yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) .

PT Barata Indonesia (Persero) launched a Certified Internship program which was held on Wednesday 21 November 2018. Barata Indonesia welcomed 9 students from various departments from Muhammadiyah University Malang (UMM).



19. Best Local Content Company, IBEA Awards 2018 - 23 November 2018

19. Best Local Content Company, IBEA Awards 2018 - November 23, 2018

PT Barata Indonesia (Persero) membawa pulang penghargaan pada event bergengsi di dunia ketenagalistrikan, *Indonesia Best Electricity Awards (IBEA) 2018*. Barata Indonesia, berhasil menyisihkan perusahaan lain dengan menyabet penghargaan di kategori Perusahaan dengan *Local Content* terbaik di bidang pembangkit listrik pada ajang IBEA Awards 2018.

PT Barata Indonesia (Persero) obtained an award at the prestigious electricity event, Indonesia Best Electricity Awards (IBEA) 2018. Barata Indonesia, managed to beat other companies by winning the award in the category of Companies with the best Local Content in the field of electricity generation IBEA Awards 2018.



20. Apresiasi Indonesia Untuk BUMN Indonesia BUMN HEROES - 26 November 2018
20. *Indonesia's Appreciation for Indonesian BUMN BUMN HEROES - November 26, 2018*

PT Barata Indonesia kembali membawa pulang penghargaan dari Apresiasi BUMN 2018 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi.

PT Barata Indonesia again obtained an award from the Appreciation of BUMN 2018 organized by Warta Ekonomi.



21. Pengangkatan Direktur Utama Barata Indonesia - 19 Desember 2018
21. *Appointment of Barata Indonesia President Director - December 19, 2018*

Barata Indonesia berhasil memenangkan penghargaan kategori BUMN Heroes yakni dengan melakukan *Good Exporter in Train Manufacturing Components*, Perusahaan dinilai mampu secara konsisten melakukan ekspor komponen kereta api ke luar negeri dan mampu membantu devisa perusahaan.

Barata Indonesia won the BUMN Heroes category award as a Good Exporter in Train Manufacturing Components, the Company is considered capable of consistently exporting railroad components overseas and is able to assist the company's foreign exchange.



22. Investor Awards 2018, Pertumbuhan Terbaik II - 20 Desember 2018
22. *Investor Awards 2018, Best Growth II - December 20, 2018*

Oksarlidady Arifin resmi menjadi ditunjuk menjadi Nahkoda baru PT Barata Indonesia (Persero). Eks Direktur PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi (WIKI IKON) tersebut ditunjuk menjadi Dirut baru Barata Indonesia menggantikan Sllmy Karim yang ditugaskan ke Krakatau Steel.

Oksarlidady Arifin was officially appointed as the new chief of PT Barata Indonesia (Persero). The former Director of PT Wijaya Industrial & Construction Works (WIKI IKON) was appointed as the new Director of Barata Indonesia to replace Sllmy Karim who was assigned to Krakatau Steel.

PENGHARGAAN 2018

2018 Awards



1 Award 2018 (Kinerja Keuangan 2017 - 9th BUMN Awards Infobank 2018)
Award 2018 (Kinerja Keuangan 2017 - 9th BUMN Awards Infobank 2018)

2 Award 2018 (BUMN Heroes - Warta Ekonomi 2018)
Award 2018 (BUMN Heroes - Warta Ekonomi 2018)

3 Award 2018 (BUMN Terbaik Sektor Industri Strategis - Investor Award 2018)
Award 2018 (BUMN Terbaik Sektor Industri Strategis - Investor Award 2018)

4 Award 2018 (IBEA Awards 2018, Best Local Content Company (Nov))
Award 2018 (IBEA Awards 2018, Best Local Content Company (Nov))

5 Award 2018 (Sertifikat Local Content Electricity - IBEA 2018)
Award 2018 (Sertifikat Local Content Electricity - IBEA 2018)

6 Award 2018 (CEO Excellence In Strategic Alliance - BUMN Track 2018)
Award 2018 (CEO Excellence In Strategic Alliance - BUMN Track 2018)



7 Award 2018 (Juara II Strategi
Pertumbuhan - BUMN Track 2018)
Award 2018 (Juara II Strategi
Pertumbuhan - BUMN Track 2018)

8 Sertifikat PROPER 2018
PROPER Certificate 2018

9 Penghargaan Kecelakaan Nihil Depnaker
Departement Of Labor Zero Accident Award

10 Sertifikat JAMSOSTEK
JAMSOSTEK certificate

11 Piagam Penghargaan Disabilitas
Disability Award Charter

12 Piagam Penghargaan BPJS KESEHATAN
BPJS Awards Charter



AREA
LASAN
E RING



LAPORAN MANAJEMEN *Managements Reports*

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commisioners' Report

PANDANGAN BISNIS UMUM TAHUN 2018

Business Views In 2018

Di tengah situasi global kurang kondusif dimana perdagangan internasional melambat dan ketegangan hubungan dagang, fluktuasi harga minyak dunia, penurunan harga komoditas, dan kenaikan *Fed Fund Rate*, namun perekonomian Indonesia menunjukkan perbaikan kinerja dengan struktur yang lebih kuat, tumbuh tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu sebesar 5,17% (yoy). Stabilitas perekonomian tetap terjaga dengan level inflasi tahun 2018 di 3.31% dari target 4% + 1%. Hanya nilai tukar rata-rata Rupiah terhadap yang melemah di 2018, menjadi Rp 14.264,- / USD.

In the midst of non conducive global situation where international trade slowed and there was trade tensions, fluctuations in world oil prices, falling commodity prices, and an increase in the Fed Fund Rate, Indonesia's economy showed improved performance with a stronger structure, the highest growth in the last five years amounted to 5.17% (yoy). Economic stability was maintained with 2018 inflation level at 3.31% of the target of 4% + 1%. Only the average exchange rate of Rupiah was weaker against USD in 2018, which was Rp 14,264, - / USD.

Dalam kondisi dan dinamika makro ekonomi global dan nasional tersebut, Dewan Komisaris mencatat sepanjang tahun 2018, banyak capaian-capaian penting yang menjadi milestones kinerja PT Barata Indonesia menuju ke arah yang semakin baik dan kokoh. Dengan tetap fokus kepada penguatan kepercayaan konsumen dan strategic partnership guna mendapatkan order kerja dengan fokus kepada bidang Industri Agro (Food), Industri Pembangkit Listrik, Minyak, dan Gas Bumi (Energy), Industri Sumber Daya Air (Water), dan Industri Konstruksi Berat lainnya (FEW+), Dewan Komisaris mencatat beberapa highlight penting, antara lain :

- Penyesuaian dan perbaikan Remunerasi Direksi dan Karyawan yang meningkatkan motivasi dan kinerja Perseroan pada tahun buku 2018
- Perolehan Kontrak EPC Proyek dengan nilai > Rp 500 Miliar di Sektor Agro / Pabrik Gula mengindikasikan keunggulan dan kepercayaan dari *industry* Gula terhadap kompetensi Perseroan. Selain itu perolehan Kontrak Baru / Order Kerja sepanjang tahun 2018 terjaga diatas Rp 3 Triliun selama 2 tahun berturut-turut (2017: Rp 3.28 Triliun dan 2018: Rp 3.65 Triliun),
- Akuisi Pabrik Turbin ex. Siemens di Cilegon untuk memperkuat kompetensi di sector Pembangkit Listrik.
- Pendapatan Perseroan untuk pertama kali dalam sejarah Perseroan menembus Rp 2 Triliun dalam setahun.

In these global and national macroeconomic conditions and dynamics, the Board of Commissioners noted that throughout 2018, many important achievements which were PT Barata Indonesia's performance milestones towards an increasingly good and solid direction. By continuing to focus on strengthening consumer confidence and strategic partnerships to obtain work orders with a focus on the fields of Agro (Food) Industry, Power Generation, Oil and Gas (Energy), Water Resources Industry (Water), and other Heavy Construction Industries (FEW +), the Board of Commissioners noted several important highlights, including:

- *Adjustment and improvement of the Board of Directors and Employees Remuneration to increase the Company motivation and performance in the 2018.*
- *Obtained EPC Project Contract with a value of > Rp 500 Billion in the Agro / Sugar Factory Sector indicated Sugar industry trust to the Company's competency and excellence. In addition, the acquisition of New Contracts / Work Orders throughout 2018 was maintained above Rp 3 Trillion for 2 consecutive years (2017: Rp 3.28 Trillion and 2018: Rp 3.65 Trillion),*
- *Acquisition of Turbine Plant ex. Siemens in Cilegon to strengthen competencies in the Power Plant sector.*
- *For the first time in the history of the Company revenue has exceeded IDR 2 trillion in a year.*



**TRI YOGI
YUWONO**

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

KOMISARIS UTAMA
President Commissioner

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Kinerja Direksi yang direfleksikan dalam pengukuran KPI (Key Performance Indicator) juga mendapat perhatian khusus Dewan Komisaris. Berdasarkan hasil Audit Kinerja KPI (Key Performance Indicator) tahun 2018, Perseroan mendapatkan skor 97 meningkat 5,21 poin dibandingkan capaian kinerja 2017 (91, 79). Selain itu, berdasarkan Penilaian terkait Tingkat kesehatan BUMN sebagaimana Peraturan Menteri BUMN RI No : PER-10/MBU/2014 dan KEP-100/MBU/2002 pasal 3, Perseroan mempertahankan Capaian Kinerja di "Sehat- Katagori A" dengan Skor 70,25, turun 3,75 poin dibandingkan capaian Tingkat Kesehatan di 2017 di level 74. Penurunan level tingkat kesehatan disebabkan oleh Penurunan Ratio Modal sendiri (Ekuitas) terhadap Total Asset, yang dalam penilaian Dewan Komisaris ke depan dapat diperbaiki dengan meningkatkan laba bersih dari proyek/order yang diperoleh melalui upaya efisiensi-efisiensi operasi dan lebih selektif dan memilih proyek-proyek dengan margin yang cukup baik untuk tumbuh dan berkembangnya Perseroan di masa depan.

Capaian KPI 97 dan tingkat kesehatan Perseroan 70,25 di 2018 mengindikasikan kondisi perusahaan yang stabil, sehat, dan juga menantang seiring dengan peningkatan jumlah pendapatan, order, dan level kemampuan produksi sejalan dengan terselesaikannya PMN dalam beberapa waktu mendatang.

Berikut pembahasan beberapa poin detail terkait KPI dan kesehatan perusahaan.

1. KINERJA PEMASARAN (PEROLEHAN ORDER) DAN PENJUALAN / PERDAGANGAN

Dewan Komisaris secara khusus menilai capaian perolehan order/kontrak baru sepanjang 2018 yang mencapai Rp 3,65 Triliun (101,3% terhadap RKAP tahun 2018 sebesar Rp 3,6 Triliun, dan 111,11% terhadap perolehan kontrak tahun 2017 sebesar Rp 3,28 Triliun) merupakan sebuah capaian yang menunjukkan konsistensi dan pembuktian kemampuan kinerja pemasaran Perseroan untuk bersaing dan berkompetisi serta mempertahankan kinerja perolehan kontrak / order kerja baru di atas Rp 3 Triliun selama 2 tahun berturut-turut. Hal ini diikuti dengan kemampuan untuk mengkonversi order menjadi pendapatan/penjualan. Realisasi Pendapatan/ Penjualan tahun 2018 secara keseluruhan mencapai sebesar Rp 2,18 Triliun atau 142,2% terhadap target RKAP 2018 sebesar Rp 1,5 Triliun, atau 182,4% terhadap realisasi penjualan tahun 2017 sebesar Rp

The Board Of Directors Performance Assessment

The Board of Directors' performance reflected in the KPI (Key Performance Indicator) measurement also received special attention from the Board of Commissioners. Based on the KPI (Key Performance Indicator) Performance Audit results in 2018, the Company scored 97 increased by 5.21 points compared to 2017 (91.79). In addition, based on the assessment related to the level of SOE's health according to Republic of Indonesia Minister of State Regulation No. PER-10 / MBU / 2014 and KEP-100 / MBU / 2002 article 3, the Company maintained Performance Achievement in "Healthy-Category A" scored 70.25 , decreased by 3.75 points compared to 2017 which was 74. The decrease was due to the decrease in the Owned Capital Ratio (Equity) to Total Assets, which in the Board of Commissioners' evaluation may be improved by increasing the net income of the project obtained through operational efficiency efforts and be more selective in selecting projects with good margins to grow and develop the Company in the future.

The Company's 97 KPI score and 70.25 sound level in 2018 indicated that the Company condition is stable, sound, and also challenging as the number of revenues, orders and level of production capability increases in line with the completion of PMN in the near future.

The following is a discussion of several detailed points regarding KPI and company soundness.

1. *Marketing Performance (Order Obtaining) and Sales / Trading*

The Board of Commissioners specifically assessed the achievement of new orders / contracts throughout 2018 which reached Rp 3.65 Trillion (101.3% of the 2018 RKAP of Rp 3.6 Trillion, and 111.11% of 2017 contract acquisition which was Rp 3.28 Trillion) were achievement that shows the consistency and proof of the Company's marketing performance capabilities to compete and compete and maintain the performance in obtaining new contracts / work orders above Rp 3 Trillion for 2 consecutive years. This was followed by the ability to convert orders to income / sales. Realization of 2018 Revenue / Sales as a whole reached Rp 2.18 Trillion or 142.2% of the 2018 RKAP target which was Rp 1.5 Trillion, or 182.4% of 2017 sales which was Rp 1.19 Trillion. From the total sales realization of 2018, Rp 1.59 Trillion was obtained from Carry Over Work obtained from 2017 and Rp 589 Billion from New Contracts in

1,19 Triliun. Dari total realisasi penjualan 2018 sebesar Rp 1,59 Triliun didapatkan dari Carry Over Pekerjaan yang diperoleh dari 2017 dan Rp 589 Miliar dari Kontrak Baru di 2018. Hal ini berarti masih terdapat $\geq$ Rp 4 Triliun kontrak "on hand" yang siapdikonversi menjadi Pendapatan/Penjualan oleh Perseroan di tahun 2019.

2. TUNTUTAN UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN MODAL KERJA

Perolehan kontrak yang besar menuntut kesiapan dan kesediaan modal kerja yang besar. Modal kerja selain diperlukan untuk uang muka pembelian bahan juga sangat diperlukan untuk menyeimbangkan antara hutang dan piutang. Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris mencatat total plafond limit pinjaman modal kerja Perseroan mencapai Rp 2.1 Triliun. Dalam praktek penggunaannya, jumlah digunakan sesuai kebutuhan pendanaan. Dewan Komisaris dalam peran pengawasannya telah menekankan kehati-hatian Direksi dalam mengelola pinjaman modal kerja dan prinsip menekan cost of fund dan memperhatikan keseimbangan hutang dan piutang. Indikator-indikator kunci terkait *financial covenants* seperti *Current Ratio*, *Debt Equity Ratio*, dan Rasio Beban Bunga/ Pendapatan harus dijaga sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemberi dana dan target RKAP Perseroan. *Collection Period* juga penting untuk dijaga guna menyeimbangkan hutang dan piutang.

Berdasarkan realisasi tahun 2018, *Current Ratio* berada sedikit dibawah target RKAP, dari yang seharusnya 1,38 dalam realisasinya 1,25. *Ratio Beban Bunga* terhadap Pendapatan realisasi 2018 terjaga di 2% dari RKAP sebesar 2,6%. Catatan Dewan Komisaris yang harus menjadi perhatian adalah *Debt Equity Ratio* yang mencapai 2,8 dibandingkan target RKAP 2018 sebesar 1,53 dan realisasi 2017 sebesar 1,6. Meskipun dominasi *Debt* adalah hutang jangka pendek dan besaran piutang juga relative cukup besar, hal ini dalam beberapa waktu ke depan akan berpotensi menjadi masalah terkait penyediaan tambahan modal kerja jika kemampu labaan tidak segera ditingkatkan. Efektifitas Penagihan sudah membaik, dimana realisasi 2018 mencapai 63,2 hari, lebih baik dari target RKAP 2018 sebesar 96,5 hari dan lebih baik dari capaian 2017 sebesar 99,42 hari.

2018. This means that there are still $\geq$ Rp4 Trillion in "on hand" contracts that are ready to be converted into Revenue / Sales in 2019.

2. Demands to maintain working capital balance

The acquisition of large contracts requires the readiness and willingness of large working capital. Working capital is in addition required for advance purchases of materials is also required to balance the debt and receivables. Throughout 2018, the Board of Commissioners noted that the Company's working capital total loan limit reached Rp 2.1 trillion. In the practice of its use, the amount used is in accordance to the funding needs. The Board of Commissioners in its supervisory role emphasized the Board of Directors prudence in managing working capital loans and reducing the cost of funds principle and considering debt and receivables balance of. Key indicators related to financial covenants such as *Current Ratio*, *Debt Equity Ratio*, and *Interest / Income Ratio* shall be maintained in accordance with the target set by the funder and the Company's RKAP target. The *Period Collection* is also critical to maintain in order to keep the debt and receivables balance.

Based on 2018 realization, *Current Ratio* was slightly below RKAP target, which should be 1.38 while in the realization it was 1.25. *Interest Expense Ratio* in 2018 *Realized Revenue* was maintained at 2% of the RKAP which was 2.6%. The Board of Commissioners' noted that what should be considered was *Debt Equity Ratio* which was 2.8 compared to 2018 RKAP target which was 1.53 and 2017 realization which was 1.6. Although *Debt* dominance was short-term debt and the amount of receivables is also relatively large, in the future this will potentially become a problem related to the provision of additional working capital if the capacity is not immediately increased. Billing effectiveness has improved, with the realization of 2018 reached 63.2 days, better than 2018 RKAP target which was 96.5 days and better than 2017 achievement which was 99.42 days.

3. PENGENDALIAN BIAYA, COST EFFICIENCY, DAN LABA BERSIH

Secara umum, Perseroan dalam pengawasan Dewan Komisaris sudah menerapkan upaya-upaya untuk melakukan pengendalian dan efisiensi biaya melalui fungsi Pengendalian Operasi dan Manajemen Risiko. Meskipun demikian, secara keseluruhan, Ratio Beban Pokok Penjualan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Penjualan (90,8%), baik terhadap kinerja 2017 (89,%) maupun target RKAP 2018 (86,7%). Dalam pemantauan Dewan Komisaris hal ini disebabkan oleh kenaikan biaya bahan sebagai kontributor utama.

Laba bersih perusahaan tahun 2018 mencatatkan Rp 67,8 Milyar, atau 109,2% terhadap target RKAP 2018 (Rp 62,1 Milyar), atau 131,3% terhadap realisasi 2017 di Rp 51,6 Milyar. Net Margin Ratio berada di 3,1%, dan kontributor laba bersih tertolong oleh Pendapatan lain-lain sebesar Rp 56 Milyar. Tahun 2019 akan menjadi tantangan bagi Manajemen pada ujian sesungguhnya terhadap kinerja profitabilitas Perseroan pasca PMN bisa segera terserap 100%. Pengendalian biaya dan lebih selektif dalam mencari proyek/ order kerja dengan margin yang cukup menjadi kunci untuk meningkatkan dan menjaga profitabilitas perseroan dalam tahun-tahun mendatang.

4. PENYERAPAN PMN DAN CICILAN RDI

Mengacu pada peraturan Menteri BUMN nomor: PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas tanggal 3 Juni 2015, Maka Dewan Komisaris menyampaikan bahwa hingga akhir tahun buku 2018, Perseroan telah menerbitkan Purchase Order senilai Rp 318,9 milyar dengan belanja riil s.d Desember 2018 (Cash Out) Rp 148,5 Milyar dari RKAP 2018 sebesar Rp 400 Milyar. Beberapa kendala teknis terkait dengan Penentuan Spesifikasi. Vendor, dan proses pengadaan menjadi kendala. Dewan Komisaris senantiasa mengingatkan penyerapan PMN ini harus selesai di 2019. Pemanfaatan PMN sebesar Rp 148,5 Milyar sepanjang 2018 digunakan untuk :

- Investasi berupa Bangunan dan Mesin pada Divisi Turbin dan Komponen
- Investasi berupa pelunasan atas pencapaian progress pembangunan *machining Center*

3. Control of Expense, Cost Efficiency, and Net Profit

Generally, the Company under the supervision of the Board of Commissioners has implemented efforts to exercise control and cost efficiency through the Operations Control and Risk Management functions. Overall, Cost of Sales Ratio has increased compared to Sales (90.8%), both to 2017 performance (89%) and 2018 RKAP target (86.7%). In the Board of Commissioners monitoring this was caused by the increase in material costs as the main contributor.

The Company's net profit in 2018 was Rp 67.8 billion, or 109.2% of 2018 RKAP target (Rp 62.1 billion), or 131.3% of 2017 realization which was Rp 51.6 billion. Net Margin Ratio was 3.1%, and net profit contributors are helped by other income of Rp 56 billion. 2019 will be a challenge for Management on the real test of the Company's profitability performance after PMN can be absorbed 100% immediately. Cost control and more selectivity in finding projects/work orders with sufficient margins are the key to improving and maintaining the Company's profitability in the years to come.

4. Absorption of PMN and RDI Installments

Referring to Minister of SOEs regulation No. PER-08/ MBU/06/2015 regarding Realization Reporting Guidelines for the use of Additional State Capital Participation Funds to State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies on June 3, 2015, the Board of Commissioners stated that until the end of 2018 The Company has issued a Purchase Order worth by Rp 318.9 billion with real spending up to December 2018 (Cash Out) was Rp 148.5 billion from 2018 RKAP of Rp 400 billion. Several technical obstacles related to Determination of Specifications. Vendors, and procurement processes become obstacles. The Board of Commissioners always warns that the absorption of PMN shall be completed in 2019. The use of PMN of Rp 148.5 billion throughout 2018 was used to:

- *Investment in Buildings and Machinery in the Turbine and Component Division*
- *Investment in the form of repayment for achieving progress in the construction of a machining center*

Dewan Komisaris telah memberikan nasehat untuk segera memastikan *Purchase Order* bisa segera 100% dan realisasi *Cash Out* harus secepatnya bisa direalisasikan agar proses komersial asset hasil PMN bisa segera memberikan nilai tambah bagi Perseroan di Tahun Buku 2019.

The Board of Commissioners has provided advice to immediately ensure that Purchase Order can reach 100% immediately and realization of Cash Out shall be realized as soon as possible so that commercial asset process from PMN can immediately provide added value for the Company in the 2019.

Penyelesaian utang RDI telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai surat No. S-865/MK.05/2015 tanggal 29 Oktober 2015 dengan skema penyelesaian total hutang pokok dan bunga diangsur dengan suku bunga 0% mulai tahun 2016 hingga lunas tahun 2026. Dengan telah disetujuinya restrukturisasi utang RDI maka telah dibuat amandemen perjanjian yaitu Perjanjian Amandemen No. : AMA-176/RDI-178/DSMI/2016 dan AMA-177/RDI-195/DSMI/2016 pada tanggal 26 april 2016 dan dicantumkan jadwal angsuran. Sepanjang tahun 2018, Perseroan telah membayar sebesar Rp 4 Milyar , sehingga sisa hutang RDI tersisa sebesar Rp 80,36 Milyar. Jumlah pelunasan RDI tersebut sudah sesuai dengan target RKAP 2018 sebesar Rp 4 Miliar.

RDI's debt settlement has been approved by the Minister of Finance in accordance with letter No. S-865/MK.05/2015 dated October 29, 2015 with the scheme to settle total principal and interest payable in installments with 0% interest rates starting in 2016 until fully paid in 2026. With the approval of RDI's debt restructuring, an amendment to the agreement No. AMA-176/RDI-178/DSMI/2016 and AMA-177/RDI-195/DSMI/2016 on April 26, 2016 which included the installment schedule. Throughout 2018, the Company paid Rp 4 billion, so the remaining RDI debt was Rp 80.36 billion. The total repayment of the RDI was in line with 2018 RKAP target of Rp 4 billion.

5. PENGEMBANGAN USAHA

Dewan Komisaris mengapresiasi upaya Direksi Perseroan untuk akuisisi Pabrik Gas Turbine ex Siemens sebagai upaya perluasan pengembangan usaha dan penguatan kapabilitas inhouse dalam industri pembangkit listrik. Upaya-upaya serupa diperlukan guna memperbesar opsi diversifikasikan usaha dan daya saing Perseroan.

5. Business development

The Board of Commissioners appreciated the Board of Directors efforts to acquire ex Siemens Gas Turbine factory as an effort to expand business development and strengthen inhouse capabilities in the power plant industry. Similar efforts are needed to enlarge the options to diversify the Company's business and competitiveness.

6. ASPEK OPERASIONAL LAINNYA

Dewan Komisaris mencatat bahwa Manajemen sudah mulai bergerak untuk mengimplementasikan Manajemen Risiko dan Pengelolaan Biaya dengan seksama. Meskipun demikian, Dewan Komisaris melalui Komite Pemantauan Manajemen Risiko senantiasa mendorong agar intensitas dan kualitas pengelolaan risiko dilakukan. Pengelolaan risiko melalui *Enterprise Wide Risk Management (EWRM)* sudah selayaknya tidak hanya berhenti pada upaya mengenali, mengidentifikasi dan memitigasi risiko, namun mengenali adanya peluang peningkatan usaha, sekaligus menentukan skala peluang pengembangan usaha yang terbuka. Koordinasi berkala untuk profiling key risks yang harus diatasi senantiasa harus dilakukan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris dan menjadi era untuk ditingkatkan di masa mendatang. Khususnya pada proyek- proyek benilai strategis dan *multi years*.

6. Other Operational Aspects

The Board of Commissioners noted that Management has begun to implement Risk Management and Cost Management carefully. Nevertheless, the Board of Commissioners through Risk Management Monitoring Committee always encourages the intensity and quality of risk management to be implemented. Risk management through Enterprise Wide Risk Management (EWRM) shall not only identify and mitigate risks, but also recognize opportunities to grow business, while determining the scale of open business development opportunities. Periodic coordination for profiling key risks that shall be addressed must always be conducted jointly between the Board of Directors and Commissioners and become a moment to be improved in the future. Especially in strategic and multi-year value projects.

Penguatan teknologi informasi karena kebutuhan untuk mengelola *multi project, multi site* dan penyampaian informasi *real time* juga tidak luput dari perhatian Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah meminta kepada Direksi untuk menyiapkan langkah-langkah strategis untuk merevitalisasi pemanfaatan Teknologi dan Sistem informasi Perseroan agar adaptif, mampu memenuhi kebutuhan kecepatan informasi dan bagian dari memastikan akuntabilitas dan transparansi bisnis proses yang terjadi di Perseroan. Pada akhir tahun 2018 Perseroan telah memulai proses implementasi IT berbasis SAP dan proses *go-live*.

Di bidang SDM, Dewan Komisaris meminta kepada Direksi untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui program-program pengembangan SDM, *Knowledge Management*, dan Kompetisi Inovasi. Dinamika bisnis dan usaha yang penuh tantangan dimasa-masa mendatang menuntut pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia Perseroan yang harus terus disesuaikan. Pengembangan SDM tidak hanya terfokus kepada peningkatan kompetensi saja, namun juga harus berfokus pada upaya mengubah cara pandang seluruh jajaran SDM, berfokus pada pengelolaan pengetahuan seluruh jajaran yang selama ini terakumulasi pada masing-masing kelompok kerja, atau bahkan individu-individu tertentu. Dewan Komisaris meyakini bahwa *Knowledges Management* yang semakin diintensifkan melalui berbagai cara *knowledge sharing*, lomba inovasi dan sejenisnya akan membuat Perseroan memiliki keunggulan intelektual dan kolegal, sehingga mampu melahirkan terobosan inovatif yang akan membuat Perseroan Semakin maju di masa mendatang.

Dalam bisnis Perusahaan Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan atas efektivitas pelaksanaan WBS di Perusahaan. Sebagai wujud komitmen tersebut, Perusahaan menerapkan *Whistleblowing System* dengan disahkannya *System Operating Procedure (SOP)* melalui SK Direksi No.K 13 345a

Strengthening of information technology due to the need to manage multi-project, multi-site and delivery of real-time information also become the Board of Commissioners attention. The Board of Commissioners has requested the Board of Directors to prepare strategic measures to revitalize the Company's Technology and information system usage to be adaptive, able to meet the speed of information needs and ensuring the accountability and transparency of the business processes that occur in the Company. At the end of 2018 the Company has started SAP-based IT implementation process and go-live process.

In HR sector, the Board of Commissioners requested the Board of Directors to improve HR competencies through HR development programs, Knowledge Management, and Innovation Competition. Challenging business and its dynamics in the future require the Company's human resources management and development shall be continuously adjusted. HR development is not only focused on improving competency, but also focus on efforts to change entire HR department perspective, by focusing on managing knowledge throughout all the ranks that have accumulated in each work group, or even certain individuals. The Board of Commissioners believes that Management Knowledge, which is increasingly intensified through various ways of knowledge sharing, innovation competitions and likewise, will make the Company have intellectual and collegial superiority, to produce innovative breakthroughs that will make the Company progress in the future.

In the Company's business the Board of Commissioners also supervises the effectiveness of WBS implementation in the Company. As a form of this commitment, the Company implemented Whistleblowing System with the ratification of System Operating Procedure (SOP) through the Board of Directors' Decree No.K 13 345a. (inserted in the Management Report of the Board of Commissioners in OTHER OPERATIONAL ASPECTS section. Bottom. Page 53 of the book)

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Dari perspektif prospek usaha, Dewan Komisaris mencatat

Views On Company Business Prospects

From business prospects perspective, the Board of



bahwa geliat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diperkirakan berada dalam kisaran 5-5,4% pada 2019. Inflasi diperkirakan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi 3,5+1%. Hal tersebut disebabkan oleh inflasi inti yang terjaga dengan ekspektasi inflasi yang terjangkau di tengah kenaikan permintaan domestik sejalan dengan pemulihan ekonomi dan minimalnya tekanan atau kejutan pada inflasi administered prices. Faktor Pemilu berpotensi menyebabkan sedikit kenaikan, tetapi disisi lain, inflasi *volatile foods* masih akan tetap terkelola dengan baik didukung oleh intensifnya upaya pemerintah dalam memperkuat pasokan pangan dan semakin solidnya koordinasi pengendalian inflasi, termasuk jaminan pemerintah terkait tidak akan naiknya harga BBM dalam 2 tahun ke depan. Dewan Komisaris juga mencatat tingginya komitmen Pemerintah baik melalui belanja modal pemerintah, penyelesaian beberapa proyek infrastruktur, dan tahun politik sepanjang 2019 akan membawa pengaruh kepada prospek usaha Perseroan. Dari sisi global, risiko terutama berasal dari meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global terkait ekspektasi kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR) dan kenaikan harga komoditas, termasuk harga minyak dunia. Dalam asumsi APBN Pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar Rp 15.000,- / USD.

Terhadap Prospek Usaha, Dewan Komisaris memberikan nasehat kepada Dewan Direksi sebagaimana berikut:

- Manajemen harus secara intensif memperkuat Tim Manajemen Risiko dan menjalankan *Enterprise Wide*

Commissioners noted that Indonesia's economic growth in 2019 is estimated to be in the range of 5-5.4% in 2019. Inflation is estimated to remain within inflation target range of 3.5 + 1%. This was caused by maintained core inflation with anchored inflation expectations amid rising domestic demand in line with the economic recovery and minimal pressure or surprise in administered prices inflation. Election factors have the potential to cause a slight increase, but on the other hand, volatile foods inflation will still be well managed, supported by intense government efforts to strengthen food supply and the increasingly solid coordination of inflation control, including government guarantee to not rise fuel prices in the next 2 years. The Board of Commissioners also noted the Government's high commitment through government capital expenditure, the completion of several infrastructure projects, and the political year throughout 2019 which would have an influence on the Company's business prospects. Globally, risks mainly stemmed from increased uncertainty in the global financial market related to expectations of an increase in the Fed Fund Rate (FFR) and increases in commodity prices, including world oil prices. In the APBN assumption the Government sets Rupiah exchange rate against USD of Rp 15,000, - / USD.

Regarding Business Prospects, the Board of Commissioners provides advice to the Board of Directors as follows:

- *Management shall intensively strengthen Risk Management Team and run Enterprise Wide Risk*

Risk Manajement pada setiap proyek/aspek produksi dan aspek pendukung operasional lainnya.

- Upaya manajemen untuk mengejar kontrak yang cukup besar harus didukung oleh kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kontrak tersebut sesuai dengan tempo yang dipersyaratkan dalam kontrak. Hal ini perlu untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan mengantisipasi keterlambatan penyelesaian order. Perseroan harus mulai lebih selektif memilih Proyek / Order, tidak fokus saja kepada jumlah atau nilai, tetapi harus lebih *concern* dengan perolehan margin profitabilitas, serta sedapat mungkin menghindari proyek yang bersifat *turn key* yang dapat mengganggu *cashflow* Perseroan, Penyelesaian Order / Kontrak on hand juga penting untuk dipastikan penyelesaiannya.
- Manajemen harus mengawal implementasi SAP dan mulai memanfaatkan untuk kepentingan sinkronisasi pencatatan dari mulai *procurement* – pengelolaan material – produksi/project – hingga akuntansi dan keuangan dan memanfaatkan dalam proses – proses evaluasi dan pemantauan kinerja Perseroan.
- Manajemen perlu memperhatikan dengan lebih giat terkait pengelolaan utang dan piutang dalam rangka menjaga arus
- Direksi diminta untuk menyelesaikan PMN pada tahun buku 2019 dan mulai memanfaatkan hasil PMN untuk memberikan nilai tambah dan kemampuan Perseroan
- Dewan Komisaris didukung oleh Komite Penunjang Dewan Komisaris tidak henti-hentinya mengamanatkan Direksi agar meningkatkan kualitas penerapan GCG untuk mewujudkan pengelolaan Perseroan yang transparan, akuntabel, relevan, independen, dan *firmness* (TARIF).
- Direksi diminta untuk secara bertahap memulai R & D serta pengembangan usaha, baik yang melalui PMN maupun swadana, khususnya untuk menghasilkan *Recurring Income*, khususnya produk-produk yang dikembangkan di *Workshop* / Pabrik sendiri guna mendukung kekuatan kemandirian teknologi nasional.

Management in each project/production aspect and other operational supporting aspects.

- *Management's efforts to pursue a large contract shall be supported by the Company's ability to complete the contract according to the time required in the contract. This is necessary to increase customer trust in the Company and anticipate the delay in order completion. The Company shall begin to be more selective in choosing Projects / Orders, not only focused on the amount or value, but shall be more concerned with obtaining profitability margins, as far as possible to avoid turn key projects that may disrupt the Company's cashflow, Settlement of Orders / Contracts on hand is also important to ensure completion.*
- *Management shall oversee SAP implementation and start utilizing it in recording synchronization from procurement - material management - production / project - to accounting and finance and use it in the processes of evaluating and monitoring the Company's performance.*
- *Management needs to pay more attention to the management of payable and receivables in order to maintain the flow.*
- *The Board of Directors are required to complete PMN in the 2019 and begin to utilize PMN results to provide of the Company added value and profitability.*
- *The Board of Commissioners is supported by the Board of Commissioners' Supporting Committees which constantly mandate the Board of Directors to improve GCG implementation quality to realize transparent, accountable, relevant, independence and fairness (TARIF) management of the Company.*
- *The Board of Directors was asked to gradually start R & D and business development, both through PMN and self-financing, specifically to produce Recurring Income, especially products developed in their own Workshop / Factory to support the power of national technological independence.*

KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris didukung oleh Komite Penunjang Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit & Komite Pemantau Manajemen Resiko, tidak henti-hentinya mengamanatkan Direksi agar meningkatkan kualitas penerapan GCG melalui sosialisasi terus menerus dan

The Board Of Commissioners Committee Performance

The Board of Commissioners is supported by the Board of Commissioners Supporting Committee which consisted of Audit Committee & Risk Management Monitoring Committee, consistently mandating the Board of Directors to improve GCG implementation quality through continuous and

berjenjang, seluruh aturan yang tercakup dalam Pedoman GCG, Pedoman Kode Etik maupun penjelasan nilai-nilai perusahaan. Dewan Komisaris mengamanatkan Direksi agar segera menindak-lanjuti selesainya aksi korporasi dengan segera menuntaskan proses peninjauan dan perumusan ulang seluruh ketentuan yang tercakup dalam Pedoman GCG, Pedoman Kode Etik dan kebijakan yang menyertai, agar selaras dengan perkembangan terkini. Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantauan Manajemen Risiko, serta Sekretaris Dewan Komisaris yang bekerja secara *full-time* akan siap mengawal upaya peningkatan kualitas penerapan kualitas penerapan praktek tata kelola terbaik tersebut, disamping siap menjalankan tugas-tugas pengawasan dan penasehatan. Dalam kaitan pelaksanaan tugas tersebut, Dewan Komisaris juga menilai bahwa Komite-komite Dewan Komisaris telah menjalankan fungsinya dengan baik, efisien dan efektif. Namun dengan semakin besarnya slake usaha Perseroan dan akan semakin beratnya tantangan yang dihadapi, Dewan Komisaris mengupayakan peningkatan kompetensi, jumlah, dan kualitas dari unsur Komite Komisaris.

Dewan Komisaris yang pada akhir tahun buku 2018 mengalami perubahan komposisi dengan berakhirnya masa jabatan Adriansyah pada November 2018.

PENUTUP

Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih kepada Direksi dan jajarannya dalam memajukan perusahaan menjadi Badan Usaha Milik Negara yang memiliki diferensiasi tersendiri sehingga mampu melejit menghasilkan kinerja yang luar biasa pada tahun 2018.

Dewan Komisaris memberikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh pengampu kepentingan atas kontribusi yang diberikan dalam pencapaian kinerja tahun 2018.

Harapan Dewan Komisaris kondisi tersebut akan semakin baik pada tahun 2019 serta menciptakan hasil kinerja yang lebih eksponensial dan memberikan manfaat maksimal untuk karyawan, masyarakat dan Negara.

tiered socialization, all regulations included in the GCG Guidelines, Code of Conduct Guidelines and explanations of the Company's values. The Board of Commissioners mandates the Board of Directors to follow up the completion of corporate actions by immediately completing review process and reformulating all the provisions included in the GCG Guidelines, Code of Conducts Guidelines and accompanying policies, in line with the latest developments. The Board of Commissioners assisted by Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, and the Board of Commissioners Secretary who work full-time will be ready to oversee efforts to improve the best governance practices implementation of quality, besides being prepared to conduct supervisory and advisory duties. In relation to the implementation of this task, the Board of Commissioners also considered that the Committees of the Board of Commissioners had performed its functions properly, efficiently and effectively. But with the increase in the Company's business size and the increasing challenges faced, the Board of Commissioners strives to increase the competence, number and the Board of Commissioners Committees' element quality.

The Board of Commissioners, which at the end of 2018 experienced a change in its composition with the end of Adriansyah's office term in November 2018,

Remarks

The Board of Commissioners also like to express its gratitude to the Board of Directors and staffs in advancing the Company to become a State-Owned Enterprise that has its own differentiation that able to dedicate outstanding performance in 2018.

The Board of Commissioners expresses its deepest appreciation to all stakeholders for their contributions in achieving performance in 2018.

The Board of Commissioners' expectations it will be improved in 2019 and create performance results that more exponential and provide maximum benefits for employees, society and the State.

LAPORAN DEWAN DIREKSI

Board of Directors' Report

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, izinkan kami mewakili segenap manajemen PT Barata Indonesia (Persero) untuk menyampaikan Laporan Tahunan tahun buku 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan lainnya. Kami senantiasa bersyukur atas kinerja Perseroan yang dapat melewati tahun 2018 dengan pencapaian yang senantiasa positif yang didukung oleh peningkatan kinerja operasi melalui strategi akuisisi perusahaan pemilik teknologi pembangkit listrik serta peningkatan nilai ekspor. Pencapaian yang ditorehkan Perseroan di tahun 2018 merupakan gambaran dari upaya-upaya inisiasi strategis yang telah dilakukan manajemen, yang diharapkan mampu memberikan dampak yang positif terhadap kinerja Perseroan secara berkelanjutan. Selanjutnya perkenankanlah kami selaku Direksi PT Barata Indonesia (Persero) untuk menyampaikan pengelolaan Perseroan di tahun buku 2018. Dapat kami sampaikan juga bahwa laporan keuangan Perseroan telah diaudit oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan mendapat predikat opini "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material".

Dear Valued Shareholders and Stakeholders,

By commending and thanking the presence of God Almighty, allow us to represent the entire management of PT Barata Indonesia (Persero) to submit 2018 Annual Report as a form of accountability to the Shareholders and all other Stakeholders. We are always grateful for the Company's performance in passing 2018 with positive achievements supported by an increase in operating performance through the strategy to acquire power plant technology company and increased exports value. The Company's achievement in 2018 were the proof of strategic initiations efforts that have been implemented by management, which are expected to have a positive impact on the Company's performance sustainably. Furthermore, please allow us as Directors of PT Barata Indonesia (Persero) to convey the Company management in fiscal year 2018. We also convey that the Company's financial statements have been audited by an independent auditor from HLB Hadori Sugiarto Adi & Partners Public Accountant Office with "Unqualified Opinion".

KONDISI EKONOMI DAN INDUSTRI TAHUN 2018

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 mencapai 5,17%. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia ini dipengaruhi berbagai hal, antara lain harga komoditas yang mengalami penurunan serta tren pelemahan ekonomi dunia juga ikut mempengaruhi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan pencapaian yang cukup baik di tengah kondisi ekonomi global saat ini bahkan tertinggi dalam kurun 4(empat) tahun terakhir. Pada 2014 pertumbuhan ekonomi tercatat 5,01%, 2015 sebesar 4,88%, 2016 sebesar 5,03%, dan 2017 sebesar 5,07%.

Berdasarkan data laporan triwulanan perekonomian Indonesia edisi Desember 2018 yang dirilis oleh Bank Dunia, perekonomian Indonesia berhasil bertahan di tengah gejolak global yang besar berkat fundamental ekonomi makro yang kokoh dan koordinasi kebijakan yang kuat.

Economic And Industrial Conditions In 2018

Central Statistics Agency (BPS) noted Indonesia's economic growth in 2018 reached 5.17% Indonesia's economic growth figures were influenced by various things, including decreased commodity prices and the weakening of world economy also affected Indonesia. This growth was fairly good achievement amid the current global economic conditions and even the highest in the past 4 (four) years. In 2014 economic growth was 5.01%, in 2015 was 4.88%, in 2016 was 5.03% and in 2017 was 5.07%.

Based on the December 2018 edition of the Indonesian economy quarterly report released by the World Bank, Indonesian economy managed to survive amid huge global turmoil thanks to solid macroeconomic fundamentals and strong policy coordination.



**OKSARLIDADY
ARIFIN**

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Oksarlidady Arifin'.

DIREKTUR UTAMA
President Director

Dengan kebijakan moneter dan fiskal yang menjaga stabilitas ekonomi makro, ekonomi Indonesia tumbuh dengan kuat sebesar 5,2% pada kuartal ketiga. Pertumbuhan investasi tetap menjadi pendorong utama ekonomi, dengan investasi konstruksi menguat dibanding kuartal sebelumnya. Sementara konsumsi masyarakat sedikit menurun, lonjakan konsumsi pemerintah mempertahankan pertumbuhan konsumsi secara keseluruhan.

Ke depan, kondisi eksternal kemungkinan akan terus membawa risiko besar terhadap proyeksi pertumbuhan Indonesia. Terus bertahannya ketidakpastian terkait perdagangan global dan kemungkinan pengetatan kebijakan moneter AS yang lebih lanjut dapat menyebabkan arus keluar modal lebih lanjut dan gejolak keuangan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Menanggapi kondisi-kondisi diatas PT Barata Indonesia (Persero) merasa perlu untuk membuat langkah milestone sebuah strategi bisnis melalui peningkatan ekspor dan investasi. Hal ini juga menguntungkan bagi perseroan untuk mengambil peluang program lokal konten dan meningkatkan peran strategis Indonesia pada Global Supply chain dengan demikian dapat meningkatkan daya saing perseroan dan Indonesia pada umumnya.

STRATEGI DAN INISIATIF PERUSAHAAN TAHUN 2018

Menghadapi tahun 2018, Manajemen telah menetapkan sasaran pokok yang harus dicapai beserta strateginya guna mencapai target yang telah ditetapkan. Upaya-upaya strategis yang telah dilakukan meliputi :

1. Perluasan pangsa pasar dan mengembangkan pasar baru termasuk pasar di area non core business.
2. Menata fasilitas pabrik dan melakukan modernisasi pemessinan untuk meningkatkan kapasitas produksi manufaktur.
3. Mengembangkan pasar konstruksi beserta operation maintenance.
4. Melakukan penguatan *Engineering* dan Penetapan *Project Management Officer* (PMO) sebagai upaya dalam pengendalian projects.
5. Melakukan strategi pengendalian dengan sistem ERP berbasis SAP untuk mengawal projects agar berjalan efisien dan meningkatkan laba perusahaan.
6. Melakukan penguatan permodalan kerja dan cash

With monetary and fiscal policies that able to maintain macroeconomic stability, Indonesian economy grew strongly by 5.2% in the third quarter. Investment growth remained the main economic booster, with construction investment strengthening compared to the previous quarter. While public consumption declined slightly, the surge in government's consumption maintained overall consumption growth.

Looking ahead, external conditions are likely to continue to carry major risks to Indonesia's growth projections. The persistence of uncertainty related to global trade and the possibility of further tightening of US monetary policy could lead to further capital outflows and financial turmoil in developing countries, including Indonesia.

Responding to the conditions above PT Barata Indonesia (Persero) feels the need to make a milestone in its business strategy through increasing exports and investment. This is also advantageous for the Company to seize opportunities for content local programs and increase Indonesia's strategic role in the Global Supply chain thereby increasing the competitiveness of the Company and Indonesia in general.

The Company's Strategies And Initiatives In 2018

Facing 2018, Management has set the main targets to be achieved along with its strategy to achieve the targets. Strategic efforts that have been made include:

1. *Expanding market share and developing new markets including markets in the non-core business area.*
2. *Arrange factory facilities and modernize machineries to increase manufacturing production capacity.*
3. *Develop construction market along with operation maintenance.*
4. *Strengthen Engineering and Determination of Project Management Officer (PMO) as an effort in controlling projects.*
5. *Perform control strategies with an SAP-based ERP system to oversee projects to run efficiently and increase Company's profits.*
6. *Strengthening work capital and cash flow as well as*

flow serta menetapkan kebijakan sentralisasi fungsi keuangan.

7. Melakukan akuisisi Perusahaan dalam lingkup usaha sejenis untuk menghemat biaya investasi dan mendapatkan pangsa pasar, fasilitas produksi dan rentang produk dalam waktu yang lebih singkat dan efektif.
8. Meningkatkan penguasaan teknologi dengan menambah partner strategis pemilik teknologi.
9. Meningkatkan peran perseroan dalam tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) melalui proyek-proyek infrastruktur prioritas Pemerintah.
10. Mempertajam estimator untuk menghasilkan HPP yang bersaing.
11. Meningkatkan kompetensi SDM melalui *benchmarking best practice*.
12. Penerapan prinsip Manajemen Risiko di setiap aktivitas perusahaan.
13. Peningkatan kesejahteraan dan *engagement* dengan melakukan penyempurnaan remunerasi.

establishing centralizing financial functions policy.

7. *Acquiring companies in the similar business scope to save investment costs and gain market share, production facilities and product ranges in a shorter and more effective time.*
8. *Increasing mastery of technology by adding strategic partners to technology owners.*
9. *Increasing the Company's role in domestic level content (TKDN) through Government priority infrastructure projects.*
10. *Sharpen estimators to produce competitive HPP.*
11. *Improve HR competencies through benchmarking best practice.*
12. *Risk Management principles implementation in all the Company's activities.*
13. *Increased prosperity and engagement by improving remuneration.*

KINERJA PERSEROAN 2018

Kinerja Barata Indonesia yang meningkat signifikan pada tahun sebelumnya merupakan momentum positif yang harus dijaga serta ditingkatkan pada tahun 2018. Perseroan merencanakan perolehan dari beberapa komponen substansial dan penting sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja Perseroan. Perbandingan antara rencana dan realisasi adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2018, Perseroan mencatat pertumbuhan kinerja yang cukup positif dengan menjaga tren peningkatan atas tahun sebelumnya. Perolehan kontrak sepanjang 2018 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 11,1% atau mencapai Rp 3,65 Triliun. Hal ini merupakan sebuah capaian yang menunjukkan konsistensi dan pembuktian kemampuan Perseroan untuk bersaing dan berkompetisi untuk mempertahankan kinerja.
- Angka penjualan tahun 2018 tercatat mencapai Rp 2,18 Triliun atau 82,4% lebih tinggi terhadap capaian tahun 2017 dan telah melebihi target RKAP tahun 2018. Dengan penguatan pengendalian pada aspek operasional dan produksi, Perseroan berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp 67,8 Milyar atau naik 31,4% dibanding tahun sebelumnya.
- Sementara itu Aset dan Ekuitas Perseroan juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp 4,55 Triliun atau naik 54% terhadap capaian 2017 dengan ekuitas sebesar Rp 1,2 Triliun atau naik 5,5%

Company's Performance In 2018

Barata Indonesia's performance which increased significantly in the previous year was a positive momentum that shall be maintained and improved in 2018. The Company planned the acquisition of several substantial and important components as a benchmark in assessing the Company's performance. The comparison between plan and realization is as follows:

- *In 2018, the Company recorded positive performance growth by maintaining an upward trend over the previous year. Contracts acquisition throughout 2018 recorded growth by 11.1% or reached Rp 3.65 Trillion. This is an achievement that shows consistency and proof of the Company's ability to compete and compete to maintain performance.*
- *2018 sales figure was recorded at Rp 2.18 Trillion or 82.4% higher than 2017 achievement and has exceeded the RKAP target in 2018. With the strengthening of controls on operational and production aspects, the Company managed to record a net profit of Rp 67.8 Billion or up 31.4% compared to the previous year.*
- *Meanwhile the Company's Assets and Equities also increased by Rp 4.55 Trillion or up 54% to the 2017 achievement with equity of Rp 1.2 Trillion or increased by 5.5% towards the 2017 achievement. This condition*

terhadap capaian tahun 2017. Kondisi ini memberikan pengaruh positif bagi Perseroan, khususnya mendukung bidang pemasaran dalam memenuhi persyaratan untuk mengikuti dan memenangkan tender-tender pekerjaan bernilai tinggi.

- Pencapaian kinerja tahun 2018 juga diukur dari beberapa parameter kualitatif diantaranya level capaian *Key Performance Indicator* (KPI), Tingkat Kesehatan Perseroan, skor implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU). Dalam kurun waktu 2018 Perseroan telah melakukan berbagai *improvement* atas koreksi tahun sebelumnya dan hasilnya terdapat peningkatan dalam empat parameter tersebut.
- Pertumbuhan capaian KPI sebesar 5,7% menjadi 97,8 dari sebelumnya 89,1. Parameter KPI ini meliputi parameter atas perspektif kepemimpinan, fokus pada pelanggan, efektivitas produk dan proses, fokus tenaga kerja dan fokus kepemimpinan, tata kelola dan tanggung jawab masyarakat. Sedangkan pada aspek Tingkat Kesehatan Perusahaan, Perseroan mempertahankan capaian kinerja di kategori Sehat "A" dengan skor 70,25 atau turun 3,75 poin dibandingkan capaian 2017 pada skor 74. Penurunan level tingkat kesehatan ini disebabkan penurunan Ratio Modal Sendiri (Ekuitas) terhadap total aset. Pencapaian ini masih mengindikasikan kondisi perusahaan yang stabil dan sehat seiring dengan peningkatan jumlah pendapatan, order, dan level kemampuan produksi sejalan dengan terselesaikannya PMN dalam waktu mendatang.
- Selanjutnya, Perseroan juga mengendalikan dengan ketat implementasi GCG & KPKU di segala aspek aktivitas operasional. Pada akhir tahun 2018 tercatat capaian skor GCG sebesar 82 atau 2 poin lebih tinggi dari tahun 2017 dengan menyandang predikat "BAIK". Sedangkan skor implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,6% atau menjadi 553 dengan menyandang predikat "Good Performance."

PENGEMBANGAN ORGANISASI & SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja dan kemajuan perseroan, Sumber Daya manusia menjadi salah satu faktor dan kunci untuk pencapaian produktivitas serta keuntungan yang lebih tinggi bagi organisasi. Sejalan dengan hal tersebut maka Perseroan melakukan perubahan kebijakan yang berkesinambungan terhadap Manajemen

has a positive influence for the Company, especially in supporting the marketing sector in fulfilling the requirements to participate in and win the tender -tender high value work.

- *2018 performance achievement was also measured by several qualitative parameters including Key Performance Indicators (KPI) achievement level, the Company's Health Level, the score of Good Corporate Governance (GCG) implementation and Superior Performance Assessment Criteria (KPKU). In 2018 the Company has made various improvements over the previous year's correction and the result has been an increase in these four parameters.*
- *KPI achievement growth by 5.7% to 97.8 from 89.1. KPI parameters include parameters from leadership perspective, customer focus, product and process effectiveness, workforce focus and leadership, governance and community responsibility focus. Whereas in the Company Soundness Level aspect, the Company maintains its performance achievements by achieving "A" category with a score of 70.25 or down 3.75 points compared to 2017 achievement score which was 74. The decrease of soundness level was due to a decrease in Own Capital Ratio (Equity) to total assets. This achievement still indicates the condition of a stable and healthy company along with the increase in the number of revenues, orders and level of production capability in line with the completion of PMN in the future.*
- *Furthermore, the Company also strictly controls the GCG & KPKU implementation in all aspects of operational activities. At the end of 2018, the achievement of a GCG score was recorded at 82 or 2 points higher than in 2017 with the title "GOOD". While Superior Performance Assessment Criteria implementation of in 2018 has increased by 5.6% or 553 by and received the predicate "Good Performance."*

Development Of Human Organizations & Resources

To support the Company's achievement of performance and progress, human resource is one of the factors and keys to achieving productivity and higher profits for the organization. In line with this, the Company established continuous policy changes to Human Resource Management towards the Human Capital approach.

Sumber Daya Manusia menuju pendekatan *Human Capital*.

Dalam kurun waktu 2018, Perseroan juga terus berusaha mengembangkan proses sistematis yang melibatkan karyawan dalam mencapai misi dan tujuan melalui perbaikan sistem *Performance Management* serta penguatan fungsi pemasaran pada setiap lini bisnis perusahaan perseroan di bidang Industri Gula & Agro, Industri Komponen & Permesinan, Pembangkit, Sumber Daya Air dan Oil & Gas. Strategi ini berjalan dengan cukup baik dan memberikan *feedback* positif yang ditunjukkan dengan adanya perolehan order – order dengan nilai yang cukup signifikan.

Secara demografi, jumlah karyawan mengalami perubahan yang cukup signifikan di tahun 2018 dengan kenaikan sebesar 45,21% dibandingkan dengan tahun 2017 atas akuisisi Perusahaan sekaligus tenaga kerja Pabrik Komponen Turbin - Siemens. Disamping itu, Perseroan juga menambah tenaga kerja baru melalui jalur Management Trainee sebanyak 80 orang dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung kebutuhan operasional. Dalam hal kualitas SDM, perseroan terus melakukan program pengembangan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan – pelatihan guna mencetak SDM yang berkualitas dan berdaya saing, serta sebagai penopang kebutuhan regenerasi karyawan agar Perseroan tetap mampu bersaing dengan Perusahaan sejenis lainnya di masa mendatang.

KENDALA- KENDALA YANG DIHADAPI

Sepanjang tahun 2018, Manajemen dan segenap karyawan telah bekerja keras meningkatkan kinerja untuk mencapai target yang telah dituangkan dalam RKAP 2018 dan disahkan oleh Pemegang Saham. Namun demikian dalam perjalanannya juga tidak terlepas dari kendala dan tantangan yang muncul dalam tahun 2018, antara lain:

1. Masih terdapat akumulasi kerugian usaha dibawah tahun 2015 sehingga meskipun Perseroan mulai mencetak laba sejak kurun tahun terakhir, maka laba dipergunakan untuk modal kerja juga masih dipergunakan untuk mengurangi angka akumulasi kerugian.
2. Kurang kuatnya fungsi estimator dalam tim pemasaran yang membuat tingginya harga estimasi yang berakibat pada kekalahan tender.
3. Persaingan pasar sektoral dalam hal peraihan order akibat tidak efektifnya sinergi antar BUMN.
4. Tingginya NCR dan keterlambatan pengiriman produk

In 2018, the Company also continued to develop a systematic process that involves employees in achieving its mission and objectives through Performance Management system improvement and marketing function strengthening in each of the Company's line of business in the Sugar & Agro Industry, Component & Machinery Industry, power plants, Water, as well as Oil & Gas Power. This strategy works properly and provides positive feedback as indicated by the acquisition of orders with a significant value.

Demographically, the number of employees experienced a significant change in 2018 with an increase of 45,21% compared to 2017 on the Company acquisition as well as the workforce from Turbine Component Factory - Siemens. In addition, the Company also added new workforce through Management Trainee channel as many as 80 people from various disciplines to support operational needs. In terms of human resources quality, the Company continues to develop knowledge and skills programs through trainings in order to produce qualified and competitive human resources, as well as supporting the regeneration needs of employees so that the Company may continue to compete with other similar companies in the future.

Challenges

Throughout 2018, Management and all employees have worked hard to improve The Company's performance to achieve the targets which determined in the 2018 RKAP which ratified by the Shareholders. However, the journey was also inseparable from the obstacles and challenges that arise in 2018, including:

1. *There was still accumulated business losses below 2015 sthus even though the Company began to make profits since the last year, profit was used for working capital is also still used to reduce the accumulated loss rate.*
2. *Lack of estimators function in the marketing team that make high estimation prices which resulted loss in tenders.*
3. *Sectoral market competition in order achievement due to the ineffectiveness of synergies between SOEs.*
4. *High NCR and the delay in products shipping which*

yang berpotensi pada lepasnya pelanggan utama.

5. Penagihan piutang usaha yang macet yang kebanyakan berasal dari BUMN.
6. Demografi karyawan yang tidak berimbang serta kompetensi karyawan yang kurang merata pada suatu organisasi yang berpengaruh pada kecepatan transfer teknologi dan kematangan penanganan masalah korporasi.

Hal di atas menunjukkan bahwa baik Manajemen maupun seluruh karyawan Barata Indonesia harus bekerja lebih keras agar mampu mengatasi berbagai tantangan dan rintangan sehingga seluruh target yang diprogramkan bisa terealisasi secara cepat, tepat dan mendatangkan nilai tambah untuk Perseroan.

PROSPEK USAHA

Tren prospek usaha tahun 2018 konsisten pada penguatan bisnis di bidang usaha fokus pada produk yang dikelompokkan dalam bisnis *Food, Energy, Water* dan Industri Berat lainnya termasuk didalamnya *Material Handling Equipment*, Industri petrokimia, Industri Semen. Perseroan berkeyakinan ke empat lini usaha tersebut akan menciptakan sumber pendapatan yang berkesinambungan

potentially resulted in the loss of main customer.

5. *Collection of non-performing trade receivables which mostly come from SOEs.*
6. *Unbalanced employee demographics and uneven employee competencies in an organization which influenced technology transfer speed and maturity in handling corporate problems.*

These shows that both Management and all Barata Indonesia employees shall work harder to be able to overcome various challenges and obstacles so that all the Company's targets can be realized quickly, precisely and give added value to the Company.

Business Prospect

2018 business prospects trend in is consistent with strengthening business in the business sector focusing on Food, Energy, Water and other Heavy Industry businesses including Material Handling Equipment, Petrochemical Industry, Cement Industry (FEW+) products. The Company believes that the four business lines will create a sustainable income source. This is not only due to the dynamic



(sustainable income). Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh sifat industri yang dinamis dan berkembang menyediakan proyek infrastruktur yang menjadi pasar Perseroan, namun juga karena telah dicanangkannya program pembangunan infrastruktur prioritas oleh Pemerintah.

Pada dasarnya, prospek usaha adalah mengadopsi program-program infrastruktur prioritas baik yang dicanangkan melalaui Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional periode 2015 – 2035 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Didalam program tersebut terangkum kebijakan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas yang merupakan pembangunan sektor unggulan bahkan telah diikuti dengan program percepatannya.

Perseroan memanfaatkan peluang terkait dengan bidang usaha yang ada, diantaranya adalah pengembangan sarana dan prasarana transportasi penyelenggaraan sinergi transportasi pendukung sistem logistik, pembangunan pelabuhan & dermaga yang membutuhkan banyak peralatan angkat & angkut, pembangunan jalur kereta api serta pengadaan unit kereta yang banyak menyerap komponen perkeretaapian Barata setiap tahunnya, pembangunan bandara dengan segala fasilitas pendukungnya, peningkatan rasio elektrifikasi yang otomatis meningkatkan kebutuhan unit pembangkit listrik, serta kebijakan- kebijakan pemerintah di bidang agro industri untuk segera mewujudkan kemandirian pangan dan kemandirian energi yang keduanya membutuhkan fasilitas produksi yang terus menerus. Prospek usaha lain yang akan menjadi perhatian Manajemen adalah peluang penanganan maintenance pembangkit listrik dan berbagai pabrik-pabrik di seluruh Indonesia. Secara khusus Direksi memberikan perhatian kepada bidang ini karena akan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan (sustainable income).

Dengan berbagai hal tersebut di atas, Direksi menilai bahwa PT Barata Indonesia (Persero) masih memiliki prospek usaha yang sangat baik. Untuk itu, Direksi terus melakukan pembenahan internal, peningkatan kompetensi SDM, menerapkan berbagai teknologi yang tepat guna khususnya di bidang konstruksi dan perencanaan strategis lainnya.

and developing nature of the industry which providing infrastructure projects that become the Company's market, but also because the Government has established a priority infrastructure development program.

Basically, the Company's business prospect is adopting priority infrastructure programs both launched through National Industrial Development Master Plan for the period 2015-2035 and 2015-2019 National Medium Term Development Plan (RPJMN). In the program, basic infrastructure development policy and connectivity that constitute superior sector development are summarized and even accelerated.

The Company takes advantage of these opportunities related to the existing business fields, including the development of transportation facilities and infrastructure to carry out transportation synergies supporting logistic systems, port & dock construction that require a lot of lifting & hauling equipment, the construction of railway lines and the procurement of train units that absorb Barata railway components every year, construction of airports with all its supporting facilities, increasing the electrification ratio that automatically increases the demand for power plant units, as well as government policies in the agro-industry sector to realize food and energy independence, both which require continuous production facilities. Other business prospect which will be Management concern is the opportunity to handling power plants and various factories maintenance throughout Indonesia. In particular, the Board of Directors gives attention to this field because it will become a source of sustainable income.

With various points mentioned above, the Board of Directors considers that PT Barata Indonesia (Persero) still has very good business prospects. For that, the Board of Directors continues to mimplement various appropriate technologies, especially in the fields of construction and other strategic planning.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Seluruh jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan segenap insan Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG yang baik dan berkelanjutan. Komitmen ini didukung oleh Komite Audit untuk melakukan pengawasan kegiatan terhadap pelaksanaan penerapan GCG. Perseroan secara rutin juga melakukan sosialisasi terhadap seluruh aturan yang tercakup dalam pedoman GCG, pedoman kode etik maupun penjelasan nilai-nilai perusahaan sebagai upaya dalam peningkatan kualitas penerapan GCG di seluruh aspek bisnis perusahaan. Seluruh operasional Perusahaan mengacu kepada *Standard Operation Procedure* dan ketentuan-ketentuan dari Kementerian terkait serta dilaksanakan dengan pengawasan yang mencukupi. Azas *Good Corporate Governance* yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran, diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam setiap aktivitas menuju tercapainya target yang ditetapkan. Sebagai *counter*, Perseroan memfasilitasi para Stakeholders dalam pelaporan *whistleblowing* PT Barata Indonesia (Persero) melalui sistem aplikasi online yang dapat diakses melalui www.barata.com dengan mengisi data yang dibutuhkan atau melalui email di alamat info@barata.com. Hal ini merupakan komitmen dalam rangka pengendalian pada penyelenggaraan Perseroan. Pada tahun 2018 PT Barata Indonesia (Persero) telah melakukan evaluasi penerapan praktik-praktik GCG secara *Assessment* yang didampingi oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur. Hasilnya penerapan GCG oleh perseroan mengalami peningkatan skor menjadi 82 dengan predikat "BAIK".

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

Dalam rangka menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi Perseroan dan kesadaran sosial, Perseroan senantiasa melaksanakan berbagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perseroan merancang program CSR sebagai pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perseroan berkomitmen dan aktif menyelenggarakan sejumlah kegiatan untuk mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pelaksanaan CSR berfokus pada 4 (empat) pilar utama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu bidang sosial, pendidikan, agama, dan lingkungan. Implementasi

Corporate Governance

All levels of the Board of Commissioners, Directors, and all members of the Company are committed to implement proper and sustainable GCG principles. This commitment is supported by Audit Committee to oversee activities on the implementation of GCG. The Company is also routinely conducts socialization of all rules covered by the GCG guidelines, code of conduct and an explanation of the Company values as an effort to improve GCG implementation quality in all aspects of the Company's business. All of the Company's operations refer to Standard Operation Procedure and provisions of the relevant Ministry which conducted with adequate supervision. Good Corporate Governance principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness, is implemented as well as possible in all activities towards achieving the determined targets. As a counter, the Company facilitates Stakeholders in whistleblowing report of PT Barata Indonesia (Persero) through an online application system that can be accessed through www.barata.com by filling in the required data or by email at info@barata.com. This is one of commitment to control the Company's operational. In 2018 PT Barata Indonesia (Persero) has evaluated the GCG practices implementation in an assessment accompanied by East Java Province BPKP Representative. As a result, the Company's GCG implementation score has increased to 82 with the title "GOOD".

Corporate Social Responsibility.

To create a balance between the Company's economic interests and social awareness, the Company always implements various Corporate Social Responsibility (CSR) programs. The Company designs CSR programs as a business approach by contributing to sustainable development by providing economic, social and environmental benefits to all stakeholders. The Company is committed and actively organizes a number of activities to realize corporate social responsibility.

CSR implementation focuses on 4 (four) main pillars that directly touch the community, namely in social, education, religion and environmental. This continuous

CSR berkesinambungan ini merupakan cara Perseroan menjawab tantangan sebagai pelaku usaha untuk konsisten membangun *corporate value* di mata *stakeholder*.

Bagi Barata Indonesia, tujuan utama pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) adalah mewujudkan fungsi Barata sebagai Badan Usaha Milik Negara, yaitu sebagai agen pembangunan nasional, sekaligus sebagai institusi sosial. Hal ini untuk memastikan bahwa kepentingan sosial dari berbagai kelompok pemangku kepentingan Perseroan dapat dipenuhi secara tepat dan proporsional, terutama masyarakat yang dekat dengan lingkungan kerja Perseroan.

PENUTUP

Atas pencapaian yang ditorehkan di tahun 2018, izinkan saya mewakili Direksi PT Barata Indonesia (Persero) menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris serta Pemegang Saham, juga kepada Regulator, Pemangku Kepentingan, serta jajaran Manajemen dan Karyawan, atas seluruh kerjasama yang telah terjalin dengan baik.

Kami menyadari bahwa tahun-tahun ke depan merupakan tahun yang penuh tantangan tetapi juga sekaligus memberikan peluang bagi PT Barata Indonesia (Persero) untuk lebih kuat, unggul, dan bermanfaat bagi karyawan, masyarakat & negara. Sekalipun terjadi perubahan dalam komposisi Dewan Direksi pada akhir tahun buku 2018 namun dengan dukungan dan kerja sama dari para pemangku kepentingan, kami optimis dapat mencapai kemajuan lebih baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah kepada segenap Pemangku Kepentingan khususnya untuk pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

CSR implementation is the way the Company answers the challenges as business people to consistently build corporate value in the eyes of stakeholders.

For Barata Indonesia, the main objective of implementing Corporate Social Responsibility (CSR) is to realize the Barata function as a State-Owned Enterprise, namely as a national development agent, as well as a social institution. This is to ensure that the social interests of stakeholder groups of the Company can be fulfilled appropriately and proportionally, especially communities surrounding the Company's work environment.

Final Remarks

For the achievements in 2018, allow me to represent the Board of Directors of PT Barata Indonesia (Persero) to express my deepest respect and gratitude to the Board of Commissioners and Shareholders, also to Regulators, Stakeholders, and Management and Employees, for all the GOOD cooperation that has been established.

We realize that the years ahead are challenging years but also at the same time provide opportunities for PT Barata Indonesia (Persero) to be stronger, superior, and beneficial for employees, society & the country. Despite changes in the composition of the Board of Directors at the end of 2018 but with the support and cooperation of stakeholders, we are optimistic that we can achieve better progress in realizing the Company's vision, mission and goals which will ultimately provide added value to all stakeholders especially for sustainable business growth.

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2018

*Statement Letter From Members Of Board Of
Commissioners And Directors For Responsibility On 2018
Annual Report*





PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Tentang
Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2018 PT. Barata Indonesia (Persero)

Statement of the Board of Commissioners and Board of Directors
Regarding Responsibility for Annual Report 2018
PT. Barata Indonesia (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT. BARATA INDONESIA (Persero) Tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan

We, the undersigned, certify that all information contained in Annual Report of PT. Barata Indonesia (Persero) 2018 are complete and we are held responsible for the accuracy of this Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This certificate is made in true.

Gresik, 28 February 2019

PT. BARATA INDONESIA (Persero)

Dewan Komisaris dan Direksi / Board of Commissioner's and Board of Director's



TRİYOGI YUWONO

Komisaris Utama / President Commissioner

OKSARLIDADY ARIFIN

Direktur Utama / President Director

KATNO

Komisaris / Commissioner

YOYOK HADI SATRIYONO

Direktur / Director

SAM HERODIAN

Komisaris / Commissioner

TONY BUDI SANTOSA

Direktur / Director

SUDARSO

Komisaris / Commissioner

BOBBY SUMARDIAT ATMOSUDIRJO

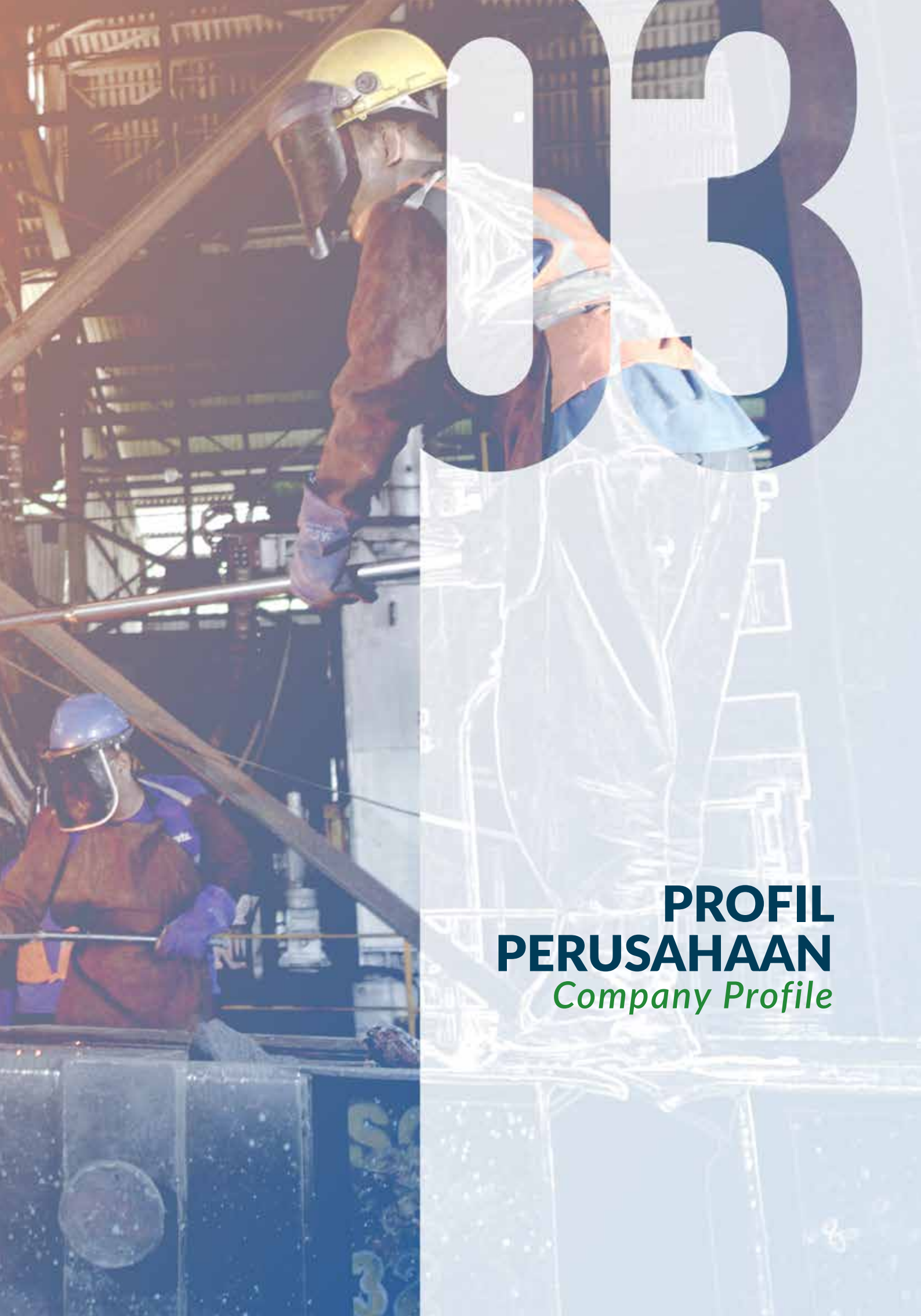
Direktur / Director

PT. BARATA INDONESIA (Persero)

Jl. Veteran 241 Gresik 61123, East Java - Indonesia

Tel. +62 31 3990555, Fax. +62 31 3990666, info@barata.com, www.barata.com





13

**PROFIL
PERUSAHAAN**
Company Profile

DATA PERUSAHAAN Company Data



NAMA PERUSAHAAN
Company Name

PT Barata Indonesia (Persero)

KANTOR PUSAT
Head Office

Jl. Veteran No. 241 Gresik, 61123
Tel | Phone: +62 31 3990555 | Faksimili | Fax: +62 31 3990666
Website: www.barata.com | E-mail: info@barata.com

**KANTOR PERWAKILAN
JAKARTA**
Jakarta Representative Office

MTH Tower, 10th floor, 1001
Jl. MT Haryono Kav. 23, Jakarta Selatan 12320
Tel|Phone: +62 21 83788533 | Faksimili|Fax: +62 21 83788534
E-mail: jakarta@barata.com

STATUS PERUSAHAAN
Company Status

Badan Usaha Milik Negara
State-Owned Enterprise

BIDANG USAHA
Business Scope

Manufaktur dan proyek-proyek bidang Food, Energy, Water dan Industri Pendukung lainnya,
(FEW +)
Manufacturing and projects in Food, /energy, Water and Other Supporting Industries (FEW+

KEPEMILIKAN SAHAM
Shares Ownership

100% milik Negara Republik Indonesia
100% owned by Republic of Indonesia

TANGGAL PENDIRIAN
Establishment Date

19 Mei 1971
May 19, 1971

DASAR HUKUM PENDIRIAN *Legal Framework of Establishment*

1. Undang Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
 2. Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 3. Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.
 4. Keputusan Menteri No.100/Menteri BUMN/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
 5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 Jo. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 6. Akta Pendirian Perusahaan No. 35 tanggal 19 Mei 1971 yang dibuat di hadapan E. Pondaag Notaris di Jakarta dan Anggaran Dasar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris No. 01 tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Herawati S.H., Notaris di Surabaya.
1. *Law No.19/ 2003 regarding State-Owned Enterprise*
 2. *Law No. 40 /2007 regarding Limited Liability Company*
 3. *Government Regulation No. 45/ 2005 regarding Establishment, Supervision and Dissolution of SOE.*
 4. *Ministerial Decree No.100/ Minister of SOE/2002 regarding Assessment of State-Owned Enterprise Sound Level.*
 5. *Minister of State-Owned Enterprises Regulation No.PER-01 / MBU / 2011 August 1, 2011 Jo. Minister of State-Owned Enterprise Regulation No. PER-09 / MBU / 2012 dated July 6, 2012 regarding Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises (BUMN).*
 6. *Company Establishment Deed No. 35 dated May 19, 1971 made before E. Pondaag Notary in Jakarta and Articles of Association as amended several times, most recently by Notarial Deed No. 01 March 1, 2017 made before Herawati S.H., Notary in Surabaya*

Sesuai Akta Notaris Herawati, S.H. No. 07 tanggal 15 Juni 2017 tentang besarnya modal dasar Perusahaan yaitu sebesar Rp 3.000.000.000.000,- tiga triliun rupiah.

According to Notarial Deed Herawati, S.H. No. 07 dated June 15, 2017 regarding the amount of the Company authorized capital is Rp 3,000,000,000,000 (three trillion rupiahs).

MODAL DASAR *Authorized Capital*

Sesuai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.0013895.AH.01.02 Tahun 2017 dan daftar Perseroan Nomor AHU.0082787. AH.01.11 Tahun 2017 yaitu sebesar Rp 762.915.000.000 (tujuh ratus enam puluh dua milyar Sembilan ratus lima belas juta rupiah).

In accordance with Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Decision No. AHU.0013895.AH.01.02/2017 and the list of Company Number AHU.0082787.AH.01.11/2017 that is equal to Rp 762,915,000,000 (seven hundred sixty two billion nine hundred and fifteen million rupiah).

MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR *Issued and Paid-in Capital*

MAKNA LOGO, FILOSOFI, DAN MOTTO PERUSAHAAN

Logo Meaning, Philosophy, And Motto Of The Company

MAKNA LOGO BARATA INDONESIA

Pada tahun 1971, Barata Indonesia terbentuk atas penyatuan tiga perusahaan PN Barata, PN Peprida dan PN Sabang Merauke dilandasi dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Ketika itu Perusahaan belum memiliki logo Perusahaan yang baku, sehingga dibuatlah logo Perusahaan secara manual.

Logo Perusahaan terdiri dari sebuah inisial dan diikuti dengan nama Perusahaan yang merupakan satu kesatuan.

Meaning Of Barata Indonesia Logo

In 1971, Barata Indonesia was established by merging three companies, namely PN Barata, PN Peprida and PN Sabang Merauke founded on a high nationalism spirit. At that time the Company did not yet have a standard Company logo, so the Company logo was created manually.

The Company logo consists of an initial and is followed by the name of the Company.



barata indonesia
PT. (PERSERO)

Logo kotak berisi inisial Perusahaan. b adalah Barata. Direpresentasikan oleh plat baja yang ditekuk menjadi punggung huruf b dan pipa merepresentasikan lingkaran untuk badan huruf b.

The box logo contains the initials of the Company. "b" for Barata. Represented by a steel plate bent into the back of letter b and the pipe represents a circle for the body of the letter b.



Secara harafiah kedua bentukan ini menyerupai tongkat golf. Di mana olah raga ini dilakukan dengan mengayunkan tongkat golf untuk memukul bola ke arah depan. Artinya, Perusahaan memiliki target yang dituju oleh seluruh karyawan dan selalu melangkah ke depan. Sejalan dengan hal ini dibutuhkan keterampilan yang tinggi dalam menggunakan tongkat agar bola yang dipukul tepat mengenai kepala tongkat pemukul. Hal ini merepresentasikan bahwa insan Barata dalam bekerja harus mempunyai keterampilan serta kemampuan dalam

Literally these two objects formations resemble golf clubs. Where this sport is performed by swinging the club to hit the ball towards. Symbolizing, the Company which has targets to be achieved by all employees and always goes forward. In line with this, a high skill is needed in using the stick so that the ball is hit right on the club's head. This represents that at work, Barata individual shall have the skills and abilities to operate work tools so that the goals in work may be achieved according to the target.

mengoperasikan alat kerja agar tujuan dalam bekerja bisa tercapai sesuai dengan target.

Saat bola dipukul maka akan menghantam sudut-sudut siku di sekeliling simbol b. Ketika terjadi tumbukan maka sudut-sudut tersebut akan berpencar ke empat penjuru mata angin. Harapannya target yang telah dicapai dapat membawa nama harum Indonesia, didengar dan dikenali di empat penjuru mata angin melintasi samudera luas yang direpresentasikan dengan warna biru pada logo.

Sebagai aktualisasi nama perusahaan dibuat logo nama perusahaan secara manual di sisi sebelah kanan lambang inisial b dalam kotak bersudut, dengan font tertentu yang tidak dimiliki oleh perusahaan apapun dan dibubuhi tulisan PT (PERSERO) yang merupakan jati diri Perusahaan sebagai Perusahaan BUMN.

When the ball is hit, it will hit the angles around the symbol b. When a collision occurs, the corners will scatter to the four corners of the wind. This symbolizing a hope that the target that has been achieved may bring proud to Indonesia, be heard and recognized in the four corners of the wind across the vast ocean which represented in blue on the logo.

As the actualization of the company name, the company name logo was manually created on the right side of the initial symbol b in an angular box, with certain fonts that are not owned by any company and affixed with the writing of PT (PERSERO) which is the Company's identity as a BUMN Company.



Dengan berjalannya waktu Perusahaan semakin berkembang, diperlukan logo yang lebih segar tanpa meninggalkan pondasi awal pembuatan logo tahun 1971 sekaligus memberi kesan simpel, tepat sasaran dan dapat menunjukkan jati diri. Maka manajemen memutuskan untuk hanya menggunakan logo nama Perusahaan sebagai logo resmi PT Barata Indonesia (Persero) saat ini.

Hal ini menunjukkan ketegasan untuk tampil tunggal, percaya diri serta merepresentasikan simplifikasi proses dan efektifitas prosedur menuju tercapainya tujuan dan target Perusahaan selain menunjukkan makna keterbukaan dalam berbagai hal serta membuka peluang untuk menjalin sinergi baik secara internal maupun eksternal.

Logo ini telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2017 berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan telah disahkan melalui sertifikat No. IDM000613479 tanggal 1 Februari 2017.

As time went on, the Company grew and needed a fresher logo without leaving the initial foundation logo creation in 1971 while giving a simple impression, right on target (precise) and able to show identity. So management decided to only use the Company's name logo as the current official logo of PT Barata Indonesia (Persero).

This shows the determination to appear uniquely, confident and represents a simplification of the process and the effectiveness of procedure towards achieving the Company's goals and targets in addition to showing the meaning of openness in various matters and opening opportunities to establish synergies both internally and externally.

This logo has been registered with the Ministry of Human Rights Law, Director General of Intellectual Property Rights in 2017 under Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and has been ratified through certificate No. IDM000613479 February 1, 2017.

TAGLINE PERUSAHAAN

Company's Tagline

ADVANCEMENT THROUGH TECHNOLOGY

Teknologi mutlak diperlukan untuk kemudahan proses dan kemajuan perusahaan, dimana penguasaannya memberikan nilai tambah untuk membentuk PT Barata Indonesia (Persero) yang unggul dan berdaya saing.

Melalui *tagline* ini diharapkan penggunaan teknologi dalam proses produksi di Barata semakin meningkat dan dapat difahami serta diaplikasikan dalam setiap kegiatan berbisnis di Perusahaan oleh para karyawan sekaligus memberikan informasi kepada khalayak bahwa teknologi menjadi perhatian utama perusahaan saat ini. Hal ini bisa meningkatkan citra perusahaan di mata pemberi pekerjaan dan *stakeholder*.

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PERUSAHAAN

TUJUAN PERUSAHAAN

Pengelolaan setiap bidang usaha PT Barata Indonesia (Persero) dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

- Turut mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing dan maju melalui peningkatan peran industri antara dalam memenuhi kebutuhan industri hulu dan hilir.
- Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan impor & meningkatkan ekspor.

Technology is absolutely necessary for the ease of the company process and progress, where its mastery provides added value to form a superior and competitive PT Barata Indonesia (Persero).

Through this tagline, it is expected that technology usage in Barata production process will increase and may be understood and applied in all activities in the Company's business by employees while providing information to the public that technology is the company's main concern at this time. This may improve the image of the company in the eyes of employers and stake holders

Company Goals, Targets, And Strategies

Company Goals

Management of each of PT Barata Indonesia (Persero) business scope is conducted to achieve the following objectives:

- *To participate in creating an independent, competitive and advanced national industry through enhancing the role of intermediate industry in meeting the needs of upstream and downstream industries.*
- *To increase the domination in the domestic and foreign markets by reducing import dependence & increasing exports.*

- Meningkatkan inovasi berbasis teknologi.
- Membangun kepercayaan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terdepan.
- Meningkatkan pertumbuhan nilai Perusahaan dalam rangka pencapaian kepuasan pemangku kepentingan.
- To improve technology-based innovation.
- To build customer trust by providing excellent service.
- To improve the Company's growth value to achieve stakeholders' satisfaction.

SASARAN POKOK PERUSAHAAN

Dalam kinerja tahun 2018 Perusahaan telah menentukan beberapa sasaran pokok sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Company Main Goals

In 2018 performance, the Company has determined several main goals as presented in the following table:

TARGET DAN REALISASI 2018

2018 Target and Realization

URAIAN Description	Satuan Unit	RKAP 2018 2018 PCAB	REALISASI 2018	% REALISASI thd RKAP
PESANAN MASUK <i>Incoming Order</i>	Juta Rp <i>Million Rp</i>	3.600.146	3.646.669	101,29
PENJUALAN <i>Sales</i>	Juta Rp <i>Million Rp</i>	1.510.309	2.176.896	144,14
LABA USAHA <i>Operating Income</i>	Juta Rp <i>Million Rp</i>	149.946	157.082	104,76
LABA BERSIH <i>Net-Income</i>	Juta Rp <i>Million Rp</i>	62.089	67.809	109,21
TOTAL ASET <i>Total Assets</i>	Juta Rp <i>Million Rp</i>	2.654.948	4.547.362	171,28
INVESTASI <i>Investment</i>	Juta Rp <i>Million Rp</i>	246.240	222.800	50,17
RUTIN	Juta Rp <i>Million Rp</i>	146.240	74.300	168,48
PMN	Juta Rp <i>Million Rp</i>	100.000	148.500	37,13
PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA <i>Labor Productivity</i>	Orang <i>Persons</i>	1.370	2.261	165,00
JUMLAH TENAGA <i>Total Manpower</i>	Juta Rp <i>Million Rp</i>	1.102	963	87,39
TINGKAT KESEHATAN <i>Sound Level</i>	Juta Rp <i>Million Rp</i>	SEHAT (A) NILAI 76,00	SEHAT (A) SKOR 70,25	

Target pesanan masuk tahun 2018 sebesar Rp 3.600.146 juta dengan target penjualan sebesar Rp 1.510.309 juta. Dari kondisi kinerja tersebut Perusahaan berkeyakinan akan membukukan laba bersih sebesar Rp 62.089 juta. Pada akhir tahun 2018 Perusahaan optimis akan menyandang status Kesehatan Perusahaan pada level "Sehat (A)" dengan skor 76,00. seiring berjalannya waktu dan didukung oleh kerja keras pada akhir tahun buku 2018 perusahaan mampu memperoleh pesanan masuk sebesar Rp 3.646.669 juta, penjualan sebesar Rp 2.176.896 juta sehingga perusahaan mampu memperoleh laba bersih sebesar 67.809 juta atau 109,21 % terhadap target RKAP tahun 2018 maka Perusahaan mampu menyandang status kesehatan pada level "Sehat (A)" dengan skor 70,25.

Incoming orders target in 2018 was Rp 3,600,146 million with sales target of Rp 1,510,309 million. From these performance, the Company believes it will achieve net profit of Rp 62,089 million. At the end of 2018 the Company is optimistic that it will achieve "SOUND (A)" level with the score of 76.00 over time and supported by hard work at the end of fiscal year 2018 the Company was able to obtain incoming orders of Rp 3,646,669 million, sales of Rp 2,176,896 million thus the Company was able to obtain a net profit of 67,809 million or 109.21% of 2018 RKAP target that enable the Company to achieve "SOUND (A)" with a score of 70.25.

S

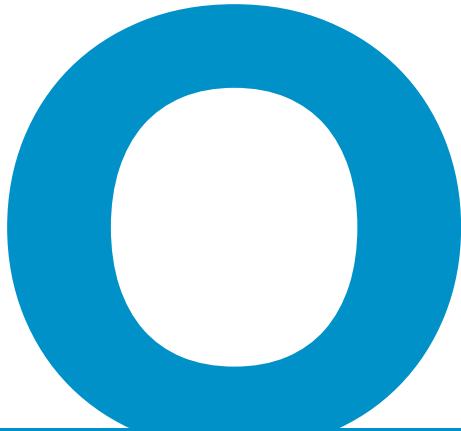
STRENGTH | KEKUATAN

- Memiliki sistem manajemen mutu yang bersertifikat
- Memiliki bisnis proses terupdate sebagai acuan pelaksanaan usaha
- Menerapkan standard GCG & KPKU
- Memiliki kapasitas pengecoran besi/baja tinggi
- Mempunyai core competency untuk produk andalan
- Produk diterima di pasar global (Amerika Utara, Selatan, Australia)
- Mempunyai patent produk andalan
- Memiliki workshop khusus komponen turbin
- Memiliki asset non produktif yang bisa dioptimalkan
- Penguatan Kompetensi SDM berkesinambungan.
- *Owns a certified quality management system*
- *Owns updated business process as a reference for conducting business*
- *Implements GCG & KPKU standards*
- *Owns high iron/steel casting capacity*
- *Owns core competency for reliable products*
- *Products accepted in the global market (North America, South America, Australia)*
- *Owns flagship product patent*
- *Owns turbine component dedicated workshop*
- *Owns non-productive assets that can be optimized*
- *Continuous Strengthening of HR Competencies.*

W

WEAKNESS | KELEMAHAN

- Kekuatan kurang memadai untuk pendanaan investasi besar
- Produk industri hilir yang bersifat kontinyu belum kuat
- Gab usia & penguasaan teknis SDM tinggi
- Aplikasi sistem terintegrasi yang belum sempurna
- Lemahnya kekuatan desain engineering dalam mendukung pemasaran dan produksi
- Program manajemen resiko & mitigasi tersedia, namun belum teraplikasi.
- *Strength is insufficient for funding large investments*
- *Continuous downstream industrial products are not yet strong*
- *High Age & HRtechnical mastery difference*
- *Imperfect integrated system application*
- *Weak engineering design in supporting marketing and production*
- *Risk management & mitigation program is available, but yet to be implemented.*



OPPORTUNITY | PELUANG

- Potensi pasar yang besar meliputi Pasar ekspor & sektor infrastruktur prioritas Pemerintah .
- Terdapat peluang pasar maintenance
- Pesaing bisnis yang terbatas di bidang pengecoran & Maintenance Pabrik Gula.
- Kerjasama/sinergi BUMN semakin terbuka.
- Kepercayaan partner meningkat (perbankan/ non perbankan & teknis)
- Potensi untuk peningkatan TKDN berbagai produk
- *Large market potential including export market & government infrastructure sector.*
- *Lot of maintenance market opportunities*
- *Business competitors are limited in casting & Sugar Plant Maintenance fields.*
- *Cooperation/synergy of SOEs is increasingly open.*
- *Partners trust are increases (banking / non-banking & technical)*
- *Potential to increase TKDN of various products*



THREAT | ANCAMAN

- Masuknya produk kompetitor dari Tiongkok dan India.
- Turunnya margin keuntungan akibat globalisasi pasar/MEA termasuknya harga energi & bahan baku.
- Perubahan teknologi
- Munculnya produk-produk substitusi
- *The entry of competing products from China and India.*
- *The decline in profit margins due to market globalization/MEA includes energy prices & raw materials.*
- *Technology changes*
- *Growth of substitution products*

STRATEGI ANALISIS SWOT

SWOT Analysis Strategy

S-O

- Melakukan pemasaran secara agresif dengan memprioritaskan pekerjaan yang memerlukan sertifikasi mutu.
- *Aggressive marketing by prioritizing projects that require quality certification.*
- Meningkatkan penjualan melalui bundle produk lewat pemasaran yang intensif.
- *Increase the sales by products bundle through intensive marketing.*
- Dengan mesin produksi baru maka dapat menciptakan produk-produk unggul untuk mendukung Program Pemerintah dengan berpartisipasi antar BUMN dan Pemerintah.
- *With the new production machine excellent products may be created to support the Government Programs by participating in inter- SOEs and Government projects.*

W-O

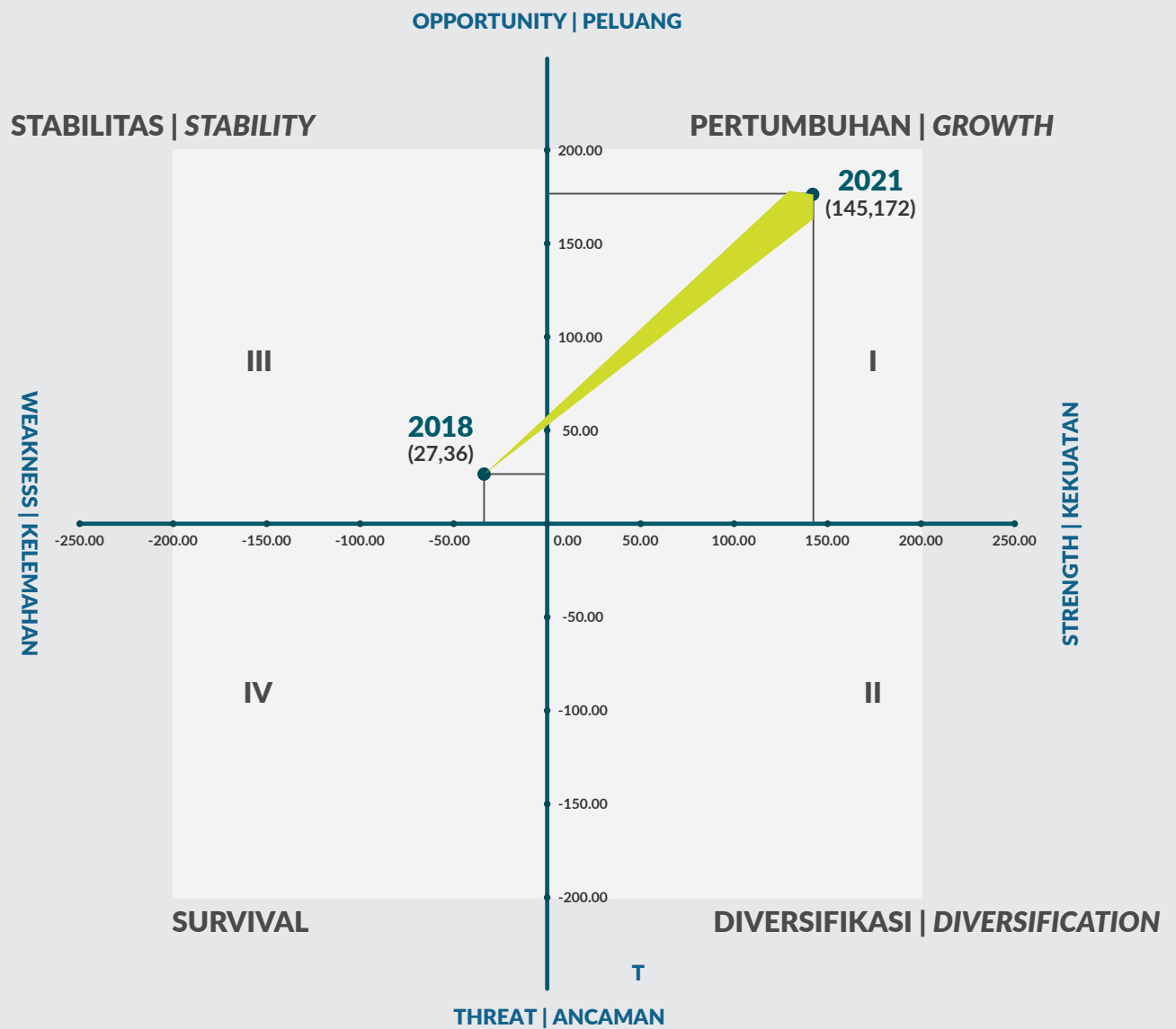
- Peremajaan peralatan dan pembangunan pabrik baru dapat meningkatkan kapasitas produksi mesin sehingga semua peluang pasar yang sesuai dengan kompetensi perusahaan
- *Equipment rejuvenation and new plants construction may increase production machine capacity so that all market opportunities are in accordance with the company's competence*
- Memanfaatkan pengalaman perusahaan dalam bidang manufaktur untuk perolehan pekerjaan.
- *Utilizing the company's experience in manufacturing for job acquisition.*

S-T

- Strategi pemasaran produk yang sesuai dengan kompetensi perseroan kepada komunitas.
- *Using the proper product marketing strategy in accordance with the company's competence to the community.*
- Optimalisasi kantor cabang sebagai pemasaran dan pelayanan.
- *Optimizing branch offices as marketing and service agents.*
- Mendapatkan proyek-proyek pemerintah.
- *Acquiring government projects.*
- Bekerja sama dengan pemerintah baik pemerintah daerah atau pusat dalam pengembangan produk yang dimiliki perseroan.
- *Teaming up with either local or central government in product development owned by the company.*
- Melakukan strategi minimum stock untuk menghindari kenaikan harga
- *Performing minimum stock strategy to avoid mark-up.*

W-T

- Memaksimalkan jam mesin dan jam orang serta bahan baku yang ada.
- *Maximizing machines and employees working hours as well as raw materials available.*
- Mengkombinasikan bahan baku dengan tidak menurunkan kualitas produk.
- *Combining raw materials by not degrading the quality of the product.*
- Investasi untuk pembangunan dan pengembangan peralatan pabrik.
- *Investing for factory construction and machinery development.*



STRATEGI PERUSAHAAN, KEBIJAKAN & PROGRAM KERJA

Berdasarkan analisa SWOT atas Kinerja Tahun 2018, maka Perusahaan kemudian menetapkan beberapa strategi sebagai berikut:

BIDANG PEMASARAN

- Memperkuat tim marketing.
- Melakukan pemasaran secara agresif dengan penekanan pada produk- produk andalan yang telah dikuasai dengan baik dan sesuai kompetensi.
- Penerimaan order yang selektif tidak hanya fokus pada order manufaktur namun juga proyek-proyek konstruksi berbasis engineering.
- Diversifikasi produk dan pasar untuk *foundry* dan industri agro sehingga tidak tergantung pada customer tertentu.
- Menjaring order melalui sinergi dengan BUMN lain di semua sektor (BUMN bidang minyak & gas, BUMN pertambangan, BUMN pengelolaan pelabuhan, BUMN perkebunan dan lainnya).
- Peningkatan jaringan partner global.
- Peningkatan perolehan pasar ekspor untuk menambah profit.

BIDANG PRODUKSI

- Memelihara fasilitas produksi yang ada
- Melakukan penataan ulang fasilitas produksi pabrik untuk tujuan efisiensi produksi serta lebih bersih.
- Apabila terjadi investasi akibat pengajuan PMN 2016 maka akan dilakukan penggantian mesin konvensional dengan mesin-mesin otomatis yang lebih modern (CNC) untuk menghemat biaya dan waktu produksi.
- Menata kembali fasilitas produksi pabrik untuk tujuan efisiensi produksi.
- Melakukan investasi alat berat *crane* untuk mendukung pekerjaan erection & installation.
- Peningkatan pengawasan dan ketersediaan bahan baku untuk memastikan kegiatan produksi berjalan lancar.
- Peningkatan QCD (Quality, Cost & Delivery) dan penurunan angka reject rate.
- Efisiensi sistem pengadaan melalui kerjasama jangka panjang dengan *mill manufacturer* khususnya material pokok/*plate*.
- Sinergi BUMN untuk pengadaan material scrap (INKA, KAI, PTPN, PAL dan BUMN lain).

Corporate Strategy, Policy & Work Program

Based on SWOT analysis on 2018 Performance, the Company sets out several strategies as follows:

Marketing

- *Strengthening marketing team.*
- *Conducting aggressive marketing which emphasized on featured products that have been well-mastered and appropriately competed.*
- *Selective in order acceptance, not only focuses on manufacturing orders but also engineering-based construction projects.*
- *Products and markets diversification for foundry and agro industries to not dependent on specific customers.*
- *Drawing orders through synergy with other SOEs in all sectors (oil & gas SOEs, mining SOEs, port management SOEs, plantations SOEs and others).*
- *Improving global partner network.*
- *Enhancing export market acquisition to increase profit.*

Production

- *Maintaining the existing production facilities*
- *Rearranging factory production facility for a cleaner and production efficiency purpose.*
- *In the case of investments due to the application of 2016 PMN, there will be a replacement from conventional machines to automatic machines (CNC) to save production costs and time.*
- *Reorganizing factory production facilities for production efficiency purposes.*
- *Investing heavy equipment crane to support erection & installation work.*
- *Improving supervision and raw materials availability to ensure production activities run smoothly.*
- *Improving QCD (Quality, Cost & Delivery) and lowering reject rate.*
- *Procurement system efficiency through long-term cooperation with mill manufacturer especially main material / plate.*
- *SOEs synergy for the procurement of scrap materials (INKA, KAI, PTPN, PAL and other SOEs).*

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

Secara garis besar, sasaran dan strategi di bidang Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1. **Peningkatan kompetensi karyawan untuk berbagai kebutuhan usaha melalui training pelatihan yang meliputi:**
 - Analisa kebutuhan *training* (TNA) & *update* kebutuhan training 2018 per Satmikal.
 - Pendidikan dan latihan baik secara *In House Training* maupun *Out House Training* secara lebih terstruktur.
 - Perencanaan dan pelaksanaan training kedisiplinan dan wawasan kebangsaan bagi karyawan baru tingkat sarjana tahun 2018 dan training persiapan hidup mandiri bagi karyawan yang akan menjalani MPPB.
 - Melaksanakan beberapa *training* untuk *marketing*, diantaranya *Strategic Marketing & Marketing Intelligent*, *Marketing Management & Marketing Research* serta *Sales management & Negotiation Skill*.
2. **Pengembangan SDM**
 - Guna memenuhi kebutuhan SDM oleh organisasi maka sasaran jumlah tenaga kerja untuk mendukung RKAP 2018 sebanyak 1044 orang.
 - *Bench Mark/* magang sistem manajem HRD vs *Human Capital* dan implementasi awal sistem *Human Capital*.
 - Menata kembali posisi tenaga kerja sesuai *job description* dan penyempurnaan struktur organisasi baru dan bisnis perusahaan 2018.
 - Implementasi awal penyempurnaan Sistem Penilaian Kinerja (*konduite*) karyawan menjadi Sistem *Performance Appraisal* (PA) dan *Key Performance Indicator* (KPI).
 - Pemetaan tenaga struktural yang akan memasuki MPPB, formasi jabatan lowong & penyiapan proses suksesinya serta persiapan regenerasi pada level strata I & II.
 - Proses regenerasi bertahap yaitu dengan menindak lanjuti rekrutmen tahun 2017 dan melakukan rekrutmen tahun 2018.
 - Menyempurnakan sistem *management trainee* bagi para CKT dengan membuat SOP dan kurikulum *Induction Training* karyawan baru, membuat SOP tentang evaluasi & presentasi akhir CKT.

Human Resources

Generally, Human Resources goals and strategies are as follows:

1. **Increasing employee competence for various business needs through various training which includes:**
 - *Training Needs Analysis (TNA) & Training Needs Update 2017 per Satmikal.*
 - *Trainings both in house training and out house training more structurally.*
 - *Planning and implementation of discipline training and nationality insight for 2018 fresh graduated-new employees and independent self-employment preparation training for employees who will undergo MPPB.*
 - *Organizing several training for marketings, among others, Strategic Marketing & Marketing Intelligent, Marketing Management & Marketing Research as well as Sales Management & Negotiation Skill.*
2. **Human Resource Development**
 - *In order to meet HR needs of the organization, the number of employees target to support 2018RKAP is 1044 people.*
 - *Bench Mark / HRD management system apprentice VS Human Capital and Human Capital system initial implementation.*
 - *Reorganize employees' position according to job description and new organizational structure improvement and 2018 company business.*
 - *Initial implementation of Employee Performance Assessment System (conduit) implementation into Performance Appraisal System (PA) and Key Performance Indicator (KPI).*
 - *Structural forces mapping of those who will enter MPPB, vacant position formation & succession process preparation and regeneration at the level I & II preparation.*
 - *Gradual regeneration process to follow up the 2017 recruitment and conduct 2018 recruitment.*
 - *Improving trainee management system for CKT by establishing SOP and Induction Training curriculum for new employees, making SOP on CKT final evaluation & presentation.*

- Mereview *Operating Procedure Agreement (OPA)*, *Work Intruction (WI)*, serta optimalisasi dan implementasi program database karyawan.
- Secara bertahap mentrasformasi entiti SDM menjadi *Human Capital*.
- Melakukan upaya peningkatan keterikatan karyawan melalui penyesuaian remunerasi dan program-program lainnya.

BIDANG KEUANGAN

- Penguatan modal melalui program PMN 2016
- Mencari sumber pendanaan yang baik dari perbankan maupun non perbankan untuk memperoleh *cost of fund* yang bersaing.
- Menyusun sistem pengendalian biaya.
- Optimalisasi aset non produktif dalam rangka menguatkan modal kerja.
- Meningkatkan ketertiban pembayaran dan pelaporan pajak.
- Menerapkan sistem keuangan yang terintegrasi.

BIDANG SISTEM

- Memperbaiki sistem dan prosedur untuk memfasilitasi aplikasi struktur organisasi.
- Menerapkan sistem manajemen yang bernilai tambah dan terintegrasi.
- Mempertahankan sertifikat manajemen mutu yang telah diraih, melaksanakan secara disiplin dan berkesinambungan sertifikasi yang telah diperoleh seperti *ASME Code/Stamp*, *ISO 9001:2015*, *ISO 14001:2015*, *OHSAS 18001:2007*[Cek versi2 *ISO* , sebagian sudah berubah ke versi 2015 (*done*)], sertifikat *AAR*, sertifikat *Lloyd Register*, sertifikat *Class NK*, sertifikat *BKI*.
- Mempertahankan skor *KPKU*.
- Meningkatkan sistem *IT*.

- *Review Operating Procedure Agreement (OPA)*, *Work Instructions (WI)*, as well as optimizing and implementing employee database programs.
- *Gradually transform HR entities into Human Capital.*
- *Increase employee engagement through remuneration adjustment and other programs.*

Finance

- *Strengthen capital through the 2018PMN program.*
- *Seek good funding sources from both non-banking and banking to obtain competitive costs funds.*
- *Establish cost control system.*
- *Optimize non-productive assets to strengthen working capital.*
- *Improve order of payment and tax reporting.*
- *Implement integrated financial systems.*

System

- *Improve systems and procedures to facilitate the application of organizational structure.*
- *Implement a value-added and integrated management system.*
- *Maintain the obtained quality management certificate, implementing discipline and sustainable certifications such as ASME Code / Stamp, ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007, AAR certificate, Lloyd Register certificate, Class NK certificate, BKI certificate.*
- *Maintain the KPKU score.*
- *Improve IT systems.*

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN *Company Background In Brief*

Berawal dari cikal bakal Perseroan "NV BRAAT" pada tahun 1924 hingga saat ini telah terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan namun masih memiliki benang merah bidang usaha yang menjadi unggulan bagi Perseroan.

Starting from forerunner of the Company "NV BRAAT" in the year of 1924, there have been significant changes so far but still has a correlation in the business field that became the flagship for the Company



JEJAK LANGKAH Milestone

Milestone Transformasi PT Barata Indonesia (Persero) dijelaskan sebagai berikut:

PT Barata Indonesia (Persero) Milestone Transformation is described as follows:

Era 1901- 1961 ■

- 1901 NV Braat Machine Fabriek berdiri dengan fokus penyedia fasilitas perawatan pabrik-pabrik gula di Jawa Timur. Pada tahun 1961 dinasionalisasi dan berubah nama menjadi PN Barata.
- 1920 Machine Fabriek & Werf NV. Molen Fliet berdiri dengan fokus n juga dinasionalisasi pada 1961 dan berubah nama menjadi PN Sabang Merauke
- *1901 NV Braat Machine Fabriek established with a focus in providing maintenance facilities for sugar mills in East Java. In 1961 it was nationalized and changed its name to PN Barata.*
- *1920 Machine Fabriek & Werf NV. Molen Fliet established with the same focus, sugar mills equipment service providers of outside East Java. It was also nationalized and changed its name to PN Sabang Merauke.*

Era 1961- 1971 ■

Tiga Perusahaan Nasional PN Barata, PN Sabang Merauke dan PN Peprida dijadikan satu menjadi PT Barata Metalworks & Engineering. Lini usaha utama diperluas menjadi perawatan pabrik gula, produsen mesin pengolah hasil perkebunan, fabrikasi dan instalasi konstruksi baja, produsen mesin penggilas jalan, serta jasa instalasi proyek-proyek industri dasar.

Three National Company PN Barata, PN Sabang Merauke and PN Peprida merged as PT Barata Metalworks & Engineering. The main business scope is expanded into sugar mills maintenances, plantation processing plant manufacturers, fabrication and steel construction installation, road roller manufacturers, as well as installation services of basic industrial projects.

Era 1974- 1976 ■

Pada tahun 1974-1976 PT Barata Metalworks & Engineering dilengkapi dengan pabrik pengecoran besi dan baja di pabrik Gresik dan Jakarta dan mulai memasuki pembangunan peralatan pelabuhan, peralatan bandar udara dan pembangkit listrik.

In 1974-1976, PT Barata Metalworks & Engineering was equipped with iron and steel foundry factory in Gresik and began to penetrate port, airport, and power plants equipment construction in Jakarta.

Era 1987- 1998 ■

Pada era ini selain berubah nama menjadi PT Barata Indonesia, juga terdapat hal-hal penting, antara lain:

- Dilakukan peremajaan mesin-mesin produksi (Proyek P2SP).
- Pada 1989 perseroan dikelola oleh Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) melalui Keppres no 40 tahun 1989.
- Pada 1998 Perseroan menjadi anak perusahaan PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero) dengan keputusan Meneg Pendayagunaan BUMN No. Kep.036/MPUBMN/98 tanggal 7 Agustus 1998.

In this era, in addition to changing its name to PT Barata Indonesia, there were also important events, among others:

- *Rejuvenated production machinery (P2SP Project).*
- *In 1989, the company was managed by Strategic Industrial Management Agency (BPIS) through Presidential Decree No. 40/1989.*
- *In 1998, the Company became a subsidiary of PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero) with the State Minister of State-Owned Enterprises Decree No. Kep.036/M PUBMN/98 dated August 7th 1998.*

1901-1961

1961-1971

1974-1976

1987-1998

Era 2002

Perseroan kembali dibawah pengelolaan Kementerian BUMN setelah PT BPIS dilikuidasi.
The Company returned under the management of the Ministry of SOE after PT BPIS was liquidated.

Era 2005

Perseroan melakukan realokasi Pabrik dari Jalan Ngagel Surabaya ke lokasi Gresik. Latar belakang realokasi adalah karena tata kota Surabaya sudah tidak diperuntukkan untuk industri. Dari sisi Barata, tindakan tersebut merupakan gerakan efisiensi operasional guna mencapai keuntungan tertinggi.
The Company relocated its Factory from Jalan Ngagel Surabaya to Gresik. The background of the relocation was due to Surabaya city planning is not intended for industry. From Barata side, the action was an operational efficiency to achieve the highest profits.

Era 2016

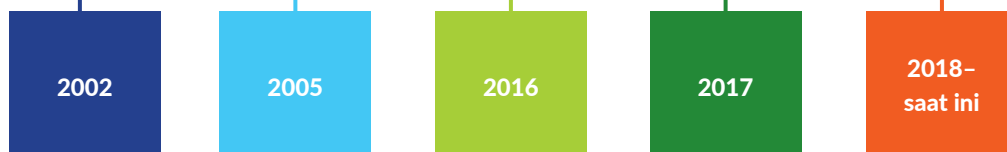
Diterimanya PMN 2016 sebesar Rp500 Milyar yang secara finansial memperkuat posisi Perseroan dalam bisnis. Peningkatan kapasitas produksi pabrik foundry dan agro juga mendapatkan efek positif dari penerimaan PMN ini.
Reception of 2016 PMN which amounted to Rp500 billion was financially strengthens the Company's position in the business. The increased production capacity of foundry and agro factories also received a positive effect from the reception of this PMN.

Era 2017

Terjadi perubahan bidang usaha yang mengacu pada FEW+ untuk tujuan penguasaan pasar yang Sumber Daya Air (Water), dan Divisi Industri Komponen & Permesinan (+).
There has been a change in the business sector that refers to FEW + for the purpose of market share Water Resources (Water), Industrial Components & Machinery division(+).

Era 2018

Perseroan melakukan perluasan usaha dengan menetapkan tingkat pertumbuhan tinggi diantaranya dengan menambah strategi akuisisi beberapa Perusahaan swasta atau bahkan Perusahaan non swasta bereputasi baik, memiliki prospek pasar khas/khusus dan masih bisa dikembangkan lebih lanjut dengan pertimbangan efisiensi waktu dan dana investasi. Pada tahun 2018, rencana akuisisi terwujud dengan dibelinya aset pabrik komponen turbin milik Siemens di Cilegon. Hal ini memperkuat posisi Perseroan di bidang pembangkit tenaga listrik.
The Company is expanding its business by determining high growth rate, among others by increasing the acquisition strategy of several private companies or even reputable non-private companies, that have distinctive / special market prospects and can still be further developed by considering time efficiency and investment funds. In 2018, the planned acquisition was realized with the purchase of Siemens turbine component factory assets in Cilegon. This strengthens the Company's position in the field of electricity generation.



BIDANG USAHA *Line Of Business*

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan melaksanakan usaha sebagai berikut :

- a. Produksi, meliputi pembuatan dan perakitan komponen peralatan industri berat, permesinan, pengecoran (*foundry*) dan suku cadang.
- b. Jasa, meliputi pekerjaan – pekerjaan :
 - Rancang bangun dan perekayasa (Design Engineering) baik mekanikal maupu elektrikal;
 - Instalasi dan pemeliharaan mesin – mesin dan peralatan.
- c. Perdagangan, terhadap barang – barang tersebut di atas baik yang diproduksi sendiri oleh Perseroan maupun oleh Perusahaan lain, yang berada di dalam negeri atau luar negeri, termasuk kegiatan usaha keagenan.
- d. Kegiatan usaha lain yang dapat menunjang kegiatan – kegiatan usaha tersebut di atas.

Di dalam pelaksanaannya kegiatan usaha perusahaan tersebut di atas kemudian diwujudkan dalam FEW+ yaitu:

In accordance with the Company's Articles of Association, the Company conducts the following business:

- a. *Production, including manufacturing and assembly of heavy industrial equipment components, machinery, foundry and spare parts.*
- b. *Services, including:*
 - *Design Engineering and mechanical and electrical engineering;*
 - *Installation and maintenance of machinery and equipment.*
- c. *Trade, on the mentioned goods above whether produced solely by the Company or by any other Company, domestically or abroad, including agency business activities.*
- d. *Other business activities that may support the mentioned business activities above.*

In the Company's business activities implementation above are realized in FEW+:



FOOD



SUGAR MILL PLANT



SAGOO FACTORY



CPO PLANT



POST HARVEST SOLUTIONS

ENERGY



GAS TURBINE POWER PLANT



BIOETHANOL PLANT



HYDRO POWER PLANT



COAL FIRED STEAM POWER PLANT

WATER



WATER GATE



HOLLOW CONE



SLUICE WATER GATE

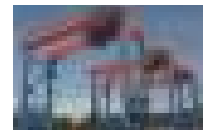


WATER TREATMENT PLANT/ WWTP

PLUS



CRANERUBBER TYRED GANTRY CRANE



RAIL MOUNTED HARBOUR CRANE



OVERHEAD CRANE



CONVEYOR

1. Industri Agro (Food Industry)

Barata Indonesia memiliki banyak pengalaman dalam memberikan produk industri makanan, baik dalam komponen & jenis proyek EPC. Perusahaan berkompetensi dalam mengembangkan pabrik gula & pemeliharaannya selama era kolonial sekitar tahun 1200.

Sekarang, dikombinasikan dengan teknologi baru, Barata Indonesia mampu mengembangkan pabrik gula dengan kapasitas hingga 15000 ton per hari, serta menguasai komponen fabrikasi.

Mulai dari gula mill, Barata Indonesia kemudian intensif memperluas kompetensi dalam mengembangkan produk agro industri lainnya seperti tanaman sagu, pabrik Bioethanol, Crude Palm Oil dan tumbuhan proses serupa lainnya.

1. Agro Industry (Food Industry)

Barata Indonesia has long experience in delivering food industry products, both in components & EPC projects. The Company has competence in developing sugar mills & its maintenance during the colonial era around 1200.

Now, combined with new technology, Barata Indonesia is capable to develop sugar mills with capacities up to 15000 tons per day, and mastering fabrication components.

Starting from sugar mills, Barata Indonesia then expand its competence in developing other agro industry products such as sago mill, Bioethanol plant, Crude Palm Oil and other similar plant process

2. Industri Energi (Energy Industry)



Barata Indonesia memainkan peran penting dalam industri energi di Indonesia, baik di sektor minyak & gas, pembangkit listrik dan memberikan komponen serta jenis proyek-proyek EPC. Dalam kekuasaan generasi pandang, Barata Indonesia memiliki pengalaman dalam mengembangkan batubara uap pembangkit tenaga listrik, pembangkit listrik Turbin Gas, pembangkit listrik hidro-listrik dan keseimbangan dari tanaman dari berbagai jenis *Power Generator*. Sektor minyak dan gas juga mendapatkan perhatian intensif dan memiliki begitu banyak proyek di Indonesia. Penyebaran pada berbagai jenis tangki dan terminal pipa & minyak mentah atau pipa gas dan banyak lagi.

2. Energy Industry (Energy Industry)

Barata Indonesia plays an important role in the energy industry in Indonesia, both in oil & gas sectors, power generation and providing components as well as EPC projects. In generation power of view, Barata Indonesia has experience in developing coal steam power plants, Gas Turbine power plants, hydroelectric power plants and the balance of plants from various types of Power Generators. Oil and gas sector is also gaining intensive attention and there are many projects in Indonesia, spreading on various types of tanks, pipelines & crude oil terminals or gas pipelines, and many more.

3. Industri Sumber Daya Air (Water Related Industry)

Nusantara memberikan peluang yang besar untuk bisnis Barata Indonesia. Serupa dengan sumber gula mill, Barata Indonesia menangani bisnis sumber daya air sejak tahun 1200. Kemudian mengembangkan kompetensi lebih lanjut dan telah memperoleh pengakuan sumber daya bisnis nasional. Berbagai jenis Dam komponen yang diproduksi oleh Barata Indonesia salah satunya, yaitu berongga kerucut katup yang berhasil mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai HCV terbesar di Indonesia.

4. Industri Berat Lainnya (Material Handling, Process Industry, etc)

Industri komponen & mesin memproduksi fabrikasi komponen dan mesin untuk berbagai industri mengklasifikasikan sebagai konstruksi berat. Diantaranya adalah pelabuhan bahan penanganan peralatan dan komponen untuk industri perkereta apian, petrokimia, pupuk, semen dan industri proses lainnya. Pangsa pasar industri ini di seluruh Indonesia dan mencapai Amerika Serikat untuk produk kereta api.

3. Water Resources Industry (Water Related Industry)

Indonesia provides a great opportunity for Barata Indonesia business. Similar to sugar mill sources, Barata Indonesia handles the water resources business since 1200. Then it competence develops further and has gained recognition of national business resources. Various types of Dam components produced by Barata Indonesia, one of them is the hollow cone valve that managed to get the award from the Indonesian Records Museum (MURI) as the largest HCV in Indonesia.

4. Other Heavy Industries (Material Handling, Process Industry, etc)

Components & machines industry producing fabricated components and machines for various industries classify as heavy construction. Among them are ports handling equipment and components for railway, petrochemical, fertilizer, cement and other process industries. The market share of this industry throughout Indonesia and reach the United States for rail products.

No.	UNIT USAHA Business Unit	RKAP 2018 1 Tahun year
1.	DIVISI INDUSTRI GULA & AGRO <i>Sugar & Agro Industries Division</i>	859.000
2.	DIVISI MINYAK & GAS <i>Oil & Gas Division</i>	725.000
3	DIVISI PEMBANGKIT <i>Power Plants Division</i>	789.755
4	DIVISI SUMBER DAYA AIR <i>Water Resources Division</i>	622.341
5	DIVISI IND KOMP & PERMESINAN <i>Components & Machinery Industries Division</i>	604.050
TOTAL <i>Total</i>		3.600.146

Gambar berikut menunjukkan bidang-bidang usaha Perusahaan yang sejalan dengan tag line bisnis FEW+ (Food, Energy, Water) yang menyediakan peluang besar untuk dimanfaatkan PT Barata Indonesia (Persero).

The following figure shows the Company's business fields in line with FEW + (Food, Energy, Water) business tagline that provide great opportunities for PT Barata Indonesia (Persero)

PRODUK DAN JASA YANG DIHASILKAN

Products and Services



ENGINEERING, PROCUREMENT, & CONSTRUCTION

- Sago Plant
- Sugar Plant
- Bioethanol Plant
- Crude Palm Oil Plant



MANUFACTURING

- Roll Mill
- Mill Stand
- Pinion Gear

INDUSTRI ENERGY

ENGINEERING, PROCUREMENT, & CONSTRUCTION

- Belawan Gas Turbine Power Plant 1x48 MW
- Walesi Mini Hydro Power Plant

- Coal Fired Stream Power Plant NTB 2x25 MW
- Kayu Aro Mini Hydro Power Plant
- Conveyor

ENERGY

MANUFACTURING OIL AND GAS INDUSTRY

- Filtered Water Tank
- Tank Bioreactor Matindok
- Main Transit Terminal Tuban Project
- Pressure Vessel
- Spherical Tanks

POWER PLANT INDUSTRY

- Dearator
- Condensor
- HP Heater & LP Heater
- Boiler
- Mining Industry
- Liners
- Crusher
- Striking Blade
- Grizzly Bar

INDUSTRI SUMBER DAYA AIR

ENGINEERING, PROCUREMENT, & CONSTRUCTION

- Mini Hydro Power Plant
- Hydro Mechanical Package

WATER

WATER MANUFACTURING

- Hollow Cone Valve
- Uluwatu Water Gate
- Hollow Jet Valve
- Plunger Valve
- Bengawan Solo Barrage

MATERIAL HANDLING PROCESS INDUSTRY, etc

PROCESS INDUSTRY

- Kiln
- Electrostatic Precipator
- Clinker Mill
- Heat Exchanger & Pressure Vessel
- Boiler

CEMENT INDUSTRY

- Kiln Shell
- Mill Body
- Classifier
- Preheater
- Striking Blade
- Grizzly Bar

INDUSTRI BERAT LAINNYA

MATERIAL HANDLING

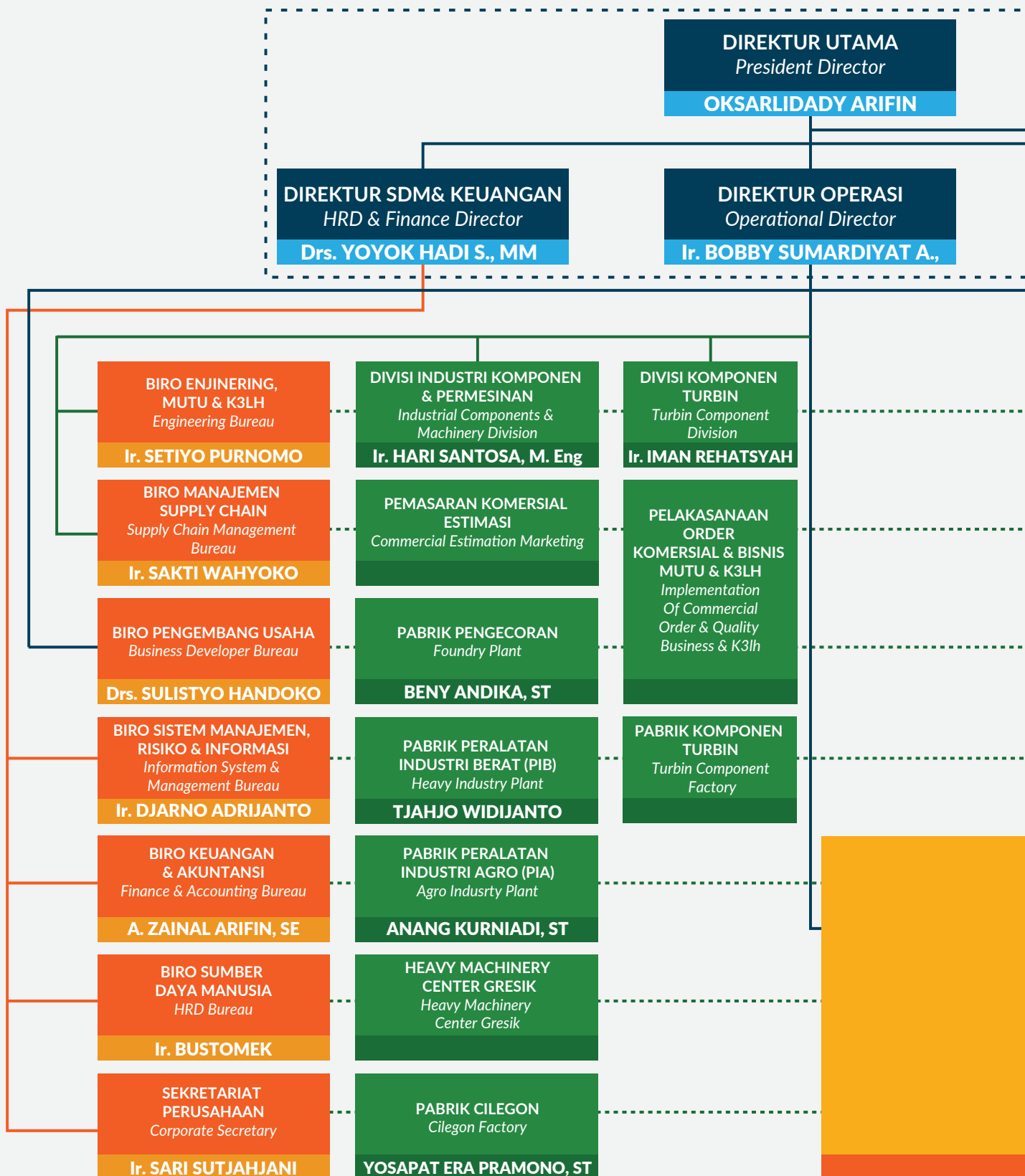
- Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC)
- Rail Mounted Harbour Crane (RMHC)
- Container Crane
- Stacker Reclaimer
- Conveyors
- Automatic Stacking Crane
- Straddle Carrier

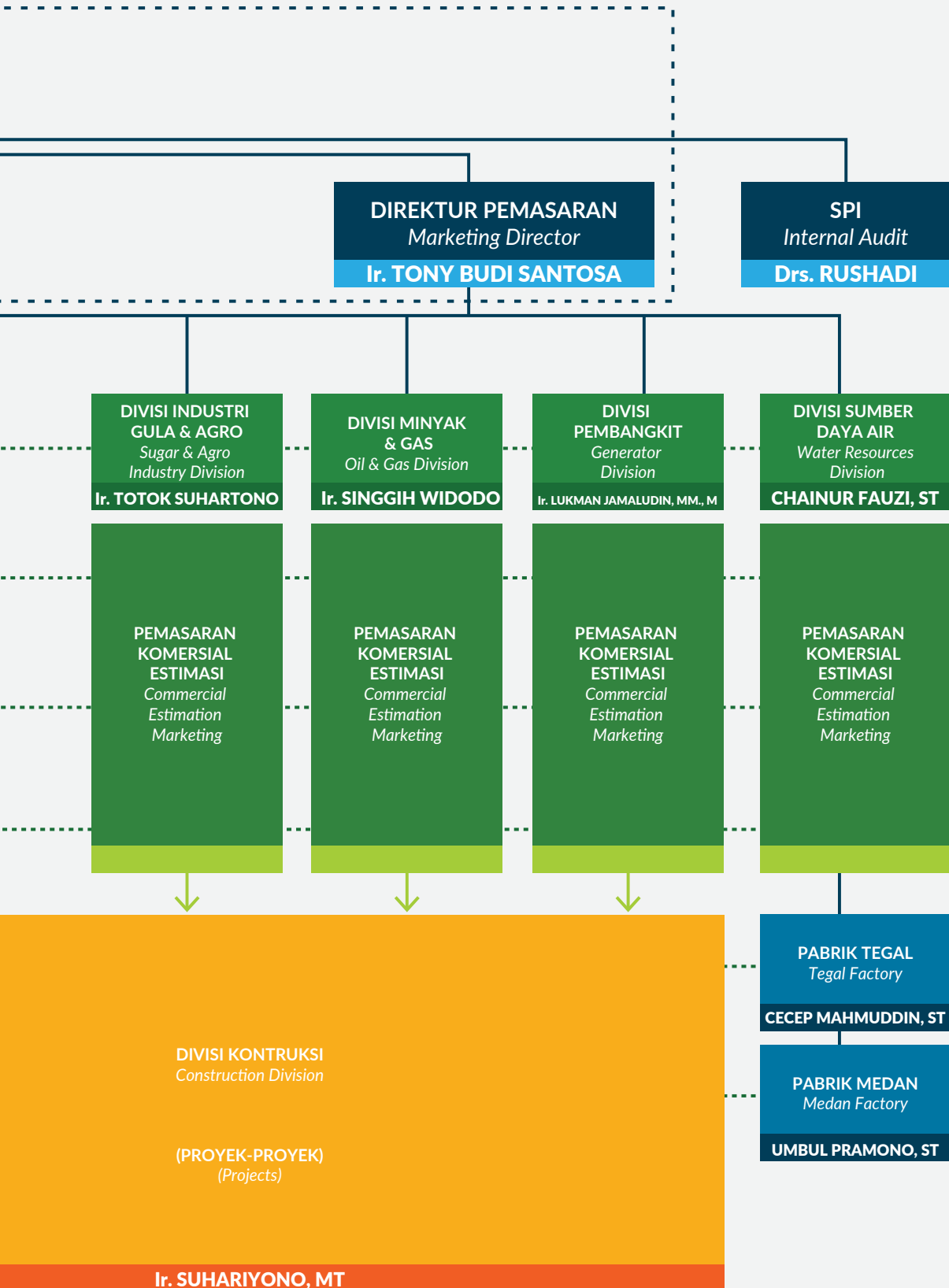
RAILWAY EQUIPMENT

- Road Rollers
- Asphalt Sprayer
- Stamper
- Three Wheel Roller
- Shipbuilding Industry
- Rudder Frame
- Stern Tube
- Gybsy
- Gear Wheel
- Steel Construction
- Warehouse Construction
- Conveyor Striking Blade
- Grizzly Bar

STRUKTUR ORGANISASI

Organization Chart





VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Vision, Mission, And Corporate Values

VISI

Vision

**MENJADI PERUSAHAAN
YANG KUAT, SEHAT, DAN
BERDAYA SAING YANG
BERBASIS INOVASI &
TEKNOLOGI DALAM
BIDANG FOOD, ENERGY,
WATER DAN INDUSTRI
PENDUKUNG LAINNYA,
(FEW +)**

***Become a strong, healthy and
competitive company, based
on innovation and technology
in food, energy, water and
other supporting industries
(FEW+)***

Adapun maksud Visi Perusahaan dijelaskan sebagai berikut:

The significance of the Company's Vision is described as follows:

A. Kuat

PT Barata Indonesia (Persero) menjadi perusahaan yang kuat menghadapi kompetisi usaha, termasuk di dalam memenangkan tender-tender yang diikuti.

A. Strong

PT Barata Indonesia (Persero) become a strong company facing business competition, including in winning tenders.

B. Sehat

Perseroan mampu mencapai target tingkat kesehatan 'Sehat A' atau level di atasnya sesuai ketentuan yang ditetapkan Pemegang Saham.

B. Healthy

The Company is able to achieve 'Sound A' soundness level or above as determined by the Shareholders.

C. Berdaya Saing

Perseroan mampu bersaing dengan BUMN lain/Swasta di bidang-bidang yang berkaitan dengan lingkup usaha Perusahaan.

C. Competitive

The Company is able to compete with other BUMN/Private in the scopes related to the Company's business scope.

D. Berbasis Inovasi & Teknologi

Perseroan memperkuat teknologi dengan terus mengembangkan bidang desain engineering untuk memperkuat perairan order dan mendukung tumbuhnya inovasi.

D. Based on Innovation & Technology

The Company is strengthening the technology by continuing to develop engineering design to strengthen the order and support innovation growth.

E. Bidang Manufaktur, Engineering & Konstruksi

Perseroan bergerak di bidang Manufaktur, Engineering & Konstruksi yang berbasis engineering.

E. Manufacturing, Engineering & Construction

The Company is engaged in engineering based Manufacturing, Engineering & Construction.

MISI

Mission

- A. Memperkuat kompetensi manufaktur dan konstruksi berbasis enjinering.
- B. Meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) tinggi melalui kerjasama strategis.
- C. Memperkuat bidang usaha Pembangkit Listrik, Minyak & Gas, *Material Handling Equipment*, Industri Agro & Hidromekanikal.
- D. Meningkatkan kepuasan pelanggan.
- E. Memproduksi mesin & peralatan untuk industri hilir.
- F. Meningkatkan ekspansi pasar lokal maupun internasional.

- A. *Strengthening manufacture and construction-based engineering competencies.*
- B. *Increasing the Domestic Content Level (TKDN) high through strategic cooperation.*
- C. *Strengthening Power Plant, Oil & Gas Plants, Material Handling Equipment, Agro & Hydro mechanical Industries.*
- D. *Improving customer satisfaction.*
- E. *Producing machinery & equipment for downstream industries.*
- F. *Increasing local and international market expansion.*

NILAI PERUSAHAAN *Corporate Values*

Makna Tata Nilai/Budaya Perusahaan

PT Barata Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai visi :

Corporate Culture Significance

PT Barata Indonesia (Persero) is a State-Owned Enterprise that has a vision:

“ Menjadi Perusahaan yang kuat, sehat dan berdaya saing yang berbasis inovasi dan teknologi dalam bidang manufaktur, enjineriing dan konstruksi

To be a strong, healthy and competitive company based on innovation and technology in manufacturing, engineering and construction “

yang dilengkapi dengan misi-misi guna mensukseskan visi tersebut.

equipped with missions to succeed the vision.

Cita-cita tersebut dipersenjatai dengan semangat yang luar biasa dan dijiwai oleh seluruh insan Perseroan untuk menjunjung komitmen yang telah disepakati bersama-sama dan kemudian diimplementasikan oleh *team work* yang terbentuk kuat dengan dasar semangat dan tujuan kesejahteraan bagi karyawan dan seluruh pemangku kepentingan yang pada akhirnya membawa kesuksesan bagi PT Barata Indonesia (Persero) secara utuh dan memberikan kontribusi kepada Pemerintah atau Pemegang Saham.

These missions are armed with tremendous spirit and are imbued by all the Company's workers to uphold the commitments that have been agreed upon and implemented by a teamwork strongly formed based on the spirit and prosperity purposes for employees and all stakeholders that leads to the ultimate success for PT Barata Indonesia (Persero) as a whole as well as to contribute to the Government or Shareholders.

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Corporate Values Implementation

Unsur-unsur Tata Nilai/Budaya Perusahaan

Corporate Culture Elements

Merespon kondisi dengan cepat adalah perilaku standar & merupakan tolak ukur produktivitas untuk memenuhi target perusahaan.

Responsive to the current conditions quickly is standard behavior and is productivity benchmark to meet the company target.

CEPAT RESPON
Quick Response

Target akhir dari setiap aktifitas adalah untuk menjadi lebih berdaya saing dan unggul dibandingkan pesaing maupun partner usaha.

The final target of each activity is to become more competitive and excellent compared to competitors or business partner.

EKSELEN
Excellent

Team Work kuat terbentuk dari SDM professional & tangguh yang bervisi & misi sama untuk meraih kesuksesan dengan lebih cepat & lebih besar.

Strong team work formed from professional, strong human resource that who has the same vision and mission to achieve greater success quickly.

KERJA TIM
Team Work

Janji dan dedikasi yang kuat untuk menjawab tantangan internal dan eksternal yang semata-mata ditujukan untuk mendukung kepentingan perusahaan serta untuk memberikan pesan kesungguhan di depan stakeholders.

Commitments and a strong dedication to respond to the internal and external challenges which aimed to support the company's interest as well as to show seriousness impression to the stakeholders

KOMITMEN
Commitment

Selalu melakukan usaha berkelanjutan untuk mengembangkan dan memperbaiki kondisi diantaranya terhadap produk, pelayanan dan proses.

Always conducts continuous improvement to develop and improve products, services, and processes.

**PERBAIKAN
KESINAMBUNGAN**
Continuous Improvement

Pola pikir untuk selalu berinovasi ditumbuhkan untuk menciptakan produk & proses baru untuk kemudahan pekerjaan & mendukung diversifikasi usaha.

Mindset to always innovate is imprinted to create new products and process and for ease of work and support business diversification.

INOVASI
Innovation

IDENTITAS & RIWAYAT HIDUP SINGKAT DEWAN KOMISARIS

Board Of Commissioners' Profile In Brief



1. Triyogi Yuwono
2. Sam Herodian
3. Katno
4. Sudarso

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Barata Indonesia adalah Komisaris Independen yang diangkat oleh Pemegang Saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang merupakan Komisaris dari pihak luar dimana ada 1(satu) orang atau lebih Komisaris Independen dan 1(satu) orang Komisaris Utusan.

Independent Commissioner

Commissioner of Barata Indonesia is an Independent Commissioner appointed by the Shareholder based on Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (UUPT) which is Commissioner from external party where there are 1 (one) person or more Independent Commissioner and 1 (one) Commissioner Deputy.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris Pada awal tahun 2016 komposisi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Triyogi Yuwono	: Komisaris Utama
2. Katno	: Komisaris Independen
3. Sam Herodian	: Komisaris
4. Sudarso	: Komisaris

Board of Commissioners Composition

Composition of the Board of Commissioners At the beginning of 2016 the composition of the Board of Commissioners was as follows:

1. Triyogi Yuwono	: President Commissioner
2. Katno	: Independent Commissioner
3. Sam Herodian	: Commissioner
4. Sudarso	: Commissioner



TRI YOGI YUWONO
KOMISARIS UTAMA
President Commissioner

Warga Negara Indonesia, lahir di Tulungagung, 29 Januari 1960. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri (FTI)- Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya dan gelar Diplôme d'Étude Approfondies (DEA) serta juga gelar Docteur en Mécanique dari École nationale Supérieure d'Hydraulique et de Mécanique de Grenoble (ENSHMG) pada Institute National Polytechnique de Grenoble (INPG) Prancis. Beliau diangkat menjadi Komisaris PT Barata Indonesia (Persero) sejak tahun 2015. Awal karir beliau dimulai saat menjadi Staf Pengajar Jurusan Teknik Mesin FTI-ITS-Surabaya, hingga sekarang. Beliau juga termasuk dalam jajaran serta Staf Pengajar Program Pasca Sarjana, Jurusan Teknik Mesin FTI-ITS pada tahun 1995 – sekarang. Namun dalam rentang waktu tersebut, pria asal Tulungagung tersebut menjabat posisi penting mulai dari, Koordinator Bidang Studi Konversi Energi, Jurusan Teknik Mesin FTI-ITS pada tahun 1994-1996, Koordinator Bidang Keahlian Teknologi Energi, Program Pasca Sarjana-Jurusan Teknik Mesin FTI-ITS 1995 – 1996, serta sebagai Ketua Jurusan Teknik Mesin FTI-ITS pada tahun 1996 – 1999 dan 1999-2003. Pada 2003-2007 beliau menduduki jabatan sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri - ITS, sebelum akhirnya terpilih sebagai Rektor ITS - Surabaya pada 2011-2015. Saat ini beliau juga tercatat sebagai Anggota Dewan Riset Nasional untuk periode tahun 2015-2018 dan 2019-2022.

Indonesian citizen, born in Tulungagung, January 29, 1960. He obtained Bachelor of Mechanical Engineering from Faculty of Industrial Technology (FTI) - Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS), Surabaya and Diplôme d'Étude Approfondies (DEA) as well as Docteur en Mécanique from École Nationale Supérieure d'Hydraulique et de Mécanique de Grenoble (ENSHMG) Institute National Polytechnique de Grenoble (INPG) France. He was appointed as Commissioner of PT Barata Indonesia (Persero) since 2015. His career began as Teaching Staff of Mechanical Engineering Department of FTI-ITS-Surabaya, until now. He is also served as teaching staff of the Postgraduate Program, FTI-ITS Mechanical Engineering Department in 1995 - present. But during that time, he served in various important positions such as, Coordinator of Energy Conversion Study, Mechanical Engineering Department of FTI-ITS in 1994-1996, Coordinator of Energy Technology Expertise, Post-Graduate Program-Mechanical Engineering Department of FTI-ITS 1995 - 1996, and as Chair of Mechanical Engineering Department of FTI-ITS in 1996 - 1999 and 1999-2003. In 2003-2007 he served as Dean of Faculty of Industrial Technology - ITS, before finally elected Chancellor of ITS - Surabaya in 2011-2015. Currently he is also a member of the National Research Council for the period 2015-2018 and 2019-2022.



KATNO
KOMISARIS INDEPENDEN
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, 13 November 1971. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Beliau diangkat sebagai Komisaris PT Barata Indonesia (Persero) sejak tahun 2014. Awal karir beliau dimulai sejak menjabat sebagai Pengawas di PNPM Mandiri, pada tahun 2004 hingga tahun 2008 dan sebagai Pengadaan Administrasi Umum (Kepegawaian) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan II Surabaya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2008–2009. Kemudian pada tahun 2010 Beliau menjabat sebagai Pengadministrasi Umum (Pengadaan) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan II Surabaya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun 2011–2012 Beliau menjabat sebagai Pengadministrasi Umum (Peralatan) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian pada tahun 2013 Beliau menjabat sebagai Pengelola Barang Milik Negara Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan II Surabaya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan sebagai Pengadministrasi Teknik Pengawasan Dan Pelaksanaan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan II Surabaya, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat pada tahun 2014, sebelum akhirnya Beliau ditunjuk sebagai Pengadministrasi Teknik Perencanaan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan II Surabaya, Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat di tahun 2015.

Indonesian citizen, born in Surabaya, November 13th, 1971. He obtained his degree in Mechanical Engineering from the University of 17 August Surabaya. He was appointed as one of the Commissioners of PT Barata Indonesia (Persero) since 2014. His career started since he served as a Supervisor at PNPM Mandiri, from 2004 to 2008 and as a Procurement of Public Administration (Personnel) of Metropolitan II National Road Implementation Work Unit Surabaya, Ministry of Public Works and People's Housing in 2008-2009. Then in 2010 he served as a General Administration (Procurement) of Metropolitan II National Road Implementation Work Unit Surabaya, Ministry of Public Works and Public Housing. In 2011-2012 he served as a General Administrator (Equipment) Central to the Implementation of National Road V, Ministry of Public Works and Public Housing. Then in 2013 he served as a State Property Manager of the Implementation of Metropolitan II National Road Surabaya, Ministry of Public Works and People's Housing, and as a Technical Superintendent of Implementation Work Unit and Implementation of Metropolitan II National Road Surabaya, Ministry of Public Works and Public Housing in 2014, before finally he was appointed as an Administrator of Planning Technique Implementing Work Unit of Metropolitan II National Road Surabaya, Ministry of Public Works and Public Housing in 2015.



SUDARSO
KOMISARIS
Commissioner

Warga Negara Indonesia, lahir di Sumenep, 16 Agustus 1968. Beliau memperoleh gelar Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara-Kementerian Keuangan, Jakarta. Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara-Kementerian Keuangan, Jakarta. Magister Manajemen Universitas Krisnadwipayana, Jakarta. Sebelum menjabat sebagai Komisaris di PT Barata Indonesia (Persero), Beliau sudah aktif sebagai Pelaksana pada Kantor Tata Usaha Anggaran, Medan hingga 1991, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pacitan hingga 2008. Kepala Subdirektorat Kebijakan dan Standardisasi Teknis, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum hingga 2009. Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo hingga 2013 dan kemudian menjadi PLT. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo di tahun 2013. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov Sumatera Selatan hingga 2015, dan Direktur Sistem Perbendaharaan hingga 2018. Setelah periode tersebut, Pemegang Saham BUMN mempercayai beliau untuk juga menjadi Komisaris PT Barata Indonesia (Persero) guna memberikan masukan & pengawasan atas kinerja PT Barata Indonesia (Persero) dari tahun 2018 hingga sekarang.

Indonesian citizen, born in Sumenep, August 16, 1968. He obtained Diploma III from State College of Accounting, Ministry of Finance, Jakarta. Diploma IV from State College of Accounting-Ministry of Finance, Jakarta. Master of Management from Krisnadwipayana University, Jakarta. Prior his appointment as Commissioner at PT Barata Indonesia (Persero), he had been active as an Executor at Budget Administration Office, Medan until 1991, Head of Pacitan State Treasury Service Office until 2008. Head of Subdirector of Policy and Technical Standardization, Directorate of Financial Management of Public Service Agencies until 2009. Head of KPPN Supervision and Internal Compliance, of Directorate General of Treasury of Gorontalo Province Regional Office until 2013 and later became PLT. Head of Directorate General of Treasury of Gorontalo Province Regional Office in 2013. Head of Directorate General of Treasury of South Sumatra Province Regional Office until 2015, and Director of the Treasury System until 2018. After this period, SOEs Shareholders appointed him as Commissioner of PT Barata Indonesia (Persero) to provide input & supervision on the PT Barata Indonesia (Persero) performance from 2018 to the present.



SAM HERODIAN
KOMISARIS
Commissioner

Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon, 29 Mei 1962. Beliau memperoleh gelar Sarjana Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Bidang Mekanisasi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Pelatihan di University of Tokyo Labor Science (Human Factor Engineering), Master - Fakultas Teknologi Pertanian - IPB Bidang Keteknikan Pertanian, dan Doktor - Tokyo University of Agriculture and Technology Labor Science. Sebelum menjabat sebagai Komisaris di PT Barata Indonesia (Persero), Beliau sudah aktif di Kementerian Pertanian RI sejak tahun 2015. Atas prestasi kinerja beliau maka beberapa posisi strategis telah diemban sejak 2000-2015 yaitu Ketua Jurusan Mekanisasi Pertanian Fateta-IPB, Wakil Dekan Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Ketua Laboratorium Ergonomika Fateta-IPB, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Tim Pakar UPSUS Kementan/Staf Khusus Menteri. Setelah periode tersebut, Pemegang Saham BUMN mempercayai beliau untuk juga menjadi Komisaris PT Barata Indonesia (Persero) guna memberikan masukan & pengawasan atas kinerja PT Barata Indonesia (Persero) dari tahun 2018 hingga sekarang.

Indonesian citizen, born in Cirebon, May 29, 1962. He obtained Bachelor's degree in Agriculture from the Faculty of Agricultural Technology in the Field of Agricultural Mechanization, Bogor Agricultural University. Training at the University of Tokyo Labor Science (Human Factor Engineering), Masters - Faculty of Agricultural Technology - IPB in Agricultural Engineering, and Doctorate - Tokyo University of Agriculture and Technology Labor Science. Before serving as Commissioner at PT Barata Indonesia (Persero), he has been active in the Indonesian Ministry of Agriculture since 2015. For his performance achievements, he has been served in various strategic positions since 2000-2015, such as Chair of the Agriculture Mechanization Department Fateta-IPB, Deputy Dean of Faculty of Technology IPB Agriculture, Chair of Fateta-IPB Ergonomics Laboratory, Dean of Faculty of Agricultural Technology- IPB, Expert Team UPSUS Minister Special Staff. After this period, SOEs Shareholders appointed him to be Commissioner of PT Barata Indonesia (Persero) to provide input & supervision on PT Barata Indonesia (Persero) performance from 2018 up to present.

PEMBAGIAN TUGAS

Jajaran Dewan Komisaris telah melakukan pembagian tugas pengawasan sebagai berikut :

1. Triyogi Yuwono selaku Komisaris Utama bertugas melakukan koordinasi antar Komisaris dan melakukan pengawasan menyeluruh atas aktifitas Direksi
2. Katno selaku Komisaris Independen melakukan tugas pengawasan juga mengetuai Komite Manajemen Risiko
3. Sam Herodian selaku Komisaris melakukan tugas pengawasan juga mengetuai Komite Audit
4. Adriansyah sebagai Komisaris melakukan tugas pengawasan menyeluruh atas aktifitas Direksi.

REMUNERASI

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kewenangan Pemegang Saham dan ditetapkan dalam RUPS yang formulasinya berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER- 01/MBU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permen BUMN Nomor : PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, Keputusan Menteri BUMN No. SK-122/MBU/06/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN Tahun 2017 serta berdasarkan keputusan agenda ke-5 RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 PT Barata Indonesia (Persero) tanggal 17 Mei 2017.

Adapun secara garis besar, aturan pengganjian Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direksi.

Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama.

Duties Division

The Board of Commissioners has supervisory duties division as follows:

1. *Triyogi Yuwono as the President Commissioner has the duty to coordinate among Commissioners and conduct thorough supervision of the activities of the Board of Directors*
2. *Katno as the Independent Commissioner conducts supervisory duties as well as chairs Risk Management Committee*
3. *Sam Herodian as Commissioner conducts supervisory duties and chairs Audit Committee*
4. *Adriansyah as Commissioner conducts thorough supervisory duties on the Board of Directors activities.*

Remuneration

The determination of the Board of Commissioners and Directors Remuneration shall be the authority of Shareholders and Determined in the General Meeting of Shareholders of the Republic of Indonesia based on the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01 / MBU / 06/2017 dated June 20th, 2017 regarding Second Amendment to Minister of SOEs Regulation Number PER-04 / MBU / 2014 regarding the Board of Directors, Commissioners and the Supervisory Board of SOEs salary, Minister of State-Owned Enterprises Decree No. SK-122/MBU/06/2017 dated June 21, 2017 regarding the Board of Directors, Commissioners and the Supervisory Board salary of 2017 SOEs also based on the decision of the 5th agenda of PT Barata Indonesia (Persero) 2016 Annual GMS dated May 17, 2017.

Generally, the Board of Commissioners salary is as follows:

President Commissioner is 45% of Board of Directors salaries. Commissioner is 90% of the salary of the President Commissioner.

IDENTITAS DAN RIWAYAT HIDUP DIREKSI

Identity And Brief Curriculum Vitae Of Board Of Directors



1. Oksarlidady Arifin
2. Yoyok Hadi Satriyono
3. Tony Budi Santosa
4. Bobby Sumardiat Atmosudirjo

Jajaran Direksi sesuai SK Menteri BUMN No.SK-305/MBU/12/2018 tanggal 19 Desember 2018 menjadi sebagai berikut:

1. Oksarlidady Arifin	: Direktur Utama
2. Yoyok Hadi Satriyono	: Direktur Keuangan dan SDM
3. Tony Budi Santosa	: Direktur Pemasaran
4. Bobby Sumardiat Atmosudirjo	: Direktur Operasi

The Board of Directors composition according to SOE Minister's Decree No. SK-305 / MBU /12/2018 dated December 19, 2018 are as follows:

1. Oksarlidady Arifin	: President Director
2. Yoyok Hadi Satriyono	: Finance and Human Capital Director
3. Tony Budi Santosa	: Marketing Director
4. Bobby Sumardiat Atmosudirjo	: Operation Director



OKSARLIDADY ARIFIN
DIREKTUR UTAMA
President Director

Oksarlidady Arifin, menjabat sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero) sejak Desember 2018 dan sebelumnya juga ditugaskan di posisi Direktur Operasi di PT WIKA Industri & Konstruksi. Sebagai pemimpin strategis, Oksarlidady melakukan konsolidasi permasalahan perusahaan dan meresponnya dengan melakukan transformasi korporasi secara komprehensif dan melakukan pengendalian di segala bidang. Berlatarbelakang Sarjana Teknik Mesin Universitas Trisakti, Oksarlidady pun menambah pengetahuan di bidang ekonomi dengan menyelesaikan program Magister Manajemen di Universitas BINUS. Oksarlidady juga pernah tercatat menduduki jabatan strategis di perusahaan publik dengan menjadi Project Manager di beberapa project lalu menjadi General Manager Marketing, General Manager Division hingga menjadi Direktur Operasi di PT WIKA Industri & Konstruksi. Berbekal pengalaman yang sangat variatif tersebut, pada akhir tahun 2018 Menteri BUMN Rini M. Soemarno mempercayakan Oksarlidady untuk memimpin PT Barata Indonesia (Persero) hingga saat ini.

Oksarlidady Arifin, served as President Director of PT Barata Indonesia (Persero) since December 2018 and previously served as Director of Operations at PT WIKA Industry & Construction. As a strategic leader, Oksarlidady consolidated the company's problems and responded by making comprehensive corporate transformation and control in all fields. With a background as a Bachelor of Mechanical Engineering at Trisakti University, Oksarlidady also obtained degree in economics by completing a Masters in Management program at BINUS University. Oksarlidady also been served in several strategic position in a public company, as a Project Manager in several projects and as General Manager of Marketing, Division General Manager until his appointment as Director of Operations at PT WIKA Industry & Construction. With these experiences, at the end of 2018 SOEs Minister Rini M. Soemarno appointed Oksarlidady to lead PT Barata Indonesia (Persero) up to the present.



YOYOK HADI SATRIYONO
DIREKTUR KEUANGAN
DAN SDM
*Finance and Human Capital
Director*

Warga Negara Indonesia, lahir di Jepara, 02 September 1963. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Diponegoro Semarang dan Magister Management STIE IPWIJA Jakarta. Beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM PT Barata Indonesia (Persero) sejak tahun 2014. Sebelum ditugaskan di PT Barata Indonesia (Persero), beliau telah lebih dulu berkarya di PT Wijaya Karya (Persero) sejak tahun 1988. Serangkaian jabatan di bidang Keuangan telah diemban beliau baik di PT Wijaya Karya maupun di anak perusahaannya, PT WIKA Intrade. Namun demikian beliau juga bertugas diluar bidang keuangan pada tahun 2010-2011, yaitu memimpin Departemen Pengembangan Usaha PT Wika Intrade. Setelah menjabat beberapa posisi penting tersebut, maka kemudian Pemegang Saham BUMN mempercayai beliau untuk menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Barata Indonesia (Persero) sejak bulan Oktober 2014 hingga saat ini.

Indonesian citizen, born in Jepara, September 2, 1963. He obtained Bachelor of Economics in Management from Diponegoro University Semarang and Master of Management from STIE IPWIJA Jakarta. He served as Director of Finance and HR at PT Barata Indonesia (Persero) since 2014. Before assigned to PT Barata Indonesia (Persero), he previously worked at PT Wijaya Karya (Persero) since 1988. He has been served in various positions in finance both at PT Wijaya Karya and in its subsidiary, PT WIKA Intrade. However, he also served outside finance in 2010-2011, namely leading Business Development Department of PT Wika Intrade. After serving several important positions, SOEs Shareholder entrusted him to serve as Director of Finance and Human Resources of PT Barata Indonesia (Persero) since October 2014 up to present



BOBBY SUMARDIAT
ATMOSUDIRJO
DIREKTUR OPERASI
Operation Director

Warga Negara Indonesia, lahir di Pangkalan Pinang, 21 September 1965. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Mekanikal Enjineri Institut Teknik Bandung. Beliau menjabat sebagai Direktur Operasi PT Barata Indonesia (Persero) sejak tahun 2018. Sebelum ditugaskan di PT Barata Indonesia (Persero), beliau telah lebih dulu berkarya di PT PINDAD (Persero) sejak tahun 2014. Serangkaian jabatan telah diemban beliau baik di PT PINDAD maupun di perusahaan lain yaitu, PT Petrosea Tbk. lalu PT Chonocophilips Indonesia, PT Petrokimia Nusantara Interindo dan PT Krakatau Engineering Corporation, maka kemudian Pemegang Saham BUMN mempercayai beliau untuk menjabat sebagai Direktur Operasi PT Barata Indonesia (Persero) sejak bulan Januari 2018 hingga saat ini.

Indonesian citizen, born in Pangkalan Pinang, September 21, 1965. He obtained Bachelor degree in Mechanical Engineering from Institute of Technology Bandung. He served as Director of Operations at PT Barata Indonesia (Persero) since 2018. Before assigned to PT Barata Indonesia (Persero), he worked at PT PINDAD (Persero) since 2014. He had served a series of positions at PT PINDAD and in other companies, namely, PT Petrosea Tbk. then PT Chonocophilips Indonesia, PT Petrokimia Nusantara Interindo and PT Krakatau Engineering Corporation, SOEs Shareholders entrust him to serve as Director of Operations of PT Barata Indonesia (Persero) from January 2018 to the present.



TONY BUDI SANTOSA
DIREKTUR PEMASARAN
Marketing Director

Warga Negara Indonesia, lahir di Madiun, 11 Desember 1967. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin FTI-ITS, Surabaya tahun 1993. Beliau menjabat sebagai Direktur Operasi dan Pemasaran PT Barata Indonesia (Persero) sejak tahun 2014. Pada tahun 1994 – 1996 beliau memulai karir di PT Barata Indonesia (Persero) Unit Usaha Mandiri (UUM) Bandung sebagai Staff Kepala Pabrik, kemudian pada tahun 1996 – 1997 Beliau menjadi Pjs. Kabag. PPP di UUM Bandung, yang kemudian naik jabatan menjadi Kabag. PPP di UUM Bandung pada tahun 1997 – 1999, pada tahun 1999 – 2000 Beliau bekerja sebagai Supervisor Pengendalian Produksi, Divisi PITA, hingga pada tahun 2000 – 2001 Beliau menduduki posisi sebagai Pjs. Manager Produksi Divisi PITA, dan menjadi Manager Produksi di Divisi PITA pada tahun 2001 – 2002, Beliau menjadi Deputy General Manager UUM Medan tahun 2002, dan menjadi Pjs. General Manager UMM Medan tahun 2002 – 2005, serta Pjs. General Manager UUM Bandung tahun 2005, dan menjadi General Manager UUM Bandung, pada tahun 2005–2008, di tahun yang sama Beliau menjadi Staff Ahli Direktur Utama, serta menjadi Kepala Devisi Produksi Peralatan Jalan pada tahun 2008 – 2009, kemudian Beliau menjadi General Manager UUM Tegal pada tahun 2009 – 2012, menjadi Direktur Keuangan dan SDM pada tahun 2012 – 2014.

Indonesian citizen, born in Madiun, December 11, 1967. He obtained his Bachelor's degree in Mechanical Engineering FTI-ITS, Surabaya in 1993. He served as Director of Operations and Marketing of PT Barata Indonesia (Persero) since 2014. In 1994 - 1996 he started his career at PT Barata Indonesia (Persero) Mandiri Business Unit (UUM) Bandung as Factory Chief Staff, in 1996-1997 he became Acting Officer. Head of Section PPP at UUM Bandung, which later rose to the position of Head of Section. PPP at UUM Bandung in 1997 - 1999, in 1999 - 2000 He worked as Production Control Supervisor, PITA Division, until 2000 - 2001 he served as Acting Officer. Production Manager of the PITA Division, and Production Manager in the PITA Division in 2001 - 2002, he became Deputy General Manager of UUM Medan in 2002, and as Acting Officer. UUM Medan General Manager 2002 - 2005, and Acting The General Manager of UUM Bandung in 2005, and as General Manager of UUM Bandung, in 2005-2008, in the same year He served as Expert Staff of the President Director, and served as Head of the Road Equipment Production Division in 2008 - 2009, then he served as General Manager of UUM Tegal in 2009 - 2012, and as Director of Finance and HR in 2012 - 2014.

PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, telah dilakukan pembagian tugas Direksi sebagai berikut :

1. Oksarlidady Arifin selaku Direktur Utama melakukan pengendalian menyeluruh atas aktivitas Perusahaan
2. Tonny Budi Santosa selaku Direktur Pemasaran melakukan pengaturan dan pengendalian bidang Pemasaran
3. Yoyok Hadi Satriyono selaku Direktur Keuangan Dan Sumber Daya Manusia melakukan pengaturan dan pengendalian bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
4. Bobby Sumardiat Atmosudiro selaku Direktur Operasi melakukan pengaturan serta pengendalian bidang Produksi dan Operasi .

REMUNERASI

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kewenangan Pemegang Saham dan ditetapkan dalam RUPS yang formulasinya berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER- 01/MBU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permen BUMN Nomor : PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, Keputusan Menteri BUMN No. SK-122/MBU/06/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN Tahun 2017 serta berdasarkan keputusan agenda ke-5 RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 PT Barata Indonesia (Persero) tanggal 17 Mei 2017.

Adapun secara garis besar, aturan pengganjian Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama.
Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama.
Direktur Utama, gaji ditentukan dalam SR-77 / D3.MBU/06/2016 tanggal 22 Juni 2017.
Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia sebesar 90% dari gaji Direktur Utama.
Direktur Operasi sebesar 90% dari gaji Direktur Utama.

Direktur Pemasaran sebesar 90% dari gaji Direktur Utama.

Division of Duties of Directors

In conducting duties, the Board of Directors has duties divisions as follows:

1. *Oksarlidady Arifin as President Director conducted thorough control over the Company's activities.*
2. *Tonny Budi Santosa as Director of Marketing manages and controls Marketing scope.*
3. *Yoyok Hadi Satriyono as Director of Finance and Human Resources manages and controls Finance and Human Resources scopes.*
4. *Bobby Sumardiat Atmosudiro as Operational Director manages and controls Production and Operational scope.*

Remuneration

The determination of the Board of Commissioners and Directors Remuneration shall be the authority of Shareholders and Determined in the General Meeting of Shareholders of the Republic of Indonesia based on the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01 / MBU / 06/2017 dated June 20th, 2017 regarding Second Amendment to Minister of SOEs Regulation Number PER-04 / MBU / 2014 regarding the Board of Directors, Commissioners and the Supervisory Board of SOEs salary, Minister of State-Owned Enterprises Decree No. SK-122/MBU/06/2017 dated June 21, 2017 regarding the Board of Directors, Commissioners and the Supervisory Board salary of 2017 SOEs also based on the decision of the 5th agenda of PT Barata Indonesia (Persero) 2016 Annual GMS dated May 17, 2017.

Generally, the Board of Commisioners and Directors salary is as follows:

President Commissioner's salary is 45% of President Director. Commissioners' salary are 90% of President Commissioner. President Director's salary is determined in SR-77 / D3.MBU /06/2016 dated June 22, 2017. Director of Finance & Human Resources is 90% of the salary of the President Director. Director of Operations is 90% of the salary of the President Director. Marketing Director is 90% of the salary of the President Director.

PROFIL ESELON I Echelon I Profile



RUSHADI
KEPALA SATUAN
PENGAWASAN INTERN (SPI)
Head of Internal Audit (SPI)

Lahir di Magetan, Jawa Tengah pada tanggal 10 Oktober 1962, memulai karir di PT Barata Indonesia (Persero) sebagai Staf Direktorat Keuangan pada tahun 1988, dan pada tahun 2004 diangkat menjadi Manajer Admikum Divisi EPC. Prestasinya dalam menjalankan tugas sebagai Manajer Admikum, membuatnya dipercaya oleh Direksi untuk memimpin Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada tahun 2014 hingga saat ini.

Born in Magetan, Central Java on October 10, 1962, began his career at PT Barata Indonesia (Persero) as Staff of the Directorate of Finance in 1988, and in 2004 he was appointed as Admikum Manager of the EPC Division. His achievements in conducted his duties as an Admikum Manager, made him trusted by the Board of Directors to be the head of Internal Audit Unit (SPI) in 2014 to the present.



HARI SANTOSA
GENERAL MANAGER DIVISI
INDUSTRI KOMPONEN DAN
PERMESINAN
*General Manager Of Industrial
Components And Machinery
Division*

Lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 26 Februari 1963, memulai karir di PT Barata Indonesia (Persero) sebagai Staf Kepala Cabang pada tahun 1988. Dalam kurun waktu hingga tahun 2006 menduduki beberapa posisi teknis di pabrik, terutama di pabrik pengecoran dan pada tahun 2007 diangkat sebagai Kepala Divisi Produksi Pengecoran & Pabrik Industri Agro (PIA). Berangkat dari keahliannya memimpin Bagian Produksi Pabrik Pengecoran dan PIA maka pada tahun 2010 hingga saat ini dipercaya untuk memimpin Divisi Industri yang membawahi 3 (tiga) pabrik, yaitu Pabrik Pengecoran, Pabrik Peralatan Industri Berat dan Pabrik Industri Agro pada posisi General Manager hingga saat ini.

Born in Blitar, East Java on February 26th, 1963, he started his career at PT Barata Indonesia (Persero) as Head of Branch Officer in 1988. In 2006, he held several technical positions at the Company, mainly in foundry and in 2007 was appointed as Head of Production Division of Casting & Manufacture of Agro Industry (PIA). From his expertise in leading Production Division of POLE and PIA Plant, in 2010 up today he is entrusted to lead Industrial Division which oversees 3 (three) factories, namely Foundry, Heavy Equipment Industry and Agro Industrial Factory as General Manager until now.



IMAN REHATSYAH

PROFIL GENERAL MANAGER
DIVISI KOMPONEN TURBIN

*General Manager Of Turbin
Component Division*

Lahir di Yogyakarta, tanggal 5 November 1959. Sebelum bekerja di PT Barata Indonesia (Persero) beliau merupakan karyawan dari PT Siemens Indonesia Pabrik Cilegon dan memulai karir di PT Barata Indonesia (Persero) pada tahun 2018 sebagai General Manager Divisi Komponen Turbin hingga saat ini.

Born in Yogyakarta on November 5, 1959. Before working at PT Barata Indonesia (Persero) he was an employee of PT Siemens Indonesia Cilegon Factory and began his career at PT Barata Indonesia (Persero) in 2018 as General Manager of Turbine Component Division to date.



TOTOK SUHARTONO

PROFIL GENERAL MANAGER
DIVISI INDUSTRI GULA DAN
AGRO

*General Manager of Marketing
Division 2*

Lahir di Jember, Jawa Timur pada tanggal 6 Agustus 1964, memulai karir di PT Barata Indonesia (Persero) sebagai Staf pada Pusat Teknologi tahun 1989, dan pada tahun 2006 diangkat menjadi Manajer Pemasaran Divisi EPC. Selanjutnya Direksi menugaskan memimpin Divisi EPC selama beberapa tahun. Kemudian pada tahun 2015 dipercaya untuk memimpin Divisi Pemasaran dan menjelang akhir tahun 2016 setelah Divisi Pemasaran dipecah menjadi 2 (dua) maka beliau dipercaya untuk mengembangkan Divisi Pemasaran I sebagai *General Manager* dengan target perolehan Kontrak lebih tinggi dibandingkan tahun 2016.

Born in Jember, East Java on August 6th, 1964, started his career at PT Barata Indonesia (Persero) as a Staff at Technology Center in 1989, and in 2006 he was appointed as Marketing Manager of the EPC Division. Furthermore, the Board of Directors commissioned him to lead EPC Division for several years. Then in 2015 he is entrusted to lead Marketing Division and by the end of 2016 after Marketing Division was split into 2 (two) divisions, he was entrusted to develop Marketing Division I as General Manager with higher Contract target compared to 2016.



SINGGIH WIDODO
GENERAL MANAGER DIVISI
MINYAK DAN GAS
*General Manager of Oil and Gas
Division*

Lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 19 Oktober 1967, memulai karir di PT Barata Indonesia (Persero) sebagai staf Kepala Sub Direktorat Manufacturing Engineering pada tahun 1994, dan pada tahun 2010 diangkat menjadi Manajer Pemasaran Produk Pengecoran Komponen KA, Departemen Pemasaran Produk Pengecoran. Karena mempunyai kemampuan dalam bidang pemasaran, Direksi mengangkatnya menjadi General Manager Unit Usaha Mandiri (UUM) Medan pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2016, Direksi menugaskannya menjadi Deputy Manajer Divisi Pengembangan Usaha yang kemudian berubah menjadi Divisi Pemasaran 2. Berkat keahlian beliau, Direksi memberikan tugas untuk memimpin Divisi Minyak dan Gas hingga akhir tahun 2018.

Born in Surabaya, East Java on October 19, 1967, he began his career in PT Barata Indonesia (Persero) as a staff of Sub Directorate of Manufacturing Engineering in 1994, and in 2010 he was appointed as Marketing Manager of KA Component Product Casting, Department of Marketing Product Casting. Because of his marketing skills, the Board of Directors appointed him as General Manager of the Medan Business Unit (UUM) in 2013. In 2016, the Board of Directors assigned him to Deputy Manager of Business Development Division, which later became Marketing Division II.



LUKMAN JAMALUDIN
PROFIL GENERAL MANAGER
DIVISI PEMBANGKIT
*General Manager Of Power Plant
Division*

Lahir di Sumatera Barat pada tanggal 1 Februari 1964. Merupakan Lulusan ITB dan memulai karir di PT Barata Indonesia (Persero) pada tahun 2018 sebagai PJS General Manager Divisi Pembangkit kemudian dipercaya sebagai General Manager Divisi Pembangkit PT Barata Indonesia hingga saat ini.

Born in West Sumatra on February 1, 1964. He graduated from ITB and began his career at PT Barata Indonesia (Persero) in 2018 as the PJS General Manager of the Generating Division and then appointed as General Manager of PT Barata Indonesia's Power Plant Division to date.



CHAINUR FAUZI
PROFIL GENERAL MANAGER
DIVISI SUMBER DAYA AIR
*General Manager Of Water
Resources*

Lahir di Sumenep, Madura pada tanggal 28 April 1964, memulai karir di PT Barata Indonesia (Persero) sebagai Staf Direktorat Produksi pada tahun 1989. Dalam perjalanannya pada tahun 2013 diangkat menjadi Pjs. General Manager Unit Usaha Mandiri (UUM) Tegal yang bergerak khusus di bidang Hidromekanikal. Berkat prestasinya kemudian dipercaya untuk memimpin Cabang Tegal sejak tahun 2015 hingga akhir tahun 2016.

Berkat keahlian beliau memimpin Cabang Tegal, Direksi memberikan tugas untuk kepada beliau untuk memimpin Divisi Area membawahi 3 (tiga) cabang, Cabang Medan, Cabang Tegal, dan Cabang Cilegon hingga akhir 2017. Kemudian pada tahun 2018, Direksi menugaskan beliau menjadi General Manager Sumber Daya Air.

Born in Sumenep, Madura on April 28, 1964, he started his career at PT Barata Indonesia (Persero) as Staff of Directorate of Production in 1989. In his journey in 2013, he was appointed as Pjs. General Manager of Independent Business Unit (UUM) Tegal specializing in Hydromechanical field. He is appointed to lead Tegal Subsidiary from 2015 until the end of 2016.

Due to his expertise in leading Tegal Branch, the Board of Directors assigned to him to lead the Area Division in charge of 3 (three) subsidiaries such as Medan, Tegal and Cilegon up to end of 2017. In 2018, the Board of Directors appointed him as General Manager of Water Resources



SETIYO PURNOMO
GENERAL MANAGER
DIVISI KONSTRUKSI
*General Manager of
Construction Division*

Lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 24 Pebruari 1966, memulai karir di PT Barata Indonesia (Persero) sebagai Staf Kepala Sub Direktorat Maintenance pada tahun 1994, dan hingga akhir tahun 2005 terus dikonsentrasikan untuk menangani tugas-tugas di seputar produksi. Kemudian tahun 2006 dipercaya menjadi Manajer Produksi. Karena kemampuannya beliau dipercaya Direksi menjabat sebagai General Manager Divisi Konstruksi yang pada dasarnya menangani order-order proyek konstruksi berbasis *engineering* (Proyek EPC).

Born in Malang, East Java on February 24th, 1966, he started his career in PT Barata Indonesia (Persero) as Staff of the Sub Directorate of Maintenance in 1994, and until the end of 2005 continued to concentrate on handling duties around production. Then in 2006 he was entrusted to be a Production Manager. Due to his ability, he is trusted by the Board of Directors to serve as General Manager of the Construction Division which essentially handles engineering-based construction project orders (EPC Project).



SUHARIYONO

MANAGER ENJINIRING,
MUTU & K3LH

*General Manager of
Engineering, Quality & K3LH*

Lahir di Lumajang, 08 Juli 1965, memulai karir di PT Barata Indonesia (Persero) sebagai staff Biro Teknologi, Pusat Teknologi tahun 1990 dan pada tahun 2007 diangkat menjadi Manajer Pemasaran Divisi EPC. Karir lulusan Pasca Sarjana ITB ini terus meningkat terbukti dengan beberapa kali diberi kepercayaan untuk memegang beberapa Departemen dan terakhir diangkat sebagai General Manajer Enjiniring, Mutu & K3LH pada tahun 2018.

Born in Lumajang, July 08, 1965, started his career in PT Barata Indonesia (Persero) as a Technology Bureau staff; Technology Center in 1990 and in 2007 was appointed as Marketing Manager of EPC Division. Graduated from Postgraduate ITB, his career continues to rise proven by several times given the trust to hold several Departments until he was appointed as General Manager of Engineering, Quality & K3LH in 2018.



SAKTI WAHYOKO

MANAGER BIRO
PENGADAAN

*Procurement Bureau
Manager*

Lahir di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 23 Nopember 1966, memulai karir di PT Barata Indonesia (Persero) sebagai staf Kantor Cabang pada tahun 1992, dan pada tahun 2009 diangkat menjadi Manajer Produksi Seri, Divisi Produksi Pengecoran. Kemampuannya dalam hal mengelola kebutuhan pengadaan telah ditunjukkan pada saat ditugaskan di Divisi dan pada puncaknya di saat ditugaskan bergabung dalam proyek PLTU NTB 2x25 MW. Maka pada akhir tahun 2015 dipercaya untuk memimpin Biro Pengadaan hingga akhir tahun 2018.

Born in Kediri, East Java on November 23rd, 1966, started his career at PT Barata Indonesia (Persero) as a Branch Office staff in 1992 and in 2009 was appointed as Series Production Manager, Production Division of Casting. His skills to manage procurement needs has been demonstrated when he was assigned to the Division and at its peak when he was assigned to join the 2x25 MW NTB power plant project. By the end of 2015 he was appointed to lead the Procurement Bureau up to the end of 2017.



BUSTOMEK

MANAGER BIRO SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM)

*Human Resources (Hr) Bureau
Manager*

Lahir di Bangkalan, Jawa Timur pada tanggal 10 Juli 1968, memulai karir di PT Barata Indonesia (Persero) sebagai Staf Pusat Peningkatan Pengendalian Kualitas pada tahun 1994, dan pada tahun 2015 diangkat menjadi Manajer Sistem Manajemen Mutu dan IT, Biro Sistem Manajemen. Pada tahun 2015 hingga saat ini menjabat sebagai Manajemen Biro Sumber Daya Manusia (SDM).

Born in Bangkalan, East Java on July 10th, 1968, started his career in PT Barata Indonesia (Persero) as a Staff of Quality Control Improvement Center in 1994 and in 2015 was appointed as a Quality Management System Manager and IT Management System Bureau. In 2015 until now served as Human Resources Management Bureau (HR).



SARI SUTJAHJANI

PROFIL SEKRETARIS
PERUSAHAAN

Corporate Secretary Profile

Lahir di Bondowoso, Jawa Timur pada tanggal 26 Agustus 1968, memulai karir di PT Barata Indonesia (Persero) sebagai Sekretaris pada tahun 2000. Kemudian menjadi staf Pemasaran Alat Berat pada tahun 2013 dan kemudian ditugaskan memimpin Kantor Jakarta pada tahun 2007 hingga awal 2015. Karirnya berlanjut dengan penugasan sebagai Sekretaris Perusahaan sejak awal 2015 dan tetap menduduki posisi yang sama pada akhir tahun 2018.

Born in Bondowoso, East Java on August 26th, 1968, began her career at PT Barata Indonesia (Persero) as Secretary in 2000. Later, she became Heavy Equipment Marketing staff in 2013 and subsequently appointed to be the head of Jakarta Office from 2007 to early 2015. Her career continues with the assignment as Corporate Secretary since early 2015 and remains in the same position by the end of 2018.



A ZAINAL ARIFIN
MANAGER BIRO KEUANGAN &
AKUNTANSI
Financial & Accounting Manager

Lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 20 Maret 1962, memulai karir di PT Barata Indonesia (Persero) sebagai Staf Audit SPI pada tahun 1987. Pengalaman beliau pada bidang Auditor dari tahun 1988 sampai dengan 1998 membawa beliau untuk memimpin Administrasi Keuangan pada Unit Usaha Mandiri Medan sampai tahun 2003 lalu pindah di Unit Usaha Mandiri Cilegon sampai dengan tahun 2008. Pada tahun 2009 beliau menjadi Manajer Akuntansi pada Departemen Akuntansi, karena perubahan organisasi pada tahun 2015 jabatan beliau diganti menjadi Manajer Akuntansi & Pajak pada Biro Keuangan & Akuntansi, pada tahun yang sama beliau ditugaskan menjadi Manajer Keuangan. Karena pengalaman beliau, Direksi mempercayakan jabatan Manajer Biro Keuangan & Akuntansi pada tahun 2017.

Born in Blitar, East Java on March 20, 1962, he began his career in PT Barata Indonesia (Persero) as Audit Staff of SPI in 1987. His experience in the Auditor field from 1988 to 1998 brought him to lead the Financial Administration of the Independent Business Unit Medan until 2003 then moved to Cilegon Independent Business Unit until 2008. In 2009, he was appointed as Accounting Manager at Accounting Department, due to organizational change in 2015 he changed his position to Accounting & Tax Manager at Finance & Accounting Bureau, in the year as he was appointed as Finance Manager. Because of his experiences, the Board of Directors appointed him as Manager of Finance & Accounting Bureau in 2017.



DJARNOADRIJANTO
PROFIL MANAGER BIRO
SISTEM MANAJEMEN,
RISIKO & INFORMASI
*Management, Risk &
Information Systems Bureau.*

Lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 2 Juli 1966, memulai karir di PT Barata Indonesia (Persero) sebagai Staf Biro Teknik Peralatan Industri pada tahun 1990, dan pada tahun 2010 diangkat menjadi Kepala Departemen Pengembangan Usaha. Setelah era tersebut sempat menduduki beberapa posisi lain diantaranya sebagai Sekretaris Perusahaan, Manajer Estimator, dan Manajer Biro Sistem Manajemen. Dan pada awal tahun 2017 menjabat sebagai Manajer Biro Pengendalian & Risiko. Kemudian pada tahun 2018 beliau memimpin Biro Sistem Manajemen, Risiko & Informasi.

Born in Malang, East Java on July 2, 1966, he started his career in PT Barata Indonesia (Persero) as a Staff of Industrial Equipment Engineering Bureau in 1990, and in 2010, he was appointed as Head of Business Development Department. Then he served in several other positions including as Corporate Secretary, Estimator Manager, and Head of Management System Bureau. And in early 2017, he served as Manager of Control & Risk Bureau. In 2018 he was appointed to lead Management, Risk & Information Systems Bureau.



SULISTYO HANDOKO

PROFIL MANAGER BIRO
PENGEMBANGAN USAHA

*Bureau Manager Profile Business
Development*

Lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 28 Februari 1969, Karir beliau berawal dari Staff Pustek pada tahun 1993 hingga tahun 1996, pada tahun 1997 beliau ditugaskan menjadi Design Engineer pada Departemen Pengembangan Teknologi. Berkat keahlian beliau yang juga sempat menjabat sebagai Sales Engineer dan juga Estimator pada Pemasaran Produk Cor (Foundry) maka pada tahun 2011 beliau ditugaskan memimpin di Bagian Enjiniring pada Divisi EPC. Di tahun 2015 bersama Divisi Konstruksi beliau menjabat sebagai Manajer Proyek. Beliau juga pernah menjabat sebagai Manajer Estimasi & Manajer Pemasaran Industri Pembangkit, pada tahun 2017 beliau ditugaskan memimpin Biro Pengembangan Usaha.

Born in Bandung, West Java on February 28, 1969, his began his career from Pustek Staff from 1993 to 1996. In 1997, he was assigned to Design Engineer at the Department of Technology Development. Due to his expertise who also served as Sales Engineer and also Estimator on Foundry Product Marketing. Then in 2011 he was appointed to lead in Engineering of EPC Division. In 2015, with the Construction Division, he served as Project Manager. He also served as Estimation & Marketing Manager of Generating Industry. In 2017, he was assigned to lead the Bureau of Business Development.



WIRATMOKO

SEKRETARIS DEWAN
KOMISARIS

Commissioner Secretary

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 28 Maret 1960. Beliau memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara dari STIA LAN Jakarta pada tahun 1996 dan Magister Manajemen dari STIE IPWI Jakarta pada tahun 2000. Beliau diangkat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Barata Indonesia (Persero) sejak tahun 2018. Awal karir beliau dimulai sejak menjabat sebagai Staf Tata Usaha Dit. Persero & BUN tahun 1984 –1987, pada tahun 1987-1991 sebagai Staf pada Subdit Perusahaan Jasa Umum, Staf Subdit Perencanaan pada tahun 1991-1998. Kemudian pada tahun 1999-2000 Beliau menjabat sebagai Staf Subdit Peraturan BUMN, Staf Setditjen Pembinaan BUMN tahun 2000–2001, Beliau menjabat sebagai Staf Direktur Persh Perjan dan Perum pada tahun 2001-2002, Kasubbid - Asdep Perbankan tahun 2004-2010, Kasubbid – Asdep ISM III tahun 2011-2014, Kasubbid – Asdep PISM2 tahun 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017-2018 Beliau menjabat sebagai Kasubbid PISM2 Kementerian BUMN RI.

Indonesian citizen, born in Jakarta, March 28, 1960. He obtained Bachelor of State Administration from STIA LAN Jakarta in 1996 and Master in Management from STIE IPWI Jakarta in 2000. He was appointed as Board of Commissioners Secretary of PT Barata Indonesia (Persero) since 2018. His early career began when he served as Administrative Staff of Dit. Persero & BUN from 1984 to 1987, as a Staff in the Subdit of Public Service Companies in 1987-1991, Staff of Planning Subdistrict in 1991-1998. Then in 1999-2000 he served as Staff of the BUMN Regulations Subdit, Staff of Directorate General of State-Owned Enterprise Development in 2000-2001, He served as Staff Director of Persh Perjan and Public Housing in 2001-2002, Kasubbid - Deputy Assistant of Banking 2004-2010, Kasubbid - Asdep ISM III in 2011-2014, Kasubbid - Deputy Assistant of PISM2 in 2014-2017. Then in 2017-2018 he served as Head of Sub-Section of PISM2 of the Ministry of SOE.

DIVISI Division

Pada tahun 2018 PT Barata Indonesia (Persero) memiliki 6 Divisi yang merupakan divisi profit center sekaligus berperan sebagai marketing. Keenam divisi tersebut yaitu Divisi Industri Komponen dan Permesinan, Divisi Komponen Turbin, Divisi Industri Gula dan Agro, Divisi Minyak & Gas, Divisi Pembangkit serta Divisi Sumber Daya Air.

In 2018 PT Barata Indonesia (Persero) has 6 Divisions which are considered as profit center divisions, which also serve as marketing. The six divisions are Component and Machinery Industry, Turbine Component, Sugar and Agro Industry, Oil & Gas Division, and Power plant & Water Resources Division.

1. DIVISI INDUSTRI KOMPONEN & PERMESINAN

Merupakan Divisi yang memproduksi/ fabrikasi komponen dan mesin untuk berbagai industri yang mengklasifikasikan sebagai konstruksi berat. Diantaranya yaitu peralatan dan komponen untuk industri perkeretaapian, petrokimia, pupuk, semen dan industri proses lainnya. Pangsa pasar industri ini di seluruh Indonesia dan mencapai Amerika Serikat untuk produk kereta api.

1. Component & Machinery Industry Division

Component & Machinery Industry Division Is a division that manufactures components and machines for various industries which classify as heavy construction. Among others equipment and components for the railroad, petrochemical, fertilizer, cement and other processing industries. The industrial market are large market share of this industry throughout Indonesia and reach the United States for railroad products

2. DIVISI KOMPONEN TURBIN

Melalui divisi ini, Perseroan diberi penugasan sebagai koordinator lokal konten untuk proyek-proyek pembangkit listrik. Divisi ini merupakan salah satu tulang punggung ekspor produk yang dilakukan PT Barata Indonesia (Persero). Beberapa produk divisi komponen turbin yaitu *Combustion Chamber, Condenser, Blade Ring, Low Pressure Inner Casing, Low Pressure Outer Casing*.

2. Turbine Component Division

Turbine Component Division Through this division, the Company is assigned as a local content coordinator for power plant projects. This division is one of the backbone of PT Barata Indonesia (Persero) export products. Some of turbine component division products are Combustion Chamber, Condenser, Ring Blade, Low Pressure Inner Casing, Low Pressure Outer Casing.

3. DIVISI INDUSTRI GULA DAN AGRO

Barata Indonesia memiliki banyak pengalaman dalam menghasilkan produk industri makanan, baik dalam komponen & jenis proyek EPC. Melalui divisi ini, Perseroan berkompetensi dalam mengembangkan pabrik gula & pemeliharaannya selama era kolonial sekitar tahun 1900-an. Sekarang, dikombinasikan dengan teknologi baru, Barata Indonesia mampu mengembangkan pabrik gula dengan kapasitas hingga 15000 ton per hari, serta menguasai komponen fabrikasi.

3. Sugar and Agro Industry Division

Sugar and Agro Industry Division Barata Indonesia has a lot of experience in producing food industry products, both in components & EPC projects types. Through this division, the Company is competent in developing sugar mills & its maintenance during the colonial era around 1900s. Now, combined with new technology, Barata Indonesia is able to develop sugar factory with capacities of up to 15000 tons per day, and master fabrication components.

Mulai dari gula mill, Barata Indonesia kemudian intensif memperluas kompetensi dalam mengembangkan produk agro industri lainnya seperti pabrik garam, pabrik sagu, pabrik Bioethanol, *Crude Palm Oil, Modern Rice Milling Plant* dan pabrik proses serupa lainnya.

Starting from sugar mill, Barata Indonesia intensified its competence in developing other industrial agro products such as salt mills, sago mills, Bioethanol factories, Crude Palm Oil, Modern Rice Milling Plants and other similar process plants

4. DIVISI MINYAK & GAS

Divisi ini memainkan peran penting dalam industri *energy* di Indonesia utamanya sektor minyak & gas. Sektor minyak dan gas juga mendapatkan perhatian intensif dan memiliki banyak pengalaman proyek di Indonesia.

Beberapa produk dari divisi ini yaitu LNG/LPG Tank and Terminals, Spherical Tank, Pressure Vessel, Heat Exchanger, Tank Farm, Piping and Pipelines.

5. DIVISI PEMBANGKIT

Divisi ini memiliki banyak pengalaman di bidang pembangunan pembangkit tenaga listrik. Barata memiliki pengalaman bergerak di bidang kelistrikan diantaranya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU/ Steam Power Plant), Pembangkit Listrik Tenaga Air / Mini Hidro (PLTA/PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Gas Turbine Generator dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal Power Plant). Sesuai rencana bisnis, divisi pembangkit membagi dalam 2 (dua) bidang bisnis yang pertama adalah jenis proyek *Engineering Procurement Construction* (EPC) Pembangkit, dimana Barata akan berperan sebagai integrator yang akan menjembatani dan mengkoordinasikan seluruh bagian EPC. Lingkup bidang yang kedua adalah bisnis manufaktur untuk komponen pembangkit khususnya *Balance of Plant* (BOP) PLTU yang terdiri dari *condenser, deaerator, hp heater, lp heater dan oil cooler*.

6. DIVISI SUMBER DAYA AIR

Divisi ini berfokus pada pekerjaan komponen hidromekanikal. Dengan membawahi tiga pabrik yaitu pabrik Medan, Cilegon dan Tegal mampu memproduksi berbagai produk antara lain berbagai jenis pintu air, *Hollowcone Valves, Penstock, Pump Station, Trash Remover System*.

4. Oil & Gas Division

Barata Indonesia plays an important role in the energy industry in Indonesia, both in the oil & gas sector, generating electricity and providing components and types of EPC projects. The oil and gas sector also received intensive attention and has so many projects in Indonesia.

Some of the products from this division are LNG/LPG Tanks and Terminals, Spherical Tanks, Pressure Vessels, Heat Exchangers, Tank Farms, Piping and Pipelines.

5. Power Plant Division

Barata Indonesia has a lot of experience in the field of power plant development. Barata has experience in the electricity generation including Steam Power Plant (PLTU), Mini Hydro/Hydro Power Plant (PLTA/PLTM), Gas Turbine Generator and Geothermal Power Plant. In the business plan for the Electric Power Plant, power plant division is divided into 2 (two) business fields, the first is Engineering Procurement Construction (EPC) projects, where Barata will act as an integrator who will bridge and coordinate all EPC parts. Second is the manufacturing business of components, especially the Balance of Plant (BOP) which consists of a condenser, deaerator, hp heater, lp heater and oil cooler.

6. Water Resources Division

This division focuses on the work of hydromechanical components. In charge of three factories, namely Medan, Cilegon and Tegal factories capable to produce various products including Various types of water gates, Hollowcone Valves, Penstock, Pump Station, Trash Remover System.

JUMLAH KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Number Of Employees And Competency Development Of Employees

Secara komposisi, PT BARATA INDONESIA (PERSERO) memiliki karyawan sejumlah 1044 pada tahun 2018, dan mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 45,21% dari tahun 2017 yaitu sebanyak 472 orang yang disebabkan adanya proses rekrutmen untuk memenuhi perkembangan bisnis perusahaan serta adanya proses akuisisi PT Siemens Indonesia cabang Cilegon. Berikut ini adalah komposisi karyawan berdasarkan jenjang jabatan, tingkat pendidikan, status karyawan, wilayah kerja, jenis kelamin, dan usia.

In composition, in 2018 PT BARATA INDONESIA (PERSERO) has 1044 employees, and experienced a significant increase of 45.21% from 2017 by 472 people due to the results of the recruitment process to meet the company's business development and the acquisition of PT Siemens Indonesia Cilegon branch. The following is the composition of employees based on position, education level, employee status, work area, gender, and age.

KOMPOSISI KARYAWAN

Pada tahun 2018, karyawan organik / karyawan tetap PT Barata Indonesia (Persero) cukup seimbang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah karyawan tidak tetap dimana persentasenya adalah 51% berbanding 49% dari total keseluruhan karyawan.

Employees Composition

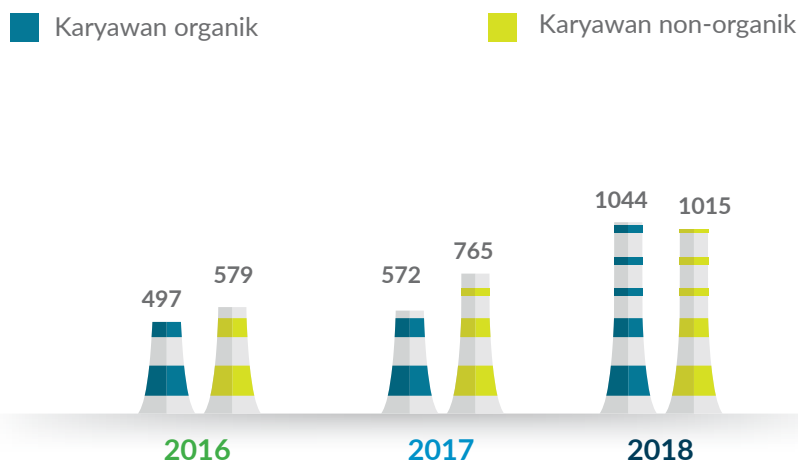
In 2018, organic employees/permanent employees of PT Barata Indonesia (Persero) was balanced compared to the number of non-permanent employees with a percentage of 51% compared to 49% of the total employees.

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan Tahun 2016-2018 | Table of Employee Composition Based on Employee Status 2016-2018

STATUS Status	2016	2017	2018
Karyawan organik	497	572	1044
Karyawan non-organik	579	765	1015

GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KARYAWAN TAHUN 2016 - 2018

Graphic of Employee Composition Based on Employee Status



BERDASARKAN JENJANG JABATAN

Dalam rangka pencapaian produktivitas dan optimalisasi hasil, Manajemen telah melakukan evaluasi dalam pemenuhan pengawakan organisasi agar tetap efektif dan efisien. Pada tahun 2018 terdapat peningkatan yang cukup signifikan dimana jumlah karyawan dengan jabatan Staff meningkat 48%, Supervisor 48%, Manager 17%, dan General Manager meningkat 29% dibandingkan tahun 2017.

Based on Position Level

To achieve productivity and optimizing work results, Management has evaluated the fulfillment of organizational oversight to remain effective and efficient. In 2018 there was a significant increase where the number of employees with Staff positions increased 48%, Supervisors 48%, Managers 17%, and General Managers increased 29% compared to 2017.

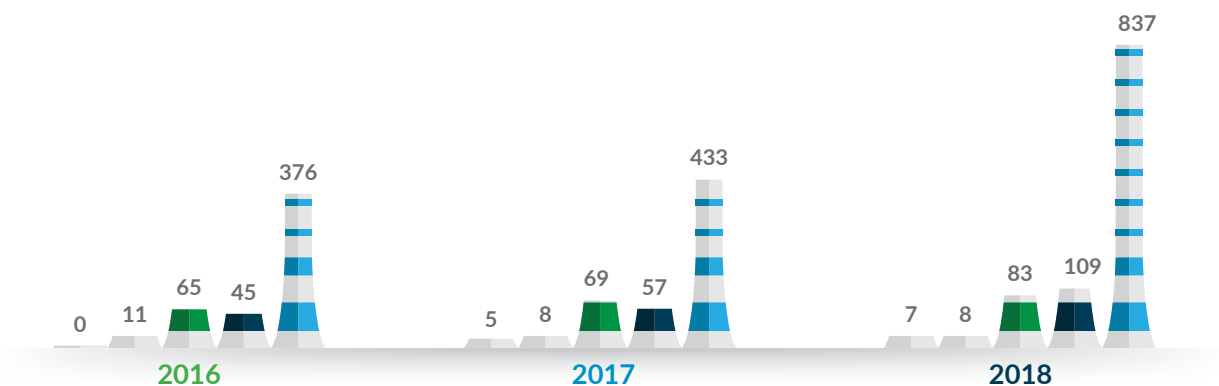
Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2016-2018* | Table of Employee Composition Based on Employees position level 2016-2018*

Jenjang Jabatan Position Level	2016	2017	2018
GM	0	5	7
Manajer Biro	11	8	8
Manajer Bidang / Bagian	65	69	83
SPV	45	57	109
Staff / officer / pelaksana	376	433	837

GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN JENJANG JABATAN TAHUN 2016 - 2018

Graphic of Employee Composition Based on Employees position level 2016-2018

■ GM ■ Manajer Biro ■ Manajer Bidang / Bagian ■ SPV ■ Staff / officer / pelaksana



BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Langkah strategis PT Barata Indonesia dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan di tahun 2018 sangat didukung oleh aspek kualitas sumber daya yang dimiliki, terutama terkait dengan upaya pemenuhan posisi-posisi strategis yang akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Bentuk perhatian khusus terhadap kualitas SDM tersebut menitikberatkan pada tingkat pendidikan karyawan, dengan komposisi yang relatif meningkat dari tahun ke tahun.

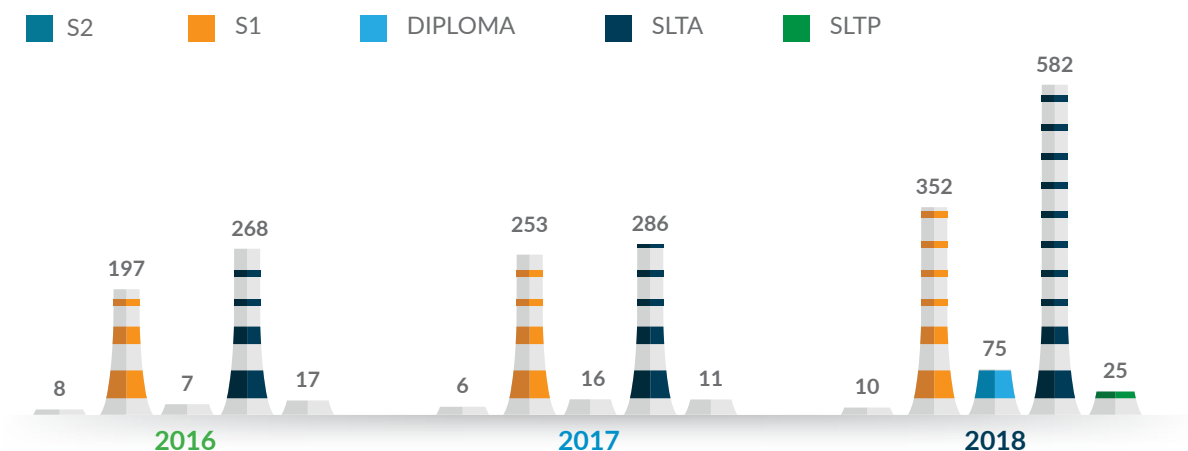
Based on Education Level

PT Barata Indonesia strategic steps in an effort to improve company performance in 2018 is strongly supported by the quality of its resources, especially related to efforts to fulfill strategic positions that will affect company's decision-making and policy. The form of special attention to human resources quality focuses on employees education level, with a relatively increasing composition from year to year.

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2018* | Table of Employee Composition Based on Education Level 2016-2018 *

Pendidikan Education	2016	2017	2018
S2	8	6	10
S1	197	253	352
DIPLOMA	7	16	75
SLTA	268	286	582
SLTP	17	11	25

Grafik Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016 - 2018
Graphic of Employee Composition Based on Education Level 2016-2018



BERDASARKAN WILAYAH KERJA

Lingkup wilayah kerja PT Barata Indonesia (Persero) tersebar di 5 lokasi dimana kota Gresik sebagai Kantor Pusat dengan jumlah presentase sebesar 42% dari total keseluruhan karyawan. Adapun 4 wilayah kerja yang lain adalah Kantor Perwakilan Jakarta, Pabrik Tegal, Pabrik Cilegon (termasuk Divisi Komponen Turbin), dan Pabrik Medan.

Based on Work Area

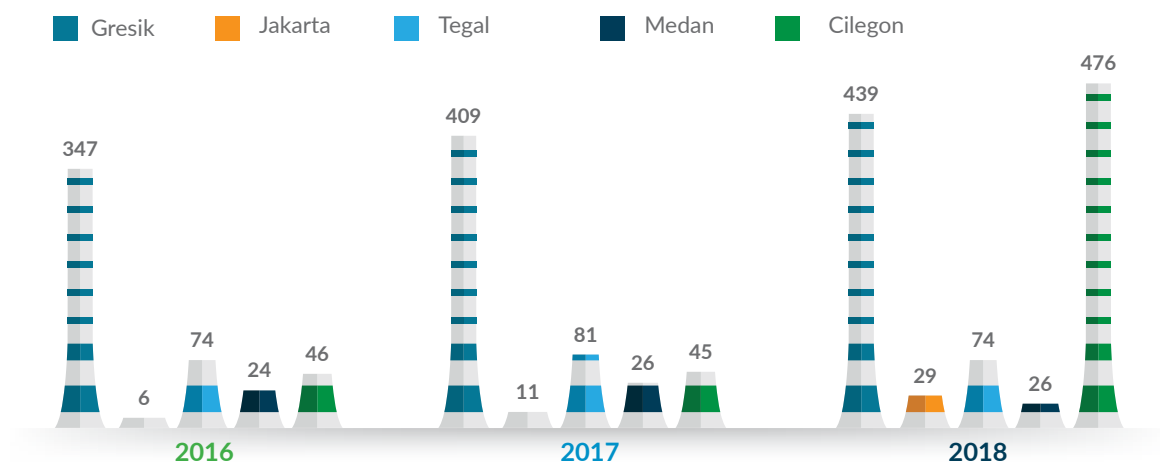
PT Barata Indonesia (Persero) work area is spread in 5 locations, with its main location in Gresik as Head Office and dominates 42% of the total employees. The other 4 work areas are Jakarta Representative Office, Tegal Factory, Cilegon Factory (including Turbine Component Division), and the Medan Factory.

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2016-2018* | Table of Employee Composition Based on Work Areas in 2016-2018 *

LOKASI Location	2016	2017	2018
Gresik	347	409	439
Jakarta	6	11	29
Tegal	74	81	74
Medan	24	26	26
Cilegon	46	45	476

GRAFIK KOMPOSISI BERDASARKAN WILAYAH KERJA TAHUN 2016 - 2018

Graphic of Employee Composition Based on Work Areas in 2016-2018



BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Berdasarkan segmentasi, mayoritas karyawan PT Barata Indonesia (Persero) pada tahun 2018 adalah pria, yaitu sejumlah 956 orang atau 92% dari total jumlah keseluruhan karyawan.

Based on Gender

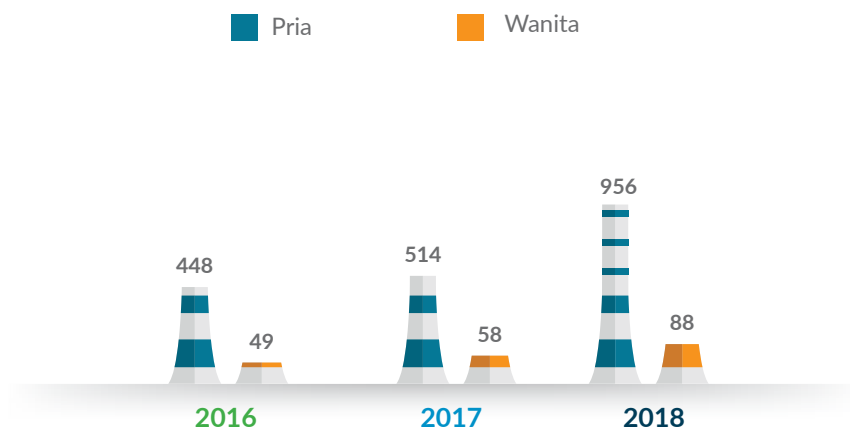
Based on its segmentation, majority of PT Barata Indonesia (Persero) employees in 2018 are men, 956 people or 92% of the total number of employees.

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016-2018* | Table of Employee Composition by Gender 2016-2018 *

JENIS KELAMIN Based on Gender	2016	2017	2018
Pria	448	514	956
Wanita	49	58	88

GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 - 2018

Graphic of Employee Composition by Gender 2016-2018



BERDASARKAN USIA

Perusahaan terus berbenah untuk memperkuat sumber daya manusia melalui program rekrutmen karyawan secara signifikan pada tahun 2018 guna percepatan laju organisasi serta dalam rangka program kaderisasi atau persiapan pengganti bagi para purnabhakti. Hal ini dapat terlihat dari jumlah / komposisi karyawan pada tahun 2018 dimana pertumbuhan karyawan dari kelompok millenials pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 42,21% yang terdiri dari kelompok usia 21-35 tahun.

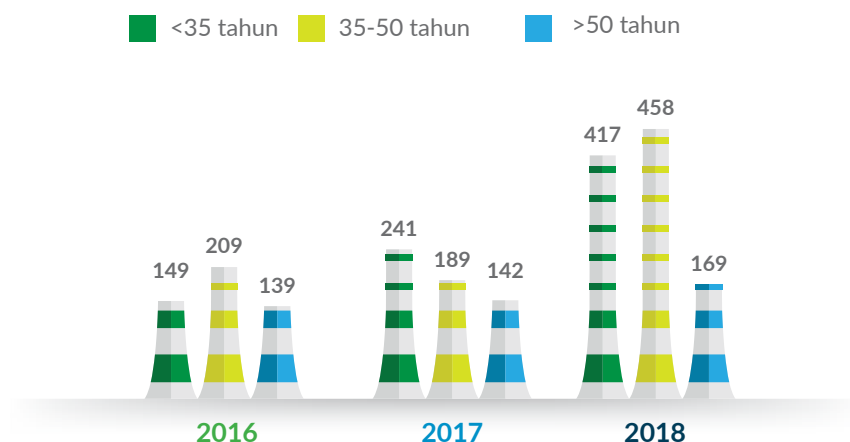
By age

The Company continues to improve itself to strengthen human resources through a significant employee recruitment program in 2018 to fulfill and accelerate the pace of the organization and regarding to regeneration program to prepare substitutes for retired workers. This can be seen from the composition of employees in 2018 where the growth of employees from the millenials in 2018 experienced a significant increase compared to 2017, which amounted to 42.21%, consisted of 74% increase for 21-35 year age group

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia Tahun 2016-2018* | *Table of Employee Composition by Age 2016-2018 **

USIA Age	2016	2017	2018
< 35 tahun	149	241	417
35 - 50 tahun	209	189	458
> 50 tahun	139	142	169

**GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN
USIA TAHUN 2016 - 2018**
Graphic of Employee Composition by Age 2016-2018



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholders Composition

Permodalan PT Barata Indonesia (Persero) sepenuhnya (100%) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian BUMN RI, sesuai Anggaran Dasar dalam Akta Notaris Herawati, S.H. No. 07 tanggal 15 Juni 2017 yang telah mendapat persetujuan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0013895.AH.01.02 Tahun 2017 dan Daftar Perseroan Nomor AHU.0082787 .AH.01.11 Tahun 2017 dijelaskan tentang besarnya modal dasar Perusahaan yaitu sebesar Rp 3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah), dan kemudian telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah RI sebesar Rp 762.915.000.000 (tujuh ratus enam puluh dua milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah).

*PT Barata Indonesia (Persero) is fully (100%) owned by the Government of Republic Indonesia c.q. Ministry of BUMN RI, according to the Articles of Association of Herawati, S.H. No. 07 on June 15, 2017 which has been approved by the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU.0013895.AH.01.02 Year 2017 and List of Company Number AHU.0082787.AH.01.11 Year 2017 explained about the amount of **authorized capital of the Company amounted to Rp 3,000,000,000,000, - (three trillion rupiah), and then it has been placed and paid by the Government of RI amounted to Rp762,915,000,000 (seven hundred sixty two billion nine hundred and fifteen million rupiah).***

STRUKTUR KEPEMILIKAN MODAL

Capital Ownership Structure

URAIAN Description	Lembar Saham Number of Shares	Nominal (Rp) Nominal (Rp)
Modal Dasar <i>Authorized Capital</i>	3.000.000	3.000.000.000.000
Modal Saham Ditempatkan & Disetor <i>Stock Shares Issued & Paid</i>	143.203	143.203.000.000
Tambahan Modal Disetor PMN (Penyertaan Modal Negara) <i>Additional Paid-in Capital of PMN (State Equity Participation)</i>	500.000	500.000.000.000
Tambahan Modal Disetor BMN (Barang Milik Negara) <i>Additional Paid-in Capital BMN (State Property)</i>	119.712	119.712.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor <i>Total of Shares Issued & Paid</i>	762.915	762.915.000.000

Dalam tahun 2018 terjadi transaksi pembelanjaan barang modal yang didanai dari investasi sendiri dan PMN. Pengikatan kerja sama pengadaan barang modal tersebut telah mengikuti prosedur yang berlaku.

In 2018 there was capital expenditure transactions which are funded from own investment and PMN. The binding agreement for the procurement of capital goods has followed the prevailing procedures.

KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM Share Issuance Chronology

Saat ini PT Barata Indonesia (persero) belum terdaftar sebagai perusahaan Go Public. Seluruh modal saham dimiliki oleh Republik Indonesia.

At present PT Barata Indonesia (Persero) has not been registered as a Go Public company. All share capital is owned by the Republic of Indonesia.

KRONOLOGI OBLIGASI DAN EFEK LAINNYA Bonds and Other Securities chronology

Pada 8 Nopember 2017 PT Barata Indonesia telah mendapatkan sertifikat Nomor RC-935/PEF-DIR/XI/2017, PEFINDO memberikan hasil peringkat idBBB (Triple B) stable outlook atas Medium Term Notes Tahun 2017 PT Barata Indonesia (persero) dengan nilai agregat pokok hingga Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah). PEFINDO melalui surat No. RC-936/PEF-DIR/XI/2017 juga memberikan peringkat idBBB (Triple B) stable outlook untuk PT Barata Indonesia (persero) secara korporat.

On November 8, 2017 PT Barata Indonesia has obtained the certificate Number RC-935 / PEF-DIR / XI / 2017, PEFINDO assessed results of idBBB (Triple B) stable outlook rating on PT Barata Indonesia (Persero) 2017 Medium Term Notes with principal aggregate value up to Rp300,000,000,000 (three hundred billion rupiahs). PEFINDO through letter No. RC-936 / PEF-DIR / XI / 2017 also assessed corporate rating of idBBB (Triple B) stable outlook for PT Barata Indonesia (Persero).

Obligor dengan peringkat idBBB memiliki kemampuan yang memadai dibanding obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangannya. Peringkat tersebut mencerminkan pandangan kami tentang dukungan

Obligors with an IDBBB rating have sufficient capability compared to other Indonesian obligors to fulfill their financial commitments. The rating reflects our view of the strong support obtained by PT Barata Indonesia (Persero) from the

kuat yang diperoleh PT Barata Indonesia (persero) dari pemerintah, posisi pasar yang baik sebagai produsen besi dan pengecoran baja di pasar utamanya, dan perolehan kontrak proyek infrastruktur.

Faktor untuk peringkat idBBB bagi PT Barata Indonesia (persero) adalah sebagai berikut :

- Dukungan pemerintah yang kuat. Kami berpandangan bahwa PT Barata Indonesia (persero) mendapat dukungan kuat dari pemerintah, mengingat peran bidang usahanya yang strategis. Dengan kompetensi yang kuat dan akses ke kemitraan dengan pemilik teknologi, perusahaan memiliki peran strategis dalam memperkuat industri nasional dengan memberikan nilai tambah dari industri hulu ke hilir. Hal ini dicerminkan oleh Penanaman Modal Negara senilai Rp500 miliar pada tahun 2016 untuk meningkatkan kapasitas pengecoran dan permesinan dan memperluas industri agro.
- Posisi pasar yang baik sebagai produsen pengecoran baja dan sektor strategis. PT Barata Indonesia (persero) memiliki posisi pasar yang baik di industri pengecoran, serta dalam industri peralatan dan manufaktur komponen. Perusahaan memiliki barrier entry produk yang sulit ditembus yakni memproduksi komponen seperti bogies, coupler, dan truck frame. Sejarah panjang di industri pengecoran besi, didukung oleh kapasitas produksinya yang besar menjadikan perusahaan unggul dari pesaing-pesaingnya. PT Barata Indonesia merupakan perusahaan pengecoran logam di Indonesia dilengkapi dengan tungku busur 10-ton, menjadikannya satu-satunya produsen foundry terbesar di Indonesia.
- Perusahaan memiliki diversifikasi produk dan pasar yang sangat luas, maka dengan demikian melindunginya dari penurunan di satu sektor tertentu. Kompetensi perusahaan yang kuat juga hadir di sektor industri komponen dan permesinan, sektor industri gula dan agro, sektor minyak dan gas, sektor industri air serta sektor pembangkit.
- Harapan untuk perolehan proyek infrastruktur. Investasi oleh pemerintah dalam banyak proyek infrastruktur kemungkinan akan memainkan peran penting dalam pertumbuhan perusahaan. Status milik negara dan sinergi dengan perusahaan milik negara lainnya meningkatkan peluang untuk mendapatkan kontrak baru yang berasal dari proyek pemerintah.
- Akuisisi pabrik komponen turbin Siemens di Cilegon, Banten, merupakan bukti komitmen untuk memenuhi kebutuhan untuk suku cadang pembangkit listrik.

government, a good market position as a producer of iron and steel casting in its main market, and the acquisition of infrastructure project contracts.

The factors for idBBB ranking for PT Barata Indonesia (Persero) are as follows:

- *Strong government support. We believe that PT Barata Indonesia (Persero) has strong support from the government, considering the strategic role of its business sector. With strong competence and access to partnerships with technology owners, the company has a strategic role in strengthening national industries by providing added value from upstream to downstream industries. This is reflected in the State Investment of Rp500 billion in 2016 to increase the capacity of casting and machining and expand agro industry.*
- *Good market position as a steel casting manufacturer and strategic sector. PT Barata Indonesia (Persero) has a good market position in the foundry industry, as well as in the equipment industry and component manufacturing. The company has a barrier entry product that is difficult to penetrate, namely producing components such as bogies, couplers and truck frames. A long history in the iron casting industry, supported by its large production capacity makes the company superior to its competitors. PT Barata Indonesia is a metal casting company in Indonesia equipped with 10-ton arc furnaces, making it the only largest foundry producer in Indonesia.*
- *The company has a vast products and markets diversification, thus protecting it from decline in one particular sector. Strong corporate competencies are also present in the components and machinery industry, sugar and agro industry sectors, oil and gas sector, water industry sector and the power sector.*
- *Expectations for the acquisition of infrastructure projects. Investment by the government in many infrastructure projects is likely to play an important role in the growth of the company. The status as state property and synergy with other state-owned companies increases the opportunity to obtain new contracts from government projects.*
- *The acquisition of the Siemens turbine component plant in Cilegon, Banten, is a testament to its commitment to meet the needs for power plant parts. Through this*

Melalui akuisisi ini, perusahaan akan menyerap pengalaman, kapabilitas, dan teknologi lebih banyak dari Siemens dari 30 tahun dalam bisnis pembangkit listrik.

acquisition, the company will absorb more experience, capabilities and technology than Siemens from 30 years in the power generation business.

Pada 5 Desember 2017, melalui surat nomor S-122/D3.MBU/12/2007 PT Barata Indonesia (persero) telah mendapatkan ijin menerbitkan MTN dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Mencatatkan MTN dengan nilai agregat pokok hingga Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah). Penerbitan MTN terbagi menjadi dua seri terpisah. MTN Seri A terbit pada tanggal 7 Desember 2017 memiliki nilai Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dengan tenor tiga tahun dan bunga 9,25% per annum. MTN Seri B terbit pada tanggal 15 Maret 2018 memiliki nilai Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dengan tenor tiga tahun dan bunga 9,15% per annum.

On December 5, 2017, through letter number S-122 / D3.MBU / 12/2007 PT Barata Indonesia (Persero) has obtained permission to issue MTN from the Ministry of BUMN as shareholders. Record MTN with principal aggregate value up to Rp300,000,000,000 (three hundred billion rupiahs). The issuance of MTN is divided into two separate series. Series A MTN issued on December 7, 2017 has a value of Rp200,000,000,000 (two hundred billion rupiahs) with a three-year tenor and an interest of 9.25% per annum. Series B MTN issued on March 15, 2018 has a value of Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah) with a three-year tenor and an interest of 9.15% per annum.

Pada 10 Oktober 2018, PT Barata Indonesia telah mendapatkan sertifikat Nomor RC-1037/PEF-DIR/X/2018, PEFINDO memberikan hasil peringkat idBBB (Triple B) stable outlook atas Medium Term Notes Tahun 2017 Seri A dan Seri B PT Barata Indonesia (persero) dengan nilai agregat pokok hingga Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah). Pada 10 Oktober 2018, PEFINDO melalui surat No. RC-1040/PEF-DIR/X/2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan juga memberikan peringkat idBBB (Triple B) stable outlook untuk PT Barata Indonesia (persero) secara korporat. Adapun kronologi pemeringkatan yang telah dilewati perusahaan adalah sebagai berikut :

On October 10, 2018, PT Barata Indonesia has obtained certificate Number RC-1037 / PEF-DIR / X / 2018, PEFINDO provides results of idBBB (Triple B) stable outlook rating on 2017 Series A Medium Series Notes and PT B Series Barata Indonesia (Persero) with principal aggregate value up to Rp300,000,000,000 (three hundred billion rupiahs). On 10 October 2018, PEFINDO through letter No. RC-1040 / PEF-DIR / X / 2018 regarding the Rating Monitoring Certificate also provides corporate IDBBB (Triple B) stable outlook ratings. The ranking chronology that the company has passed is as follows:

No.	Lembaga Rating Rating Institution	Nomor Surat Letter Number	Perihal Regarding	Nilai Rating Rating	Keterangan Description
1	PT Pemeringkat Efek Indonesia	RC-935/PEF-DIR/XI/2017	Sertifikat Pemeringkatan atas MTN tahun 2017 PT Barata Indonesia (persero)	idBBB (Triple B)	-
2	PT Pemeringkat Efek Indonesia	RC-936/PEF-DIR/XI/2017	Sertifikat Pemeringkatan atas PT Barata Indonesia (persero)	idBBB (Triple B)	Stable Outlook
3	PT Pemeringkat Efek Indonesia	RC - 1038 / PEF - DIR/X/2018	Sertifikat Pemeringkatan atas MTN II tahun 2018 PT Barata Indonesia	idBBB (Triple B)	-
4	PT Pemeringkat Efek Indonesia	RC - 1039 / PEF - DIR/X/2018	Sertifikat Pemeringkatan atas MTN I Seri A dan Seri B tahun 2017 PT Barata Indonesia (persero)	idBBB (Triple B)	-
5	PT Pemeringkat Efek Indonesia	RC - 1040 / PEF - DIR/X/2018	Sertifikat Pemeringkatan atas MTN I Seri A dan Seri B tahun 2017 PT Barata Indonesia (persero)	idBBB (Triple B)	Stable Outlook

LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN

Capital Market Supporting Institutions

Konsultan Hukum WINS & Partner

Perkantoran Graha Asri Blok RK No. 9,
Jl. Raya Ngagel No. 176-179, Surabaya, Jawa Timur.
Telp. : (031) 5011922 | Fax : (031) 5011923

Kantor Akuntan Publik, KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan

Jl. Cempaka Putih Barat 13, No. G 10, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10520.
Telp. : (021) 4288 2576 | Fax : (021) 4288 2577
Email : kap_m@rad.net.id Website : www.iapi.or.id

PPM Manajemen

Jl. Menteng Raya No.9-19, RT.1/RW.10, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, 10340, Indonesia
Telp. : (021) 2300313

EDP MM Universitas Airlangga

Jl. Airlangga No.4 Surabaya 60286, Indonesia
Telp. : (031) 5033642, 5036584 | Fax : (031) 5026288

Daya Dimensi Indonesia (DDI)

Kantor Taman E3.3 Unit B 3-3A,
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 - Indonesia
Telp. : (021) 576 4455 | Fax : (021) 576 4466

Human Talent Development

Wisma Korindo Lt. 5 Jl MT Haryono Kav 62, Pancoran, Jakarta Selatan.
Hp : 081 29611 9811 | Telp. : (021) 8082 1752 / 8082 1753

UPKK Universitas Brawijaya

Jl. Veteran Malang
Telp. : (0341) 583787, 0341 551611 Pes : 130
Fax : (0341) 575453 | Email : jpc@ub.ac.id

Undip Career Center

Gedung PKM Lama Universitas Diponegoro
Jl. Prof Soedarto, SH, Kampus UNDIP Tembalang, Semarang 50275, Email : info@career.undip.ac.id

SAC ITS

Gedung SAC, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111, Jawa Timur, Indonesia
Telp. : (031) 5994251-55 ext. 1135
Fax : (031) 5925880 | Email : careersinfo@its.ac.id

Law Consultant WINS & Partner

Office of Graha Asri Blok RK No. 9,
Jl. Raya Ngagel No. 176-179, Surabaya, East Java.
Tel. : (031) 5011922 | Fax : (031) 5011923

Public Accounting Firm, KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Partners

Jl. Cempaka Putih Barat 13, No. G 10, Central Jakarta, DKI Jakarta, 10520.
Tel. : (021) 4288 2576 | Fax : (021) 4288 2577
Email : kap_m@rad.net.id Website: www.iapi.or.id

PPM Manajemen

Jl. Menteng Raya No.9-19, RT.1/RW.10, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, 10340, Indonesia
Phone : (021) 2300313

EDP MM Universitas Airlangga

Jl. Airlangga No.4 Surabaya 60286
Phone : (031) 5033642, 5036584 | Fax : (031) 5026288

Daya Dimensi Indonesia (DDI)

Kantor Taman E3.3 Unit B 3-3A,
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 - Indonesia
Phone : (021) 576 4455 | Fax : (021) 576 4466

Human Talent Development

Wisma Korindo Lt 5 Jl MT Haryono Kav 62 Pancoran Jakarta Selatan
Mobile : +6281296119811, | Phone : +6221-8082 1752 / 8082 1753

UPKK Universitas Brawijaya

Jl. Veteran Malang
Phone : (0341) 583787, 0341 551611 Pes : 130
Fax. : (0341) 575453 | Email : jpc@ub.ac.id

Undip Career Center

Gedung PKM Lama Universitas Diponegoro
Jl. Prof Soedarto, SH, Kampus UNDIP Tembalang, Semarang 50275, Email : info@career.undip.ac.id

SAC ITS

Gedung SAC, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111, Jawa Timur, Indonesia
Phone and Fax : (031) 5994251-55
ext. 1135, (031) 5925880 | Email : careersinfo@its.ac.id

CLT Unika Soegijapranata

Jalan Menteri Supeno no. 35 Semarang, Indonesia,
Telp. : (024) 8316028, 8452822, 8452823
Fax : (024) 8314065

Parahita Diagnos_c Center

Jl. Panglima Sudirman No. 92
Telp. : (031) 398 1455 | Fax : (031) 399 1820

Aspeknas (Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional)

Jl. Kebun Jeruk VI No. 24A, Jakarta Pusat, Indonesia
Telp. : (021) 6253070 | Fax : (021) 6240668
Email : dpp_aspeknas@yahoo.com

Aklindo (Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia) Jatim

Jl. Raya Perak Barat 85, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia,
PO BOX 1125
Telp. : (031) 3541210 / (021) 3557181
Fax : (031) 3541153 | aklindo_ja_m@yahoo.com

Gapenri (Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia)

Perkantoran Buncit Mas Blok B No. 11
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 108, Jakarta Selatan
Telp. : (021) 7946375 - 7980554
Fax : (021) 7980554 | Email : gapenri@idola.net.id
Web : www.gapenri.or.id

Gapeknas (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia)

Jl. Pemuda komplek Ruko Graha Mas Blok AD No.21
Rawamangun, Jakarta Timur, 13220, Indonesia
Telp. : (021) 4711796 | Fax : (021) 4711860
Email : gapeknas_dpp@yahoo.com

Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Jl. HOS Cokroaminoto No.122 Menteng - Jakarta Pusat,
DKI Jakarta Indonesia 10310 | Telp : 021.22391426 /
021.21393583
Email : sekretariat@kadinindonesia.or.id, kadin@
kadinindonesia.or.id

AFABI (ASOSIASI FABRIKATOR INDONESIA)

Menara MTH Jalan MT Haryono Kav 23 Cikoko - Pancoran
Telp : 021-83788533 | Fax : 021-83788534
Email : admin@afabi.or.id

CLT Unika Soegijapranata

Jl. Menteri Supeno no. 35 Semarang, Indonesia
Phone : 024 - 8316028, 8452822, 8452823
Fax : 024 - 8314065

Parahita Diagnos_c Center

Jl. Panglima Sudirman No. 92
Phone : (031) 398 1455, | Fax : (031) 399 1820

Aspeknas (National Construction Practitioner Association)

Jl. Kebun Jeruk VI No. 24A, Jakarta Pusat, Indonesia
Telp. : (021) 6253070 | Fax : (021) 6240668
Email : dpp_aspeknas@yahoo.com

Aklindo (Association of Indonesian Electricity Contractors) East Java

Jl. Raya Perak Barat 85, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, PO
BOX 1125
Telp. : (031) 3541210 / (021) 3557181
Fax : (031) 3541153 | aklindo_jatim@yahoo.com

Gapenri (Association of National Design Company of Indonesia)

Perkantoran Buncit Mas Blok B No. 11
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 108, Jakarta Selatan
Telp. : (021) 7946375 - 7980554
Fax : (021) 7980554 | Email : gapenri@idola.net.id
Web : www.gapenri.or.id

Gapeknas (Association of Indonesian National Contractor Entrepreneurs)

Jl. Pemuda komplek Ruko Graha Mas Blok AD No.21
Rawamangun, Jakarta Timur, 13220, Indonesia
Telp. : (021) 4711796 | Fax : (021) 4711860
Email : gapeknas_dpp@yahoo.com

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Jl. HOS Cokroaminoto No.122 Menteng - Jakarta Pusat,
DKI Jakarta Indonesia 10310 | Phone: 021.22391426 /
021.21393583 | E-mail : sekretariat@kadinindonesia.or.id,
kadin@kadinindonesia.or.id

AFABI (INDONESIAN FABRICATORS ASSOCIATION)

Menara MTH Jalan MT Haryono Kav 23 Cikoko - Pancoran
Phone : 021-83788533 | Fax : 021-83788534
E-mail : admin@afabi.or.id

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI *Reward And Certifications*



1 Award 2018 (Kinerja Keuangan 2017 – 9th
BUMN Awards Infobank 2018)
Award 2018 (Kinerja Keuangan 2017 – 9th
BUMN Awards Infobank 2018)

2 Award 2018 (BUMN Heroes – Warta
Ekonomi 2018)
Award 2018 (BUMN Heroes – Warta
Ekonomi 2018)

3 Award 2018 (BUMN Terbaik Sektor
Industri Strategis - Investor Award 2018)
Award 2018 (BUMN Terbaik Sektor
Industri Strategis - Investor Award 2018)

4 Award 2018 (IBEA Awards 2018,
Best Local Content Company (Nov))
Award 2018 (IBEA Awards 2018,
Best Local Content Company (Nov))

5 Award 2018 (Sertifikat Local
Content Electricity – IBEA 2018)
Award 2018 (Sertifikat Local
Content Electricity – IBEA 2018)

6 Award 2018 (CEO Excellence In Strategic
Alliance - BUMN Track 2018)
Award 2018 (CEO Excellence In Strategic
Alliance - BUMN Track 2018)



7 Award 2018 (Juara II Strategi
Pertumbuhan - BUMN Track 2018)
Award 2018 (Juara II Strategi
Pertumbuhan - BUMN Track 2018)

8 Sertifikat PROPER 2018
PROPER Certificate 2018

9 Penghargaan Kecelakaan Nihil Depnaker
Departement Of Labor Zero Accident Award

10 Sertifikat JAMSOSTEK
JAMSOSTEK certificate

11 Piagam Penghargaan Disabilitas
Disability Award Charter

12 Piagam Penghargaan BPJS KESEHATAN
BPJS Awards Charter

WILAYAH KERJA Work Area



01

HEAD OFFICE

Main Workshops
Jl. Veteran No 241 Gresik 61123
Ph. +62 31 3990 555
Fax +62 31 3990 666

02

JAKARTA REPRESENTATIVE OFFICE

Menara MTH Bld, 10th Floor
Jl. MT Haryono, Jakarta
Ph. +62 21 83788 533
Fax +62 21 83788 534

03

MEDAN WORKSHOP

Jl. Gatot Subroto Km 7.5
No. 273, Medan 20127
Ph. +62 61 8452 404
Fax +62 61 8469 962

04

TEGAL WORKSHOP

Jl. Pemuda No 7, Tegal 52121
Ph. +62 283 350 098
Fax +62 283 353 100



05

SUKABUMI WORKSHOP

Jl. Otto Iskandardinata 44
Sukabumi, Jawa Barat
Ph./Fax +62 266 2222 13

06

CILEGON WORKSHOP

Jl. Eropa, Kav H-2/2, KIEC –
Kawasan Industri Berat, Cilegon
– 42443
Ph./Fax +62 254 392 517

07

MAKASSAR WORKSHOP

Jl. Prof. Ir. Sutami KM 16 Maros,
Makassar
Ph. +62 411 511 530
Fax +62 411 512 444

ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN *Offices Address*

KANTOR PUSAT

Head Office

Jl. Veteran No 241, Gresik 61123 - Jawa Timur,
Telp | Phone: +62 31 3990 555
Faksimili | Fax: +62 31 3990 666
E-mail: info@barata.com

KANTOR PERWAKILAN

Representative Office

Menara MTH, 10th floor, 1001
Jl. MT Haryono Kav. 23,
Jakarta Selatan 12320, Indonesia
Tel | Phone: +62 21 83788 533
Faksimili | Fax: +62 21 83788 534
Email: jakarta@barata.com

WORKSHOP CILEGON

Cilegon Workshop

Jl. Eropa I Kavling H-2/2
KIEC Kawasan Industri Berat, Cilegon 42443,
Tel | Phone: +62 254 392517
Faksimili | Fax: +62 254 392033
E-mail: cilegon@barata.com

WORKSHOP TEGAL

Tegal Workshop

Jl. Pemuda No. 7, Tegal 52121ax
Tel | Phone: +62 283 2500 98 / 356 567
Faksimili | Fax: +62 283 353 100
E-mail: tegal@barata.com

WORKSHOP MEDAN

Medan Workshop

Jl. Gatot Subroto KM. 7,5 No. 273, Medan 20127
Tel | Phone: +62 61 845 2404 / 845 1850
Faksimili | Fax: +62 61 846 9962
E-mail: medan@barata.com





INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN *Information On Company Website*

Barata Indonesia berusaha untuk terus memperbaiki pelayanan baik kepada publik maupun pelanggan dengan memberikan informasi yang bisa diakses oleh khalayak umum secara terintegrasi, cepat dan tepat melalui website www.barata.com serta portal Kementerian BUMN. Website perusahaan tersebut berisi tentang :

PROFIL PERUSAHAAN

Dalam website tersebut, publik dapat mengetahui informasi mengenai profil perusahaan yang berisi tentang Susunan Dewan Komisaris dan Direksi, Struktur Organisasi, Human Capital, Tentang Perusahaan, Visi & Misi serta Kinerja Perusahaan.

BIDANG USAHA

Dalam kategori tersebut, publik bisa mengetahui informasi mengenai Bidang Usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Meliputi empat bidang yakni, Food (Industri Pangan), Energy (Industri Energi), Water (Industri Air) serta Industri Komponen dan Permesinan.

PORTOFOLIO

Kategori Portfolio berisi tentang informasi bagi customer maupun calon pelanggan tentang proyek- proyek yang telah dikerjakan oleh perusahaan. Selain itu, kategori tersebut juga berisi tentang kemampuan Barata Indonesia dalam Bidang Usaha yang digelar.

FASILITAS

Website perusahaan juga menampilkan kategori Fasilitas sebagai tempat informasi, mesin, peralatan dan juga workshop yang digunakan oleh perusahaan untuk mengerjakan proyek – proyek dari pelanggan. Informasi tersebut digunakan untuk memberikan keterangan bahwa perusahaan menggunakan peralatan dan juga mesin yang terbaru serta mutakhir dalam pengerjaan proyek – proyek perusahaan.

INFO PUBLIK

Kategori Informasi Publik hadir sebagai salah satu jawaban perusahaan terhadap keterbukaan informasi yang perlu disampaikan kepada publik. Kategori tersebut berisi tentang Press Release (Siaran pers),Tata Kelola Perusahaan, E-supplier (e- katalog),Annual Report, Kebijakan Pengadaan,Karir serta Informasi Kontak Perusahaan.

Barata Indonesia strives to continually improve services both to the public and customers by providing information that may be accessed by general public in an integrated, fast and precise manner through www.barata.com website and Ministr of SOEs portal. The company's website contains:

Company profile

In the website, public may find out information about the company profile which contains the Board of Commissioners and Directors composition, Organizational Structure, Human Capital, About the Company, Vision & Mission and Company Performance.

Business scopes

In this category, public may find out information about Business scopes conducted by the company. Which includes four scopes namely, Food (Food Industry), Energy (Energy Industry), Water (Water Industry) and the Component and Machinery Industry.

Portfolio

Portfolio contains information for customers and prospective customers about projects that have been done by the company. In addition, the category also contains the capabilities of Barata Indonesia in the Business Scope that they are involved in.

Facilities

The company's Website also contains facilities as a place of information regarding machines, equipment and workshops used by companies to work on projects from customers. This information is used to provide information that the company uses the latest equipment and machines as well as the latest in the execution of company projects.

Public Information

Public Information is the company's answers to information disclosure that needs to be disclosed to the public. The category contains Press Release, Corporate Governance, E-suppliers (e-catalog), Annual Report, Procurement Policy, Career and Company Contact Information.

BERITA

Berisi tentang Siaran Pers yang biasa dipublikasikan oleh perusahaan ke media massa sebagai informasi mengenai perkembangan maupun berita terbaru perusahaan ke masyarakat atau stakeholder terkait. Siaran Pers juga berisi pemberitaan dari media massa mengenai informasi perusahaan yang disampaikan kepada publik lewat medium media massa.

CSR

Kategori CSR hampir mirip dengan Siaran Pers, namun kategori tersebut berisi tentang kegiatan CSR perusahaan yang disampaikan lewat medium pers release kepada publik.

KARIR

Kategori Karir berisi tentang informasi rekrutmen, lowongan pekerjaan serta posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan bagi para pelamar.

Didalam website juga terdapat informasi mengenai informasi perusahaan yang bisa ditanyakan melalui email di info@barata.com maupun contact center yang dapat dihubungi di nomor 031 - 3990555

News

Contains Press Releases published by the company to the mass media as information about the latest company's developments and news of to the community or related stakeholders. Press releases also contain news from the mass media regarding company information that is conveyed to the public through mass media.

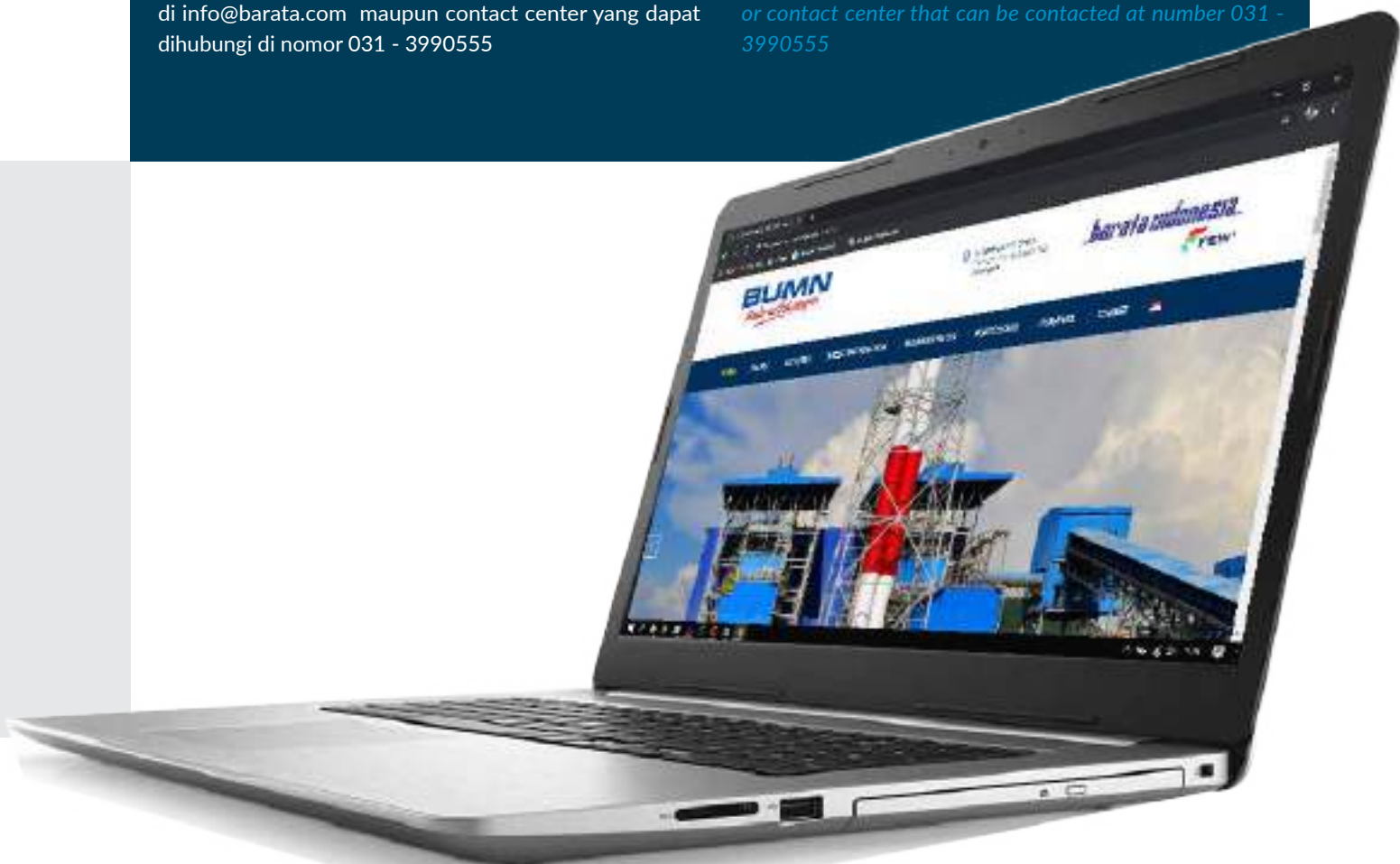
CSR

CSR is almost similar to Press Releases, but the category contains the company's CSR activities that are delivered through the press release to public.

Career

Career category contains information on recruitment, job vacancies and positions needed by companies for applicants.

In the website there is also information about company information that may be asked via email at info@barata.com or contact center that can be contacted at number 031 - 3990555



DATA PELATIHAN ORGAN PERSEROAN

Data Of Training Of Company's Organ

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Employee Competence Development

FOKUS / REALISASI PELATIHAN

PT Barata Indonesia memfokuskan diri dalam usaha peningkatan kompetensi karyawan melalui program training tahunan yang telah disusun berdasarkan *Training Need Analysis* (TNA) serta mengacu pada *Personal Competency Assessment* dari masing-masing karyawan serta selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Training Focus/Realization

PT Barata Indonesia focuses on efforts to improve employee competency through annual training programs that has been prepared based on *Training Need Analysis* (TNA) and refers to *Personal Competency Assessment* of each employee which is in line with the Company's Long Term Plan (RJPP).

Program pelatihan/ *training* telah dilaksanakan dari tahun ke tahun meliputi *Training Keterampilan*, *Training Keahlian* dan *Training Manajemen (Leadership & Managerial Training)*. Berikut adalah sejumlah program training yang telah dilakukan selama kurun waktu tahun 2018 yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal.

Training programs have been implemented year after year including Skills, Expertise and Management Training (Leadership & Managerial Training). The following are a number of training programs that have been implemented during 2018 internally and externally.

Program *Technical Training* selama 2018, diantaranya adalah :

Technical Training Program during 2018, including:

- a. *Training Sosialisasi Work Instruction (WI) Pengecoran AAR*
- b. *Training Peran Petugas P3K Dalam Keselamatan Kerja*
- c. *Training Peningkatan Kemampuan SDM Industri Berbasis Kompetensi di Bidang Pengecoran*
- d. *Training RSKKNI Bidang Industri Kereta Api, Kementerian Perindustrian*
- e. *Training & Sertifikasi Skema Pembuatan Cetak Manual, oleh Kementerian Perindustrian*
- f. *Training MCU Sebagai Investasi SDM Dalam SMK3, Parahita Diagnostic Center*
- g. *Training Pembinaan LPKS, Disnaker Kabupaten Gresik*
- h. *Training Probity Audit Pengadaan Barang & Jasa, FKSPI*
- i. *Training Sertifikasi & Uji Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan*
- j. *Training Sosialisasi Proses Pengadaan*
- k. *Training Sertifikasi & Uji Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan*
- l. *Training BIMTEK Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Kecelakaan Kerja*
- m. *Training Sertifikasi & Uji Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Batch 2*
- n. *Training End User Training SAP Batch 1 & 2, (persero) & Bravura Consultant*
- o. *Training Sertifikasi AK3 Umum, Kementerian Ketenagakerjaan*
- p. *Training Sertifikasi & Training SIO Alat Angkat Angkut, Kementerian Ketenagakerjaan*

- a. *Work Instruction (WI) AAR Casting Socialization Training*
- b. *Role of First Aid Officer in Occupational Safety Training*
- c. *Capability Improvement Training for Competency-Based Industrial HR in Casting*
- d. *RSKKNI Training in the Railroad Industry, Ministry of Industry*
- e. *Training & Certification of Manual Print Making Schemes, by the Ministry of Industry*
- f. *MCU Training as HR Investment in SMK3, Parahita Diagnostic Center*
- g. *LPKS Coaching Training, Manpower Office of Gresik Regency*
- h. *Probity Training for Goods & Services Procurement Audit, FKSPI*
- i. *Certification Training & Competency Test for Electricians*
- j. *Procurement Process Socialization Training*
- k. *Certification Training & Competency Test for Electricians*
- l. *BIMTEK Training for Fire and Occupational Hazard Mitigation*
- m. *Certification of Batch 2 Electric Power Engineering Personnel Certification & Competency Test*
- n. *SAP Batch 1 & 2 End User Training Training, (persero) & Bravura Consultant*
- o. *General AK3 Certification Training, Ministry of Manpower*
- p. *SIO Training & Certification Training for Lifting Equipment, Ministry of Manpower*

- q. *Training Power Selling*, oleh PT Talenta Sumberdaya Prima
- r. *Lokakarya & Sertifikasi Insinyur Profesional*, oleh PII
- s. *Workshop Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control*, oleh Indonesia Safety Center
- t. *Serifikasi Pendidikan Khusus Advokat*, Oleh Peradi & FH Unair
- u. *Training Project Management for EPC Project Batch 1 dan 2*
- v. *Training & sertifikasi PTMT* oleh PT Multi Spec Sinergindo
- w. *Training Awareness Ohsas 18001 : 2007*, oleh PT Media Edutama Indonesia

Program *Technical Training* selama 2018, diantaranya adalah :

- a. *Training Orientasi*
- b. *Training Supervisory Manajemen*
- c. *Training Manajemen Risiko*
- d. *Training FGD Employee Ability of ITS Graduates*, ITS
- e. *Training Design Sprint* diselenggarakan, oleh FHCI
- f. *Training Uncovering Leadership Blind Spot* oleh Dale Carnegie
- g. *Training Sosialisasi dan Sharing BPJS Kesehatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Gresik*
- h. *Training Millennial Summit*, Kementerian BUMN
- i. *Training Sharing Culture Transformation*, FHCI Millennial
- j. *Training & Sertifikasi Training for Trainers*, oleh Ekonid (Kamar dagang Jerman)
- k. *Training Building Disruptive Innovation by design sprint*
- l. *Training Peran dan Kontribusi BEI Serta Pasar Modal Terhadap Pertumbuhan Perseroan*.
- m. *Diklat Belanegara*

ANGGARAN PELATIHAN KARYAWAN

Selama kurun waktu 2018 Perseroan telah melakukan berbagai macam pelatihan guna meningkatkan kompetensi dan ketrampilan karyawan, hal ini terlihat dari jumlah peserta maupun jam training yang meningkat secara signifikan pada tahun 2018. Untuk jumlah peserta pelatihan mengalami kenaikan sebesar 47,47 % dibanding tahun 2017 yaitu berjumlah 1.740 Orang jika dibandingkan dengan target RKAP yaitu sebesar 686 Orang per tahun maka meningkat tajam sebesar 61 %, demikian juga untuk jumlah training yang dilaksanakan sepanjang pada tahun 2018 terealisasi 17.541 Jam maka jika dibanding dengan jumlah jam pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 57 %. Meskipun secara biaya mengalami efisiensi/ penurunan realisasi sebesar Rp 776,019,791 yaitu 29,06% dari realisasi biaya tahun 2017, namun hal tersebut tidak menjadi kendala berkat optimalisasi anggaran maupun optimalisasi *Trainer* dari internal.

- q. *Power Selling Training*, by PT Talenta Sumberdaya Prima
- r. *Professional Engineer Workshop & Certification*, by PII
- s. *Workshop on Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control*, by the Indonesia Safety Center
- t. *Educational Certification for Advocates*, by Peradi & FH Unair
- u. *Project Management Training for EPC Project Batch 1 and 2*
- v. *PTMT training & certification* by PT Sinergindo Multi Spec
- w. *OHSAS Awareness Training 18001: 2007*, by PT Media Edutama Indonesia

Technical Training Program during 2018, including:

- a. *Orientation Training*
- b. *Management Supervisory Training*
- c. *Risk Management Training*
- d. *Training of FGD Employee Ability of ITS Graduates*, ITS
- e. *Sprint Design Training* is held, by FHCI
- f. *Training for Blind Spot Uncovering Leadership* by Dale Carnegie
- g. *BPJS Health Socialization and Sharing Training* in collaboration with BPJS Gresik
- h. *Millennial Summit Training*, Ministry of BUMN
- i. *Sharing Culture Transformation Training*, Millennial FHCI
- j. *Training & Certification for Training for Trainers*, by Ekonid (German Chamber of Commerce)
- k. *Building Disruptive Innovation training* by sprint design
- l. *Training on the Role and Contribution of the IDX and the Capital Market to the Company's Growth*
- m. *National Defense Training*

Employee Training Budget

During 2018 the Company has conducted various types of training to improve employee competency and skills, this can be seen from the number of participants and training hours that increased significantly in 2018. The number of training participants has increased by 47.47% compared to 2017 which amounted to 1,740 people when compared to RKAP target which was 686 people per year, increased sharply by 61%, as well as the number of training conducted during 2018 realized 17,541 hours then when compared to the number of hours in 2017 increased 57%. Although the cost experienced an efficiency / decreased by Rp 776,019,791, which was 29.06% of the realized costs in 2017, but this was not an obstacle thanks to budget and trainer optimization internally.





TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

*Supporting Business
Review*

SUMBER DAYA MANUSIA *Human Resources*

JUMLAH KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Secara komposisi, PT BARATA INDONESIA (PERSERO) memiliki karyawan sejumlah 1044 pada tahun 2018, dan mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 45,21 % dari tahun 2017 yaitu sebanyak 472 orang yang karena adanya hasil proses rekrutmen untuk memenuhi perkembangan bisnis perusahaan serta adanya proses akuisisi PT Siemens Indonesia cabang Cilegon. Berikut ini adalah komposisi karyawan berdasarkan jenjang jabatan, tingkat pendidikan, status karyawan, wilayah kerja, jenis kelamin, dan usia.

KOMPOSISI KARYAWAN

Pada tahun 2018, karyawan organik / karyawan tetap PT Barata Indonesia (Persero) cukup seimbang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah karyawan tidak tetap dengan prosentase sebesar 51% berbanding 49% dari total keseluruhan karyawan.

Number Of Employees And Development Of Employee Competencies

In composition, in 2018 PT BARATA INDONESIA (PERSERO) has 1044 employees, and experienced a significant increase of 45,21 % from 2017 by 472 people due to the results of the recruitment process to meet the company's business development and the acquisition of PT Siemens Indonesia Cilegon branch. The following is the composition of employees based on position, education level, employee status, work area, gender, and age.

Employees Composition

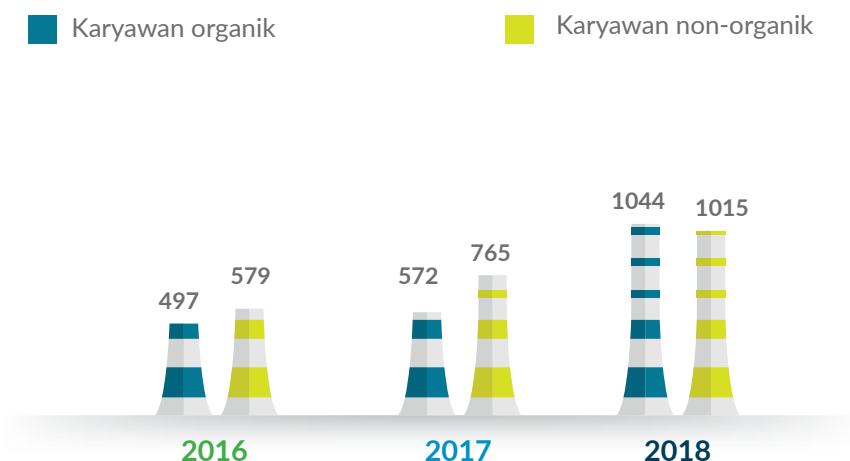
In 2018, organic employees/permanent employees of PT Barata Indonesia (Persero) was balanced compared to the number of non-permanent employees with a percentage of 51% compared to 49% of the total employees.

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan Tahun 2016-2018 | Table of Employee Composition Based on Employee Status 2016-2018

STATUS Status	2016	2017	2018
Karyawan organik	497	572	1044
Karyawan non-organik	579	765	1015

GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KARYAWAN TAHUN 2016 - 2018

Graphic of Employee Composition Based on Employee Status



BERDASARKAN JENJANG JABATAN

Dalam rangka pencapaian produktivitas dan optimalisasi hasil, Manajemen telah melakukan evaluasi dalam pemenuhan pengawakan organisasi agar tetap efektif dan efisien. Pada tahun 2018 terdapat peningkatan yang cukup signifikan dimana jumlah karyawan dengan jabatan Staff meningkat 48%, Supervisor 48%, Manager 17%, dan General Manager meningkat 29% dibandingkan tahun 2017.

Based on Position Level

To achieve productivity and optimizing work results, Management has evaluated the fulfillment of organizational oversight to remain effective and efficient. In 2018 there was a significant increase where the number of employees with Staff positions increased 48%, Supervisors 48%, Managers 17%, and General Managers increased 29% compared to 2017.

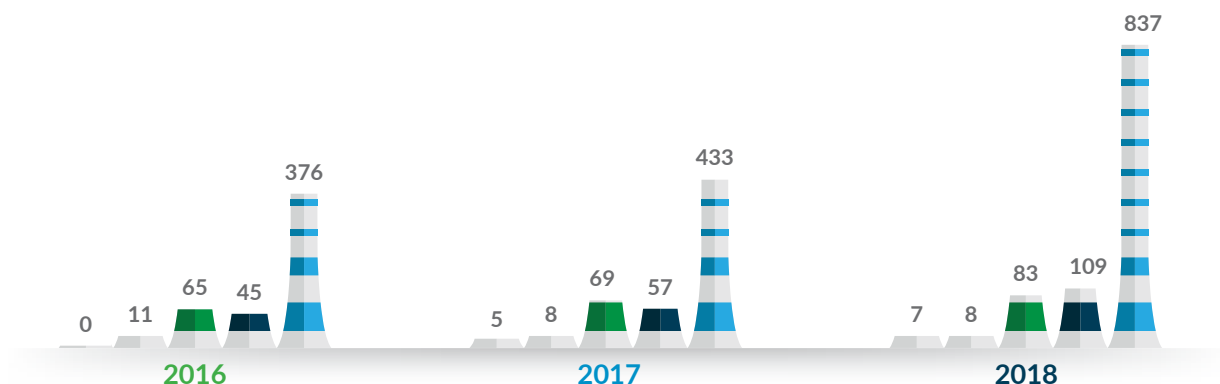
Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2016-2018* | Table of Employee Composition Based on Employees position level 2016-2018*

Jenjang Jabatan Jenjang Jabatan	2016	2017	2018
GM	0	5	7
Manajer Biro	11	8	8
Manajer Bidang / Bagian	65	69	83
SPV	45	57	109
Staff / officer / pelaksana	376	433	837

GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN JENJANG JABATAN TAHUN 2016 - 2018

Graphic of Employee Composition Based on Employees position level 2016-2018

GM Manajer Biro Manajer Bidang / Bagian SPV Staff / officer / pelaksana



BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Langkah strategis PT Barata Indonesia dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan di tahun 2018 sangat didukung oleh aspek kualitas sumber daya yang dimiliki, terutama terkait dengan upaya pemenuhan posisi-posisi strategis yang akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Bentuk perhatian khusus terhadap kualitas SDM tersebut menitikberatkan pada tingkat pendidikan karyawan, dengan komposisi yang relatif meningkat dari tahun ke tahun.

Based on Education Level

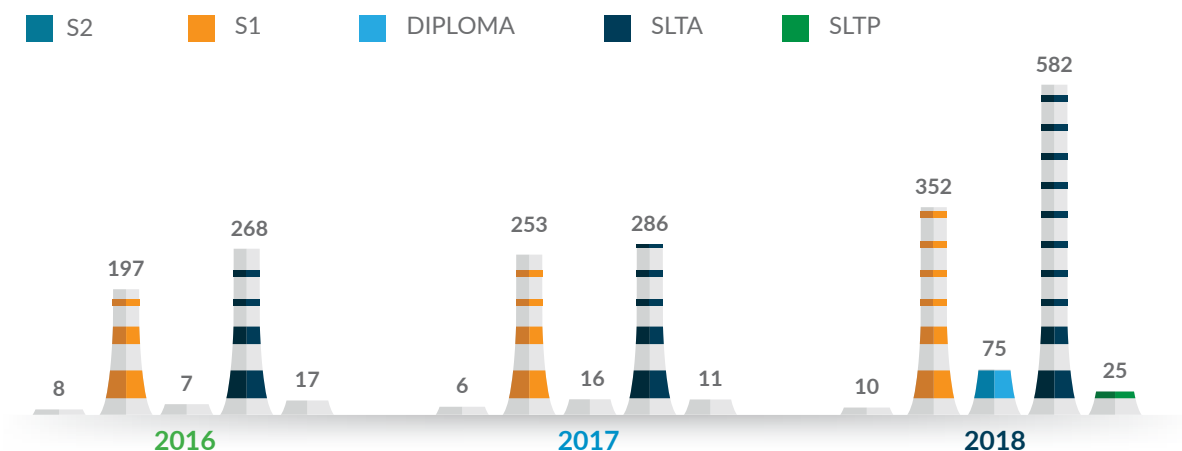
PT Barata Indonesia strategic steps in an effort to improve company performance in 2018 is strongly supported by the quality of its resources, especially related to efforts to fulfill strategic positions that will affect company's decision-making and policy. The form of special attention to human resources quality focuses on employees education level, with a relatively increasing composition from year to year.

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2018* | Table of Employee Composition Based on Education Level 2016-2018 *

Pendidikan	2016	2017	2018
S2	8	6	10
S1	197	253	352
DIPLOMA	7	16	75
SLTA	268	286	582
SLTP	17	11	25

Grafik Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016 - 2018

Graphic of Employee Composition Based on Education Level 2016-2018



BERDASARKAN WILAYAH KERJA

Lingkup wilayah kerja PT Barata Indonesia (Persero) tersebar di 5 lokasi dimana kota Gresik sebagai Kantor Pusat dengan jumlah presentase sebesar 42% dari total keseluruhan karyawan. Adapun 4 wilayah kerja yang lain adalah Kantor Perwakilan Jakarta, Pabrik Tegal, Pabrik Cilegon (termasuk Divisi Komponen Turbin), dan Pabrik Medan.

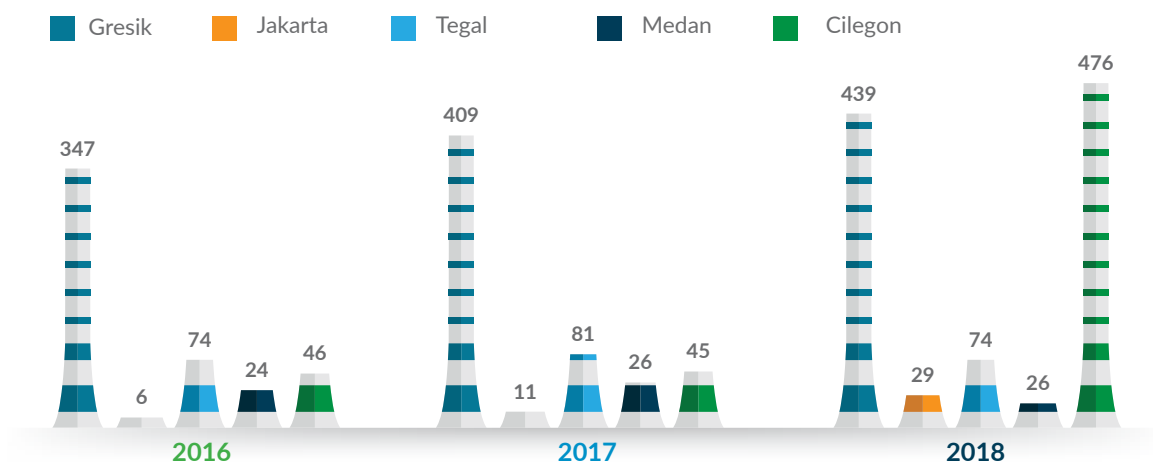
Based on Work Area

PT Barata Indonesia (Persero) work area is spread in 5 locations, with its main location in Gresik as Head Office and dominates 42% of the total employees. The other 4 work areas are Jakarta Representative Office, Tegal Factory, Cilegon Factory (including Turbine Component Division), and the Medan Factory.

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2016-2018* | Table of Employee Composition Based on Work Areas in 2016-2018 *

LOKASI Location	2016	2017	2018
Gresik	347	409	439
Jakarta	6	11	29
Tegal	74	81	74
Medan	24	26	26
Cilegon	46	45	476

GRAFIK KOMPOSISI BERDASARKAN WILAYAH KERJA TAHUN 2016 - 2018 Graphic of Employee Composition Based on Work Areas in 2016-2018



BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Berdasarkan segmentasi, mayoritas karyawan PT Barata Indonesia (Persero) pada tahun 2018 adalah pria, yaitu sejumlah 956 orang atau 92% dari total jumlah keseluruhan karyawan.

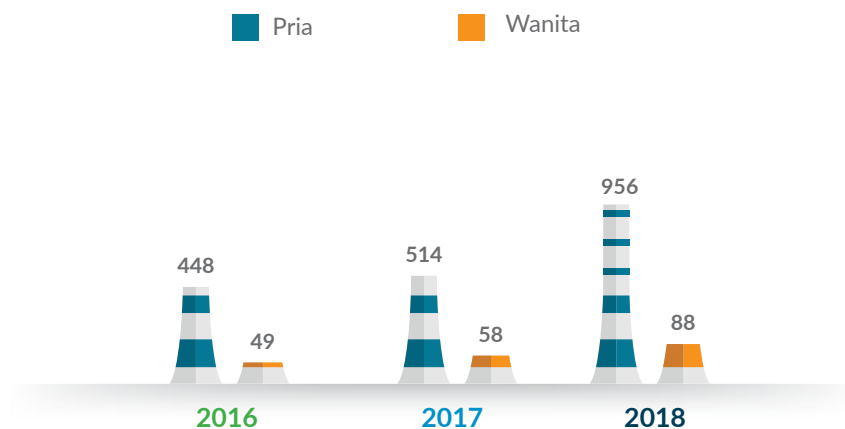
Based on Gender

Based on its segmentation, majority of PT Barata Indonesia (Persero) employees in 2018 are men, 956 people or 92% of the total number of employees.

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016-2018* | *Table of Employee Composition by Gender 2016-2018 **

JENIS KELAMIN <i>Based on Gender</i>	2016	2017	2018
Pria	448	514	956
Wanita	49	58	88

**GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2016 - 2018**
Graphic of Employee Composition by Gender 2016-2018



BERDASARKAN USIA

Perusahaan terus berbenah untuk memperkuat sumber daya manusia melalui program rekrutmen karyawan secara signifikan pada tahun 2018 guna percepatan laju organisasi serta dalam rangka program kaderisasi atau persiapan pengganti bagi para purnabhakti. Hal ini dapat terlihat dari jumlah / komposisi karyawan pada tahun 2018 dimana pertumbuhan karyawan dari kelompok millenials pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 42,21% yang terdiri dari kelompok usia 21-35 tahun.

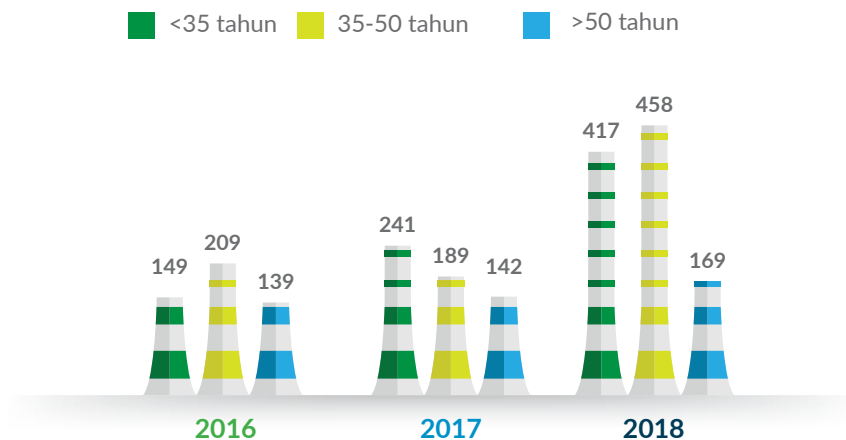
By age

The Company continues to improve itself to strengthen human resources through a significant employee recruitment program in 2018 to fulfill and accelerate the pace of the organization and regarding to regeneration program to prepare substitutes for retired workers. This can be seen from the composition of employees in 2018 where the growth of employees from the millenials in 2018 experienced a significant increase compared to 2017, which amounted to 42.21%, consisted of 74% increase for 21-35 year age group

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia Tahun 2016-2018* | *Table of Employee Composition by Age 2016-2018 **

USIA <i>Age</i>	2016	2017	2018
< 35 tahun	149	241	417
35 - 50 tahun	209	189	458
> 50 tahun	139	142	169

GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN
USIA TAHUN 2016 - 2018
Graphic of Employee Composition by Age 2016-2018



MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Secara organisasi, pengelolaan sumber daya manusia di PT Barata Indonesia berada di bawah tanggung jawab Direktur Keuangan & SDM yang eksekusi pelaksanaannya dilakukan Biro Sumber Daya Manusia, yang membawahi 3 bidang yaitu Bidang Rekrutmen & Asesmen, Bidang Pengembangan SDM serta Bidang Remunerasi & Kepersonaliaan. Biro SDM berperan dalam proses pengelolaan karyawan mulai dari awal penerimaan karyawan, pengembangan, pemenuhan hak dan fasilitas karyawan serta persiapan karyawan dalam memasuki masa purna bakti. Sistem dan proses pengelolaan SDM bersifat dinamis dari tahun ke tahun dengan tetap menyelaraskan perkembangan serta dinamika bisnis perusahaan.

Human Resource Management

Organizational management of human resources at PT Barata Indonesia is under the responsibility of Director of Finance & HR which its implementation is conducted by Human Resources Bureau, which oversees 3 fields, Recruitment & Assessment, HR Development and Remuneration & Personality. The HR Bureau plays a role in employees management process starting from the beginning of employee recruitment, development, fulfillment of employee rights and facilities as well as preparation of employees in entering its retirement period. HR management system and process is dynamic from year to year by aligning to the Company's business development and dynamics.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM

PT Barata Indonesia saat ini tengah melakukan proses penyempurnaan strategi pengelolaan SDM yang disesuaikan dengan kebijakan yang dimiliki. Kebijakan pengelolaan SDM selama ini berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2017 - 2019 dan berbagai *Operating Procedure Agreement (OPA)* dan *Work Instruction (WI)* yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban karyawan serta prosedur administrasi maupun tata kelola organisasi.

HR Management Policy

*PT Barata Indonesia is currently in the process of improving HR management strategy which is tailored to the policies it already has. HR management policy has been adhering to the prevailing laws and regulations as well as the Collective Labor Agreement (PKB) for 2017 - 2019 period and various *Operating Procedure Agreement (OPA)* and *Work Instruction (WI)* which regulate employees' rights and obligations and administration procedures and organizational governance.*

PERENCANAAN SDM

Untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dalam jangka panjang, PT Barata Indonesia senantiasa melakukan perencanaan dan *mapping* kebutuhan karyawan dengan memperhatikan beberapa faktor internal dan eksternal perusahaan yang meliputi perkembangan dan arah bisnis perusahaan, jumlah dan rencana pensiun karyawan, perkiraan beban kerja, kebutuhan dan kelangkaan karyawan dengan kompetensi tertentu di masa depan, serta pertimbangan rencana anggaran keuangan perusahaan. Selanjutnya perencanaan SDM jangka panjang tersebut diturunkan dalam rencana SDM tahunan (RKAP) yang disusun sebelum tahun berjalan yang meliputi detail jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahun berjalan disertai dengan analisis ketersediaan tenaga kerja, serta analisis pemenuhan disertai target pemenuhan tenaga kerja yang dibutuhkan. Semua hal diatas menjadi fokus perhatian PT Barata Indonesia agar perencanaan dan pemenuhan SDM dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

HR RECRUITMENT

PT Barata Indonesia terus melakukan upaya pemenuhan tenaga kerja dengan tetap berpedoman pada perkembangan arah bisnis perusahaan dan perencanaan SDM pada tahun berjalan. Melalui mekanisme rekrutmen internal dan eksternal, perusahaan berupaya untuk terus mengembangkan karyawan dari sisi jumlah dan kualitas dengan penerapan proses seleksi yang komprehensif dan transparan. Pola rekrutmen internal dilakukan melalui proses promosi dan rotasi karyawan ataupun penugasan karyawan sebagai salah satu wujud implementasi pengembangan karir dan *mapping* karyawan dari segi kompetensi. Di samping itu, proses peningkatan status karyawan kontrak (internal) menjadi karyawan tetap juga menjadi salah satu alternatif proses pelaksanaan rekrutmen untuk memberikan kesempatan kepada para karyawan kontrak dengan kompetensi atau keterampilan yang telah teruji dengan masa kerja tertentu dan atas rekomendasi dari pimpinan lembaga terkait.

Pelaksanaan rekrutmen eksternal selama ini terutama untuk rekrutmen karyawan dari lulusan Diploma dan Sarjana dari berbagai perguruan tinggi melalui mekanisme proses seleksi secara bertahap. PT Barata Indonesia dalam hal ini melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan lembaga konsultan rekrutmen untuk mendapatkan kandidat terbaik. Selama kurun waktu terakhir, PT Barata Indonesia secara konsisten berupaya untuk melakukan proses regenerasi dan perbaikan demografi karyawan dengan melakukan proses perekrutan tenaga-tenaga

HR Planning

To ensure the availability of human resources (HR) in long term, PT Barata Indonesia always plans and maps employees needs by observing the Company's internal and external factors which include the development and direction of the Company's business, number and employee retirement plans, estimating workload, needs and scarcity of employees with certain competencies in the future, and considering the Company's budget plans. Furthermore, long-term HR planning is derived from the annual HR plan (RKAP) prepared before the current year which includes details of the number and qualifications of the workforce needed in the current year accompanied by an analysis of labor availability, and fulfillment analysis along with the target of fulfilling the required workforce. All of the above are the focus of PT Barata Indonesia's attention so that planning and fulfillment of HR may run effectively and efficiently.

HR Recruitment

PT Barata Indonesia continues to seek efforts to fulfill its workforce while still adhering to the Company's business direction and HR planning development in the current year. Through internal and external recruitment mechanism, the Company strives to continue to develop its employees both in quantity and quality by implementing a comprehensive and transparent selection process. Internal recruitment mechanism is conducted through promotion and employee rotation or assignment as one of the manifestations of employee career development and mapping in competence. Additionally, the process of increasing non-permanent employees (internal) to permanent employees is also one of the alternative recruitment processes to provide opportunities to contracted employees with competencies or skills that have been tested within certain period of service and on the recommendation of the head of relevant units.

So far, external recruitment implementation was mainly intended for the recruitment of employees from Diploma and Bachelor graduates' background from various universities through gradual selection process mechanism. PT Barata Indonesia in this case collaborated with several universities and recruitment consulting institutions to recruit the best candidates. During the last period, PT Barata Indonesia consistently seeks to regenerate and improve employee demographics by conducting new personnel recruitment process through Management Trainee (MT) program to

baru melalui program *Management Trainee* (MT) guna mendukung dan memperkuat lini bisnis perusahaan. *Management Trainee* akan diberikan program *training* dan pendampingan serta ditempatkan atau ditugaskan di berbagai unit kerja untuk menambah kemampuan dan kompetensi serta mampu mengaplikasikan kemampuan *leadership* di tempat kerja. Setelah mengikuti program tersebut selama 6 (enam) bulan, maka akan dilakukan proses evaluasi ulang sebelum diangkat menjadi karyawan tetap.

Pada tahun 2018 jumlah *Management Trainee* (MT) baru yang telah berhasil direkrut oleh PT Barata Indonesia berjumlah 80 orang atau meningkat sebesar 16% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Dalam rangka memperbaiki demografi tenaga kerja dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga ahli / profesional siap pakai, perusahaan juga melakukan proses perekrutan eksternal melalui jalur rekrut *pro-hire* guna mengimbangi laju perkembangan bisnis yang semakin cepat.

PENGEMBANGAN SDM

Peningkatan & pengembangan karyawan dalam segi kapasitas dan kapabilitas adalah salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap produktivitas dan kinerja perusahaan. Dari segi kapasitas, PT Barata Indonesia terus berupaya untuk melakukan proses regenerasi melalui program rekrutmen dan seleksi karyawan yang berkelanjutan. Di sisi lain, program pengembangan karyawan dari sisi kapabilitas dilakukan melalui pelaksanaan *training* baik secara internal maupun eksternal yang disesuaikan dengan analisa kebutuhan *training* tahunan yang mencakup *training* keahlian, keterampilan serta *training* manajemen atau kepemimpinan untuk meningkatkan kompetensi karyawan agar mampu berdaya saing dan mampu memperkuat fokus bisnis perusahaan. Pada tahun 2018, realisasi jam *training* di PT Barata Indonesia berjumlah 17.541 jam atau meningkat sebesar 57% dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2017.

support and strengthen the Company's business lines. Management Trainees will be enrolled in training and mentoring programs and placed or assigned to various work units to increase their abilities and competencies and be able to apply leadership skills in the workplace. After participating in the program for 6 (six) months, a re-evaluation process will be conducted before being appointed as a permanent employee.

In 2018 the number of new Management Trainees (MT) that had been recruited by PT Barata Indonesia were 80 people or increased by 16% compared to 2017. In order to improve the workforce demographics and to meet the needs of ready-to-use experts/professionals, the company also conducted an external recruitment process through pro-hire recruitment lines to counter balance business development dynamics.

HR Development

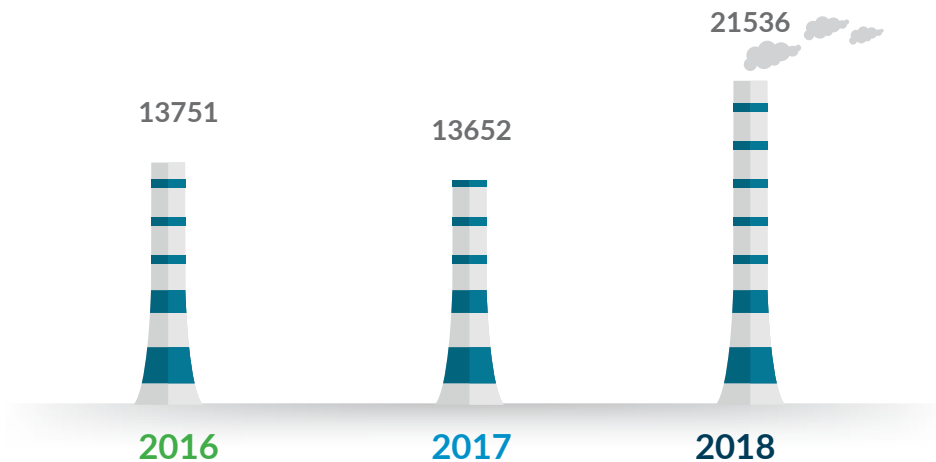
Employees' improvement & development of employees in terms of capacity and capability is one of the main factors that influence company productivity and performance. In terms of capacity, PT Barata Indonesia continues to strive to conduct regeneration process through a continuous employee recruitment and selection program. On the other hand, employees development programs from capabilities side are conducted through training implementation both internally and externally tailored to the annual training needs analysis which includes training in skills, expertise and management or leadership training to improve employee competencies to be competitive and strengthen the Company's business focus. In 2018, the realization of training hours at PT Barata Indonesia amounted to 17,541 hours or increased by 57% compared to 2017.

Tabel Jam Training Tahun 2016 - 2018 | [Tabel Training Hours Tahun 2016 - 2018](#)

Jam Training Training Hours	2016	2017	2018
Jumlah	13.750	7.540	17.541

GRAFIK JAM TRAINING TAHUN 2016 - 2018

Grafik Jam Training Tahun 2016 - 2018



PT Barata Indonesia tetap melaksanakan pelatihan mandatory yang terkait dengan penguatan dan pengembangan kompetensi inti berupa training-training di bidang pengecoran, EPC dan manufaktur untuk lebih memperkuat fokus bisnis perusahaan meskipun pada tahun 2018 secara jumlah peserta mengalami penurunan peserta / partisipan sebesar 1% jika dibandingkan dengan tahun 2017.

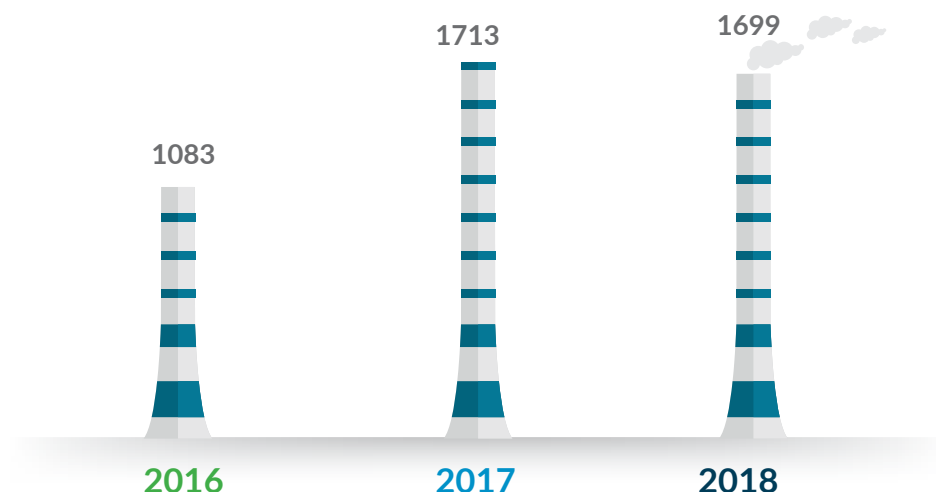
PT Barata Indonesia continues to implement mandatory training related to strengthening and developing core competencies in the form of trainings in the fields of casting, EPC and manufacturing to further strengthen the Company's business focus even though in 2018 the number of participants decreased by 1% compared to the year 2017.

Tabel Peserta Training Tahun 2016 - 2018 | Tabel Peserta Training Tahun 2016 - 2018

Peserta Training Peserta Training	2016	2017	2018
Jumlah orang	1083	1713	1699

TABEL PESERTA TRAINING TAHUN 2016 - 2018

Tabel Peserta Training Tahun 2016 - 2018



SISTEM MANAJEMEN KINERJA

Implementasi penilaian kinerja karyawan di PT Barata Indonesia dilakukan melalui sistem manajemen kinerja. Dengan aplikasi sistem berbasis online, sistem manajemen kinerja dapat diakses secara real time oleh masing-masing user sehingga memudahkan dalam proses implementasi dan monitoring. Implementasi sistem manajemen kinerja meliputi proses perencanaan, pengelolaan kinerja dan evaluasi. Ketiga tahapan tersebut menjadi salah satu alat dalam memantau / memonitor 2 (dua) aspek utama dalam pengelolaan karyawan yaitu penilaian kinerja individu dan perilaku karyawan.

SKEMA SIKLUS MANAJEMEN KINERJA

Siklus manajemen kinerja karyawan dilakukan berdasarkan penilaian Key Performance Indicator (KPI) Individu yang menitikberatkan pada penilaian pada aspek Kinerja dan aspek Perilaku. Penilaian Kinerja karyawan dilakukan oleh masing-masing atasan langsung dan selanjutnya disampaikan secara personal dengan baik dan benar kepada karyawan yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam Operating Procedure Agreement (OPA), penilaian kinerja karyawan dinilai setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dikompilasikan ke Biro SDM sebanyak 2 periode dalam setahun yaitu periode Januari sampai dengan Juni dan periode Juli sampai dengan Desember. Penilaian tersebut digunakan sebagai dasar pemberian reward & punishment bagi karyawan.

MANAJEMEN KARIR

Penerapan manajemen karir di PT Barata Indonesia berpedoman pada pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan untuk mengembangkan karirnya. Salah satu tujuan penerapan sistem tersebut adalah untuk menyusun succession planning dalam rangka pengawakan organisasi. Jalur karir yang diterapkan terdiri dari dua yaitu karir profesional serta jalur karir struktural. Jalur karir profesional lebih menitikberatkan pada pemberian kesempatan kepada karyawan untuk menekuni bidang keahlian masing-masing dan jalur struktural lebih menitikberatkan pada pemberian kesempatan bagi karyawan yang memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan untuk mengembangkan serta mengimplementasikannya dalam organisasi. Secara umum pengelolaan karir dan talent karyawan mengacu

Performance Management System

employee performance appraisal at PT Barata Indonesia implementation is conducted through a performance management system. With an online-based system application, performance management system can be accessed in real time by each user to facilitate the implementation and monitoring process. performance management system implementation includes planning, performance management and evaluation process. These three stages become one of the tools in monitoring 2 (two) main aspects of employee management, namely the individual performance assessment and employee behavior (Individual KPI).

Performance Management Cycle Schemes

Employee performance management cycle is based on t Individual Key Performance Indicator (KPI) assessment which focuses on evaluating Performance and Behavior aspects. Employee Performance Evaluation is implemented by each supervisor directly and then delivered personally and properly to the relevant employees. As stipulated in Operating Procedure Agreement (OPA), employee performance appraisals are assessed every 3 (three) months and compiled to HR Bureau for 2 periods in a year, namely January to June period and July to December period. The assessment is used as the basis for giving reward & punishment to employees, especially related to evaluating Grade increases and providing compensation and work incentives.

Career Management

Career management implementation at PT Barata Indonesia is rooted by providing equal opportunities for all employees to develop their careers. One of the objectives of implementing the system is to develop succession planning in order to guard the organization. The career path implemented consists of two professional careers and structural career paths. Professional career paths are more focused on providing opportunities for employees to pursue their respective fields of expertise while structural paths are more focused on providing opportunities for employees who have managerial and leadership abilities to develop and implement it in the organization. In general, career management and employee talent refers to the Integrated Talent Management System (ITMS) in BUMN.

pada Integrated Talent Management System (ITMS) di BUMN.

Dengan mempertimbangkan formasi dan kualifikasi atau syarat jabatan, perusahaan dapat menerapkan manajemen karir melalui tahapan assessment oleh tim asessor dari eksternal dan internal untuk menilai kesesuaian formasi jabatan dengan kualifikasi calon pemegang jabatan agar pelaksanaan tetap obyektif dan memenuhi standard kualitas. Dengan menerapkan proses mapping dan berpedoman pada nine boxes diagram, perusahaan dapat mengevaluasi dan melakukan langkah pengembangan apabila terdapat karyawan yang belum memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan tertentu.

Pada tahun 2018 PT Barata Indoneisa telah melaksanakan promosi terhadap 20 karyawan serta rotasi (alih tempat tugas) terhadap 21 karyawan

PENERAPAN REWARD DAN PUNISHMENT

REWARD

Reward atau apresiasi kepada karyawan merupakan salah satu bentuk penghormatan karyawan untuk memberikan dorongan dan motivasi agar setiap karyawan tetap berkembang, memiliki semangat dan menumbuhkan keterikatan karyawan kepada perusahaan. Pada tahun 2017 dan 2018 PT Barata Indonesia telah menerapkan sistem penggajian berdasarkan grading system dengan memperhitungkan sistem 3P yaitu People, Position dan Performance dengan mengedepankan prinsip keadilan.

Salah satu bentuk reward yang diberikan perusahaan kepada karyawan pada tahun 2018 adalah Insentif Karya (Inkar) dan Kompensasi Karya (Komkar).

1. Insentiff Karya (Inkar) adalah bonus tahunan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan kinerja atau laba perusahaan.
2. Kompensasi Karya (Komkar) adalah bentuk reward yang diberikan atas dasar perhitungan realisasi kemenangan Harga Pokok Produksi (HPP) per order yang mencapai 100% dibanding Harga Pokok produksi Standard Perhitungan Harga dan diberikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bentuk penghargaan / apresiasi lain yang dilakukan PT Barata Indonesia adalah Penghargaan Pengabdian karyawan dengan masa kerja 10, 20, 25 dan 30 tahun serta penghargaan kepada karyawan berprestasi. Di samping itu perusahaan juga memberikan fasilitas bantuan

By considering the formation and qualifications or office term, the Company can implement career management through the assessment stage by the external and internal assessment team to assess the suitability of the position formation with the qualifications of prospective office holders so that the implementation remains objective and meets quality standards. By implementing the mapping process and guided by nine boxes diagrams, the Company may evaluate and conduct development steps if there are employees who have not met the criteria for occupying certain positions.

In 2018 PT Barata Indonesia has promoted 20 employees and conducted rotations (over assignments) to 21 employees

Reward and Punishment Implementation

Reward

Reward or appreciation to employees is one form of employee appreciation to provide encouragement and motivation so that every employee continues to grow, has enthusiasm and fosters employee attachment to the Company. In 2017 and 2018 PT Barata Indonesia has implemented a payroll system based on grading systems by considering 3P system, namely People, Position and Performance by prioritizing fairness principle.

One form of reward given by the company to employees in 2018 is Work Incentive (Inkar) and Work Compensation (Inkar).

1. *Insentiff Work (Inkar) is the annual bonus given to employees based on performance or Company profits.*
2. *Work Compensation (Komkar) is a form of reward given based on the calculation of the realization of winning Cost of Production (HPP) per order that reaches 100% compared to Cost of Production Standard Calculation and is given every 3 (three) months.*

Other forms of appreciation from PT Barata Indonesia is an employee dedication award with 10, 20, 25 and 30 years of service and awards to outstanding employees. In addition, the Company also provides educational assistance facilities, mortgages for natural disaster relief, grief relief, and assistance

Pendidikan, kredit kepemilikan rumah/ KPR Bantuan Musibah Bencana Alam, Bantuan Suka Duka, serta Bantuan bagi Karyawan yang Diskorsing/Ditahan. Dari sisi *non financial*, perusahaan juga memberikan atensi / perhatian kepada karyawan yang melangsungkan pernikahan atau merayakan ulang tahun dengan pemberian kue atau *greeting card*. Selama kurun waktu 2018, jumlah penerima penghargaan masa kerja ada 16 orang serta 5 penghargaan bagi karyawan berprestasi.

for employees who are suspended/detained. In terms of non-financial, companies also pay attention to employees who hold a wedding or celebrate a birthday by giving a cake or greeting card. During 2018, there were 16 recipients of office service award and 5 awards for outstanding employees.

PUNISHMENT

Melalui Biro SDM, perusahaan menerapkan sistem pemberian punishment terhadap para karyawan yang melakukan pelanggaran berupa sanksi atau hukuman disiplin berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sistem pemberian punishment bertujuan untuk memberikan kesadaran akan arti pentingnya kedisiplinan dan ketertiban karyawan dalam rutinitas kerja sehari-hari sehingga pemberian jenis sanksi selalu menitikberatkan pada jenis pelanggaran yang dilakukan, dampak yang ditimbulkan serta unsur perbuatan yang dilakukan. Jenis sanksi yang berlaku meliputi sanksi disiplin ringan, sanksi disiplin sedang dan sanksi disiplin berat.

Punishment

Through HR Bureau, the company implemented punishment system to employees who commit violations in the form of sanctions or disciplinary penalties based on violations level committed. Punishment system aimed to provide awareness of the discipline importance and orderliness to employees in their daily work routines so that the provision of this type of sanction always focuses on the types of violations committed, the impact caused and the elements of actions taken. The types of sanctions that implemented include mild, moderate and severe disciplinary sanctions.

Sanksi yang diberikan berdasarkan jenis sanksi yang berlaku di PT BARATA INDONESIA (PERSERO) ditunjukkan dalam skema di bawah ini.

Sanctions given are based on the type of sanctions which implemented at PT BARATA INDONESIA (PERSERO) indicated in the scheme below.

JENIS PELANGGARAN DISIPLIN

Types Of Discipline Violations

PELANGGARAN RINGAN *Lightning Violation*

PERINGATAN LISAN
TERCATAT
Oral Warning Is Recorded

PELANGGARAN SEDANG *Medium Violation*

PERINGATAN TERTULIS I
Warning Written I
PERINGATAN TERTULIS II
Warning Written II
PERINGATAN TERTULIS III
Warning Written III

PELANGGARAN BERAT *Weight Breach*

PENURUNAN PANGKAT/
JABATAN (DEMOSI)
Types Of Discipline Violations
PEMBERHENTIAN
SEMENTARA (SKORSING)
Temporary Termination
(Scoring)
PEMBERHENTIAN TIDAK
TERHORMAT
Termination Of Respect

SKEMA SANKSI YANG DIBERIKAN BERDASARKAN JENIS PELANGGARAN

Upaya manajemen untuk membangun kesadaran akan kedisiplinan karyawan diwujudkan dalam budaya disiplin kerja melalui pendekatan Disiplin Waktu Kerja, Disiplin 5 Menit Meeting, Disiplin Penggunaan Seragam Kerja, Disiplin Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), Disiplin Keselamatan Kerja, serta Disiplin 5R. Melalui penerapan keterlibatan jajaran manajemen dan sistem kontrol yang berkelanjutan, laporan kedisiplinan karyawan akan berpengaruh terhadap pemberian *reward* dan *punishment*. Pada tahun 2018 tidak ada karyawan yang diberikan *punishment* secara tertulis namun hanya berupa teguran lisan atas pelanggaran disiplin ringan dan diharapkan semakin turun dari tahun ke tahun.

SURVEI IKLIM ORGANISASI

Kepuasan Karyawan (*Employee Satisfaction*) dan Keterikatan Karyawan (*Employee Engagement*) merupakan elemen penting bagi perusahaan yang akan berpengaruh terhadap iklim organisasi serta produktivitas kerja karyawan. Setiap tahun sekali PT. Barata Indonesia selalu melaksanakan survei untuk mengukur tingkat kepuasan dan keterikatan karyawan secara internal baik melalui sistem *online* atau *paper based*. Tujuan dari pelaksanaan survei tersebut adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi riil iklim organisasi serta menjangkau aspirasi / harapan dari seluruh karyawan sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan terhadap aspek-aspek yang masih belum tercapai. Adapun beberapa aspek yang dimasukkan dalam survei adalah hubungan kerja, sistem remunerasi, budaya organisasi, lingkungan kerja, *career planning*, pengembangan diri serta komitmen terhadap pekerjaan / perusahaan. Dibandingkan dengan tahun 2017, hasil *survey* kepuasan karyawan relatif sama dibanding tahun 2017 dan hasil *survey* keterikatan karyawan meningkat sebesar 1 % dibanding tahun 2017.

Scheme of Punishment Based on Violation Type

Management's efforts to build employee discipline awareness are manifested in a work discipline culture through Work Time Discipline approach, 5 Minute Discipline Meeting, Discipline in Work Uniforms usage, Personal Protective Equipment (PPE) usage, Work Safety Discipline, and 5R Discipline. Through the involvement of management ranks and a continuous control system, employee discipline reports will affect reward and punishment. In 2018 there were no employees who are given written punishment but only in verbal reprimand for light discipline violations and are expected to decline from year to year.

Organizational Climate Survey

Employee Satisfaction and Employee Engagement are important elements for companies that will affect the organization's climate and employees work productivity. Each year, PT. Barata Indonesia always conduct surveys to measure employees satisfaction and engagement level internally through online or paper based systems. The purpose of conducting the survey is to provide an overview of the real conditions of the organization's climate and obtain all employees aspirations / expectations so that steps can be taken to improve the aspects that have not yet been achieved. The aspects included in the survey are work relations, remuneration systems, organizational culture, work environment, career planning, self-development and commitment to work / company. The results of the employee satisfaction survey were relatively the same compared to 2017 and the survey results of employee engagement increased by 1% compared to 2017.

TEKNOLOGI INFORMASI *Information Technology*

Teknologi Informasi (TI) telah menjelma menjadi salah satu aspek penting bagi semua instansi dan perusahaan. Perkembangan Teknologi Informasi yang bergerak

Information Technology (IT) has become one of essential aspects for all institutions and companies. Information Technology development which moves quickly has become a

cepat dan sudah menjadi suatu kebutuhan, menuntut perusahaan untuk berbenah dan menerapkannya dalam beberapa sektor bisnis yang bertujuan menyelaraskan dengan tuntutan zaman. Dalam perspektif industri konstruksi, penerapan Teknologi Informasi menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Bagi PT Barata Indonesia, penggunaan dan penyesuaian Teknologi Informasi memiliki nilai tinggi, di samping memudahkan operasional kerja perusahaan, penggunaan Teknologi Informasi secara optimal juga menjadi langkah inovatif dalam jangka panjang untuk bersaing dengan perusahaan lainnya.

IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi Informasi merupakan suatu perangkat yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat manusia saat ini, apalagi bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam operasional bisnisnya. Implementasi Teknologi Informasi akan meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Laju perkembangan teknologi yang dari tahun ke tahun terus tumbuh pesat membuat setiap perusahaan untuk terus bergegas membenahi struktur operasional kerjanya bila tidak ingin tertinggal dengan perusahaan lainnya. Sadar akan pentingnya Teknologi Informasi, PT Barata Indonesia berupaya mengimplementasikan Teknologi Informasi semaksimal mungkin guna memudahkan operasional bisnis yang dijalankan. PT Barata Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan Teknologi Informasi disetiap lini bisnisnya. Hal ini merupakan upaya untuk mengimbangi perkembangan teknologi dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif. PT Barata Indonesia akan terus bergerak mengintegrasikan Teknologi Informasi ke semua lini usaha yang dijalankan, terutama ke lini usaha yang membutuhkan sentuhan teknologi secara langsung. Penerapan Teknologi Informasi di PT Barata Indonesia difokuskan untuk memenuhi beberapa prinsip, sebagai berikut:

1. Perusahaan bertanggungjawab atas pengembangan solusi TI Perusahaan dengan melibatkan unit bisnis terkait dalam proses identifikasi masalah dan solusi dari permasalahan tersebut. Solusi TI harus sejalan dengan *Master Plan* TI dan *Standard Operating Environment* (SOE), yang dikembangkan melalui *Software Development Life Cycle* (SDLC) yang meliputi analisis kebutuhan bisnis dan sistem, perancangan sistem, pengembangan sistem, pengujian sistem, operasional dan pemeliharaan sistem.
2. Perusahaan bertanggungjawab mengelola aset Teknologi Informasi yang meliputi Data, Informasi,

necessity, require the company to improve and implement it in various business sectors that aim to align with the current development. From construction industry perspective, Information Technology implementation is very important to be developed. For PT Barata Indonesia, the usage and adjustment of Information Technology has a high value, besides facilitating the operation of company work, the optimal use of Information Technology is also an innovative step in the long term to compete with other companies.

Information Technology Implementation

Today, information Technology is a device that cannot be separated from human life, especially for companies which using technological facilities in their business operations. We believe that Information Technology implementation will improve company's performance. The pace of technological development that continues to grow rapidly each year makes every company to keep rushing to improve the operational structure of their work if they do not want to be left behind by other companies. Aware of Information Technology importance, PT Barata Indonesia seeks to implement Information Technology to the maximum extent to facilitate business being operation. PT Barata Indonesia continues to strive to improve Information Technology services in all of its business line. This is an effort to counterbalance technological developments to face the increasingly competitive business competition. PT Barata Indonesia will continue to integrate Information Technology into all business lines, especially to business lines that require technology directly. Information Technology implementation at PT Barata Indonesia is focused to meet several principles, as follows:

1. *The Company is responsible to develop the Company's IT solutions by involving relevant business units in the process of identifying problems and solutions to those problems. IT solutions shall be in line with IT Master Plan and Standard Operating Environment (SOE), which are developed through Software Development Life Cycle (SDLC) which includes business and system requirements analysis, system design, system development, system testing, system operation and maintenance.*
2. *The Company is responsible for managing Information Technology assets which include Data, Information,*

Aplikasi, Perangkat Lunak, Infrastruktur, Perangkat Keras, dan Sumber Daya Manusia. Setiap karyawan dilarang menggunakan aset TI untuk kepentingan yang mendatangkan keuntungan pribadi, atau hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian perusahaan.

3. Perusahaan bertanggungjawab dalam melakukan identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko TI sesuai kerangka kerja manajemen risiko.
4. Perusahaan harus menunjukkan komitmen dalam mendukung pengelolaan keamanan aset TI, dengan memberikan arahan dan pembagian tugas yang jelas. Untuk menjamin bahwa semua akses sesuai dengan kebutuhan bisnis yang paling baik dan menerapkan minimum akses, Bagian Teknologi Informasi bertanggung jawab mengelola dan mengatur infrastruktur teknologi informasi perusahaan yang digunakan untuk mendukung jalannya aplikasi perusahaan. Hak akses atas aplikasi diberikan kepada personil atas dasar kewenangan yang ditentukan berdasar tugas pokok dan fungsi jabatannya, sedangkan Bagian Teknologi Informasi bertanggung jawab menyusun sistem keamanan data, informasi dan aplikasi yang selanjutnya hal tersebut dituangkan ke dalam matrik keamanan sistem proses bisnis perusahaan.
5. Perusahaan bertanggung jawab melakukan pengendalian internal TI.
6. Perusahaan bertanggung jawab mengelola kepatuhan TI terhadap standar dan regulasi maupun kebijakan TI yang dibuat oleh PT Barata Indonesia (Persero), dan produk-produk hukum lainnya, seperti hukum dan undang-undang yang mengatur Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dalam menjalankan kebijakan ini, Bagian TI berkomitmen untuk memaksimalkan penggunaan perangkat lunak *open source* dalam kegiatan operasionalnya.
7. Perusahaan mendukung terciptanya budaya dan peningkatan kompetensi teknologi informasi seluruh karyawan berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatannya.

Applications, Software, Infrastructure, Hardware, and Human Resources. All employees is prohibited from using IT assets for personal benefits, or other things that may cause the Company's loss.

3. *The Company is responsible for identifying, evaluating, controlling and monitoring IT risk according to the risk management framework.*
4. *The Company shall show its commitment in supporting IT asset security management, by providing clear direction and duties division. To ensure that all access is in accordance with the best business needs and implement minimum access, Information Technology Department is responsible for managing the Company's information technology infrastructure which is used to support the Company's applications. The right of access to the application is given to personnel on the basis of authority determined based on their main duties and functions, while Information Technology Department is responsible for compiling data, information and application security systems, which are then incorporated into the Company's business process system security matrix.*
5. *The Company is responsible for conducting internal IT controls.*
6. *The Company is responsible for managing IT compliance with IT standards and regulations and policies made by PT Barata Indonesia (Persero), and other legal products, such as laws and regulations governing Intellectual Property Rights (IPR). In conducting this policy, IT Department is committed to maximizing open source software usage in its operational activities.*
7. *The Company supports the creation of culture and improvement of information technology competencies of all employees based on their main duties and functions.*

BIAYA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 2018

Pada tahun 2018, PT Barata Indonesia mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Teknologi Informasi adalah sebesar Rp.15 M dengan realisasi mencapai Rp 14 M atau 90 % dari total anggaran

Information Technology Cost in 2018

In 2018, PT Barata Indonesia allocated a budget for Information Technology development which was Rp.15 M with the realization amounted to Rp.14 billion or 90% of the total budget

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 2018

Untuk mendukung ekspansi bisnis yang dijalankan, dibutuhkan strategi khusus guna mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, salah satunya adalah lewat penggunaan Teknologi Informasi yang maksimal. Untuk itu, pada tahun 2018, PT Barata Indonesia telah mengembangkan beberapa perangkat Teknologi Informasi yang diharapkan mampu memperlancar arus usaha PT Barata Indonesia. Adapun perangkat Teknologi Informasi yang dikembangkan pada tahun 2018, yaitu:

1. Pembangunan Teknologi Jaringan Berbasis Fiber Optik
2. Pengembangan Aplikasi Internal berbasis web
3. Integrasi aplikasi berbasis internet dan *Virtual Private Network*
4. *Implementasi Enterprises Resource Planning*

Dalam pengembangan dan evaluasi aplikasi, Bagian Teknologi Informasi telah mengimplementasikan konsep *Software Development Life Cycle*.

IMPLEMENTASI ERP SISTEM PT BARATA INDONESIA

Dalam mendukung penerapan Enterprise Resource Planning di PT Barata Indonesia, pada tahun 2018, perusahaan dengan menggandeng konsultan mengimplemtasikan *System Application and Processing* (SAP). Proses penerapan SAP dilakukan selama enam bulan. Ada enam modul di SAP yang diterapkan di PT Barata Indonesia, yaitu :

1. *Material Management*
2. *Production and Planning*
3. *Project Sytem*
4. *Sales and Distribution*
5. *Finance*
6. *Controlling*

Proses penerapan dimulai dari analisis strategi usaha yang berkaitan dengan proses bisnis, yaitu input, proses, dan output. Hasil dari analisis tersebut, maka dibuatlah beberapa dokumentasi sebagai berikut :

- a. Mendokumentasikan format-format form yang berlaku
- b. Memetakan sumber data (use/create) informasi proses bisnis
- c. Membuat *flow* proses bisnis

Information Technology Development in 2018

To support business expansion, special strategies are needed to be able to compete with other companies, one of which is by using Information Technology maximally. For this reason, in 2018, PT Barata Indonesia has developed several Information Technology devices that are expected to be able to streamline the business flow of PT Barata Indonesia. The Information Technology devices developed in 2018, namely:

1. *Development of Optical Fiber-Based Network Technology*
2. *Web-based Internal Application Development*
3. *Integration of internet-based applications and Virtual Private Networks*
4. *Enterprises Resource Planning Implementation*

In the applications development and evaluation, Information Technology Department has implemented Software Development Life Cycle concePT

ERP System Implementation in PT Barata Indonesia

In supporting Enterprise Resource Planning implementation at PT Barata Indonesia, in 2018, the Company was cooperated with consultants to implement System Application and Processing (SAP). The process of implementing SAP was conducted for six months. There are six modules in SAP which implemented at PT Barata Indonesia, namely:

1. *Material Management*
2. *Production and Planning*
3. *Project Sytem*
4. *Sales and Distribution*
5. *Finance*
6. *Controlling*

The implementation process starts from the business strategies analysis related to business processes, namely input, process, and output. From the analysis results, the following documentations are prepared:

- a. *Documenting formats of the applicable form*
- b. *Mapping data sources (use/create) business process information*
- c. *Creating business process flow*

- d. Menentukan kode master (*customer, supplier, material, mesin, proses, departemen, dan akun keuangan*)

Sesuai dengan jadwal SAP akan mulai digunakan pada maret 2019.

- d. *Determining master codes (customers, suppliers, materials, machines, processes, departments, and financial accounts)*

In accordance with the schedule, SAP will be implemented in March 2019.

RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 2018

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, manufaktur, dan *Foundry*, PT Barata Indonesia terus bergerak melakukan inovasi sesuai permintaan industri dan bisnis investasi infrastruktur. Untuk mendukung pengembangan bisnis di tahun 2019, PT Barata Indonesia telah merancang dan menetapkan pengembangan Teknologi Informasi (TI) yang akan direalisasikan di tahun 2019 nantinya. Selain itu, PT Barata Indonesia juga akan melanjutkan program pengembangan perangkat Teknologi Informasi tahun 2018 yang tertunda atau belum sempat direalisasikan sepenuhnya.

Selain merujuk kepada prinsip-prinsip yang ada, penerapan Teknologi Informasi PT Barata Indonesia juga dilaksanakan mengacu pada tahap pengembangan Teknologi Informasi (IT Roadmap), sebagai berikut:

Information Technology Development Plan 2018

As a company engaged in construction, manufacturing and Foundry services, PT Barata Indonesia continues to move forwards to innovate in accordance to industry demand and infrastructure investment business. To support business development in 2019, PT Barata Indonesia has designed and determined Information Technology (IT) development which will be realized in 2019 later. Additionally, PT Barata Indonesia will also continue Information Technology device development program which was postponed or not yet fully realized in 2018.

Other than referring to the existing principles, PT Barata Indonesia's Information Technology implementation is also conducted referring to the development phase of the Information Technology (IT Roadmap), as follows:

TAHAPAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI *Information Technology Roadmap*





Sedangkan aplikasi yang dikembangkan mengikuti arsitektur teknologi informasi yang ada di masterplan TI PT Barata Indonesia.

PELATIHAN BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI 2018

Guna mengimbangi persaingan bisnis di era Teknologi Informasi saat ini, PT Barata Indonesia terus memperkuat lini Sumber Daya Manusia (SDM) terutama yang mengemban tugas dan tanggung jawab di bidang Teknologi Informasi. Untuk itu PT Barata Indonesia mengikutsertakan SDM dengan berbagai pelatihan dan workshop. Berikut ini beberapa pelatihan/training/workshop yang diikuti karyawan PT Barata Indonesia di bidang Teknologi Informasi:

1. Workshop Server
2. Workshop Securiti Jaringan
3. Workshop Teknologi Wifi
4. Workshop Enterprise Resource Planning

TATA KELOLA TI PT BARATA INDONESIA (Persero)

Pelaksanaan Tata kelola TI PT Barata Indonesia (Persero) dilaksanakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:

- Membuat kerangka kerja TI yang sejalan dengan tata kelola perusahaan. Ini dilakukan dengan menjaga keselarasan antara tata kelola TI dengan peraturan dan regulasi yang ada.
- Membangun pemahaman Pengelola Perusahaan agar memahami pentingnya masalah-masalah strategis TI. Ini dilakukan dengan memperkenalkan potensi-potensi yang dimiliki TI untuk berkontribusi bagi kemajuan perusahaan.
- Membuat pencapaian kinerja dan nilai tambah yang maksimum. Pengelola TI harus mampu menyediakan nilai tambah maksimum bagi proses bisnis perusahaan dan meyakinkan bahwa usaha yang maksimum telah dilakukan untuk memungkinkan hal tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang tertib pada manajemen proyek dan program kerja yang baik.
- Membuat manajemen sumber daya dan manajemen risiko yang baik. Pengelola TI harus dapat melakukan alokasi sumber daya yang baik dan manajemen risiko yang memperhitungkan risiko dalam menjalankan fungsi-fungsi TI.

Whereas the application developed following the information technology architecture on IT masterplan of PT Barata Indonesia.

Information Technology Training 2018

To counterbalance business competition in the current Information Technology era, PT Barata Indonesia continues to strengthen its Human Resources (HR) line, especially those who performed duties and responsibilities in Information Technology field. For this reason, PT Barata Indonesia enrolled HR with various trainings and workshops. The following are some trainings / workshops / enrolled by PT Barata Indonesia's employees in Information Technology:

1. Server Workshop
2. Network Security Workshop
3. Wifi Technology Workshop
4. Workshop Enterprise Resource Planning

PT Barata Indonesia (Persero) IT Governance

PT Barata Indonesia (Persero) IT Governance Implementation is conducted for the following purposes:

- *Creating an IT framework which is in line with corporate governance. This is conducted by maintaining harmony between IT governance with existing stipulations and regulations.*
- *Building an understanding for Company Managers to understand the importance of IT strategic issues. This is conducted by introducing IT potential in contributing to the Company progress.*
- *Creating performance achievement and maximum added value. IT managers shall be able to provide maximum added value for the Company's business processes and ensure that maximum effort has been made to enable this. This may be done with orderly approaches to project management and proper work programs.*
- *Creating proper resource management and risk management. IT managers shall be able to allocate good resources and risk management that takes into account risks in conducting IT functions.*

KATALOG LAYANAN TI

Katalog layanan (*Service Catalogue*) adalah daftar layanan yang dapat diberikan oleh Bagian Teknologi Informasi sebagai acuan yang memudahkan user untuk mendapatkan layanan. Adapun layanan tersebut adalah sebagai berikut:

- Layanan Help Desk
- Layanan Email
- Local Area Network / Wifi
- Layanan WAN
- Layanan Internet
- Layanan Server
- Layanan Desktop
- Layanan Hardware
- Layanan Aplikasi
- Layanan Pengembangan Sistem
- Layanan Analisis Sistem
- Layanan Pengembangan Aplikasi
- Layanan Pemeliharaan Sistem
- Layanan Pemeliharaan Aplikasi
- Layanan CCTV
- Layanan Skype

IT Service Catalog

Service catalog (Service Catalog) is a list of services that can be provided by the Information Technology Section as a reference that allows users to get services. The service is as follows:

- *Help Desk Service*
- *Email service*
- *Local Area Network / Wifi*
- *WAN services*
- *Internet services*
- *Server services*
- *Desktop services*
- *Hardware services*
- *Application Services*
- *System Development Services*
- *System Analyst Services*
- *Application Development Services*
- *System Maintenance Services*
- *Application Maintenance Service*
- *CCTV services*
- *Skype services*





ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

*Management
Discussion & Analysis*

TINJAUAN EKONOMI

Economy Overview



I. NERACA PERDAGANGAN INDONESIA

Perekonomian Indonesia 2018 menghadapi tantangan yang tidak ringan dipicu ketidakpastian global yang meningkat. Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, ketidakpastian global memberikan tantangan bagi pengelolaan ekonomi di sektor eksternal, baik dari jalur perdagangan maupun jalur finansial. Dari jalur perdagangan, kinerja ekspor menurun akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan harga komoditas yang turun. Tantangan dari jalur perdagangan makin kuat karena pada saat bersamaan permintaan impor untuk proyek infrastruktur domestik cukup besar, sehingga meningkatkan kompleksitas dalam mengelola defisit transaksi berjalan pada level yang sehat. Dari jalur finansial, tantangan berkaitan dengan menurunnya aliran masuk modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia, karena dipicu kenaikan suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) dan ketidakpastian pasar keuangan global. Tantangan dari global ini kemudian menurunkan kinerja neraca pembayaran Indonesia (NPI) terutama pada triwulan II dan III 2018, serta meningkatkan tekanan pada nilai tukar Rupiah.

I. Indonesia's Trade Balance

In 2018 Indonesia's economy faced challenges which triggered by increasing global uncertainty. As a country with an open economy, global uncertainty poses a challenge for economy management in external sector, both from trade and financial. From trade, export performance declined due to slow down of world economic growth and decline of commodity prices. The challenge in trade was getting stronger because at the same time the import demand for domestic infrastructure projects was quite large, thus increased the complexity in managing the current account deficit at sound level. From financial side, challenges related to the decline of foreign capital inflows to developing countries, including Indonesia, were triggered by an increase in US (US) monetary policy rates and the uncertainty of global financial markets. The global challenges then decreased Indonesia's balance of payments (NPI) performance, especially in the second and third quarters of 2018, and increased pressure on Rupiah exchange rate.

Ketidakpastian global yang meningkat dipicu tiga perkembangan yang kurang menguntungkan. Pertama, pertumbuhan ekonomi dunia melambat dari 3,8% pada 2017 menjadi 3,7% pada 2018. Pertumbuhan ekonomi yang melambat kemudian menurunkan pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global. Kedua, suku bunga *Federal Funds Rate* (FFR) naik lebih cepat dan lebih tinggi dari respons tahun sebelumnya, sehingga memicu risiko pembalikan aliran modal dari negara berkembang. Ketiga, ketidakpastian pasar keuangan global meningkat dipicu beberapa faktor seperti peningkatan ketegangan perdagangan Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok dan negara lain, risiko geopolitik seperti perundingan Brexit dan krisis di beberapa negara berkembang seperti Argentina dan Turki. Ketiga faktor ini kemudian mendorong investor global menarik dananya dan mengancam stabilitas eksternal negara berkembang. Mata uang berbagai negara melemah tajam terhadap dolar AS dan menimbulkan kerentanan instabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Dari jalur perdagangan, pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat sejak semester II 2018 telah menurunkan permintaan ekspor Indonesia. Harga komoditas yang melemah telah menurunkan *Terms Of Trade* (ToT) Indonesia dan melemahkan kinerja ekspor pada semester II 2018. Di tengah kondisi pertumbuhan impor yang tinggi sejalan dengan permintaan domestik yang kuat, termasuk untuk permintaan proyek infrastruktur, penurunan ekspor pada gilirannya memperlebar defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan (TB) mulai melebar pada triwulan II dan III 2018. Defisit TB pada triwulan II dan III 2018 masing-masing tercatat sebesar 7,9 miliar dolar AS atau 3,01% dari PDB dan 8,6 miliar dolar AS atau 3,28% dari PDB. Kondisi ini lebih tinggi dari defisit triwulan II dan III 2017 masing-masing sebesar 4,4 miliar dolar AS atau 1,8% dari PDB dan 4,2 miliar dolar AS atau 1,6% dari PDB. Berdasarkan komponennya, peningkatan defisit TB pada triwulan II dan III 2018 terutama disebabkan penurunan kinerja neraca perdagangan barang nonmigas akibat kenaikan impor nonmigas. Neraca perdagangan nonmigas turun sejalan dengan peningkatan impor yang didorong kuatnya permintaan domestik. Kenaikan impor terlihat di seluruh komponen, yakni impor bahan baku, impor barang modal, dan impor barang konsumsi.

Increased global uncertainty triggered by three unfavorable developments. First, world economic growth slowed down from 3.8% in 2017 to 3.7% in 2018. Slowing economic growth reduced the world trade volume and global commodity prices growth. Second, Federal Funds Rate (FFR) interest rate rose faster and was higher than the response of the previous year, thus triggered the risk of reversing capital flows from developing countries. Third, uncertainty in global financial market has increased due to several factors, such as increased trade tensions between the United States (US) and China and other countries, geopolitical risks such as Brexit negotiations and crises in developing countries such as Argentina and Turkey. These three factors then encourage global investors to withdraw their funds and threaten the external stability of developing countries. The currencies of various countries sharply weakened against the US dollar and caused vulnerability to macroeconomic and financial system instability.

From the trade side, world economic growth which has slowed since the second semester of 2018 has reduced demand for Indonesian exports. The decline of commodity prices have reduced Indonesia's terms of trade (ToT) and weakened export performance in semester II 2018. Amid high import growth which was in line with strong domestic demand, including demand for infrastructure projects, the decline in exports increase the current account deficit. The current account deficit (TB) began to widen in the second and third quarters of 2018. Current account deficit in the second and third quarters of 2018 was recorded at 7.9 billion US dollars or 3.01% of GDP and 8.6 billion US dollars or 3.28% of GDP. This condition is higher than the deficit in the second and third quarters of 2017 amounted to 4.4 billion US dollars or 1.8% of GDP and 4.2 billion US dollars or 1.6% of GDP. Based on its components, the increase in the TB deficit in the second and third quarter of 2018 was mainly due to the decline in the performance of the non-oil and gas goods trade balance due to the increase in non-oil and gas imports. Non-oil and gas trade balance fell in line with the increase in imports driven by strong domestic demand. The increase in imports was seen in all components, namely imports of raw materials, imports of capital goods, and imports of consumer goods.

RINCIAN Details	2016	2017					TOTAL	2018					TOTAL
		I	II	III	IV	I		II	III	IV			
I. TRANSAKSI BERJALAN	-17,0	-2,0	-4,4	-4,2	-5,6	-16,2	-5,3	-7,9	-8,6	-9,1	-11,1		
A. Barang Netto	15,3	5,6	4,8	5,3	3,1	18,8	2,3	0,3	-0,5	-2,6	-0,4		
• Ekspor	144,5	40,8	-39,2	43,4	45,6	168,9	44,4	43,7	47,7	44,9	180,7		
• Impor	129,2	-35,1	-34,3	-38,1	-42,5	-150,1	-42,1	-43,5	-48,2	-47,5	-181,2		
B. Jasa-Jasa, neto	-7,1	-1,1	-2,0	-2,1	-2,1	-7,4	-1,6	-1,8	-2,0	-1,6	-7,1		
C. Pendapatan Primer, neto	-29,6	-7,7	-8,1	-8,6	-7,8	-32,1	-7,5	-8,0	-7,9	-7,0	-30,4		
D. Pendapatan Sekunder, neto	4,5	1,1	1,0	1,1	1,2	4,5	1,4	1,6	1,8	2,0	6,9		
II. TRANSAKSI MODAL & FINANSIAL	29,3	6,7	5,3	9,6	7,1	28,7	2,2	3,3	3,9	15,7	25,2		
A. Transaksi Modal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
B. Transaksi Finansial	29,3	6,7	5,3	9,6	7,1	28,7	2,3	3,3	3,9	15,7	25,2		
1. Investasi langsung, neto	16,1	2,6	4,5	7,0	4,4	18,5	4,8	2,5	4,6	2,0	13,8		
2. Investasi portofolio, neto	19,0	6,5	8,1	3,8	2,6	21,1	-1,1	0,1	-0,1	10,4	9,3		
3. Derivativ finansial, neto	-0,0	-0,1	0,0	-0,0	-0,1	-0,1	0,1	0,0	0,1	-0,2	-0,1		
4. Investasi lainnya, neto	-5,8	-2,5	-7,3	-1,2	0,2	-10,7	-1,5	0,7	-0,7	3,5	2,0		
III. TOTAL (I+II)	12,4	4,6	1,0	5,4	1,6	12,5	-3,1	-4,6	-4,7	6,5	-5,9		
VI. SELISIH PERHITUNGAN BERSIH	-0,3	-0,1	-0,2	-0,0	-0,6	-1,0	-0,8	0,3	0,3	-1,1	-1,3		
V. NERACA KESELURUHAN (III+IV)	12,1	4,5	0,7	5,4	1,0	11,6	-3,9	-4,3	-4,4	5,4	-7,1		
VI. CADANGAN VISA DAN YANG TERKAIT	-12,1	-4,5	-0,7	-5,4	-1,0	-11,6	3,9	4,3	4,4	-5,4	7,1		
MEMORANDUM:													
• Posisi Cadangan Devisa	116,4	121,8	123,1	129,4	130,2	130,2	126,0	119,8	114,8	120,7	120,7		
• Bulan impor dan pembayaran Utang LN pemerintah	8,4	8,6	8,6	8,6	8,3	8,3	7,7	6,9	6,3	6,3	6,5		
• Transaksi berjalan/PDB(%)	-1,82	-0,84	-1,73	-1,61	-2,16	-1,60	-2,07	-3,01	-3,28	-3,57	-2,98		

Tabel 1. Neraca Pembayaran Republik Indonesia Tahun 2018.

Sumber : Bank Indonesia

Dari jalur finansial, surplus transaksi modal dan finansial menurun dipicu kenaikan FFR dan ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi ini kemudian meningkatkan premi risiko investasi di negara berkembang dan akhirnya mendorong pembalikan modal dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Kenaikan FFR mengurangi daya tarik penanaman modal asing di negara berkembang. Aliran masuk modal asing ke negara berkembang yang berkurang telah meningkatkan tekanan kepada mata uang negara berkembang, termasuk nilai tukar Rupiah. Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah juga kuat karena saat bersamaan defisit transaksi berjalan

Tabel 1. Neraca Pembayaran Republik Indonesia Tahun 2018.
 Sumber : Bank Indonesia

From financial side, the capital and financial account surplus declined due to the increase in FFR and uncertainty in the global financial market. This condition then increases the investment risk premium in developing countries and ultimately encourages the reversal of capital from developing countries, including Indonesia. The increase in the FFR reduced the attractiveness of foreign investment in developing countries. The reduced inflow of foreign capital to developing countries has increased pressure on emerging market currencies, including the Rupiah exchange rate. Pressure on Rupiah exchange rate was also strong because at the same time Indonesia's current account deficit widened in line with

Indonesia melebar sejalan pertumbuhan impor yang tinggi untuk pemenuhan permintaan domestik yang solid. Selain itu, ekspor yang menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat juga turut menekan kinerja transaksi berjalan.

high import growth to meet solid domestic demand. In addition, declining exports along with slowing world economic growth also helped reduce the performance of the current account.

II. PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI DAN NILAI TUKAR

Momentum pemulihan ekonomi Indonesia berlanjut pada 2018. Pertumbuhan ekonomi 2018 tercatat 5,17%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,07% dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 2013. Secara umum, kinerja tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia tetap solid, mengingat pada saat bersamaan pertumbuhan ekonomi dunia 2018 dalam tren melambat dan ketidakpastian global sedang meningkat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat pada 2018 banyak ditopang oleh permintaan domestik. Pertumbuhan konsumsi dan investasi meningkat didukung pendapatan yang membaik, keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur, serta daya beli yang terjaga sejalan dengan tekanan inflasi yang rendah.

Inflasi pada 2018 tetap rendah terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%, meskipun pada saat bersamaan Rupiah mengalami depresiasi. Inflasi Indeks Harga Konsumen pada akhir 2018 tercatat 3,13%, sehingga membuat inflasi berada dalam kisaran sasaran dalam 4 tahun berturut-turut. Inflasi 2018 tercatat rendah, baik bila dibandingkan dengan capaian inflasi tahun 2017 (3,61%) maupun dengan rerata historis empat tahun terakhir (4,59%).

Nilai tukar Rupiah pada 2018 secara rerata melemah 6,05% (yoy) ke level Rp14.246 per dolar AS dari Rp13.385 per dolar AS pada 2017. Secara point-to-point (ptp), nilai tukar Rupiah melemah 5,65% dan ditutup di level Rp 14.380 per dolar AS pada akhir 2018. Namun demikian, pelemahan Rupiah tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi mata uang negara lain seperti Rupee India, Rand Afrika Selatan, Real Brazil, dan Lira Turki. Volatilitas Rupiah pada 2018 meningkat dari 3,0% pada 2017 menjadi berada pada level 8,5%. Volatilitas rupiah pada 2018 juga lebih rendah dibandingkan dengan kondisi beberapa mata uang lain, dengan volatilitas tertinggi terjadi di Turki yakni 30,4%.

II. Economic Growth, Inflation and Exchange Rate

Indonesia's economic recovery momentum continues in 2018. 2018 economic growth was recorded at 5.17%, an increase compared to the previous year's growth which was 5.07% and was the highest growth since 2013. In general, the performance showed that Indonesia's economy remained strong, considering at the same time 2018 world economic growth is in a slowing trend and global uncertainty is increasing. Indonesia's economic growth which increased in 2018 was largely supported by domestic demand. Increased consumption and investment growth was supported by improved income, continued development of infrastructure projects, and maintained purchasing power in line with low inflationary pressures.

In 2018 inflation remained low under control in the target range of 3.5 ± 1%, even though at the same time the Rupiah had depreciated. The Consumer Price Index inflation at the end of 2018 was 3.13%, making inflation within the target range in 4 consecutive years. 2018 inflation was recorded low, both compared to the inflation achievement in 2017 (3.61%) and with the historical average of the last four years (4.59%).

Rupiah exchange rate in 2018 weakened 6.05% (yoy) to a level of Rp14,246 per US dollar from Rp13,385 per US dollar in 2017. In point-to-point (ptp), the Rupiah exchange rate weakened 5.65 % and closed at Rp14,380 per US dollar at the end of 2018. However, the weakening of the Rupiah is still lower than the depreciation of other currencies such as Indian Rupees, South African Rands, Brazilian Real, and Turkish Lira. volatility of Rupiah in 2018 increased from 3.0% in 2017 to 8.5%. Volatility of Rupiah in 2018 was also lower compared to the conditions of several other currencies, with the highest volatility occurring in Turkey which was at 30.4%.

TINJAUAN INDUSTRI *Industrial Overview*

Indonesia merupakan salah satu negara industri terbesar di dunia, dimana dengan letak geografis diapit dua benua, saat ini Indonesia berhasil masuk dalam 10 besar sebagai negara penghasil nilai tambah terbesar dunia dari sektor Industri dan peringkat ke-4 dari segi persentase kontribusi industri.

Industri yang menjadi andalan Indonesia adalah pengolahan non-migas dengan cabang industri logam dasar, industri makanan dan minuman, industri mesin dan perlengkapan, serta industri alat dan transportasi.

Aktivitas manufaktur sebagai salah satu jenis industri diukur kondisinya melalui *Purchasing Manager Index* (PMI) atau indeks manajer pembelian manufaktur Indonesia.

Pada tahun 2018, *Purchasing Manager Index* (PMI) atau indeks manajer pembelian manufaktur Indonesia mengalami sedikit melambat yaitu 51,2 dibanding tahun 2017 berada di angka 51,4. Meskipun begitu, sepanjang tahun 2018 rata-rata Indonesia berada pada level di atas 50. Hal ini menandakan sektor manufaktur dalam negeri terus menunjukkan tanda untuk terus meningkatkan produktivitas. Di level Asia Tenggara, geliat industri di Indonesia lebih baik daripada Thailand, Malaysia dan Singapura. Sementara itu, PMI manufaktur Asean terpantau berada di posisi 50,3 pada Desember 2018, melambat dibanding capaian bulan sebelumnya di posisi 50,4. Melalui kebijakan dari pemerintah untuk deregulasi dan *debottlenecking* yang disertai dengan mempermudah persyaratan dan perizinan, data PMI yang dirilis Nikket & Markit menunjukkan pencapaian PMI diatas 50 kembali pada akhir 2018. Kondisi PMI diatas 50 menandakan manufaktur sedang berlangsung ekspansif. Hal ini semakin kondusif dengan peringkat kemudahan melakukan bisnis (*ease of doing business*) yang masih baik yaitu peringkat 73 pada tahun 2018 yang mana pada tahun sebelumnya berada di peringkat 72.

Dalam tinjauan regional, Indonesia dinilai sudah menjadi basis produksi industri manufaktur terbesar di ASEAN. Hal ini seiring upaya pemerintah yang ingin mentransformasi ekonomi agar fokus terhadap pengembangan industri pengolahan nonmigas dan pada faktanya telah terjadi pergeseran dari *commodity based* ke *manufactured based*. Berdasarkan data *Competitive Industrial Performance* (CIP) Report tahun 2018, Indonesia berada di ranking 38 dunia. Untuk regional ASEAN, CIP index berada di urutan 2 di bawah Thailand.

Indonesia is one of the largest industrial countries in the world, with a geographical location flanked by two continents, currently Indonesia is successfully included in the top 10 in the world's largest producer of added value from Industrial sector and ranked 4th in the industrial contributions percentage.

Indonesia's featured industry is non-oil and gas processing with branches of the basic metal industry, food and beverage industry, machinery and equipment industry, as well as tools and transportations industry.

Manufacturing as one type of industry is measured by purchasing manager index (PMI) or Indonesian Manufacturing Purchasing Manager Index.

In 2018, Purchasing Manager Index (PMI) or Indonesian Manufacturing Purchasing Manager Index experienced a slight slowdown of 51.2 compared to 2017 which was 51.4. Even so, throughout 2018 Indonesia's average level is above 50. This indicates that domestic manufacturing sector continues to show signs of productivity increase. At Southeast Asian level, industrial performance in Indonesia was better than Thailand, Malaysia and Singapore. Meanwhile, ASEAN manufacturing PMI was 50.3 in December 2018, slowing down compared to the previous month's position which was 50.4. Through government policies for deregulation and debottlenecking which were accompanied by simplifying investment requirements and licensing, Nikket & Markit's released PMI data shows the PMI achievement above 50 returns at the end of 2018. PMI positions above 50 indicated manufacturing was expansionary. This was increasingly conducive to the ease of doing business rating which is still good, which is ranked 73rd in 2018, which was ranked 72nd in the previous year.

In a regional review, Indonesia was considered to have become the largest manufacturing industry production base in ASEAN. This was in line with the government's efforts to transform the economy to focus on developing non-oil and gas processing industry which in fact there has been a shift from commodity based to manufactured based. Based on data from the Competitive Industrial Performance (CIP) Report in 2018, Indonesia was ranked 38th in the world. For ASEAN region, Indonesian CIP index was ranked second below Thailand.

Apabila dilihat dari sisi pertumbuhan *Manufacturing Value Added* (MVA), Indonesia menempati posisi tertinggi di antara negara-negara di ASEAN. MVA Indonesia mampu mencapai 4,84%, sedangkan di ASEAN berkisar 4,5%. Di tingkat global, Indonesia saat ini berada di peringkat ke sembilan dunia. Peluncuran *roadmap Making Indonesia 4.0* oleh pemerintah dapat meningkatkan daya saing global.

From manufacturing value added (MVA) growth side, Indonesia occupied the highest position among countries in ASEAN. Indonesian MVA was able to reach 4.84%, while in ASEAN it was around 4.5%. At the global level, Indonesia was currently ranked 9th in the world. Making Indonesia 4.0 roadmap launch by the government may increase global competitiveness.

Bagi PT Barata Indonesia (Persero) kondisi industri yang kondusif tersebut memberikan pengaruh positif baik dalam hal perluasan pasar, perolehan kontrak aktual dan produksi berikut penjualannya. Selain itu posisi Barata sebagai industri antara menempatkan Barata pada posisi fleksibel dalam range pasar yang lebar serta penguasaan pangsa pasar, yaitu sebagai penyedia jasa atas kebutuhan komponen industri berat dari industri hulu sampai dengan industri hilir. Hal ini digambarkan dalam ilustrasi berikut.

For PT Barata Indonesia (Persero) this conducive condition of the industry has positive influence both in market expansion, acquisition of actual contracts and production along with sales. In addition, Barata's position as midstream industry placed Barata in a flexible position in a wide market range and market share control, namely as a service provider for heavy industrial components needs from upstream to downstream industries. This is illustrated in the following illustration.

POSISI STRATEGIS DI DALAM INDUSTRI *Strategy Position In Industry*



Mengutip penjabatan Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian pada Triwulan I tahun 2017 disampaikan bahwa Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang disusun untuk melaksanakan amanat UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 12 dan PP No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035 Pasal 3 telah ditentukan sasaran pembangunan industri diantaranya:

1. Meningkatkan laju pertumbuhan industri pengolahan tanpa migas hingga mencapai 8,4% pada tahun 2019.
2. Meningkatkan peran industri pengolahan tanpa migas dalam perekonomian menjadi 19,4% pada tahun 2019.
3. Mengurangi ketergantungan terhadap impor.
4. Meningkatkan ekspor produk industri.
5. Meningkatkan persebaran dan pemerataan kegiatan industri.
6. Meningkatkan peran industri kecil dan menengah.
7. Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi.
8. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
9. Memperkuat struktur industri.
10. Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
11. Memperkokoh konektivitas ekonomi nasional.

Fokus sasaran industri dan implementasinya berkaitan erat dengan bisnis PT Barata Indonesia (Persero), gerakan pemberdayaan industri yang diantaranya memasukkan program perhatian kepada Industri Strategi di sepanjang jalur Industri Hulu, Industri Antara dan Industri Hilir telah memperkuat keberadaan Perseroan karena terdapat pemberian fasilitas usaha yang sangat membantu dalam jalannya usaha dan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang jelas memihak pada Perseroan. Dimana secara terpisah, Perseroan juga mendapat penugasan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk industri pembangkit listrik dari Pemegang Saham (Kementerian BUMN RI).

Kondisi lain yang mendukung bisnis Perseroan adalah program Pemerintah tentang Pengembangan Industri Prioritas. Bidang prioritas yang dikembangkan secara pasti merupakan lini usaha Perseroan yang menyebabkan Perseroan bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari program yang dicanangkan Pemerintah tersebut. Bidang yang berkaitan tersebut meliputi :

Quoting the position of the National Industry Policy for 2015-2019 issued by Ministry of Industry in the first Quarter of 2017, it was stated that National Industrial Policy (KIN) was compiled to implement the mandate of Law No. 3 of 2014 regarding National Industry Article 12 and PP No. 14 of 2015 regarding 2015 - 2035 National Industrial Development Master Plan Article 3 industrial development targets have been determined including:

1. *Increasing non-oil and gas processing industry growth rate to 8.4% in 2019.*
2. *Increasing the non-oil and gas processing industry's role in the economy up to 19.4% in 2019.*
3. *Reducing dependence on imports.*
4. *Increasing export of industrial products.*
5. *Increasing distribution of industrial activities.*
6. *Increasing the role of small and medium industries.*
7. *Increasing innovation and utilization of technology.*
8. *Increasing employment.*
9. *Strengthening industrial structure.*
10. *Increasing natural resources' added value.*
11. *Strengthening national economic connectivity.*

Industrial goals and its implementation focus is closely related to PT Barata Indonesia (Persero) business, an industrial empowerment movement which includes attention program to Strategy Industries along Upstream Industry pathway, Midstream Industry and Downstream Industry has strengthened the Company's presence because there are very helpful business facilities in the course of the business and programs to increase the use of domestic products which clearly favor the Company. Where separately, the Company also received an assignment to strengthen the Domestic Component Level (TKDN) for the power plant industry from the Shareholders (Ministry of SOEs RI).

Another condition that supports the Company's business is the Government's program on Priority Industry Development. Priority fields that are definitely developed are the Company's business lines which makes the Company to take full advantage of the program launched by the Government. The related fields include:

1. Industri Pangan;
2. Industri Pembangkit Energi;
3. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong & Jasa Industri;
4. Industri Hulu Agro, dan
5. Industri Transportasi

1. *Food Industry;*
2. *Energy Generation Industry;*
3. *Industrial Capital Goods, Components, Auxiliary Materials & Industrial Services;*
4. *Upstream Agro Industry, and*
5. *Transportation Industry*

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PRIORITAS

Program Pengembangan Industri Prioritas



Perseroan bertindak aktif menyikapi kondisi industri yang kondusif pada tahun 2018 dan ditambah lagi dengan Kebijakan Industri Nasional tahun 2015 – 2019 yang telah memberikan ruang gerak bisnis yang fleksibel dan penyediaan pasar yang luas/besar. Mengimbangi hal tersebut telah disusun Strategi Jangka Pendek melalui Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tahun 2018 serta Strategi Jangka Panjang melalui Rencana Kerja Jangka Panjang tahun 2018-2022 dimana hasil positifnya telah tampak pada capaian kinerja yang meningkat pada akhir 2018.

The Company is active in responding to conducive industrial conditions in 2018 and also National Industry Policy for 2015 - 2019 has provided a flexible business space and wide/large market supply. Compensated this, Short-Term Strategy has been compiled through the 2018 Corporate Work & Budget Plan and Long-Term Strategy through 2018-2022 Long-Term Work Plan where the positive results have been seen in the performance achievement that increased in late 2018.

TINJAUAN OPERASIONAL *Operational Overview*

Secara umum, perekonomian Indonesia menunjukkan perbaikan kinerja yang lebih kuat, tumbuh tertinggi dalam empat tahun terakhir, yaitu sebesar 5,17% (yoy). Meskipun masih dibawah target, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 yang sebesar 5,17% itu masih lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2017, sebesar 5,07%. Selain itu stabilitas perekonomian tetap terjaga dengan level inflasi tahun 2018 di 3.13% dari target 4% tahun 2017.

Generally, Indonesian economy showed better improvements, the highest growth in the last four years, namely 5.17% (yoy). Even though it was still below the target, Indonesia's economic growth in 2018 which amounted to 5.17% was still higher than 2017, which was 5.07%. Additionally, economic stability has been maintained with the inflation rate of 2018 at 3.13% from the target of 4% in 2017.

Hal ini tentu saja berpengaruh kepada kondisi usaha Perseroan. Kondisi kondusif perekonomian memberikan peluang yang cukup luas dan beragam. Karenanya secara operasional, produksi Perseroan secara menyeluruh menunjukkan angka yang meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2017. Selain itu terdapat *carry over* pekerjaan dari tahun sebelumnya, meskipun tidak terlalu besar, namun perolehan kontrak tahun 2018 yang meningkat 11% terhadap perolehan tahun 2017 atau tepatnya sebesar Rp 3,65 Triliun telah memberikan ruang gerak produksi yang sangat luas.

This certainly affects the Company's business conditions. The conducive economy conditions provide wide and varied opportunities. Therefore operationally, the Company's production as a whole shows a significant increase compared to 2017. Besides there were carry-over jobs from the previous year, although not too large, the acquisition of 2018 contracts increased by 11% against the acquisition in 2017 or Rp 3.65 Trillion has provided a very wide production space.

Hal yang menarik lainnya, pada pertengahan tahun 2018 Perseroan telah melakukan transformasi bidang usaha yang juga secara signifikan memberikan pengaruh pada luasnya lingkup market yang dijadikan sasaran. Transformasi tersebut merumuskan kembali lini usaha menjadi 4 (empat) lini usaha yang menekankan pada penguasaan menyeluruh dan mendalam pada masing-masing lini usaha untuk tujuan penguasaan pangsa pasar yang lebih tinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam bab Profile Perusahaan, bidang/lini usaha tersebut meliputi :

In mid of 2018 the Company has carried out business sector transformation which also significantly affected the extent of the target market. This transformation reformulated the business line into 4 (four) business lines that emphasized overall and in-depth mastery of each business lines for the higher market share control. As explained in the Company Profile, the Company's business lines include:

1. Food : Industri Pangan (*Food Related Industry*)
Food : *Food Related Industry*
2. Energy : Industri Energi (*Energy Related Industry*)
Energy : *Energy Related Industry*
3. Water : Industri Sumber Daya Air (*Water Resources Related Industry*)
Water : *Water Resources Related Industry*
4. Plus : Industri Berat Selain bidang Food, Energy & Water Resources (*Material Handling Equipment, Cement industry dan industri proses lainnya.*)
Plus : *Heavy Industry Besides Food, Energy & Water Resources (Material Handling) Equipment, Cement industry and other processing industries.*

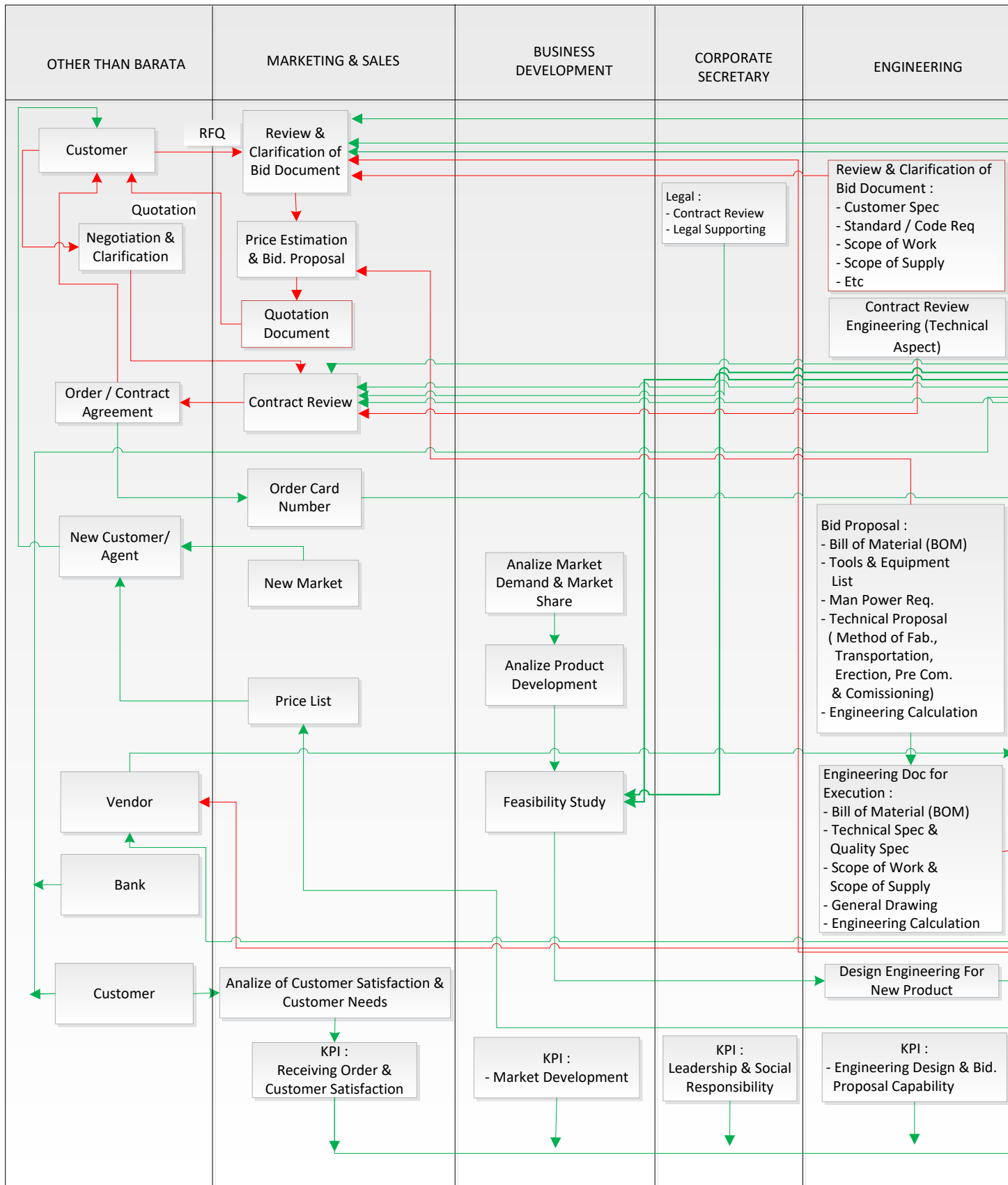


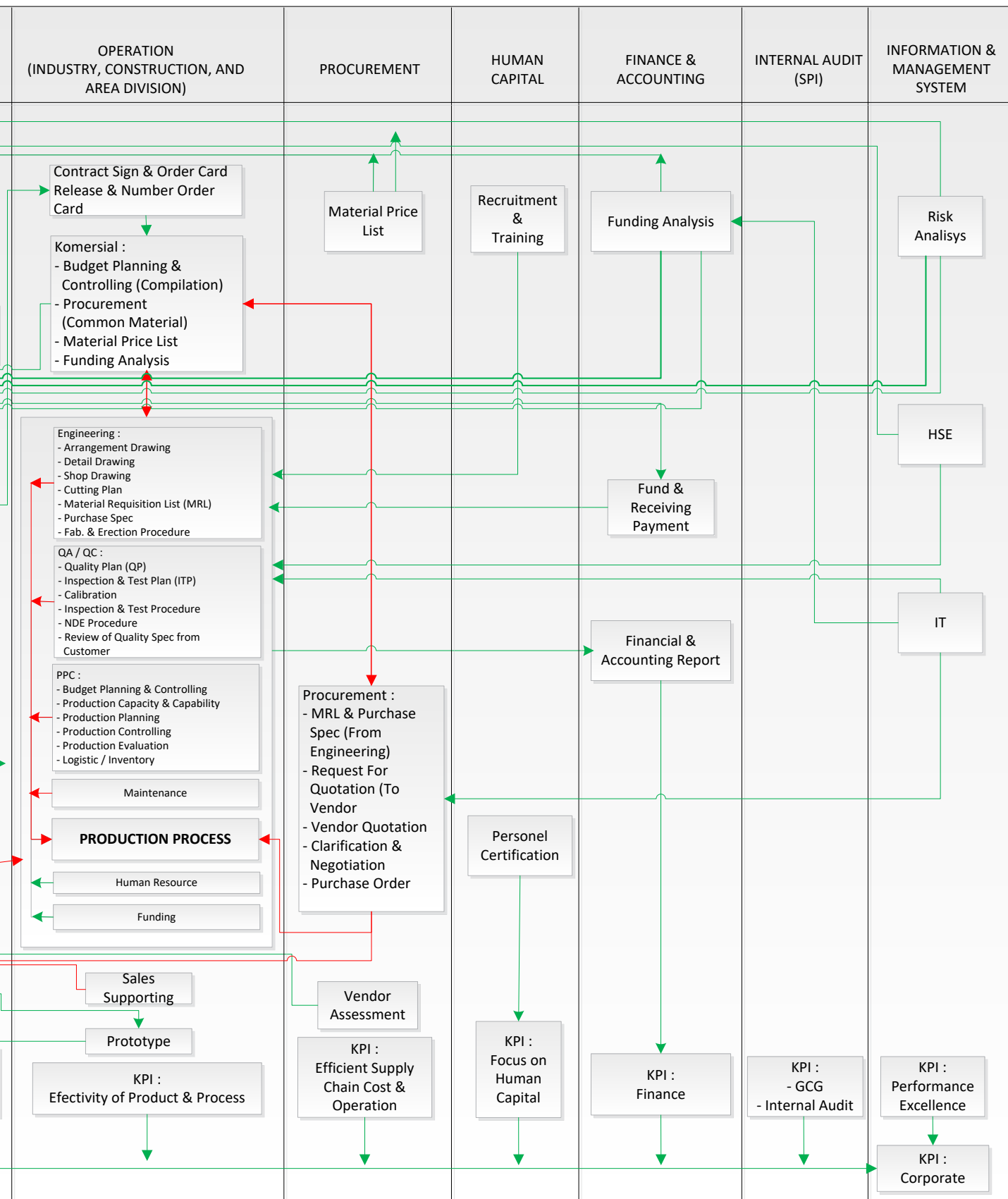
Ditinjau dari pengendalian operasional, Perseroan telah memiliki sistem & prosedur yang harus diterapkan di semua lini. Secara mendasar, melalui Biro Sistem Informasi & Manajemen, telah diformulasikan *flow process* baru yang mendasari semua kegiatan operasional Perseroan sehingga terdapat standar yang sama dengan tujuan memberikan keyakinan kepada *stake holder* atas kepastian operasional yang terkontrol dengan baik. *Flow Process* dimaksud tergambar sebagai berikut:

Judging from operational controls, the Company has systems & procedures that shall be implemented on all fronts. Basically, through Information Systems & Management Bureau, a new flow process has been formulated that underlies all of the Company's operational activities so that there are similar standards with the aim to provide confidence to the stakeholders for well-controlled operational certainty. The intended flow process is illustrated as follows:

DIAGRAM ARUS PT BARATA INDONESIA
(Persero)

Flow Diagram Business Process Of PT Barata
Indonesia (Persero)





NB:

- Garis Hijau Merupakan Flow Supporting
- Garis Merah Merupakan Flow Inti

NB:

- Green Line Is a Supporting Flow
- Red Line Is the Core Flow

Flow Process ini telah menjadi standar operasional dan menjadi bagian penting yang menjadi tolak ukur dalam perolehan sertifikat ISO 9001;2015.

Kaidah-kaidah operasional Perseroan tidak hanya mengacu pada ISO 9001;2015, namun juga ISO 14000:2015 untuk sektor pengamanan lingkungan, OHSAS 18001:2007 untuk sektor pengamanan *Safety, Health & Environment*, ASME STAMP (S, U & U2) untuk pedoman pengerjaan produk-produk minyak & gas dan Sertifikat *Association of American Railroads* sebagai pedoman untuk produk-produk perkeretaapian yang diekspor ke Amerika.

Secara organisasi, Perseroan juga telah memiliki bentuk optimal sebagai acuan koordinasi operasional lintas bagian sehingga *flow process* yang telah ditentukan bisa teraplikasikan dengan baik. Garis komando yang diturunkan oleh Direksi bisa langsung diaplikasikan secara berjenjang dengan baik. Sebagaimana disajikan dalam bab Profil Perusahaan, tampak bahwa terdapat Bagian Biro yang mendukung dan menyediakan berbagai kebutuhan Divisi yang merupakan ujung tombak dalam pencetakan pendapatan Perseroan.

Dari sisi pencapaian tahun 2018 dalam kaitannya dengan output operasional bisa disampaikan bahwa dari Kontrak total sebesar Rp 3,65 Triliun yang diperoleh telah terjual sebesar Rp 2,18 Triliun sehingga menyisakan pekerjaan *carry over* ke tahun 2019 sebesar Rp 2,47 Triliun.

Selain itu terbantu oleh perolahan dana PMN tunai dan non tunai tahun 2016, *output* operasional Perseroan dalam total aset di akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp 4,55 Triliun dengan ekuitas sebesar Rp 1,20 Triliun. Angka-angka capaian operasional Perseroan pada akhir 2018 menghantarkan Perseroan pada posisi bagus dan optimis untuk memasuki tahun 2019.

This Flow Process has become the operational standard and is an important part that becomes a benchmark in obtaining ISO 9001; 2015 certificates.

The Company's operational rules not only refer to ISO 9001; 2015, but also ISO 14000: 2015 for the environmental safeguard sector, OHSAS 18001: 2007 for the security sector Safety, Health & Environment, ASME STAMP (S, U & U2) for guideline for oil & gas products and the Certificate of Association of American Railroads as a guideline for railroad products exported to America.

Organizationally, the Company also has an optimal form as a reference for cross-section operational coordination so that a predetermined flow process can be properly applied. The command line handed down by the Board of Directors can be directly applied in stages. As presented in the Company Profile chapter, it appears that there are Parts of the Bureau that support and provide the various needs of the Division which are the spearhead in the printing of the Company's revenue.

In terms of achievement, in 2018 related to operational output, it could be stated regarding total Contract of Rp 3.65 trillion, it has been sold by Rp 2.18 trillion, leaving Rp 2.47 trillion in carry-over work to 2019.

Besides being helped by obtaining cash and non-cash PMN funds in 2016, the Company's operational output in total assets at the end of 2018 was Rp 4.55 trillion with equity of Rp 1.20 trillion. The Company's operational achievement figures at the end of 2018 lead the Company to a good and optimistic position to enter 2019.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Operational Overview Per Business Segment

Mengawali Rencana Jangka Panjang 2018-2022, Manajemen memperkenalkan keterkaitan issue dunia tentang bisnis '*Food, Energy, Water (FEW)*' dengan bidang/ lini usaha eksisting. Filosofi bahwa sumber daya alam

Starting 2018-2022 Long-Term Plan, Management introduced world issue relevance regarding 'Food, Energy, Water (FEW) business' with the existing business lines. The philosophy that non-renewable natural resources will become scarce at a time

yang tidak dapat diperbarui akan menjadi langka/semakin menipis suatu saat ("FEW+"), namun demikian bagi PT Barata Indonesia (Persero), kondisi tersebut justru menyediakan peluang untuk memenuhi kebutuhan komponen industri yang terus menerus tersedia dan menciptakan sumber pendapatan yang berkesinambungan bagi Perusahaan. Dalam perkembangannya ada beberapa produk yang tidak dicover baik oleh *Food*, *Energy* maupun *Water*. Maka Perusahaan perlu memasukkan unsur inisial baru ke dalam icon lini bisnis yaitu plus (+).

Pada pelaksanaannya bidang-bidang tersebut diimplementasikan ke dalam dua kelompok

1. Proyek konstruksi
2. *Manufacturing*

Dalam tahun 2018 Perusahaan bisa mendapatkan dan menyelesaikan proyek-proyek besar antara lain:

1. Pekerjaan Konstruksi PG Asembagoes, Rendeng dan Bombana
2. Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM), Tegal
3. Bendungan Karian

Dengan realisasi penjualan tahun 2018 berdasarkan lini bisnis adalah sebagai berikut:

1. Divisi Industri Gula dan Agro sebesar Rp 180,4M
2. Divisi Oil and gas sebesar Rp 28,9M
3. Divisi Industri Komponen & Permesinan sebesar Rp 177,9M
4. Divisi Sumber Daya Air sebesar Rp 181,9M

*Catatan: Proyek-proyek besar yaitu multi year, sehingga baru akan selesai tahun 2019.

Pada tahun 2018, Perusahaan telah mengembangkan penguasaan pasar atas produk-produk yang dihasilkan, di mana perubahannya sangat signifikan terutama untuk hidromekanikal. PT Barata Indonesia (Persero) menguasai 75% pasar Indonesia mengalahkan swasta dan produk impor. Sementara untuk komponen kereta api PT Barata Indonesia (Persero) menguasai 60% pasar di Indonesia. Untuk Industri pabrik gula baru, Perusahaan menguasai 50% pasar Indonesia, mengungguli pangsa BUMN lain, swasta dan impor. Untuk EPC terminal bahan bakar dan minyak, Perusahaan menguasai 45% pasar lokal. Sementara untuk pangsa pasar komponen semen, boiler dan pvhe serta pangsa *foundry* untuk komponen kapal, tambang, dan semen Perusahaan hanya menempati 20% dan 15%, bersaing ketat dengan BUMN lain swasta dan impor.

("FEW+"), however, for PT Barata Indonesia (Persero), these conditions actually provide opportunities to meet the needs of sustainable industrial components and create resources sustainable income for the Company. In its development there are several products that are not covered by Food, Energy or Water. So the Company needs to enter new initial elements into the business line icon, namely plus (+).

In its implementation the fields were implemented into two groups

1. Construction project
2. *Manufacturing*

In 2018 the Company was able to obtain and complete major projects, including:

1. PG Asembagoes, Rendeng and Bombana Construction Works
2. Fuel Terminal, Tegal
3. Karian Dam

With sales realization in 2018 based on business lines are as follows:

1. Sugar and Agro Industry Division amounted to Rp 180.4M
2. Oil and gas division amounted to Rp 28.9M
3. Component & Machinery Industry Division amounted to Rp 177.9M
4. Water Resources Division amounted to Rp 181.9M

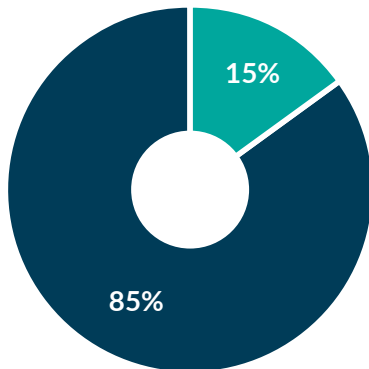
* Note: Large projects are multi years, which will only be completed in 2019.

In 2018, the Company has developed market control over the products produced, where the changes are very significant, especially for hydro mechanical. PT Barata Indonesia (Persero) controls 75% of the Indonesian market defeated private sectors and imported products. While for railway components PT Barata Indonesia (Persero) controls 60% of the market in Indonesia. For the new sugar factory industry, the Company controls 50% of the Indonesian market, surpassing other SOEs' shares, private and imported. While for fuel and oil EPC terminals, the Company controls 45% of the local market. Meanwhile for the market share of cement, boiler and PVHE components as well as foundry for components of ships, mines and cement shares, the Company only gained 20% and 15%, competing closely with other SOEs, private and import.

PANGSA PASAR INDUSTRI AGRO

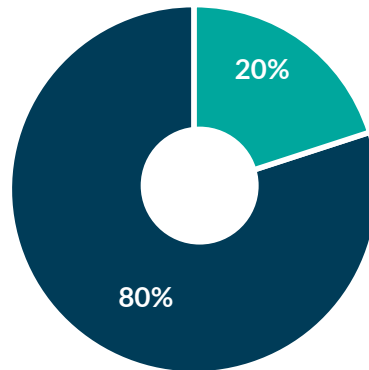
Agro Industry Market Share

EPC Pabrik Gula
Sugar Mills EPC



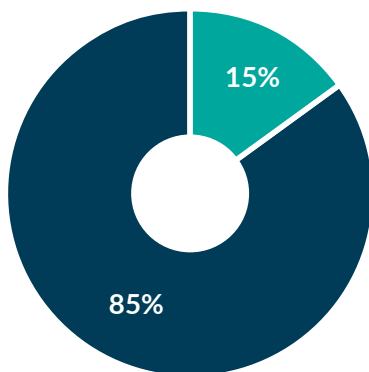
■ BARATA ■ BUMN LAIN & SWASTA

MAINTENANCE PABRIK GULA
Sugar Mills Maintenance



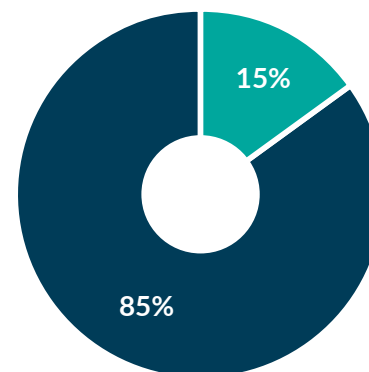
■ BARATA ■ BUMN LAIN & SWASTA

EPC PABRIK KELAPA SAWIT
Palm Oil Factories EPC



■ BARATA ■ BUMN LAIN & SWASTA

EPC MAINTENANCE PABRIK KELAPA SAWIT
Palm Oil Facotories Maintenance

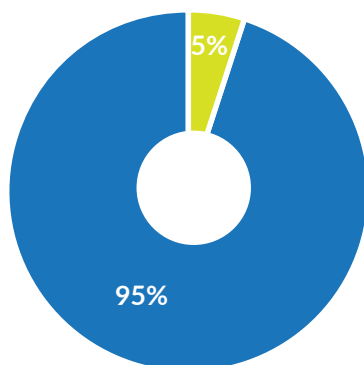


■ BARATA ■ BUMN LAIN & SWASTA

PANGSA PASAR PEMBANGKIT LISTRIK

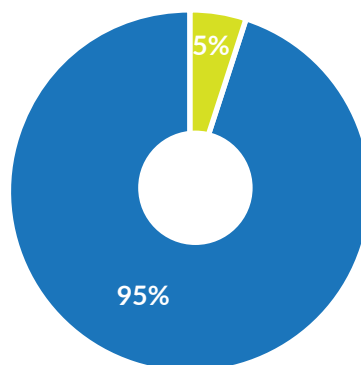
Power Plants Market Shares

PASAR EPC
EPC Markets



■ BARATA ■ BUMN LAIN & SWASTA

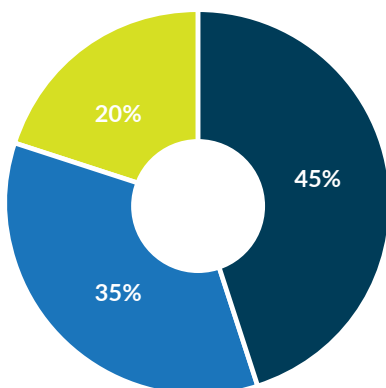
PASAR MAINTENANCE
Maintenance Markets



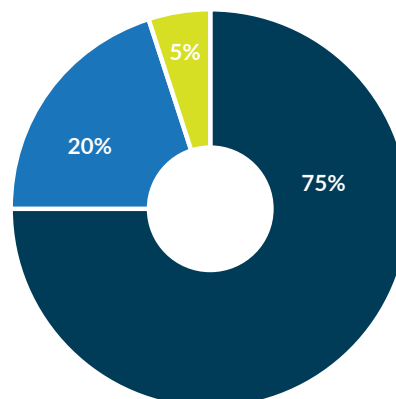
■ BARATA ■ BUMN LAIN & SWASTA

PANGSA PASAR EPC STORAGE TANK & TERMINAL | EPC Storage Tank & Terminal Market Shares

PANGSA PASAR HIDROMEKANIKAL Hydromechanical Market Shares



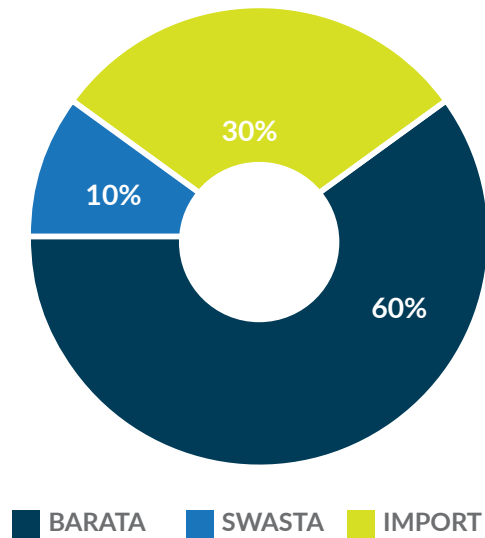
■ BARATA ■ BUMN ■ LAIN-LAIN



■ BARATA ■ BUMN ■ IMPORT

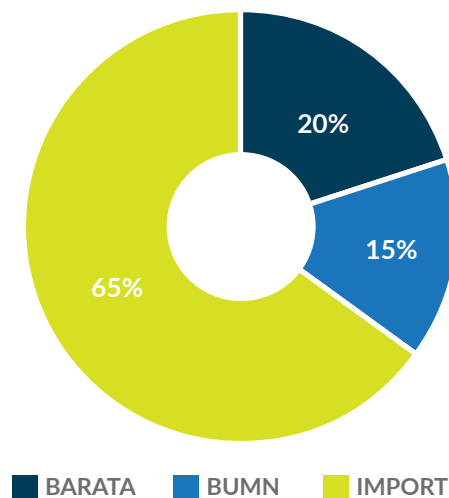
PANGSA PASAR FOUNDRY UNTUK KOMPONEN
KERETA API

Foundry for Train Components Market shares



PANGSA PASAR FOUNDRY UNTUK KOMPONEN
KAPAL, SEMEN, TAMBANG

Foundry for Ships, Cement, Mines Components Market shares





* Turbin Assembly

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

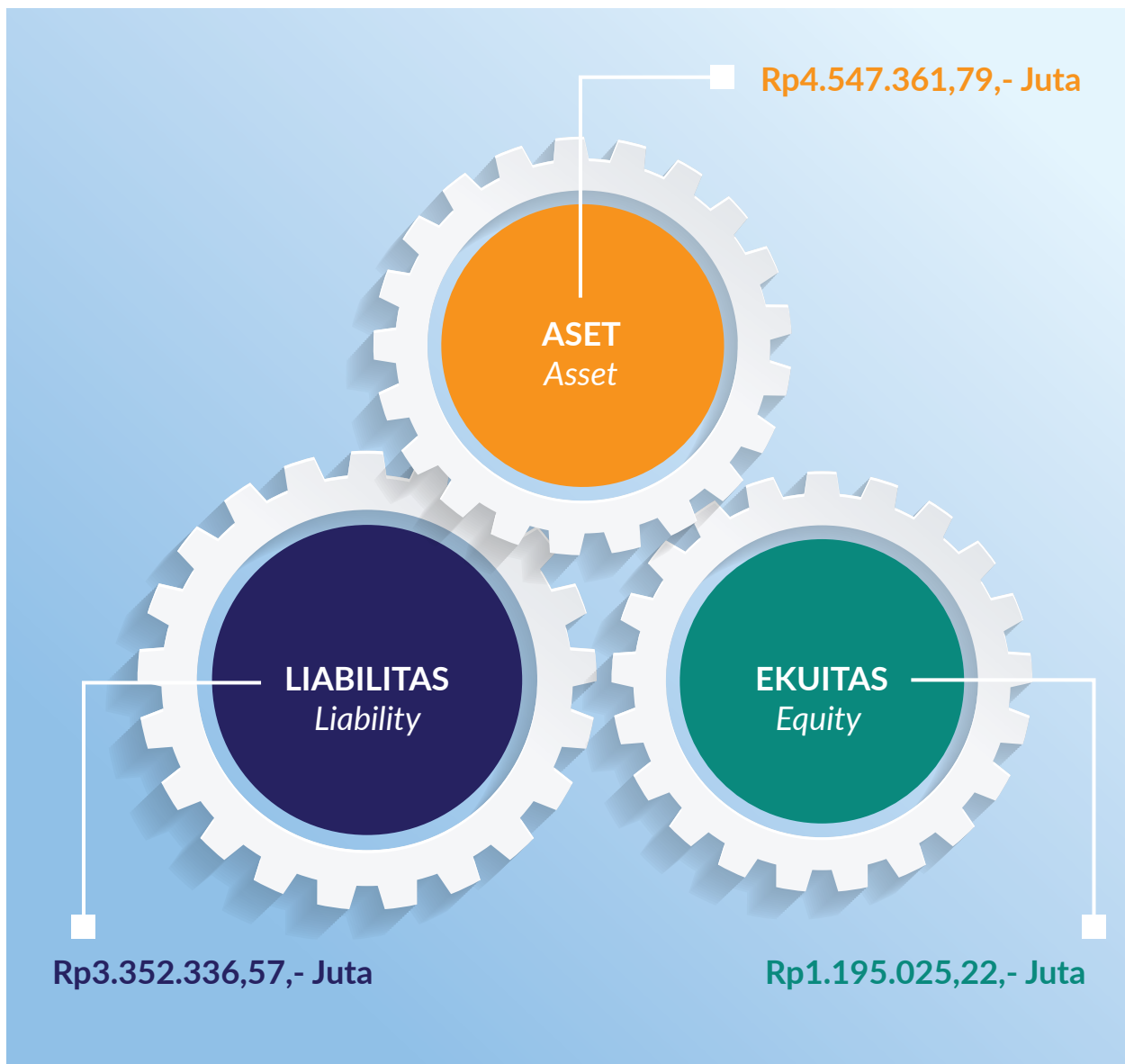
Financial Performance Overview

ANALISIS KINERJA KEUANGAN|

Financial Performance Analysis

A. ANALISIS POSISI KEUANGAN

A. Financial Position Analysis



TOTAL ASET

Komponen aset Barata terdiri dari dua komponen yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Posisi keuangan tahun 2018 ditutup pada posisi aset sebesar Rp 4.547.361,79 juta ada kenaikan 53,98% bila dibandingkan dengan posisi keuangan periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp 2.919.246,89 juta. Jumlah komposisi aset tersebut berasal dari aset lancar sebesar Rp 3.573.897,46 juta dan aset tidak lancar sebesar Rp 973.464,33 juta.

Total Assets

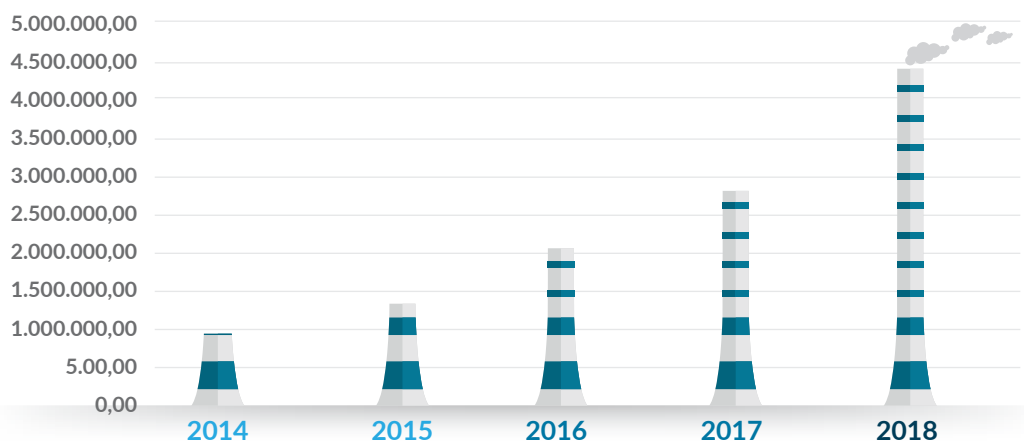
Barata's asset component consisted of two components, namely current assets and non-current assets. The financial position of 2018 was closed at the position of assets of Rp 4,547,361.79 million, there was an increase of 53.98% when compared to the financial position of the same period in 2017 amounting to Rp 2,919,246.89 million. The total composition of the assets came from current assets of Rp 3,573,897.46 million and non-current assets of Rp 973,464.33 million.

X Rp Juta | Million

URAIAN Description	2014	2015	2016	2017	2018
Total Asset Total Asset	860.201,94	1.314.832,16	2.077.983,78	2.919.246,89	4.547.361,79

TOTAL ASET (Rp Juta)
Total Assets (In Million Rupiah)

X Rp Juta | Million



Grafik. Total Aset 2014-2018 (xRp Juta) | Graphic of Total Assets 2014-2018

ASET LANCAR

Secara umum, Aset Lancar merupakan komponen aset yang memiliki manfaat kurang dari 1 (satu) tahun dengan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi.

Current assets

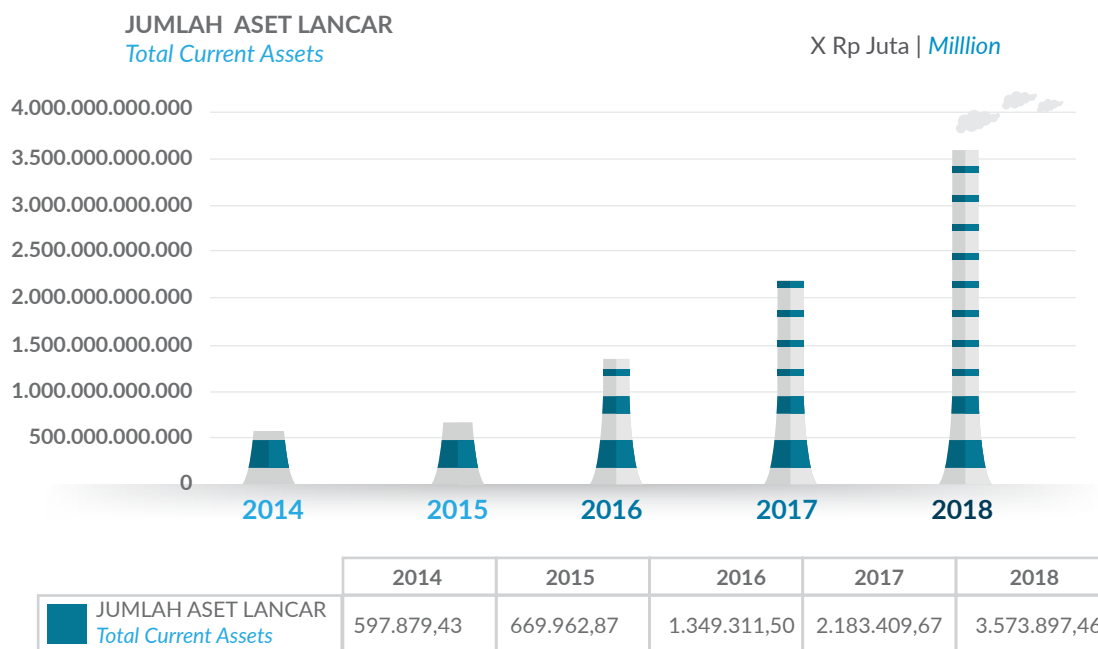
Generally, Current Assets are a component of assets that have benefits of less than 1 (one) year by having a high level of liquidity.

X Rp Juta | Million

URAIAN Description	2014	2015	2016	2017	2018
Kas dan setara kas Cash and Cash Equivalent	66.293,65	84.523,72	607.020,07	1.006.644,60	757.289,80
Piutang Usaha Accounts Receivables	145.852,87	184.318,40	183.469,25	258.942,46	312.247,76
Piutang Retensi Retention Receivables	3.032,68	7.640,18	4.937,94	66.098,48	64.679,63
Tagihan Bruto Pemberi Kerja Gross Charges to Employers	187.598,58	216.452,70	388.646,82	614.479,99	1.801.584,10
Piutang lain-lain Others Receivables	1.144,20	4.227,96	1.815,03	602,95	1.430,24
Persediaan Reserves	80.196,25	81.631,79	107.870,31	167.935,17	416.389,99
Uang muka Advance	82.659,36	81.549,41	40.586,35	63.967,05	186.691,14
Pajak dibayar dimuka Prepaid Taxes	30.694,24	9.522,38	12.594,77	248,20	33.497,52
Biaya dibayar dimuka Prepaid Costs	407,60	96,31	2.370,96	4.490,76	87,29
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets		669.962,87	1.349.311,50	2.183.409,67	3.573.897,46

Jumlah Aset Lancar meningkat 63,68% menjadi Rp 3.573.897,46 Juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 2.183.409,67 juta. Peningkatan jumlah Aset Lancar tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo piutang bruto. Jumlah kas dan setara kas mengalami penurunan seiring dengan realisasi investasi yang berasal dari Penanaman Modal Negara. Piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan dan uang muka mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan penjualan Barata di tahun 2018.

Total of Current Assets increased 63.68% to Rp 3,573,897.46 Million compared to 2017 which was Rp 2,183,409.67 million. The increase in total of Current Assets was mainly due to an increase in gross receivables balance. Cash and cash equivalents decreased along with the realization of investments from State Investment. Trade accounts receivable, other receivables, inventories and advances increased along with the increase in Barata sales in 2018.



Grafik. Total Aset Lancar 2014-2018 (x Rp Juta) | *Graphic of Total Current Assets 2014-2018*

KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Pada umumnya, hanya investasi dengan jatuh tempo asli tiga bulan atau kurang yang memenuhi syarat sebagai setara kas.

Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are investments that are liquid, short-term, and which can quickly be made into cash in a certain amount without facing the risk of significant changes in value. In general, only investments with original maturities of three months or less that qualify as cash equivalents.

X Rp Juta | *Million*

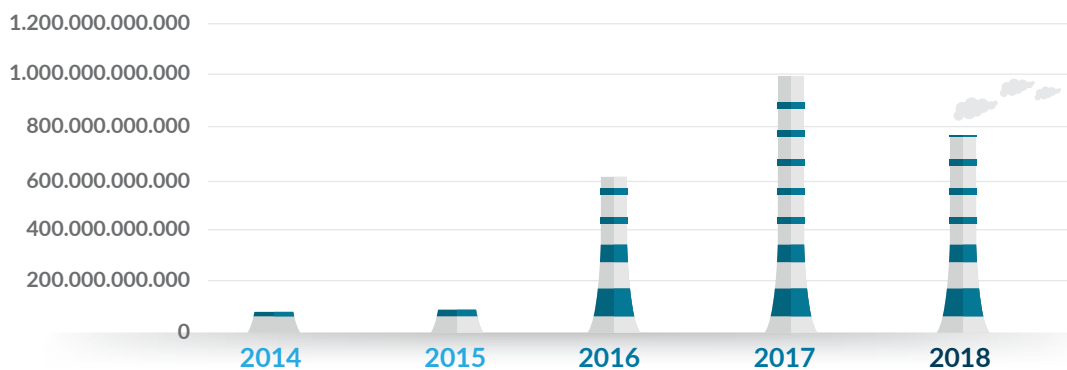
URAIAN <i>Description</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Kas dan Setara Kas <i>Cash and cash equivalents</i>	66.293,65	84.523,72	607.020,07	1.006.644,60	757.289,80

Jumlah Kas dan Setara Kas menurun 24,77% menjadi Rp 757.289,80 Juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 1.006.644,60 Juta. Jumlah kas dan setara kas mengalami penurunan seiring dengan realisasi investasi yang berasal dari Penanaman Modal Negara.

Amount of Cash and Cash Equivalents decreased 24.77% to Rp 757,289.80 Million compared to 2017 which was Rp 1,006,644.60 Million. Cash and cash equivalents decreased along with the realization of investments from State Investment.

KAS DAN SETARA KAS *Cash and cash equivalents*

X Rp Juta | Million



	2014	2015	2016	2017	2018
Kas dan Setara Kas <i>Cash and Cash Equivalents</i>	66.293,65	84.523,72	607.020,07	1.006.644,60	757.289,80

Grafik. Kas dan Setara Kas 2014-2018 (x Rp Juta) | *Graphic of Cash and Cash Equivalents 2014-2018*

PIUTANG USAHA

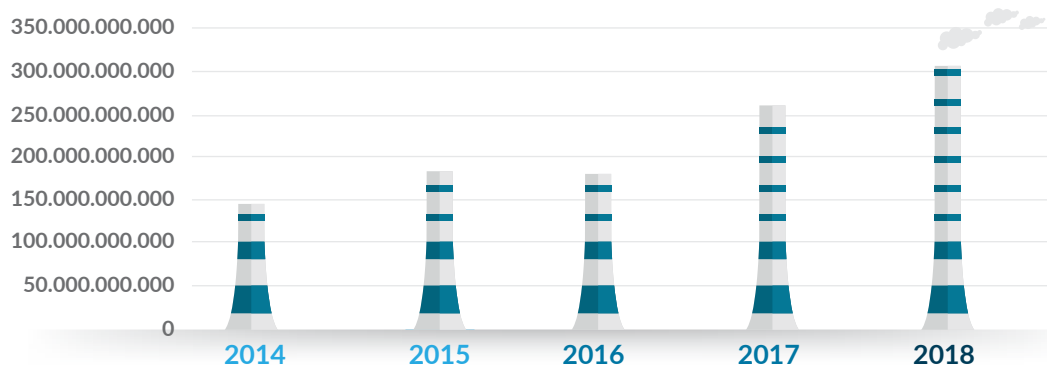
Perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur besar dan konstruksi mengakibatkan siklus pendapatan menggunakan sepenuhnya skema kredit bagi pelanggan. Sehingga seluruh penjualan akan terkonversi menjadi piutang terlebih dahulu sebelum mendapatkan pembayaran dari pelanggan.

Accounts Receivable

The Company which engaged in large manufacturing and construction sectors resulted in a full cycle of income using credit schemes for customers. Thus, all sales will be converted into accounts receivables first before getting payments from customers.

PIUTANG USAHA *Accounts Receivables*

X Rp Juta | Million



	2014	2015	2016	2017	2018
Piutang Usaha <i>Account Receivables</i>	145.852,87	184.318,40	183.469,25	258.942,46	312.247,76

Piutang Usaha di Barata merupakan turunan dari tagihan bruto yang sudah memiliki beberapa kriteria. Kriteria tersebut sebagai berikut :

1. Dokumen Berita acara serah terima pekerjaan/ kemajuan progress yang telah disetujui oleh pelanggan.
2. Memenuhi syarat termin pembayaran sebagaimana tercantum di Kontrak.
3. Kwitansi/Invoice.
4. Faktur penjualan.
5. Faktur pajak.

Account Receivables in Barata are derivatives of gross bills that already have several criteria. These criteria are as follows:

1. *Minutes of work handover/ progress that has been agreed by customers.*
2. *Meet the terms of payment terms as stated in the Contract.*
3. *Receipt/Invoice.*
4. *Sales invoice.*
5. *Tax invoice.*

X Rp Juta | *Million*

URAIAN <i>Description</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Piutang Usaha - Pihak Berelasi	93.238,46	82.368,24	77.870,64	162.192,95	171.504,22
Piutang Usaha - Pihak Ketiga	52.614,41	101.950,16	105.598,60	96.749,51	140.743,54

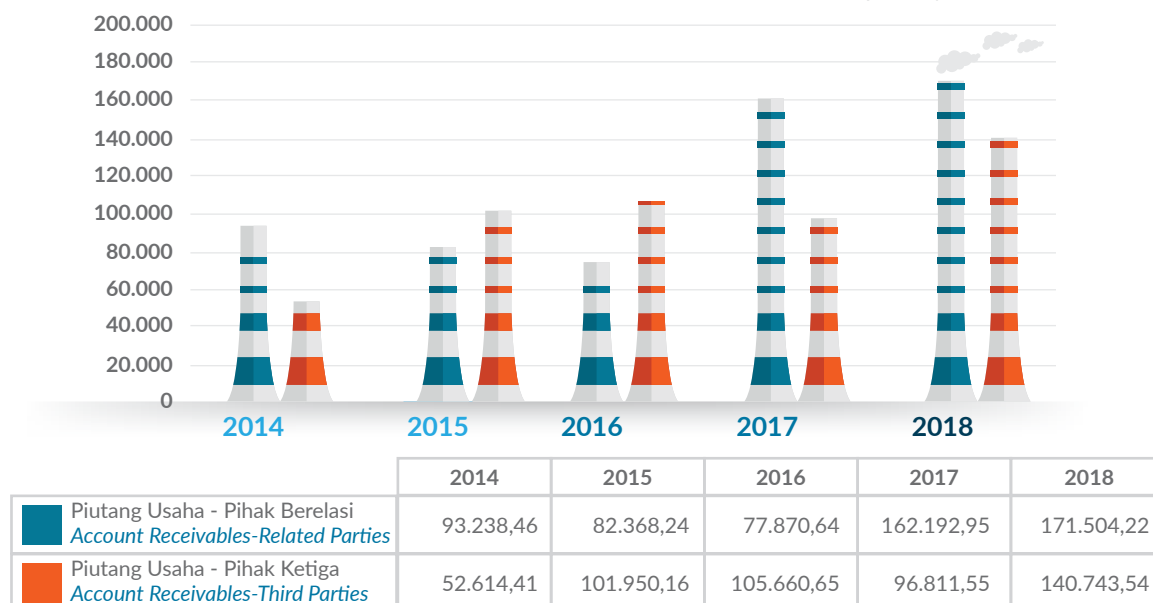
. Perubahan Piutang Usaha 2014-2018 (X Rp Juta) | *Account Receivables changes table 2014-2018 (x Rp million)*

Piutang Usaha meningkat 20,59% menjadi Rp 312.247,76 Juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 258.942,46 Juta. Peningkatan Piutang Usaha terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha dari kepada pihak ketiga sebesar 45,47 % dibandingkan tahun 2017. Penambahan piutang pihak ketiga tersebut diperoleh di akhir periode tahun 2018 sehingga baru dapat ditagihkan di tahun berikutnya. Di sisi lain terjadi kenaikan yang tidak signifikan dari piutang pihak berelasi sebesar 5,74%.

Account Receivables increased by 20.59% to Rp 312,247.76 Million compared to 2017 which was Rp 258,942.46 Million. The increase in Accounts Receivable was mainly due to an increase in trade receivables from third parties by 45.47% compared to 2017. Additional third party receivables was obtained at the end of 2018 so that it could only be collected in the following year. On the other hand there was a non-significant increase from related party receivables of 5.74%.

KOMPOSISI PIUTANG USAHA *Accounts Receivable Composition*

X Rp Juta | *Million*



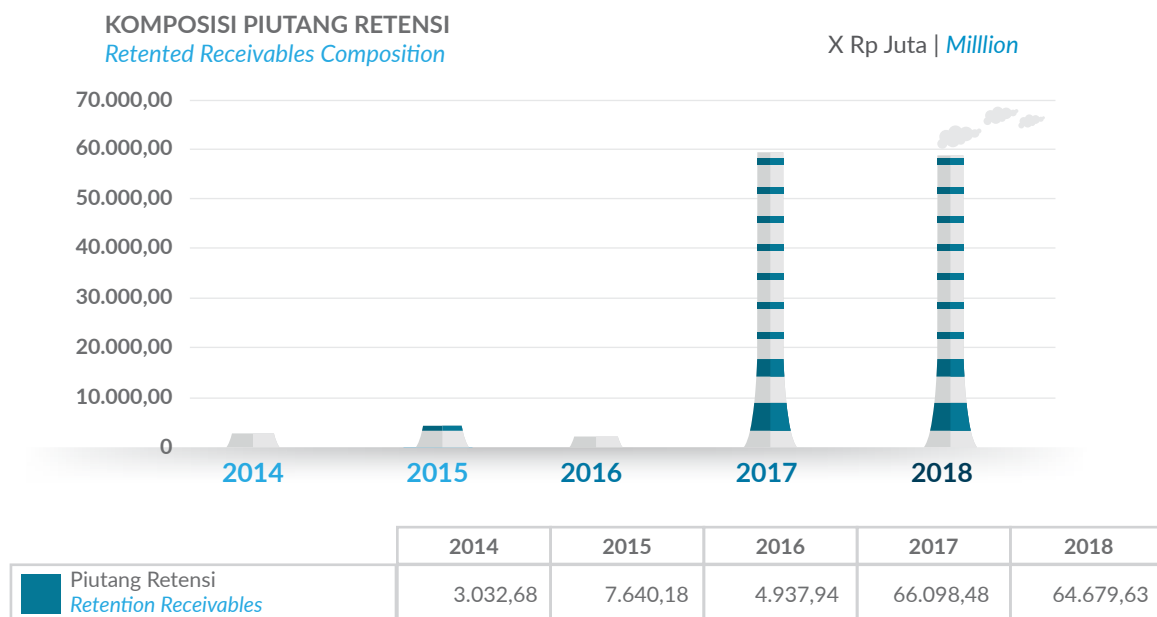
Grafik. Komposisi Piutang Usaha 2014-2018 (x Rp Juta) | *Chart. Composition of Trade Receivables 2014-2018 (x Rp Million)*

PIUTANG RETENSI

Piutang retensi merupakan piutang termin yang terakhir ke pelanggan namun tidak dapat ditagihkan sebelum terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Piutang retensi umumnya bernilai rentang antara 5%-15% dari nilai kontrak. Piutang retensi selalu merupakan termin terakhir penagihan kepada pelanggan. Umumnya syarat yang harus dipenuhi oleh Barata untuk mendapatkan hak tagih atas piutang retensi adalah berakhirnya masa garansi pekerjaan. Masa garansi bervariasi antara 6 bulan hingga 1 tahun pasca penyelesaian pekerjaan 100% dari nilai kontrak.

Retented Receivables

Retented receivables represent the last receivable term to the customer but cannot be billed before certain conditions are fulfilled. Retention receivables generally are in the range of 5-15% of the contract value. Retention receivables are always the last term for billing to customers. Generally, the conditions that must be met by Barata to get the right to collect the retention receivables are the expiration of the job guarantee period. The warranty period varies from 6 months to 1 year after completion of work 100% of the contract value.



Grafik. Komposisi Piutang Retensi 2014-2018 (x Rp Juta) | Chart. Composition of Retented Receivables Composition 2014-2018 (x Rp Million)

X Rp Juta | Million

URAIAN Description	2014	2015	2016	2017	2018
Piutang Usaha - Pihak Berelasi	2.515,03	4.572,71	2.094,58	59.351,09	58.236,67
Piutang Usaha - Pihak Ketiga	517,66	3.067,48	2.843,36	6.747,39	6.442,96

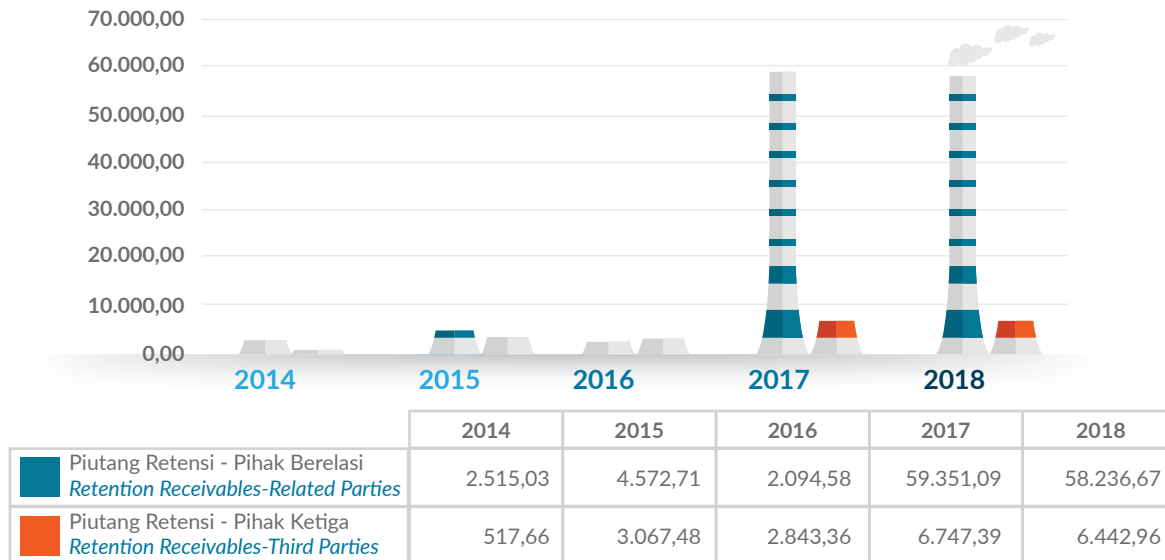
Tb. Perubahan Piutang Retensi 2014-2018 (X Rp Juta Retented Receivables | changes table 2014-2018 (x Rp million)

Pada tahun 2018, kondisi piutang retensi terjadi penurunan senilai 2,15% dari tahun 2017. Penurunan ini dikarenakan Barata telah mendapatkan pelunasan piutang retensi dari pelanggan. Proporsi penurunan piutang retensi berasal dari penurunan dari pihak berelasi sebesar 1,88% dan dari pihak ketiga senilai 4,51%.

In 2018, retented receivables decreased by 2.15% from 2017. This decrease was due to Barata's repayment of retented receivables from customers. The proportion of retented receivables decreased came from a decrease of related parties by 1.88% and from third parties by 4.51%.

KOMPOSISI PIUTANG RETENSI *Retented Receivable Composition*

X Rp Juta | *Million*



Grafik. Komposisi Piutang Retensi 2014-2018 (x Rp Juta) | *Chart. Composition of Retented Receivable Composition 2014-2018 (x Rp Million)*

TAGIHAN BRUTO

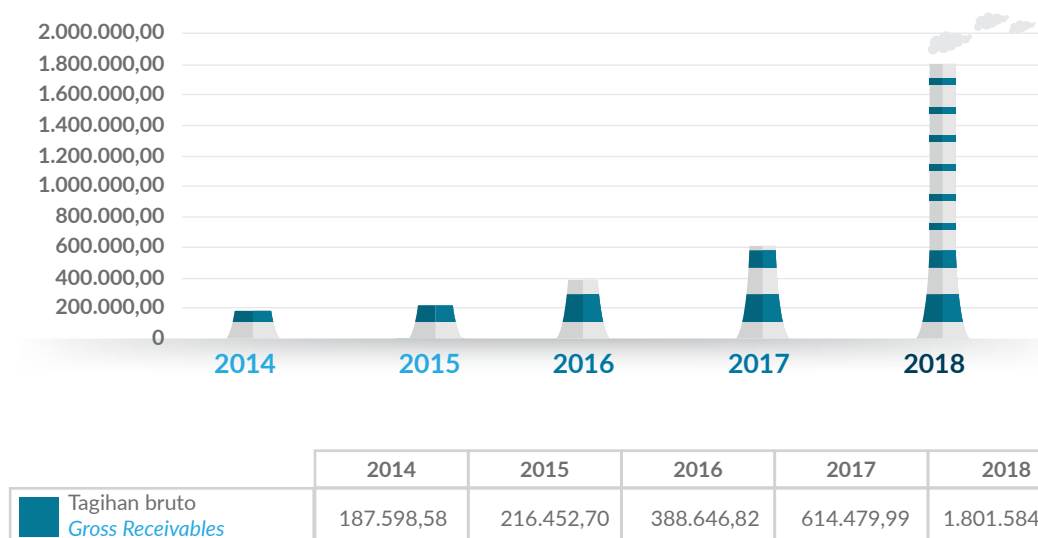
Tagihan bruto merupakan piutang sebagai wadah untuk mengakui penjualan di Barata. Tagihan bruto ini diakui seiring dengan kemajuan pekerjaan atau progress atas suatu kontrak kerja. Tagihan bruto belum dapat ditagihkan kepada pelanggan karena belum memenuhi kriteria-kriteria penagihan. Tagihan bruto memerlukan konversi lebih lanjut menjadi piutang usaha dan piutang retensi agar dapat ditagihkan kepada pelanggan.

Gross Receivables

Gross Receivables are receivables as a place to recognize sales at Barata. This gross bill is recognized along with the progress of work or progress on a work contract. Gross claims cannot be charged to customers because they have not met the collection criteria. Gross receivables require further conversion to accounts receivable and retented receivables so that they may be charged to customers.

TAGIHAN BRUTO *Gross Receivables*

X Rp Juta | *Million*



Grafik. Tagihan Bruto 2014-2018 (x Rp Juta) | *Graphic of Gross Receivables 2014-2018*

Tagihan bruto meningkat tajam pada tahun 2018 senilai 193,19% menjadi Rp 1.801.584,10 Juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 614.479,99 Juta. Peningkatan tagihan bruto pada tahun 2018 terutama disebabkan oleh kenaikan tagihan bruto dari pihak ketiga sebesar 653,10 % dibandingkan tahun 2017.

Gross receivables increased sharply in 2018 by 193.19% to Rp 1,801,584.10 Million compared to 2017 which was Rp 614,479.99 Million. The increase in gross receivables in 2018 was mainly due to an increase in gross receivables from third parties amounted to 653.10% compared to 2017.

X Rp Juta | *Million*

URAIAN <i>Description</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Tagihan Bruto - Pihak Berelasi <i>Gross Receivables-Related Parties</i>	152.917,65	159.836,40	245.683,25	418.050,42	322.277,60
Tagihan Bruto - Pihak Ketiga <i>Gross Receivables-Third Parties</i>	34.680,93	56.616,31	142.963,57	196.429,57	1.479.306,49

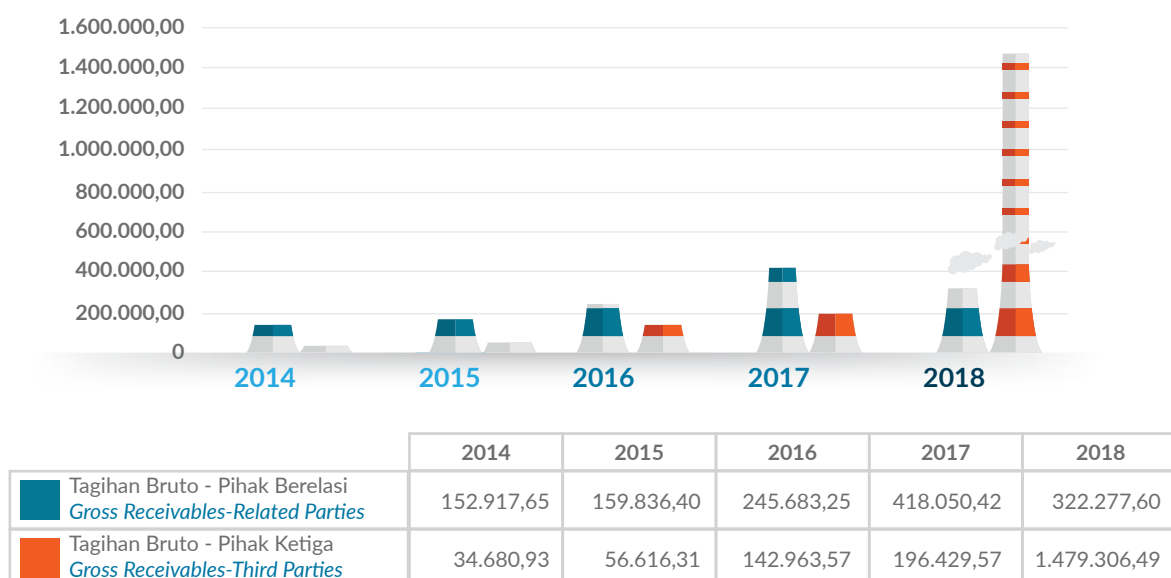
Tb. Perubahan Piutang Bruto 2014-2018 | *Gross Receivables changes table 2014-2018 (x Rp million)*

Penambahan tagihan bruto yang signifikan tersebut terjadi akibat kontrak pekerjaan pembangunan PG Bombana di Sulawesi dengan pemberi kerja PT Prima Alam Gemilang. Di sisi lain terjadi penurunan dari tagihan bruto pihak berelasi sebesar 22,91%. Penurunan ini dikarenakan Barata telah melakukan konversi ke piutang usaha.

The significant increase of gross bills occurred due to the contract for the construction of PG Bombana in Sulawesi with the employer of PT Prima Alam Gemilang. On the other hand, there was a decrease in gross receivables from related parties by 22.91%. This decline was due to Barata's conversion to accounts receivable.

KOMPOSISI TAGIHAN BRUTO *Gross Receivables*

X Rp Juta | *Million*



Grafik. Komposisi Tagihan Bruto 2014-2018 (x Rp Juta) | *Graphic of Gross Receivables Composition 2014-2018*

PIUTANG LAIN-LAIN

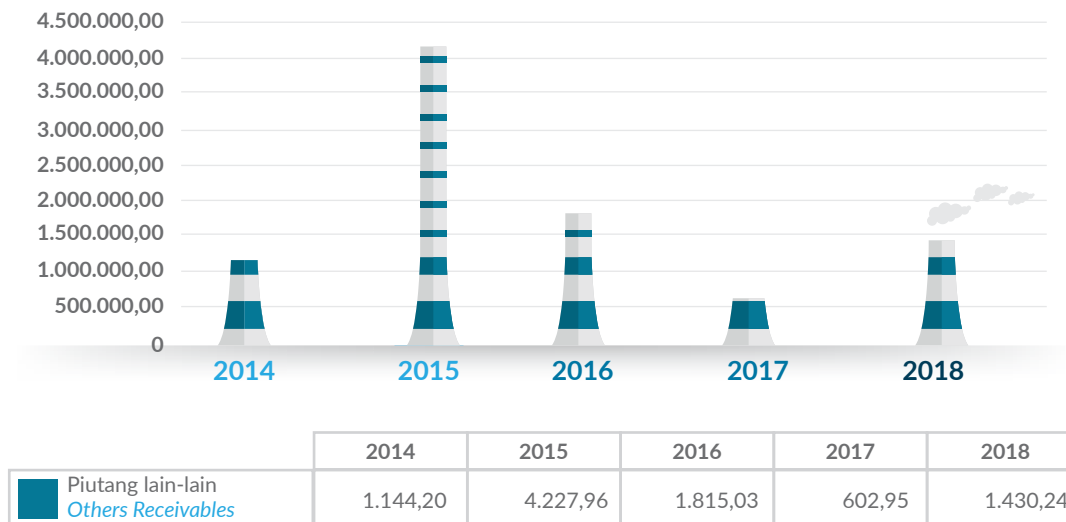
Piutang lain lain mengalami peningkatan 137,21% menjadi Rp 1.430,24 Juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 602,95 Juta. Peningkatan ini bertambah dikarenakan piutang pengobatan dari karyawan.

Others Receivables

Piutang lain lain mengalami peningkatan 137,21% menjadi Rp 1.430,24 Juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 602,95 Juta. Peningkatan ini bertambah dikarenakan piutang pengobatan dari karyawan.

PIUTANG LAIN-LAIN Others Receivables

X Rp Juta | Million



Grafik. Piutang Lain-lain 2014-2018 (x Rp Juta) | Graphic of Others Receivables 2014-2018

X Rp Juta | Million

URAIAN Description	2014	2015	2016	2017	2018
Piutang lain-lain Others Receivables	1.144,20	4.227,96	1.815,03	602,95	1.430,24

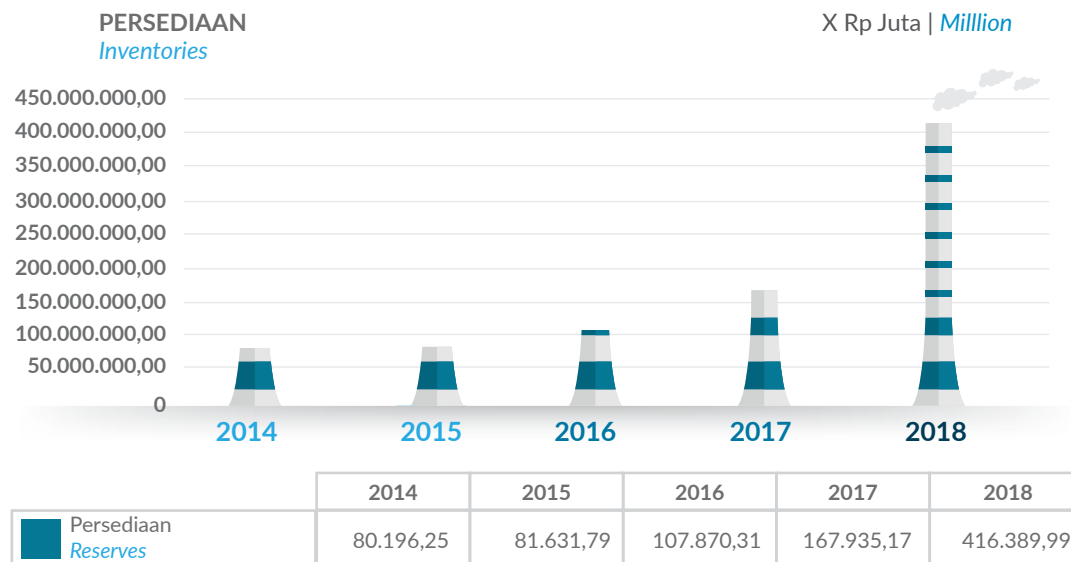
Tb. Piutang Lain-Lain 2014-2018 | Others Receivables changes table 2014-2018 (x Rp million)

PERSEDIAAN

Barata memiliki empat tipe persediaan antara lain barang hasil produksi / barang jadi, pekerjaan dalam pelaksanaan, bahan baku / pembantu, suku cadang / peralatan. Barang hasil produksi antara lain merupakan barang jadi di Divisi Komponen Turbin, sisa produk pengecoran Gresik dan persediaan ex proyek baik di Unit Gresik maupun di pabrik-pabrik. Persediaan barang jadi tahun 2018 diantaranya merupakan persediaan mother station ex Proyek Station Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Pekerjaan dalam pelaksanaan sebagian besar merupakan pekerjaan dalam proses produk pengecoran di Gresik dan Divisi Komponen Turbin. Persediaan bahan baku / pembantu merupakan persediaan bahan seluruh unit bisnis dan pabrik. Suku cadang merupakan spare part peralatan ex Proyek Pengembangan Sarana Produksi (P2SP). Penurunan nilai persediaan merupakan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan serta harga jual pada saat tanggal pelaporan.

Inventories

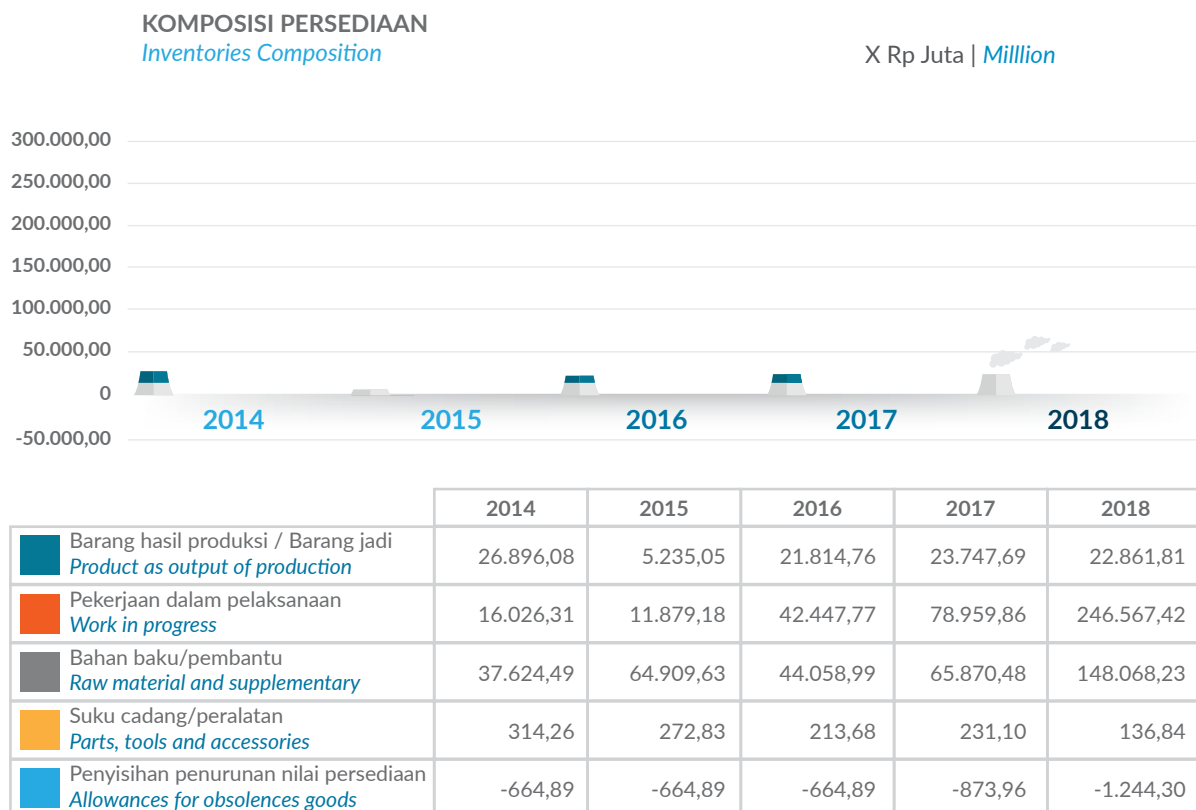
Barata has four types of inventories including produced goods/ finished goods, ongoing projects, raw/additional materials, parts/equipment. Produced goods include finished goods in Turbine Component Division, the remaining Gresik casting products and ex-project supplies both in Gresik Unit and in factories. Finished goods inventories in 2018 was supply of mother station of ex gas refueling station (SPBG) Project. Ongoing projects was mainly work in casting products process in Gresik and Turbine Component Division. Raw/ additional material inventory is material supply of all business units and factories. Spare parts are ex equipment spare parts for Production Facilities Development Project (P2SP). The decrease in inventory value is the result of a review of the state of inventory and selling price at the reporting date.



Grafik. Persediaan 2014-2018 (x Rp Juta) | *Graphic of Inventories 2014-2018*

Persediaan meningkat pada tahun 2018 senilai 147,95% menjadi Rp 416.389,99 Juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 167.935,17 Juta. Peningkatan persediaan ini dikarenakan peningkatan pekerjaan dalam pelaksanaan dan bahan baku/pembantu. Peningkatan ini berasal dari akuisisi Divisi Komponen Turbin Cilegon yang merupakan peralihan dari PT Siemens Indonesia di akhir tahun 2018.

in 2018 Inventories increased by 147.95% to Rp 416,389.99 Million compared to 2017 which was Rp 167,935.17 Million. This increase in inventories was due to increased ongoing projects and raw /additional materials. This increase was due to the acquisition of Cilegon Turbine Component Division which was a transition from PT Siemens Indonesia at the end of 2018.



Grafik. Komposisi Persediaan 2014-2018 (x Rp Juta) | *Graphic of Inventorie Compositions 2014-2018*

X Rp Juta | *Million*

URAIAN <i>Description</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Barang hasil produksi / Barang jadi <i>Product as output of production</i>	26.896,08	5.235,05	21.814,76	23.747,69	22.861,81
Pekerjaan dalam pelaksanaan <i>Work in progress</i>	16.026,31	11.879,18	42.447,77	78.959,86	246.567,42
Bahan baku/pembantu <i>Raw material and supplementary</i>	37.624,49	64.909,63	44.058,99	65.870,48	148.068,23
Suku cadang/peralatan <i>Parts, tools and accessories</i>	314,26	272,83	213,68	231,10	136,84
Penyisihan penurunan nilai persediaan <i>Allowances for obsolescences goods</i>	-664,89	-664,89	-664,89	-873,96	-1.244,30

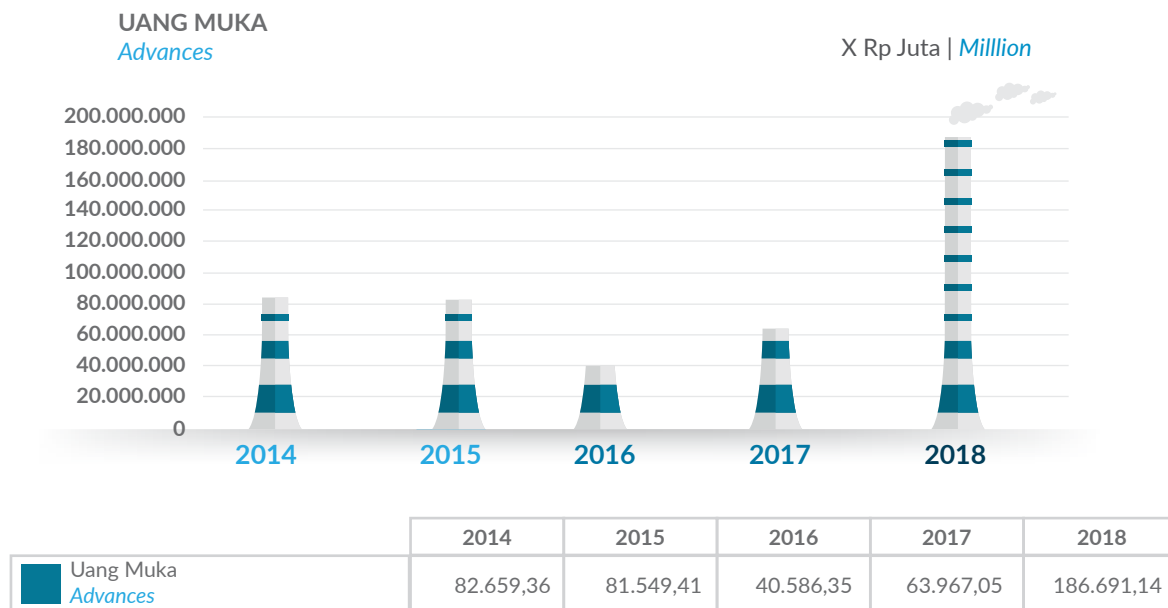
Tb. Perubahan Persediaan 2014-2018 | *Inventories Changes table 2014-2018 (x Rp million)*

UANG MUKA

Uang muka terutama merupakan uang yang dibayarkan kepada pemasok dan karyawan.

Advances

Advances are mainly payment to suppliers and employees.



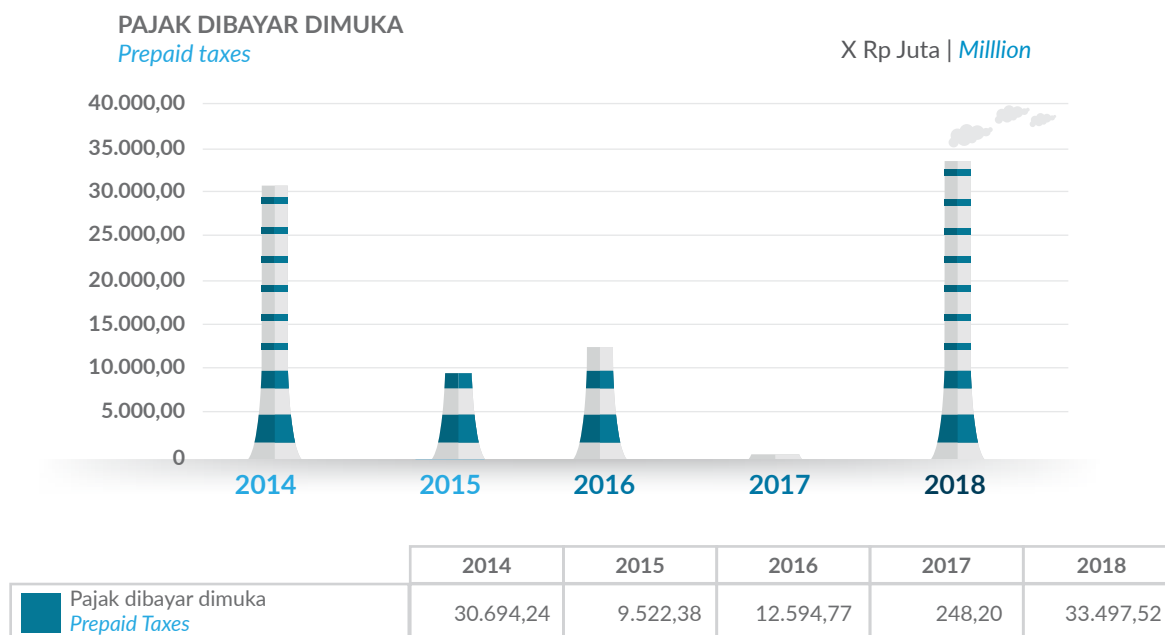
Grafik. Uang Muka 2014-2018 (x Rp Juta) | *Advances 2014-2018 (x Million)Graphic*

PAJAK DIBAYAR DIMUKA

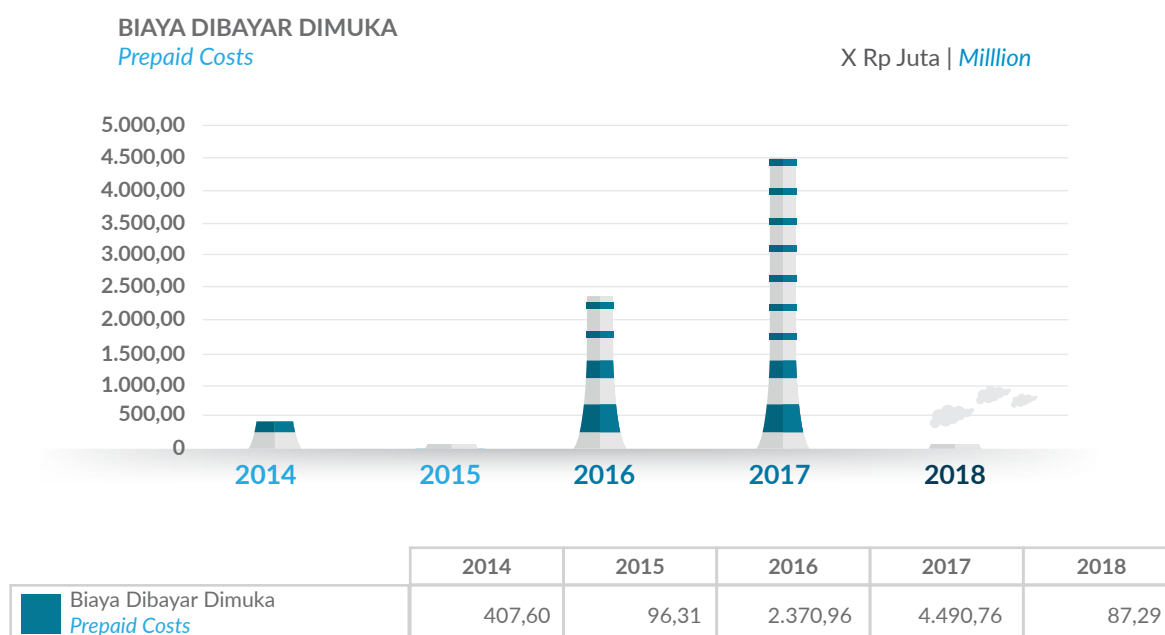
Pajak Dibayar Dimuka meningkat menjadi Rp 33.497,52 juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 248,20 juta. Peningkatan Pajak Dibayar Dimuka terutama disebabkan oleh koreksi pembayaran cicilan Pph pasal 25.

Prepaid taxes

Prepaid Taxes increased to Rp 33,497.52 million compared to 2017 which was Rp 248.20 million. The increase in Prepaid Taxes was mainly due to the correction in the installment payment of income tax article 25.



Grafik. Pajak Dibayar Muka 2014-2018 (x Rp Juta) | *Prepaid Taxes Graphic 2014-2018 (x Million)*Graphic



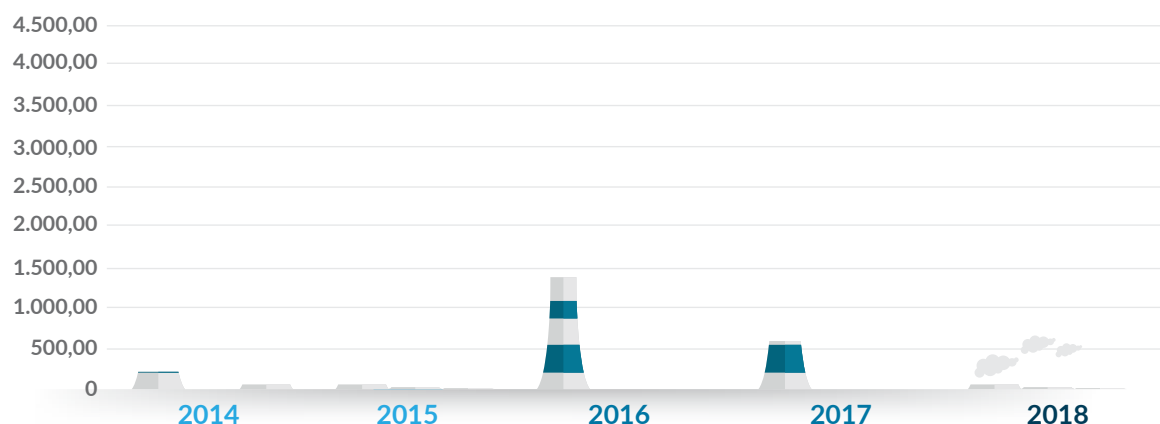
Grafik. Pajak Dibayar Muka 2014-2018 (x Rp Juta) | *Prepaid Taxes Graphic 2014-2018 (x Million)*Graphic

Premi asuransi merupakan uang muka biaya asuransi yang diamortisasi sesuai umur manfaatnya. Beban lainnya dibayar dimuka tahun 2017 merupakan biaya – biaya yang telah dibayar namun sebenarnya untuk beban tahun berikutnya. Termasuk didalamnya biaya dibayar dimuka atas penerbitan MTN (*Medium Term Notes*) melalui KSEI. Beban persiapan proyek merupakan beban dalam rangka meraih order dan akan menjadi beban pekerjaan dalam pelaksanaan atau beban pokok penjualan.

Insurance premiums are advances in insurance costs which amortized according to the benefits age. Other advances expenses in 2017 were fees that have been paid but actually were for the following year's expenses. This includes advances expenses for the issuance of MTN (Medium Term Notes) through KSEI. Project preparation expenses are expenses to obtain orders and will be the expense in ongoing projects or sold goods expenses.

KOMPOSISI BIAYA DIBAYAR DIMUKA
Prepaid taxes

X Rp Juta | *Million*



	2014	2015	2016	2017	2018
Premi asuransi <i>Insurance Premium</i>	189,12	71,70	202,52	568,51	55,81
Beban persiapan proyek <i>Project's Preparation Expenses</i>	184,38	4,29	1.752,35	75,45	31,48
Beban lainnya dibayar dimuka <i>Other Prepaid Expenses</i>	34,09	20,32	416,09	3.846,80	0,00

Grafik. Komposisi Biaya Dibayar Dimuka 2014-2018 (x Rp Juta) | *Graphic of Prepaid Taxes Compositions 2014-2018*

Pada tahun 2018, biaya lainnya dibayar dimuka telah diakui pada sepanjang tahun 2018. Sehingga jumlah tersebut habis di akhir tahun 2018. Faktor ini pula lah yang mengakibatkan komposisi biaya dibayar dimuka tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat tajam dibandingkan tahun 2017.

In 2018, other advances expenses have been recognized throughout 2018. So that the amount is discharged at the end of 2018. This factor also causes the composition of Advances expenses in 2018 to decrease very sharply compared to 2017.

X Rp Juta | *Million*

URAIAN <i>Description</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Premi asuransi <i>Insurance Premium</i>	189,12	71,70	202,52	568,51	55,81
Beban persiapan proyek <i>Project's Preparation Expenses</i>	184,38	4,29	1.752,35	75,45	31,48
Beban lainnya dibayar dimuka <i>Other Prepaid Expenses</i>	34,09	20,32	416,09	3.846,80	0,00

Tb. Perubahan Biaya Dibayar Dimuka 2014-2018 (X Rp Juta) | *Advances Expenses change 2014-2018 (x Rp million)*

ASET TIDAK LANCAR

Aset Tidak Lancar merupakan komponen aset Perusahaan yang masa manfaatnya dapat lebih dari 1 (satu) tahun. Aset Tidak Lancar Barata terdiri dari aset keuangan lainnya, properti investasi, aset tetap, aset tetap tax amnesty, aset tak berwujud, investasi pada ventura bersama, aset pajak tangguhan, dan aset lain-lain.

Non-Current Assets

Non-Current Assets are components of Company assets whose benefits period may be more than 1 (one) year. Barata Non-Current Assets consist of other financial assets, investment property, fixed assets, tax amnesty fixed assets, intangible assets, investments in joint ventures, deferred tax assets, and other assets.

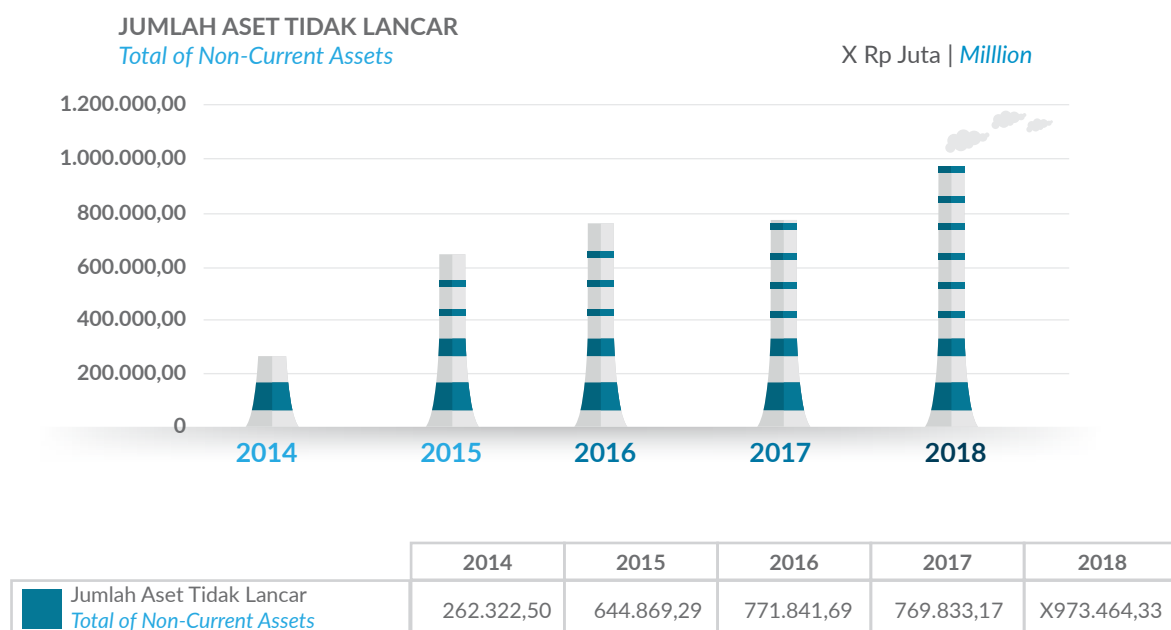
X Rp Juta | Million

URAIAN Description	2014	2015	2016	2017	2018
Aset keuangan lainnya <i>Other Financial Assets</i>	99,72	99,72	99,72	99,72	99,72
Properti Investasi <i>Investment Property Assets</i>	-	752,83	733,55	726,23	709,81
Aset tetap <i>Fixed Assets</i>	129.840,92	619.308,21	710.008,26	722.000,35	924.877,29
Aset tetap tax amnesty <i>Tax amnesty Fixed Assets</i>	-	-	-	3.220,88	3.220,88
Aset tak berwujud <i>Intangible Assets</i>	24,44	1.873,05	2.263,50	2.297,58	8.497,12
Investasi pada ventura bersama <i>Joint Venture Investment</i>	-	-	-	3.250,00	16.722,37
Aset Pajak Tangguhan <i>Deffered Tax Assets</i>	34.688,99	-	35.841,65	34.057,99	15.941,66
Aset lain-lain <i>Others Assets</i>	97.668,43	22.835,48	22.895,01	4.180,41	3.395,47
"Jumlah Aset Tidak Lancar <i>Total of Non-Current assets</i> "	262.322,50	644.869,29	771.841,69	769.833,17	973.464,33

Tb. Perubahan Aset tidak Lancar 2014-2018 (X Rp Juta) | *Changes in Non-Current assets 2014-2018 (x Rp Million)*

Aset Tidak Lancar meningkat 32,29% menjadi Rp 973.464,33 Juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 735.837,22 Juta. Peningkatan Aset Tidak Lancar terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap dalam sarana dan prasarana pendukung operasional produksi yang berasal dari penggunaan dana Penanaman Modal Negara.

Non-Current Assets increased 32.29% to Rp 973,464.33 Million compared to 2017 which was Rp 735,837.22 Million. The increase in Non-Current Assets was mainly due to an increase in fixed assets in the operational supporting facilities and infrastructure derived from the use of State Investment funds.



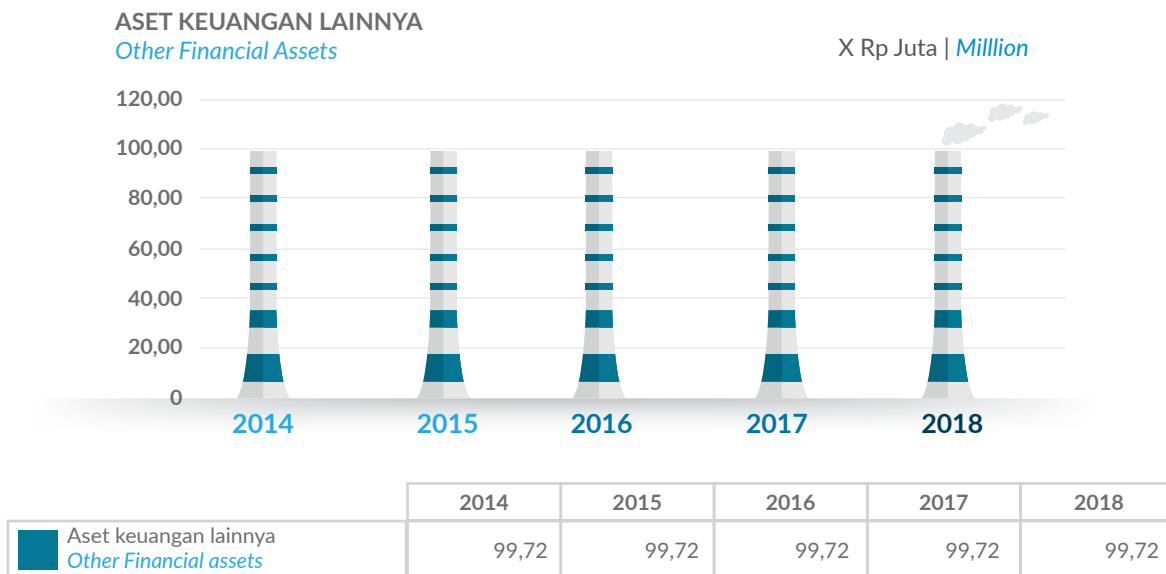
Grafik Aset tidak Lancar 2014-2018 (X Rp Juta) | *Non-Current assets Graphic 2014-2018 (x Rp Million)*

ASET KEUANGAN LAINNYA

Saldo aset keuangan lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp 99,72 Juta merupakan penyertaan pada PT General Electric Power Solution Indonesia. Sesuai Akta Notaris Rusdi Muljono, SH N. 104 tanggal 11 Agustus 2008 perusahaan memiliki 94.080 lembar saham Seri A pada PT General Electric Power Solution Indonesia. Kepemilikan jumlah tersebut mewakili 1,11% dari total 8.460.000 lembar saham seri A.

Other Financial Assets

other financial assets balance as of December 31, 2018 and December 31, 2017 which was Rp 99.72 Million is an investment in PT General Electric Power Solution Indonesia. In accordance with Rusdi Muljono, SH Notary Deed No. 104 dated August 11, 2008 the company owned 94,080 Series A shares in PT General Electric Power Solution Indonesia. Ownership of this amount represents 1.11% of the total 8,460,000 series A shares.



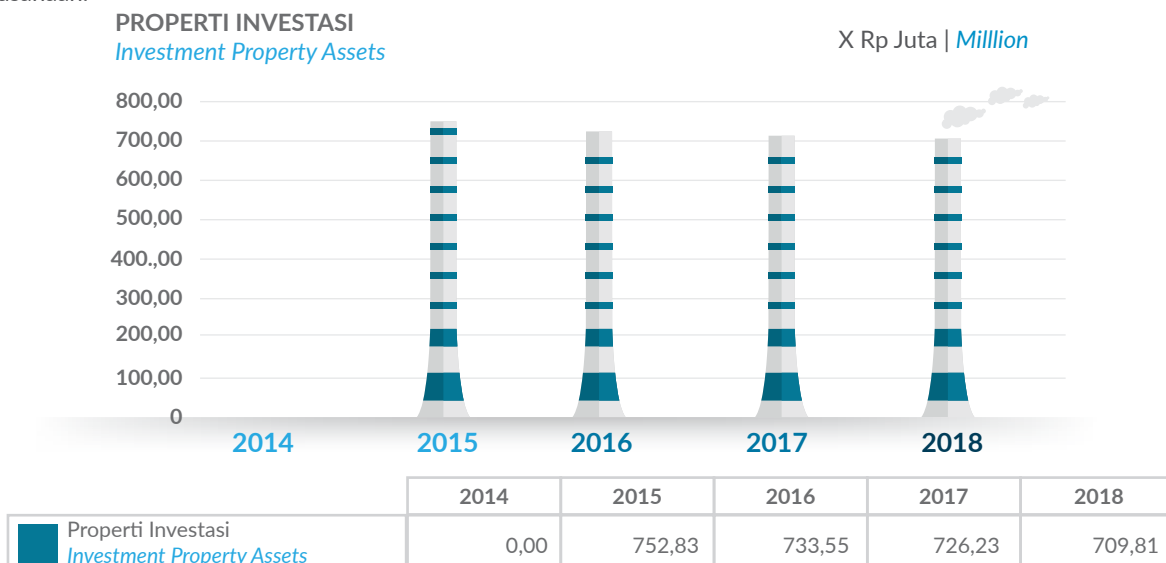
Grafik Aset Keuangan Lainnya 2014-2018 (X Rp Juta) | *Other Financial Assets Graphic 2014-2018 (x Rp Million)*

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi berupa tanah dan bangunan yang tidak dipakai operasional, berlokasi di Bandung, Sukabumi, Makassar, Surabaya dan Prigen. Sebagian properti investasi digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka pendek Perusahaan.

Investment Property

Investment properties in the form of land and buildings that are not used for operations, are located in Bandung, Sukabumi, Makassar, Surabaya and Prigen. Some investment properties are used as collateral for the Company's short-term loans.



Grafik Properti Investasi 2014-2018 (X Rp Juta) | *Investment Property Graphic 2014-2018 (x Rp Million)*

ASET TETAP

Aset Tetap Barata terkategori menjadi :

1. Tanah lapangan dan jalan.
2. Gedung, Pabrik dan Kantor.
3. Mesin-mesin
4. Peralatan dan Instalasi listrik.
5. Peralatan dan alat angkut.
6. Inventaris kantor dan peralatan logam.
7. Mebel dan peralatan kayu.
8. Kendaraan bermotor

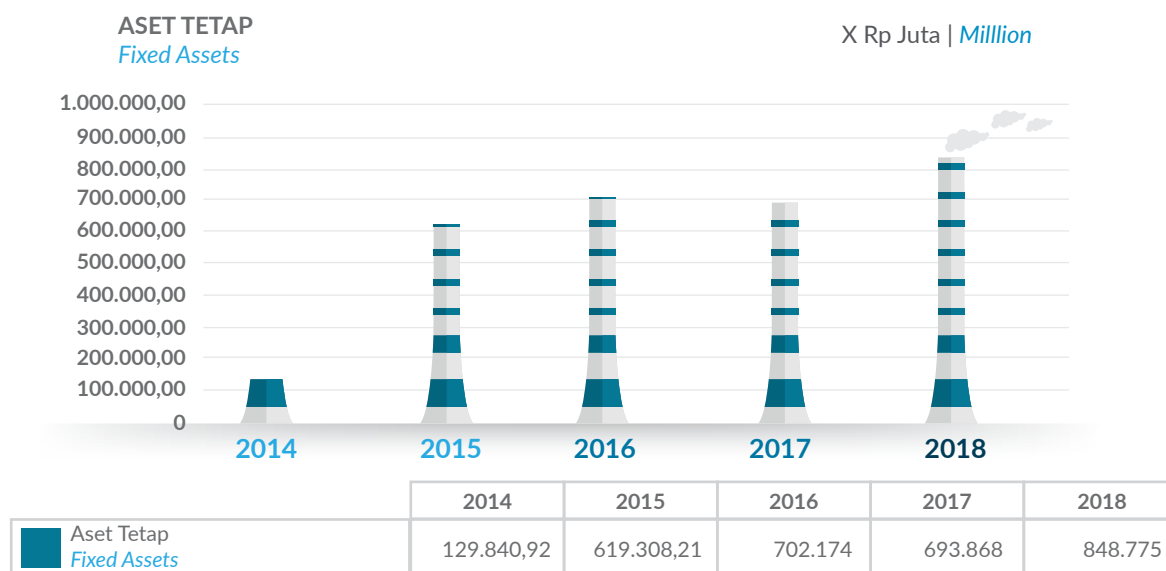
Aset Tetap meningkat 22,33% menjadi Rp 848.775 Juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 693.867,82 Juta. Penambahan aset tetap per 31 Desember 2018 merupakan rehabilitasi gedung, tanah, mesin, pembelian inventaris perkantoran dan pembelian aset bangunan dan mesin PT Siemens Indonesia - Cilegon yang sekarang telah menjadi Divisi Komponen Turbin PT Barata Indonesia (persero). Di tahun 2018 juga terjadi reklasifikasi gedung Cilegon dari aset dalam konstruksi menjadi aset tetap. Tahun 2018 juga terjadi penjualan kendaraan bermotor. Sedangkan penambahan aset tetap per 31 Desember 2017 merupakan rehabilitasi /perbaikan gedung dan permesinan serta pembelian kendaraan, juga terjadi reklasifikasi/ pemindahan dari aset nonproduktif yang dapat digunakan lagi dan sebaliknya

Fixed assets

Barata's Fixed Assets are categorized into:

1. Land and road.
2. Buildings, Factories and Offices.
3. Machines
4. Electrical equipment and installations.
5. Transport equipment and tools.
6. Office inventory and metal equipment.
7. Wooden furniture and equipment.
8. Motorized vehicles

Fixed Assets increased 22.33% to Rp 848,775 Million compared to 2017 amounting to Rp 693,867.82 Million. The addition of fixed assets as of December 31, 2018 was the rehabilitation of buildings, land, machinery, purchase of office inventory and purchase of building assets and machinery of PT Siemens Indonesia - Cilegon which is now a PT Barata Indonesia (Persero) Turbine Component Division. In 2018, there was also a reclassification of the Cilegon building from assets under construction to fixed assets. In 2018 there were also sales of motorized vehicles. While the addition of fixed assets as of December 31, 2017 is the rehabilitation / repair of buildings and machinery and vehicle purchases, there has also been reclassification / transfer of non-productive assets that may be used again and vice versa.



Grafik Aset Tetap 2014-2018 (X Rp Juta) | Fixed Assets Graphic 2014-2018 (x Rp Million)

ASET TETAP TAX AMNESTY

PT Barata Indonesia Persero telah mengikuti program tax amnesty pada Maret 2017 dengan melaporkan aset tanah yang telah dimiliki namun belum tercatat dalam laporan keuangan perusahaan. Aset tersebut dilaporkan berdasarkan nilai NJOP, sebagai berikut :

Tax Amnesty's Fixed Assets

PT Barata Indonesia Persero has participated in the tax amnesty program in March 2017 by reporting on land assets that have been owned but not yet recorded in the company's financial statements. These assets are reported based on the NJOP value, as follows:

X Rp Juta | Million

URAIAN Description	2017	2018
Megamendung, Bogor	1.305,23	1.305,23
Kranji, Bekasi	115,07	115,07
Kranji, Bekasi	1.800,58	1.800,58
Total	3.220,88	3.220,88

Tb. Rincian Aset Tetap Tax Amnesty 2017-2018 (x Rp Juta) | Tax Amnesty's Fixed Assets table 2017-2018 (x Rp Million)

Uang tebusan yang telah dibayar dengan tarif 5% sebesar Rp161,04 Juta. Atas keikutsertaan tax amnesty, telah diperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor : KET350/PP/WPJ.19/2017 tanggal 5 April 2017.

Amnesty tax paid by 5% of Rp161.04 Million. For the participation of the tax amnesty, a Tax Amnesty Certificate Number: KET350/PP/WPJ.19/2017 has been obtained on April 5, 2017.

ASET TAK BERWUJUD

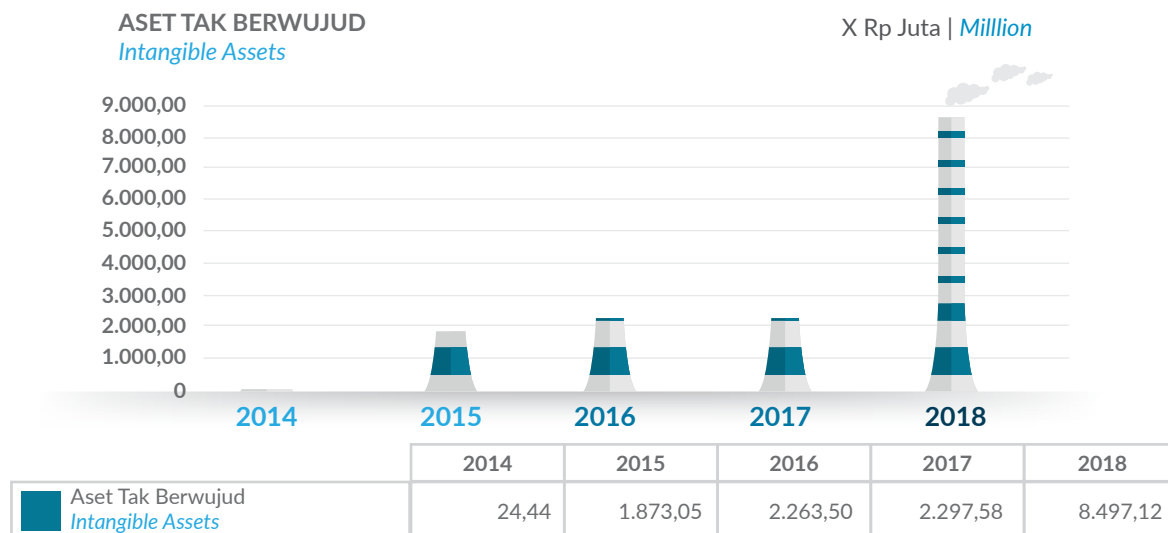
Aset tak berwujud berupa lisensi yang diperoleh perusahaan untuk memproduksi alat berat berupa Mesin Gilas/Motor Wals, lisensi Microsoft, software dan biaya perpanjangan /pembaharuan hak atas tanah serta hak paten.

Intangible Assets

Intangible assets in the form of licenses obtained by the company to produce heavy equipment in the form of Gilas/Motor Wals machines, Microsoft licenses, renewal of software and fees, renewal of land rights and patents.

Terdapat kenaikan aset tak berwujud senilai 269,83% menjadi Rp 8.497,12 Juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 2.297,58 juta.

There was an increase in intangible assets worth 269.83% to Rp 8,497.12 Million compared to 2017 amounting to Rp 2,297.58 million.



Grafik Aset Tak Berwujud 2014-2018 (X Rp Juta) | Intangible Assets Graphic 2014-2018 (x Rp Million)

INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA

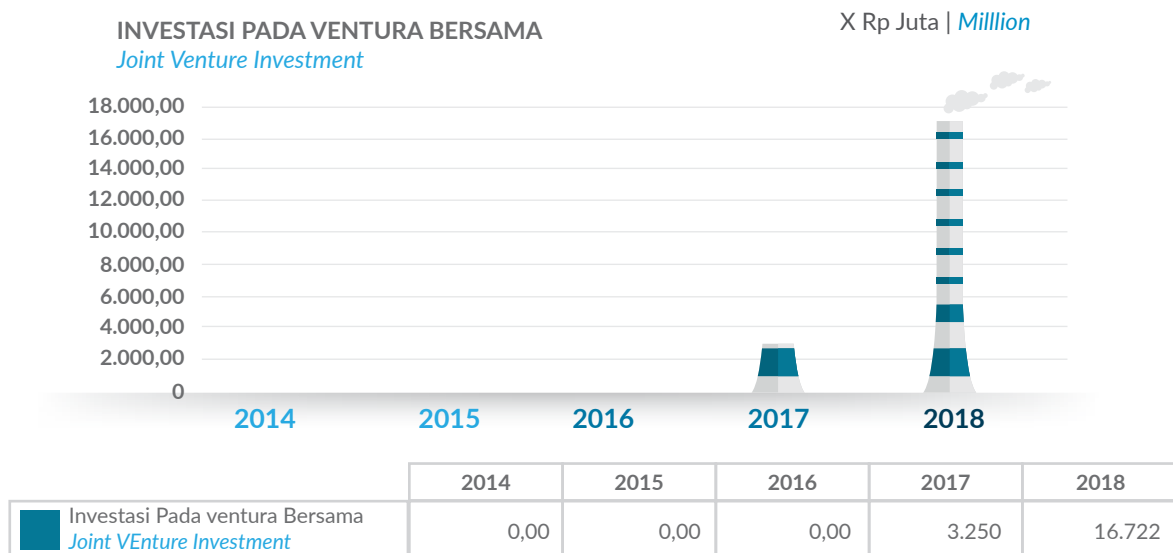
Barata melakukan perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak sebagaimana tersebut pada perjanjian, berupa penyerahan dana kepada pengelola dengan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerjasama menurut porsi

Investments in Joint Ventures

Barata entered into a cooperation agreement with various parties, as stated in the agreement, in the form of transferring funds to the managing partner with the obligations contained in the cooperation agreement according to the stipulated

yang ditetapkan. Pengelola proyek dibentuk dengan anggota yang berasal dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Pengelola proyek ini melaksanakan kegiatan pembangunan proyek yang berasal dari pemberi kerja (owner) dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan tersebut termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan dan proyek kepada masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerja sama. Penyerahan dana kepada pengelola proyek dicatat dan diberlakukan sebagai investasi pada ventura bersama. Bagian partisipasi dalam ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

portion. The project manager is formed with members who come from each party that makes the agreement. Project manager conducting project development activities originating from the employer (owner) and is fully responsible for all of the activities including financial and project accountability reports to each party that conducted cooperation agreement. Submission of funds to project managers is deemed to be deemed as an investment in joint ventures. Shares of participation in joint ventures is recorded by using equity method.



Grafik Investasi Pada Ventura Bersama 2014-2018 (X Rp Juta) | *Investment in Joint Ventures Graphic 2014-2018 (x Rp Million)*

tahun 2018 terdapat kenaikan di Investasi pada ventura bersama sebesar 414,53% menjadi Rp 16.722,37 Juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 3.250,00. Kenaikan ini dikarenakan Barata mendapatkan pekerjaan yang bersifat Kerjasama Operasi (KSO).

In 2018 there was an increase in investment in joint ventures by 414.53% to Rp 16,722.37 million compared to 2017 amounting to Rp 3,250. This increase was due to Barata getting a Cooperation Operation (KSO) job.

X Rp Juta | Million

URAIAN <i>Description</i>	2017	2018
KSO Wika, Barata, Multinas	3.250,00	12.979,60
KSO Wika, Barata	0,00	3.742,77
Total	3.250,00	16.722,37

Tb. Rincian Investasi Ventura Bersama 2017-2018 (X Rp Juta) | *Tb. Rincian Investasi Ventura Bersama 2017-2018 (x Rp Million)*

ASET PAJAK TANGGUHAN

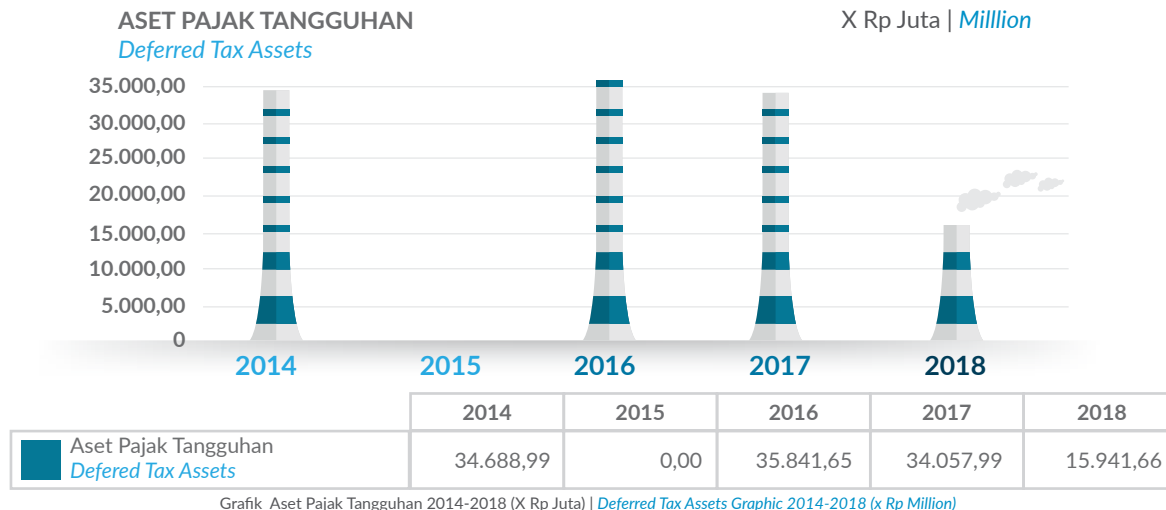
Pada tahun 2018 terdapat aset pajak tangguhan sebesar Rp 15.941,66 Juta. aset pajak tangguhan terdiri dari pajak tangguhan atas aset tetap, atas kewajiban imbalan kerja, atas kompensasi kerugian, atas penurunan nilai piutang

Deferred tax assets

In 2018 there was a deferred tax asset of Rp 15,941.66 million. Deferred tax assets consist of deferred tax on property, plant and equipment, employee benefit obligations, compensation for losses, impairment in value of receivables

dan penurunan nilai persediaan. Namun pada tahun 2018, terjadi reklasifikasi untuk menyesuaikan kebijakan pengakuan pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan terdiri dari imbalan pasca kerja kepada karyawan dan impairment atas piutang Barata.

and decrease in inventories value. However, in 2018, there was a reclassification to adjust the deferred tax recognition policy. Deferred tax assets consist of post-employment benefits to employees and impairment of Barata's receivables.



ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain terdiri dari uang jaminan, tanah hibah dan aset non produktif.

Other Assets

Other assets consist of security deposits, granted land and non-productive assets.

X Rp Juta | Million

URAIAN <i>Description</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Aset Lain-Lain <i>Other Assets</i>	28.174,40	16.247,89	15.567,25	4.242,43	3.395,47

Tb Aset Lain-lain 2014-2018 (X Rp Juta) | *Other Assets table 2014-2018 (x Rp million)*

ASET DALAM KONSTRUKSI

Aset Dalam Konstruksi merupakan aset yang masih dalam tahap penyelesaian.

Construction In Assets

Assets Under Construction are assets that are still in the stage of completion.

X Rp Juta | Million

URAIAN <i>Description</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Aset Dalam Konstruksi <i>Construction In Assets</i>	69.494,03	6.591,59	7.834,19	28.132,53	76.102,42

Tb Aset Dalam Konstruksi 2014-2018 (X Rp Juta) | *Construction In Assets table 2014-2018 (x Rp million)*

Aset dalam konstruksi terjadi peningkatan tajam sebesar 170,51% menjadi 76.102 juta tahun 2018 dari 28.133 juta tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan adanya investasi PMN pembuatan pabrik dan aset dalam konstruksi rutin.

Construction in assets increased sharply by 170.51% to 76,102 million in 2018 from 28,133 million in 2017. This was due to PMN investment in manufacturing plants and assets in routine construction.

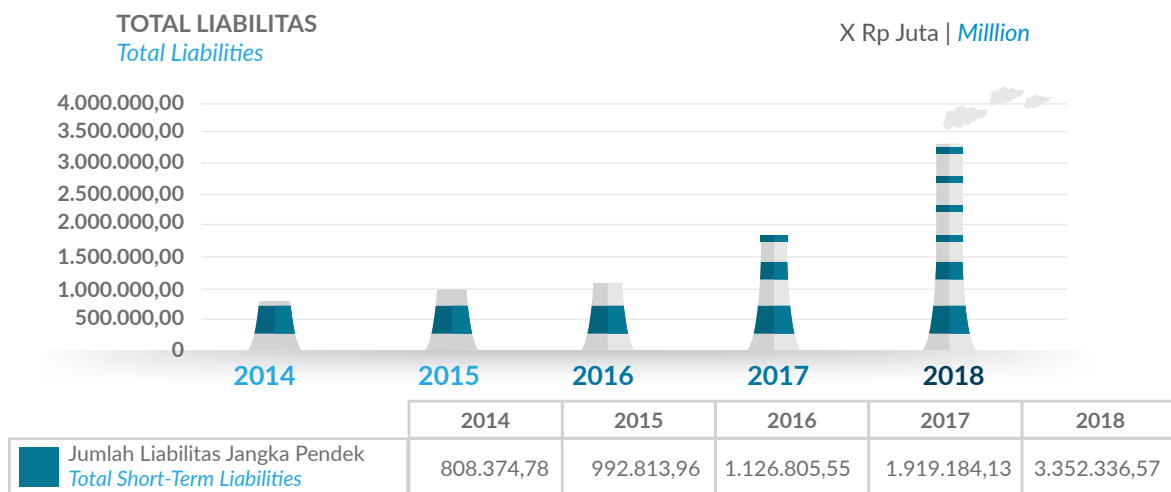
LIABILITAS

Liabilities

X Rp Juta | *Million*

URAIAN <i>Description</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Liabilitas Jangka Pendek <i>Short-term liabilities</i>	626.718,39	717.859,70	809.611,11	1.401.315,23	2.841.043,64
Liabilitas Jangka Panjang <i>Long-term Liabilities</i>	181.656,38	274.954,27	317.194,44	517.86,90	511.292,93
Total Liabilitas <i>Total Liabilities</i>	808.374,78	992.813,96	1.126.805,55	1.919.184,13	3.352.336,57

TbKomposisi Liabilitas 2014-2018 (X Rp Juta) | *Liabilities Composition table 2014-2018 (x Rp million)*



Grafik Total Liabilitas 2014-2018 (X Rp Juta) | *Total Liabilities Graphic 2014-2018 (x Rp Million)*

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas Jangka Pendek merupakan hutang-hutang yang harus dilunasi dalam tempo satu tahun. Jenis liabilitas jangka pendek Barata terdiri dari Pinjaman Jangka Pendek, Utang uang muka dari pelanggan, biaya yang masih harus dibayar, dan utang sewa pembiayaan.

Short-term liabilities

Short-term Liabilities are debts that must be repaid within one year. The types of Barata short-term liabilities consist of Short-term Loans, debts from advances from customers, accrued expenses, and finance lease loans.

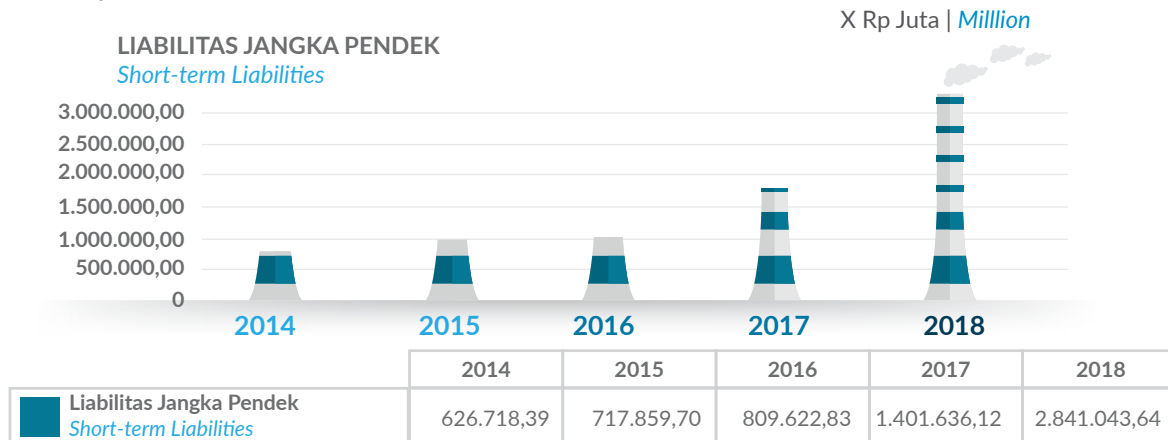
X Rp Juta | *Million*

URAIAN <i>Description</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Pinjaman jangka pendek <i>Short-term loan</i>	210.280,27	177.520,92	219.101,10	244.419,06	404.721,21
Utang usaha <i>Accounts payable</i>	149.558,12	200.553,33	206.208,65	202.128,38	519.832,94
Utang Lain-Lain <i>Debt Different</i>	39.453,40	48.941,57	52.696,27	216.679,96	80.008,07
Utang pajak <i>Tax Expenses</i>	36.647,58	40.207,15	38.427,32	50.119,07	138.395,46
Uang muka dari pelanggan <i>Advances from customers</i>	25.045,49	40.604,12	34.611,89	6.858,86	1.131.313,29
Biaya yang masih harus dibayar <i>Accrued Expenses</i>	165.733,53	210.032,60	258.565,88	681.109,91	566.740,62
Utang sewa pembiayaan <i>Debt finance leases</i>	-	-	-	-	32,04
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek <i>Total of Short-Term Liabilities</i>	626.718,39	717.859,70	809.611,11	1.401.315,23	2.841.043,64

Tb Komposisi Liabilitas Jangka Pendek 2014-2018 (X Rp Juta) | *Short-term Liabilities Composition table 2014-2018 (x Rp million)*

Liabilitas Jangka Pendek naik 102,74% menjadi Rp 2.841.043,64 Juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 1.401.315,23 juta. Kenaikan signifikan ada di Uang Muka dari Pelanggan, kenaikan 16.394,19% menjadi Rp 1.131.313,29 dibandingkan tahun 2017 senilai Rp 6.858,86 juta.

Short-term liabilities increased by 102.74% to Rp 2,841,043.64 million compared to 2017 which was Rp 1,401,315.23 million. Significant increase is in Advances from Customers, increased by 16,394.19% to Rp 1,131,313.29 compared to 2017 which was Rp 6,858.86 million.



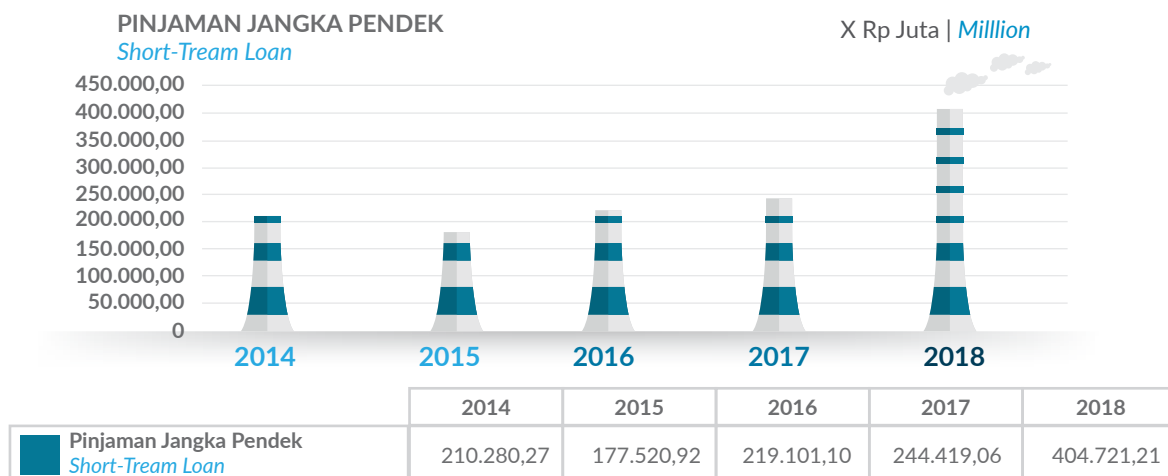
Grafik Liabilitas Jangka Pendek 2014-2018 (X Rp Juta) | *Short-term Liabilities Graphic 2014-2018 (x Rp Million)*

PINJAMAN JANGKA PENDEK

Pinjaman Jangka Pendek kenaikan 65,58% menjadi Rp 404.721,21 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 244.419,06. Kenaikan Pinjaman Jangka Pendek disebabkan kepercayaan pihak perbankan untuk memberikan fasilitas pinjaman modal bagi Barata.

Short-term loans

Short-term loans increased by 65.58% to Rp 404,721.21 compared to 2017 which was Rp 244,419.06. The increase in Short Term Loans was due to the confidence of the banks to provide capital loan facilities for Barata.



Grafik Pinjaman Jangka Pendek 2014-2018 (X Rp Juta) | *Short-term Loans Graphic 2014-2018 (x Rp Million)*

Komposisi pinjaman jangka pendek terdiri dari pinjaman dari pihak berelasi dan pihak ketiga. Pada tahun 2018 terdapat kenaikan pinjaman jangka pendek dari pihak ketiga senilai 692,90% menjadi Rp 191.373,35 Juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 24.135,90 juta. Kenaikan ini dikarenakan fasilitas Supply Chain Financing yang diterapkan Barata di tahun 2018.

Short-term loans composition consists of loans from related parties and third parties. In 2018 there was an increase in short-term loans from third parties by 692.90% to Rp 191,373.35 Million compared to 2017 which was Rp 24,135.90 million. This increase was due to the Supply Chain Financing facilities implemented by Barata in 2018.

X Rp Juta | *Million*

URAIAN <i>Description</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Pinjaman Jangka Pendek - Pihak Berelasi <i>Short-Term Loans-Related Parties</i>	56.227,15	48.877,05	48.574,30	24.135,90	191.373,35
Pinjaman Jangka Pendek - Pihak Ketiga <i>Short-Term Loans-Third Parties</i>	154.053,12	128.643,87	170.526,79	220.283,16	213.347,86

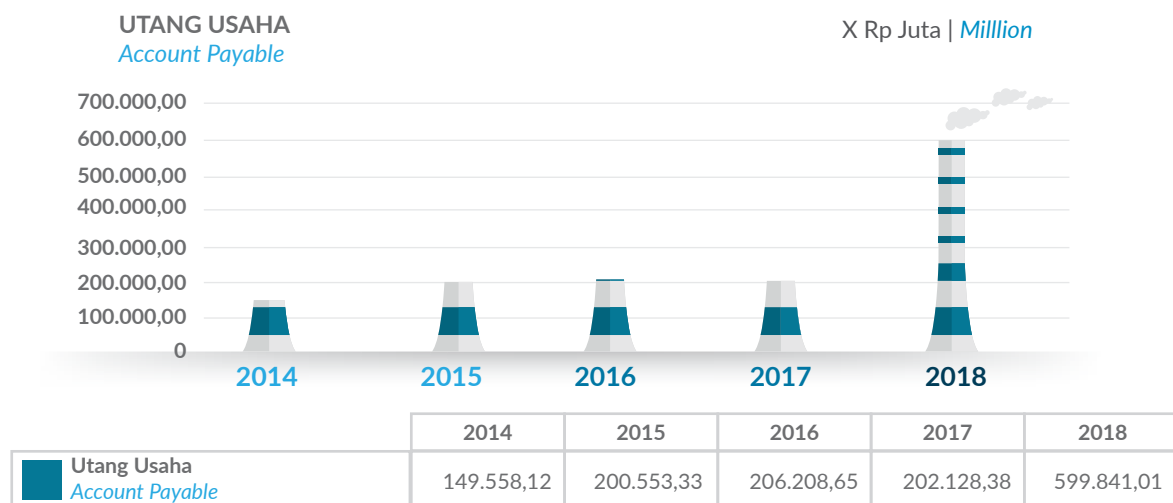
Tb. Komposisi Pinjaman Jangka Pendek) | *Short-term Loan Composition table 2014-2018 (x Rp million)*

UTANG USAHA

Utang Usaha berupa kewajiban karena pembelian barang/ jasa secara kredit yang biasanya timbul dari transaksi pembelian material berupa barang dan jasa. Utang Usaha Barata terdiri dari Utang pembelian pemasok, utang subkontraktor, dan utang expenditure.

Accounts payable

Accounts Payables in the form of obligations due to the purchase of goods/ services on credit which usually arise from material purchase transactions in the form of goods and services. Barata's accounts payable consists of supplier purchase loans, subcontractor loans, and expenditure loans.



Grafik Utang Usaha 2014-2018 (X Rp Juta) | *Account Payable Graphic 2014-2018 (x Rp Million)*

Utang Usaha naik 196,76% menjadi Rp 599.841,01 juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 202.128,38 juta. Kenaikan hutang usaha ini secara nominal dikontribusikan dari Utang pembelian pemasok. Jumlah kenaikan ini terkait dengan utang lain-lain yang direklas ke utang usaha sebesar Rp 80.008 juta pada tahun 2018 dan juga seiring dengan peningkatan penjualan pada tahun 2018

Account Payables increased by 196.76% to Rp 599,841.01 million compared to 2017 which was Rp 202.128.38 million. The increase in account payables was nominally contributed by suppliers' purchase debt. The amount of this increase related to other payables reclassified to trade payables of Rp 80,008 million in 2018 and also in line with the increase in sales in 2018.

X Rp Juta | *Million*

URAIAN <i>Description</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Utang Pembelian Pemasok <i>Suppliers Purchase Payable</i>	103.549,52	159.131,34	155.480,57	149.512,42	505.468,50
Utang Subkontraktor <i>Sub-Contractor Payable</i>	44.554,68	39.071,17	48.152,57	50.100,48	91.879,93
Utang Expenditur <i>Expenditor Payable</i>	1.453,92	2.350,82	2.575,52	2.515,47	2.492,59

Tb. Utang Usaha 2014-2018 (x Rp Juta) | *Short-term Loan Composition 2014-2018 (x Rp million) table*

UTANG PAJAK

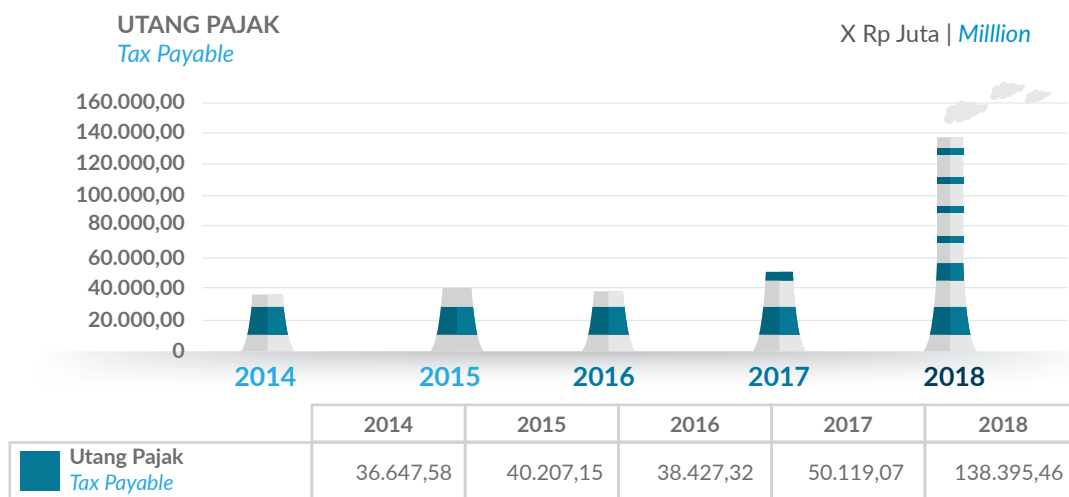
Utang Pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk didalamnya kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat kenaikan utang pajak 176,13% menjadi sebesar Rp 138.395,46 juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 50.119,07 juta. Kenaikan signifikan terdapat di PPN pungut. Kenaikan PPN ini seiring dengan peningkatan pembelian barang / jasa untuk mendukung peningkatan penjualan pada tahun 2018.

Tax payables

Tax payables is an accrued tax including the increase which stated in a tax assessment letter or similar letter based on tax laws and regulations.

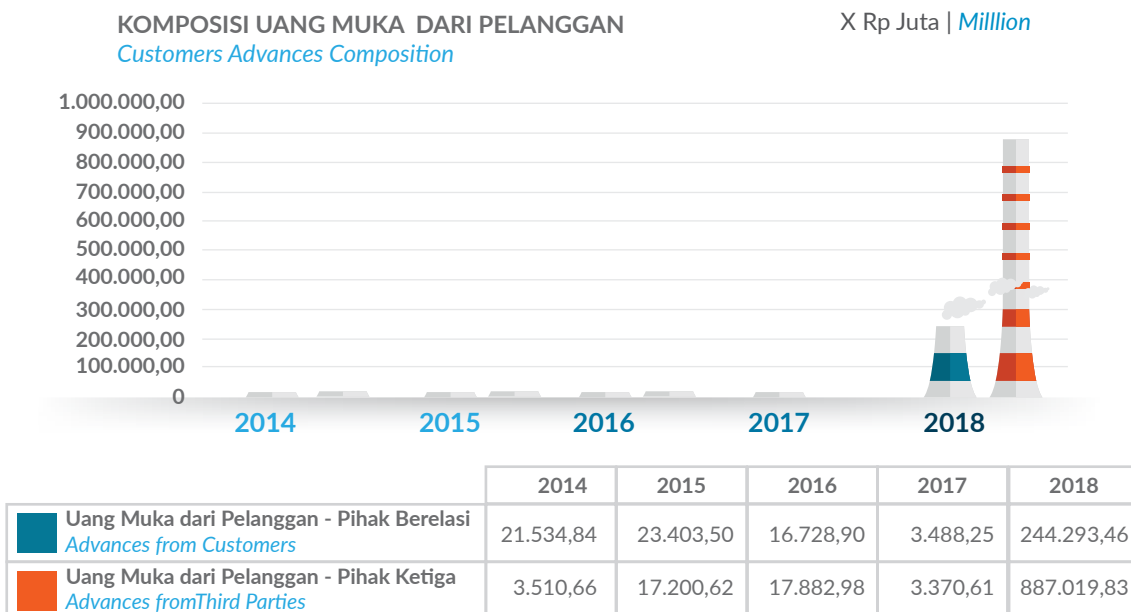
There was an increase in tax payables by 176.13% to Rp 138,395.46 million compared to 2017 which was Rp 50,119.07 million. There was a significant increase in VAT collection. The increase in VAT was in line with the increase in purchases of goods/services to support increased sales in 2018.



Grafik Utang Pajak 2014-2018 (X Rp Juta) | Tax Payable Graphic 2014-2018 (x Rp Million)

UANG MUKA PELANGGAN

Customers Advances



Grafik Uang mUka dari Pelanggan 2014-2018 (X Rp Juta) | Customers advances Graphic 2014-2018 (x Rp Million)

Uang muka dari pelanggan diperoleh Barata sehubungan penyelesaian pekerjaan. Uang muka dari pelanggan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kenaikan ini berasal dari uang muka dari pelanggan – pihak ketiga. Uang muka dari pelanggan – pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar 26.216,31% menjadi sebesar Rp 887.019,83 juta dibandingkan tahun 2017 senilai Rp 3.370,61 juta. Kenaikan signifikan ini dikarenakan Proyek PG Bombana dengan pemberi kerja PT Prima Alam Gemilang. PT Prima Alam Gemilang memberikan uang muka senilai Rp 840.411,94 juta.

Advances from customers are obtained by Barata regarding the completion of the work. Advances from customers experienced a very significant increase. This increase comes from advances from customers - third parties. Advances from customers - third parties increased by 26,216.31% to Rp 887,019.83 million compared to 2017 which was Rp 3,370.61 million. This significant increase was due to the PG Bombana Project with the employer PT Prima Alam Gemilang. PT Prima Alam Gemilang gave a down payment of Rp 840,411.94 million.

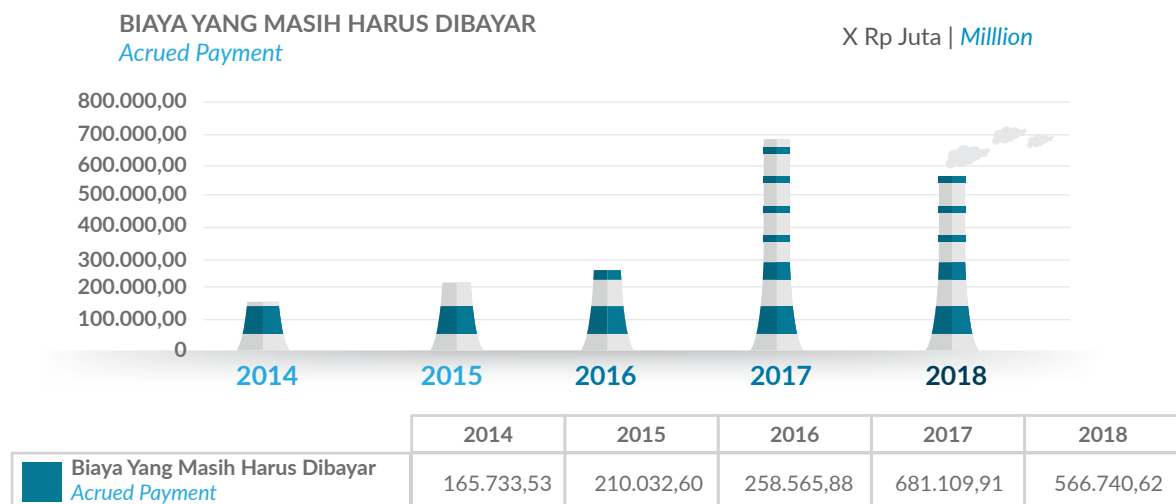
X Rp Juta | *Million*

URAIAN <i>Description</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Uang Muka dari Pelanggan - Pihak Berelasi <i>Advances from Customers</i>	21.534,84	23.403,50	16.728,90	3.488,25	244.293,46
Uang Muka dari Pelanggan - Pihak Ketiga <i>Advances from Third Parties</i>	3.510,66	17.200,62	17.882,98	3.370,61	887.019,83

Tb. Komposisi Uang muka Dari Pelanggan 2014-2018 (x Rp Juta) | *Customers Advances Composition table 2014-2018 (x Rp million)*

BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Accrued Expenses



Grafik Biaya yang Masih Harus Dibayar 2014-2018 (X Rp Juta) | *Accrued Expenses Graphic 2014-2018 (x Rp Million)*

Biaya yang masih harus dibayar terdiri dari biaya produksi, biaya cadangan insentif, biaya lainnya, dan biaya usaha. Biaya produksi yang masih harus dibayar merupakan biaya yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga maupun tenaga kerja proyek sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Biaya usaha yang masih harus dibayar merupakan liabilitas yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga sehubungan dengan aktivitas umum dan administrasi. Biaya lainnya merupakan biaya cadangan atas karyawan yang sudah purna bakti. Dana insentif karya merupakan cadangan dana prestasi kerja.

Accrued expenses consists of production expenses, incentive reserve costs, other costs, and business costs. Accrued production costs are costs that have not been billed by third parties or project workers regarding the implementation of work in the field. Accrued operating expenses are liabilities that have not been paid by third parties in connection with general and administrative activities. Other expenses are reserved expenses for employees who have retired. Work incentive fund is a reserve for performance funds.

UTANG PEMBIAYAAN

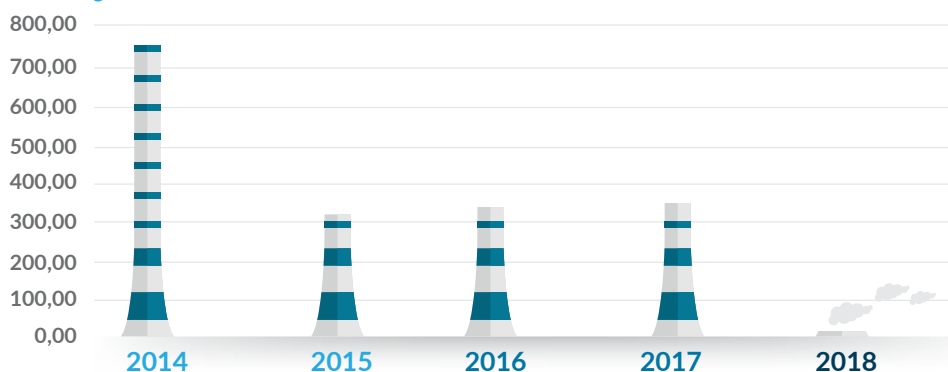
Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Astra Sedaya Finance dan Maybank Finance. Kedua pembiayaan ini ditujukan untuk pembelian kendaraan operasional berupa mobil dinas. Utang pembiayaan yang tercantum di liabilitas jangka pendek ini merupakan bagian yang merupakan jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun.

Financing Loan

The Company obtained financing from PT Astra Sedaya Finance and Maybank Finance. Both of funds are intended for operational vehicles purchase in the form of official cars. Financing loans listed in this short-term liability is a part which is due within one year.

UTANG SEWA PEMBIAYAAN Financing Loan

X Rp Juta | Million



	2014	2015	2016	2017	2018
Utang Sewa Pembiayaan Financing Loan	758,65	325,57	332,60	352,93	32,04

Grafik. Utang Sewa Pembiayaan 2014-2018 (x Rp Juta) | Financing lease loans 2014-2018 (x Rp million)

LIABILITAS JANGKA PANJANG

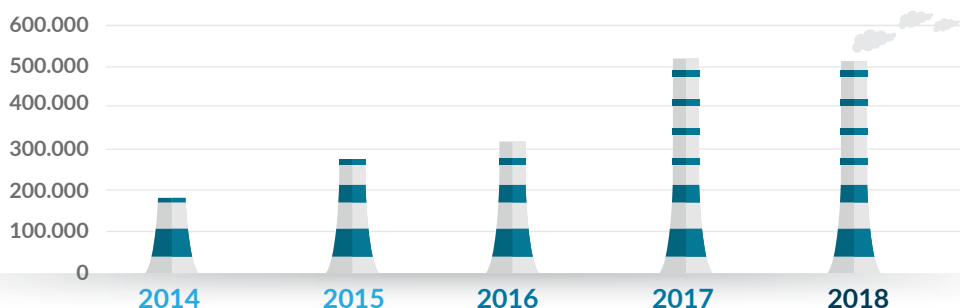
Liabilitas Jangka Panjang merupakan kewajiban perusahaan yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun secara agregat. Liabilitas jangka panjang di neraca terdiri dari utang investasi, pinjaman jangka menengah, utang jangka panjang lainnya, utang rekening dana investasi, liabilitas imbalan paska kerja, liabilitas jangka panjang.

Long-term Liabilities

Long-term Liabilities are the Company's liabilities with more than one year periods in aggregate. Long-term liabilities in the balance sheet consisted of investment debt, medium-term loans, other long-term loans, investment fund accounts payable, post-employment benefit liabilities, long-term liabilities.

LIABILITAS JANGKA PANJANG Long-term Liabilities

X Rp Juta | Million



	2014	2015	2016	2017	2018
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	181.656,38	274.954,27	317.194,44	517.868,90	511.292,93

Grafik. Liabilitas Jangka Panjang 2014-2018 (x Rp Juta) | Long term liabilities 2014-2018 (x Rp million)

Terdapat penurunan Liabilitas jangka panjang senilai 1,27% menjadi sebesar Rp 511.292,93 juta dibandingkan tahun 2017 senilai Rp 517.868,90 juta.

There was a decrease in long-term liabilities by 1.27% to Rp 511,292.93 million compared to 2017 which was Rp 517,868.90 million.

X Rp Juta | *Million*

URAIAN <i>Description</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Utang bank kredit investasi <i>Bank's Investment loan</i>	17.545,72	11.194,59	4.843,46	-	-
Pinjaman jangka menengah <i>Medium-term loans</i>	-	-	-	200.000,00	300.000,00
Utang jangka panjang lainnya <i>Other long-term debt</i>	-	100.141,91	40.731,93	38.511,37	38.511,37
Utang rekening dana investasi <i>investment account loan</i>	88.825,44	88.825,44	86.863,44	84.363,44	80.363,44
Liabilitas imbalan paska kerja <i>Post-employment benefit liabilities</i>	74.526,57	74.466,76	88.067,02	96.501,52	92.418,12
Utang pembiayaan <i>Financing Loan</i>	758,65	325,57	332,60	352,93	-
Liabilitas Pajak Tangguhan <i>Deferred Tax Liabilities</i>	-	100.141,91	96.355,98	98.139,64	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang <i>Total of Long-Term Liabilities</i>	181.656,38	274.954,27	317.194,44	517.868,90	511.292,93

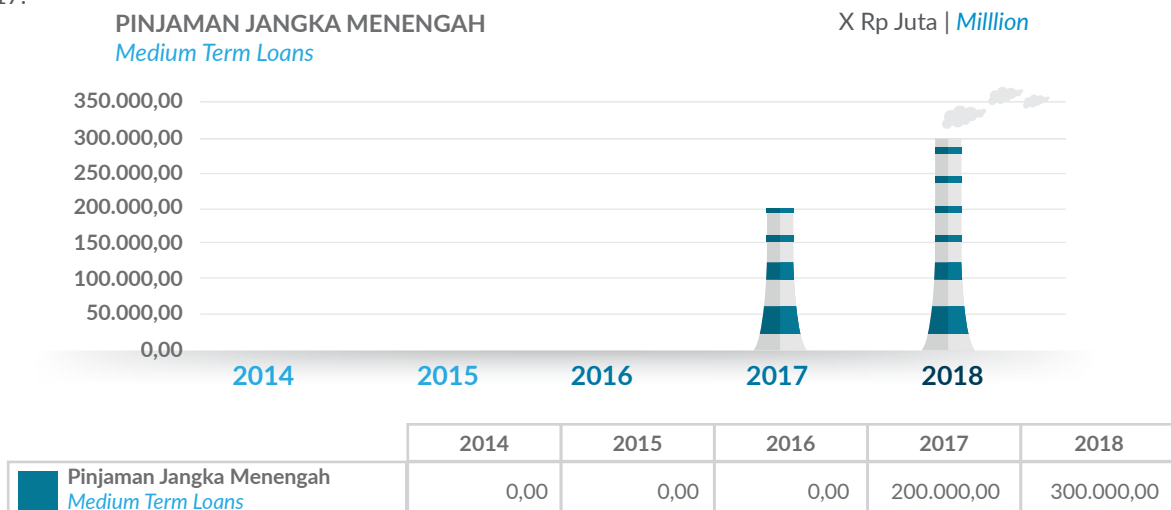
Tabel. Liabilitas Jangka Panjang 2014-2018 (x Rp Juta) | *Long Term Liabilities 2014-2018 (x Rp Million)*

PINJAMAN JANGKA MENENGAH

Utang MTN merupakan surat hutang berjangka menengah (*Medium Term Notes*) yang diterbitkan oleh PT Barata Indonesia (Persero) guna mendukung penyediaan dana untuk pengembangan usaha. Dalam melakukan penerbitan ini perusahaan telah mendapat persetujuan dari dewan komisaris berdasarkan surat No. S32/Dekom/BRT/XII/2017 tanggal 2 Desember 2017 dan surat dari Kementerian BUMN No. S-122/D3.MBU/12/2017. Perjanjian penerbitan dan penunjukan Agen Pemantau MTN 1 Barata Indonesia tahun 2017 telah disahkan oleh Notaris Arry Supratno, SH No. 11 tanggal 6 Desember 2017.

Medium Term Loans

MTN loans is a medium term loans issued by PT Barata Indonesia (Persero) to support funds provision for business development. In conducting this issuance the company has received approval from the Board of Commissioners based on letter No. S32/Dekom/BRT/XII/2017 dated December 2, 2017 and a Ministry of BUMN letter No. S-122 / D3.MBU / 12/2017. The agreement to issue and appoint Barata Indonesia MTN 1 Monitoring Agents in 2017 has been approved by Arry Supratno, SH, Notary No. 11 December 6, 2017.



Grafik Pinjaman Jangka Menengah 2014-2018 (X Rp Juta) | *Medium Term Loans Graphic 2014-2018 (x Rp Million)*

MTN diterbitkan secara bertahap terdiri dari beberapa seri dengan nilai pokok MTN yaitu sebesar dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 300.000,00 juta yang diterbitkan secara berseri dengan rincian sebagai berikut :

1. MTN 1 Barata Indonesia tahun 2017 seri A telah disahkan oleh Notaris Arry Supratno, SH No. 12 tanggal 6 Desember 2017 tentang Akta Pengakuan Hutang *Medium Term Notes* (MTN) I, bahwa PT Barata Indonesia menerbitkan MTN dengan cara penempatan terbatas dengan jumlah sebesar Rp 200.000,00 juta- dengan tenor 3 tahun sejak tanggal penerbitan yaitu tanggal 7 Desember 2017 dengan bunga 9,25%.
2. MTN 1 Barata Indonesia tahun 2018 seri B telah disahkan oleh Notaris Arry Supratno, SH No. 59 tanggal 13 Maret 2018 tentang Akta Pengakuan Hutang *Medium Term Notes* (MTN) I, dengan nilai pokok MTN sebanyak-banyaknya sebesar Rp 100.000, 00 jutadengan tenor 3 tahun sejak tanggal penerbitan MTN yaitu pada tanggal 15 Maret 2018 dengan bunga 9,15%.

MTN is issued in stages consisting of several series with MTN principal value, amounted to a maximum amount of Rp 300,000.00 million issued serially with the following details:

1. *Barata Indonesia MTN 1 2017 series A has been approved by Notary Arry Supratno, SH No. 12 December 6, 2017 regarding the Recognition Deed of Medium Term Notes (MTN) I, that PT Barata Indonesia issues MTN by means of a limited placement by Rp 200,000.00 million - with 3 years tenor from the date of issuance, December 7, 2017 with 9.25% interest.*
2. *in 2018 Barata Indonesia's MTN 1 series B has been approved by Notary Arry Supratno, SH No. 59 dated March 13, 2018 regarding Recognition Deed of Medium Term Notes (MTN) I, with a MTN principal value of no more than Rp 100,000.00 million with 3 years tenor from the date of MTN issuance, March 15, 2018 with 9.15% interest.*

UTANG REKENING DANA INVESTASI

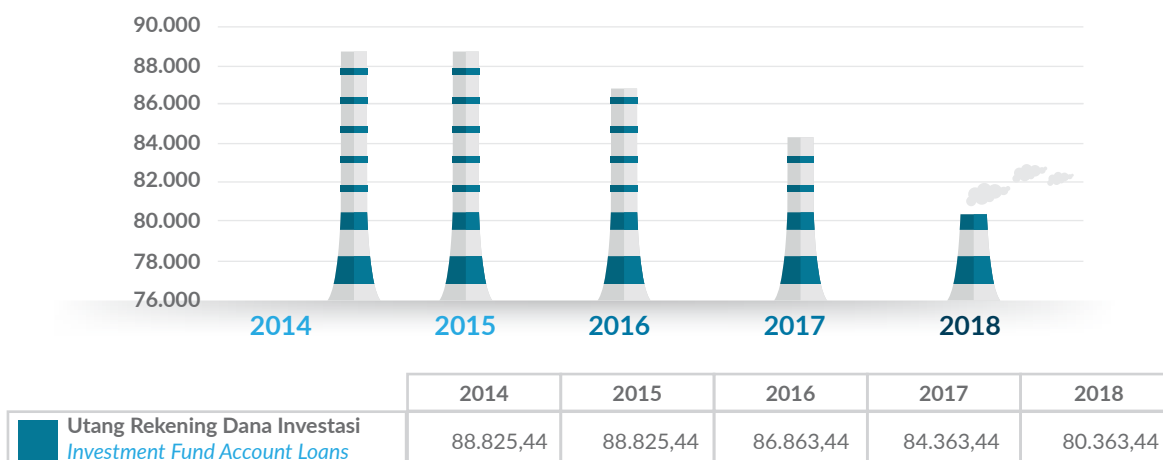
Utang RDI merupakan utang kepada Pemerintah berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor : RDI-178/DDI/1987 tanggal 4 September 1987 dalam rangka pembiayaan investasi prasarana fisik P2SP dan Perjanjian Pinjaman Nomor : RDI-195/DDI/1988 tanggal 29 Februari 1988 untuk modal kerja dalam rangka pekerjaan Proyek Peningkatan Kapasitas Giling Pabrik Gula.

Investment Fund Account Loans

RDI loans are loans to the Government based on the Loan Agreement No. RDI-178/DDI/1987 dated September 4, 1987 to finance P2SP physical infrastructure investment and Loan Agreement No. RDI-195/DDI/1988 dated February 29, 1988 for working capital for Project for Capacity Increase of Sugar Mill.

UTANG REKENING DANA INVESTASI
Investment Fund Account Loans

X Rp Juta | *Million*



Grafik Utang Rekening Dana Investasi 2014-2018 (X Rp Juta) | *Investment Fund Account Loans Graphic 2014-2018 (x Rp Million)*

Pada tahun 2018 terdapat penurunan 4,74% menjadi Rp 80.363,44 juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 84.363,44 juta. Penurunan ini sesuai dengan skema penyelesaian utang RDI mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.05/2007 tanggal 19 Februari 2007. Restrukturisasi utang RDI ini juga telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sesuai surat No. S - 865/MK.05/2015 tanggal 29 Oktober 2015 dengan skema penyelesaian total hutang pokok dan bunga diangsur dengan suku bunga 0% mulai tahun 2016 hingga lunas tahun 2026. Dengan telah disetujuinya restrukturisasi utang RDI maka telah dibuat amandemen perjanjian yaitu Perjanjian Amandemen No. : AMA-176/RDI-178/DSMI/2016 dan AMA-177/RDI-195/DSMI/2016 tanggal 26 April 2016 dan dicantumkan jadwal angsuran.

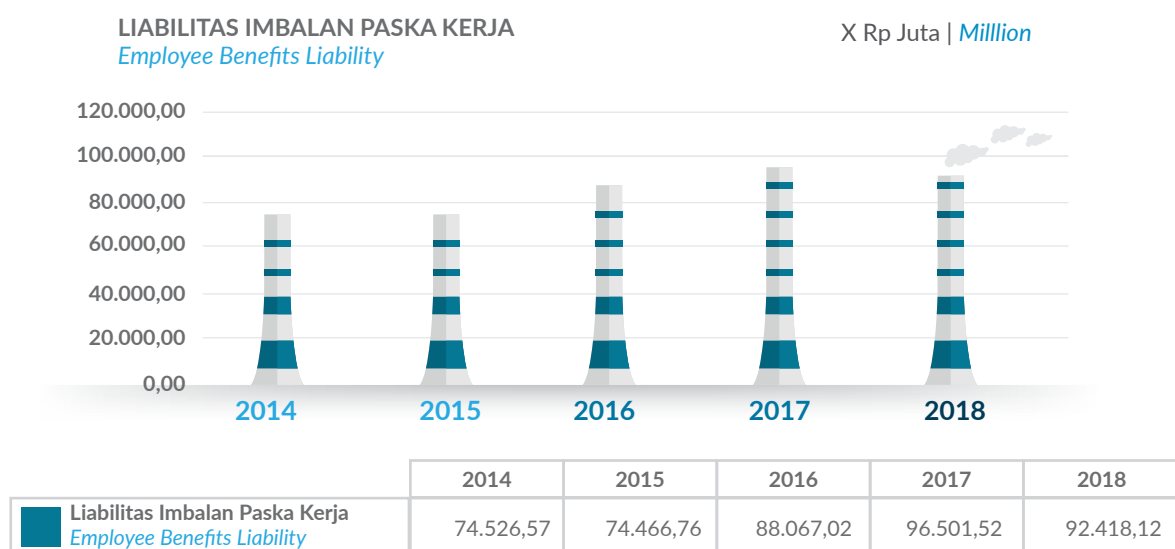
In 2018 there was a decrease by 4.74% to Rp 80,363.44 million compared to 2017 which was Rp 84,363.44 million. This decrease in accordance with the RDI loans settlement scheme which referred to Minister of Finance Regulation Number 17/PMK.05/2007 dated February 19, 2007. RDI loans restructuring has also been approved by tMinister of Finance in accordance with letter No. S - 865/MK.05/2015 dated October 29, 2015 with a scheme to settle total principal and interest payable in installments with a 0% interest rate starting in 2016 until fully paid in 2026. With the approval of RDI loans restructuring, an amendment to the agreement was made, namely the Amendment Agreement No. AMA-176/RDI-178/DSMI/2016 and AMA-177/RDI-195/DSMI/2016 dated April 26, 2016 which included an installment schedule.

LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perseroan setiap tahun mencadangkan donasi kepada peserta/pegawai yang akan pensiun guna memberikan kompensasi atas hak ganti rugi, pesangon dan penghargaan masa kerja sesuai UU No. 13 tahun 2003. Perhitungan atas imbalan paska kerja Tanggal 31 Desember 2018 dihitung oleh konsultan PT Binaputera Jaga Hikmah tanggal 28 Desember 2018 dengan No. 595/PSAK-BJH/XII-2018 dilakukan oleh Konsultan Aktuaria PT Binaputera Jaga Hikmah dengan menggunakan metode Projected Unit Credit.

Employee Benefits Liability

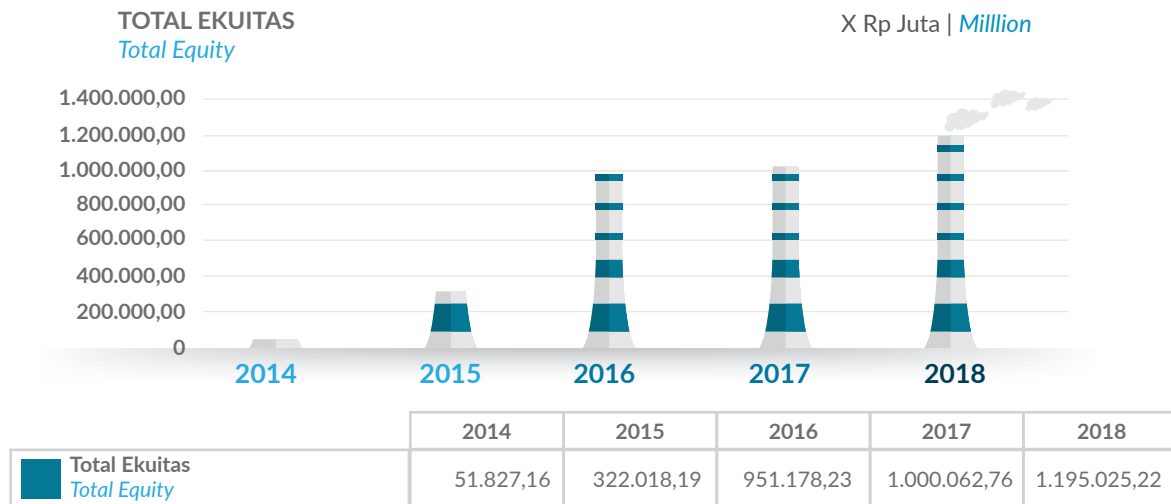
The Company reserves donations every year to employees who will retire in order to compensate for compensation rights, severance pay and work period appreciation in accordance with Law No. 13 of 2003. Calculation of post-employment benefits of December 31, 2018 is calculated by the consultant PT Binaputera Jaga Hikmah dated December 28, 2018 with No. 595 / PSAK-BJH / XII-2018 conducted by Actuarial Consultants PT Binaputera Jaga Hikmah using the Projected Unit Credit method.



Grafik Liabilitas Imbalan Paska Kerja 2014-2018 (X Rp Juta) | *Employee Benefits Liability Graphic 2014-2018 (x Rp Million)*

TOTAL EKUITAS

Total Equity



Grafik Total Ekuitas 2014-2018 (X Rp Juta) | Total Equity Graphic 2014-2018 (x Rp Million)

Total ekuitas Barata mengalami kenaikan senilai 19,50% sebesar Rp 1.195.025,22 juta dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp 1.000.062,76 juta. Pada tahun 2018, barata mencatatkan laba bersih yang cukup signifikan, laba ini kemudian mampu menurunkan saldo rugi yang dimiliki barata.

Barata's total equity increased by 19.50% to Rp1,195,025.22 million compared to 2017 which was Rp1,000,062.76 million. In 2018, Barata recorded a significant net profit, this profit was then able to reduce Barata's loss balance

X Rp Juta | Million

URAIAN Description	2014	2015	2016	2017	2018
Modal Saham Capital stock	128.203,00	143.203,00	143.203,00	762.915,00	762.915,00
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	15.000,00	-	619.712,38	3.221,27	3.221,27
Selisih penilaian kembali aset tetap Difference in revaluation of fixed assets	-	396.592,90	396.592,50	396.592,90	528.790,53
Modal Donasi Donation Capital	127.795,36	-	-	-	-
Pengukuran kembali Imbalan Kerja Remuneration for Employee Benefits	(15.467,57)	(26.618,36)	(37.423,27)	(43.374,64)	(48.416,47)
Cadangan Reserve	1.574,28	1.574,28	1.574,28	-	-
Saldo laba tak Dibagi Divided earnings balance	0,04	0,04	0,04	-	-
Saldo laba (rugi) Retained earnings (loss)	(205.277,96)	(192.733,67)	(172.481,11)	(119.291,77)	(51.485,11)
Total Ekuitas Total Equity	51.827,16	322.018,19	951.178,23	1.000.062,76	1.195.025,22

Tabel Total Ekuitas 2014-2018 (X Rp Juta) | Total Equity Table 2014-2018 (x Rp Million)

MODAL SAHAM

Modal dasar perusahaan per 31 Desember 2018, 2017 adalah 3.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Sehingga total modal dasar adalah 3.000.000.000.

Pada tahun 2016,2015,2014 modal dasar perusahaan adalah 150.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham sehingga total modal saham tahun 2016,2015,2014 adalah 150.000.000.000.

Modal ditempatkan dan disetor penuh perusahaan adalah sebesar 762.915 saham per 31 Desember 2018 dan 2017 dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham sehingga total modal ditempatkan dan disetor penuh adalah 762.915.000.000.

Modal ditempatkan dan disetor penuh perusahaan pada tahun 2016,2015,2014 adalah sebesar 143.203 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham sehingga total modal ditempatkan dan disetor penuh adalah 143.203.000.000.

Berdasarkan Surat Kementerian BUMN sebagai Pemegang Saham Nomor S-312/MBU/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 dan Akta Notaris Herawati, SH Nomor 07 Tanggal 15 Juni 2017, Modal Dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp 3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah) yang terbagi atas 3.000.000 saham, masing-masing saham dengan nilai sebesar Rp 1.000.000. Modal dasar telah ditempatkan / disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak Rp 762.915.000.000 dengan cara sebagai berikut :

1. Sebesar Rp 143.203.000.000 merupakan setoran modal lama sesuai dengan Akta Nomor 9 tanggal 29 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Herawati, Sarjana Hukum, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-07890.40.21.2014 tanggal 29 Oktober 2014.
2. Sebesar Rp 500.000.000.000 berasal dari penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam saham Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016.
3. Sebesar Rp 119.721.000.000 berasal dari penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam saham Perseroan berupa pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perindustrian.

Capital stock

The Company's Authorized capital as of December 31, 2018, 2017 was 3,000,000 shares with nominal value of Rp 1,000,000 per share. Thus total authorized capital was 3,000,000,000.

In 2016, 2015, 2014 the Company's authorized capital was 150,000 shares with a nominal value of Rp 1,000,000 per share, thus total share capital in 2016,2015,2014 was 150,000,000,000.

The Company's issued and fully paid capital amounted to 762,915 shares as of December 31, 2018 and 2017 with a nominal value of Rp1,000,000 per share, thus total issued and fully paid capital was 762,915,000,000.

The Company's issued and fully paid up capital in 2016, 2015, 2014 amounted to 143,203 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share, thus total issued and fully paid capital was 143,203,000,000.

Based on Ministry of BUMN Letter as Shareholder No. S-312 / MBU/05/2017 dated May 26, 2017 and Notary Herawati, SH Number 07 Deed June 15, 2017, the Company's authorized capital is Rp 3,000,000,000,000 (three trillion rupiahs) divided into 3,000,000 shares, each with a value of Rp 1,000,000. The authorized capital has been placed/fully paid by Republic of Indonesia was Rp 762,915,000,000 in the following ways:

1. *Rp 143,203,000,000 represent old capital deposits in accordance with Deed Number 9 dated October 29, 2014 made before Notary Herawati, Bachelor of Law, who has obtained ratification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-07890.40.21.2014 dated October 29, 2014.*
2. *Rp 500,000,000,000 from the addition of the State capital of Republic of Indonesia into the Company's shares based on Government Regulation No. 68 of 2016 dated 29 December 2016.*
3. *Rp 119,721,000,000 from the addition of the State capital of the Republic of Indonesia into the Company's shares in the form of transfer of State Property to the Ministry of Industry.*

STRUKTUR MODAL

Capital Structure

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Management Policy on Capital Structure

Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan manajemen atas struktur modal yaitu dengan *Debt to Equity* (DER) yang tidak boleh melebihi 2,75 kali. Realisasi pada tahun 2017 untuk DER adalah 0,44 kali dan 2018 0,59 kali.

The Company is committed to implement management policy on capital structure with Debt to Equity (DER) shall not exceed 2.75 times. Realization in 2017 for DER was 0.44 times and 2018 0.59 times.

STRUKTUR MODAL PT. BARATA INDONESIA

Capital Structure of PT. Barata Indonesia

Struktur modal posisi Desember tahun 2018 adalah sebagai berikut :

The capital structure position as of December 2018 is as follows:

X Rp Juta | *Million*

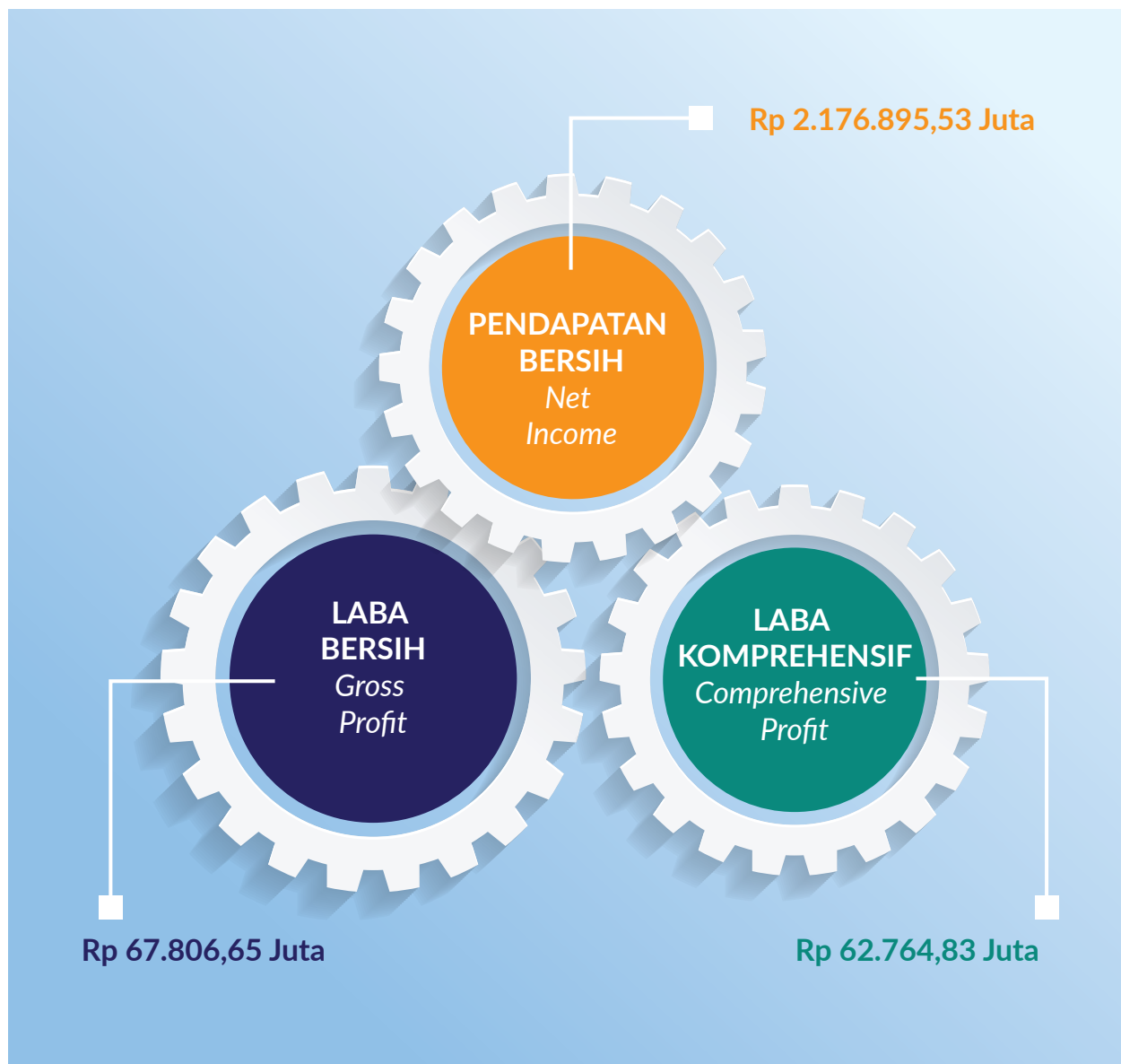
URAIAN <i>Description</i>	2017		2018		PERTUMBUHAN Growth	
	Nilai Value	%	Nilai Value	%	Nilai Value	%
Pinjaman Berbunga <i>Interest-bearing loans</i>	444.419	31%	704.721	37%	260.302	59%
Ekuitas <i>Equities</i>	1.000.063	69%	1.195.025	63%	194.962	19%
Jumlah Pinjaman berbunga dan ekuitas <i>Total Interest-bearing loans and Equities</i>	1.444.482	100%	1.899.746	100%	455.265	32%
DER (Debt to Equity Ratio) (kali) <i>DER (Debt to Equity Ratio) (times)</i>	0,44		0,59			

Perusahaan berusaha untuk mempertahankan struktur modal yang optimal untuk memaksimalkan kelangsungan usaha. Komposisi struktur modal tahun 2017 yang dimiliki adalah 31% berasal dari pinjaman berbunga dan 69% berupa ekuitas. Komposisi struktur modal yang berasal dari pinjaman berbunga mengalami kenaikan 59% sedangkan yang berasal dari ekuitas mengalami kenaikan 19%.

The Company strives to maintain optimal capital structure to maximize business continuity. The composition of the capital structure in 2017 was 31% derived from interest-bearing loans and 69% was in the form of equity. The composition of capital structure derived from interest-bearing loans increased 59% while those from equity increased 19%.

ANALISIS LABA KOMPREHENSIF

Comprehensive Income Analysis



Laba komprehensif meningkat 37,45% sebesar Rp 62.764,83 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 45.663,64 Juta. Jumlah ini merupakan laba periode yang paling besar diperoleh PT Barata Indonesia (persero).

Comprehensive profit increased 37.45% to Rp 62,764.83 compared to 2017 which was Rp 45,663.64 million. This amount was the largest period profit obtained by PT Barata Indonesia (Persero).

X Rp Juta | *Million*

URAIAN Description	2017	2018
PENDAPATAN BERSIH <i>Revenue</i>	1.193.277,45	2.176.895,53
BEBAN POKOK PENDAPATAN <i>Cost of Good Sales</i>	(1.073.232,70)	(1.976.461,60)
LABA KOTOR <i>Gross Profit</i>	120.044,75	200.433,94
Beban administrasi dan umum <i>Administrative And General Expenses</i>	(30.394,60)	(43.039,92)
Beban penjualan <i>Selling Expenses</i>	(10.128,57)	(4.197,04)
Bagian laba pada investasi ventura bersama <i>The Share Of Profits On Joint Venture Investment</i>	0,00	16.722,37
Selisih Kurs <i>Exchange Rate Gap</i>	2.336,24	12.637,63
Pendapatan bunga <i>Interest Income</i>	25.460,04	26.596,93
Beban pajak final <i>Final Tax Expense</i>	(10.822,44)	(54.032,84)
Beban dari pendanaan <i>Burden Of Funding</i>	(27.015,48)	(42.657,67)
Lain-lain bersih <i>Others Are Clean</i>	(10.824,80)	(18.571,49)
LABA SEBELUM PAJAK <i>Profit Before Tax</i>	58.655,14	93.891,91
Beban pajak penghasilan <i>Income Tax Expense</i>	(7.040,12)	(26.085,26)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN <i>Net Profit</i>	51.615,02	67.806,66
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN <i>Other Comprehensive Income</i>	0,00	0,00
Kerugian aktuarial atas program imbal pasti <i>Actuarial Losses On Fixed Return Programs</i>	(7.935,17)	(5.746,60)
Pajak tangguhan terkait <i>Deferred Tax Related</i>	1.983,79	704,78
Jumlah penghasilan komperhensif lain setelah pajak <i>Other Comprehensive Income Amounts After Tax</i>	(5.951,38)	(5.041,83)
Jumlah laba komperhensif periode berjalan <i>Total Comprehensive Profit For The Current Period</i>	45.663,64	62.764,83

Tb. Laporan Laba Rugi Tahun 2017-2018 (x Juta) | 2014-2018 Income Statement Tb (x Rp Million)

X Rp Juta | *Million*

URAIAN Description	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Bersih <i>Cost if Good Sales</i>	568.537,26	650.207,63	702.754,27	1.193.277,45	2.176.895,53
Beban Pokok Pendapatan <i>Cost if Good Sales</i>	(561.665,98)	(582.272,67)	(613.221,95)	(1.073.232,70)	(1.976.461,60)
Laba Kotor <i>Gross profit</i>	6.871,28	67.934,97	89.532,31	120.044,75	200.433,94
Laba Sebelum Pajak <i>Profit before tax</i>	107.988,00	25.761,04	27.007,92	69.477,58	147.924,75
Laba Bersih Tahun Berjalan <i>Current Year Net Profit</i>	(96.561,17)	12.544,29	20.252,56	51.615,02	67.806,66
Laba komprehensif periode berjalan <i>Comprehensive profit for the period</i>	(102.228,64)	397.986,40	9.447,65	45.663,64	62.764,83

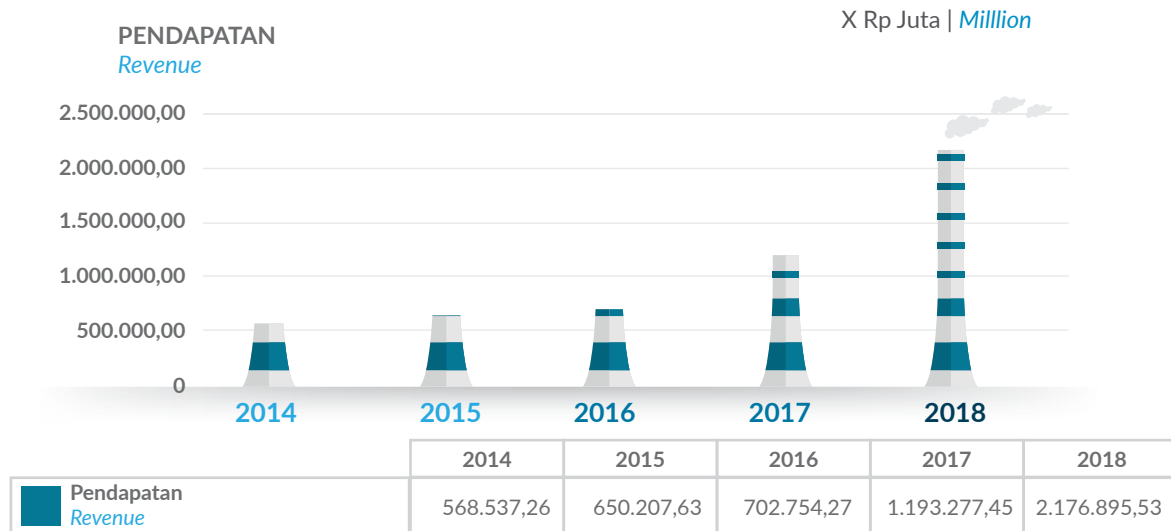
Tb. Laporan Laba Rugi Tahun 2014-2018 | 2014-2018 Income Statement Tb

PENDAPATAN

Pendapatan Barata berasal dari aktivitas manufaktur, pengecoran baja dan konstruksi. Dalam konsep lini bisnis, Barata memiliki fokus di bidang penyedia sarana dan prasarana bagi industri pangan, industri energy, industri pengairan, industri komponen dan permesinan (FEW +). Untuk meraih fokus ini, Barata membentuk lima divisi diantaranya Divisi Industri Gula dan Agro, Divisi Industri Komponen dan Permesinan, Divisi Pembangkit, Divisi Minyak dan Gas, Divisi Sumber Daya Air.

Revenue

Barata's Revenue are from manufacturing, steel casting and construction activities. In the business line concept, Barata has a focus on the provision of facilities and infrastructure for the food industry, energy industry, irrigation industry, component and machinery industry (FEW +). To achieve this, Barata formed five divisions including Sugar and Agro Industry Division, Component and Machinery Industry Division, Power plant Division, Oil and Gas Division, Water Resources Division.



Grafik Pendapatan Bersih 2014-2018 (X Rp Juta) | Revenue Graphic 2014-2018 (x Rp Million)

Pendapatan bersih tahun 2018 mengalami kenaikan 82,43% menjadi Rp 2.176.895,53 juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 1.193.277,46 Juta. Kenaikan pada tahun 2018 ini dikarenakan Barata memiliki pekerjaan konstruksi yang cukup besar.

Revenue in 2018 increased 82.43% to Rp 2,176,895.53 million compared to 2017 amounting to Rp 1,193,277.46 Million. The increase in 2018 is because Barata has a large enough construction work.

BEBAN POKOK PENJUALAN

Beban pokok penjualan terdiri dari biaya pemakaian bahan, beban tenaga langsung, beban mesin, beban operasional / lapangan, beban subkontrak, dan beban produksi tidak langsung. .

Cost of Good Sales

Cost of Good Sales consisted of material usage costs, direct power expenses, engine expenses, operational / field expenses, subcontracted expenses, and indirect production expenses.

X Rp Juta | Million

URAIAN Description	2014	2015	2016	2017	2018
Pemakaian bahan Use of materials	218.495,32	265.428,63	251.786,39	492.912,92	861.445,50
Beban tenaga langsung Direct energy expense	11.713,07	12.579,77	12.171,26	18.211,62	22.962,62
Beban mesin Engine load	12.970,34	13.924,52	18.746,22	18.933,36	13.281,13
Beban operasional lapangan/order Field operational costs / order	110.425,33	90.733,32	93.941,82	149.338,71	336.455,27
Beban sub kontrak Sub-contract expenses	179.914,88	133.801,19	155.168,45	282.479,45	629.237,85
Beban produksi tak langsung Indirect production costs	28.147,04	65.805,25	81.407,81	111.356,63	113.079,23

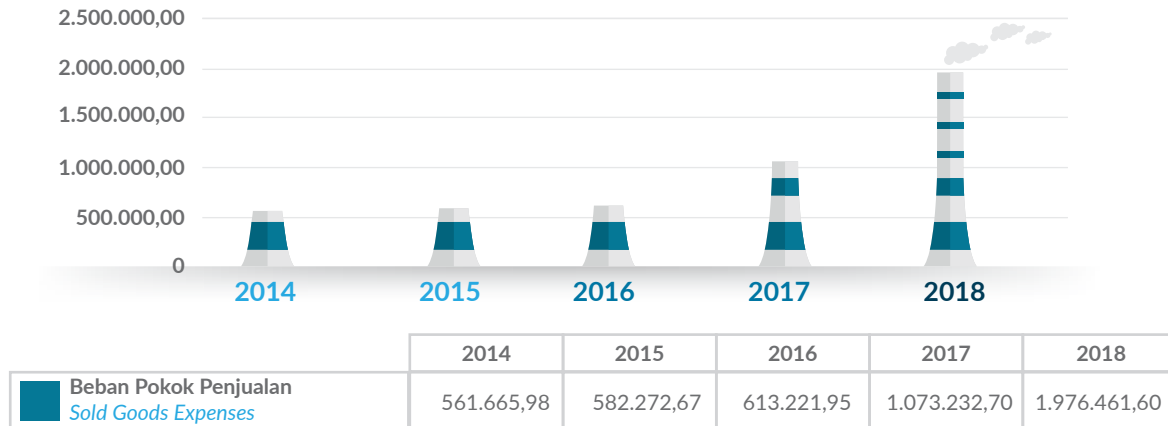
Tb. Komposisi Harga Pokok Penjualan 2014-2018 (Rp Juta) | Tb. Komposisi Harga Pokok Penjualan 2014-2018 (Rp Million)

Pada tahun 2018 terdapat kenaikan 84,16% menjadi Rp 1.976.461,60 Juta dibandingkan tahun 2017 senilai Rp 1.073.232,70 juta. Secara umum peningkatan jumlah beban pokok penjualan yakni mengikuti kenaikan penjualan di tahun 2018. Secara khusus, Jumlah terbesar dari peningkatan beban pokok penjualan ini berasal dari pemakaian bahan. Pemakaian bahan meningkat 74,77% menjadi Rp 861.445,50 juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 492.912,92 juta.

In 2018 there was an increase by 84.16% to Rp 1,976,461.60 Million compared to 2017 which was Rp 1,073,232.70 million. Generally, the increase in the total Sold Goods Expenses was following the increase in sales in 2018. particularly, the largest amount of this increase in Sold Goods Expenses came from usage of materials. Material usage increased 74.77% to Rp 861,445.50 million compared to 2017 which was Rp 492,912.92 million.

BEBAN POKOK PENJUALAN
Sold goods Expenses

X Rp Juta | *Million*



Grafik Beban Pokok Penjualan 2014-2018 (X Rp Juta) | *Sold Goods Expenses Graphic 2014-2018 (x Rp Million)*

BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Beban administrasi dan umum terdiri dari beban pegawai, beban rumah dinas dan gedung, beban administrasi lainnya, beban kendaraan, beban diestimasi atas imbalan kerja dan beban insentif karyawan.

Administrative and General Expenses

Administrative and general expenses consist of employee expenses, official house and building expenses, other administrative expenses, vehicle expenses, expenses estimated on employee benefits and employee incentives.

X Rp Juta | *Million*

URAIAN <i>Description</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Beban pegawai <i>Employee expense</i>	15.878,46	14.766,15	16.863,49	15.936,42	19.171,31
Beban rumah dinas dan gedung <i>Office and building expenses</i>	1.936,26	2.244,39	1.921,00	973,40	1.103,38
Beban administrasi lainnya <i>Other administrative expenses</i>	8.397,77	2.573,87	1.393,08	7.927,39	10.145,79
Beban kendaraan <i>Vehicle expenses</i>	5.742,64	3.437,52	3.560,27	2.287,63	3.409,25
Beban yang diestimasi atas imbalan kerja <i>estimated on employee benefits Expenses</i>	9.339,77	1.472,33	2.112,35	461,80	2.691,78
Beban insentif karya <i>Work incentive expenses</i>	5.000,00	2.202,18	3.955,00	2.807,96	6.518,40

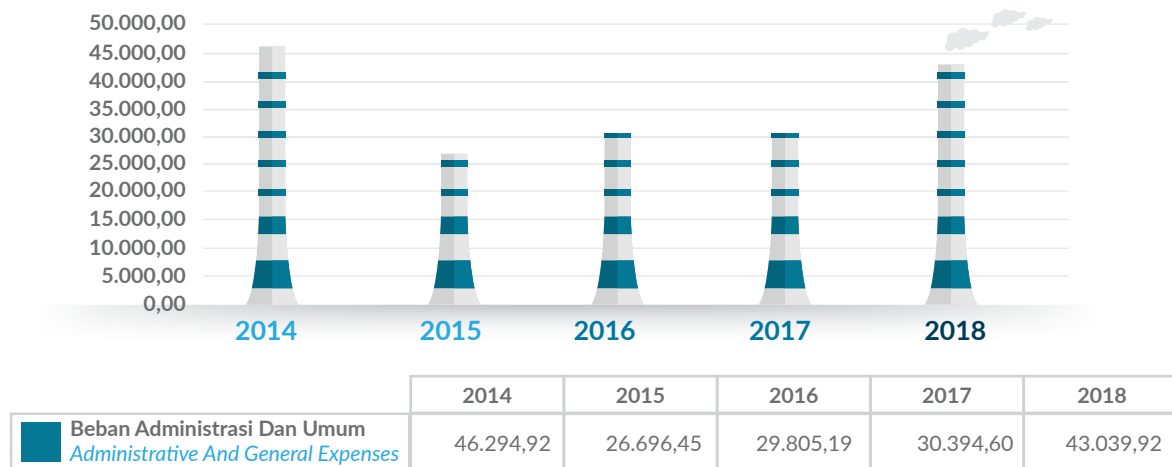
Tb. Beban Administrasi Dan Umum Tahun 2014-2018 | *Administrative and General Expenses Table Tahun 2014-2018*

Pada tahun 2018 beban administrasi dan umum terdapat kenaikan 41,60% menjadi Rp 43.092,92 juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 30.394,60 juta. Secara umum beban administrasi dan umum dikarenakan penambahan tenaga kerja karyawan di bidang *engineering* yang dilakukan sepanjang tahun 2018. Secara khusus, Jumlah terbesar dari peningkatan beban administrasi dan umum ini berasal dari beban pegawai. Pemakaian bahan meningkat 20,30% menjadi Rp 19.171,31 juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 15.936,42 juta.

In 2018 the general and administrative expenses increased 41.60% to Rp 43,092.92 million compared to 2017 amounting to Rp 30,394.60 million. In general, administrative and general expenses are due to the addition of employee workforce in the field of engineering carried out throughout 2018. In particular, the largest amount of this increase in administrative and general expenses comes from employee expenses. Material use increased by 20.30% to Rp 19,171.31 million compared to 2017 amounting to Rp 15,936.42 million.

BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM *Administrative and General Expenses*

X Rp Juta | Million



Grafik Beban Administrasi dan Umum 2014-2018 (X Rp Juta) | *Administrative and General Expenses Graphic 2014-2018 (x Rp Million)*

BEBAN PENJUALAN

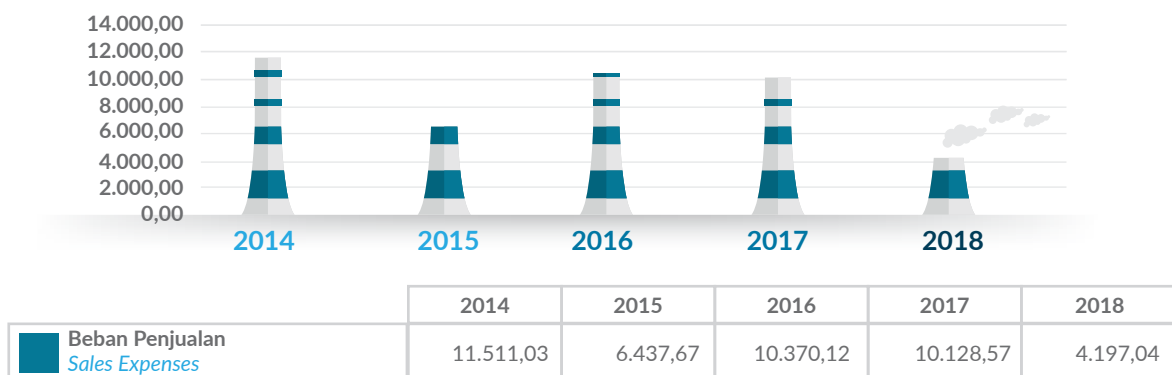
Beban penjualan terdiri dari beban pegawai, beban administrasi dan umum, beban kendaraan, beban promosi dan tender, beban rumah dinas dan gedung.

Sales expenses

Sales expenses consist of employee expenses, general and administrative expenses, vehicle expenses, promotion and tender expenses, official house and building expenses.

BEBAN PENJUALAN *Sales Expenses*

X Rp Juta | Million



Grafik Beban Penjualan 2014-2018 (X Rp Juta) | *Sales Expenses Graphic 2014-2018 (x Rp Million)*

Pada tahun 2018 beban penjualan terdapat penurunan 58,56% menjadi Rp 4.197,04 juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 10.128,57 juta. Secara umum beban penjualan mengalami penurunan dikarenakan beban pegawai pemasaran mengalami realokasi posisi dan jabatan sesuai dengan struktur organisasi.

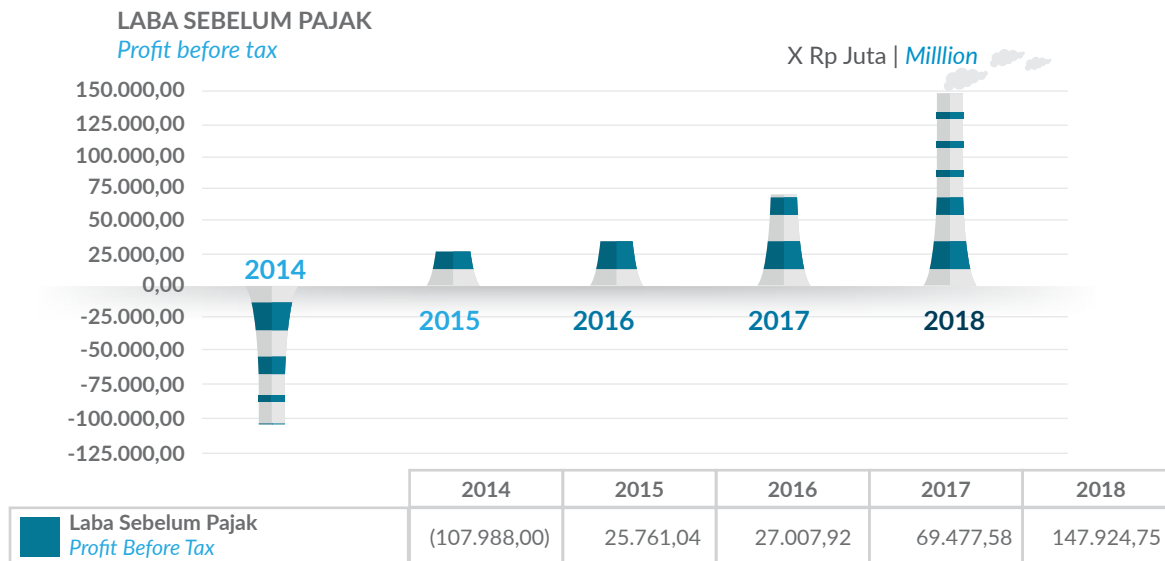
In 2018 sales expenses decreased 58.56% to Rp 4,197.04 million compared to 2017 which was Rp 10,128.57 million. Generally, sales expenses has decreased due to marketing employees expenses experiencing reallocation of positions and positions in accordance with the organizational structure.

LABA SEBELUM PAJAK

Pada tahun 2018 beban penjualan terdapat kenaikan 112,91% menjadi Rp 147.924,75 juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 69.477,58 Juta. Kenaikan ini mengikuti kenaikan penjualan pada tahun 2018.

Profit before tax

In 2018, sales expenses increased by 112,91% to Rp 147.924,75 million compared to 2017 which was Rp 69.477,58 million. This increase follows the increase in sales in 2018.



Grafik Beban Administrasi dan Umum 2014-2018 (X Rp Juta) | *Administrative and General Expenses Graphic 2014-2018 (x Rp Million)*

ANALISIS ARUS KAS

Cash Flows Analysis

X Rp Juta | Million

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	Description
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						Cash Flows From Operating Activities
Penerimaan kas dari pelanggan	457.589,02	523.150,55	488.326,85	736.256,15	2.053.000,70	Cash Receipts From Customers
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	-498.442,78	-481.659,79	-463.252,80	-506.861,27	-2.022.953,10	Cash Payments To Suppliers And Employees
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	-40.853,76	41.490,76	25.074,04	229.394,88	30.047,61	Net Cash Used For Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						Cash Flows From Investment Activities
Penerimaan penjualan aset tetap	174,50	638,35	0,00	263,50	577,15	Acceptance Of Fixed Asset Sales
Pengeluaran rehabilitasi / investasi	-2.609,82	-472,42	-1.050,83	-19.898,53	-148.658,88	Rehabilitation / Investment Expenses
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	-2.435,32	165,93	-1.050,83	-19.635,03	-148.081,73	Net Cash Used For Investment Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						Cash Flows From Funding Activities
Pengeluaran angsuran kredit	-142.125,70	-154.375,89	-154.564,87	-285.566,79	-874.415,62	Expenditures For Credit Installments
Pengeluaran angsuran Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00	-1.962,00	-2.500,00	-4.000,00	Expenditure On Long-Term Loans
Penerimaan Tambahan Modal Disetor	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	Receipt Of Additional Paid-In Capital
Penerimaan Kredit	144.720,00	130.949,26	155.000,00	477.931,48	747.094,94	Credit Receipt
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	2.594,30	-23.426,63	498.473,13	189.864,69	-131.320,68	Net Cash Used For Funding Activities
KENAIKAN / (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	-40.694,78	18.230,06	522.496,35	399.624,53	-249.354,81	Increase / (Decrease) Clean Cash And Cash Equivalents
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	106.988,43	66.293,65	84.523,72	607.020,07	1.006.644,60	Cash And Early Cash Equivalent Period
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	66.293,65	84.523,72	607.020,07	1.006.644,60	757.289,80	Cash And Final Cash Equipment Period

Tb. Analisa Arus Kas Tahun 2014-2018 | *Cash Flow Analysis Table Tahun 2014-2018*

Barata memiliki saldo akhir kas dan setara kas sebesar Rp 757.289,80 juta dengan penurunan sebesar Rp 249.354,81 juta dibandingkan tahun 2017. Penurunan ini seiring dengan realisasi investasi yang berasal dari Penanaman Modal Negara.

Barata has cash and cash equivalents final balance of Rp 757,289.80 million with a decrease of Rp 249,354.81 million compared to 2017. This decline is in line with the realization of investments originating from State Investment.

KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi mengalami penurunan 86,90% menjadi Rp 30.047,61 juta jika dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 229.394,88 juta. Penurunan ini disebabkan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan yang meningkat dan tidak diimbangi dengan penerimaan kas dari pelanggan. Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan meningkat 299,11% menjadi Rp 2.022.953,10 juta dibandingkan tahun 2017 senilai Rp 506.861,27 juta. Pembayaran kas kepada pemasok meningkat seiring dengan banyaknya pekerjaan di bidang konstruksi yang dikerjakan Barata. Sedangkan disisi lain, Barata menerima beberapa pekerjaan konstruksi yang bersifat *turn key*.

Net Cash from Operating Activities

Net cash from operating activities decreased by 86.90% to Rp 30,047.61 million compared to 2017 which was Rp 229,394.88 million. The decrease was due to increased cash payments to suppliers and employees and not compensated by cash receipts from customers. Cash payments to suppliers and employees increased by 299.11% to Rp 2,022,953.10 million compared to 2017 which was Rp 506,861.27 million. Cash payments to suppliers increased along with projects in the construction sector that Barata worked on. While on the other hand, Barata received several turn key construction projects.

KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi mengalami penurunan 654,17% menjadi Rp (148.081,73) juta jika dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp (19.635,03) juta. Penurunan ini disebabkan pengeluaran kas untuk aktivitas rehabilitasi/investasi, pengeluaran ini meningkat senilai Rp 128.760,35 juta. Kenaikan pengeluaran ini merupakan realisasi investasi menggunakan penanaman modal negara yang diperoleh Barata pada tahun 2016.

Net Cash from Investment Activities

Net cash from operating activities decreased by 654.17% to Rp (148,081.73) million compared to 2017 which was Rp (19,635.03) million. This decrease was due to cash outflows for rehabilitation/investment activities, this expense increased by Rp 128,760.35 million. This increase in expenses were the realization of investment using state investment obtained by Barata in 2016.

KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan 169,17% menjadi Rp (131.320,68) juta jika dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 189.864,69 juta. Penurunan ini disebabkan bertambahnya pengeluaran untuk angsuran pinjaman tidak sebanding dengan penerimaan kredit yang diperoleh. Pengeluaran angsuran pinjaman meningkat 206,20% menjadi Rp 874.415,62 juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 285.566,79 juta. Pada tahun 2018, Barata memperoleh penerimaan kredit jangka menengah dengan melakukan pencairan Medium Term Notes I tahun 2017 Seri B senilai Rp 100.000,00 Juta.

Net Cash from Funding Activities

Net cash from financing activities decreased by 169.17% to Rp (131,320.68) million compared to 2017 which was Rp 189,864.69 million. This decrease was due to the increase in expenditure on loan installments not proportional to the credit received. Expenditures on loan installments increased 206.20% to Rp 874,415.62 million compared to 2017 which was Rp 285,566.79 million. In 2018, Barata obtained medium-term credit receipts by disbursing 2017 Series B Medium Term Notes I amounted to Rp 100,000.00 Million.

ANALISIS KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG, KOLEKTIBILITAS PIUTANG, DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA

Analysis Of The Ability To Pay Debts, Collectability Of Accounts Receivable, And Other Financial Ratios

Rasio keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktifitas operasionalnya. Rasio keuangan ini umumnya terbagi menjadi beberapa topik yakni :

1. Profitabilitas ; kemampuan menghasilkan laba.
2. Likuiditas ; kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek.
3. Solvabilitas ; kemampuan melunasi seluruh hutang yang dimiliki.
4. Perputaran ; mencerminkan perputaran modal yang ada dalam perusahaan.

Financial ratio shows the company's ability to conduct its operational activities. This financial ratio is generally divided into several topics, namely:

1. Profitability; ability to generate profits.
2. Liquidity; ability to fulfill short-term liabilities.
3. Solvability; the ability to pay off all loans held.
4. Turnover; reflect the existing capital turnover within the company.

PROFITABILITAS

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas yaitu melalui Margin Laba kotor, Margin Laba usaha, margin laba bersih, Return on Equity (ROE), dan Return on Investment (ROI).

Profitability

The company's ability to generate profits may be measured by using profitability ratios, namely through gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, Return On Equity (ROE), and Return On Investment (ROI).

X Rp Juta | Million

URAIAN Description	2014	2015	2016	2017	2018
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	1,21	10,45	12,74	10,06	9,21
Margin Laba Usaha Operating Profit Margin	-8,96	5,35	7,02	6,66	7,04
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	-16,98	1,93	2,88	4,33	3,11
ROE ROE	-102,33	3,79	2,19	5,58	6,4
ROI ROI	-9,99	4,25	3,10	3,77	4,55

Tb. Rasio Profitabilitas Tahun 2014-2018 (%) | Rasio Profitability Table Tahun 2014-2018 (%)

MARGIN LABA KOTOR

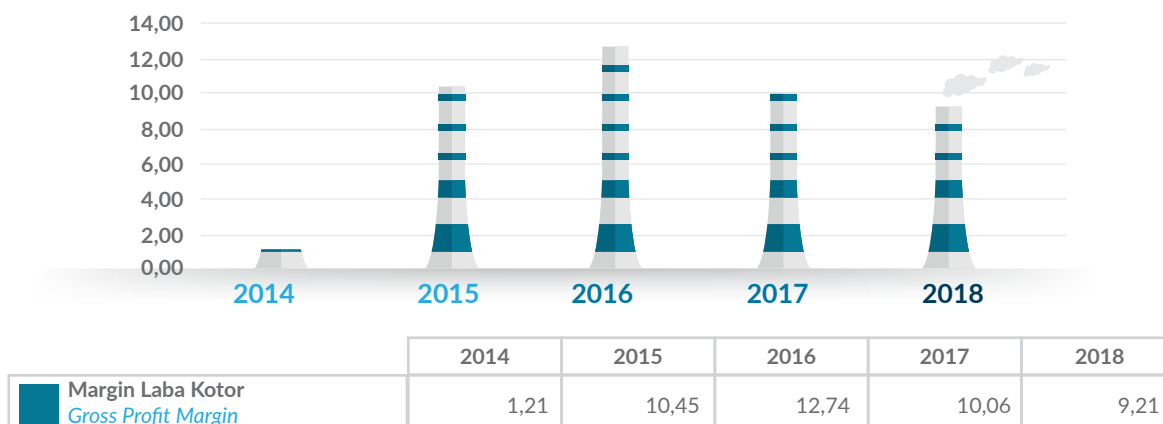
Mencerminkan kemampuan Barata untuk mengendalikan beban pokok penjualan. Margin laba kotor senilai 9,21% menurun dari tahun 2017 senilai 10,06%. Penurunan ini dikarenakan peningkatan pemakaian bahan dan beban subkontrak yang memperkecil margin laba kotor. Adanya peningkatan bauran pekerjaan konstruksi menjadi salah satu faktor utama.

Gross Profit Margin

Reflects Barata's ability to control Sold goods expenses. Gross profit margin of 9.21% decreased from 2017 which was 10.06%. This decrease was due to an increase in material usage and subcontracted expenses which reduce gross profit margin. The increase in the mix of construction work is one of the main factors.

MARGIN LABA KOTOR Gross Profit Margin

X Rp Juta | Million



Grafik Margin Laba Kotor 2014-2018 (%) | Gross Profit Margin Graphic 2014-2018 (%)

MARGIN LABA USAHA

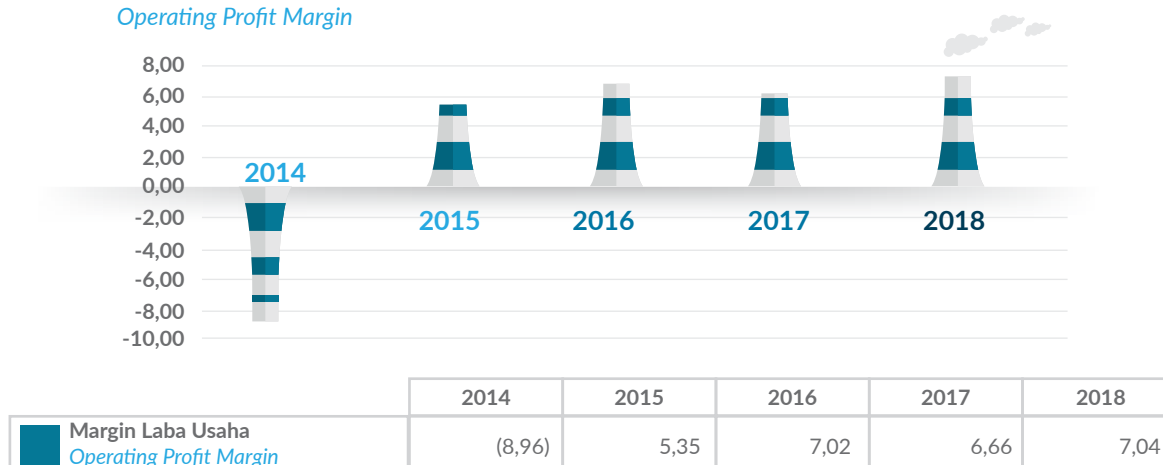
Margin laba usaha senilai 7,04% naik dari tahun 2017 senilai 6,66%. Kenaikan ini merupakan efisiensi dari beban usaha. Dimana terdapat perubahan struktur organisasi di bagian pemasaran yang semula di HO pindah ke divisi masing masing.

Operating Profit Margin

Operating profit margin was 7.04% increased from 2017 which was 6.66%. This increase was operating expenses efficiency. Where there was a change in the organizational structure in the marketing department which originally in HO moved to their respective divisions.

MARGIN LABA USAHA Operating Profit Margin

X Rp Juta | Million



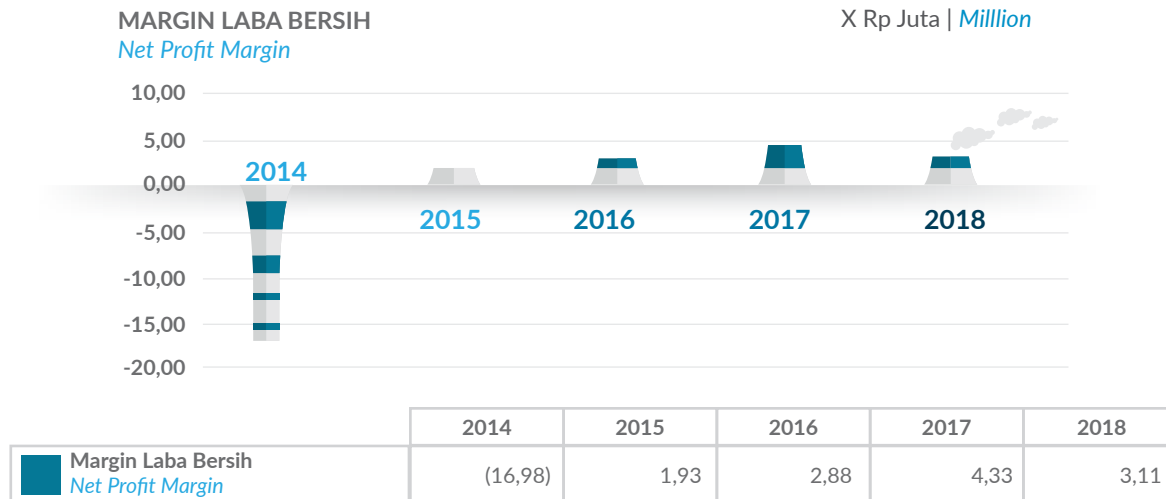
Grafik Margin Laba Usaha 2014-2018 (%) | Operating Profit Margin Graphic 2014-2018 (%)

MARGIN LABA BERSIH

Margin laba usaha senilai 3,11% menurun dari tahun 2017 senilai 4,33%. Penurunan margin laba bersih ini berkaitan dengan banyak pekerjaan konstruksi dan pekerjaan yang bersifat turn key sehingga margin laba berkurang.

Net Profit Margin

Operating profit margin of 3.11% decreased from 2017 valued at 4.33%. This decline was in addition to being in line with the decline in gross profit margin, This decrease in net-profit margin was related to a lot of construction work and turn key jobs thus profit margin was decreased.



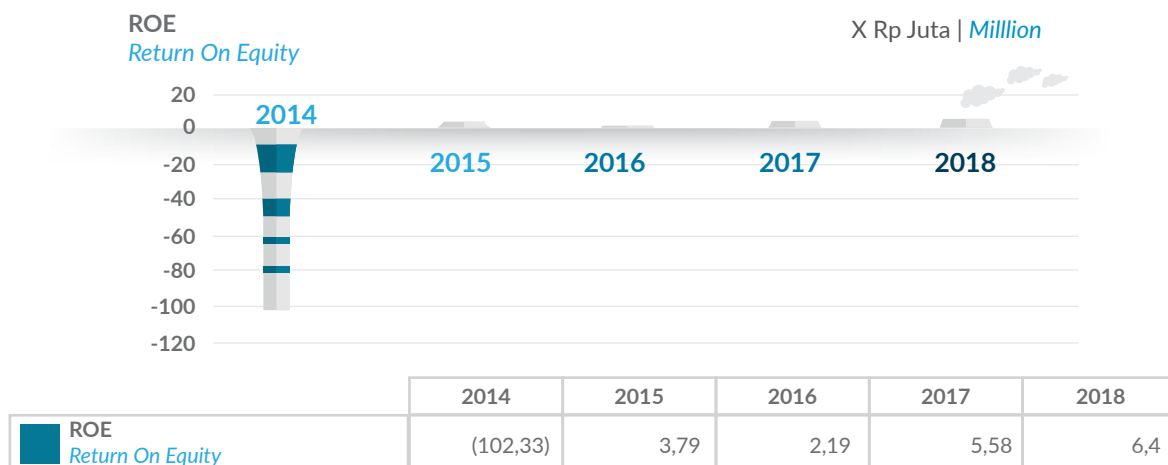
Grafik Margin Laba Bersih 2014-2018 (%) | *Net Profit Margin Graphic 2014-2018 (%)*

RETURN ON EQUITY

Merupakan besar penghasilan atau *income* yang tersedia bagi negara atas modal yang diinvestasikan di dalam perusahaan. ROE sebesar 6,40% meningkat jika dibandingkan dari tahun 2017 senilai 5,58%.

Return On Equity

Is the amount of income available to the state for the capital invested in the company. ROE of 6.40% increased compared to 2017 which was 5.58%.



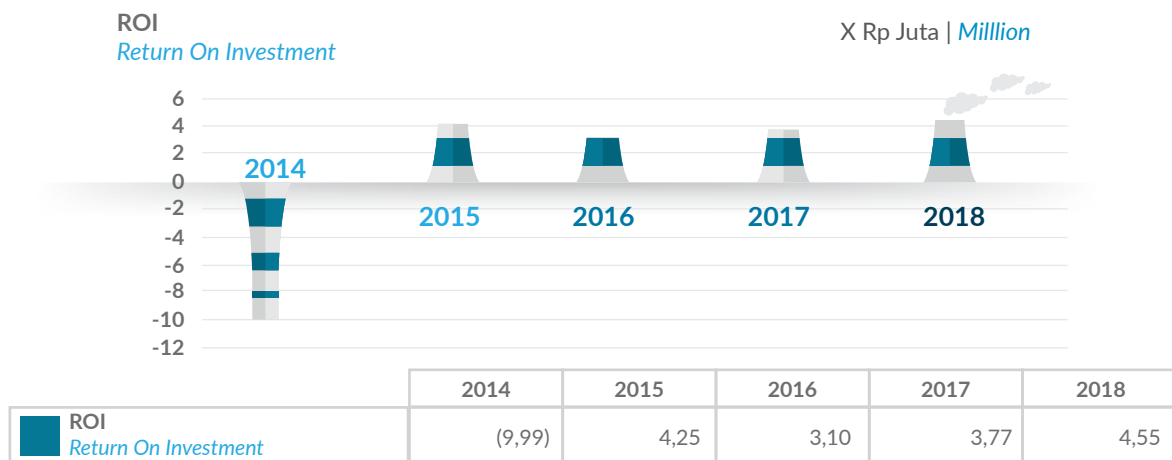
Grafik Return on Equity 2014-2018 (%) | *Return On Equity Graphic 2014-2018 (%)*

RETURN ON INVESTMENT

Merupakan besar penghasilan atau *income* yang tersedia bagi negara atas modal yang diinvestasikan di dalam perusahaan. ROE sebesar 4,55% meningkat jika dibandingkan dari tahun 2017 senilai 3,77%.

Return On Investment

Is the amount of income available to the state for the capital invested in the company. ROE of 4.55% increased when compared to 2017 which was 3.77%.



Grafik Return on Investment 2014-2018 (%) | Return On Investment Graphic 2014-2018 (%)

LIKUIDITAS

Likuiditas merupakan rasio yang mencerminkan tentang kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dalam jangka pendek. Tingkat likuiditas dapat dilihat dengan *cash ratio*, dan *current ratio*.

Liquidity

Liquidity is a ratio that reflects the ability to fulfill its liabilities, especially short term liabilities. The level of liquidity can be seen with cash ratio and current ratio.

CASH RATIO

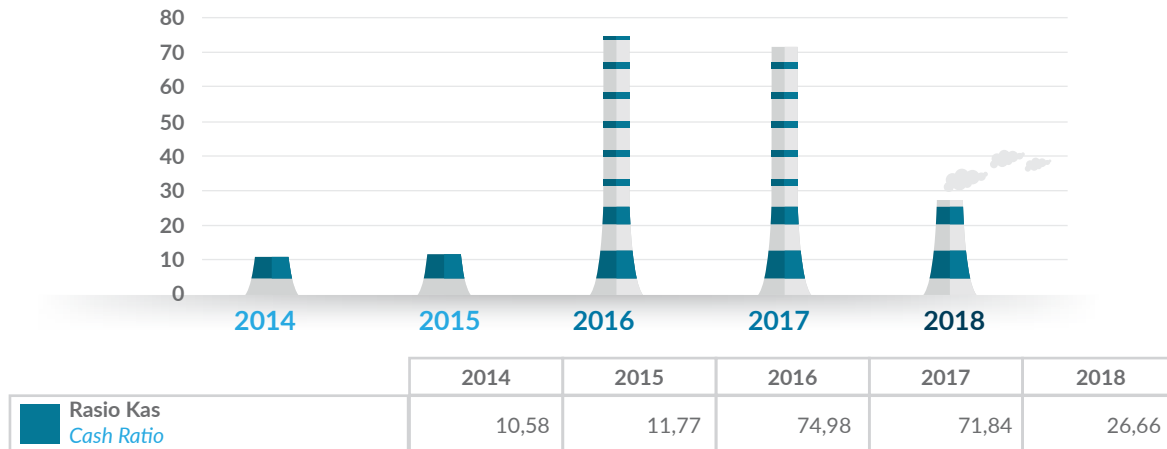
Merupakan kemampuan kas perusahaan untuk menutupi semua utang lancar atau liabilitas jangka pendek perusahaan. *Cash Ratio* sebesar 26,66% menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan surat berharga yang dimiliki menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 71,84%. Penurunan rasio kas ini berkaitan penggunaan dana Penanaman Modal Negara tahun 2016 untuk tujuan investasi aset dan peningkatan kewajiban jangka pendek untuk memenuhi keperluan proyek.

Cash Ratio

Is the Company's cash ability to cover all current loans or short-term liabilities of the Company. Cash Ratio amounted to 26.66% shows that the Company's ability to settle short-term liabilities using cash and securities owned decreased compared to 2017 which was 71.84%. The decrease in the cash ratio was related to the use of 2016 State Investment Funds for asset investment purposes and increased short-term liabilities to meet project needs.

RASIO KAS Cash Ratio

X Rp Juta | Million



Grafik Cash Ratio 2014-2018 (%) | Cash Ratio Graphic 2014-2018 (%)

RASIO LANCAR

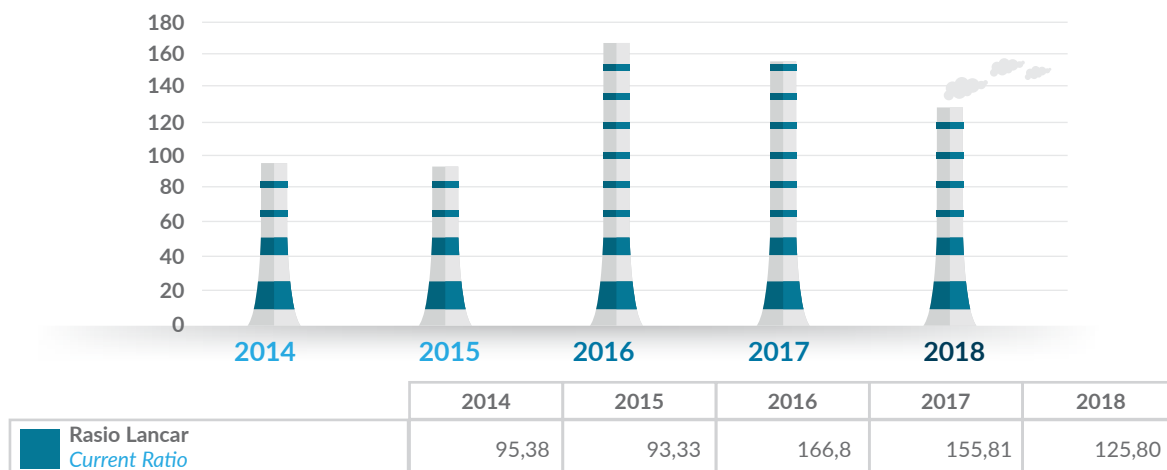
Merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. *Current Ratio* sebesar 125,80% menunjukkan bahwa perusahaan sangat mampu dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan seluruh aset lancar yang dimiliki. *Current Ratio* menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 155,81%. Penurunan *Current Ratio* disebabkan oleh secara besaran karena penurunan aset lancar dan kenaikan kewajiban jangka pendek.

Current Ratio

It is the company's ability to pay short-term obligations using current assets. The current ratio of 125.80% shows that the company is very capable of completing its short-term obligations by using all of its current assets. Current Ratio decreased compared to 2017 amounted to 155,81%. The decrease in the current ratio was caused by a large scale due to a decrease in current assets and an increase in short-term liabilities.

RASIO LANCAR Current Ratio

X Rp Juta | Million



Grafik Rasio Lancar 2014-2018 (%) | Current Ratio Graphic 2014-2018 (%)

SOLVABILITAS

Solvabilitas merupakan ukuran untuk menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang dimilikinya menggunakan seluruh aset atau modal perusahaan. Pengukuran solvabilitas menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) dan Debt to Assets Ratio (DAR).

Solvability

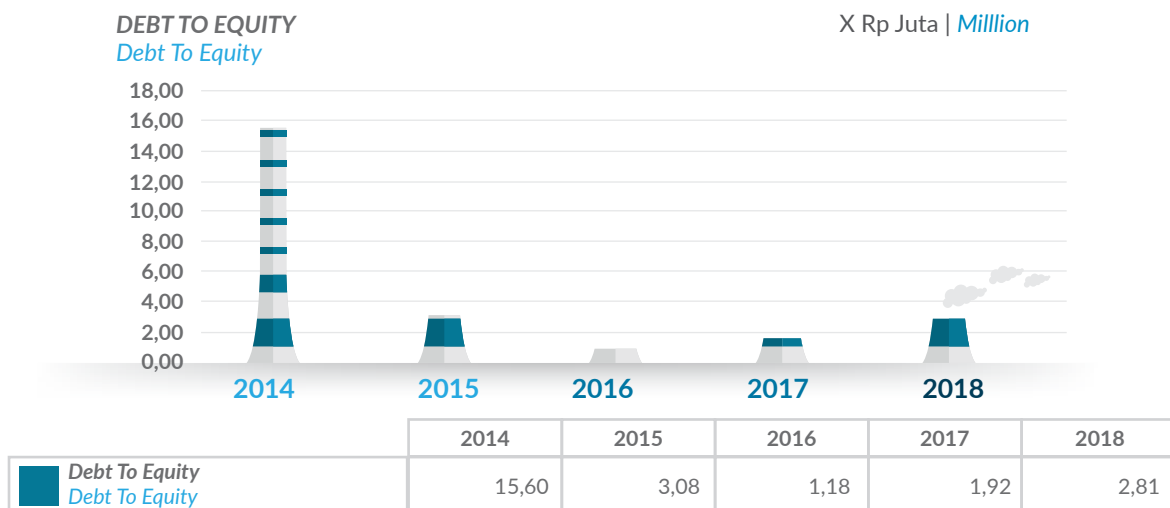
Solvability is a measure to assess a company's ability to pay off all its loans using all company assets or capital. Solvability measurement uses Debt to Equity Ratio (DER) and Debt to Assets Ratio (DAR).

DEBT TO EQUITY RATIO

Merupakan perbandingan antara utang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri, perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. DER sebesar 2,81 kali naik dari tahun 2017 yaitu sebesar 1,92.

Loan to Equity Ratio

Is a comparison between loans and equities in corporate funding and shows the ability of its own capital, the company to fulfill all its liabilities. DER is 2.81 times up from 2017, which is 1.92.



Grafik Debt To Equity Ratio 2014-2018 (%) | Loan to Equity Ratio Graphic 2014-2018 (%)

DEBT TO ASSET RATIO

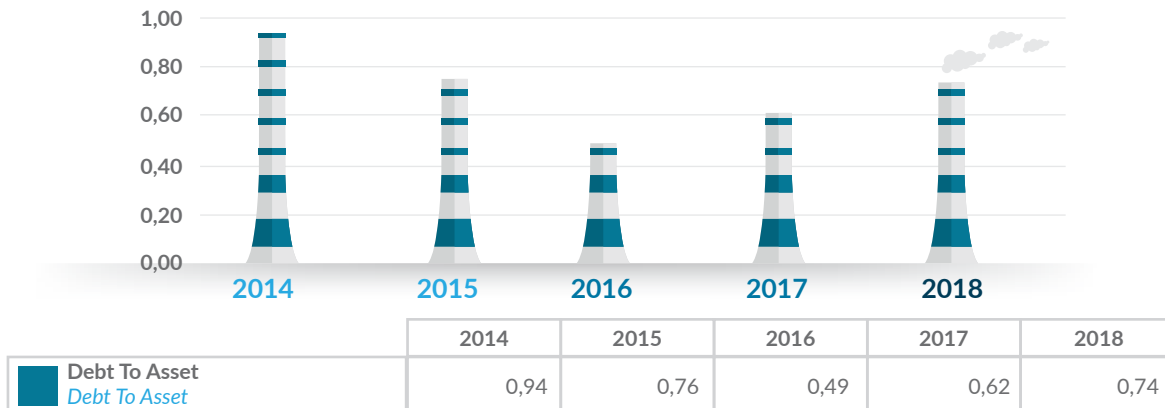
Merupakan perbandingan antara jumlah utang dan jumlah aset perusahaan. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh utang. DAR sebesar 0,74 naik dari tahun 2017 yaitu sebesar 0,66. Kenaikan ini dikarenakan peningkatan liabilitas dan penurunan total aset. Peningkatan liabilitas salah satunya disebabkan oleh penerbitan MTN, sedangkan penurunan aset disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas.

Debt to Asset Ratio

Is a comparison between the amount of debt and the the company's total assets. This ratio shows what part of the total assets spent on debt. DAR is 0.74 up from 2017, which was 0.66. This increase was due to an increase in liabilities and a decrease in total assets. One of the increase in liabilities was due to the issuance of MTN, while the decrease in assets was due to the decrease in cash and cash equivalents.

DEBT TO ASSET Debt To Asset

X Rp Juta | Million



Grafik Debt To Assets 2014-2018 (%) | Debt To Assets Graphic 2014-2018 (%)

TINGKAT PERPUTARAN

Tingkat perputaran atau rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia didalam perusahaan. Pengukuran rasio ini dapat menggunakan rasio perputaran persediaan (*Inventory Turn Over/ITO*) dan perputaran total aset (*Total Asset Turn Over/TATO*).

Turnover Rate

Turnover rate or activity ratio is a ratio that measures how effective a company is in utilizing available resources within the company. Measurement of this ratio can use Inventory Turn Over / ITO and total asset turnover (Total Asset Turn Over / TATO).

PERPUTARAN PERSEDIAAN

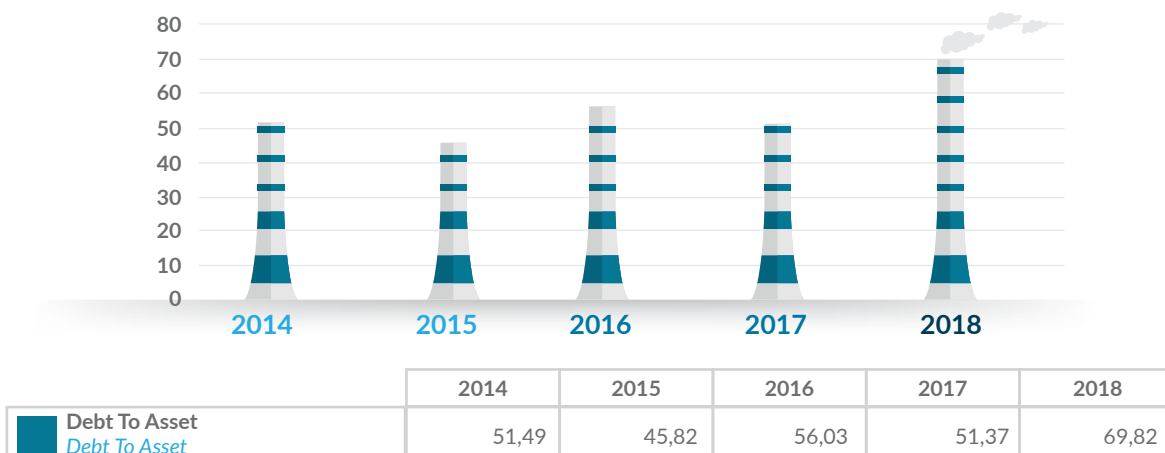
Menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam *inventory* atau persediaan berputar dalam suatu periode tertentu. ITO sebesar 69,82 hari meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 51,37 kali. Peningkatan ITO disebabkan oleh peningkatan *inventory* untuk pemenuhan kebutuhan material terutama untuk proyek-proyek.

Inventory Turnover

Shows ability of funds in inventory or spinning inventory in a given period. ITO of 69.82 days increased compared to 2017 which was 51.37 times. The increase in ITO is caused by an increase in inventory to meet material needs, especially for projects.

PERPUTARAN PERSEDIAAN Inventory Turnover

X Rp Juta | Million



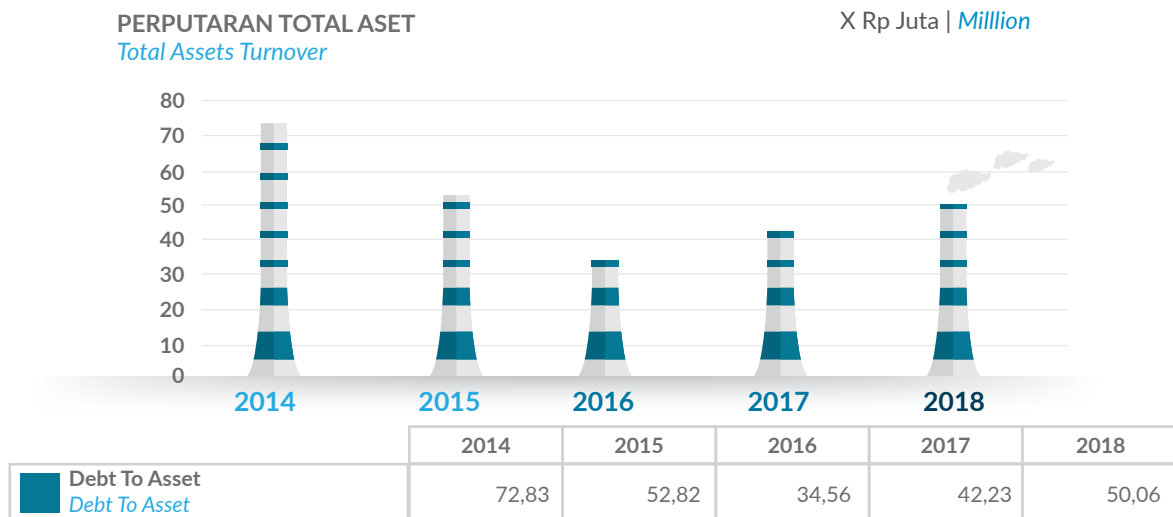
Grafik Perputaran Persediaan 2014-2018 (%) | Inventory Turnover Graphic 2014-2018 (%)

PERPUTARAN TOTAL ASET

Merupakan perbandingan antara penjualan dengan total aset suatu perusahaan dimana rasio ini menggambarkan kecepatan perputarannya total aktiva dalam satu periode tertentu. TATO 49,95 hari menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 42,23 hari. Peningkatan ini disebabkan peningkatan penjualan tidak sebanding dengan peningkatan total aset yang cukup signifikan di tahun 2018.

Total Assets Turnover

Is a comparison between the company's sales and total assets where this ratio describes turnover rate of total assets in a given period. TATO 49.95 days decreased compared to 2017 amounting to 42.23 days. This increase was due to an increase in sales which was not comparable with the significant increase in total assets in 2018.



Grafik Perputaran Total Aset 2014-2018 (%) | Total Assets Turnover Graphic 2014-2018 (%)

ANALISIS PENCAPAIAN 2018 TERHADAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN 2018

Analysis of 2018 Achievement of 2018 Corporate Work Plan and Budget

PENCAPAIAN ANGGARAN LAPORAN LABA (RUGI)

Profit Report Budget (Loss) Achievement

ANGGARAN PENDAPATAN

Realisasi pendapatan selama tahun 2018 sebesar Rp 2.232.895,53 juta atau 147,4% terhadap target tahun 2018 sebesar Rp 1.515.262,00 juta. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2017 sebesar Rp 1.225.589,75 juta, maka realisasi pendapatan di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 82,2%. Pendapatan tersebut meliputi pendapatan usaha (penjualan) sebesar Rp 2.176.895,53 juta dan pendapatan bunga serta jasa giro, selisih kurs, dll sebesar Rp 56.000,00 Juta.

Budget Revenue

Revenue realization in 2018 amounted to Rp 2,232,895.53 million or 147.4% of the 2018 target which was Rp 1,515,262.00 million. Compared to the realization of 2017 revenues which was Rp 1,225,589.75 million, the realization of revenues in 2018 increased by 82.2%. These revenues include operating income (sales) of Rp 2,176,895.53 million and interest income as well as demand deposits, foreign exchange differences, etc. of Rp 56,000.00 Million.

X Rp Juta | *Million*

NO.	URAIAN <i>Description</i>	TAHUN 2017 <i>(Audited)</i>	TAHUN 2018		% Real'18 (Audited) thd	
			RKAP	Real <i>(Audited)</i>	Real 2017 <i>(Audited)</i>	RKAP 2018
1.	Penjualan <i>Sales</i>	1.193.277,45	1.510.000,00	2.176.895,53	182,43	144,17
2.	Pendapatan Jasa Giro, selisih kurs, dll <i>Giro Service Revenues, foreign exchange differences, etc.</i>	32.312,30	5.262,00	56.000,00	173,31	1.064,23
3.	Revaluasi aset tetap <i>Revaluation of fixed assets</i>	-	-	-	-	-
TOTAL		1.225.589,75	1.515.262,00	2.232.895,53	182,19	147,36

Tb. Perbandingan Pendapatan Tahun 2014-2018 (Rp Juta) | *Budget Revenue Table 2014-2018 (Rp Million)*

ANGGARAN BEBAN

Jumlah beban yang dikeluarkan Perusahaan selama tahun 2018 sebesar Rp 2.165.045,81 juta atau 149,0% terhadap target RKAP tahun 2018 sebesar Rp 1.453.173,00 juta. Dari jumlah beban tersebut sebesar 91,3% atau Rp 1.976.461,60 juta merupakan beban pokok penjualan dan 3,7% atau Rp 80.118,09 juta merupakan beban pajak dan sisanya adalah beban usaha, beban lain-lain dan beban bunga.

Realisasi beban yang dikeluarkan selama tahun 2018 sebagai berikut :

Expense Budget

The total expenses incurred by the Company in 2018 amounted to Rp 2,165,045,81 million or 149.0% of RKAP target in 2018 amounted to Rp 1,453,173.00 million. From the total expenses amounted to 91.3% or Rp 1,976,461.60 million, Sold good expenses and 3.7% or Rp80,118.09 million represent tax expense and the remainder is operating expenses, other expenses and interest expenses.

Realized expenses during 2018 are as follows:

X Rp Juta | *Million*

NO.	URAIAN <i>Description</i>	TAHUN 2017 <i>(Audited)</i>	TAHUN 2018		% Real'18 (Audited) thd	
			RKAP	Real <i>(Audited)</i>	Real 2017 <i>(Audited)</i>	RKAP 2018
1.	Beban Pokok Penjualan <i>Sold Goods Expenses</i>	1.073.232,70	1.309.733,00	1.976.461,60	184,16	150,91
2.	Beban Usaha <i>Operating expenses</i>	40.523,16	50.321,00	47.236,96	116,57	93,87
3.	Beban Lain-lain <i>Other expenses</i>	15.340,82	10.495,00	18.571,49	121,06	176,96
4.	Beban Bunga <i>Interest expense</i>	27.015,48	39.182,00	42.657,67	157,90	108,87
5.	Beban Pajak <i>Tax Expenses</i>	17.862,57	43.442,00	80.118,09	448,53	184,43
TOTAL		1.173.974,73	1.453.173,00	2.165.045,81	184,42	148,99

Tb. Perbandingan Beban Tahun 2014-2018 (Rp Juta) | *Expense Budget Table 2014-2018 (Rp Million)*

ANGGARAN LABA BERSIH

Dari realisasi penjualan dan beban pokok penjualan tahun 2018 Perusahaan memperoleh laba kotor sebesar Rp 200.433,94 Juta atau 100,1% terhadap target RKAP tahun 2018 sebesar Rp 200.267,00 Juta dan 9,2% terhadap realisasi penjualan tahun 2018. Beban usaha yang telah dikeluarkan sebesar Rp 47.236,96 Juta, maka perusahaan mendapatkan laba usaha sebesar Rp 153.196,98 Juta. Laba usaha tersebut setelah diperhitungkan dengan beban lain-lain sebesar Rp 5.272,23 juta dan beban pajak sebesar Rp 80.118,09 Juta, maka laba bersih Perusahaan tahun 2018 sebesar Rp 67.806,66 Juta, naik 31,3% bila dibandingkan dengan realisasi laba bersih pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp 51.615,02 Juta.

Net Profit Budget

From the sales realization and cost of goods sold in 2018, the Company obtained a gross profit of Rp 200,433.94 Million or 100.1% of the target of the RKAP in 2018 of Rp 200,267.00 Million and 9.2% of the realization of sales in 2018. Operating expenses which has been issued in the amount of Rp 47,236.96 Million, the company gets an operating profit of Rp 153,196.98 Million. The operating profit after being calculated with other expenses amounting to Rp 5,272.23 million and tax expense of Rp 80,118.09 million, the Company's Revenue in 2018 amounted to Rp 67,806.66 million, up 31.3% compared to Realization of Revenue in the same period of 2017 which was Rp 51,615.02 Million.

PENCAPAIAN ANGGARAN LAPORAN POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan tahun 2018 ditutup pada posisi aset sebesar Rp 4.547.361,79 Juta atau 171,3% dari RKAP 2018 sebesar Rp 2.654.948,00 Juta dan posisi ekuitas sebesar Rp 1.195.025,22 juta. Posisi keuangan pada akhir tahun 2018 sebagai berikut :

Achievement of the Financial Position Report Budget

Financial position of 2018 was closed at Rp 4,547,361.79 million or 171.3% of the 2018 RKAP of Rp 2,654,948.00 million and the equity position of Rp 1,195,025.22 million. The financial position at the end of 2018 is as follows:

X Rp Juta | Million

No.	URAIAN	TAHUN 2018		Description	No.
		RKAP 1 TH	Real Posisi 31 Des'18 (Audited)		
ASET					ASSET
1.	ASET LANCAR			Current Asset	1.
	Kas & Setara Kas	315.139,00	757.289,80	Cash & Cash Equivalents	
	Piutang usaha setelah dikurangi penyisihan piutang ragu			Trade Accounts Receivable Are Reduced By Doubtful Accounts	
	- Pihak Berelasi	203.087,00	171.504,22	- Related Parties	
	- Pihak ketiga	117.297,00	140.743,54	- Third Party	
	Piutang Retensi setelah dikurangi penysh piutang ragu			Standard Retention Receivables Reduced By Doubtful Accounts	
	- Pihak Berelasi	70.591,00	58.236,67	- Related Parties	
	- Pihak ketiga	8.025,00	6.442,96	- Third Party	
	Tagihan Bruto pada pemberi kerja			Gross Claim On The Employer	
	- Pihak Berelasi	279.951,00	322.277,60	- Related Parties	
	- Pihak ketiga	130.813,00	1.479.306,49	- Third Party	
	Piutang Lain-lain	658,00	1.430,24	Other Receivables	
	Persediaan	191.156,00	416.389,99	Stock	
	Uang Muka	48.865,00	186.691,14	Down Payment	
	Pajak dibayar dimuka	6.613,00	33.497,52	Prepaid Taxes	
	Biaya dibayar dimuka	2.163,00	87,29	Prepaid Expenses	
	JUMLAH ASET LANCAR	1.374.358,00	3.573.897,46	Total Current Assets	

X Rp Juta | *Million*

No.	URAIAN	TAHUN 2018		Description	No.
		RKAP 1 TH	Real Posisi 31 Des'18 (Audited)		
2.	ASET TIDAK LANCAR			Non-Current Assets	2.
	Aset keuangan lainnya Penyertaan	100,00	99,72	Other Financial Assets	
	Properti Investasi	710,00	709,81	Investment Property	
	Aset tetap (stlh dikurangi akum penyusutan)	1.257.270,00	924.877,29	Fixed Assets (After Deducting Accumulated Depreciation)	
	Aset Tetap Tax Amnesty	3.220,00	3.220,88	Tax Amnesty's Fixed Assets	
	Aset tidak berwujud (stlh dikurangi akum amortisasi)	2.180,00	8.497,12	Intangible Assets (After Deducting Amortization Fees)	
	Investasi pada ventura bersama (KSO)	3.250,00	16.722,37	Investment In Joint Ventures (Kso)	
	Aset Pajak Tangguhan	-	15.941,66	Deferred Tax Assets	
	Aset Lain-lain	13.860,00	3.395,47	Other Assets	
	JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	1.280.590,00	973.464,33	Total Non-Current Assets	
	JUMLAH ASET	2.654.948,00	4.547.361,79	Total Assets	

X Rp Juta | *Million*

No.	URAIAN	TAHUN 2018		Description	No.
		RKAP 1 TH	Real Posisi 31 Des'18 (Audited)		
	LIABILITAS DAN EKUITAS			Liabilities And Equities	
1.	LIABILITAS JANGKA PENDEK			Short-Term Liabilities	1.
	Pinjaman Jangka Pendek	120.157,00	404.721,21	Short-term loan	
	Utang Usaha :			Accounts payable :	
	- Pihak Berelasi	15.891,00	75.370,12	- Related Parties	
	- Pihak ketiga	505.835,00	524.470,90	- Third party	
	Utang Pajak	39.260,00	138.395,46	Tax payable	
	Uang muka dari pelanggan :			Advances from customers:	
	- Pihak Berelasi	15.841,00	244.293,46	- Related Parties	
	- Pihak ketiga	15.310,00	887.019,83	- Third party	
	Biaya yang masih harus dibayar	261.293,00	566.740,62	Accrued cost	
	Utang sewa pembiayaan (liabilitas jk pjg yg jatuh tempo 1 th)	-	32,04	financing lease loan (liability due to maturity of 1 year)	
	JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	973.587,00	2.841.043,64	Total Of Short-Term Liabilities	
2.	LIABILITAS JANGKA PANJANG			Long-Term Liabilities	2.
	Utang bank kredit investasi	40.000,00	-	Investment credit bank loans	
	Utang jangka menengah	300.048,00	300.000,00	Medium-term loans	
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	38.511,37	Other Long-Term loans	
	Utang rekening dana investasi	80.363,00	80.363,44	fund investment account loans	
	Liabilitas imbalan paska kerja	103.265,00	92.418,12	Post-employment benefit obligation	
	Utang sewa pembiayaan (liabilitas jk panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun)	106.072,00	-	finance lease loan (long term liability after deducting part due in one year)	
	JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	629.748,00	511.292,93	Total Of Long-Term Liabilities	

X Rp Juta | *Million*

No.	URAIAN	TAHUN 2018		Description	No.
		RKAP 1 TH	Real Posisi 31 Des'18 (Audited)		
3.	EKUITAS			Equity	3.
	Modal saham (Modal Dasar 3.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham, modal ditempatkan dan disetor 762.915 saham)	762.915,00	762.915,00	Share capital (authorized capital of 3,000,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share, issued and paid-up capital of 762,915 shares)	
	Tambahan modal disetor	3.221,00	3.221,27	Additional paid-in capital	
	Selisih Penilaian kembali aset tetap	396.593,00	528.790,53	Difference Revaluation of fixed assets	
	Pengukuran kembali imbalan paska kerja	(46.320,00)	(48.416,47)	Re-measurement of post-employment benefits	
	Cadangan	-	-	Reserve	
	Modal Disetor Lainnya	-	-	Other Paid Up Capital	
	Saldo Laba (Rugi)	(64.796,00)	(51.485,11)	Profit Balance (Loss)	
	JUMLAH EKUITAS	1.051.613,00	1.195.025,22	Total Of Equities	
	JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS	2.654.948,00	4.547.361,79	Amount Of Liabilities & Equities	

PENCAPAIAN ANGGARAN LAPORAN ARUS KAS

Penerimaan kas dari pelanggan selama tahun 2018 sebesar Rp 2.020.787,49 juta, sedangkan pengeluaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp 1.881.243,07 juta. Disamping itu terdapat penerimaan dan pengeluaran pajak serta pengeluaran operasional lainnya, sehingga saldo kas operasional sebesar Rp 30.047,61 Juta. Kas bersih aktivitas investasi sebesar Rp (148.081.73) juta dan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp (131.320,68) juta, maka terjadi penurunan kas dan setara kas sebesar Rp (249.354,81) juta. Saldo awal kas tahun 2018 sebesar Rp 1.006.644,60 juta sehingga saldo akhir pada tahun 2018 menjadi Rp 757.289,80 Juta.

Posisi Arus Kas tahun 2018 (31 Desember 2018) sebagai berikut:

Cash Flow Budget Statement Achievement

Cash receipts from customers during 2018 amounted to Rp 2,020,787.49 million, while cash expenditures to suppliers and employees amounted to Rp 1,881,243.07 million. Also there are tax revenues and expenditures as well as other operational expenses, so that the operating cash balance was Rp 30,047.61 Million. Net cash from investment activities amounted to Rp (148,081.73) million and net cash flows from funding activities amounted to Rp (131,320.68 million), a decrease in cash and cash equivalents of Rp (249,354.81) million. The initial balance of cash in 2018 was Rp 1,006,644.60 million so that the final balance in 2018 became Rp 757,289.80 Million.

Position of Cash Flow in 2018 (31 December 2018) as follows:

X Rp Juta | *Million*

No.	URAIAN	Real Posisi 31 Des'17 (Audited)	TAHUN 2018		Description	No.
			RKAP 1 TH	Real Posisi 31 Des'18 (Audited)		
ASET						ASSET
I.	ASET LANCAR				Current Asset	I.
	Kas & Setara Kas	1.006.644,60	315.139,00	757.289,80	Cash & Cash Equivalents	
	Piutang usaha setelah dikurangi penyisihan piutang ragu				Trade accounts receivable are reduced by doubtful accounts	
	- Pihak Berelasi	162.192,95	203.087,00	171.504,22	- Related Parties	
	- Pihak ketiga	96.811,55	117.297,00	140.743,54	- Third party	
	Piutang Retensi setelah dikurangi penysh piutang ragu				Standard retention receivables reduced by doubtful accounts	
	- Pihak Berelasi	59.351,09	70.591,00	58.236,67	- Related Parties	
	- Pihak ketiga	6.747,39	8.025,00	6.442,96	- Third party	
	Tagihan Bruto pada pemberi kerja				Gross Claim on the employer	
	- Pihak Berelasi	418.050,42	279.951,00	322.277,60	- Related Parties	
	- Pihak ketiga	196.429,57	130.813,00	1.479.306,49	- Third party	
	Piutang Lain-lain	602,95	658,00	1.430,24	Other receivables	
	Persediaan	167.935,17	191.156,00	416.389,99	Stock	
	Uang Muka	63.967,05	48.865,00	186.691,14	Down payment	
	Pajak dibayar dimuka	248,20	6.613,00	33.497,52	prepaid taxes	
	Biaya dibayar dimuka	4.490,76	2.163,00	87,29	Prepaid expenses	
	JUMLAH ASET LANCAR	2.183.471,71	1.374.358,00	3.573.897,46	Total CURRENT ASSETS	
II.	ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS	II.
	Aset keuangan lainnya Penyertaan	99,72	100,00	99,72	Other financial assets	
	Properti Investasi	726,23	710,00	709,81	Investment Property	
	Aset tetap (stlh dikurangi akumul penyusutan)	722.000,35	1.257.270,00	924.877,29	Fixed assets (after deducting accumulated depreciation)	
	Aset Tetap Tax Amnesty	3.220,88	3.220,00	3.220,88	Tax Amnesty's Fixed Assets	
	Aset tidak berwujud (stlh dikurangi akumul amortisasi)	2.297,58	2.180,00	8.497,12	Intangible assets (after deducting amortization fees)	
	Investasi pada ventura bersama (KSO)	3.250,00	3.250,00	16.722,37	Investment in joint ventures (KSO)	
	Aset Pajak Tangguhan	34.057,99	-	15.941,66	Deferred tax assets	
	Aset Lain-lain	4.180,41	13.860,00	3.395,47	Other Assets	
	JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	769.833,17	1.280.590,00	973.464,33	Total Non-Current Assets	
	JUMLAH ASET	2.953.304,88	2.654.948,00	4.547.361,79	Total Assets	

Catatan : Modal dasar 3.000.000 saham, nilai nominal Rp1.000.000,- per saham

Note: authorized capital of 3,000,000 shares, nominal value of Rp1,000,000 per share

PERBANDINGAN REALISASI 2017 DAN 2018

Comparison of 2017 and 2018 Realization

X Rp Juta | *Million*

No.	URAIAN	Real Posisi 31 Des'17 (Audited)	TAHUN 2018		Description	No.
			RKAP 1 TH	Real Posisi 31 Des'18 (Audited)		
I	KAS & SETARA KAS AWAL PERIODE	607.020,1	680.000,0	1.006.644,6	Cash & Cash Equivalents in the beginning of Period	I
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				Cash Flows From Operating Activities	II
	- Penerimaan Kas dari pelanggan	710.930,6	1.451.143,0	2.026.393,0	- Cash receipts from customers	
	- Pembayaran Kas kepada Pemasok, Pegawai, Beban Usaha Lainnya	(489.345,2)	(1.295.416,0)	(1.881.243,1)	- Cash Payments to Suppliers, Employees, Other Operating Expenses	
	Kas yang Dihasilkan dari Operasi	221.585,4	155.727,0	145.150,0	Cash generated from operations	
	- Penerimaan Pajak	10,9	130.014,3	5,6	- Tax revenue	
	- Pengeluaran Pajak	(2.430,6)	(166.000,0)	(136.764,7)	- Tax Expenditures	
	- Pengeluaran lain-lain dan pesangan purna bakti	(15.085,5)	(24.037,9)	(4.945,3)	- Other expenses and post-service disbursements	
	- Penerimaan Lain-lain (jasa Giro, Dll)	25.314,6	5.262,3	26.602,1	- Other receipts (Giro services, etc.)	
	- Pengeluaran untuk PKBL	-	-	-	- Expenditures for PKBL	
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	229.394,9	100.965,7	30.047,6	Clean Cash Flows From Operating Activities	
III	ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI				Cash Flows For Investment Activities	III
	- Penerimaan dari penjualan Aset tetap	263,5	-	577,2	- Receipts from the sale of fixed assets	
	- Pengeluaran Rehab/Investasi (rutin)	(19.898,5)	(44.085,0)	(2.007,7)	- Rehab / Investment Expenditures (routine)	
	- Pengeluaran Investasi PMN	-	(400.000,0)	(146.651,2)	- PMN Investment Expenditures	
	ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	(19.635,0)	(444.085,0)	(148.081,7)	Cash Flows For Investment Activities	
IV	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				Cash Flows From Funding Activities	IV
	Pengeluaran :				Expenditures:	
	- Angsuran Pinjaman	(285.566,8)	(252.841,5)	(874.415,6)	- Loan installments	
	- Pembayaran Utang RDI	(2.500,0)	(4.000,0)	(4.000,0)	- RDI Debt Payments	
		(288.066,8)	(256.841,5)	(878.415,6)		
	Penerimaan :				Receipts:	
	- Penerimaan Pinjaman	477.931,5	235.303,9	747.094,9	- Loan receipts	
		477.931,5	235.303,9	747.094,9		
	ARUS KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN UNTUK PENDANAAN	189.864,7	(21.537,6)	(131.320,7)	Net Cash Flows Used For Funding	
	KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	399.624,5	(364.656,9)	(249.354,8)	Increase (Decrease) Clean Cash And Cash Equivalents	
V	KAS & SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	1.006.644,6	315.343,1	757.289,8	Cash & Cash Equivalents In The End Of Period	V

ASPEK PEMASARAN *Marketing Aspect*

Usaha jasa konstruksi merupakan usaha yang mempunyai karakteristik tertentu dan unik, dimana memiliki batasan-batasan (*constrain*) yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Waktu berkaitan dengan periode pelaksanaan proyek,
2. Biaya berhubungan dengan anggaran proyek,
3. Mutu berkaitan dengan spesifikasi, serta
4. Keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja dan masyarakat di sekitar proyek.
5. Melibatkan banyak pihak yang memiliki disiplin ilmu yang beragam, pekerja terampil maupun pekerja yang tanpa keterampilan (*non skill*).

Tren pertumbuhan pasar konstruksi nasional terus meningkat dari tahun ke tahun seiring tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Seperti halnya pada industri lain, pasar jasa konstruksi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh daya beli dari masyarakat dan pemerintah. PT Barata Indonesia (Persero) masuk jenis bisnis Konstruksi khusus yang merupakan pekerjaan jasa konstruksi berupa bangunan pabrik maupun manufaktur komponen Industri termasuk di dalamnya *project EPCC* seperti konstruksi pabrik gula untuk pengolahan tebu menjadi gula, konstruksi tangki di Terminal Bahan Bakar Minyak, Konstruksi Sumber Daya Air, dan Pembangkit.

Masalah Bisnis Pada periode 2018 pengusaha konstruksi masih menganggap cukup bermasalah dalam menjalankan bisnisnya dibanding triwulan-triwulan awal, yang ditunjukkan dengan Indeks Umum masalah bisnis yang nilainya sebesar 27,91 pada triwulan IV tahun 2017 dan 22,66 pada triwulan IV tahun 2018. Ada tiga masalah utama yang dihadapi oleh para pengusaha yaitu tidak stabilnya harga bahan bangunan, penurunan permintaan, dan tingkat persaingan yang tinggi. Harga bahan bangunan sangat menentukan kontrak pekerjaan. Bila harga bahan bangunan tidak stabil akan merugikan kontraktor karena rentang waktu antara kontrak dan pelaksanaan berbeda. Fluktuasi nilai indeks kondisi bisnis, prospek bisnis dan masalah bisnis ditunjukkan pada Gambar 4. Hubungan Kondisi, Prospek dan Masalah Bisnis pada triwulan IV tahun 2018 ini menunjukkan angka indeks yang cukup signifikan, dimana kondisi bisnis 54,54 (>50), prospek bisnis 54,88 (>50) dan diikuti masalah bisnis 22,66 (<50%). Hubungan ini membuat pelaku pengusaha atau pengembangan jasa konstruksi optimis kondisi terus membaik di tahun mendatang.

Seiring dengan meningkatnya industri konstruksi nasional, PT Barata Indonesia (Persero) berupaya untuk meningkatkan pangsa pasarnya dengan mengambil peluang bisnis dan pasar melalui optimalisasi sumber daya

Construction services business is a business that has certain and unique characteristics, which have constraints that must be met, namely:

1. *Time, related to project implementation period,*
2. *Costs, related to the project budget,*
3. *Quality, related to specifications, as well as*
4. *Occupational health and safety for workers and the community around the project.*
5. *Involve many parties who have diverse disciplines, skilled and non-skilled workers.*

National construction market growth trend continues to increase from year to year in line with the high demand for infrastructure development in Indonesia. As in other industries, construction services market in Indonesia is strongly influenced by people and government purchasing power. PT Barata Indonesia (Persero) classified as special type of construction business specialized in construction service of factory buildings and industrial component manufacturing including EPCC projects such as sugar mill construction for sugar cane processing into sugar, tank construction at Oil Fuel Terminal, Construction of Water Resources, and Power plants.

In 2018, construction entrepreneurs considered several business Issues causing quite problematic in conducting its business compared to the initial quarters, as indicated by General Index of business problems value was 27.91 in the fourth quarter of 2017 and 22.66 in the fourth quarter of 2018. There were three main problems faced by entrepreneurs, unstable prices of building materials, decreased demand, and high levels of competition. Price of building materials will determine the work contract. If the price of building materials are unstable, contractors will be harmed because the time span between the contract and implementation is different. Fluctuations of the business conditions index score, business prospects and business problems are shown in Figure 4. Linkage between Conditions, Prospects and Business Problems in the fourth quarter of 2018 shows a significant index number, where business conditions was 54.54 (> 50), business prospects was 54.88 (> 50) and followed by business problems was 22.66 (<50%). This linkage makes construction services entrepreneurs or development optimistic that conditions will continue to improve in the coming year.

Along with the increasing national construction industry, PT Barata Indonesia (Persero) seeks to increase its market share by taking business and market opportunities through the optimization its own resources.

yang dimiliki oleh PT Barata Indonesia (Persero).

Untuk dapat mengejar dan mendapatkan peluang bisnis dan pasar, Perseroan memperhatikan elemen-elemen yang harus dicapai dan merupakan target perbaikan diantaranya :

1. Efisiensi dalam produksi, harus mampu memproduksi dengan efisiensi tinggi.
2. Efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya sehingga harga yang dikenakan kepada pembeli bisa rendah sesuai dengan rendahnya biaya produksi termasuk keuntungan yang normal bagi produsen.
3. *Upgrade* sumber daya dalam rangka mengikuti perkembangan bisnis terkini
4. Perkuatan network marketer, baik ke sesama BUMN maupun dengan kalangan swasta dan para *technology provider*.
5. Kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga dapat diperoleh biaya produksi yang rendah dan teknik distribusi yang lebih tepat.
6. Kinerja berupa mutu, harga dan *delivery* yang sesuai dan bisa memenuhi kebutuhan konsumen (masyarakat)

PT Barata Indonesia (persero) telah memulai proses transformasi dalam upaya meningkatkan kemampuannya, baik dalam skala efisiensi maupun peningkatan kemampuan untuk mengadopsi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pergerakan kinerja positif lini produksi dan lini supporting lainnya sudah menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Peningkatan laba perusahaan makin nyata sehingga meningkatkan peringkat perusahaan dalam mengikuti Tender skala besar.

Pada proses perubahan yang telah dilakukan, dampak positif repons pasar terhadap perusahaan sangatlah besar. PT Barata Indonesia (persero) dipercaya mengikuti tender tender besar dan disejajarkan dengan perusahaan perusahaan konstruksi yang telah go publik. Peluang pasar sdh terbuka lebar sumber daya perusahaan sudah semakin lengkap dan kuat, kinerja Pemasaran untuk meraih *order order* besar telah dibuktikan dengan banyaknya tender yang diikuti dan dimenangkan. Hal ini dapat dilihat pada tingkat pertumbuhan perolehan *order* (Pesma) tahun 2018 sebesar Rp 3,65 Triliun atau 111% terhadap perolehan tahun 2017).

Peningkatan yang cukup signifikan tersebut berasal dari perolehan 4 Divisional profit centre yaitu Divisi Industri Gula & Agro, Divisi Oil & Gas, Divisi Pembangkit dan Divisi Sumber Daya Air.

To be able to pursue and obtain business and market opportunities, the Company pays attention to the elements that shall be achieved and is a target of improvement including:

1. *Efficiency in production, shall be able to produce with high efficiency.*
2. *Efficiency in allocating resources so that the prices charged to buyers can be lower in accordance with the low cost of production, including normal profits for producers.*
3. *Upgrading resources to keep up with the latest business developments*
4. *Strengthening network marketers, both to SOEs and private sectors and technology providers.*
5. *The ability to take advantage of technological advances, so that low production costs and more appropriate distribution techniques can be obtained.*
6. *Performance, excellent quality, appropriate price and delivery that can meet consumers (the community) need*

PT Barata Indonesia (Persero) has begun the transformation process in an effort to improve its capabilities, both in efficiency and capacity building to adopt increasingly rapid technological developments. The positive performance movement of the production line and other supporting lines has shown a high level of efficiency. Increased the Company's significantly, thus increasing the company ranking in participating in large-scale tenders.

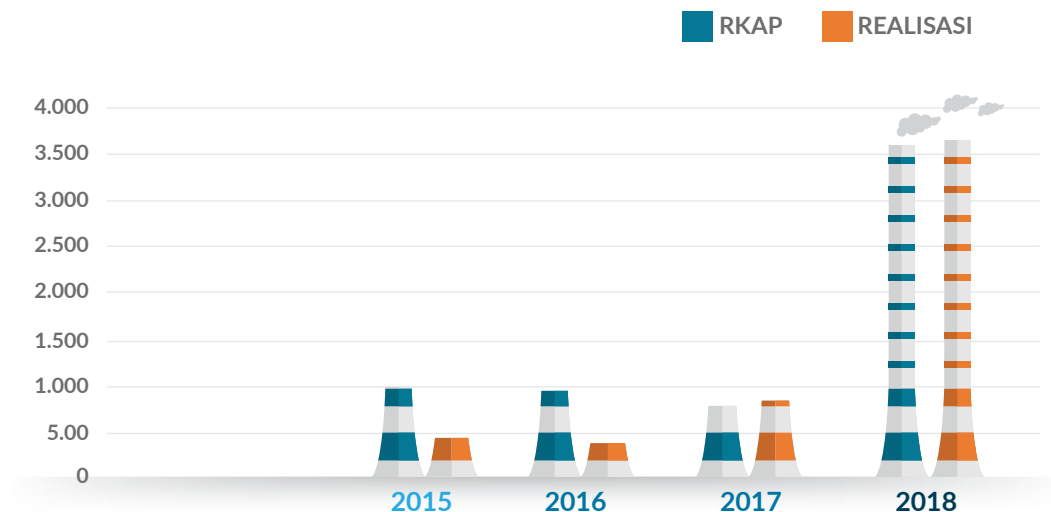
In the process of change that has been made, the positive impact of market response to the company was significant. PT Barata Indonesia (Persero) is trusted to participate in large tenders and equal with go public construction companies. Market opportunity is wide open, the Company's resources are getting more complete and stronger, marketing performance in achieving large orders has been proven by the number of participated and won tenders. This can be seen in the growth of order acquisition (Pesma) rate in 2018 which was Rp 3.65 Trillion or 111% of the acquisition in 2017).

The significant increase came from the achievement of 4 Divisional profit centers, Sugar & Agro Industry, the Oil & Gas, Power Plant and Water Resources Division.

Apabila diperhatikan, perolehan kontrak baru semakin meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana grafik berikut ini :

When noted, the acquisition of new contracts is increasing from year to year, as the following graphic :

KONTRAK BARU RKAP VS CAPAIAN (Rp Juta)
New Contract RKAP Vs Achievements (In Million Rupiah)



Dari grafik tampak bahwa tren perolehan kontrak baru semakin meningkat dari tahun ketahun, terutama pada tahun 2018. Perubahan Struktur Organisasi Divisional yang mengacu pada penguasaan jenis produk ternyata sangat berpengaruh positif kepada pola kerja para marketer dan secara otomatis memacu pencapaian tinggi d masing-masing Divisi.

From the graphic above it showed that new contracts obtainment trend is increasing from year to year, especially in 2018. Changes in Divisions Organizational Structure which refers to products type mastery turns out bring very positive influence on marketing work patterns thus automatically encouraging high achievements in each Division.

Dari dua strategi tersebut bisa digambarkan perolahan kualitatif sebagai berikut:

1. Penetrasi pasar berbasis produk & service
2. Penguatan kemitraan strategis baik dengan sesama BUMN maupun dengan pihak swasta.

From the two strategies can be described qualitative achievements as follows:

1. Market penetration based on products & services
2. Strengthening strategic partnerships both with fellow SOEs and with private parties.

Adapun sebagai hasil dari strategi tersebut, selain hasil kontrtrak baru yang bersifat kuantitatif, juga terdapat produk-produk pengembangan di antaranya:

As for the results of this strategy, in addition to new quantitative contract, there were also development products including:

1. Sinergi BUMN & Luar Negeri :
 - Crane pelabuhan
 - Komponen Turbin &
 - Pabrik Boiler
 - Pabrik Garam
 - Pabrik Gula
 - Traktor

1. SOEs & Overseas Synergy:
 - Harbor crane
 - Turbine Components &
 - Boiler factory
 - Salt factory
 - Sugar factory
 - Tractor

2. Penerapan Lokal Konten:
 - *Balance of Plant* Pembangkit Tenaga Listrik dan Pabrik Gula.
3. Pengembangan bisnis & produk :
 - Mesin pemanen Kelapa Sawit di lahan gambut, Fastrex
 - Mesin pellet beras analog, *Extruder*
 - *Mobile Power Plant* dengan Siemens
 - *Gas Engine* berbahan baku CPO 100%.

Hal besar yang dilakukan Perseroan pada tahun 2018 yang secara berhasil langsung mengangkat aspek pasar adalah aksi korporasi akuisisi pabrik komponen turbin milik Siemens yang berlokasi di Cllegon. Efek yang ditimbulkan adalah menguatnya kompetensi di sector Pembangkit Tenaga Listrik dimana pabrik baru hasil akuisisi ini ditargetkan bisa menyumbangkan kontrak baru sebesar Rp 500 Milyar dalam setahun pada kapasitas terpasang penuh.

2. *Local Content Implementation:*
 - *Balance of Power Plant and Sugar Mills.*
3. *Business & product development:*
 - *Oil Palm harvesting machine on peatlands, Fastrex*
 - *Analog rice pellet machine, Extruder*
 - *Mobile Power Plant with Siemens*
 - *Gas Engine made from 100% CPO raw material.*

Huge move that the Company did in 2018 which successfully lifted the market aspect was the corporate action to acquire Siemens' turbine component factory located in Cllegon. The effect was competency strengthening in the Power Plant sector where the new plant is targeted to contribute a new contract amounted Rp 500 billion in a year at full installed capacity.



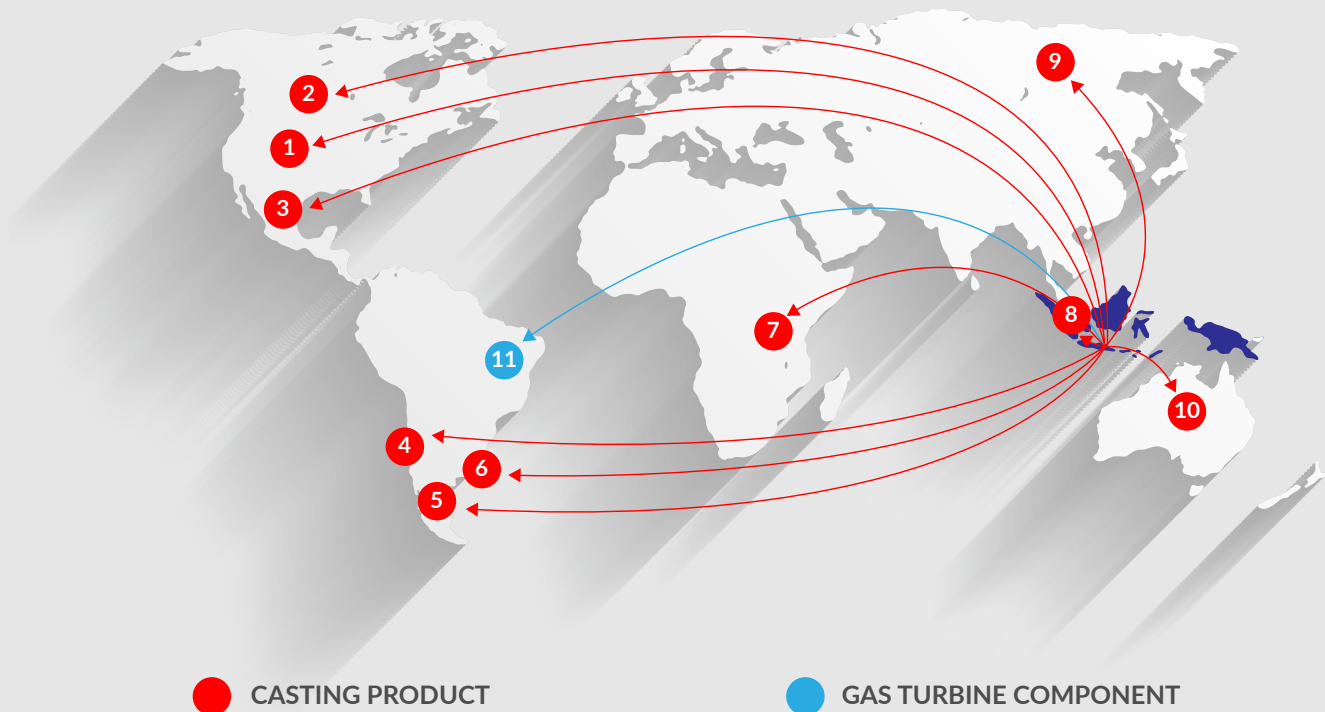
Produk-produk Divisi Komponen Turbin, Hasil Akuisisi | *Image: Turbine Component Division Products, Acquisition Results*

Aktivitas pemasaran yang tidak kalah penting adalah aktivitas ekspor komponen perkeretaapian dan komponen pembangkit tenaga listrik. Tren pasar ekspor dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan peremajaan beberapa permesinan pabrik pengecoran serta penambahan pabrik baru komponen Pembangkit Listrik di Cilegon. Beberapa Negara menjadi tujuan ekspor di Amerika, Canada, Australia dan Afrika, sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut:

Other important marketing activities is export of railroad components and power plant components. Export market trend from year to year is increasing along with the rejuvenation of several casting plant machineries as well as the addition of a new power plant component plant in Cilegon. Some of export destination countries are US, Canada, Australia and Africa, as illustrated in the following figure:

REALISASI EXPORT 2018 *Realization of Export 2018*

barata indonesia



1. USA (2016-2018)
2. CANADA (2013-2015)
3. MEKSIKO (2015)

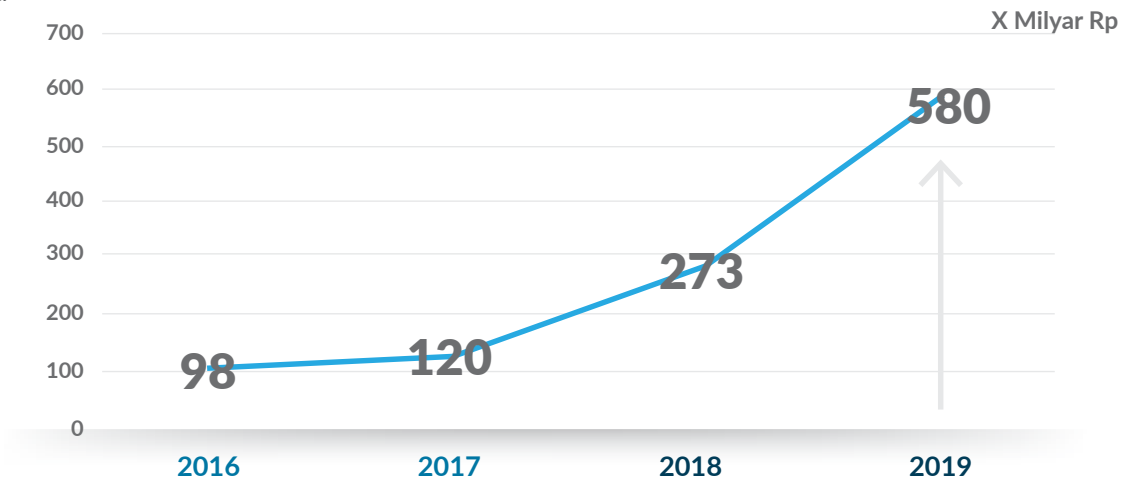
4. CHILI (2013)
5. ARGENTINA (2019)
6. URUGUAY (2013-2014)

7. AFRIKA (2014)
8. SINGAPURA (2010)
9. RUSIA (2017)

10. AUSTRALIA (2012)
11. BRASIL (2019)

Adapun tren kenaikan pasar ekspor yang semakin meningkat di tahun 2018 dan terus diprognoakan meningkat pada tahun 2019, digambarkan oleh grafik berikut:

Export market increasing growth trend in 2018 which predicated continuing to increase is in 2019, illustrated by the following graphic:



KEBIJAKAN DEVIDEN DAN JUMLAH DEVIDEN *Dividend Policy and Amount*

Pembagian dividen di dalam suatu Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 71 ayat 3 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan anggaran dasar Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan UU PT. Berdasarkan UU PT, seluruh laba bersih dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Pengaturan pembagian dividen PT Barata Indonesia (Persero) juga mengacu kepada Pasal 71 ayat 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan dalam Pasal 26 ayat 2 sesuai Perubahan Terakhir Anggaran Dasar PT Barata Indonesia (Persero) (Akta Notaris Herawati, SH., Nomor 01 Tahun 2017).

Dividend share in a Limited Liability Companies regulated in Law No. 40/2017, chapter 71 paragraph 3 regarding Limited Liability Companies ("UUPT") and the Company's Article of Association, as long as does not contravene Limited Liability Companies Law. Based on Limited Liability Companies Law, all net-profit minus allowance for reserves is shared to the shareholders as dividend, unless determined differently in GMS. Determination of PT Barata Indonesia Dividend share also referred to chapter 71 paragraph 3 Law No. 40/2007 regarding Limited Liability Companies and stipulation in chapter 26 paragraph 2 in accordance to the last amendmnet of PT Barata Indonesia (Persero) (Herawati, SH., No. 01/2017 Notarial Deed).

Untuk tahun buku 2018 Barata Indonesia belum berkewajiban menyumbangkan dividen kepada pemegang saham/Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini dipertegas oleh hasil Rapat Umum Pemegang Saham Persetujuan laporan tahun 2018 & Laporan Keuangan 2018 (Audited) tanggal 22 April 2019 yang menyetujui bahwa Net Profit sebesar Rp 67,8 Milyar seluruhnya akan dipergunakan sebagai cadangan. Namun demikian, sepanjang tahun 2018 Perseroan telah menyumbangkan nilai pajak sebesar total Rp 207,4 Milyar.

For 2018 fiscal year, Barata Indonesia yet to be obliged to share dividend to shareholders/Government of Republic of Indonesia. This was confirmed by GMS results for 2018 Annual Report & Financial Report (Audited) , dated April 22, 2019 which approved that the Company's Net-Profit which was amounted to Rp 67.8 Billion will be used as reserves entirety. However throughout 2018 the Company has contributed a total tax value Rp 207.4 Billion.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN YANG DILAKSANAKAN PERUSAHAAN (ESOP/MSOP)

Share Ownership Program By and/or Corporate Managed Management (ESOP/MSOP)

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Permodalan PT Barata Indonesia (Persero) sepenuhnya (100%) dimiliki Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian BUMN RI, sesuai Anggaran Dasar dalam Akta Notaris Ranti Nursukma Handayani, SH nomor 148 Tahun 2008 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum & HAM RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-39405.AH.01.02. Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa modal disetor adalah sebesar Rp 150 Milyar dan modal disetor sebesar Rp 128 Milyar. Dalam perjalanannya pada tahun 2015 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 477/KMK/MK.06/2015 tentang Penetapan Nilai Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada PT Barata Indonesia (Persero) tanggal 31 Maret 2015, Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-537/MBU/9/2015 tanggal 8 September 2015 dimana telah disetujui penambahan penempatan modal kerja menjadi total Rp 143.203.000.000,00 (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus tiga juta rupiah).

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

Sampai dengan akhir tahun 2017 PT Barata Indonesia (Persero) belum melakukan aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, sehingga tidak terdapat informasi yang memuat tentang:

1. Jumlah saham yang beredar;
2. Kapitalisasi pasar;
3. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan
4. Volume perdagangan.

KRONOLOGIS PENCATATAN EFEK LAINNYA

Sampai dengan akhir tahun 2017 PT Barata Indonesia (Persero) belum melakukan aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, sehingga tidak terdapat informasi yang memuat tentang:

1. Jumlah saham yang beredar;
2. Kapitalisasi pasar;
3. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan
4. Volume perdagangan.

Shareholder Composition

PT Barata Indonesia capital is fully (100%) owned by the Ministry of State-Owned Enterprises of Indonesian Government, in accordance with the Articles of Association in the Notarial Deed by Ranti Nursukma Handayani, SH, number 148 in 2008 which had been approved by Law and Human Rights Ministry of Indonesia based on decree number AHU-39405.AH.01.02. in 2008 which explained that the paid-up capital was Rp 150 billion and paid up Rp 128 billion. In 2015, through minister of finance decree No. 477/KMK/MK.06/2015 regarding Determination of State Equity Participation Value of Republic of Indonesia at PT Barata Indonesia dated March 31, 2015, Letters of Ministry of State-Owned Enterprises number S-537/MBU/9/2015 on September 8, 2015 where there had been approval regarding the additional capital placement amounted to Rp 143.203.000.000,00.

Chronological of Share Listing

Up to the end of 2018, PT Barata Indonesia has not conducted share trades in Indonesia Stock Exchange, thus, it cannot provide any information as follow:

- 1. Number of distributed shares*
- 2. Market capitalization*
- 3. The highest, lowest, and closing share prices*
- 4. Trading volume*

Chronological Of Other Effects Listing

Until the end of 2017, PT Barata Indonesia has not conducted share trades in Indonesia Stock Exchange, thus, it cannot provide any information as follow:

- 1. Number of distributed shares*
- 2. Market capitalization*
- 3. The highest, lowest, and closing share prices*
- 4. Trading volume.*

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM (DALAM HAL PERUSAHAAN MASIH DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA *Actual Use of Funds from The Public Offering (In The Company's Issues Still Required to Submit a Fund Realization Issuance Report)*

Menurut Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/ PJOK/.04//2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang selanjutnya disingkat LRPD (Laporan Realisasi Penggunaan Dana) adalah laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang disampaikan oleh Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah efektif.

Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah efektif wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada Bapepam. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan atau disampaikan kepada Wali Amanat.

Yang dimaksud dengan emiten adalah Perusahaan Terbuka yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik. Karena sampai sekarang PT Barata Indonesia belum Go Public sehingga PT Barata Indonesia belum membuat atau melakukan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Menurut Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan sehingga Perseroan wajib memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang saham berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh perseroan sebagai perusahaan publik dengan afiliasinya atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Apabila Perseroan melakukan Transaksi Afiliasi, Perseroan wajib:

- a. Mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa

According to a copy of the Regulation of the Financial Services Authority No. 30 / PJOK / .04 // 2015 on the Report on the Realization of the Use of Funds of Public Offering results hereinafter abbreviated as LRPD (Report on the Realization of the Use of Funds) is a report on the realization of the proceeds from the Public Offering submitted by the Issuer whose Registration Statement has been effective.

An Issuer who's Registration Statement has been effectively obliged to submit a report on the realization of the use of the proceeds from the Public Offering to Bapepam. The realization of the use of the proceeds of the Public Offering must also be accounted for at the Annual General Meeting of Shareholders and / or submitted to the Trust Agent.

What is in effect with the issuer is the Open Company that has conducted the Public Offering of Equity Securities or Public Company. Since PT Barata Indonesia yet to Go Public, so PT Barata Indonesia has not made or conducted Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering.

Material Transaction Information Containing Conflicts Of Interest And/Or Transaction With Affiliates

According to Bapepam and LK Regulation No. IX.E.1 regarding Affiliate Transactions and Transactions Containing Conflict of Interest, the Company is required to provide legal certainty and protection to shareholders in relation to transactions conducted by the company as a public company with its affiliates or conflict of interest transactions. If the Company engages in an Affiliate Transaction, the Company shall:

- a. *Announce disclosure of information to the public and submit proof of announcement and supporting documents to the Financial Services Authority no later*

Keuangan paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya transaksi. Pengumuman keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat dimaksud, wajib dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam/Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

b. Untuk transaksi tertentu cukup dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya transaksi-transaksi dimaksud, antara lain adalah:

- Penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Utama dalam hal Pemegang Saham Utama juga menjabat sebagai karyawan dan fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perseroan dan sesuai dengan kebijakan Perseroan, serta telah disetujui RUPS;
- Transaksi antara Perseroan dengan karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut maupun dengan karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS. Dalam Transaksi tersebut termasuk pula manfaat yang diberikan oleh Perseroan kepada semua karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut kebijakan yang ditetapkan Perseroan;
- Transaksi dengan nilai tidak melebihi 0,5% dari modal disetor Perseroan dan tidak melebihi jumlah Rp 5 Miliar;
- Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan sebagai pelaksanaan peraturan perundang undangan atau putusan pengadilan;
- Transaksi antara Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan tersebut;
- Transaksi antara Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya tidak dimiliki seluruhnya dan tidak satu pun saham atau modal Perusahaan Terkendali tersebut dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pemegang Saham Utama Perseroan atau pihak terafiliasinya, dan laporan keuangan Perusahaan Terkendali tersebut dikonsolidasikan dengan Perseroan.

than the end of the second (2) working day after the transaction. An information disclosure announcement on each Affiliated Transaction to the public concerned shall be conducted in accordance with Bapepam/Financial Services Authority Regulations on Affiliate Transactions and Conflict of Interest on Certain Transactions.

b. *For certain transactions are reported to the Financial Services Authority no later than the end of the second (2) work day after the transactions, as follow:*

- *The use of any facilities granted by the Company or Controlled Company to members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and / or the Main Shareholders in the event that the Main Shareholder also serves as an employee and the facility is directly related to their responsibilities to the Company and in accordance with Company policy, and has been approved by the GMS;*
- *Transactions between the Company and its employees, members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of the Company and any employees, members of the Board of Directors, or members of the Board of Commissioners of Controlled Companies on the same terms, insofar as they are approved by the GMS. In the Transaction, including the benefits provided by the Company to all employees, members of the Board of Directors, or members of the Board of Commissioners under the same terms, in accordance with the policies stipulated by the Company;*
- *Transactions with a value not exceeding 0.5% of the Company's paid up capital and not exceeding Rp 5 billion;*
- *Transactions conducted by the Company as the implementation of laws and regulations;*
- *Transactions between the Company and the Controlled Company whose shares or capital are owned at least 99% by the Company;*
- *Transactions between the Company and the Controlled Company whose shares or capital are not owned wholly and not one share or the capital of such Controlled Company is owned by members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, the Company's Shareholder or its affiliated party, and the Company's consolidated financial statements are consolidated with the Company.*

TRANSAKSI AFILIASI YANG DIKECUALIKAN

Transaksi Afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban melakukan keterbukaan informasi, antara lain adalah sebagai berikut:

- Transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan atau Perusahaan Terkendali; dan
- Transaksi Afiliasi yang merupakan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan atau Perusahaan Terkendali.

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

• PERSETUJUAN RUPS

Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK/Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk Akta Notariil.

Dalam hal transaksi yang telah disetujui dalam RUPS sebagaimana dimaksud di atas belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka transaksi hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan hasil pelaksanaan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.

PENGECUALIAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Pengecualian transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan secara detail diatur dalam Peraturan Bapepam/Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Karena PT Barata Indonesia belum perusahaan Go Public atau belum merupakan perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan artian belum menerbitkan saham maka PT Barata Indonesia tidak menyampaikan informasi material mengenai transaksi afiliasi dan atau benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan OJK.

Excluded Affiliate Transactions

Affiliate Transactions that are exempt from the obligation to disclose information, among others, are as follows:

- Affiliate Transactions that are the principal business of the Company or a Controlled Company; and*
- The Affiliate Transactions which are the main supporting activities of the Company or the Controlled Company.*

Conflict of Interest Transactions

- Approval of the GMS

Transactions involving Conflict of Interest shall first be approved by independent Shareholders or their representatives authorized to do so in the GMS as stipulated in Bapepam-LK Regulation / Financial Services Authority on Affiliated Transactions and Conflict of Interest on Certain Transactions. Approval of such matters shall be affirmed in the form of a Notarial Deed.

In the event that a transaction which has been approved in the GMS as referred to above has not been implemented within 12 (twelve) months since the date of approval of the GMS, then the transaction may only be executed upon approval of the GMS. The Company is obliged to convey to the Financial Services Authority a report on the implementation of a Conflict of Interest transaction.

Exclusion of Conflict of Interest Transactions

Transaction exemptions containing Conflict of Interest are detailed in the Bapepam / Financial Services Authority Regulations on Affiliate Transactions and Conflict of Interest of Certain Transactions. Since PT Barata Indonesia is not a Go Public company or is not a listed company in the Indonesia Stock Exchange with the meaning that it has not issued any shares, PT Barata Indonesia does not submit material information regarding affiliate transactions and / or conflicts of interest as enforced by OJK regulations.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Regulatory Changes In Legislation

UNDANG-UNDANG

Legislations

PERATURAN SEBELUMNYA Previous Regulations	PERATURAN BARU New Regulations
UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI Construction Service Law	
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Law Number 18 Year 1999	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (mencabut undang-undang sebelumnya) Law Number 2 Year 2017 (revoking the previous law)
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI Corruption Criminal Act Law	
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Law Number 31 of 1999 regarding Eradication of Corruption Crimes	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Law Number 20 /2001 regarding Amendment to Law Number 31/ 1999 regarding Eradication of Corruption Crimes
UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP Environmental Law	
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Law Number 23/1997 regarding Environmental Management	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Law Number 32/2009 regarding Environmental Protection and Management

PERATURAN PEMERINTAH

Government Regulation

PERATURAN SEBELUMNYA Previous Regulations	PERATURAN BARU New Regulations
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Government Regulation Number 44/2005	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 Government Regulation Number 72/2015
TENTANG Regarding	
Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas Procedures for Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas Amendment to Government Regulation No.44/2005 regarding Procedures for Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Minister of State-Owned Enterprises Regulation

No.	PERATURAN SEBELUMNYA Previous Regulations	PERATURAN BARU New Regulations
1.	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara Minister of State Owned Enterprises Regulation No. PER-03 / MBU / 08/2017 regarding Guidelines for Cooperation between State-Owned Enterprises	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-04/MBU/09/2017 regarding Amendments to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No.PER-0 /MBU/08/2017 regarding Guidelines for Cooperation between State-Owned Enterprises
2.	Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara State Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-05 / MBU / 2008 regarding General Guidelines for Procurement of Goods and Services the Implementation in State-Owned Enterprises	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-15 / MBU / 2012 regarding Amendments to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-05 / MBU / 2008 regarding General Guidelines for Procurement of Goods and Services the Implementation in State-Owned Enterprises

No.	PERATURAN SEBELUMNYA <i>Previous Regulations</i>	PERATURAN BARU <i>New Regulations</i>
3.	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara <i>Minister of State Owned Enterprises Regulation No. PER-10 / MBU / 07/2015 regarding the Organization and Work Procedure of the Ministry of State-Owned Enterprises</i>	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/12/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara <i>Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-06 / MBU / 12/2017 regarding Amendments to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-10 / MBU / 07/2015 regarding the Organization and Work Procedure of the Ministry of State-Owned Enterprises</i>
4.	Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara <i>Minister of State Owned Enterprises Regulation No. PER-01 / MBU / 2011 regarding Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises</i>	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara <i>Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09 / MBU / 2012 regarding Amendments to Minister of State-Owned Enterprises Regulation PER-01 / MBU / 2011 regarding Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises</i>
5.	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas <i>Minister of State Owned Enterprises Regulation No. PER-08 / MBU / 06/2015 regarding Guidelines for Reporting the Realization of Additional Use of Funds for Participating in State Capital to State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies</i>	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 11/MBU/09/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas <i>Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. 11 / MBU / 09/2015 regarding Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-08 / MBU / 06/2015 regarding Guidelines for Reporting the Realization of Additional Use of Funds for Participating in State Capital to State-Owned Enterprises and Companies Limited</i>

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Standar yang telah diterbitkan dan efektif pada tahun buku 2018, namun tidak menimbulkan efek signifikan terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. PSAK 13 (Amandemen 2017) : Properti Investasi
2. PSAK 15 (Penyesuaian 2017) : Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
3. PSAK 16 (Amandemen 2015) : Aset Tetap
4. PSAK 46 (Amandemen 2016) : Pajak Penghasilan
5. PSAK 53 (Amandemen 2017) : Pembayaran Berbasis Saham
6. PSAK 67 (Penyesuaian 2017) : Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain

Changes To Accounting Policy

Issued standards and were effective in fiscal 2018, but have no significant effect on financial report is as follows:

1. *PSAK 13 (2017 Amendments): Investment Property*
2. *PSAK 15 (2017 Adjustment): Investment in Associates and Joint Venture*
3. *PSAK 16 (2015Amendment): Fixed Assets*
4. *PSAK 46 (2016 Amendment): Income Tax*
5. *PSAK 53 (2017 Amendments): Share Based Payments*
6. *PSAK 67 (2017 Adjustment): Disclosure of Interest in Other Companies*





**TATA KELOLA
PERUSAHAAN**
Corporate Governance

KOMITMEN PENERAPAN GCG

Statement in Good Corporate Governance

Perseroan menyadari bahwa Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan agar sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Sebagai landasan kokoh dan perangkat standar yang bertujuan mendukung upaya menjaga kesinambungan kegiatan usaha, maka diperlukan penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Perseroan.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan perusahaan mengingat risiko dan tantangan ke depan yang semakin meningkat dan kompleks. Untuk itulah, Barata konsisten terus untuk meningkatkan kualitas penerapan praktek terbaik *Good Corporate Governance* (GCG) di setiap aspek operasional.

PT Barata Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan untuk turut serta dalam menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Perseroan memiliki keyakinan bahwa penerapan GCG merupakan salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar, menjadi bagian penting dalam menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Pemahaman ini mendasari komitmen Perseroan untuk senantiasa menegakkan penerapan GCG dalam setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan komitmen yang tinggi dan konsistensi terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perseroan. Komitmen penerapan GCG tidak hanya sekedar sebagai pemenuhan atas aturan-aturan yang berlaku melainkan dalam praktiknya perlu dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya GCG bagi tegaknya integritas dalam menjalankan bisnis yang berkesinambungan. "Perseroan berkomitmen untuk menerapkan dan mengimplementasikan GCG secara berkelanjutan di seluruh proses bisnis untuk menciptakan Perseroan yang profesional, transparan, dan efisiensi dengan peningkatan keterbukaan, akuntabilitas, adil dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang bertanggung jawab".

Komitmen Perseroan untuk senantiasa mengimplementasikan GCG secara berkelanjutan tersebut, didukung dengan adanya infrastruktur berikut ini :

- a. Visi, misi, dan tata nilai Perseroan yang jelas dan realistis yang dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris dan Direksi;

The Company realized that Good Corporate Governance (GCG) is a mechanism that regulates the company's management to meet the stakeholders' expectations. As a solid foundation and standard element which aimed to support the efforts in maintaining of business continuity activities, thus the implementation of the above principles of good corporate governance is required to achieve the Company's vision and mission.

Consistent Good Corporate Governance (GCG) is a very important factor in the management of the company given the increasing and complex risks and challenges ahead. For this reason, Barata consistently continues to improve the quality of implementing the best practices of Good Corporate Governance (GCG) in every operational aspect.

PT Barata Indonesia (Persero) is a State-Owned Enterprise (BUMN) which was established to participate in supporting government policies and programs in the national economy and development. The Company believes that GCG implementation is one of the pillars of the market economy system, an essential part in supporting sustainable economic growth and stability. This understanding underlies the Company's commitment to always uphold GCG implementation at every level of the organization and its operational activities.

To achieve these goals, it requires a high commitment and consistency in good corporate governance implementation within the Company. Commitment to the GCG implementation is not merely a fulfillment of the prevailing regulations but in practice it shall be based on awareness of GCG importance to enforce integrity in running a sustainable business. "The Company is committed to implement GCG sustainably in all business processes to create a professional, transparent and efficient Company by increasing disclosure, accountability, fairness and trustworthiness through responsible business management".

The Company's commitment to continuously implement sustainable GCG is supported by the following infrastructure:

- a. Clear and realistic vision, mission and values of the Company which are regularly evaluated by the Board of Commissioners and Directors;*

b. Pedoman <i>Good Corporate Governance</i>; c. Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (<i>Board Manual</i>); d. Penetapan pedoman perilaku (<i>code of conduct</i>) yang dilakukan secara konsisten dan membudaya; e. Pedoman Sistem Pengendalian Intern (<i>Internal Control System</i>) yang kuat; f. Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>whistle blowing system</i>); g. Pedoman Pengendalian Gratifikasi (<i>Gratification Control</i>); h. <i>Internal Audit Charter</i> i. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkelanjutan; j. Sistem dan Prosedur (<i>Administrative/ Operating Procedure</i>).	b. <i>Good Corporate Governance Guidelines</i>; c. <i>Board Manual</i>; d. <i>Determination of a consistent and cultured code of conduct</i>; e. <i>Guidelines for a strong Internal Control System</i>; f. <i>Whistle blowing system implementation</i>; g. <i>Guidelines for Gratification Control</i>; h. <i>Internal Audit Charter</i> i. <i>Sustainable social and environmental responsibility programs</i>; j. <i>Systems and Procedures (Administrative / Operating Procedures)</i>.

DASAR HUKUM PENERAPAN GCG DI PERUSAHAAN

Legal Basis Of GCG Implementation

Penerapan atas Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) mengacu kepada beberapa ketentuan yang berlaku, diantaranya :

- a. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c. Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
- e. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- f. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Kep-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- g. Anggaran Dasar PT Barata Indonesia (Persero).

Good Corporate Governance implementation refers to several prevailing regulations, including:

- a. *Law Number 19/2003 regarding State-Owned Enterprises;*
- b. *Law Number 40/2007 regarding Limited Liability Companies;*
- c. *Law No. 31 of 1999 regarding Eradication of Corruption Crime;*
- d. *BUMN State Ministerial Regulation No.PER-01/MBU/2012 dated July 6, 2012 regarding Amendment State Minister of State-Owned Enterprises Regulation No.PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 regarding Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises;*
- e. *Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Decree No. SK-16 / S.MBU / 2012 dated June 6, 2012 regarding Indicators / Parameters for Evaluating and Evaluating Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises.*
- f. *Minister of State-Owned Enterprises Decree No. Kep-117/M-MBU/2002 regarding Good Corporate Governance Practices Implementation in State-Owned Enterprises (BUMN);*
- g. *PT Barata Indonesia (Persero) Articles of Association.*

ROADMAP PENERAPAN GCG

Barata Indonesia meyakini bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara berkelanjutan dan berkesinambungan merupakan pondasi bagi terbentuknya sistem, struktur dan budaya Perusahaan yang dapat menjadi sarana untuk mencapai visi & misi Perusahaan. Perseroan menetapkan arah implementasi GCG dalam bentuk roadmap GCG yang diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan implementasi GCG di seluruh tingkatan. Dimana roadmap ini diharapkan mampu menjadikan GCG sebagai acuan dalam setiap aktifitas operasional dan menumbuhkan komitmen manajemen dalam menerapkan GCG serta senantiasa diikuti langkah penyempurnaan dan konsistensi penerapan. Berikut merupakan gambaran tahapan penerapan GCG Perseroan dengan tujuan menjadi perusahaan yang beretika dan bertanggung jawab, dengan menjadikan praktik tata kelola yang baik sebagai budaya dalam pengelolaan perusahaan, sebagai berikut:

Roadmap Of GCG Implementation

Barata Indonesia believes that a continuous and sustainable good corporate governance implementation is the foundation for the establishment of a system, structure and corporate culture that can be a means to achieve the Company's vision and mission. The Company sets the direction of GCG implementation in the form of a GCG roadmap which is expected to be a guideline in GCG implementation at all levels. Where this roadmap is expected to be able to make GCG as a reference in all operational activities and foster management commitment in implementing GCG which expected will be always followed by improvement measures and consistency in its implementation. The following is an overview of the stages of the Company's GCG implementation with the aim of being an ethical and responsible company, by making good governance practice as culture in the company's management, as follows:

PERUSAHAAN YANG BERETIKA DAN BERTANGGUNG JAWAB <i>Ethical and Responsible Company</i>		
INFRASTRUKTUR & SOFTSTRUCTURE <i>Infrastructure & Softstructure</i>	PENYEMPURNAAN BERKELANJUTAN (PROSES) <i>Continuous Improvement (Process)</i>	SASARAN <i>Goals</i>
1. Organ Utama 2. Organ Pendukung : a. Organ Pendukung Dekom b. Organ Pendukung Direksi 3. Infrastruktur : a. Pedoman GCG b. Board Manual (Pedoman Direksi & Dewan Komisaris) c. Code of Conduct (Pedoman Perilaku) d. Pedoman Sistem Pengendalian Intern (<i>Internal Control System</i>) e. Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>whistle blowing system</i>) f. Pedoman Pengendalian Gratifikasi (<i>Gratification Control System</i>) g. Internal Audit Charter h. Sistem dan Prosedur (<i>administrative/ operating procedure</i>) i. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	1. Penerapan : a. Penerapan atas Sistem, Pedoman dan/atau Prosedur yang ada. b. Pemenuhan Hak Pemegang saham dan Perlakuan Yang Sama Kepada Seluruh Pemegang Saham. c. Pemenuhan Hak Para Pemangku Kepentingan d. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris e. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan. 2. Review 3. Assessment 4. Audit	Good Corporate Governance (GCG) menjadi budaya dalam mengelola perusahaan.
1) Main Organs 2) Supporting Organs: a) BoC Supporting Organs b) BoD Supporting Organs 3) Infrastructure: a) GCG Guidelines b) Board Manual (BoD & BoC Guidelines) c) Code of Conduct d) Internal Control System Guidelines e) Whistle Blowing System f) Gratification Control System g) Internal Audit Charter h) System and Procedure (<i>administrative / operating procedure</i>) i) Vision, Mission and Corporate Culture	1) Implementation: a. Implementation of existing Systems, Guidelines and/or Procedures. b. Fulfillment of shareholders rights and equal treatment to all shareholders. c. Fulfillment of Stakeholder Rights d. BoC & BoD Duties and Responsibilities Implementation e. Transparency of the Company's financial and non-financial conditions. 2) Review 3) Assessment 4) Audit	Good Corporate Governance (GCG) as a culture in managing the company.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance Structure

Selaras dengan ketentuan – ketentuan diatas, untuk lebih mengefektifkan implementasi Good Corporate Governance (GCG) maka Perseroan juga melakukan penelaahan terhadap praktik-praktik bisnis terbaik yang ada meliputi antara lain:

- Penerapan GCG dengan melihat indeks persepsi dari sisi bidang tertentu terkait tata kelola perusahaan atau Corporate Governance Perception Index (CGPI);
- Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Tahun 2006; serta
- Penilaian penerapan bisnis ekselen melalui Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) khususnya pelaksanaan tata kelola dan kepemimpinan.

In line with the provisions above, in order to make Good Corporate Governance (GCG) implementation more effective, the Company also conducts a review of the existed best business practices, including among others:

- GCG Implementation by observing perception index in certain fields related to corporate governance or Corporate Governance Perception Index (CGPI);*
- Indonesian GCG Guidelines developed by the National Committee on Governance Policy (KNKG) in 2006; and*
- Evaluation of excellent business implementation through Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU), especially governance and leadership implementation.*

GCG STRUCTURE GCG Structure

05 GOOD CORPORATE SUSTAINABILITY

Dengan mendasarkan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan pada prinsip-prinsip GCG yang ada, diharapkan akan terciptanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

GOOD CORPORATE SUSTAINABILITY

EGULASI PRAKTEK TERBAIK INFRASTRUKTUR

PROSES GCG 04

Standar penerapan GCG meliputi :

1. Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan.
2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS / Pemilik Modal.
3. Aspek Dewan Komisaris / Dewan Pengawas.
4. Aspek Direksi
5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi
6. Aspek Lainnya

02 STRUKTUR GCG

Organ yang mendukung dalam pelaksanaan atau penerapan GCG, antara lain :

1. Organ Utama :
 - a) RUPS
 - b) Dewan Komisaris
 - c) Direksi
2. Organ Pendukung :
 - a) Organ Pendukung Dewan Komisaris : Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit serta Komite Manajemen Risiko.
 - b) Organ Pendukung Direksi : Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, dan Satuan Kerja Lainnya.

ORGAN UTAMA ORGAN PENDUKUNG

TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, RESPOSIBILITAS, INDEPENDENSI, DAN FAIRNESS

PRINSIP GCG 02

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Perseroan senantiasa berpegang pada asas-asas GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness.

01 KOMITMEN GCG

Komitmen Perseroan dalam menerapkan GCG ditunjang dari Visi, Misi dan Nilai Budaya yang dimiliki oleh Perseroan

VISI, MISI, DAN BUDAYA

Berdasarkan dari berbagai Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman tersebut, kemudian dilakukan adopsi ke dalam kebijakan internal Perseroan merupakan suatu bentuk komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh insan Perseroan. Untuk mencapai kepada

Based on various Laws and Regulations, then adoption into the Company's internal policies is a form of commitment from the Board of Commissioners and the Board of Directors along with all the Company's employees. To achieve sustainable good governance, it can be seen from the following GCG

tata kelola yang baik secara berkelanjutan terlihat dari Struktur Penerapan GCG berikut ini yang merupakan bentuk komitmen Perseroan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) :

Komitmen Perseroan dalam menerapkan atas *Good Corporate Governance* (GCG) ditunjukkan dari komponen dasar yang dimiliki oleh Perseroan yaitu Visi, Misi dan Nilai Budaya. Visi Perseroan untuk menjadi perusahaan industri yang kuat, sehat dan berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi dalam bidang *food, energy* dan *water* (*Engineering, Procurement & Construction*), dimana diwujudkan dalam misi Perseroan dengan didasarkan pada nilai Budaya Perseroan. Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Perseroan senantiasa berpegang pada prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independence*) dan Kewajaran (*fairness*).

Untuk dapat melaksanakan atau menerapkan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai Peraturan Perundang-undangan serta *best practices* yang ada, maka berdasarkan prinsip GCG yang ada Perseroan mengembangkan struktur *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi organ utama dan organ pendukung. Maka dengan mendasarkan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip - prinsip GCG, tentunya komitmen, kepatuhan terhadap sistem, ketentuan maupun regulasi yang ada diharapkan akan terciptanya kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang dan tata kelola yang baik (*good corporate sustainability*).

Implementation Structure which is a form of the Company's commitment to Good Corporate Governance (GCG) implementation:

The Company's commitment in implementing Good Corporate Governance (GCG) is shown by the Company's foundations, namely Vision, Mission and Cultural Value. The Company's vision to be a strong, healthy and competitive industrial company based on innovation and technology in the fields of food, energy and water (Engineering, Procurement & Construction), which is realized in the Company's mission based on the Company's Cultural values. In realizing its Vision and execute its Mission, the Company always adheres to the Good Corporate Governance (GCG) principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.

To be able to implement Good Corporate Governance (GCG) mechanism in accordance with Laws and the existing best practices, thus based on the existing GCG principles the Company develops Good Corporate Governance (GCG) structures which includes the main organs and supporting organs. Thus by founding its business activities based on GCG principles, surely commitment, compliance with the system, existing stipulations and regulations are expected to create the Company's business continuity in long term and good corporate governance.

TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN GCG *Objectives and Benefits of GCG Implementation*

Penerapan GCG secara umum memiliki tujuan untuk menciptakan aturan main yang jelas antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, dengan harapan jalannya operasional perusahaan lebih bersifat transparan, akuntabel dan dapat dimonitoring secara baik sehingga hasil yang dicapai akan lebih optimal. Pengelolaan perusahaan dapat diawasi melalui penerapan GCG serta memberikan manfaat dan keuntungan bagi aspek-aspek keberlanjutan seperti:

- a. Meningkatkan penilaian terhadap perusahaan;
- b. Menciptakan dan meningkatkan kemampuan kompetitif perusahaan;
- c. Memungkinkan kinerja perusahaan menjadi lebih efisien

GCG implementation generally is aimed to create clear regulations between the company and stakeholders, with the hope that the company's operations will be more transparent, accountable and may be monitored properly to achieve better and more optimal results. Company management can be monitored through GCG implementation and provide benefits for sustainable aspects such as:

- a. Increase the company's value;*
- b. Creating and enhancing the company's competitiveness;*
- c. Enables the company's performance to be more efficient*

- serta mencegah terjadinya penyimpangan;
- d. Melindungi kepentingan pemegang saham;
- e. Mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan;
- f. Memastikan perusahaan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Atas dasar tersebut, Perseroan telah merancang dan membangun pedoman GCG dengan mengacu pada prinsip GCG dan lapisan aturan atau regulasi yang ada serta memperhatikan secara seksama isu-isu tata kelola yang sedang berkembang baik di internal maupun eksternal Perusahaan. Pedoman tersebut juga telah disesuaikan dengan bidang usaha perseroan yang dijalankan serta diharapkan memiliki visi tata kelola yang maju dan mampu beradaptasi pada perkembangan maupun tantangan dunia usaha di masa depan. Dengan begitu, akan memungkinkan bagi Perseroan memiliki pedoman pelaksanaan GCG yang jauh lebih fleksibel, lebih lengkap dan memiliki dampak yang cukup luas.

TUJUAN PENERAPAN GCG DI PT BARATA INDONESIA (Persero) SEBAGAI BERIKUT :

- a. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Perseroan dengan organnya, yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, pegawai, pelanggan, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan agar berjalan secara baik dan kepentingan semua pihak terpenuhi;
- b. Mengoptimalkan nilai Perseroan agar Barata Indonesia memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Barata Indonesia;
- c. Mendorong pengelolaan Barata Indonesia secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero;
- d. Mendorong agar Organ Persero dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Barata Indonesia terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar Barata Indonesia;
- e. Meningkatkan kontribusi Barata Indonesia dalam perekonomian nasional;
- f. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

- and prevents the occurrence of irregularities;*
- d. Protect shareholders interests;*
- e. Reducing poverty through increasing corporate social responsibility;*
- f. Ensure the company complies with prevailing laws and regulations.*

On this basis, the Company has designed and established GCG guidelines by referring to GCG principles and the existing regulations and considering the developing governance issues both internally and externally. This guidelines have also been adapted to the Company's business lines and are expected to have an advanced governance vision and adaptable to the development and challenges of the business world in the future. That way, it will enable the Company to have GCG implementation guidelines that are far more flexible, more complete and have a broad enough impact.

GCG Implementation objectives at PT Barata Indonesia (Persero) are as follows:

- a. Controlling and directing relations between the Company and its organs, namely Shareholders, Board of Commissioners, Directors, employees, customers, partners, and community and environment to run well and all parties interests are fulfilled;*
- b. Optimizing the Company's value so that Barata Indonesia has strong competitiveness, both locally and internationally, to be able to maintain its existence and sustainability to achieve Barata Indonesia's goals and objectives;*
- c. Encouraging Barata Indonesia's management in a professional, efficient and effective manner, as well as empowering functions and increasing the independence of the Company's Organs;*
- d. Encouraging the Company's Organ in making decisions and performing actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, and awareness of Barata Indonesia's social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability around Barata Indonesia;*
- e. Increase Barata Indonesia's contribution in the national economy;*
- f. Improving a conducive climate for the development of national investment.*

PRINSIP-PRINSIP GCG

GCG Principles

Perseroan mengembangkan struktur dan tata kelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG sesuai ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sebagai best practice. Prinsip dasar GCG secara umum diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang – undangan. Oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu :

1. Negara dan perangkatnya sebagai regulator;
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Barata Indonesia menerapkan prinsip – prinsip GCG sesuai dengan PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara, yang meliputi :

The Company develops structure and governance by paying attention to the GCG principles in accordance with the prevailing provisions and regulations as the best practice. GCG principles are generally needed to encourage the establishment of markets which are efficient, transparent and consistent with laws and regulations. Therefore GCG implementation needs to be supported by three pillars, namely:

- 1. The state and its organs as regulators;*
- 2. The business world as a market participants, and*
- 3. Communities as users of business products and services.*

Barata Indonesia implemented GCG principles in accordance with PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011 concerning the application of good corporate governance to State-Owned Enterprises, which includes:



1. TRANSPARANSI (*Transparency*)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan prinsip transparansi dengan baik dan tepat akan menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan berbagai pihak;

2. AKUNTABILITAS (*Accountability*)

Seluruh organ tata kelola Perseroan memiliki prinsip akuntabilitas dengan kejelasan fungsi, struktur, sistem serta pertanggungjawaban sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara sistematis dan efektif. Dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya dalam pengurusan perusahaan, masing-masing organ perusahaan (dalam hal ini Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS) berpegang pada Anggaran Dasar Barata Indonesia yang berlaku;

3. PERTANGGUNGJAWABAN (*Responsibility*)

Upaya penerapan prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Barata Indonesia secara sinergi membangun sistem kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan peraturan internal secara terus-menerus;

4. KEMANDIRIAN (*Indenpendency*)

Keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat;

5. KEWAJARAN (*Fairness*)

Perseroan memberikan perlakuan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak - hak seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

1. Transparency

Transparency in decision making process and openness in disclosing material and relevant information regarding the company. The Company believes that proper transparency principles implementation will avoid conflicts of interest occurrence;

2. Accountability

All of the Company's governance organs implemented accountability principle with clear functions, structures, systems and accountability so that corporate management is conducted systematically and effectively. In performing its obligations and authority in managing the company, each company organs (in this case the Board of Directors, Commissioners, and GMS) adheres to the prevailing Barata Indonesia Articles of Association;

3. Responsibility

Efforts to implement responsibility principle in managing the company, Barata Indonesia's Board of Directors and Commissioners synergistically established compliance system with the prevailing laws and internal regulations continuously;

4. Independence

The situation where the company is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party which contravene the laws and regulations and sound company's principles;

5. Fairness

The Company provides fairness and equality treatment in fulfilling all stakeholders rights based on the prevailing laws and regulations.

PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Code of Corporate Governance

Sesuai dengan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara adalah Perseroan harus memiliki Board Manual, Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), dan Pedoman GCG (*Code of Corporate Governance*).

1. BOARD MANUAL

Board Manual yang dimiliki oleh Perseroan merupakan salah satu soft structure GCG, sebagai penjabaran dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang mengacu pada Anggaran Dasar PT Barata Indonesia (Persero) dan ketentuan lainnya yang selaras dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Board Manual merupakan pedoman atau panduan yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan tata kerja Direksi dan Dewan Komisaris serta proses hubungan fungsi antara Direksi, Dewan Komisaris dan antara kedua organ Perseroan tersebut.

Board Manual disusun dengan tujuan :

- Menjadi pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja Direksi dan Dewan Komisaris;
- Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola perusahaan;
- Menerapkan prinsip-prinsip GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness (kewajaran) di setiap kegiatan di Perseroan secara konsisten.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara mewajibkan Perseroan untuk menyusun *Board Manual*. Secara internal di Barata Indonesia telah menyusun dan pemutakhiran atas Board Manual yang dimiliki, dimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama No. K 17 157a tertanggal 27 Juli 2017 tentang "Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual).

2. PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

Pedoman perilaku atau *Code of Conduct* merupakan pedoman individu bagi seluruh insan Perseroan dalam berperilaku yang wajar, patut, menjunjung nilai-nilai

In accordance with a copy of Ministry of State-Owned Enterprises Secretary Decision No. SK-16/S.MBU/2012 regarding Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises, the Company shall have a Board Manual, Code of Conduct, and Code of Corporate Governance (GCG) Guidelines.

1. Board Manual

The Company's Board Manual is one of GCG softstructures, as the description of Code of Corporate Governance that refers to PT Barata Indonesia (Persero) Articles of Association and other provisions which are in line with Good Corporate Governance (GCG) implementation.

The Board Manual is a guideline that describes the outlines regarding relevant matters to Board of Directors and the Commissioners working governance as well as functional relation processes between the Board of Directors, the Commissioners and between those two Company's organs.

Board manual is arranged with the aim to:

- To be a guideline regarding the Board of Directors and Commissioners duties and work functions;*
- Improve work relations quality and effectiveness between the Board of Directors and Commissioners in managing the company;*
- Implementing GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in all activities in the Company consistently.*

Minister of SOE Regulation No. PER-01 / MBU/2011 as last amended by Minister of SOE Regulation No. PER-09 / MBU / 2012 regarding Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises requires the Company to compile Manual Board. Internally Barata Indonesia has compiled and updated its Board Manual, which has been determined through Joint Decree No. K 17 157a dated July 27, 2017 regarding " Board Manual for Board of Directors and Commissioners.

2. Code Of Conduct

Code of Conduct is an individual guideline for all employees of the Company in behaving reasonably, appropriately, upholding good and trustworthy values in performing their

yang baik dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan dalam menjalin hubungan dengan mitra kerja, mitra usaha, maupun rekan kerja dan pihak lainnya agar PT Barata Indonesia (Persero) mampu mempertahankan pelanggan dan mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara mewajibkan Perseroan untuk memiliki Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*). PT Barata Indonesia (Persero) telah menyusun, pemutakhiran dan penetapan *Code of Conduct* melalui Surat Keputusan Bersama No.SKB 17 001 tertanggal 4 Januari 2017.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup materi *Code of Conduct* Barata Indonesia meliputi etika usaha, benturan kepentingan (*conflict of interest*), penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan, komitmen dan perilaku insan Barata Indonesia, Kerahasiaan Data Perseroan, Pengawasan Pelaksanaan, serta Sanksi Pelanggaran yang diberikan apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan atas kebijakan yang ada.

ISI PEDOMAN PERILAKU (*Code of Conduct*)

Pedoman Perilaku (*code of conduct*) pada PT Barata Indonesia (Persero) terdiri atas :

- a. Etika Usaha : mengatur hubungan dengan antar pegawai PT Barata Indonesia (Persero), Pelanggan, Pemegang Saham, Pemerintah dan Regulator, Lingkungan, Penyedia Barang/Jasa, Mitra Usaha, Kreditur/Investor, Pesaing dan masyarakat sekitar.
- b. Tata Perilaku : mengatur tuntutan perilaku individu, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, kerahasiaan informasi, benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah, anti penggelapan, melindungi asset perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja, menjaga kriteria perusahaan, serta ketepatan pencatatan.

KEBERLAKUAN ATAS PEDOMAN PERILAKU (*Code of Conduct*)

Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) berlaku untuk seluruh insan PT Barata Indonesia (Persero) mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan kepada seluruh karyawan atau pegawai di level operasional.

daily duties and in establishing relationships with business partners, colleagues and other parties so that PT Barata Indonesia (Persero) is able to retain customers and be able to improve employee welfare.

In accordance with Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 as last amended by Minister of SOE Regulation No. PER-09/MBU/2012 regarding Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises requires the Company to have a Code of Conduct. PT Barata Indonesia (Persero) has compiled, updated and stipulated the Code of Conduct through a Joint Decree No. SKB 17 001 dated January 4, 2017.

Scope

The scope of Barata Indonesia's Code of Conduct material includes business ethics, conflict of interest, misuse of office and fraud, commitment and behavior of Barata Indonesians, Confidentiality of Company Data, Implementation Supervision, and Sanctions for Violation given in the case of a violation or non-compliance on the existing policy.

Code of Conduct's Contents

PT Barata Indonesia (Persero) Code of conduct consists of:

- a. *Business Ethics: regulating PT Barata Indonesia (Persero) interemployees, Customers, Shareholders, Government and Regulators, Environment, Goods/Services Suppliers, Business Partners, Creditors / Investors, Competitors and the surrounding community relations.*
- b. *Behavior: regulates individual behavior, compliance with laws and regulations, confidentiality of information, conflicts of interest, giving and receiving gifts, anti-fraud, protecting company assets, occupational safety and health, maintain company criteria, and recording accuracy.*

Applicability of the Code of Conduct

Code of Conduct applies to all employees of PT Barata Indonesia (Persero) from the Board of Commissioners, Directors to all employees at operational level. Company values content is always socialized to all employees.

Kandungan dari nilai-nilai perusahaan selalu disosialisasikan kepada seluruh pegawai.

PENEGAKAN ATAS PEDOMAN PERILAKU

Untuk mengawal implementasi tersebut dan sebagai bentuk dukungan atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), seluruh insan Barata mendapatkan buku pedoman perilaku (*code of conduct*) ini serta menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap kode etik atau pedoman perilaku yang berlaku tersebut.

PENGAWASAN PELAKSANAAN

- a. Direksi PT Barata Indonesia (Persero) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ketentuan ini disampaikan, dimengerti serta ditaati oleh seluruh insan PT Barata Indonesia (Persero);
- b. Tanggung jawab sehari-hari didelegasikan kepada para pemimpin tertinggi di masing-masing lembaga terkait yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ini serta melakukan pelaksanaannya.

SANKSI PELANGGARAN

Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan tersebut, maka pihak yang melanggar dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan atau perundang-undangan yang berlaku.

3. PEDOMAN GCG (CODE OF CORPORATE GOVERNANCE)

Code of Corporate Governance atau Pedoman Tata Kelola Perusahaan merupakan suatu acuan yang disusun oleh Barata Indonesia dalam pelaksanaan pengelolaan berdasarkan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* (GCGC). *Code of Corporate Governance* ini mengatur struktur badan tata kelola perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi), proses tata kelola perusahaan, organ pendukung badan tata kelola perusahaan serta proses tata kelola perusahaan.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang dimiliki PT Barata Indonesia telah disusun dan disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama dengan Surat Keputusan Bersama Nomor 05/DEKOM/BRT/I/2013 dan K 13 343b tanggal 14 November 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan GCG PT Barata Indonesia (Persero).

Code of Conduct Enforcement

To oversee this implementation and as a support for good corporate governance implementation, all Barata personnel obtain this code of conduct and sign a statement of compliance with the prevailing code of conduct.

Implementation Supervision

- a. *PT Barata Indonesia (Persero) Board of Directors are responsible for ensuring that these provisions are socialized, understood and adhered to by all PT Barata Indonesia (Persero) personnel;*
- b. *Daily responsibility is delegated to the highest officers in each of the relevant departments who are responsible for implementing these provisions and conducting its implementation.*

Violation Sanctions

If there shall be a violation or non-compliance with the policy, violator(s) party may be sanctioned in accordance with company regulations or the prevailing legislation.

3. GCG Guidelines (Code Of Corporate Governance)

Code of Corporate Governance is a reference prepared by Barata Indonesia in implementing management based on Good Corporate Governance (GCGC) principles. This Code of Corporate Governance governs corporate governance bodies structures (GMS, Board of Commissioners, and Directors), corporate governance processes, corporate governance bodies supporting organs and corporate governance processes.

PT Barata Indonesia's Code of Corporate Governance been prepared and approved by President Director and President Commissioner with a Joint Decree No. 05/DECOM/BRT/I/2013 and K 13 343b November 14, 2013 regarding PT Barata Indonesia (Persero) GCG Implementation Guidelines.

Untuk detail dari *Board Manual*, *Code of Conduct*, dan *Code of Corporate Governance* PT Barata Indonesia (Persero) dapat diunduh publik melalui situs resmi PT Barata Indonesia (Persero) yaitu www.barata.com.

PT Barata Indonesia (Persero) Board Manual, Code of Conduct, and Code of Corporate Governance details are downloadable publicly through the official website of PT Barata Indonesia (Persero): www.barata.com.

ASESMEN TERHADAP PENERAPAN GCG PERUSAHAAN

Assessment On The Implementation Of Corporate GCG

PROSEDUR PELAKSANAAN ASESMEN (STRUKTUR DAN MEKANISME GCG)

Untuk pengukuran terhadap efektivitas penerapan GCG sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan termasuk Barata Indonesia agar kredibilitas pelaksanaan tata kelola yang baik senantiasa terpelihara dan dapat ditingkatkan. Dimana secara berkala Perseroan melaksanakan asesmen yang dilakukan oleh konsultan independen maupun oleh tim kerja yang berasal dari internal Perseroan (*self-assesment*) yang telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Direksi dan memiliki kewenangan tertentu agar proses penilaian berjalan independen. Pelaksanaan asesmen dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu untuk mengidentifikasi serta mencari tahu adakah kelemahan-kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus Perseroan untuk segera ditindak lanjuti.

Struktur GCG dari Organ Utama dan Organ Pendukung. Organ Utama terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sedangkan Organ Pendukung GCG adalah Sekertaris Perusahaan, Satuan Pengawas Internal, Komite Audit & Komite lainnya. Uraian tentang Organ Utama dan Organ Pendukung akan dijelaskan dalam sub bab berikutnya.

Landasan yuridis dan prosedur pelaksanaan asesmen GCG di Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER -01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Kriteria yang digunakan untuk assesmen atas penerapan GCG pada Barata Indonesia, yaitu Berdasarkan Keputusan

Procedure For Implementing Assessment (Structure And GCG Mechanism)

Assessing GCG implementation effectiveness is required by all companies including Barata Indonesia so that the credibility of good governance implementation of is always maintained and may be improved. The Company periodic assessments is conducted by independent consultants as well as by internal self-assessment team that has been appointed through the Board of Directors decree and has certain authority so that the assessment process runs independently. The assessment is conducted using certain methods to identify and find out if there shall be weaknesses that need to get special attention from the Company to be followed up immediately.

GCG Structure from Main and Supporting Organs. Main Organ consists of General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners and Directors. Whereas the GCG Supporting Organ is Corporate Secretary, Internal Audit Unit, Audit Committee & other Committees. A description of the Main and Supporting Organs will be explained in the next sub-chapter.

The juridical foundation and procedures in implementing GCG assessments in the Company refer to State Minister of SOE Regulation No.PER-09/MBU/2012 regarding Amendments to State Minister of SOE Regulation No.PER-01/MBU/2011 regarding Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises.

The criteria used for assessment of GCG implementation in Barata Indonesia are based on Ministry of SOE Secretary

Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara yang diterbitkan pada tanggal 6 Juni 2012 ("BUMN Scorecard").

Tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*). Pada Badan Usaha Milik Negara 6 aspek yang diukur yaitu :

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS;
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi & Transparansi;
6. Aspek Lainnya.

decree No.SK-16/S.MBU/2012 regarding Parameter Indicators for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in State-owned Enterprise issued on June 6, 2012 ("BUMN Scorecard").

Regarding Parameter Indicators for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation. In the State Owned Enterprise there are 6 measured aspects as follows:

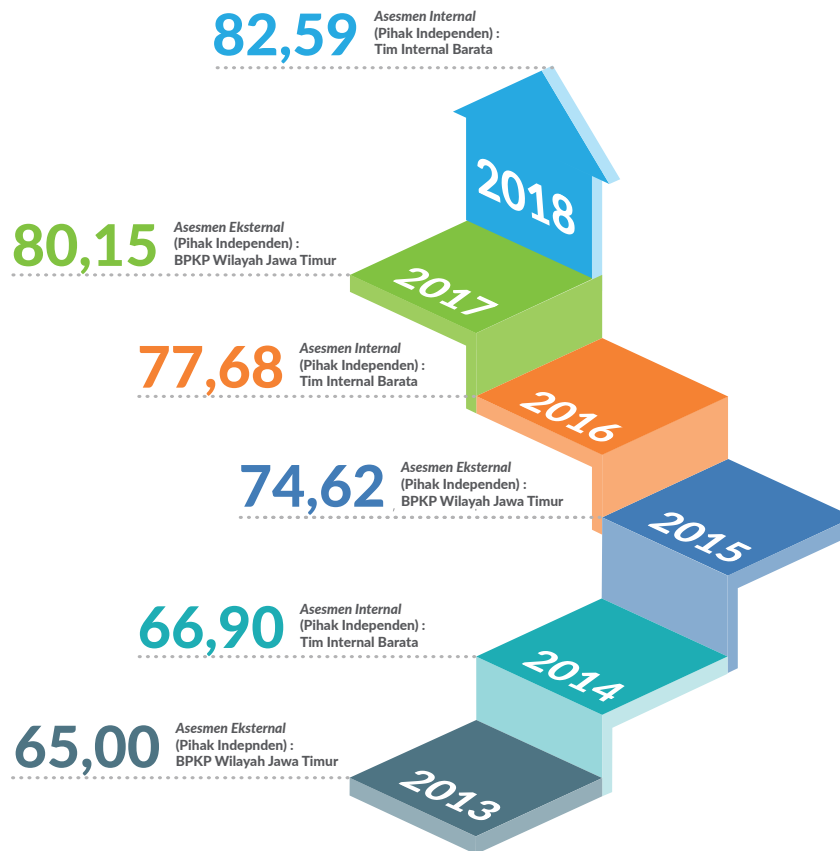
- 1) Commitment to Sustainable Governance Implementation;*
- 2) Shareholders and GMS;*
- 3) Board of Commissioners;*
- 4) Board of Directors;*
- 5) Information Disclosure & Transparency;*
- 6) Other Aspects.*

HASIL PENILAIAN PENERAPAN GCG SETIAP TAHUN (PENGUKURAN IMPLEMENTASI GCG) *GCG Assessment Results Every Year (GCG Implementation Assessment)*

Perseroan melakukan evaluasi atau assessment atas pelaksanaan praktik GCG dengan tujuan mengukur kedalaman implementasi praktik GCG sekaligus mendapatkan umpan balik bagi perbaikannya di masa mendatang. Barata Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan pengukuran Penerapan GCG secara berkala yang dilaksanakan setiap tahun. Apresiasi yang sangat baik atas penerapan GCG, dimana skor Assessment *Good Corporate Governance* (GCG) Barata Indonesia selama tahun 2013 – 2018 mengalami peningkatan seperti terlihat dibawah ini :

The Company conducts an assessment of GCG practices implementation with the aim to measure GCG practices implementation while at the same time getting feedback for future improvements. Barata Indonesia is committed to conducting periodic GCG Implementation assessment that are carried out every year. A very good appreciation for GCG implementation, where Barata Indonesia's Good Corporate Governance (GCG) score during 2013 - 2018 has increased as shown below:

SKOR ASESMEN GCG
SKOR *Assesment* GCG



HASIL PENILAIAN PENERAPAN GCG TAHUN 2018

Barata Indonesia telah melaksanakan evaluasi atau penilaian secara internal (self assessment) atas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Surat Tugas	: SK Direksi K 19 002 tanggal 7 Januari 2019
<i>Letter Number Assignment</i>	<i>Board of Directors Decree K 19 002 dated 7 January 2019</i>
Waktu Pelaksanaan	: 7 Januari – 7 Maret 2019
<i>Time</i>	<i>: 7 January - 7 March 2019</i>
Pihak yang Melakukan Assessment	: Tim Internal Self Assessment GCG Tahun 2018
<i>Parties Conducting Assessment</i>	<i>: GCG Internal Self Assessment Team in 2018</i>
Kriteria yang digunakan	: SK -16/S.MBU/ 2012
<i>Criteria used</i>	<i>: SK -16 / S.MBU / 2012</i>

Perolehan nilai (skor) atas penerapan GCG tahun 2018 sebesar 82,587 dengan predikat “Baik”. Hasil penilaian tersebut menunjukkan peningkatan nilai atas penerapan GCG di Perusahaan, yakni dari nilai 80,151 di tahun 2017

Results Of GCG Implementation Assessment Of In 2018

Barata Indonesia has conducted self assessment on Good Corporate Governance (GCG) implementation for the period ended on December 31, 2018, with the following details:

The score for the implementation of GCG in 2018 is 82.587 with the title “Good”. The results of the assessment showed an increase in GCG implementation score in the Company, from 80,151 in 2017 to 81,708 in 2018 or up by 1,557 points (an

menjadi 81,708 di tahun 2018 atau naik sebanyak 1,557 point (peningkatan 1,943% dari tahun lalu).

increase of 1.943% from a year ago).

Adapun hasil dari penilaian (*assessment*) GCG tahun 2018 PT Barata Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :

The results of the 2018 GCG assessment of PT Barata Indonesia (Persero) are as follows

Aspek Pengujian (Evaluation Aspect)	Bobot (Quality)	Pencapaian Tahun Buku 2018 Achievement in 2018		Penjelasan Description
		Nilai (Score)	Pencapaian (%)	
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation</i>	7,00	6,594	94,20%	Sangat Baik <i>Very Good</i>
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal <i>Shareholders and GMS/Capital Owners</i>	9,00	8,852	98,36%	Sangat Baik <i>Very Good</i>
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <i>Board of Commissioners/Supervisory Board</i>	35,00	29,672	84,78%	Baik <i>Good</i>
Direksi <i>Directors</i>	35,00	30,746	87,85%	Sangat Baik <i>Very Good</i>
Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9,00	6,721	74,68%	Cukup Baik <i>Satisfactory</i>
Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5,00	-	-	
Skor Keseluruhan <i>Total Score</i>	100,00	82,587		
Kualifikasi Keseluruhan Kualitas GCG <i>Overall Qualification of GCG Quality</i>		" Baik " "Good"		

Keterangan :

0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik

Legends :

0-50: Bad | 50-60: Less Satisfactory | 60-75: Satisfactory | 75-85: Good | 85-100: Very Good

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan evaluasi dari Tim Pelaksana Penerapan GCG, yakni Tim Internal Self Assessment GCG (Barata), menyatakan bahwa pelaksanaan evaluasi atau assesment penerapan GCG yang dilakukan oleh PT Barata Indonesia (Persero) telah memenuhi kesesuaian dan telah diimplementasikan dengan "Baik" berdasarkan Kerangka Acuan Pelaksanaan Assessment GCG menggunakan parameter SK-16/S-MBU/2012.

From the activities that have been conducted based on assessment from GCG Internal Self Assessment Team (Barata), stated that the assessment of GCG implementation by PT Barata Indonesia (Persero) has met conformity and has been well implemented and scored as "Good" based on the Terms of Reference for GCG Assessment Implementation using SK-16/S-MBU/ 2012 parameter.

Hasil evaluasi terhadap penerapan GCG di Perseroan menjadi masukan yang penting bagi penerapan GCG pada masa yang akan datang. Penerapan GCG menjadi lebih bermakna dan rencana perbaikan atau penyempurnaannya senantiasa dilakukan secara berkala. Tindak lanjut atas rencana aksi yang didasari dengan komitmen semua pihak terkait akan meningkatkan *performance*, dan *good corporate image* dari PT Barata Indonesia (Persero).

The results of GCG implementation assessment in the Company are important inputs for GCG implementation in the future. GCG implementation becomes more meaningful and improvement plan is always conducted regularly. Follow-up on the action plan based on the commitment of all relevant parties will improve performance, and good corporate image of PT Barata Indonesia (Persero).

REKOMENDASI HASIL ASSESSMENT GCG

Recommendation Of GCG Assessment Results

Berdasarkan hasil *assessment* atau evaluasi atas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di tahun 2018, diperoleh beberapa rekomendasi sebagai berikut :

Based on the results of an assessment or Good Corporate Governance (GCG) implementation in 2018, several recommendations were obtained as follows:

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
Aspek I. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>1st Aspect. Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation</i>			
1.	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala. <i>The company has Good Corporate Governance (GCG Code) Guidelines that are reviewed and updated regularly</i>	Pedoman GCG (<i>Code of Corporate Governance</i>) dan Board Manual agar dilakukan peninjauan dan pemutakhiran. <i>Code of Corporate Governance and Manual Board for review and updating.</i>	Kekuatan : - Pedoman GCG (<i>Code of Corporate Governance</i>) telah disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama dengan Surat Keputusan Bersama Nomor 05/DEKOM/BRT/I/2013 dan K 13 343b tanggal 14 November 2013. Kelemahan : - Pedoman GCG yang tersebut belum ditinjau atau dimutakhirkan terlihat dari adanya ketidaksinkronan muatan Program Pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru antara Pedoman GCG dengan <i>Board Manual</i>. Pada Pedoman GCG untuk penyelenggara program pengenalan atas Komisaris baru merupakan tanggung jawab Komisaris Utama, sedangkan pada <i>Board Manual</i> atas program tersebut menjadi tanggung jawab Sekretaris Perusahaan. - Di sisi lain belum diatur program pengenalan bagi anggota Direksi baru pada Pedoman GCG <i>Strength:</i> <i>Code of Corporate Governance (GCG) has been approved by the President Director and President Commissioner with a Joint Decree NO 05 / DECOM / BRT / I / 2013 and K 13 343b dated November 14, 2013.</i> <i>Weaknesses:</i> <i>GCG Guidelines have not been reviewed or updated can be seen from the inconsistencies between the contents of the new Introduction Program for members of the Board of Commissioners between GCG Guidelines and Manual Board. GCG Guidelines for organizers of the introduction program for the new Commissioners are the responsibility of the President Commissioner, while in Board Manual the program is the responsibility of the Corporate Secretary.</i> <i>On the other hand, an introduction program for new members of the Board of Directors has not been regulated in GCG Guidelines</i>

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
2.	Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala. <i>The company has a Code of Conduct that is reviewed and updated regularly.</i>	Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) agar memuat nilai-nilai perusahaan, dan penghormatan kepada Hak Intelektual <i>Code of Conduct shall contains company values, and respect for Intellectual Rights</i>	Kekuatan : • Pedoman perilaku (<i>Code of Conduct</i>) telah diterbitkan melalui Keputusan Bersama No. SKB 16 001 tanggal 18 Juli 2016, kemudian telah diperbahatui dengan Surat Keputusan Bersama Nomor : SKB 17 001 tanggal 04 Januari 2017. • Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) telah ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama. • <i>Code of Conduct</i> memuat : (a) komitmen insan Barata, (b) pengaturan benturan kepentingan, (c) aturan pemberian & penerimaan hadiah, meminta imbalan, jamuan bisnis, pemberian donasi, (d) komitmen terhadap keselamatan, kesehatan kerja & lingkungan, (e) pemberian pelatihan, jenjang karir, kesempatan kerja, (f) perlindungan informasi perusahaan, (g) pengaturan & larangan insider trading, (h) komitmen pemeliharaan aset, (i) pernyataan bahwa perusahaan tidak memberikan kontribusi politik dan tidak berafiliasi ke partai politik manapun, (j) etika dengan stakeholders, (k) adanya sanksi atas pelanggaran, (l) pernyataan integritas, (m) mekanisme penegakan Pedoman Perilaku, (n) pedoman perilaku telah dimutakhirkan. Kelemahan : • Belum memuat nilai – nilai perusahaan • Belum memuat penghormatan kepada hak intelektual. <i>Strength:</i> • <i>Code of Conduct has been issued through Joint Decree No. SKB 16 001 dated July 18, 2016, then it has been renewed with a Joint Decree No. SKB 17 001 dated January 4, 2017.</i> • <i>Code of Conduct has been signed by the President Commissioner and the President Director.</i> • <i>Code of Conduct contains: (a) Barata employee commitments, (b) conflict of interest regulation, (c) rules for giving & receiving gifts, requesting for compensation, business meals, donations, (d) commitment to safety, health & environment, (e) provision of training, career paths, employment opportunities, (f) protection of company information, (g) regulation & prohibition of insider trading, (h) asset maintenance commitments, (i) statement that the company does not make political contributions and is not affiliated with the party any politics, (j) ethics with stakeholders, (k) the existence of sanctions for violations, (l) statement of integrity, (m) enforcement mechanism of the Code of Conduct, (n) code of conduct has been updated.</i> <i>Weaknesses:</i> • <i>Does not yet contain company values</i> • <i>Has not contained respect for intellectual rights.</i>

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
3.	Penyelenggara Negara/Wajib Laporan memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. <i>State Administrators/ On parole understand policies / SOPs regarding compliance to report state assets.</i>	Agar 2 (dua) pejabat PT Barata Indonesia (Persero) yang belum menyampaikan LHKPN untuk segera menyampaikan. <i>So that 2 (two) officials from PT Barata Indonesia (Persero) who yet to submit LHKPN to report immediately.</i>	Kekuatan : • Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2017 di Kantor Walikota Surabaya. Kelemahan : • Pejabat PT Barata Indonesia (Persero) yang wajib menyampaikan LHKPN sesuai SK Direksi nomor : K 16 144a : Pejabat Eselon 1 sebanyak 23 orang, namun berdasarkan Rekapitulasi Status Laporan 31 Maret 2017 yang belum menyampaikan yaitu 3 (tiga) orang dari 26 orang atau 11,54 %. <i>Strength:</i> • <i>Implementation of socialization and technical guidance on LHKPN was held on October 11, 2017 at Surabaya Mayor's Office.</i> <i>Weaknesses:</i> • <i>PT Barata Indonesia (Persero) Officials who are required to submit LHKPN according to the Board of Directors' Decree No. K 16 144a: as many as 23 Echelon 1 Officials, but based on Recapitulation of Status Report March 31, 2017 there are only 3 (three) people from 26 people or 11 , 54%.</i>

Aspek II. Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal
IInd Aspect. Shareholders and GMS / Capital Owners

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
4.	Pemegang Saham/ RUPS / Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas. <i>Shareholders /GMS/ Capital Owners approve annual reports including ratification of financial statements and supervisory duties of the Board of Commissioners / Supervisory Board.</i>	Agar Risalah RUPS memuat pendapat-pendapat yang berkembang termasuk pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tgl 01-08-2011, menyatakan setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS dan keputusan RUPS. <i>So that that AGMS minutes include dissenting opinion, as regulated in Article 6 paragraph (4) of Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, stated that every RUPS shall have RUPS minutes, which shall contain at least time, agenda, attendance, opinions in AGM and AGM decisions.</i>	Kekuatan : - Perseroan tunduk pada UU No.40 (2007) pasal 66, UU No.19 (2003) pasal 23 dan Anggaran Dasar (AD) No.30 (2008) pasal 18 terkait dengan kewajiban Direksi untuk menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan. - Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS/Menteri, hal ini telah sesuai dengan ketentuan PER-01/MBU/2011, tgl 01 Agustus 2011 dan PER-09/MBU/2014 pasal 12 (6), Anggaran Dasar no.48 pasal 15(7). - Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan dan tugas pengawasan Dewan Komisaris telah dituangkan dalam RUPS. - Dalam risalah RUPS telah memuat Pembebasan Tanggung Jawab Kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan Pengawasan yang telah dilaksanakan dalam tahun buku yang berakhir 31 Des 2016. Kelemahan : - Tidak terdapat hasil telaahan/ pembahasan dan tanya jawab terkait laporan keuangan oleh Pemegang Saham yang tertuang dalam Risalah RUPS. - Tidak terdapat hasil telaahan/ pembahasan dan tanya jawab terkait laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh Pemegang Saham yang tertuang dalam Risalah RUPS. Hal ini tidak sesuai dengan PER-01/MBU/2011 pasal 6 (4), dimana setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS dan keputusan RUPS. <i>Strength:</i> <i>The Company complies with Article 66 of Law No. 40 (2007), Law No.19 (2003) Article 23 and Article of Association (AD) No.30 (2008) article 18 related to the Board of Directors' obligation to submit annual reports to the GMS after reviewed by the Board of Commissioners no later than 6 (six) months after the company's financial year.</i> <i>The Board of Commissioners has submitted a report on supervisory duties during the recent financial year to the GMS / Minister, this is in accordance with the provisions of PER-01 / MBU / 2011, August 1, 2011 and PER-09 / MBU / 2014 article 12 (6), Articles of Association no.48 article 15 (7).</i> <i>Approval of annual reports including ratification of financial statements and supervisory duties of the Board of Commissioners has been stated in the GMS.</i> <i>GMS minutes stipulated Board of Directors and Commissioners' acquit et discharge for its management and supervision actions in the financial year ended December 31, 2016.</i> <i>Weaknesses:</i> <i>There was no review/discussion result and questions and answers related to Shareholders financial statements contained in GMS Minutes.</i> <i>There was no review/discussion result as well as question and answer related to the Board of Commissioners' supervisory duties report by the Shareholders contained in GMS Minutes.</i> <i>This is not in accordance with PER-01 / MBU/2011 article 6 (4), where each GMS shall be prepared with a minutes of GMS which at least contains the time, agenda, participants, opinions developed at the GMS and the resolution of the GMS.</i>

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
5.	Pemegang Saham/ Pemilik Modal memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. <i>Shareholders / Capital Owners provide direction / guidance for the implementation of Good Corporate Governance to the Directors and Board of Commissioners / Supervisory Board.</i>	Agar Pemegang Saham membuat perencanaan hal-hal yang harus mendapat perbaikan (<i>area of improvement</i>) dari hasil asesmen GCG tahun sebelumnya. <i>Shareholders to create area of improvement plan from the previous year's GCG assessment results.</i>	Kekuatan : - Direksi agar mengusahakan pencapaian target RKAP 2017 dengan tetap mengacu pada prinsip prinsip GCG dan profesionalisme sesuai dengan ketentuan perundangan serta menyiapkan langkah antisipasi (<i>contingency plan</i>) sehingga target RKAP tetap dapat tercapai. Kelemahan : - PS belum membuat perencanaan <i>area of improvement</i> (hal-hal yang harus mendapat perbaikan). dari hasil asesmen GCG tahun sebelumnya. <i>Strength:</i> <i>The Board of Directors seek to achieve 2017 RKAP targets by still adhering to GCG principles and professionalism as stipulated by laws and prepared anticipatory measures so that RKAP targets can still be achieved.</i> <i>Weaknesses:</i> <i>PS has not created area of improvement plan from previous year's GCG assessment results.</i>
Aspek III. Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas <i>IIIrd Aspect. Board of Commissioners / Supervisory Board</i>			

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
6.	Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas sesuai kebutuhan. <i>The Board of Commissioners / Supervisory Board conducted training programs to improve the Board of Commissioners/ Supervisory Board members' competence as needed.</i>	Direkomendasikan kepada Dewan Komisaris agar membuat laporan hasil kegiatan atas seminar/ <i>training</i> yang diikutinya. <i>It is recommended to the Board of Commissioners to make a report on the results of seminars/ trainings that they enrolled.</i>	Kekuatan : - Kebijakan pelatihan bagi Dewan Komisaris tertuang dalam Board Manual (2017) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama No.K 17 157a pada poin "Peningkatan Kapabilitas". Dimana untuk anggaran dan program pelatihan anggota Dewan Komisaris telah disampaikan dalam RKAP. - Dekom dianggarkan untuk mengikuti 1 x pelatihan. Untuk realisasinya Dekom telah mengikuti pelatihan "Peran Dewan Komisaris & Dewan Pengawas Dalam Rangka Mendorong Kemajuan Perusahaan" (tercapai sebesar 100%). Kelemahan : - Perencanaan program pelatihan untuk Dewan Komisaris yang tersaji pada RKAP masih bersifat global dalam satu mata anggaran yaitu "Seminar", tidak terinci pada tema/materi seminar yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kapabilitas anggota Dekom. Sehingga dapat menunjang tugas-tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi Perusahaan. - Dewan komisaris yang mengikuti kegiatan seminar/pelatihan belum membuat laporan kegiatan dan menyampaikannya ke Komisaris Utama sebagaimana diwajibkan dalam Board Manual. <i>Strength:</i> <i>The Board of Commissioners training policy is stipulated in the Board Manual (2017) specified in the Joint Decree No. K 17 157a on the "Capacity Capability" point. Where for the Board of Commissioners members' budget and training program have been submitted in RKAP.</i> <i>The Board of Commissioners is budgeted to participate in 1 x training. For its realization, the Board of Commissioners has participated in "The Role of the Board of Commissioners & Supervisory Board in Promoting Company Progress" training (reached 100%).</i> <i>Weaknesses:</i> <i>Planning of the Board of Commissioners training programs is stipulated in RKAP in general, namely "Seminar", and has no detail on seminar theme/ material which is expected to improve the Board of Commissioners members quality and competence. So that it may support supervisory duty as well as advisory duty to the Company's Board of Directors.</i> <i>The Board of Commissioners who enrolled in the seminar/training program did not prepare activity report and submit it to the President Commissioner as required in the Board Manual.</i>

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
7.	Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas. <i>The Board of Commissioners/ Supervisory Board has policies and conduct duties division among the Board of Commissioners/ Supervisory Board's members.</i>	Komisaris Utama agar menetapkan secara tertulis tentang pembagian tugas Dewan Komisaris yang mencakup seluruh tugas bidang direksi. <i>President Commissioner shall determine the Board of Commissioners duties division in writing which covers all directories duties.</i>	Kekuatan : -- Kelemahan : - Pembagian tugas Dewan Komisaris (2017) belum dilakukan secara tertulis/formal yang mencakup seluruh bidang tugas direksi seperti yang telah dilakukan pada tahun 2013, namun menunjukan dua orang anggota Dekom sebagai Ketua Komite Audit dan Komite PMR telah dilakukan. Strength: - Weaknesses: <i>The Board of Commissioners duties division (2017) has not been stipulated in writing/ formally covering all areas of directories duties as it was in 2013, but the appointment of two Board of Commissioners members as heads of Audit Committee and PMR Committee has been conducted.</i>
8.	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan. <i>The Board of Commissioners provides directions on essential matters regarding changes in business environment which are expected to have a major impact on the company's business and performance in a timely and relevant manner.</i>	Komisaris utama agar menginstruksikan Komite Dewan Komisaris untuk menyusun mekanisme/ prosedur untuk menjamin ketersediaan informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang berdampak pada perusahaan secara tertulis. <i>President Commissioner instructs the Board of Commissioners' Committee to establish a mechanism/ procedure to ensure the availability of business environment information and its problems that affect the company in writing.</i>	Kekuatan : - Kriteria tentang informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang mungkin berdampak pada perusahaan tercantum dalam SKB Dekom dan Direksi PT BI Nomor : 05/DEKOM/BRT/I/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan GCG PT BI, Bab V.2 huruf b. - Peninjauan secara berkala dan penyesuaian visi misi perusahaan dengan adanya perubahan lingkungan perusahaan, yang dilakukan melalui penyusunan RJPP 2017-2021 dan telah disampaikan oleh Dewan Komisaris pada pada Ragab untuk selalu review, apakah visi misi masih selaras dengan program perusahaan. - Visi misi ditelaah terakhir tahun 2012 dan dituangkan dalam RJPP tahun 2012-2016. Kelemahan : - Tidak terdapat permasalahan/tantangan (ancaman dan peluang) yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan, yang tidak direspon oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Strength: <i>Criteria for information on the business environment and the problems that might have an impact on the company are listed in the joint Decree of the BoC and BOD of Barata Indonesia No. 05/DEKOM/BRT/I/2013 regarding Barata Indonesia's GCG Implementation Guidelines, Chapter V.2 b.</i> <i>Periodic review and adjustment of the company's vision and mission with changes in the company's environment, carried out through the preparation of RJPP 2017-2021 and has been submitted by the Board of Commissioners to joint meeting for review, whether the vision and mission are still in line with the company's program.</i> <i>The mission vision was reviewed last time in 2012 and set forth in the RJPP for 2012-2016.</i> Weaknesses: <i>There was no problem / challenges (threats and opportunities) that occur and have a significant impact on the performance of the company, which is not responded by the Board of Commissioners / Supervisory Board.</i>

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
9.	Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari <i>Stakeholders</i> (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ataupun penyampaian. <i>The Board of Commissioners within the limits of its authority, responding to suggestions, expectations, problems and complaints from stakeholders (customers, suppliers, creditors and employees) that are submitted directly to the Board of Commissioners/ Supervisory Board or non direct submission.</i>	Dewan Komisaris agar membuat mekanisme untuk merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari stakeholder dan menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan. <i>The Board of Commissioners shall establish a mechanism to respond / follow up on suggestions, problems or complaints from stakeholders and submit advice to the Board of Directors on the necessary solutions.</i>	Kekuatan : - Tidak ada permasalahan/keluhan dari stakeholder yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, karena permasalahan/keluhan dari stakeholder yang disampaikan kepada Direksi telah ditindaklanjuti dengan baik baik melalui Rapat gabungan maupun permintaan tertulis dewan komisaris. - Semua permasalahan hubungan dengan stakeholder yang berdampak pada kinerja perusahaan sudah dibahas oleh Dewan Komisaris melalui Rapat interna Dekom dan Rapat gabungan dengan direksi. Kelemahan : - Dewan Komisaris belum memiliki mekanisme untuk merespon/ menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari stakeholder dan menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan secara tertulis baik dalam Anggaran Dasar dan Pedoman GCG. <i>Strength:</i> <i>There was no problem/complaint from stakeholders which submitted to the Board of Commissioners, because the problem(s)/complaint(s) from the stakeholders submitted to the Board of Directors have been properly followed up through joint meetings or written requests from the Board of Commissioners.</i> <i>All issues relating to stakeholders that have an impact on company performance have been discussed by the Board of Commissioners through the Board of Commissioners internal meetings and joint meetings with directors.</i> <i>Weaknesses:</i> <i>The Board of Commissioners yet to have a mechanism to respond / follow up on suggestions, problems or complaints from stakeholders and give advice solutions to the Board of Directors in writing both Articles of Association and GCG Guidelines.</i>

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
10.	Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan. <i>The Board of Commissioners/ Supervisory Board provides direction on strengthening the company's internal control system.</i>	Dewan Komisaris agar: 1. Menyusun rencana kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/ rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya dalam RKT Dekom tahun berikutnya. 2. Melakukan telaah/ evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas. <i>The Board of Commissioners to:</i> 1. <i>Prepare a plan for monitoring and giving advice on the policies/ designs of the internal control system and its implementation in CTR in the following year.</i> 2. <i>Conduct a review / evaluation of the effectiveness of internal controls at the entity level</i>	Kekuatan : • Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan GCG Bab III.6.d. • Rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya secara eksplisit telah termuat dalam Program Kerja Dekom. • Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya. • Kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern. Kelemahan : • Dewan Komisaris memberikan masukan atas kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya pada tingkat operasional/aktivitas, namun belum pada tingkat entitas. Strength: • <i>There is Board of Commissioners policy regarding supervision and giving advice on internal control system policies/designs and its implementation as outlined in the GCG Implementation Guidelines Chapter III.6.d.</i> • <i>The Board of Commissioners' plan regarding supervision and giving advice on internal control system policies / designs and its implementation is explicitly stipulated in the Board of Commissioners Work Program.</i> • <i>The Board of Commissioners perform supervision and advice on the internal control system policies/designs and its implementation.</i> • <i>Adequate quality at the Board of Commissioners / Supervisory Board direction regarding the effectiveness of the internal control system.</i> Weaknesses: • <i>The Board of Commissioners provides input on internal control system policies / designs and its implementation at the operational / activity level, but not at the corporate level.</i>

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
11.	Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan. <i>The Board of Commissioners/ Supervisory Board provides direction on company risk management.</i>	Direkomendasikan kepada Dewan Komisaris agar: 1. Melakukan telaah terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan mencakup seluruh proses manajemen risiko al. identifikasi, penilaian respon dan mitigasi risiko secara entitas/korporat. 2. Meningkatkan kualitas atas arahan Dewan Komisaris tentang manajemen risiko perusahaan, mencakup seluruh proses manajemen risiko al. identifikasi, penilaian respon dan mitigasi risiko secara entitas/korporat. <i>It is recommended that the Board of Commissioners: 1. Conduct a review of the policies and implementation of company risk management already covering the entire risk management process, such as identification, assessment of response and risk mitigation corporately. 2. Improving the Board of Commissioners' direction quality on corporate risk management already covering the entire risk management process, such as identification, assessment of response and risk mitigation corporately.</i>	Kekuatan : • Terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko perusahaan dan pelaksanaannya yang dituangkan dalam Board Manual. • Kegiatan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan telah dituangkan secara global dalam Program kerja Dewan Komisaris. • Dalam Program kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko telah terdapat kegiatan Evaluasi Triwulanan terkait penerapan Manajemen Risiko di Barata Indonesia berdasarkan Laporan Triwulanan yang disusun oleh Biro Manajemen Risiko Barata Indonesia. Kelemahan : • Belum dilakukan telaah atas kebijakan manajemen risiko yang ada. • Kualitas atas arahan Dewan Komisaris tentang manajemen risiko perusahaan belum memadai, karena belum mencakup seluruh proses manajemen risiko al. identifikasi, penilaian respon dan mitigasi risiko secara entitas/korporat. <i>Strength:</i> • <i>There is Board of Commissioners/ Supervisory Board policy regarding supervision and giving advice on the company's risk management policies and its implementation as outlined in the Board Manual.</i> • <i>The Board of Commissioners activities regarding supervision and provision of advice on policies and corporate risk management implementation have been generally stipulated in the Board of Commissioners work program.</i> • <i>In Risk Management Monitoring Committee work program there have been Quarterly Evaluation activities related to the Risk Management implementation in Barata Indonesia based on the Quarterly Report prepared by Barata Indonesia Risk Management Bureau.</i> <i>Weaknesses:</i> • <i>There was no a review of existing risk management policies.</i> • <i>The Board of Commissioners Quality on the direction regarding corporate risk management is not yet adequate, because it has not covered the entire risk management process such as identification, evaluation of responses and risk mitigation corporately.</i>

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
12.	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan. <i>The Board of Commissioners provides direction on the information technology system used by the company</i>	Direkomendasikan kepada Dewan Komisaris agar: 1. Menyusun rencana kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dalam RKAT Dekom tahun berikutnya. 2. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi berdasarkan Master Plan IT Perusahaan. 3. Meningkatkan kualitas atas arahan Dewan Komisaris tentang sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya. <i>It is recommended that the Board of Commissioners to:</i> 1. Prepare a plan for monitoring and providing provide advice on the company's information technology system policies in the next year's RKAT. 2. Conduct supervision and advice on information technology systems policies and implementation based on the Company's IT Master Plan. 3. Improve the Board of Commissioners direction quality regarding the company's information technology system and its implementation.	Kekuatan : • Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya . Kebijakan ini termuat dalam Board of Manual Bab III huruf E, Angka 3, Wewenang DewanKomisaris, poin o, sub poin 3). • Dekom telah melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan teknologi informasi perusahaan, yaitu : Saran Pembangunan/Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Perusahaan, yaitu: Dekom sangat memandang perlu agar perusahaan berinvestasi membangun/mengembangkan sistem teknologi informasi yang lebih handal mencakup seluruh aspek bisnis perusahaan guna memudahkan proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Kelemahan : • Arahan Dewan Komisaris atas konsep master plan IT belum dilaksanakan. • Arahan belum mencakup aspek TI sesuai IT Master Plan. <i>Strength:</i> • <i>The Board of Commissioners has a policy regarding supervision and providing advice on the company's information technology system policies and its implementation. This policy is stipulated in the Board of Manual Chapter III letter E, Number 3, the Board of Commissioners' Authorities, point o, sub point 3).</i> • <i>The Board of Commissioners has supervised and provided advice on the Company's information technology policies and implementation, namely: Suggestions for the Company's Information Technology Systems Development , namely: the Board of Commissioners strongly considers it necessary for companies to invest in developing more reliable information technology systems covering all aspects of the company's business to facilitate the monitoring and decision making process.</i> <i>Weaknesses:</i> • <i>The Board of Commissioners direction on the IT master plan concept has not been implemented</i> • <i>Directives do not cover the IT aspects according to the IT Master Plan.</i>

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
13.	Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK). <i>The Board of Commissioners provides direction regarding accounting policies and preparation of financial reports in accordance with SAK.</i>	Direkomendasikan kepada Dewan Komisaris agar: 1. Menetapkan kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Menyusun rencana kegiatan pembahasan terhadap kebijakan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam RKAT Dekom tahun berikutnya. <i>It is recommended that the Board of Commissioners to:</i> 1. <i>Establish policies regarding supervision and advice on accounting policies and preparation of financial reports in accordance with SAK.</i> 2. <i>Prepare a plan for discussing policies and preparing financial statements in accordance with SAK in the Board of Commissioners' RKAT in the following year.</i>	Kekuatan : • Anggaran Dasar : Pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dimana sejalan dengan kewajiban Direksi sesuai dengan Board Manual Bab II Direksi Huruf F. Kelemahan : • Namun kebijakan tersebut tidak secara tegas mengatur mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. • Saran Dewan Komisaris terbatas pada penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya, namun saran tersebut belum mencakup kebijakan akuntansi. <i>Weaknesses:</i> • <i>However, the policy does not explicitly regulate the supervision and advice provision on accounting policies and preparation of financial statements in accordance with prevailing accounting standards.</i> • <i>The Board of Commissioners' advice is limited to the preparation of financial statements and its implementation, but these suggestions do not include accounting policies.</i>

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
14.	Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut. <i>The Board of Commissioners provides direction on quality and service policy and its implementation.</i>	Direkomendasikan kepada Dewan Komisaris agar : 1. Menyusun rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut dalam RKAT Dekom tahun berikutnya. 2. Melakukan pembahasan dan arahan kebijakan mutu dengan mengoptimalkan fungsi Komite Komisaris. <i>It is recommended that the Board of Commissioners to:</i> 1. <i>Prepare a plan for supervision and advice provision on quality and service policy as well as its implementation in the Board of Commissioners' RKAT in the following year.</i> 2. <i>Conduct discussion and direction of quality policy by optimizing the Board of Commissioners' Committees function.</i>	Kekuatan : • Dekom telah memiliki kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelaksanaannya (<i>Board Manual</i> Bab III huruf E, Angka 3, poin o, sub poin 6) • Komite Dekom telah berperan aktif dalam melakukan analisa mengenai mutu produk melalui kajian transaksional atas setiap usulan direksi maupun setiap triwulanan atas laporan manajemen triwulanan yang dikirimkan kepada Dekom. Kelemahan : • Saran mencakup praktik pengelolaan mutu, namun belum pada level kebijakan mutu. <i>Strength:</i> • <i>The Board of Commissioners has a policy regarding supervision and advice provision on the quality policy and its implementation (Board Manual Chapter III letter E, Number 3, point o, sub point 6)</i> • <i>The Board of Commissioners' Committees have an active role in analyzing product quality through a transactional review of the Board Of Directors' proposal and quarterly management report sent to the Board of Commissioners.</i> <i>Weaknesses:</i> • <i>Suggestions include quality management practices, but yet to describe quality policy level.</i>
15.	Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan dan pelaksanaannya. <i>The Board of Commissioners conduct supervision of the policy of managing subsidiaries / joint ventures and their implementation.</i>	Direkomendasikan kepada Dewan Komisaris agar menyusun: 1. Kebijakan Dewan komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan. 2. Rencana pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan dalam Program kerja/Rencana Kerja Tahunan Dekom tahun berikutnya. <i>It is recommended to the Board of Commissioners to compile:</i> 1. <i>The Board of Commissioners' policy regarding supervision and advice provision on subsidiary management policies.</i> 2. <i>Plan to discuss policies and implementation of subsidiaries management in the Work Program / Annual Work Plan for the following year.</i>	• Kebijakan Dekom mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan secara khusus tidak diatur, namun Dekom memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas usulan Direksi terhadap penempatan direksi anak perusahaan sebagaimana diatur dalam <i>Board Manual</i> Tahun 2017 Bab II Direksi, halaman 23. • Tidak terdapat rencana pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan pada RKT Dekom (PT BITEK). • <i>The Board of Commissioners' policy regarding supervision and advice provision on the subsidiaries' management policies is not specifically regulated, but the Board of Commissioners' has the authority to provide recommendations on the Board of Directors' proposals for the appointment subsidiaries' of directors as regulated in Chapter II of the Board of Directors in 2017, page 23.</i> • <i>There is no plan to discuss the and subsidiaries management and policies in The Board of Commissioners' RKT (PT BITEK).</i>

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
16.	Peran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan perusahaan / perusahaan patungan. <i>the Board of Commissioners role in the selection of prospective members of the Board of Directors and Commissioners of subsidiary / joint venture company.</i>	Direkomendasikan kepada Dewan komisaris untuk menyusun Kebijakan Dekom mengenai pengangkatan direksi dan dewan komisaris perusahaan perusahaan patungan. <i>It is recommended to the Board of Commissioners to compile Policy regarding the appointment of the Board of Directors and Commissioners of subsidiary/joint venture company</i>	• Kebijakan Dekom mengenai pengangkatan direksi dan dewan komisaris perusahaan perusahaan patungan tidak diatur , namun Dekom memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas usulan Direksi terhadap penempatan direksi anak perusahaan (<i>Board Manual</i>, Bab II, hal.23) • Dekom tidak memberikan penilaian atas usulan direksi PT BITEK oleh usulan Direksi PT Barata Indonesia, karena tidak ada pergantian direksi BITEK di tahun 2017. • <i>The Board of Commissioners policy regarding the appointment of directors and board of commissioners of joint venture companies is not regulated, but The Board of Commissioners has the authority to recommend the Board of Directors' proposals for the appointment of directors of subsidiaries (Board Manual, Chapter II, p.23)</i> • <i>The Board of Commissioners did not assess on PT BITEK directors proposal by PT Barata Indonesia directors, because there was no change in BITEK Board of Directors in 2017.</i>
.	Dewan komisaris/ Pengawas memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakann tersebut. <i>The Board of Commissioners has a conflict of interest policy and consistently implement these policies.</i>	Direkomendasikan kepada Dewan Komisaris agar : 1. Memperbaharui surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan setiap awal tahun. 2. Membuat Pakta Integritas dalam setiap rekomendasi Dekom atas usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS. <i>It is recommended that the Board of Commissioners to:</i> 1. <i>Renew no conflict of interest statement at the beginning of each year.</i> 2. <i>Create an Integrity Pact in each of the Board of Commissioners recommendation on the Board of Directors Actions proposal who must obtain recommendations from the Board of Commissioners and GMS approval.</i>	Kekuatan : • Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai (potensi) benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan Pasal 15 ayat 17. • Adanya surat pernyataan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan pada awal pengangkatan, telah diperbaharui setiap awal tahun menjadi satu dengan pembaruan pakta integritas. • Sekretaris Perusahaan telah membuat daftar khusus yang berisi laporan /keterangan kepemilikan saham Dewan Komisaris dan keluarganya pada PT BI atau perusahaan lainnya. Kelemahan : • Dewan Komisaris belum membuat pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS. Strength: • <i>The Board of Commissioners has policy regarding (potential) conflict of interest that may interfere with the Board of Commissioners duties implementation which regulated in the Articles of Association, Article 15 paragraph 17.</i> • <i>The Board of Commissioner has no conflict of interest statement at the beginning of the appointment which has been renewed at the beginning of each year together with integrity pact renewal.</i> • <i>Corporate Secretary has prepared a special list containing reports / statements of the Board of Commissioners' shares and its families in PT Barata Indonesia or other companies.</i> Weaknesses: • <i>The Board of Commissioners has not made an Integrity pact attached to the Board of Directors' Action Proposals which shall obtain recommendations from the Board of Commissioners and AGM approval.</i>

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
18.	Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas m e l a k u k a n evaluasi terhadap p e l a k s a n a a n keputusan hasil rapat sebelumnya. <i>The Board of Commissioners evaluates the implementation of the decisions of the previous meeting results.</i>	Direkomendasikan kepada Dewan Komisaris agar selalu mencantumkan tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dalam risalah rapat berjalan. <i>It is recommended to the Board of Commissioners to always include follow-up results of the previous meeting in the minutes of the meeting.</i>	Sebagian risalah rapat gabungan dan rapat internal mencantumkan tindak lanjut hasil rapat sebelumnya. Tidak seluruh hasil rapat Dewan Komisaris sebelumnya telah ditindak lanjuti tergantung pada materi persoalan dan tingkat kendali atas solusi permasalahan. Bila solusi atas masalah tergantung pada pihak ketiga, Dekom memberikan arahan untuk penyelesaiannya dalam beberapa tahapan. <i>Some of joint meetings and internal meetings minutes include follow-up results of previous meetings. Not all results of the Board of Commissioners previous meeting have been followed up, depending on the material issues and the control level over the problem solutions. If the solution to the problem depends on the third party, the Board of Commissioners provides direction for its resolution in several stages.</i>
19.	Sekretaris Dewan K o m i s a r i s / Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan rapat/ pertemuan antara Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya. <i>The Board of Commissioners' Secretary holds the Board of Commissioners internal meetings the Board of Commissioners meetings with Shareholders / Capital Owners, Directors and other relevant parties.</i>	Direkomendasikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar: a. mengadministrasikan dengan tertib seluruh risalah rapat Dewan Komisaris baik risalah rapat internal maupun gabungan. b. membuat risalah rapat sesuai ketentuan diantaranya mencantumkan pendapat yang berbeda serta mendokumentasikan dinamika rapat. c. mendistribusikan seluruh salinan risalah rapat kepada dewan komisaris baik hadir maupun tidak hadir dalam rapat. <i>It is recommended that the Secretary of the Board of Commissioners to:</i> a. <i>orderly administering all the Board of Commissioners' minutes of meeting, both minutes of internal and joint meetings.</i> b. <i>Compile minutes of meetings according to the provisions including to mention dissenting comments and documenting the meeting dynamics.</i> c. <i>distribute all copies of the minutes of meeting to the Board of Commissioners both who present and not present at the meeting.</i>	- Risalah rapat hanya mencantumkan keputusan hasil rapat saja, tidak mencantumkan (1) pendapat yang berbeda (<i>dissenting comments</i>) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris (bila ada); (2) jalannya rapat (dinamika rapat); - Sebagian anggota Dewan Komisaris tidak menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, meskipun komisaris yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat tersebut. <i>Minutes of meetings only contained the results of the meeting decision, and did not contain (1) dissenting comments to what was decided at the Board of Commissioners' Meeting (if any); (2) meeting dynamics;</i> <i>Some members of the Board of Commissioners did not receive the Board of Commissioners Minutes of Meeting copy, whether the Board of Commissioners member(s) is present or not present at the Meeting.</i>

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
Aspek IV. Direksi <i>IVth Aspect the Board of Directors</i>			
20.	Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (<i>core business</i>) perusahaan. <i>The Board of Directors establishes operational policies and SOPs for the company's core business processes.</i>	Direkomendasikan kepada direksi agar meningkatkan pengendalian internal untuk menekan terjadinya penyimpangan atas prosedur. <i>It is recommended to THE Board of Directors to improve internal controls to suppress irregularities in procedures.</i>	Kekuatan : - Kebijakan /pedoman penyusunan SOP tertuang dalam dokumen OA 131 001 tentang Kesepakatan Pedoman & Prosedur Pelaksanaan Penyusunan dan Pengendalian Sistem Manajemen Mutu. - Seluruh proses bisnis utama memiliki SOP - Sosialisasi atas SOP dilakukan oleh pejabat eselon 1 di unit masing-masing. - Penyempurnaan SOP dilakukan secara berkala berdasarkan hasil reviu terhadap SOP maupun berdasarkan hasil pemeriksaan SPI. Kelemahan : - Seluruh SOP proses bisnis inti perusahaan telah dilaksanakan, namun berdasarkan hasil audit SPI, masih terdapat penyimpangan terhadap prosedur namun tidak mengakibatkan kerugian material. <i>Strength:</i> <i>Policies for preparing SOPs are stipulated in OA 131 001 document regarding the Agreement on Guidelines & Procedures for Implementing the Compilation and Control of Quality Management System.</i> <i>All major business processes have an SOP</i> <i>Socialization of SOP is conducted by echelon 1 officials in each unit.</i> <i>Improvement of SOPs is conducted periodically based on the SOPs review results and based on IAU audit results.</i> <i>Weaknesses:</i> <i>All the Company's core business processes SOPs have been conducted, but based on the results of the IAU audit, there are still irregularities from the procedure but not material losses.</i>
21.	Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/ Pemilik Modal. <i>The Board of Directors has a Long Term Plan (RJPP) that is ratified by the GMS/Capital Owner.</i>	Direkomendasikan kepada direksi agar menyampaikan Rancangan RJPP secara tepat waktu, yaitu kepada Dewan Komisaris selambatnya 30 September sebelum periode RJPP berjalan dan kepada Pemegang Saham selambatnya 31 Oktober sebelum periode RJPP berjalan. <i>It is recommended to the Board of Directors to submit the Long Term Plan (RJPP) in a timely manner, to the Board of Commissioners no later than September 30 before the current RJPP period and to the Shareholders no later than October 31 before the current RJPP period.</i>	Kekuatan : - Pedoman penyusunan RJPP ditetapkan pada <i>Operating Procedure</i> (OPA), <i>Board Manual</i>, maupun Pedoman GCG - Terdapat rancangan RJPP yang sesuai dengan pedoman penyusunan RJPP yang ditetapkan oleh kementerian. - Direksi telah melakukan reviu/pembahasan rancangan RJPP yang disusun. Direksi telah meminta masukan/tanggapan rancangan RJPP kepada komisaris. Direksi telah membahas masukan/tanggapan komisaris atas rancangan RJPP Kelemahan : - Penyampaian atas RJPP masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. <i>Strength:</i> <i>Long Term Plan preparation guidelines are set in the Operating Procedure (OPA), Board Manual, and GCG Guidelines</i> <i>There is a Long Term Plan draft that complies with the guidelines for preparing Long Term Plan determined by the ministry.</i> <i>The Board of Directors has reviewed / discuss the Long Term Plan draft. The Board of Directors has requested Long Term Plan input / response to the Board of Commissioners. The Board of Directors has discussed the Board of Commissioners' input / responses regarding Long Term Plan draft.</i> <i>Weaknesses:</i> <i>Submission of RJPP is still not in accordance with applicable regulations.</i>

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
22.	Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/Menteri/Pemilik Modal. <i>The Board of Directors has a Corporate Work Plan and Budget (RKAP) which is ratified by the GMS / Minister / Capital Owner.</i>	Direkomendasikan kepada Direksi agar menyampaikan rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris selambatnya tanggal 15 September sebelum tahun RKAP berjalan. <i>It is recommended to the Board of Directors to submit Corporate Work Plan and Budget (RKAP) draft to the Board of Commissioners no later than September 15 before the current RKAP year.</i>	Kekuatan : • Terdapat pedoman penyusunan RKAP dalam Operating Procedure Agreement (OPA) mengenai Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Nomor OA 112 001. • Barata telah menyusun RKAP sesuai dengan OA 112 001. RKAP 2017 telah sesuai dengan RJPP 2017-2021. • Direksi telah melakukan reviu terhadap rancangan RKAP 2017 melalui rapat dengan manajemen (Manajemen Review) dan dalam rapat internal direksi. Kelemahan : • Penyampaian rancangan RKAP 2017 kepada Dekom melalui Rapat Gabungan tanggal 6 Oktober 2016 (tidak tepat waktu). <i>Strength:</i> • <i>There are guidelines for Corporate Work Plan and Budget (RKAP) preparation in the Operating Procedure Agreement (OPA) regarding the Preparation of Corporate Work Plans and Budgets (RKAP) Number OA 112 001.</i> • <i>Barata Indonesia has compiled Corporate Work Plan and Budget (RKAP) in accordance with OA 112 001. The 2017 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) complies with RJPP 2017-2021.</i> • <i>The Board of Directors has reviewed 2017 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) draft through Management Review and The Board of Directors internal meetings.</i> <i>Weaknesses:</i> • <i>Submission of 2017 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) draft to the Board of Commissioners through joint Meeting on October 6, 2016 (not on time).</i>
23.	Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan. <i>The Board of Directors places employees at all levels of office in accordance with job specifications and has a succession plan for all positions within the company.</i>	Direkomendasikan kepada Direksi agar mengisi jabatan yang masih kosong sesuai dengan struktur organisasi. <i>It is recommended to the Directors to fill vacant positions in accordance with the organizational structure.</i>	Kekuatan : • Adanya pedoman atau kebijakan perusahaan mengenai jenjang karir, sistem dan prosedur promosi, demosi dan mutasi di perusahaan (SK nomor K13 335a ttg Sistem Pengembangan Karir PT BI tanggal 4 November 2013). • Perusahaan telah memiliki database kompetensi. Promosi pejabat eselon I telah dilakukan dengan <i>assessment</i> dengan mempertimbangkan jenjang karir, diusulkan pimpinan dan kompetensi yang dimiliki. • Terdapat daftar nominatif jabatan yang dimiliki oleh masing-masing bagian. Kelemahan : • Masih terdapat beberapa jabatan yang masih kosong, dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi. Jabatan yang lowong tersebut dirangkap oleh pejabat di atasnya. <i>Strength:</i> • <i>The existence of company guidelines or policies regarding career paths, systems and procedures for promotion, demotion and mutation in the company (SK number K13 335a regarding PT Barata Indonesia's Career Development System on 4 November 2013).</i> • <i>The company has a competency database. Promotion of echelon I officials has been carried out with an assessment by considering career paths, proposed by the leadership and the competencies they have.</i> • <i>There is a nominative list of positions held by each section.</i> <i>Weaknesses:</i> • <i>There are still a number of vacant positions due to changes in organizational structure. The vacant position is held by officials above.</i>

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
28.	Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan. <i>The Board of Directors responds to current external issues regarding changes in the business environment and its problems, in a timely and relevant manner.</i>	Direkomendasikan kepada direksi agar menetapkan mekanisme rapat manajemen (<i>management review</i>). <i>It is recommended to the Board of Directors to establish a management review mechanism.</i>	1. Mekanisme pembahasan isu-isu tersebut dilakukan dalam rapat pimpinan setiap satu bulan sekali (MR) yg dihadiri Direksi dan pejabat puncak satu level bawah Direksi, namun mekanisme tersebut belum ditetapkan secara tertulis. 2. Permasalahan-permasalahan telah dibahas dan terlihat dalam risalah Rapat Direksi. Permasalahan-permasalahan telah diinventarisir dan dituangkan dalam laporan triwulan. 3. Direksi membahas perubahan lingkungan bisnis yang berdampak besar bagi perusahaan dengan Dewan Komisaris. 4. Tidak terdapat perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak signifikan pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan, yang tidak direspon oleh Direksi. <i>1. The mechanism for discussing these issues is conducted at management meeting every once a month (MR), which is attended by the Board of Directors and top officials at the lower levels of the Board of Directors, but the mechanism has not been stipulated in writing.</i> <i>2. Problems have been discussed and mentioned in the Board of Directors minutes of Meeting. Problems have been inventoried and outlined in quarterly reports.</i> <i>3. The Board of Directors discusses changes in the business environment that have a major impact on the company with the Board of Commissioners.</i> <i>4. There is no change in the business environment and problems that have a significant impact on the company's business and company performance, which are not responded to by the Directors.</i>
29	Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. <i>The Board of Directors reports the performance management system implementation to the Board of Commissioners.</i>	Direkomendasikan kepada direksi agar berkoordinasi dengan Pemegang Saham dan Dewan Komisaris terkait penyusunan kebijakan penilaian kinerja direksi secara individual <i>It is recommended to the Board of Directors to coordinate with Shareholders and the Board of Commissioners regarding the preparation of policies for evaluating the directors performance individually.</i>	• Direksi telah menyusun laporan kinerja dan laporan manajemen triwulanan, semesteran dan tahunan. Laporan-laporan tersebut disampaikan kepada dewan komisaris dan pemegang saham secara tepat waktu. • Tidak terdapat target kinerja direksi secara individual. • <i>The Board of Directors has compiled quarterly, semester and annual performance reports and management reports. These reports are submitted to the Board of Commissioners and shareholders in a timely manner.</i> • <i>There are no performance targets for directors individually.</i>

30. Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
The Board of Directors implements information technology system in accordance with the established policies.
- Direkomendasikan kepada direksi agar:
1. Meningkatkan penerapan IT Masterplan untuk mendukung data access dan data governance serta data maintenance backup dapat dilakukan secara realtime.
 2. Menambahkan kebijakan pelaporan TI pada IT Masterplan.
 3. Meningkatkan kinerja TI untuk memenuhi harapan perusahaan sesuai dengan IT Masterplan.
 4. Meningkatkan rasio SDM yang mampu menerapkan TI sesuai dengan IT Masterplan.
 5. Melakukan Audit TI baik oleh SPI maupun auditor eksternal.
- It is recommended that the Board of Directors:*
1. Increasing IT Masterplan implementation to support data access, governance and maintenance backup data can be conducted in real time.
 2. Include IT reporting policies to IT Masterplan.
 3. Improve IT performance to meet company expectations in accordance with IT Masterplan.
 4. Increase HR ratio which capable to implement IT in accordance with IT Masterplan.
 5. Conduct IT Audits by both IAU and external auditors.
- Kebijakan Teknologi Informasi tertuang dalam IT Masterplan tahun 2015-2019.
 - Pada praktiknya data access dan data governance belum ada dan data maintenance backup dilakukan secara harian dan bulanan belum realtime. Sudah ada kebijakan pengelolaan data namun kebijakan pelaporan TI belum ada.
 - Belum terdapat audit atas TI baik oleh SPI maupun auditor eksternal.
 - Terdapat laporan mengenai pelaksanaan sistem TI kepada dekom dalam laporan manajemen triwulanan tahun 2017 namun belum terdapat audit TI yang dapat dilaporkan.
 - *Information Technology Policy stipulated in the IT Masterplan for 2015-2019.*
 - *In practice, data access and data governance do not yet exist and maintenance backup data is carried out on a daily and monthly basis. There is already a data management policy but there is no IT reporting policy.*
 - *There has not been an audit of IT by either the SPI or the external auditor.*
 - *There are reports on the implementation of IT systems to the decrees in the quarterly management report in 2017 but no IT audits can be reported.*

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
31.	Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut. <i>The Board of Directors conduct goods and services procurement that are profitable for the company, both of the goods and services price and quality.</i>	Direkomendasikan kepada direksi agar: 1. Melakukan proses pengadaan barang/jasa dengan terbuka dengan mengumumkan pada media massa dan website perusahaan. 2. Menambahkan jangka waktu pada setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa dalam pedoman pengadaan perusahaan. 3. Menginformasikan nilai total HPS kepada calon penyedia barang/jasa (nilai total HPS tidak rahasia) 4. Menggunakan metode eproc untuk seluruh pengadaan barang/jasa. <i>It is recommended to the Board of Directors to:</i> 1. Conduct open procurement process of goods and services by announcing to mass media and company websites. 2. Include time period at each stage of procurement of goods and services process in the company's procurement guidelines. 3. Informing Owner Estimate (OE) total value to prospective providers of goods / services (Non-confidential Owner Estimate) 4. Using e-proc method for all goods and services procurement.	Kekuatan : • Pedoman pengadaan barang dan jasa disahkan oleh Direktur Utama nomor : K 18 204b tanggal 15 Juni 2018 tentang Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Keperluan Produksi dan Non Produksi; dan OPA Pengadaan yang ditandatangani oleh manajer biro <i>management supply chain</i>. • Pedoman/kebijakan pengadaaan telah dipublikasikan/ dapat diakses pemasok/calon pemasok, telah dapat diakses melalui situs www.barata.com • Terdapat rencana pengadaan barang/jasa yang dihitung berdasarkan kebutuhan perusahaan • Pada setiap kegiatan pengadaan barang/jasa perusahaan telah memiliki HPS yang disusun oleh masing-masing manajer divisi. HPS bersifat tertutup. Kelemahan : • Proses Pengadaan barang/jasa belum sepenuhnya terbuka karena hanya rekanan terdaftar saja yang dapat mengikuti proses pengadaan barang/jasa. • Tidak seluruh pengadaan barang dan jasa tidak diumumkan di media komunikasi (koran, <i>website</i>, papan pengumuman). Pengadaan belum sepenuhnya menggunakan <i>e-proc</i>. <i>Strength:</i> • <i>Guidelines for the procurement of goods and services are ratified by President Director No. K 18 204b dated June 15, 2018 regarding Improvement of Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services for Production and Non-Production Purposes; and OPA Procurement signed by supply chain management bureau manager.</i> • <i>Guidelines / procurement policies have been published / may be accessed by suppliers / prospective suppliers, can be accessed through the site www.barata.com</i> • <i>There is a plan to procure goods and services that are calculated based on company needs</i> • <i>In every procurement of goods and services activities, the Company already has OE compiled by each division manager. OE is confidential.</i> <i>Weaknesses:</i> • <i>The process of procurement of goods and services has not been fully open because only registered partners may participate in procurement of goods / services process</i> • <i>Not all procurement of goods and services is not announced in media (newspapers, websites, notice boards). Procurement has not fully used e-proc.</i>

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
32.	Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>) dan/atau perusahaan patungan. <i>The Board of Directors implement subsidiary or joint ventures governance.</i>	Direkomendasikan kepada direksi agar menyusun kebijakan pengelolaan anak perusahaan yang antara lain mengatur tentang namun tidak terbatas pada : 1. Pengangkatan Direksi dan Komisaris anak perusahaan 2. Penetapan target kinerja anak perusahaan 3. Penetapan remunerasi direksi dan komisaris anak perusahaan. <i>It is recommended to directors to develop a subsidiary management policy which, among other, regulates but is not limited to:</i> 1. <i>Appointment of subsidiary's Board of Directors and Commissioners</i> 2. <i>Determination of Subsidiary's performance target</i> 3. <i>Determination of subsidiary's Board of Directors and Commissioners remuneration</i>	- PT Barata Indonesia (Persero) belum memiliki kebijakan pengelolaan anak perusahaan. <i>PT Barata Indonesia (Persero) has not subsidiary management policy</i>
33.	Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi mengamankan investasi dan aset perusahaan. <i>The Board of Directors establishes and implements internal control system to protect the Company's investment and assets.</i>	Direkomendasikan kepada direksi agar: 1. Menginstruksikan kepada Kepala SPI untuk melakukan evaluasi atas pengendalian internal tingkat entitas. 2. Menyusun Internal Control Report berdasarkan hasil evaluasi pengendalian internal oleh SPI. <i>It is recommended that the Board of Directors to:</i> 1. <i>Instruct the Head of IAU to audit corporate level internal controls.</i> 2. <i>Arrange Internal Control Report based on internal controls audit result by SPI.</i>	- Kebijakan pelaksanaan SPIP diatur dalam board manual dan pedoman GCG perusahaan. - Direktur utama dan direktur keuangan telah menandatangani asersi laporan keuangan 2017 (<i>audited</i>). - Tidak terdapat entitas lain yang dikonsolidasikan dalam Lapkeu Barata. - Tidak terdapat hasil evaluasi SPI atas pengendalian internal tingkat entitas. Terdapat hasil evaluasi atas pengendalian internal di tingkat operasional/aktivitas yaitu evaluasi SPI setiap pelaksanaan audit. Hasil evaluasi SPI ditingkat operasional/aktivitas cukup memadai. - Perusahaan belum menyusun <i>internal control report</i>.

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
34.	Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan.	Direkomendasikan kepada direksi untuk: 1. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanganan keluhan pelanggan. 2. Menyusun rencana kerja tindak lanjut hasil survey kepuasan pelanggan. 3. Menyusun laporan hasil survey kepuasan pelanggan yang menunjukkan hasil indeks kepuasan secara kuantitatif. <i>It is recommended that the Board of Directors to:</i> 1. <i>Increase the effectiveness of customer complaints handling implementation.</i> 2. <i>Prepare a follow-up work plan for the customer satisfaction surveys results</i> 3. <i>Compile customer satisfaction surveys reports that show quantitative satisfaction index results.</i>	• Perusahaan telah menindaklanjuti seluruh keluhan pelanggan yang ada, umumnya terkait dengan kesesuaian produk. • Perusahaan secara internal melakukan survey kepuasan pelanggan yang dilaksanakan setiap tahun. • Tidak terdapat rencana kerja tindak lanjut survey kepuasan pelanggan. • Hasil survey kepuasan pelanggan berupa hasil kualitatif, tidak terdapat dokumen yang menunjukkan hasil indeks kepuasan secara kuantitatif. • <i>The company has followed up on all existing customer complaints, generally related to product suitability.</i> • <i>Every year the Company conducts internal customer satisfaction surveys.</i> • <i>There was no follow-up work plan for customer satisfaction surveys.</i> • <i>Customer satisfaction survey results are in the form of qualitative results, there are no documents that show quantitative satisfaction index results.</i>
35.	Pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan. <i>Company's employees' relation Implementation.</i>	Direkomendasikan kepada direksi agar menyusun rekomendasi hasil survey kepuasan karyawan dan memantau tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. <i>It is recommended that the Board of Directors to: provide recommendations on employees satisfaction survey and monitor the follow-up of these recommendations.</i>	• Untuk metode penilaian kepuasan karyawan Tidak menggunakan kesimpulan kuantitatif dalam bentuk indeks kepuasan karyawan. • Tidak ada rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan survey kepuasan karyawan, sehingga tidak ada tindak lanjut yang dapat dipantau. • <i>Employee satisfaction assessment methods do not use quantitative conclusions in the form of employee satisfaction index.</i> • <i>There was no recommendation from the employee satisfaction survey implementation, so that no follow-up could be monitored.</i>

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
36.	SPI melaksanakan fungsi pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan. <i>IAU conducts internal supervision function to provide added value and improve the Company's operations.</i>	Direkomendasikan kepada direksi agar: 1. Menginstruksikan kepada Kepala SPI untuk menyusun PKPT berbasis risiko pada periode berikutnya. 2. Menginstruksikan kepada Kepala SPI untuk menyampaikan PKPT kepada komite audit untuk direviu. 3. Menginstruksikan kepada Kepala SPI untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan/audit sesuai dengan PKPT 4. Menginstruksikan kepada Kepala SPI untuk meningkatkan rekomendasi yang berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. <i>It is recommended that the Board of Directors to:</i> 1. <i>Instruct the Head of IAU to prepare risk-based PKPT in the following period.</i> 2. <i>Instruct the Head of the IAU to submit the PKPT to the audit committee for review.</i> 3. <i>Instruct the Head of IAU to conduct audit duties in accordance with PKPT</i> 4. <i>Instruct the Head of IAU to improve recommendations related to good corporate governance implementation.</i>	• Untuk PKPT SPI belum sepenuhnya audit berbasis risiko • Laporan hasil kegiatan SPI ditujukan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada auditee. • Laporan hasil kegiatan pengawasan intern SPI disampaikan kepada Komisaris melalui Komite Audit dalam rapat pembahasan triwulanan. Namun SPI belum melaksanakan assessment atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi pengawasan intern. • SPI memberikan rekomendasi (masukan atas prosedur) berkaitan dengan proses Tata Kelola (<i>governance</i>) dalam LHA. • SPI memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan pengendalian intern kepada perusahaan • Ada pedoman untuk memantau tindak lanjut hasil rekomendasi auditor internal dan eksternal dalam dokumen Internal Audit Charter dan Pedoman Pengawasan Intern • Laporan monitoring tindak lanjut oleh SPI disampaikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit. <i>• For IAU PKPT risk-based audits are not yet fully implemented</i> <i>• Reports on IAU activities results are addressed to President Director with a copy to the auditee.</i> <i>• Reports on IAU activities results internal audit activities are submitted to the Board of Commissioner through Audit Committee in quarterly discussion meetings. However, SPI has not yet implemented an assessment of the quality assurance program and improved internal supervision functions.</i> <i>• IAU provides recommendations (input on procedures) relating to LHA governance process.</i> <i>• IAU contributes to improving risk management and internal control to the company</i> <i>• There are guidelines for monitoring the follow-up of recommendations from internal and external auditors in Internal Audit Charter documents and Internal Audit Guidelines</i> <i>• Follow-up monitoring report by IAU submitted to the President Director and Audit Committee.</i>

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
37.	Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya <i>Corporate Secretary is equipped with supporting factors for its successful their duties implementation.</i>	Direkomendasikan kepada direksi agar: 1. Menyempurnakan struktur organisasi perusahaan dengan menempatkan Sekretaris Perusahaan di bawah Direktur Utama. 2. Pengangkatan / pemberhentian Sekretaris Perusahaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. <i>It is recommended to the Board of Directors to:</i> 1. <i>Improve the Company's organizational structure by appointing Corporate Secretary under President Director.</i> 2. <i>Appointment / dismissal of Corporate Secretary shall obtains the Board of Commissioners approval.</i>	• Sekretaris perusahaan telah memiliki kualifikasi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugasnya. • Uraian tugas sekretaris perusahaan diatur dalam Board Manual • <i>Corporate secretary has sufficient qualifications to perform its duties.</i> • <i>Corporate secretary's job description of the is regulated in the Board Manual</i>

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
38.	Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya <i>Corporate secretary performs its functions.</i>	Direkomendasikan kepada direksi agar: 1. Menginstruksikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk mendokumentasikan dinamika rapat maupun <i>dissenting opinion</i> dalam Notulen Rapat Direksi 2. Menginstruksikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk memasukkan rencana kerja pengenalan direksi baru dalam rencana kerja Sekretaris Perusahaan. 3. Menginstruksikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Direktur Utama sebagaimana telah diatur dalam Board Manual. 4. Menginstruksikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk menyusun laporan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. <i>It is recommended that the Board of Directors to:</i> 1. <i>Instruct Corporate Secretary to document meetings dynamics and dissenting opinions in the Board of Directors' Minutes of Meetings</i> 2. <i>Instructs Corporate Secretary to include work plans for the introduction of new directors in the Corporate Secretary's work plan.</i> 3. <i>Instruct the Corporate Secretary to report on its activities implementation to President Director as stipulated in the Board Manual.</i> 4. <i>Instruct Corporate Secretary to compile corporate level compliance report with the prevailing regulations.</i>	• Sekper telah memberikan informasi kepada <i>stakeholder</i> • Dalam fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian RUPS dan Rapat Direksi, dimana Sekper membuat, memelihara dan menyimpan risalah rapat direksi, namun risalah rapat tidak menggambarkan dinamika rapat maupun <i>dissenting opinion</i>, hanya mencantumkan poin poin simpulan rapat. • <i>Corporate Secretary has provided information to stakeholders</i> • <i>In the function of implementing and documenting the GMS and Board of Directors Meetings, where Corporate Secretary prepares, maintains and stores Board of Directors' minutes of meetings, but the minutes of the meeting do not describe meetings dynamics or dissenting opinions, only include meeting conclusion points</i>

No.	INDIKATOR/ PARAMETER <i>Indicators / Parameters</i>	REKOMENDASI <i>Recommendations</i>	ANALISIS PENERAPAN GCG <i>Analysis Of GCG Implementation</i>
39.	Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan. <i>The Cand ompany provides other media to communicate important company information policies.</i>	Agar mengupayakan untuk merealisasikan kegiatan pertemuan /gathering dengan <i>stakeholders</i> yang telah direncanakan. <i>To strive to realize planned meeting/gathering activities with stakeholders.</i>	Kekuatan : • Terdapat bulletin yang diterbitkan dengan nama Buletin B-Magz. • Buletin tersebut terbit secara triwulanan. Kelemahan : • Terdapat rencana pertemuan/gathering dengan <i>stakeholders</i> namun tidak terealisasi. <i>Strength:</i> • <i>There is a bulletin published under the name B-Magz Bulletin.</i> • <i>The bulletin is published quarterly.</i> <i>Weaknesses:</i> • <i>There are plans for meetings / gatherings with stakeholders but are not realized.</i>
40.	Perusahaan mengikuti <i>Annual Report Award</i> (ARA). <i>The Company participates in the Annual Report Award (ARA).</i>	Agar Laporan Tahunan diikutkan dalam <i>Annual Report Award</i> (ARA) dan berupaya masuk dalam 5 besar terbaik. <i>Annual Report to be participated in Annual Report Award (ARA) and to get in the top 5.</i>	Laporan Tahunan Perusahaan diikutkan dalam <i>Annual Report Award</i> (ARA) namun tidak masuk dalam 5 besar terbaik. <i>The Company's Annual Report is participated in the Annual Report Award (ARA) but is not included in the top 5 best.</i>

Seluruh rekomendasi hasil dari evaluasi atau *assessment* atas GCG oleh tim menjadi evaluasi dan perbaikan bagi Perusahaan, dan akan di tindaklanjuti pada tahun 2019.

All recommendations from the team's evaluation or assessment of GCG become an evaluation and improvement for the Company, and will be followed up in 2019.

SOSIALISASI, INTERNALISASI, DAN EVALUASI GCG

Dalam kaitannya dengan efektivitas dari penerapan GCG, Perseroan berpendapat bahwa hal ini harus didukung oleh seluruh pihak terkait, baik internal maupun eksternal Perusahaan. Sehingga diperlukan sarana berupa sosialisasi dan internalisasi untuk mendapatkan persamaa persepsi diberbagai level mengenai visi tata kelola Perseroan kedepan.

Kegiatan sosialisasi penerapan GCG secara spesifik bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam mengenai aturan dan tujuan penerapan GCG bagi Perseroan. Pemahaman tersebut harus disosialisasikan secara baik terhadap subjek-subjek pelaksananya, khususnya dalam lingkup internal Perseroan/ internalisasi. Hal tersebut disebabkan penerapan GCG banyak menitikberatkan pada kegiatan operasional Perseroan yang banyak melibatkan pihak-pihak terkait di dalamnya.

GCG Socialization, Internalization, And Evaluation

Related to the GCG implementation effectiveness, the Company believes that this shall be supported by all relevant parties, both the Company's internal and external. So that socialization and internalization are needed to develop common perceptions in various levels regarding the corporate governance future vision.

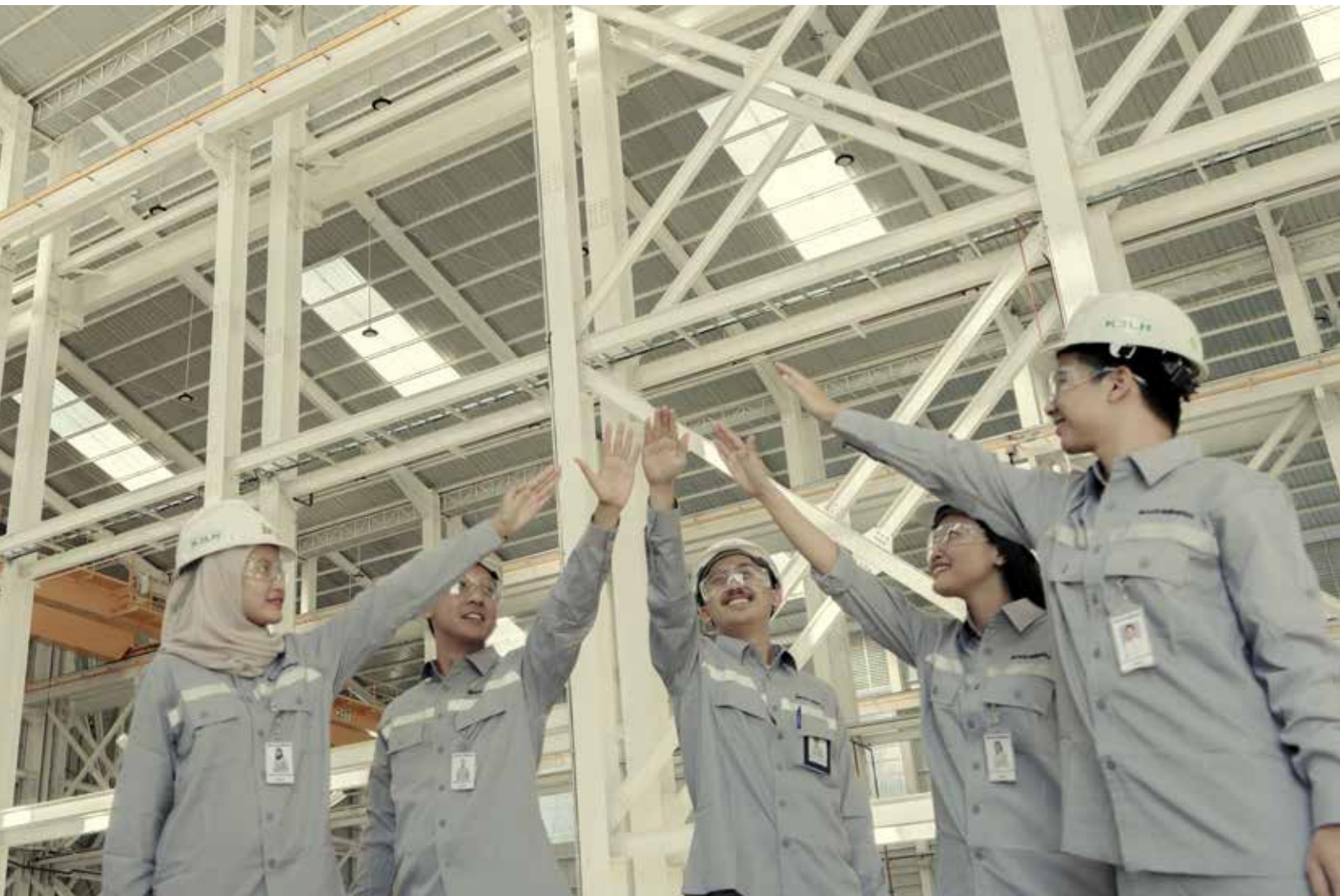
GCG implementation socialization specifically aims to provide an in-depth understanding GCG implementation rules and objectives for the Company. This understanding shall be well socialized on the subjects of the implementors, especially in the Company's internal / internalization scope. This is due to GCG implementation which focuses on the the Company's operational activities which involve many relevant parties.

Evaluasi diselenggarakan oleh Perseroan guna mengetahui dan mengukur kesesuaian antara praktik tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan dengan prinsip GCG. Kesesuaian tersebut penting diketahui untuk melihat efektivitas dari program implementasi yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pengembangan terhadap GCG dan perbaikan dari program implementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan.

Dalam perjalanan penerapan GCG selama ini, Perseroan senantiasa melaksanakan sosialisasi, internalisasi, serta evaluasi yang diselenggarakan secara bertahap. Kegiatan sosialisasi dilakukan jika terdapat aturan-aturan baru terkait penerapan GCG untuk kemudian dilakukan internalisasi agar aturan tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan kegiatan evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui asesmen ataupun *self-assessment* Perseroan sebagai sarana refleksi internal.

The evaluation was conducted by the Company to find out and measure good corporate governance practices suitability in the Company with GCG principles. The suitability is important to know to observe implementation program effectiveness. Based on the evaluations results, the development of GCG and improvement of its implementation program will be conducted sustainably.

In GCG implementation so far, the Company has always conducted socialization, internalization, and evaluations gradually. Socialization activities are conducted if there shall any new rules regarding GCG implementation to be internalized so that the rules can be conducted properly. While evaluation activities are conducted periodically through the Company self-assessment or by third party assesment as a means of internal reflection.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting Of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang selanjutnya disebut RUPS merupakan lembaga tertinggi Perseroan, sebagai wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPS Barata Indonesia adalah Menteri BUMN RI sebagai perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan pemegang 100% saham Perusahaan. Wewenang dimaksud tersebut, antara lain meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan Perseroan, mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Anggota Dewan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direktur dan lain-lain.

JENIS RUPS

Setiap tahun Barata Indonesia setidaknya menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS Tahunan, yaitu sebagai berikut :

- a. RUPS Tahunan diadakan setiap tahun, meliputi RUPS mengenai pengesahan atau persetujuan atas Laporan Keuangan dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan.
- b. RUPS lainnya/RUPS Luar Biasa yang diadakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

HAK PEMEGANG SAHAM

- a. Hak untuk menghadiri RUPS, memberikan suara dan persetujuan pada RUPS;
 - Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
 - Persetujuan perubahan modal;
 - Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;
 - Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Persetujuan pemindahan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
 - Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan prosentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
 - Persetujuan penggunaan laba;
 - Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang

General Meeting of Shareholders (GMS), hereinafter called GMS, is the Company's highest institution, as a forum for shareholders to make important decisions whose authority is not granted to the Board of Directors and Commissioners in accordance with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations. Barata Indonesia GMS is the Minister of State Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as a representative of the Government of the Republic of Indonesia who owned 100% of the Company's shares. The authorities, among others, to hold the Board of Commissioners and Directors accountability related to the Company's management, amend Articles of Association, appoint and dismiss the Board of Directors and Commissioners Members, deciding the duties division of and authorities among Directors and others.

Types Of GMS

Every year Barata Indonesia holds at least 2 (two) Annual GMS, as follows:

- a. Annual GMS is held annually, including GMS regarding Financial Report's ratification or approval and the Company's Work Plan & Budget.*
- b. Other GMS / Extraordinary GMS held at any time based on needs as stipulated in the Articles of Association.*

Shareholders Rights

- a. Right to attend the GMS, vote and approve the GMS;*
 - Approval regarding Articles of Association amendments;*
 - Approval regarding changes in capital;*
 - Approval regarding the appointment and dismissal of the Board of Directors and Commissioners members;*
 - Approval regarding merging, acquisition, separation and dissolution;*
 - Approval regarding the Board of Directors and Commissioners members remuneration;*
 - Approval regarding transfer of assets based on the Articles of Association which require GMS' approval;*
 - Approval regarding the participation and reduction of capital participation percentage in other companies which based on the Articles of Association which require GMS' approval;*
 - Approval regarding use of profits;*
 - Approval regarding non-operational investment and long-term financing based on the Articles of Association which*

- berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
- b. Hak untuk memperoleh informasi material mengenai pengelolaan perusahaan baik dari Dewan Komisaris maupun Direksi secara lengkap, tepat waktu, dan teratur;
 - c. Hak untuk memperoleh pembagian laba Perusahaan (*dividen*);
 - d. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktu meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa (RUPS-LB).

WEWENANG PEMEGANG SAHAM

- a. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Mengusulkan agenda RUPS;
- c. Menyetujui atau menolak Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan RKAP;
- d. Menetapkan target kinerja masing-masing Direksi dan Komisaris;
- e. Melakukan penilaian kinerja Direksi dan Komisaris;
- f. Menetapkan auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan;
- g. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Menetapkan anggaran dasar dan perubahannya;
- i. Meminta dan mengakses data, serta dokumen perusahaan.

MEKANISME DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

- a. **Tempat dan Pemanggilan RUPS**
 - 1. Semua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di adakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 2. Dapat dilakukan dimanapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia, jika dalam RUPS hadir dan/ atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui pelaksanaan RUPS tersebut;
 - 3. Atas poin kedua tersebut, RUPS dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat;
 - 4. Penyelenggaraan RUPS tersebut dilakukan atas

- require GMS' approval;*
- b. Right to obtain material information regarding the Company's management both from the Board of Commissioners and Directors in a complete, timely and regular manner;*
- c. Right to obtain the Company dividends;*
- d. Organizing GMS in the event that the Board of Directors and/or Commissioners fail to hold the Annual GMS and at any time request Extraordinary GMS implementation*

Shareholders Authorities

- a. Appoint and dismiss the Board of Directors and Commissioners members in accordance with the prevailing regulations;*
- b. Propose GMS agenda;*
- c. Approve or reject the Company's Long Term Plan (RJPP) and RKAP;*
- d. Establish performance targets for each of the Board of Directors and Commissioners members;*
- e. Conduct an assessment of the Board of Directors and Commissioners members performance;*
- f. Assign external auditors to audit financial statements;*
- g. Determine the Board of Directors and Commissioners members remuneration in accordance with the prevailing regulations;*
- h. Establish articles of association and its amendments;*
- i. Request and access data, as well as the Company's documents.*

Mechanism And Operation Of The Company's General Meeting Of Shareholders

- a. **Place and GMS Invitation**
 - 1. All General Meeting of Shareholders (GMS) are held at the Company's domicile or where the Company conducts its business activities which located in the territory of the Republic of Indonesia;
 - 2. May be hold anywhere in the territory of the Republic of Indonesia, if at GMS all shareholders present and / or represented and all shareholders approve GMS implementation;
 - 3. On the point above, GMS may make a decision if the decision is approved unanimously;
 - 4. GMS implementation is by the request of the following

permintaan pihak berikut ini, dengan cara pengajuan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya :

- Seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; atau
- Dewan Komisaris.

Surat tercatat tersebut disampaikan oleh Pemegang Saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris;

5. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS – Luar Biasa dengan didahului pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
6. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana yang telah diatur dalam Anggaran Perusahaan, maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Dimana pemanggilan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS dilaksanakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPS;
7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;
8. Perseroan wajib memberikan salinan hasil RUPS kepada pemegang saham secara Cuma-Cuma (jika diminta);
9. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, dan keputusan tersebut disetujui dengan suara yang bulat.

b. Ketua dan Berita Acara RUPS

1. Pelaksanaan RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir;
2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat danpaling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS;
3. Tanda tangan hasil RUPS tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris;
4. Isi atas risalah rapat adalah hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan (termasuk pendapat berbeda/ *dissenting opinion* , jika ada).

parties, by submitting to the Board of Directors a registered letter accompanied by the reasons:

- *One or more shareholders who have at least 1/10 (one tenth) part of the total shares issued by the Company with valid voting rights; or*

- *The Board of Commissioners.*

The registered letter is delivered by the Shareholder whose copy is submitted to the Board of Commissioners;

5. *The Board of Directors holds an Annual GMS and E GMS - with the prior invitation of the General Meeting of Shareholders (GMS) no later than 15 (fifteen) days from requested date for GMS implementation is received;*
6. *In the event that the Board of Directors or Commissioners not send GMS invitation as stipulated in the Corporate Budget, shareholders who requesting GMS implementation may send its own GMS invitations after obtaining permission from the Head of the District Court which covers the Company's domicile. Invitation is made no later than 14 days before GMS date, without considering the invitation and GMS date;*
7. *GMS invitations are send through registered mail and / or with advertisements in newspapers;*
8. *The Company shall provide GMS results copy to shareholders for free (if requested);*
9. *In the event that the invitations are not in accordance with the existing provisions, then GMS resolution remains valid if all shareholders with valid voting rights are present or represented, and the decision is approved unanimously.*

b. Chairperson and AGM Minutes

1. *GMS is chaired by one of the shareholders chosen by and from among those who present;*
2. *GMS minutes shall be made and signed by the chairman of the meeting and at least 1 (one) shareholder appointed from and by GMS participants;*
3. *Signature on GMS result is not required if the minutes of the GMS are made with a notary deed;*
4. *Minutes of meeting contains meetings dynamics and its decision (including dissenting opinions, if any).*

c. Kuota, Hak Suara dan Keputusan

1. RUPS dapat dilaksanakan jika paling sedikit 51% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar ini menentukan lain. Jika kuota tidak terpenuhi, maka bisa diadakan RUPS kedua;
2. Dalam pemanggilan RUPS tahap kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum;
3. RUPS kedua ini sah dan berhak mengambil keputusan, jika dalam RUPS paling sedikit 50% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar ini menentukan lain;
4. Dalam kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum RUPS ketiga;
5. Untuk pelaksanaan RUPS ketiga berdasarkan jumlah kuorum yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri serta perlu disampaikan juga untuk RUPS kedua telah dilaksanakan namun tidak mencapai kuorum;
6. Pemanggilan atas RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dan/atau ketiga dilaksanakan;
7. Untuk RUPS kedua dan ketiga dilaksanakan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilaksanakan.
8. Pemegang saham baik sendiri atau diwakilkan berdasarkan surat kuasa, berhak menggunakan hak suaranya sesuai jumlah saham yang dimilikinya.
9. Ketua rapat berhak meminta atau diperlihatkan surat kuasa tersebut pada waktu rapat dilaksanakan;
10. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
11. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan lain, dengan ketentuan pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.
12. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS;
13. Pemegang saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik, dengan

c. Quorum, Voting Rights and Decisions

1. *GMS can be held if at least 51% of the total shares with voting rights are present or represented, unless the statutory regulations and / or articles of association determine otherwise. If the quota is not met, then a second GMS can be held;*
2. *The second GMS invitation shall state that the first GMS has been implemented and has not reached the quorum;*
3. *The second GMS is valid and has the right to make a decision, if at the GMS at least 50% of the total shares with voting rights are present or represented, unless the statutory regulations and / or articles of association stipulate otherwise;*
4. *If the second GMS quorum it is not reached, then it can apply to the head of the district court whose legal area covers the Company's domicile at the request of the Company so that the third GMS quorum is stipulated;*
5. *For of the third GMS implementation based on the number of quorum stipulated by the Head of the District Court and also shall be mentioned that the second GMS to have been conducted but did not reach the quorum;*
6. *The second and third GMS invitation shall be send no later than 7 (seven) days before the second and / or third GMS is held;*
7. *For the second and third GMS to be held no sooner than 10 days and no later than 21 days after the previous GMS is held.*
8. *Shareholders either alone or represented by a power of attorney, have the right to use its voting rights according to the number of its shares.*
9. *Chairperson of the meeting has the right to request or be shown the power of attorney at the time the meeting is held;*
10. *All decisions taken based on negotiation for consensus:*
11. *If the consensus is not reached, the decision is valid if it is approved more than 1/2 of the total votes issued, unless the articles of association stipulate otherwise, with the provisions for voting on the person carried out with a non signed closed letter:*
12. *Blank voices or invalid votes are considered non-existent and are not counted in determining the number of votes issued at the GMS;*
13. *Shareholders can make legitimate decisions without holding a GMS physically, provided all Shareholders*

ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberi persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta mendatangi persetujuan tersebut. Keputusan ini diambil dengan cara ini, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

have been notified in writing and all shareholders approve the proposal submitted in writing and sign the agreement. The decision is taken in this way, has the same authority as the decision taken legally at the GMS.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN DAN REALISASINYA

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terselenggara pada tahun 2018 yaitu RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 tanggal 25 April 2018 dan RUPS tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018.

Adapun Keputusan dan Arahan RUPS tersebut adalah sebagai berikut:

A. Keputusan RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 tanggal 25 April 2018:

Keputusan RUPS:

1. Agenda 1:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 serta Laporan Penggunaan tambahan dana PMN yang berasal dari APBN 2016.

Keputusan RUPS

RUPS Menyetujui:

- Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2017;
- Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017;
- Laporan Penggunaan tambahan dana PMN yang berasal dari APBN 2016.

2. Agenda 2:

Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 sekaligus pemberian pelunasan dan pembesasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledigacquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.

Annual Gms Implementation And Its Realization

General Meeting of Shareholders (GMS) held in 2018 was GMS on the Annual Report Approval and Ratification of the 2018 Financial Statements of April 25, 2018 and GMS on the 2018 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and 2018 Partnership Program Work Plan and Budget and Community Development, December 21, 2018.

GMS decisions and directions are as follows:

a. GMS Decision regarding Annual Report Approval and Financial Statements Ratification for 2018 Fiscal Year dated April 25, 2018:

AGM Decision:

1. 1st Agenda:

Approval of the Company's Annual Report regarding the the Company's condition and operation during 2017 including the Board of Commissioners Supervisory Duties Implementation Report during 2017 and additional PMN funds usage Report from 2016 State Budget.

GMS decision

GMS Approved:

- The Company's Annual Report regarding the the Company's condition and operation during 2017;*
- The Board of Commissioners Supervisory Duties Implementation Report*
- Additional PMN funds usage Report from 2016 State Budget.*

2. 2nd Agenda:

Ratification of the Company's 2017 Financial Statements and at the same time providing full repayment and granted volledig acquit et decharge to the Board of Directors and Commissioners for the Company's management and supervision during 2017.

Keputusan RUPS

RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan PT Barata Indonesia (Persero) Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 6/LK/2/18 tanggal 5 Februari 2018 yang memberikan opini laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Barata Indonesia (Persero) dan entitas anak tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledigacquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pokok-pokok Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 sebagai berikut:

a. Laba/Rugi Komprehensif (Rp Milyar)

	2017	2016
Penjualan	1.193	703
Laba Usaha	80	49
Laba Tahun Berjalan	52	20

b. Posisi Keuangan (Neraca) (Rp Milyar) Agenda Ketiga

	2017	2016
Aktiva		
• Aktiva Lancar	2.183	1.349
• Aktiva Tidak Lancar	736	729
Total Aktiva	2.919	2.078
Liabilitas dan Ekuitas		
• Liabilitas	1.919	1.127
• Ekuitas	1.000	951
Total Liabilitas dan Ekuitas	2.919	2.078

GMS decision

GMS ratified PT Barata Indonesia (Persero) 2017 Financial Statements which was audited by KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro and Partners as stipulated in its report No. 6 /LK/2/18 dated February 5, 2018 which provided unqualified opinion in all material matters, PT Barata Indonesia (Persero) and its subsidiaries consolidated position as of December 31, 2017, as well as financial performance and cash flows for the year ended that date, in accordance with financial accounting standards in Indonesia while providing repayment and volledig acquit et decharge to the Board of Directors and Commissioners for its management and supervision actions during 2018, as long as these actions do not constitute a criminal offense or contravene the prevailing laws and procedures and recorded in the Company's Financial Statements and do contravene the prevailing laws.

The main points of the Company's Financial Report for 2018 are as follows

a. Comprehensive Profit / Loss (Rp billion)

	2017	2016
Sales	1.193	703
Operating	80	49
Current Year Profit	52	20

b. Financial Position (Balance Sheet) (Rp Billion) Third Agenda

	2017	2016
Aktiva		
• Current assets	2.183	1.349
• Non-Current Assets	736	729
Total Assets	2.919	2.078
Liabilities and Equities		
• Liabilities	1.919	1.127
• Equities	1.000	951
Total Liabilities and Equities	2.919	2.078

3. Agenda 3

Pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.

Keputusn RUPS

RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2018 telah diaudit oleh KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro dan Rekan sebagaimana dimuat dalam pelaporannya Nomor: 6d/LK/2/2018 tanggal 5 Februari 2018 dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Barata Indonesia (Persero) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, laporan aktivitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akutansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik” dapat disahkan, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan PKBL dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pokok-pokok Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun buku 2017 sebagai berikut:

a. Laporan Posisi Keuangan (Rp)

Total Aset	97.945.978
Total Liabilitas	0
Total Aset Neto	97.945.978

b. Laporan Aktivitas (Rp)

Pendapatan	4.587.678
Beban	152.233
Kenaikan Aset Bersih	4.435.445
Aset Bersih Awal Tahun	94.231.233
Aset Bersih Akhir Tahun	98.666.678

3. 3rd Agenda

Ratification of the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program Year 2018 as well as the repayment and granted volledig acquit et decharge to the Board of Directors and the Board of Commissioners for management and supervision actions that have been implemented during the 2017 Financial Year

Decision of the GMS

GMS ratified 2018 Partnership and Community Development Program Financial Report audited by KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro and Rekan as contained in its report Number: 6d / LK / 2/2018 dated February 5, 2018 with unqualified opinion, PT Barata Indonesia (Persero) Partnership and Community Development Program (PKBL) financial position for the year ended December 31, 2017, activity reports and cash flows for the year ended on that date in accordance with Public Company Accounting Standards without Public Accountability “can be ratified, at the same time provide full repayment and granted volledig acquit et decharge to the Board of Directors and Commissioners for its management and supervision actions during 2017, as long as these actions do not constitute a criminal offense or contravene the prevailing laws and procedures and recorded in PKBL Financial Report and not contravene the prevailing laws.

2017 Partnership Program and Community Development Program Report are as follows:

a. Financial Position Report (Rp)

Total Assets	97.945.978
Total Liabilities	0
Total Net Assets	97.945.978

b. Activities Report

Income	4.587.678
Expense	152.233
Net assets Increase	4.435.445
assets in the Beginning of Year	94.231.233
Net assets in the End of Year	98.666.678

4. Agenda 4

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017.

Keputusan RUPS

RUPS menetapkan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 51.615.018.095,-, semuanya digunakan untuk mengurangi akumulasi kerugian perusahaan, mengacu pada ketentuan dalam Undang-undangan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

5. Agenda 5

Persetujuan penetapan insentif kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun BUKU 2017, gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2018

Keputusan RUPS

RUPS menyetujui:

Penetapan tentang insentif kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun BUKU 2017, gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas untuk tahun 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan ditetapkan secara tersendiri.

6. Agenda 6

RUPS menyetujui:

- Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) HLB Hadori Sugiarto Adi dan Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Barata Indonesia (Persero) untuk tahun buku 2018.
- Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan.

4. 4th Agenda

Determination of the Company's net profit use for 2017.

GMS decision

GMS stipulated that the current year's net profit that can be attributed to the owners of the parent entity was Rp 51,615,018,095, - all of which are used to reduce the Company's accumulated losses, referring to the provisions in Law Number 40/ 2007 regarding Limited Liability Companies.

5. 5th Agenda

Approval of 2017 performance incentives determination for the Board of Directors and Commissioners, the Company's Board of Directors and Commissioners 2018 salary / honorarium, allowances and facilities .

GMS decision

GMS approved:

2017 performance incentives determination for the Board of Directors and Commissioners, the Company's Board of Directors and Commissioners 2018 salary / honorarium, allowances and facilities will be determined separately.

6. 6th Agenda

GMS approved:

- Appointment of HLB Hadori Sugiarto Adi and Partners Public Accountant Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements and PT Barata Indonesia (Persero) 2018 Partnership and Community Development Program Financial Statements .*
- Delegation of authority to the Company's Board of Commissioners of to determine the honorarium and other requirements and appoint a substitute Public Accountant Firm if the appointed Public Accountant Office unable to continue or conduct its duties for any reason, including legal and regulatory reasons.*

No	ARAHAN PEMEGANG SAHAM <i>Shareholders Direction</i>
1.	Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas terhadap temuan, catatan, dan saran/rekomendasi Kantor Akuntan Publik dan BPK RI, yang belum selesai. Progres tindak lanjut atas temuan tersebut agar dibahas bersama Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Menteri BUMN Dalam kesempatan pertama. <i>The Board of Directors to follow up and resolve thoroughly Public Accountant Firm's and BPK RI findings, notes, and recommendations, which have not yet been completed. Follow-up progress on the findings shall be discussed with the Board of Commissioners and submitted to the Minister of SOEs on the first occasion.</i>

2. Kerjasama yang sudah dilaksanakan bersama dengan PT Boma Bisma Indra (Persero) agar terus dilakukan tidak hanya dalam aspek pemasaran namun juga produksi dan pengembangan produk.
The cooperation has been conducted with PT Boma Bisma Indra (Persero) shall be continued not only in the marketing, but also the production and product development aspects.
3. Melakukan percepatan penggunaan dana PMN sesuai dengan perencanaan dan penggunaan PMN tersebut agar dimonitoring secara berkala oleh Dewan Komisaris serta progresnya dilaporkan kepada Menteri BUMN secara triwulanan.
Pushing up PMN funds usage in accordance with PMN planning and its usage to be monitored periodically by the Board of Commissioners as well as reported its progress to Minister of SOEs quarterly.
4. Direksi dan Dewan Komisaris PT Barata Indonesia (Persero) agar memastikan tagihan bruto dapat menjadi piutang dan dapat segera ditagihkan sesuai kontak/perjanjian berdasar Standar Operasional dan Prosedure (SOP) perusahaan.
PT Barata Indonesia (Persero)'s Board of Directors and Commissioners shall ensure that gross receivables can be receivables and can be billed on immediately according to the contract/agreement based on the company's Standard Operating Procedure
5. Direksi diminta agar menggunakan dana MTN dan pengembaliannya sesuai dengan perencanaan.
The Board of Directors are requested to use MTN funds and its returns in accordance with the plan.
6. Pendanaan dari pihak ketiga untuk kegiatan investasi dan modal kerja agar tetap memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
Funding from third parties for investment activities and working capital shall consider the company's financial capabilities.
7. Direksi diminta untuk melakukan penyampaian data, laporan, dan dokumen kepada Kementerian BUMN secara elektronik, tepat waktu, dan konsisten serta menuhi seluruh tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-18/MBU/10/2014. Direksi agar melakukan *monitoring* dan updating data pada 5 (lima) portal BUMN, yakni Portan *Financial Information System*, Portal Aset, Portal SDM, Portal PKBL, dan Portal Publik secara berkala dan berkelanjutan.
The Board of Directors are asked to submit data, reports and documents to the Ministry of SOEs electronically, timely, and consistently and fulfill all other duties and responsibilities in accordance with Minister of SOEs Regulation No. PER-18 / MBU/10/2014. The Board of Directors shall monitored and updated datas on 5 (five) SOEs portals, namely Financial Information System Portal, Asset Portal, HR Portal, PKBL Portal, and Public Portals regularly and continually.
8. Direksi agar mengupayakan penyampaian laporan keuangan tahun buku 2018 yang telah diaudit selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 2019.
The Board of Directors strives to submit 2018 audited financial statements no later than the end of March 2019.
9. Direksi agar menjaga ketepatan waktu penyelesaian produk dan meningkatkan fungsi manajemen resiko di semua lini agar terhindar dari denda.
The Board of Directors to maintain the timeliness of product completion and improve risk management functions in all lines to avoid fines.
10. *Standar Operating Prosedure* Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) agar diselaraskan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBI BUMN.
Partnership Program and Community Development Program (PKBL) implementation Standard Operating Procedure to be aligned with Minister of SOEs Regulation No. PER-02 / MBU / 7/2017 dated July 5, 2017 regarding the Second Amendment to Minister of SOEs Regulation No. PER-09 / MBU / 07 / 2015 regarding PPCD of SOE.
11. Direksi agar dapat mengoptimalkan fungsi pengadaan dengan memperbaiki *supply chain system* dimana setiap proses pengadaan atas material produksi diutamakan diperoleh langsung dari produsen/pabrikan lokal dalam upaya peningkatan TKDN dengan tetap mengoptimalkan manajemen persediaan.
The Board of Directors to optimize procurement function by improving supply chain system where each production materials procurement process is prioritized directly from local producers/manufacturers in an effort to increase TKDN while still optimizing inventory management.
12. Program pengembangan Pendidikan dan Pelatihan SDM agar dilakukan secara terpadu serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
HR Education and Training development program shall be conducted integrately and periodic monitoring and evaluation are conducted.
13. Kerjasama BUMN agar diselaraskan Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara.
SOEs Cooperation to be aligned to decree No. PER-03 / MBU / 08/2017 regarding Guidelines for Cooperation between State-Owned Enterprises as amended by Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-04/MBU/09/2017 regarding Amendments to the Minister of SOEs No. PER-03/MBU/08/2017 regarding Guidelines for Cooperation of State-Owned Enterprises.

14. Agar pengelolaan PKBL tahun 2018 lebih optimal dan lebih tepat sasaran, maka Direksi diminta mengupayakan:
- Penyeluran dana PK (tingkat efektifitas) sebesar 100% dari anggaran dana yang tersedia. Dengan demikian, untuk rencana penyaluran yang tidak sama dengan dana tersedia, maka dapat melakukan revisi penyaluran dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Komisaris, kecuali apabila ada perubahan kebijakan pengelolaan PK BUMN;
 - Tingkat pengembalian (kolektabilitas) dana PK 2 (dua) tahun terakhir minimal sebesar 80%;
 - Penyaluran dana BL (tingkat efektifitas) sebesar 100% dari anggaran dana tersedia, termasuk anggaran dana yang masih tersisa di tahun 2017;
 - Pelaksanaan program yang berasal dari beban perusahaan tahun 2018 sebagai biaya untuk program PKBL, agar memisahkan *Chart of Account (COA)*, *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan program PKBL serta menambahkan COA pada sisyem Akutansi/pencatatan Perusahaan sesuai dengan sektor-sektor penyaluran program.
- In order for 2018 PKBL management to be more optimal and more right on target, the Board of Directors are asked to:*
- PK fund disbursement (level of effectiveness) is 100% of available budget funds. Thus, for a disbursement plan that is not corresponded as the available funds, a disbursement revision can be made by first requesting the Board of Commissioners, approvals except if there is a change in SOEs PK management policy;*
 - Collectability of the last 2 (two) PK funds is at least 80%;*
 - Distribution of BL funds (effectiveness) of 100% of the available budget, including the remaining 2017 funds;*
 - The program's implementation comes from the company's 2018 expense as a cost for the PKBL program, to separate Chart of Accounts (COA), Corporate Social Responsibility (CSR) and PKBL programs as well add COA to the Company's accounting system in accordance with the program disbursement sectors.*
15. Risalah Rapat Pembahasan Laporan PKBL Audit 2017 dan tanggapan tertulis Dewan Komisaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan RUPS ini yang harus ditindaklanjuti oleh Direksi.
Minutes of 2017 PKBL Audit Report and the Board of Commissioners' written responses are inseparable parts of this GMS Decision that shall be followed up by the Board of Directors.

B. Keputusan RUPS tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2019 tanggal 21 Desember 2018

Keputusan RUPS:

1. Agenda 1:

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018

Keputusan RUPS

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 PT Barata Indonesia (Persero) dengan pokok-pokok sebagai berikut:

a. Asumsi

Pertumbuhan Ekonomi	: 5,2% - 5,5%
Tingkat Inflasi	: 3,5%
Suku BUNga Pinjaman (Rp)	: 11%
Nilai Tukar US \$	: Rp 14.000,- s.d. Rp 15.000,-

b. Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif

Penjualan	: 2.985
Laba (Rugi) Usaha	: 263
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	: 146

c. Proyeksi Posisi Keuangan (Neraca) (Rp Miliar)

Aset	: 3.650
Liabilitas	: 2.409
Ekuitas	: 1.241

d. Anggaran Inventasi dan Rehabilitas

Anggaran investasi atau rehabilitas pada tahun 2018 sebesar Rp 246,2 Miliar yang akan digunakan untuk:

b. GMS Decision on 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and the Partnership and Community Development Program Work and Budget Plan, December 21, 2018

AGM Decision:

1. 1st Agenda:

Ratification of 2018 Work Plan and Corporate Budget

GMS decision

Ratified 2018 Company Work and Budget Plan of PT Barata Indonesia (Persero) with the following points:

a. Assumption

<i>Economic Growth</i>	<i>: 5.2% - 5.5%</i>
<i>Inflation rate</i>	<i>: 3.5%</i>
<i>Loan Interest Rate (Rp)</i>	<i>: 11%</i>
<i>US \$ Exchange Rate</i>	<i>: Rp 14,000, - Rp 15,000, -</i>

b. Comprehensive Profit / Loss Projection

<i>Sales: 2,985</i>	
<i>Business Profit (Loss)</i>	<i>: 263</i>
<i>Current Year Profit (Loss)</i>	<i>: 146</i>

c. Projected Position (Balance) (Rp Billion)

<i>Assets</i>	<i>: 3,650</i>
<i>Liabilities</i>	<i>: 2,409</i>
<i>Equities</i>	<i>: 1,241</i>

d. Inventory Budget and Rehabilitation

Investment or rehabilitation budget in 2018 was Rp 246.2 billion which will be used for:

No	URAIAN Description	Nilai (Rp Miliar) Value (Rp Billion)
1	Gedung, Pabrik, Jalan <i>Building, Factories, Road</i>	6,9
2	Tanah Bitek <i>Bitek's Land</i>	18,0
3	Tanah Divisi Komponen Turbin <i>Turbin Division's Land</i>	65,6
4	Inventaris <i>Inventories</i>	3,4
5	Rehabilitasi Mesin-mesin dan Peralatan <i>Machineries and Equipments Rehabilitation</i>	7,4
6	Pengembangan Workshop dan Mesin <i>Machineries and Workshop Development</i>	37,7
7	Riset and Development <i>Research and Development</i>	1,0
8	Aktiva tak berwujud (Lisensi, Hak Paten) <i>Intangible assets (Licenses, patents)</i>	2,3
9	Aktiva tak berwujud (ERP) <i>Intangible assets (ERP)</i>	2,9
10	Aktiva tak berwujud (HGB) <i>Intangible assets (HGB)</i>	1,0
11	Dana PMN <i>PMN Funds</i>	100

e. Tingkat Kesehatan

Proyeksi tingkat kesehatan perusahaan tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 sebagai berikut:

Aspek Keuangan	: 57,00
Aspek Operasional	: 15,00
Aspek Administrasi	: 15,00
SKOR	: 87,00
Kriteria	: "AA" - SEHAT

f. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris
Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2018 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP

2. Agenda 2:

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2018
Keputusan RUPS
Mengesahkan RKA PKBL tahun 2018 PT Barata Indonesia (Persero), dengan pokok-pokok sebagaimana yang telah dibahas antara PT Barata Indonesia (Persero) dengan Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

e. Soundness Level

The company's soundness level projection in 2018 was based on Minister of SOEs decree No KEP-100 / MBU / 2002 dated June 4, 2002 as follows:

Financial Aspect	: 57.00
Operational Aspect	: 15.00
Administrative Aspect	: 15.00
SCORE	: 87.00
Criteria	: "AA" - SOUND

f. the Board of Commissioners Work Plan and Budget
Approved 2018 Board of Commissioners Work Plan and Board of Commissioners as an integral part of RKAP

2. 2nd Agenda:

Ratification of 2018 Partnership and Community Development Program (PKBL) Work Plan and Budget
GMS decision
Ratified PT Barata Indonesia (Persero) 2018 PKBL RKA, with the points as discussed between PT Barata Indonesia (Persero) and Deputy Assistant of Social and Environmental Responsibility.

3. Agenda 3:

Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk pengukuran tingkat kesehatan perusahaan Tahun 2018.

Keputusan RUPS

Menetapkan Indikator Aspek Operasional PT Barata Indonesia (Persero) untuk Pengukuran tingkat kesehatan perusahaan Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, sebagai berikut:

No	Indikator Operasional Operational Indicators	Nilai Score	Satuan Unit	Skor Score
1	Increasing order/contracted book	100	%	6,0
2	Increasing revenue from exported	100	%	2,5
3	Enable On-time Product Delivery	100	%	6,5
Total				15,0

4. Agenda 4:

Penetapan Key Performance Indicator yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2018 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham PT Barata Indonesia (Persero) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Kuasa Pemegang Saham sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Risalah ini:

5. Agenda 5:

Penetapan Key Performance Indicator Dewan Komisaris Tahun 2018.

Keputusan RUPS

Menetapkan Indikator-indikator Kinerja Kunci (Key Performace Indicator) Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Buku RKAP Tahun 2018 PT Barata Indonesia (Persero) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Risalah ini.

6. Agenda 6:

Persetujuan Penjaminan Kekayaan Perseroan Yang Lebih dari 50% Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan.

Keputusan RUPS

Menyetujui Penjamin Kekayaan Perseroan dalam rangka mengajukan pinjaman perbankan senilai Rp 2,76 triliun, yang lebih dari 50% jumlah Kekayaan Bersih Perseroan atau senilai Rp 3.539.850.364.990,00 yang terdiri dari:

a. Tanah sebesar Rp 617.542.980.000,-

3. 3rd Agenda:

Determination of Operational Aspect Indicators for measurement of the company's 2018 health level.

GMS decision

Determined of PT Barata Indonesia (Persero) Operational Aspect Indicators for the company's soundness level measurement in 2018 based on the Minister of State-Owned Enterprises decree No.KEP-100 / MBU / 2002 dated June 4, 2002, as follows:

4. 4th Agenda:

Determined of Key Performance Indicator contained in 2018 Management Contract between the Board of Directors, Commissioners and PT Barata Indonesia (Persero) Shareholders as well as between the Board of Directors, Commissioners and Shareholders Proxy as attached which was an integral part of this Minutes:

5. 5th Agenda:

Determination of the Board of Commissioners' Key Performance Indicator in 2018.

GMS decision

Determined the Board of Commissioners Key Performance Indicators as stated in PT Barata Indonesia (Persero) 2018 RKAP and which was an integral part of this Minutes was.

6. 6th Agenda 6:

Approval of Guarantee of Company Worth Which is more than 50% of the Company's Net Worth Amount.

GMS decision

Approved the Company's Wealth Guarantor in order to apply for a bank loan which amounted to Rp 2.76 trillion, or more than 50% of the Company's Net Worth or Rp 3,539,850,364,990.00 consisted of:

a. Land worth to Rp 617,542,980,000

- b. Mesin sebesar Rp 134.712.384.990,-
- c. Fidusia Persediaan sebesar Rp 295.620.000.000,-
- d. Fiduisa Piutang sebesar Rp 2.491.975.000.000,-

- b. Machineries worth to Rp 134,412,384,990*
- c. Inventories Fiduciary worth to Rp 295,620,000,000*
- d. Receivables Fiduciary worth to Rp 2,491,975,000,000*

C. Arahan Pemegang Saham

Adapun Arahan dari Pemegang Saham sebagai berikut:

c. Shareholders Direction

Shareholders Directions are as follows:

No	ARAHAN PEMEGANG SAHAM <i>Shareholders Directions</i>
1.	Direksi diminta agar mengusahakan pencapaian target RKAP dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) dan profesionalisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta menyiapkan langkah antisipasi (<i>contingency</i>) agar target RKAP tetap dapat tercapai. <i>The Board of Directors is asked to attempt to achieve the RKAP target by still referring to the principles of Good Corporate Governance and professionalism in accordance with the provisions of laws and regulations and prepare contingency measures so that the RKAP target can still achieved.</i>
2.	Dewan Komisaris kiranya dapat memberikan masukan dan arahan kepada Direksi setiap adanya isu terkini terkait perubahan dan perkembangan kondisi bisnis yang dapat berakibat pada penurunan kinerja perusahaan. <i>The Board of Commissioners shall be able to provide input and direction to the Board of Directors regarding the current issues related to changes and developments in business conditions that may result in a decrease in company performance.</i>
3.	Direksi agar memperhatikan dan melaksanakan Tanggapan Dewan Komisaris terhadap RKAP tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Surat Dewan Komisaris Nomer: S-52/Dekom/BRT/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 <i>The Board of Directors shall observe and implement the Board of Commissioners Response to 2018 RKAP as stated in the Board of Commissioners' Letter No. S-52 / DECOM / BRT / XII / 2018 dated December 3, 2018</i>
4.	Direksi agar menindaklanjuti arahan Menteri BUMN dalam Rapat Koordinasi BUMN di Bontang tanggal 28-29 Oktober 2018. <i>The Board of Directors shall follow up Minister of SOEs direction at the SOEs Coordination Meeting in Bontang on October 28-29, 2018.</i>
5.	Direksi diminta agar meningkatkan penggunaan barang dan jasa dalam negeri dengan mengutamakan sinergi antar BUMN, anak perusahaan BUMN, dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha dan perekonomian. <i>The Board of Directors are asked to increase the use of domestic goods and services by prioritizing synergies between state-owned enterprises, state-owned subsidiaries, and/or SOEs affiliated companies in order to improve business efficiency and the economy.</i>
6.	Kerjasama yang telah dilakukan Bersama dengan PT Boma Bisma Indra (Persero) agar terus ditingkatkan tidak hanya dalam aspek pemasaran, namun juga produksi, dan pengembangan produk. <i>The cooperation that has been implemented with PT Boma Bisma Indra (Persero) shall be continued and improved not only in marketing, but also production, and product development aspects.</i>
7.	Pada saat melakukan penawaran proyek, perusahaan agar selalu memasukkan <i>project and operating cost of fund</i> sebagai bagian dari Beban Pokok Produksi. <i>At the time of bidding for a project, the company shall always include the project and operating cost of funds as part of Production cost</i>
8.	Direksi agar memastikan bahwa penarikan pinjaman eksternal tetap mempertimbangkan aspek timing, sizing, dan <i>pricing</i> serta skema dan proses yang terbaik, sehingga dapat dilakukan efisiensi terhadap beban bunga (<i>cost of fund</i>) serta tidak memberatkan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. <i>The Board of Directors shall ensure that the withdrawal of external loans continues to consider timing, sizing and pricing aspects as well as the best schemes and processes, so that efficiency of the interest expense (cost of funds) can be carried out and does not burden the company's financial performance in the future.</i>
9.	Penggunaan dana PMN Tahun Anggaran 2017 harus dapat direalisasikan seluruhnya pada tahun 2018 serta laporan penggunaannya disampaikan secara berkala kepada Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. <i>2017 PMN Funds usage shall be fully realized in 2018 and reports on its usage are submitted periodically to the Minister of SOEs and Minister of Finance.</i>

DEWAN KOMISARIS Board Of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Acuan utama Dewan Komisaris adalah Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, serta Anggaran PT Barata Indonesia (Persero) yang berlaku.

Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktek Good Corporate Governance (GCG) yang diterapkan Perseroan.

Setiap anggota Dewan Komisaris harus memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, peran Dewan Komisaris sangat strategis. Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Perseroan harus memungkinkan pengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap direksi.

TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Jangka Panjang (RJPP) Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perseroan (Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar PT Barata Indonesia (Persero) tahun 2017).

The Board of Commissioners is the Company's organ in charge of supervising management policies, general management, both regarding the company and the company's business, and advising the Board of Directors regarding the company's interests and in accordance with the Company purposes and objectives. The principal reference of the Board of Commissioners is Law No.40/ 2007 regarding Limited Liability Companies, Law No. 19 /2003 regarding State-Owned Enterprises, and PT Barata Indonesia (Persero) prevailing Articles of Association.

Also, the Board of Commissioners has duty to monitor the Company's Good Corporate Governance (GCG) practice implementation effectiveness.

Each of the Board of Commissioners' members shall have integrity, dedication, comprehend the company's management issues relating to management functions, have adequate knowledge in the Company's business and able to provide sufficient time to conduct its duties and other requirements based on the prevailing laws.

Thus, the Board of Commissioners' role is very strategic. Therefore, the Company's Board of Commissioners composition shall enable effective, appropriate and fast decision makers. In addition, the Board of Commissioners is also required to be able to act independently, in the sense of having no conflict of interest which may interfere with its ability to conduct its duties independently and critically, both in relation to each other and with the directors.

Board Of Commissioners' Duties

The Board of Commissioners has duties to supervise the management policies, the general management of both the Company and the Company's business as well as provide advice to the Board of Directors including supervision of the Company's Long Term Work Plan, Corporate Work Plan and Budget implementations and Articles of Association provisions and General Meeting of Shareholders decisions, as well as the prevailing laws and regulations, for the Company's benefit and in accordance with the Company's purposes and objectives (Article 15 paragraph (1) 2017 Barata Indonesia (Persero) Articles of Association).

Secara umum, Dewan Komisaris berkewajiban untuk :

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta bertindak profesional;
- b. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak/golongan tertentu;
- d. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) yang disiapkan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan.
- e. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
- f. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan yang bersangkutan dan Perseroan lain, termasuk setiap perubahannya.
- g. Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) penunjukan Auditor Eksternal yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
- h. Memantau efektivitas praktek *Good Corporate Governance* antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*.
- i. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS DAPAT DIKELOMPOKKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. TUGAS & KEWAJIBAN TERKAIT PEMEGANG SAHAM & RUPS

- a. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
- b. Mengajukan usulan indikator pencapaian kinerja (KPI) untuk ditetapkan oleh RUPS;

Generally, the Board of Commissioners is obliged to:

- a. Comply with the prevailing law, Articles of Association and GMS decisions and act professionally;*
- b. Conduct oversight duties on the Board of Directors' policies in implementing the Company's management including the Company's Long Term Plan (RJPP), the Company's Work Plan and Budget (RKAP) implementation and Articles of Association provisions and GMS decisions and the prevailing laws and regulations;*
- c. Providing advice to the Board of Directors in the Company's management implementation which is not intended for certain parties / groups benefits;*
- d. Research and review and sign the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) prepared by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. Prepare the annual work program of the Board of Commissioners and which stipulated in the Company's work plan and budget.*
- e. Research and review periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the Company's annual reports.*
- f. Submit a Report to the Company regarding its share ownership and/or family in the relevant Company and other Companies, including any amendments thereto.*
- g. Propose to the General Meeting of Shareholders (GMS) regarding External Auditor appointment who will audit the Company's books.*
- h. Monitor Good Corporate Governance practices effectiveness, among others, by holding regular meetings between the Board of Commissioners and the Directors to discuss Good Corporate Governance the implementation.*
- i. Conduct other obligations in supervision and provision of advice, as long as they do not conflict with the prevailing laws and regulations, Articles of Association and/or GMS decisions.*

The Board Of Commissioners Duties And Obligations Of Can Be Grouped As Follows :

1. Duties & Obligations Related To Shareholders & GMS

- a. Submitting a report on the supervisory duties that have been conducted during the recent financial year to the GMS;*
- b. Submitting proposals for performance achievement indicators (KPI) to be determined by GMS;*

- c. Menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi indikator pencapaian kinerja kepada Pemegang Saham;
- d. Mengajukan akuntan publik kepada RUPS berdasarkan usulan dari Komite Audit;
- e. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi;
- f. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP);
- g. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan rencana kerja dan anggaran Perseroan;
- h. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
- i. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan tahunan, apabila diminta;
- j. Menandatangani laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris tidak bersedia menandatangani laporan tahunan, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis;
- k. Dalam hal pemberian tanggapan pada RUPS atas RJPP dan RKAP, Dewan Komisaris akan melakukan pembahasan internal dengan melibatkan organ-organ Dewan Komisaris (Tim Manajemen Risiko & Audit) dan menyajikan hasil bahasan kepada Pemegang Saham dalam kurun waktu maksimal 30 hari;

2. TUGAS & KEWAJIBAN TERKAIT PEMBAGIAN TUGAS & WEWENANG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Pembagian tugas dan wewenang diantara para anggota Dewan Komisaris diatur sendiri berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris berdasar saran tertulis Pemegang Saham atas beban Perseroan (Pasal 14 ayat (24) Anggaran Dasar PT Barata Indonesia (Persero) tahun 2017) serta Komite Audit & Manajemen Risiko. Menyusun pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris dengan tujuan agar fungsi pengawasan lebih fokus dan transparan.

- c. *Submitting quarterly reports on performance achievement indicators realization progress to Shareholders;*
- d. *Proposing public accountants to GMS based on proposals from the Audit Committee;*
- e. *Immediately reporting to GMS if there are signs of a decline in the Company's performance as well as suggestions that have been submitted to the Board of Directors to settle the problems that occur;*
- f. *Preparing an annual work program which is included in the Company's Work Plan and Budget (RKAP);*
- g. *Providing opinions and suggestions to the GMS regarding the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) regarding the reasons for the Board of Commissioners to sign the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Company's work plan and budget;*
- h. *Following the development of the Company's activities, giving opinions and suggestions to GMS regarding the issues which are considered important for the Company's management;*
- i. *Providing explanations, opinions and suggestions to GMS regarding the Company's annual report, if requested;*
- j. *Signing the Company's annual report. In the event that there is a member of the Board of Commissioners unwilling to sign the annual report, the reason shall be stated in writing;*
- k. *In responding to GMS on RJPP and RKAP, the Board of Commissioners will conduct internal discussions involving the Board of Commissioners organs (Risk Management & Audit Committees) and present the results of the discussion to the Shareholders within a 30 days maximum period;*

2. Duties & Obligations Related To The Board Of Commissioners Dutes And Authorities Divisions

Duties and authorities division among the Board of Commissioners members is regulated based on the Board of Commissioners meeting decisions, and for the fluidity of the Board of Commissioners functions can be assisted by the Board of Commissioners' Secretary based on the written advice of the Shareholders at the Company's expense (Article 14 paragraph (24) PT Barata Indonesia (Persero) Articles of Association in 2017) as well as Audit & Risk Management Committee. Establish duties division among the Board of Commissioners members which aimed to make supervisory function is more focused and transparent.

3. TUGAS & KEWAJIBAN TERKAIT FUNGSI PENGAWASAN

- a. Meneliti dan menelaah serta menandatangani dalam rangka memberikan persetujuan atau pengesahan atas Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- b. Memantau dan memastikan bahwa *Good Corporate Governance* telah diterapkan secara efektif dan Berkelanjutan;
- c. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
- d. Memastikan bahwa dalam laporan tahunan Perseroan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapatrapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat Internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perseroan;
- e. Memberikan keputusan atas usulan Direksi yang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya usulan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi serta setelah dilakukan telaah masalah oleh komitekomite Dewan Komisaris;
- f. Memberikan tanggapan tertulis atas perbuatan Direksi yang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar memerlukan tanggapan tertulis Dewan Komisaris, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi;
- g. Memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perseroan terkait :
 - i. Hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis;
 - ii. Pengadaan dan pelaksanaannya;
 - iii. Mutu dan pelayanan;
 - iv. Pengelolaan Anak Perusahaan;
 - v. Teknologi Informasi;
 - vi. Sumber Daya Manusia (SDM);
 - vii. Akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK);
 - viii. Pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga.
- h. Memberikan arah kepada Direksi tentang kebijakan dan pelaksanaan *Health, Safety, Security and Environment* (HSSE).

3. Duties & Obligations Related To Supervision Functions

- a. *Researching and reviewing as well as signing in order to grant approval or ratification of the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association;*
- b. *Monitoring and ensuring that Good Corporate Governance has been implemented effectively and sustainably;*
- c. *Researching and reviewing periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the Company's annual reports;*
- d. *Ensuring that in the Company's annual report contains information on identity, its main works, the Board of Commissioners position in other companies, including meetings held in one book year (Internal meetings or joint meetings with the Board of Directors), as well as honorariums, facilities and/or other benefits received from the Company;*
- e. *Decide the Board of Directors recommendations based on the Articles of Association which requiring the Board of Commissioners approval, within 30 days of receipt of the proposal or explanation and documents in full from the Board of Directors and after review of the problem by the Board of Commissioners' committee;*
- f. *Provide written responses to the Board of Directors actions which according to the Company's Articles of Association requiring a written response from the Board of Commissioners, within 30 (thirty) days of receipt of the proposals or explanation and documents in full from the Board of Directors;*
- g. *Provide direction to the Board of Directors regarding the Company's plans and policies implementation related to:*
 - i. *Important matters regarding changes in the business environment;*
 - ii. *Procurement and implementation;*
 - iii. *Quality and service;*
 - iv. *Management of Subsidiaries;*
 - v. *Information Technology;*
 - vi. *Human Resources (HR);*
 - vii. *Accounting and preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia (SAK);*
 - viii. *Implementation of agreements with third parties.*
- h. *Provide direction to the Board of Directors regarding policies and implementation of Occupational Health, Safety, Security and Environment (HSSE).*

4. TUGAS DAN KEWAJIBAN TERKAIT PENCALONAN ANGGOTA DIREKSI (SELEKSI & NOMINASI) DAN REMUNERASI

- a. Mengusulkan kebijakan nominasi dan seleksi bagi calon Anggota Direksi Perseroan serta calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan Perseroan, serta mengajukannya kepada RUPS untuk disahkan;
- b. Mengusulkan calon Anggota Direksi Perseroan kepada Pemegang Saham setelah melalui analisa komprehensif calon anggota Direksi dimaksud;
- c. Melakukan penelaahan dan pengawasan untuk memastikan bahwa Perseroan telah memiliki strategi dan kebijakan nominasi yang meliputi proses analisis organisasi, prosedur dan kriteria rekrutmen, seleksi dan promosi;
- d. Melakukan kajian atas sistem remunerasi yang sesuai bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan mengajukan kepada RUPS;
- e. Memastikan bahwa Perseroan memiliki sistem remunerasi yang transparan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variabel.
- f. Menyusun kebijakan mengenai pengajuan usulan remunerasi Direksi kepada RUPS;
- g. Menelaah usulan remunerasi Direksi bersama dengan Komite terkait;
- h. Mengusulkan insentif kinerja/tantiem, mempertimbangkan penilaian kinerja Direksi dan pencapaian tingkat kesehatan Perseroan;
- i. Mengusulkan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas serta tantiem/ insentif kinerja) Direksi kepada RUPS.

5. TUGAS DAN KEWAJIBAN TERKAIT EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

- a. Melakukan evaluasi kinerja melalui penyusunan (KPI) Dewan Komisaris dengan sistem *self assessment* atau sistem lain untuk kemudian diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris;
- b. Memberikan tanggapan dan rekomendasi mengenai penetapan KPI Direksi pada setiap awal tahun kerja;
- c. Mengevaluasi masing-masing kinerja Anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.
- d. Laporan kinerja Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan tugas pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
- e. Menyusun sistem pengukuran dan penilaian (evaluasi) kinerja Dewan dan individu/ Anggota Dewan

4. Duties And Obligations Related To The Reconstruction Of The Board Of Directors (Selection & Nomination) And Remuneration

- a. Proposing nomination and selection policy for candidates of the Company's Board of Directors and Commissioners members as well as the Company's Subsidiaries Directors, and submit them to GMS for approval;
- b. Proposing the Company's Board of Directors members candidates to Shareholders after through a comprehensive analysis of the relevant candidate;
- c. Reviewing and supervising to ensure that the Company has nomination strategies and policies which includes the organizational analysis process, procedures and criteria for recruitment, selection and promotion;
- d. Reviewing the appropriate remuneration system for the Board of Commissioners and Directors Members and submitting it to GMS;
- e. Ensuring that the Company has a transparent remuneration system in the form of salaries or honorarium, permanent benefits and facilities and variable incentives.
- f. Establishing policies regarding the Board of Directors remuneration proposals submission to GMS;
- g. Reviewing the Board of Directors remuneration proposals with the relevant Committee(s);
- h. Proposing performance incentives / bonuses, consider the Board of Directors performance assessment and the the Company's soundness level achievement;
- i. Proposing the Board of Directors remuneration (salary, allowances and facilities as well as performance bonuses / incentives) to GMS.

5. Duties And Obligations Related To Of The Board Of Commissioners And Directors Performance Evaluation

- a. Conducting performance evaluation through Board of Commissioners KPI preparation with a self assessment system or other system to be decided latter at the Board of Commissioners meeting;
- b. Providing responses and recommendations regarding the Board of Directors' KPI determination at the beginning of each working year;
- c. Evaluating each of the Board of Commissioners members' performance which stipulated in the Board of Commissioners' minutes of meeting.
- d. The Board of Commissioners performance report is submitted in the Board of Commissioners supervisory duties report;
- e. Developing a system for measuring and evaluating the Board of Commissioners and Directors individuals/

- Komisaris dan Direksi dan mengajukan kepada RUPS.
- f. Mengusulkan KPI beserta target-targetnya yang disampaikan setiap tahunnya kepada RUPS untuk disahkan.
- g. Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris:
1. Menyusun kebijakan mengenai penilaian kinerja Direksi dan pelaporannya kepada Pemegang Saham;
 2. Menelaah kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam kontrak manajemen Direksi/Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) baik secara individu maupun kolegal dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham dalam laporan tugas pengawasan secara semesteran atau tahunan.

6. TUGAS DAN KEWAJIBAN TERKAIT PENGAWASAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

- a. Melakukan kajian atas efektivitas pengurusan Perseroan dari aspek manajemen risiko secara terintegrasi sebagai bahan rekomendasi Dewan Komisaris;
- b. Melakukan evaluasi atas kebijakan investasi dan mengidentifikasi serta menilai potensi risikonya;
- c. Mengevaluasi tahapan proses manajemen dan risiko Perseroan, mulai dari identifikasi sampai dengan pengungkapan serta mitigasi risiko;
- d. Menilai risiko atas rencana proyek-proyek dan investasi Perseroan, untuk selanjutnya memberikan pendapat dan atau saran terkait kelanjutan proyek-proyek tersebut.

7. TUGAS DAN KEWAJIBAN TERKAIT SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

- a. Memastikan efektifitas sistem pengendalian internal;
- b. Memastikan efektifitas pelaksanaan tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal, dengan menilai kompetensi, independensi serta ruang lingkup tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
- c. Memastikan Auditor Internal, Auditor Eksternal dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perseroan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
- d. Melakukan penilaian atas akurasi informasi yang disiapkan untuk pihak lain, khususnya dalam laporan keuangan dan laporan tahunan.
- e. Menelaah pengaduan masalah yang disampaikan Auditor Internal Perusahaan dan memberikan masukan penyelesaian masalah kepada Direksi.

members performance and propose it to GMS.

- f. Proposing KPIs and its targets which is submitted annually to GMS to be ratified.*

- g. In assessing the Board of Directors, Commissioners performance:*

- 1. Preparing a policy regarding Board of Directors, Commissioners performance assessment and its reports to the Shareholders;*
- 2. Reviewing key performance criteria, targets and indicators included in the Board of Directors' management contract/Corporate Work Plan and Budget (RKAP) both individually and collegially and submitting them to the Shareholders in the semester or annual supervisory duties reports.*

6. Duties And Obligations Related To Supervision Risk Management Implementation

- a. Reviewing the Company's management effectiveness from risk management aspects integratelly as material for the Board of Commissioners recommendations;*
- b. Evaluating investment policies, identify and assess its potential risks;*
- c. Evaluating the stages of the Company's management and risk processes, from identification to risk disclosure and mitigation;*
- d. Assessing risks for the Company's project plans and investments, to further provide opinions and/or suggestions regarding the continuation of these projects.*

7. Duties And Obligations Related To Internal Control System

- a. Ensuring internal control system effectiveness;*
- b. Ensuring Internal Auditor and External Auditor's duties implementation effectiveness, by assessing competence, independence and Internal Auditor and External Auditor's scope of duties.*
- c. Ensuring the Internal Auditor, External Auditor and Audit Committee have access to information about the Company needed to conduct its duties.*
- d. Assessing the accuracy of information prepared for other parties, especially in financial reports and annual reports.*
- e. Reviewing complaints of problems submitted by the Company's Internal Auditor and providing input on solving problems to the Board of Directors.*

8. TUGAS DAN KEWAJIBAN TERKAIT ETIKA BERUSAHA DAN ANTI KORUPSI

- a. Mengedepankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam berhubungan dengan mitra kerja, kreditur/ investor, pejabat/ pegawai pemerintah maupun pihak lainnya.
- b. Tidak memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Menghindari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. TUGAS DAN KEWAJIBAN TERKAIT DENGAN KETERBUKAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI

- a. Memastikan informasi termasuk namun tidak terbatas pada laporan keuangan, laporan tahunan yang disampaikan Perseroan kepada Shareholder maupun Stakeholder Perseroan dilakukan secara tepat waktu, lengkap dan akurat.
- b. Memastikan data/ informasi yang disampaikan ke publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. TUGAS DAN KEWAJIBAN TERKAIT HUBUNGAN KERJA ANTAR ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Hubungan kerja antar anggota Dewan Komisaris adalah bersifat kolektif. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, Komisaris Utama melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Dewan Komisaris (*First among equals*).

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pembagian tugas dan wewenang diantara para anggota Dewan Komisaris diatur sendiri berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan saran tertulis Pemegang Saham atas beban Perseroan (Pasal 14 ayat (24) Anggaran Dasar PT Barata Indonesia (Persero) tahun 2017) serta Komite Audit & Manajemen Risiko. Menyusun pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris dengan tujuan agar fungsi pengawasan lebih fokus dan transparan.

8. Duties And Obligations Related To Business Ethics And Anti-Corruption

- a. *Prioritizing Good Corporate Governance principles in relationship with colleagues, creditors/investors, government officials/employees and other parties.*
- b. *Not giving or offering, or accepting, directly or indirectly, valuable items to or from a customer or a government official to influence or as a reward for what he has done and other actions, in accordance with the provisions of the legislation.*
- c. *Avoiding corruption, collusion and nepotism practices in accordance with the prevailing law.*

9. Duties And Obligations Related To Information Disclosure And Confidentiality

- a. *Ensuring information including but not limited to financial statements, annual reports submitted by the Company to the Shareholders and Stakeholders are conducted timely, completely and accurately.*
- b. *Ensuring that the data/information are submitted to the public in accordance with prevailing laws and regulations.*

10. Duties And Obligations Related To Work Relationship Among The Board Of Commissioners Members

Work relationship among the Board of Commissioners members is collective. In conducting operational activities, President Commissioner coordinates with all of the Board of Commissioners members (First among equals).

The Board Of Commissioners Authorities

Duties and authorities division among the Board of Commissioners members is regulated based on the Board of Commissioners meeting decision, and to smoothen its duties the Board of Commissioners may be assisted by the the Board of Commissioners Secretary based on the written advice of the Shareholders at the Company's expense (Article 14 paragraph (24) PT Barata Indonesia (Persero) Articles of Association in 2017) as well as Audit & Risk Management Committee. Compiles duties division among the Board of Commissioners members with the aim to make supervisory function is more focused and transparent.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berwenang untuk (Pasal 15 ayat (2) point (a) Anggaran Dasar PT Barata Indonesia (Persero) tahun 2017) :

- a. Memasuki pekarangan, gedung, kantor yang dipergunakan oleh Perseroan, melihat buku-buku, surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
- b. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
- c. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- d. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- e. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris (jika perlu);
- f. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
- g. Membentuk komite-komite lain selain komite audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
- h. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, (jika dianggap perlu);
- i. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- j. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- k. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- l. Memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan, antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance* (Pasal 12 Ayat (7) Permen No.PER-09/MBU/2012);
- m. Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau malalaikan kewajiban atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Pasal 10 ayat (33) Anggaran Dasar PT Barata Indonesia (Persero) tahun 2017) :

In conducting supervisory duties, the Board of Commissioners, both collegially and individually, is authorized to (Article 15 paragraph (2) point (a) 2017 Articles of Association of PT Barata Indonesia (Persero):

- a. Entering the yard, building, office that is used by the Company, examining books, letters and other documents, checking cash for verification purposes and other securities as well as checking the Company's assets;*
- b. Requesting an explanation from the Directors and/or other officials regarding all matters relating to the management of the Company;*
- c. Knowing all policies and actions that have been and will be implemented by the Board of Directors;*
- d. Requesting the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors under the Board of Directors permission to attend Board of Commissioners meetings;*
- e. Appoint and dismiss the Board of Commissioners secretary (if necessary);*
- f. Temporarily dismiss one or more the Board of Directors in members in accordance with Articles of Association;*
- g. Establishing committees other than audit committee, if deemed necessary by considering the Company's ability;*
- h. Requesting experts assistance for certain matters and within a certain periods at the Company's expense, (if deemed necessary);*
- i. Acting on the behalf of the Company's management under certain conditions for certain periods with the provisions of the Articles of Association;*
- j. Attending the Board of Directors meetings and providing inputs on the discussed matters;*
- k. Performing other supervisory authorities as long as it not contravene with the prevailing regulations, articles of association, and/or GMS decisions;*
- l. Monitoring and ensuring that GCG has been implemented effectively and sustainably, among others by holding regular meetings between the Board of Commissioners and the Directors to discuss Good Corporate Governance implementation (Article 12 Paragraph (7) Permen No.PER-09 / MBU / 2012);*
- m. The Board of Commissioners has the right to temporarily dismiss one or more of the Board of Directors members if they violate the Articles of Association, or there are indications of the Company loss or negligence of obligations or there are urgent reasons for the Company, by considering the following provisions (Article 10 paragraph (33) Articles of Association Barata Indonesia (Persero) in 2017):*

1. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris;
2. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi;
3. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam point 2 diatas disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
4. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan;
5. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris;
6. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud point 5 anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
7. Rapat sebagaimana point 5 diatas dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir;
8. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada point 5 diatas tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;
9. Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang Saham di luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada point 5 diatas;
10. Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan diluar RUPS sebagaimana dimaksud pada point 9 diatas, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara lisan atau tertulis, dengan diberikan kesempatan

1. *The Board of Commissioners decision regarding temporary dismissal of the Board of Directors members is conducted in accordance with the procedures for the Board of Commissioners decision making;*
2. *The temporary dismissal shall be notified in writing to the concerned member(s) with its reasons with copies to the Shareholders and the Board of Directors;*
3. *Dismissal as referred to in point 2 above shall be submitted no later than 2 (two) days after temporary dismissal decision;*
4. *The Board of Directors member(s) who are temporarily dismissed are not authorized to perform the Company's management duties and represent the Company both inside and outside the court;*
5. *Within a period of no later than 30 (thirty) days after the temporary dismissal, a GMS shall be held which will decide whether to revoke or strengthen the decision on the temporary dismissal. GMS is implemented by the Board of Commissioners;*
6. *In the GMS as referred to in point 5 the concerned Board of Directors member(s) is given the opportunity to defend himself;*
7. *The GMS as referred to in point 5 above are chaired by one of the Shareholders who appointed by and from the presentee Shareholders;*
8. *Within 30 (thirty) days, the GMS as referred to in point 5 above is not implemented or the GMS unable to make a decision, then the temporary dismissal is revoked;*
9. *The decision to revoke or strengthen the Board of Directors members temporary dismissal may also be made by Shareholders outside the GMS with the condition that all Shareholders with voting rights grant approval in writing by signing the decision with due regard to the time provisions referred to in point 5 above;*
10. *In the event that the decision to revoke or strengthen the temporary dismissal of the Board of Directors members conducted outside GMS as referred to in point 9 above, the concerned Board of Directors member(s) shall be notified verbally or in writing, with the opportunity to submit written defense within 14*

untuk menyampaikan pembelaan diri secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan;

11. Apabila RUPS atau Pemegang Saham membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada point 7 diatas, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- n. Memberikan arahan – arahan penting, mengenai :
 1. Perubahan lingkup bisnis yang diperkirakan akan berdampak besarpada usaha dan kinerja perusahaan,
 2. Memberikan saran penyelesaian terkait dengan permasalahan ataukeluhan yang diterima dari stakeholder,
 3. Kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan,
 4. Kebijakan pengembangan SDM khususnya terkait dengan pelaksanaan pola karir,
 5. Kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya,
 6. Kebijakan mutu dan pelaksanaannya,
 7. Kebijakan atau kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturanperundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar serta kepatuhanperusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen.
- o. Menelaah dan mengusulkan remunerasi Direksi sesuai dengan pengajuan dan usulan Direksi, sesuai ketentuan yang berlaku;
- p. Dapat mengusulkan calon Direksi sesuai kebijakan dan kriteria yang telah ditetapkan;
- q. Membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, komite audit dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, diluar komite audit Dewan Komisaris dapat membentuk Komite lainnya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

(fourteen) days after receiving notification;

11. If GMS or Shareholder revoke a temporary dismissal or a situation as referred to in point 7 above occurred, then the concerned Board of Directors member(s) is obliged to conduct its duties accordingly.

n. Provide important directions, regarding:

1. Changes in business scope that are expected to have a major impact on the Company's business and performance,
 2. Provide suggestions for solutions related to problems or complaints received from stakeholders,
 3. Corporate information technology system policies,
 4. HR development policies specifically related to the implementation of career patterns,
 5. Policies for goods and services procurement and its implementation,
 6. Quality policy and its implementation,
 7. Company policies or compliance in conducting the prevailing regulations and Articles of Association as well as the company compliance with all agreements and commitments.
- o. Review and propose the Board of Directors remuneration in accordance with the Board of Directors submission and proposal, in accordance with the prevailing regulations;
- p. Proposing candidates for the Board of Directors members in accordance with the existing policies and criteria;
- q. Establisihing audit committee that works collectively with its functions to assist the Board of Commissioners in conducting its duties, audit committee is chaired by a chairman and is responsible to the Board of Commissioners, the Board of Commissioners also may establish other Committee(s). In conducting its duties and authority.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

- a. Sesuai SK Menteri BUMN NO : SK-165/MBU/09/2015 tanggal 2 September 2015 dan SK-194/MBU/06/2018 tanggal 8 Juni 2018 komposisi Dewan Komisaris pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Triyogi Yuwono	: Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>
Sam Herodian	: Komisaris <i>Commissioners</i>
Adriansyah	: Komisaris <i>Commissioners</i>
Katno	: Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>

The Board Of Commissioners Composition

- a. In accordance with Minister of SOEs' Decree No. SK-165 / MBU / 09/2015 dated September 2, 2015 and SK-194/ MBU/06/2018 dated June 8, 2018 the the Board of Commissioners composition in 2018 is as follows:

b. Berdasarkan Berdasarkan Akta Notasris Herawati, S.H No. 03 pada tanggal 11 Juli 2018 dan SK Menteri BUMN NO : SK-194/MBU/06/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Penetapan Komisaris Independen Perusahaan (Perseroan) PT Barata Indonesia:

- i. Mengangkat Sdr. Dr. Ir. Sam Herodian , MS. Sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia.
- ii. Menetapkan Sdr.Katno, Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK 165/MBU/09/2015 tanggal 2 September 2015, sebagai Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dimaksud.

b. Based on Herawati, S.H Notarial Deed No. 03 on July 11, 2018 and SOE Minister's Decree No. SK-194/MBU/06/2018 dated June 8, 2018 regarding Appointment of the PT Barata Indonesia (Persero) Board of Commissioners Members and Determination of the Company's Independent Commissioners:

- i. Appointed Mr. Dr. Ir. Sam Herodian, MS. as Commissioner of PT Barata Indonesia Company (Persero).*
- ii. Appointed Mr. Katno, Commissioner of PT Barata Indonesia Company who was appointed based on the Decree of Minister of State-Owned Enterprises No. SK.165/MBU/09/2015 dated September 2, 2015, as Independent Commissioner of PT Barata Indonesia (Persero) with its position will be continued the remaining office term as the Minister of State-Owned Enterprises Decree.*

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mengadakan rapat internal sebanyak 14 (empat belas) kali pertemuan selama tahun 2018 dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut :

Board of Commissioners Meeting

The Board of Commissioners held 14 (fourteen) internal meetings during 2018 with the attendance rates of each member as follows:

NAMA (Name)	JABATAN (Position)	JUMLAH RAPAT GABUNGAN Number of Joint Meetings	KEHADIRAN YANG DIPERHITUNGGAN Attendance Counted	JUMLAH KEHADIRAN Number of Presence	% KEHADIRAN DARI YANG DIPERHITUNGGAN Attendance Counted
TRIYOGI YUWONO	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	14	14	14	100%
SAM HERODIAN	Komisaris <i>Commissioner</i>	14	5	5	100%
ADRIANSYAH	Komisaris <i>Commissioner</i>	14	12	12	100%
KATNO	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	14	14	14	100%
SUDARSO*	Komisaris <i>Commissioner</i>	1	1	1	100%

*Sudarso diangkat sebagai Komisaris PT Barata Indonesia (Persero) sejak Desember 2018

**Sudarso appointed as Commissioner of PT Barata Indonesia (Persero) since December 2018*

Berikut merupakan agenda rapat dan kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

The following is the agenda of the meeting and the presence of each member of the Board of Directors:

No.	TANGGAL Date	MATERI BAHASAN Discussion Material	DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners				
			TRI	SAM	ADR	KAT	SDR
1.	25 Januari 2018 <i>Jan 25, 2018</i>	Pembahasan Laporan Kinerja perusahaan s.d Desember 2017 <i>Discussion of Company Performance Reports as of December 2017</i>	✓	n/a	✓	✓	n/a
2.	7 Februari 2018 <i>Feb 7, 2018</i>	Pembahasan akuisisi GE-ex Alstom dan tentang pelepasan, Penyusunan Laporan Kinerja Dekom, serta evaluasi atas Komite Dewan Komisaris. <i>Discussion of GE-ex Alstom acquisition and regarding the release, Preparation of the Decom Performance Report, and evaluation of the Board of Commissioners' Committees.</i>	✓	n/a	✓	✓	n/a
3.	27 Februari 2018 <i>Feb 27, 2018</i>	Pembahasan Laporan Kinerja perusahaan s.d Januari 2018 <i>Discussion of Company Performance Reports up to January 2018</i>	✓	n/a	✓	✓	n/a
4.	28 Februari 2018 <i>Feb 28, 2018</i>	Program Kerja Dewan Komisaris dan Peninjauan Proyek PLTU NTB tanggal 28 Januari - 2 Februari 2018 <i>Work Program of the Board of Commissioners and Review of the NTB PLTU Project on January 28 - February 2, 2018</i>	✓	n/a	✓	✓	n/a
5.	23 Maret 2018 <i>March 23, 2018</i>	"Pembahasan Laporan Kinerja perusahaan s.d Februari 2018, pembahasan materi RUPS Audit 2017 bulan April 2018. <i>Discussion of Company Performance Reports as of February 2018, discussion of the 2017 AGMS Audit material in April 2018.</i> "	✓	n/a	✓	✓	n/a
6.	18 April 2018 <i>Apr 18, 2018</i>	Pembahasan rencana perpanjangan dan penambahan pinjaman jangka pendek CIMB untuk tambahan plafond kredit. <i>Discussion of the planned extension and addition of CIMB's short-term loan for additional credit ceiling.</i>	✓	n/a	✓	✓	n/a
7.	24 Mei 2018 <i>May 24, 2018</i>	Pembahasan Laporan Kinerja perusahaan s.d April 2018, Perpisahan dan pengenalan dengan anggota komite lama dan baru, Pembahasan surat BOD. <i>Discussion of company Performance Reports as of April 2018, Farewell and introduction to old and new committee members, Discussion on BOD letters.</i>	✓	n/a	✓	✓	n/a
8.	24 Juli 2018 <i>July 24, 2018</i>	Pembahasan Laporan Kinerja perusahaan s.d Juni 2018. <i>Discussion of the Company's performance reports as of June 2018.</i>	✓	n/a	✓	✓	n/a
9.	30 Juli 2018 <i>July 30, 2018</i>	Pembahasan Laporan Kinerja perusahaan s.d Juli 2018, dan tanggapan atas surat surat Direksi (Board of Directors) <i>Discussion of Company Performance Reports as of July 2018, and responses to the Board of Directors' letter</i>	✓	n/a	✓	✓	n/a
10.	30 Agustus 2018 <i>Aug 30, 2018</i>	Tanggapan atas surat Direksi (Board of Directors) tentang ijin pelepasan aset non produktif, serta pembelian saham GE. <i>Responses to the Board of Directors letter regarding permits to release non-productive assets, as well as purchasing GE shares.</i>	✓	✓	✓	✓	n/a
11.	19 September 2018 <i>Sep 19, 2018</i>	Pembahasan permintaan modal ke Exim Bank, tanggapan dan rekomendasi atas aksi korporasi akuisisi PT GEPSI, serta tanggapan dan rekomendasi RJPP 2018-2022. <i>Discussion of capital requests to Exim Bank, responses and recommendations for the acquisition of PT GEPSI, as well as RJPP responses and recommendations from 2018-2022.</i>	✓	✓	✓	✓	n/a

No.	TANGGAL Date	MATERI BAHASAN Discussion Material	DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners				
			TRI	SAM	ADR	KAT	SDR
12.	18 Oktober 2018 Oct 18, 2018	Pembahasan dan rekomendasi untuk RJPP 2018-2022, pembahasan penerbitan MTN tahap II 2018, pembahasan dan rekomendasi atas perubahan struktur organisasi, serta surat tentang RKAT-2019 dari Direksi (Board of Directors). <i>Discussion and recommendations for RJPP 2018-2022, discussion of the issuance of 2018 phase II MTN, discussion and recommendations for changes in organizational structure, as well as letters about RKAT-2019 from the Board of Directors.</i>	✓	✓	✓	✓	n/a
13.	8 Nopember 2018 Nov 8, 2018	"Tanggapan Dekom tentang RJPP 2018-2022 kepada Kementerian BUMN, tanggapan Dekom tentang triwulan III tahun 2018 kepada Kementerian BUMN, Pembahasan dan rekomendasi atas perubahan struktur organisasi. <i>BOC's response to RJPP 2018-2022 to the Ministry of BUMN, BOC's response to the third quarter of 2018 to the Ministry of BUMN, discussion and recommendations for changes in organizational structure.</i> "	✓	✓	n/a	✓	n/a
14.	3 Desember 2018 Dec 3, 2018	Penyusunan tanggapan Dekom atas RKAP 2019 untuk Kementerian BUMN. <i>Preparation of decree responses to 2019 RKAP for the Ministry of SOEs.</i>	✓	✓	n/a	✓	✓
Jumlah Kehadiran <i>total attendance</i>			14	5	12	14	1
% Kehadiran <i>% attendance</i>			100%	100%	100%	100%	100%

TRIYOGI YUWONO : TRI | SAM HERODIAN : SAM | ADRIANSYAH : ADR | KATNO : KAT | SUDARSO: SDR

*Sudarso diangkat sebagai Komisaris PT Barata Indonesia (Persero) sejak Desember 2018

**Sudarso appointed as Commissioner of PT Barata Indonesia (Persero) since December 2018*

Catatan (Notes) :

1. n/a : tidak hadir karena tidak menjabat (*not applicable*)
2. Setiap rapat Dewan Komisaris tersebut didampingi oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretaris Dekom, yaitu : Ahmad Dafis dan Slamet (periode Januari s.d Agustus 2018), Wiratmoko dan Asdi (September 2018 s.d Desember 2018). Telah terjadi pergantian Sekretaris Dewan Komisaris beserta staf sesuai dengan Surat Keputusan Dewa Komisaris nomor SK-05/DEKOM/ BRT/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018.
3. Sam Herodian diangkat sebagai Dewan Komisaris per 8 Juni 2018 sesuai SK Mentri BUMN No.SK-194/ MBU/06/2018.
4. Per Nopember 2018, Adriansyah sudah tidak aktif lagi sebagai Dewan Komisaris.

Notes (Notes):

1. *n / a not applicable*
2. *Each meeting of the Board of Commissioners is accompanied by the Secretary of the Board of Commissioners and the Secretary of BOC staff, namely: Ahmad Dafis and Slamet (January to August 2018), Wiratmoko and Asdi (September 2018 sd December 2018). There has been a change in the Secretary of the Board of Commissioners and staff in accordance with the Board of Commissioners Decree No.SK-05 / DECOM / BRT / VIII / 2018 dated 1 August 2018.*
3. *Sam Herodian was appointed as the Board of Commissioners as of June 8, 2018 according to the Decree of the BUMN Minister No.SK-194 / MBU / 06/208*
4. *As of November 2018, Adriansyah is no longer active as the Board of Commissioners."*

RAPAT GABUNGAN

Selain melaksanakan rapat internal, selama 2018 Dewan Komisaris juga mengadakan rapat gabungan bersama Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali pertemuan dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut :

Joint Meetings

In addition to held internal meetings, during 2018 the Board of Commissioners also held joint meetings with the Board of Directors in 12 (twelve) meetings with the attendance rates of each member as follows:

NAMA (Name)	JABATAN (Position)	JUMLAH RAPAT GABUNGAN Number of Joint Meetings	KEHADIRAN YANG DIPERHITUNGKAN Attendance Counted	JUMLAH KEHADIRAN Number of Presence	% KEHADIRAN DR YANG DIPERHITUNGKAN Attendance Counted
TRIYOGI YUWONO	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	12	12	12	100%
SAM HERODIAN	Komisaris <i>Commissioner</i>	12	7	6	86%
ADRIANSYAH	Komisaris <i>Commissioner</i>	12	9	9	100%
KATNO	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	12	12	12	100%
SUDARSO	Komisaris <i>Commissioner</i>	1	1	1	100%
SILMY KARIM	Direktur Utama <i>President Director</i>	12	8	7	88%
OKSARLIDADY ARIFIN	Direktur Utama <i>President Director</i>	12	1	1	100%
YOYOK HADI S.	Direktur <i>Director</i>	12	12	11	92%
TONY BUDI SANTOSA	Direktur <i>Director</i>	12	12	11	92%
BOBBY SUMARDIAT A.	Direktur <i>Director</i>	12	12	11	92%

*Sudarso diangkat sebagai Komisaris PT Barata Indonesia (Persero) sejak Desember 2018

**Sudarso appointed as Commissioner of PT Barata Indonesia (Persero) since December 2018*

Berikut merupakan agenda rapat dan kehadiran anggota Dewan Komisaris maupun Direksi dalam Rapat Gabungan adalah sebagai berikut :

The following is the meeting agenda and the attendance of members of the Board of Commissioners and Directors at the Joint Meeting:

No.	TANGGAL DATE	MATERI BAHASAN Discussion Material	DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners					DIREKSI Directors				
			TRI	SAM	ADR	KAT	SDR	SIL	OKS	YOK	TON	BOB
1.	25 Januari 2018 <i>Jan 25, 2018</i>	"Pembahasan Struktur Organisasi Baru dan Capaian Kinerja Perusahaan Awal Tahun 2018. <i>Discussion regarding new organizational structures and Submission of Company Performance in early 2018.</i> "	✓	n/a	✓	✓	n/a	✓	n/a	✓	✓	✓
2.	27 Februari 2018 <i>Feb 27, 2018</i>	"Hal Strategis Proyek PLTM Lodagung (siphon system), rencana akuisisi PT GEPSI, penyelesaian masalah BITEK, hasil audit KAP dan prosedur penunjukan KAP selanjutnya, serta penanganan gratifikasi <i>Strategic Issues Lodagung PLTM project (the siphon system), Plans for the acquisition of PT GEPSI, resolve the BITEK problem, the results of the KAP Audit relating to Risk Management, and handling gratification.</i> "	✓	n/a	✓	✓	n/a	✓	n/a	✓	✗	✓
3.	23 Maret 2018 <i>March 23, 2018</i>	"Pembahasan terkait penunjukan KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan untuk jasa audit selanjutnya, Penjualan melebihi target RKAP Feb 2018, MTN, serta penanganan gratifikasi. <i>KAP selection won by KAP Hadori Sugiarto Adi and partners for further audit services, Sales exceed February RKAP 2018 target, MTN, and regarding handling gratification.</i> "	✓	n/a	✓	✓	n/a	✓	n/a	✗	✓	✓
4.	24 April 2018 <i>Apr 24, 2018</i>	"Pembahasan terkait kinerja perusahaan s.d Maret 2018, pencapaian perolehan kontrak baru 202.1%, penjualan dan laba bersih di atas target RKAP 2018, kebutuhan plafond kredit untuk kelancaran bisnis, serta penanganan gratifikasi. <i>Submission of the Company's Performance up to March 2018, achievement of 202.1% New Contracts, Sales and net profit above the 2018 RKAP target, credit plafond was needed to be hastened in anticipation of smooth business and regarding handling gratification.</i> "	✓	n/a	✓	✓	n/a	✓	n/a	✓	✓	✓
5.	24 Mei 2018 <i>May 24, 2018</i>	Kinerja sampai April 2016, Penanganan piutang yang fluktuatif Progres PMN, Evaluasi kinerja Pabrik Komponen-Turbin-Himbauan penanganan gratifikasi.	✓	n/a	✓	✓	n/a	*1)	n/a	✓	✓	✓
6.	26 Juni 2018 <i>June 26, 2018</i>	"Pembahasan terkait kinerja perusahaan s.d akhir Mei 2018, kontrak baru mencapai 107%, Penjualan 141.5% dari target dan Laba bersih, memperkuat bisnis pembangkit untuk peluang pasar, serta penanganan atas gratifikasi. <i>The Company's performance up to the end of May 2018, namely the new contract reached 107%, sales 141.5% of the target and net profit, Strengthen power plant business for market opportunities and regarding handling gratification.</i> "	✓	a	✓	✓	n/a	✓	n/a	✓	✓	✓
7.	30 Juli 2018 <i>July 30, 2018</i>	"Pembahasan terkait kinerja perusahaan s.d bulan Juni 2018 yang mencapai peningkatan, peningkatan pembiayaan proyek PLTM Batang Toru melalui MTN Tahap II, rencana akuisisi saham PT General Electric, serta penanganan gratifikasi. <i>Discussion of June 2018 performance which reached an increase, Regarding Batang Toru MHP project financing, Phase II MTN would be issued. The plan to acquire PT General Electric to control power plant market, and handling gratification.</i> "	✓	a	✓	✓	n/a	✓	n/a	✓	✓	✓
8.	30 Agustus 2018 <i>Aug 30, 2018</i>	"Pembahasan terkait eksekusi pabrik siemens dengan dana PMN telah di setujui, peningkatan kontrak baru, antisipasi proyek turn-key dengan rencana penerbitan MTN Tahap II (200M), serta penanganan gratifikasi <i>The execution of Siemens Turbine Plant assets was approved and used PMN funds, The acquisition of new contracts showed an increase, The acquisition of new contracts showed an increase, anticipating the implementation of Turn Key projects.</i> "	✓	a	✓	✓	n/a	✓	n/a	✓	✓	✓

No.	TANGGAL DATE	MATERI BAHASAN Discussion Material	DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners					DIREKSI Directors				
			TRI	SAM	ADR	KAT	SDR	SIL	OKS	YOK	TON	BOB
9.	26 Sep 2018 <i>Sep 26, 2018</i>	"Pembahasan laporan kinerja bulan agustus 2018, perubahan struktur organisasi (penambahan eks. siemens), aksi korporasi GE karena potensi negatif yang ada, dan penanganan gratifikasi. <i>Discussion of August 2018 Performance Report, Changes in organizational structure due to ex siemens units, GE Corporate Action Plan, to be avoided because there was a considerable negative potential. Questions regarding handling gratification.</i> "	✓	a	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	✓
10.	31 Oktober 2018 <i>Oct 31, 2018</i>	"Pembahasan capaian target hingga sep 2018 diakui oleh Deputy PISM, Perlu adanya peningkatan pengawasan proyek, serta penanganan gratifikasi. <i>Target achievement up to September 2018 which recognized by PISM Deputy. Project Supervision that should be improved, and regarding handling gratification.</i> "	✓	*2)	n/a	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	✓
11.	3 Desember 2018 <i>Dec 3, 2018</i>	"Pembahasan terkait penyampaian konten RKAP 2019 yang perlu diperbaiki, penggunaan aset sebagai agunan dalam KMK, pengadaan oleh kementerian pertanian, dan penanganan atas gratifikasi <i>The contents of the 2019 RKAP were improved, Submission of permission to collect assets for KMK, Ministry of Agriculture will procure and handling gratification.</i> "	✓	a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✗
12.	19 Desember 2018 <i>Dec 19, 2018</i>	"Pembahasan terkait capaian kinerja hingga nopember 2018, total aset dan ekuitas lebih tinggi dari RKAP 2018, mewaspadai 4 proyek turn-key yang ditangani <i>Performance up to November 2018, Total assets and equity were higher than the 2018 RKAP target, should aware of 4 turnkey projects which were handled, and handling gratification.</i> "	✓	a	n/a	✓		n/a	✓	✓	✓	✓
Jumlah Kehadiran (total attendance)			12	6	9	12	1	7	1	11	11	11
"% Kehadiran (% attendance)"			100%	86%	100%	100%	100%	88%	100%	92%	92%	92%

TRIYOGI YUWONO : TRI | SAM HERODIAN :SAM | ADRIANSYAH :ADR | KATNO : KAT | SUDARSO : SDR
SILMY K. :SIL | OKSARLIDADY A. :OKS | YOYOK HADI S.:YOK | TONY BUDI S.:TON | BOBBY S. A:BOB

*Sudarso diangkat sebagai Komisaris PT Barata Indonesia (Persero) sejak Desember 2018

*Sudarso appointed as Commissioner of PT Barata Indonesia (Persero) since December 2018

Catatan (Notes) :

*1) Rapat Koordinasi (Rakor) BUMN

*2) Pendampingan Kementerian Pertanian

- Pada tanggal 26 Juni 2018, awal keikutsertaan Sam Herodian dalam rapat gabungan. Sam Herodian diangkat sebagai Dewan Komisaris per 8 Juni 2018 sesuai SK Mentri BUMN No.SK 194/MBU/06/2018.
- Untuk rapat gabungan tanggal 26 Sep 2018, Silmy Karim sudah tidak ikut lagi karena telah pindah menjadi Direktur Utama Krakatau Steel (pindah sejak 6 Sep 2018).
- Per Nopember 2018, Adriansyah sudah tidak aktif lagi sebagai Dewan Komisaris.
- Rapat tanggal 19 Desember 2018 sebagai awal keikutsertaan Oksarlidady Arifin sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero) yang baru.

Notes (Notes) :

* 1) SOEs Coordination Meeting

* 2) Assistance to the Ministry of Agriculture

- On June 26, 2018, the beginning of Sam Herodian's participation in a joint meeting. Sam Herodian was appointed as the Board of Commissioners as of June 8, 2018 according to the Minister of SOEs Decree No.SK 194 / MBU / 06/2018.
- In the joint meeting on September 26, 2018, Silmy Karim not participated anymore due to his appointment as President Director of Krakatau Steel (September 6, 2018)
- As of November 2018, Adriansyah is no longer active as the Board of Commissioners.
- Joint Meeting on December 19, 2018 was the first participation of Oksarlidady Arifin as the new President Director of PT Barata Indonesia (Persero)

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor. PER-10/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN, Dewan Komisaris telah membentuk Komite untuk membantu kinerja Dewan Komisaris. Komite-Komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam fungsinya membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dengan mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah disusun untuk masing-masing Komite berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Barata Indonesia (Persero) No. K 17 157a 27 Juli 2017 tentang Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT Barata Indonesia (Persero).

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung Dewan Komisaris, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Komite Manajemen Risiko.

1. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)

Ketua	: Katno
Anggota	: Sam Herodian
Anggota	: Bambang Sampurno
2. Komite Audit (*Audit Committee*)

Ketua	: Adriansyah hingga November 2018, lalu digantikan Sam Herodian
Anggota	: Yudha Andrian Saputra

Dalam bentuk lisan maupun tulisan. Mengingat pentingnya sistem pengendalian internal dalam kelangsungan usaha suatu bisnis, maka Perseroan mewajibkan adanya sistem pengendalian internal yang efektif guna mengamankan aset dan investasi Perseroan serta melakukan pengujian secara berkala.

Committees Under The Board Of Commissioners

In accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-10/MBU/2012 regarding the Board of Commissioners or SOEs Supervisory Board Supporting Organs, the Board of Commissioners established Committee(s) to assist the Board of Commissioners performance. These Committees are responsible to the Board of Commissioners in its functions to assist the Board of Commissioners duties and responsibilities implementation by referring to the Charter that has been prepared for each Committee based on PT Barata Indonesia (Persero) Board of Commissioners and Directors Joint Decree No. K 17 157a July 27, 2017 regarding Board Manual of PT Barata Indonesia (Persero).

In conducting its duties, the Board of Commissioners is assisted by the Board of Commissioners supporting organs, namely the Board of Commissioners Secretary, Audit Committee, and Risk Management Committee.

1. Risk Management Committee

Chairman	: Katno
Member	: Sam Herodian
Member	: Bambang Sampurno
2. Audit Committee (*Audit Committee*)

Chairman	: Adriansyah up to November 2018, then was replaced by Sam Herodian
Member	: Yudha Andrian Saputra

In oral and written forms. Considering the importance of the internal control system in the business continuity, the Company requires an effective internal control system to secure the Company's assets and investments and conduct periodic testing.

KOMISARIS INDEPENDEN Independent Commissioner

Komisaris Barata Indonesia adalah Komisaris Independen yang diangkat oleh Pemegang Saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang merupakan Komisaris dari pihak luar dimana ada 1(satu) orang atau lebih Komisaris Independen dan 1(satu) orang Komisaris Utusan.

Commissioner Barata Indonesia is an Independent Commissioner is appointed by Shareholders based on Law Number 40/ 2007 regarding Limited Liability Companies (UUPT) who are Commissioners from external parties which there shall be 1 (one) or more Independent Commissioners and 1 (one) Commissioner of Representatives .

Berdasarkan SK-165/MBU/09/2015 tanggal 2 September 2015 menetapkan Sdr. Katno, Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia sebagai Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dimaksud.

Based on SK-165 / MBU / 09/2015 dated September 2, 2015 appointed Mr. Katno, Commissioner of PT Barata Indonesia (Persero) as Independent Commissioner of PT Barata Indonesia (Persero, with office term continuing the remaining office term as Minister of State-Owned Enterprises decree.

DIREKSI *Board Of Directors*

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007).

The Board of Directors is the Company's organ that has the authority and is fully responsible for the management of the Company for the interests of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and representing the Company, both inside and outside the court in accordance with articles of association (Article 1 paragraph (5) Law No. 40 In 2007).

Direksi bertugas secara kolegial, namun agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas, maka dilakukan pembagian tugas diantara anggota Direksi. Namun demikian, sekalipun telah dilakukan pembagian tugas tanggung jawab atas pengurusan Perseroan secara keseluruhan tetap berada pada Direksi secara kolegial (board) sebagai organ Perseroan.

The Board performs its tasks collegially, but in order to be more effective and efficient in carrying out their duties, the division of tasks is carried out among members of the Board of Directors. However, even though the division of duties for responsibility for managing the Company as a whole has remained in the collegial (board) Board of Directors as the Company's organ.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang maka pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi ditetapkan melalui Rapat Direksi (Pasal 92 ayat 5 & 6 UU No. 40 Tahun 2007).

The division of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined by the GMS, in the case that the GMS does not stipulate it, the division of duties and authorities among Directors is determined through a Board of Directors Meeting (Article 92 paragraph 5 & 6 Law No. 40 of 2007).

1. WEWENANG DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas, Direksi berwenang (Pasal 11 Ayat 2 Anggaran Dasar PT Barata Indonesia (Persero) Tahun 2017) ;

- a. Menetapkan kebijakan pengurusan Perseroan yang berlaku secara korporat termasuk Anak Perusahaan;
- b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan didalam dan di luar pengadilan.
- c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

1. WEWENANG DIREKSI

In carrying out the duties, the Board of Directors is authorized (Article 11 Paragraph 2 of the 2017 Articles of Association of PT Barata Indonesia (Persero)) to ;

- a. Determine the management policy of the Company that applies corporately including Subsidiaries;*
- b. Regulates the submission of the Board of Directors' power to someone or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or represent the Company inside and outside the court.*
- c. Regulates the surrender of the power of the Board of Directors to one or several employees of the Company either individually or jointly or to others, to represent the Company inside and outside the court.*

- d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pension atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pension atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- e. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan.
- g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Pemegang Saham.
- h. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila Anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa (Pasal 97 ayat (5) UU No.40 Tahun 2007) :
 1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 4. telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian tersebut.

2. KEWAJIBAN DIREKSI

Untuk tugas dan wewenang masing-masing Anggota Direksi diatur lebih lanjut dalam suatu keputusan Direksi dan secara garis besar meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. TERKAIT DENGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
 - a. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (Pasal 6 ayat (1) huruf

d. Regulate the terms of employment of the Company including the stipulation of salary, retirement or pension and other income for the Company's employees based on applicable laws and regulations, with provisions for stipulating salary, pension or old age security and other income for workers that exceed the stipulated obligations statutory regulations, must get prior approval from the General Meeting of Shareholders (GMS).

e. Appoint and dismiss employees based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations.

f. Appoint and dismiss the Corporate Secretary.

g. Take all other actions regarding the management or ownership of the Company's assets, bind the Company to other parties and / or other parties with the Company, and represent the company inside and outside the court regarding all matters and events, with restrictions as stipulated in the regulations legislation, Articles of Association and / or Shareholders' Meeting Decisions.

h. Each member of the Board of Directors is fully responsible personally if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties for the interests and business of the Company, unless the member concerned can prove that (Article 97 paragraph (5) Law No. 40 of 2007):

- 1. the loss is not due to his/her error or negligence;*
- 2. has performed management in good faith and prudence for the interests and in accordance with the purposes and objectives of the Company;*
- 3. no conflict of interest, either directly or indirectly, over management actions that result in losses;*
- 4. has taken action to prevent the continuing loss.*

2. The Board of Directors' Obligation

The duties and authority of each member of the Board of Directors are further stipulated in a decision of the Board of Directors and broadly covers the following matters:

- 1. Relating to General Meeting of Shareholders*

a. Give an explanation to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan and Company Work Plan and Budget (Article 6 paragraph (1) letter (d) Permen No. PER-01 / MBU

- (d) Permen No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011);
- b. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan tahunan termasuk laporan keuangan kepada RUPS;
- c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir (Pasal 23 ayat (1) UU No.19 Tahun 2003);
- d. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuanperundang-undangan serta laporan lainnya setiap diminta oleh Pemegang Saham;
- e. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada RUPS setelah ditelaah olehDewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
- f. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai laporan tahunan (Pasal 11 ayat 2 bagian (b.8) Anggaran Dasar PT Barata Indonesia (Persero) tahun 2017) ;
- g. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa (Pasal 79 UU No.40 Tahun 2007) ;
- h. Menyediakan bahan RUPS kepada Pemegang Saham di kantor Perseroan;
- i. Membuat risalah RUPS yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta,pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS (Pasal 6 ayat (4) Permen No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011);
- j. Memberikan salinan risalah RUPS kepada Pemegang Saham (Pasal 6 ayat (7) Permen No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011) ;
- k. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan antara lain Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya (Pasal 22 ayat (1) huruf a-d Permen No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011).

2. TERKAIT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

- a. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat (Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar

/ 2011 dated August 1, 2011);

- b. *Provide accountability and all information regarding the condition and running of the Company in the form of annual report including financial report to the GMS;*
- c. *Compose the annual report and submit it to the GMS after being reviewed by the Board of Commissioners within a period of no later than 5 (five) months after the Company's financial year ends (Article 23 paragraph (1) of Law No.19 of 2003);*
- d. *Provide periodic reports in a manner and time in accordance with the provisions of the legislation and other reports every time requested by the Shareholders;*
- e. *Compose an annual report and submit it to the GMS after being reviewed by the Board of Commissioners within a period of no later than 5 (five) months after the Company's financial year has ended;*
- f. *Narrate explanation to the GMS regarding the annual report (Article 11 paragraph 2 part (b.8) of the Articles of Association of PT Barata Indonesia (Persero) in 2017);*
- g. *Call and hold Annual GMS and / or Extraordinary GMS (Article 79 of Law No. 40 of 2007);*
- h. *Providing GMS materials to Shareholders at the office;*
- i. *Make minutes of the GMS which at least contain the time, agenda, participants, opinions that occur in the GMS, and the resolution of the GMS (Article 6 paragraph (4) Permen No. PER-01 / MBU / 2011 dated 1 August 2011);*
- j. *submit the copy of the minutes of the GMS to the Shareholders (Article 6 paragraph (7) Permen No. PER-01 / MBU / 2011 dated 1 August 2011);*
- k. *Store at the Company's domicile includes List of Shareholders, Special List, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners Meetings and Minutes of Board of Directors Meetings, Annual Reports and Company financial documents and other Company documents (Article 22 paragraph (1) letter ad Candy No. PER- 01 / MBU / 2011 August 1, 2011).*

2. Relating to Corporate Work Plan and Budget :

- a. *The Board of Directors sets the Work Plan and Company Budget for each financial year, which at least contains (Article 17 paragraph (1) Articles of Association of PT*

PT Barata Indonesia (Persero) tahun 2017) ;

- a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
 - b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;
 - d. Program Kerja Dewan Komisaris; dan
 - e. Hal-hal yang memerlukan keputusan RUPS.
- b. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditanda tangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham ;
- c. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku .
- c. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disetujui RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan .
- d. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/ atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada point (b.4) diatas, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.
- e. Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada point (c) diatas harus disediakan dikantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS untuk kepentingan Pemegang Saham.
- f. Selain itu juga wajib untuk :
- i. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha (Pasal 11 ayat (2) point (b.1) Anggaran Dasar PT Barata Indonesia (Persero) tahun 2017) ;
 - ii. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS (Pasal 11 ayat (2) point (b.2) Anggaran Dasar PT Barata Indonesia (Persero) tahun 2017);
 - iii. Menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang

Barata Indonesia (Persero) in 2017);

- a. Mission, business objectives, business strategies, company policies, and work programs / activities;*
 - b. The Company's budget detailed on each work program / activity budget;*
 - c. Financial projections of the Company and its subsidiaries;*
 - d. Board of Commissioners Work Program; and*
 - e. Matters that require a GMS decision.*
- b. The Corporate Work Plan and Budget signed by all members of the Board of Directors are submitted to the Board of Commissioners for review and signing before being submitted to the Shareholders;*
- c. The draft of Corporate Work Plan and Budget signed by all members of the Board of Directors and all members of the Board of Commissioners shall be submitted by the Board of Directors to the Shareholders no later than 60 (sixty) days before the financial year of the Company's Work Plan and Budget for approval of the GMS with regard to the provisions apply.*
- d. The Draft of Corporate Work Plan and Budget are approved by the GMS no later than 30 (thirty) days after the current fiscal year.*
- e. In the case that the draft of the Corporate Work Plan and Budget has not been submitted by the Board of Directors and / or have not been approved within the period referred to in point (b.4) above, the previous year's Work Plan and Corporate Budget will be enacted.*
- f. The Corporate Work Plan and Budget as referred to in point (c) above must be provided at the Company's office from the date of the call until the date of the GMS for the interest of the Shareholders.*
- g. In addition, it is also mandatory to:*
- i. Strive for and guarantee the implementation of the Company's business and activities in accordance with the aims and objectives and business activities (Article 11 paragraph (2) point (b.1) 2017 Articles of Association of PT Barata Indonesia (Persero);*
 - ii. Preparing in time the Company's Long Term Plan, Company Work Plan and Budget, and changes and submitting it to the Board of Commissioners and Shareholders to obtain the approval of the GMS (Article 11 paragraph (2) point (b.2) Articles of Association of PT Barata Indonesia (Persero) 2017);*
 - iii. Prepare a draft of Long Term Company Plan (RJPP)*

Perseroan (RJPP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perseroan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ;

- iv. Memastikan tercapainya sasaran-sasaran jangka panjang yang tercantum dalam RJPP;
- v. Memastikan tercapainya target-target jangka pendek yang tercantum dalam RKAP melalui penetapan target kinerja yang diturunkan di tingkat satuan kerja dan jabatan dalam struktur organisasi Perseroan.

3. TERKAIT DENGAN MANAJEMEN RISIKO

- a. Membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program *Good Corporate Governance* dengan membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi atau memberipenugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko;
- b. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program *Good Corporate Governance*;
- c. Menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala Perseroan.

4. TERKAIT DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI

- a. Menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif;
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris;
- c. Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di Perseroan.

5. TERKAIT DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- a. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya ;
- b. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan ;
- c. Menyusun dan melaksanakan pedoman pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi sistem perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, penempatan pekerja dan jabatan dalam struktur organisasi Perseroan, promosi dan demosi serta mutasi;
- d. Memastikan penempatan Pekerja sesuai dengan kriteria jabatan dalam struktur organisasi Perseroan;
- e. Menyampaikan kepada Dewan Komisaris rencana

which is a strategic plan that contains the Company's goals and objectives to be achieved within a period of 5 (five) years;

- iv. *Ensure the achievement of the long-term goals stated in the RJPP;*
- v. *Ensure the achievement of short-term targets listed in the RKAP through the establishment of performance targets that are lowered at the work unit level and positions within the Company's organizational structure*

3. Relating to the Risk Management :

- a. *Establish and implement a corporate risk management program in an integrated manner that is part of the implementation of the Good Corporate Governance program by forming a separate work unit under the Board of Directors or assigning it to existing work units and relevant to carry out the risk management function;*
- b. *The Board of Directors must establish and implement a corporate risk management program in an integrated manner which is part of the implementation of the Good Corporate Governance program;*
- c. *Submitting a risk management profile report and handling it together with the Company's periodic reports.*

4. Relating to Information Technology

- a. *Establish effective information technology governance;*
- b. *Submit a periodic report on the implementation of information technology governance to the Board of Commissioners;*
- c. *Maintain and evaluate the quality of information technology governance functions in the Company.*

5. Relating to Human Resources :

- a. *Prepare the Company's organizational structure complete with details and duties;*
- b. *Prepare and determine the organization's blue print;*
- c. *Compile and implement guidelines for management of human resources covering the human resource planning system, recruitment, selection, placement of employee and positions in the Company's organizational structure, promotion and demotion and mutations;*
- d. *Ensure the placement of employee in accordance with the position criteria in the Company's organizational structure;*
- e. *Submit to the Board of Commissioners an organizational*

struktur organisasi 2 (dua) level dibawah Direksi;

- f. Meminta persetujuan Dewan Komisaris terkait dengan pengangkatan Kepala Satuan Pengawasan Internal dan Sekretaris Perseroan ;
- g. Memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada pekerja sesuai dengan kompetensi jabatan;
- h. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja untuk satuan kerja dan jabatan dalam organisasi secara obyektif dan transparan;
- i. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS;
- j. Mengangkat dan memberhentikan Pekerja berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. TERKAIT DENGAN ETIKA BERUSAHA DAN ANTI KORUPSI

- a. Mengembangkan dan memimpin penerapan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG);
- b. Menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perseroan ;
- c. Tidak memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada dan/atau dari pejabat pemerintah dan/atau pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Memastikan seluruh kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada lembaga pemerintah yang berwenang dipatuhi oleh semua wajib lapor yang ditetapkan dalam lingkungan Perseroan ;
- e. Melakukan sosialisasi dan implementasi atas program pengendalian gratifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

7. TERKAIT DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

- a. Menetapkan kebijakan tentang sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi, kegiatan usaha dan aset Perseroan;
- b. Memberikan masukan atas sistem pengendalian internal yang diterapkan Perseroan serta melakukan tindak lanjut dan monitoring atas rekomendasi yang diberikan oleh satuan pengawasan internal untuk memastikan sistem pengendalian internal yang efektif;

structure plan of 2 (two) levels below the Board of Directors;

- f. Request approval from the Board of Commissioners regarding the appointment of the Head of the Internal Audit Unit and the Corporate Secretary;*
- g. Ensure the implementation of education and training for employee in accordance with job competencies;*
- h. Measure and evaluate performance for work units and positions in the organization objectively and transparently;*
- i. Regulate provisions concerning the Company's staffing including stipulation of salaries, pensions or old-age benefits and other income for employees based on the applicable laws and decisions of the GMS;*
- j. Appoint and dismiss employees based on the Company's staffing regulations and applicable laws and regulations.*

6. Relating to Business Ethics and Anti-Corruption :

- a. Develop and lead the application of Good Corporate Governance (GCG) guidelines;*
- b. Set provisions that regulate the reporting mechanism for alleged mismanagement in the Company;*
- c. Give or offer or accept either directly or indirectly no valueable things to and / or from government officials and / or other parties that influence or as a reward for what they have done and other actions in accordance with applicable laws and regulations;*
- d. Ensure all obligations to declare State Owned Enterprise Assets Reports (LHKPN) to authorized government institutions are complied with by all mandatory reports specified within the Company;*
- e. Disseminate and implement gratification control programs in accordance with applicable laws and regulations.*

7. Relating to Internal Control System :

- a. Establish policies on an effective internal control system to secure investments, business activities and assets of the Company;*
- b. Provide input on the internal control system implemented by the Company and carry out follow-up and monitoring of recommendations provided by the internal control unit to ensure an effective internal control system;*

- c. Menyelenggarakan pengawasan internal dengan membentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI). Penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi Satuan Pengawasan Internal diatur dalam Piagam Satuan Pengawasan Internal yang ditetapkan dengan keputusan Direksi ;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan internal secara periodik kepada Dewan Komisaris ;
- e. Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan internal di Perseroan .

8. TERKAIT DENGAN KETERBUKAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI

- a. Mengungkapkan penerapan *Good Corporate Governance* di Perseroan dan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan dan informasi lainnya kepada pihak lain, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif ;
- b. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Dalam hal menjaga kerahasiaan informasi Perseroan, Direksi dituntut untuk mengutamakan kepentingan Perseroan daripada kepentingan individu atau kelompok.

9. TERKAIT DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

- a. Melakukan pengukuran terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam bentuk:
 - a. Penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di Perseroan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di Perseroan yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun.
 - b. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana pada butir a), yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
- b. Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan .
- c. Menunjuk salah seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perseroan melalui mekanisme rapat Direksi ;

- c. *Organize internal supervision by establishing an Internal Control Unit (SPI). Further elaboration of the duties and functions of the Internal Oversight Unit is regulated in the Charter of the Internal Audit Unit determined by the decision of the Board of Directors;*

- d. *Submit a report on the implementation of periodic internal audit functions to the Board of Commissioners;*
- e. *Maintain and evaluate the quality of the internal audit function in the Company.*

8. Relating to Information Disclosure and Confidentiality

- a. *Disclose the implementation of Good Corporate Governance in the Company and important information in annual reports and financial reports and other information to other parties, in accordance with laws and regulations that apply in a timely, accurate, clear and objective manner;*
- b. *Confidential information obtained while serving as a Member of the Company's Board of Directors must be kept confidential in accordance with the applicable laws and regulations;*
- c. *In terms of maintaining the confidentiality of Company information, the Directors are required to prioritize the interests of the Company rather than individual or group interests.*

9. Relating to Implementation of Good Corporate Governance

- a. *Measure the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the form of:*
 - a. *Assessment, namely a program to identify GCG implementation in the Company through measuring the implementation and implementation of GCG in the Company which is carried out periodically every 2 (two) years.*
 - b. *Evaluation, namely a program to describe the follow-up to the execution and implementation of GCG in SOE that is carried out in the following year after the assessment as referred to in point a), which includes evaluation of the results of the assessment and follow-up on recommendations for improvement.*
- b. *The results of the assesment and evaluation are reported to the GMS together with the submission of the annual report.*
- c. *Appoint one of the members of the Board of Directors as the person in charge of the implementation and monitoring of GCG in the Company through the*

- d. Terkait dengan pengawasan kepatuhan Perseroan, dijalankan secara bersama oleh fungsi-fungsi terkait di dalam Perseroan.

10. TERKAIT HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS

- Memastikan terjaminnya hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan Pekerja, pengguna jasa, pemasok dan stakeholders lainnya ;
- Memastikan Perseroan melakukan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
- Memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.

11. TERKAIT SISTEM AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN

- Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan ;
- Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan ;
- Menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan menyerahkan kepada akuntan publik untuk diaudit ;
- Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang.

12. TERKAIT DENGAN TUGAS DAN KEWAJIBAN LAIN

- Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi ;
- Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

mechanism of the Board of Directors meeting;

- d. *Related to the supervision of the Company's compliance, it is carried out jointly by the related functions within the Company.*

10. Relating to the Stakeholders

- Ensure the guarantee of the rights of stakeholders that arise based on the laws and regulations that apply and / or agreements made by the Company with employee, customer, suppliers and other stakeholders;*
- Ensure that the Company carries out its social responsibility in accordance with the established program;*
- Ensure that the assets and location of the business as well as other Company facilities, fulfill legislative regulations relating to occupational health and safety and environmental issues.*

11. Relating to the Accounting and Book-keeping system

- Develop an accounting system in accordance with the Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of management, recording, storage and supervision;*
- Compose Annual Reports as a form of accountability for the management of the Company, as well as the company's financial documents as referred to in the Law concerning Company Documents;*
- Prepare financial statements based on financial accounting standards and submit to public accountants for auditing;*
- Submit Annual Reports including Financial reports to the General Meeting of Shareholders to be approved and ratified, as well as reports on the rights of the Company which are not recorded in bookkeeping, among others, as a result of write-off of payables.*

12. Relating to Other Tasks and Responsibilities :

- Submit a report on changes in the composition of Shareholders, Directors and Board of Commissioners to the Minister of Law and Human Rights;*
- Compose a list of Shareholders, important List, Minutes of General Meeting of Shareholders and Minutes of Directors' Meetings;*
- Deliver the Balance Sheet and Profit and Loss Report that has been ratified by the GMS to the Minister in charge of Law and Human Rights in accordance with the provisions of legislation;*

- d. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dan dokumen perseroan lainnya ;
- f. Menyimpan di tempat kedudukan perseroan, Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi, laporan tahunan dan dokumen perseroan sebagaimana dimaksud dan dokumen perseroan lainnya ;
- g. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan, atau Pemegang Saham ;
- h. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham ;
- i. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar atau yang ditetapkan oleh RUPS dan peraturan perundang – undangan.

13. TERKAIT DENGAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKSI

Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar atau yang ditetapkan oleh RUPS dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat keputusan – keputusan Direksi, baik terkait hal operasional maupun kebijakan lainnya, maka harus disampaikan kepada organisasi satu level dibawah Direksi terkait keputusan, maksimal 7 hari setelah ditetapkan.

KOMPOSISI DIREKSI

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia Nomor SK-305/MBU/12/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia (Sdr. Oksarlidady Arifin).

d. Submit a report on changes in the composition of Shareholders, Directors and Board of Commissioners to the Minister of Law and Human Rights;

e. Responsible for the Shareholders List, Important List, Minutes of General Meeting of Shareholders and Minutes of Directors' Meetings, Annual Reports and company financial documents as intended and other company documents;

f. Store at the company's place of domicile, List of Shareholders, Special List, Minutes of General Meeting of Shareholders and Minutes of Board of Directors Meetings, annual reports and company documents as intended and other company documents;

g. Provide periodic reports in a manner and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and, or Shareholders;

h. Provide an explanation of everything that is asked or requested by members of the Board of Commissioners and Shareholders;

i. Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association or stipulated by the GMS and statutory regulations.

13. Relating to the delivery of the decision of the Board of Directors

Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association or stipulated by the GMS and statutory regulations.

In the event that there are decisions of the Board of Directors, both related to operational matters and other policies, then it must be submitted to organizations one level below the Board of Directors related to the decision, a maximum of 7 days after it is determined.

The composition of the Board of Directors

1. *Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Barata Indonesia Company Number SK-305 / MBU / 12/2018 dated December 19, 2018 concerning Dismissal and Appointment of the President Director of PT Barata Indonesia (Mr. Oksarlidady Arifin).*

2. Berdasarkan Akte Notaris Herawati, S.H Nomor 01 tanggal 06 Februari 2018. Salinan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK - 28/MBU/01/2018 tertanggal 22 Januari 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia, bahwa:
- Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia dari Direktur Operasi dan Pemasaran menjadi Direktur Operasi dan Direktur Pemasaran.
 - Mengalihkan penugasan saudara Tony Budi Santosa yang diangka berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No SK- 261/MBU/11/2017 tanggal 28 November 2017 yang sebelumnya Direktur menjadi Direktur Operasi dan Pemasaran menjadi Direktur Pemasaran dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut.
 - Mengangkat Saudara Bobby Sumardiat Atmosudiro sebagai Direktur Operasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia. Komposisi Dewan Direksi Tahun 2018 sebagai berikut:

Oksarlidady Arifin	: Direktur Utama
Yoyok Hadi Satriyono	: Direktur Keuangan dan SDM
Tony Budi Santosa	: Direktur Pemasaran
Bobby Sumardiat A.	: Direktur Operasi

2. Based on Notary Herawati's Act, S.H Number 01 dated February 6, 2018. A copy of the decision of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK - 28 / MBU / 01/2018 dated January 22, 2018 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, Assignment of Assignments and Appointment of Members of the Directors of PT Barata Indonesia (Persero), that:
- Change the position nomenclature of members of the Board of Directors of PT Barata Indonesia (Persero) from the Director of Operations and Marketing into the Operations Director and Marketing Director.
 - Divert the assignment of Tony Budi Santosa, who was appointed based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-261 / MBU / 11/2017 dated November 28, 2017 as previously the President Director to become Operations and Marketing Director became the Marketing Director with a term of office continuing the remaining tenure in accordance with the Decree Minister of State-Owned Enterprises.
 - Appointed Mr. Bobby Sumardiat Atmosudiro as Director of Operations of PT Barata Indonesia (Persero). The composition of the Board of Directors in 2018 was as follows:

Oksarlidady Arifin	: President Director
Yoyok Hadi Satriyono	: Director of Finance and HR
Tony Budi Santosa	: Marketing Director
Bobby Sumardiat A.	: Operations Director

Selama 2018, Direksi mengadakan rapat internal sebanyak 14 (empat belas) kali pertemuan dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut :

During 2018, the Board of Directors held 14 (fourteen) internal meetings with the attendance rate of each member as follows:

NAMA (Name)	JABATAN (Position)	JUMLAH RAPAT GABUNGAN Number of Joint Meetings	KEHADIRAN YANG DIPERHITUNGGAN Attendance Counted	JUMLAH KEHADIRAN Number of Presence	% KEHADIRAN DARI YANG DIPERHITUNGGAN Attendance Counted
SILMY KARIM	Direktur Utama <i>President Director</i>	14	11	11	100%
OKSARLIDADY ARIFIN	Direktur Utama <i>President Director</i>	14	1	1	100%
YOYOK HADI S.	Direktur <i>Director</i>	14	14	14	100%
TONY BUDI SANTOSA	Direktur <i>Director</i>	14	14	14	100%
BOBBY SUMARDIAT A.	Direktur <i>Director</i>	14	13	12	92%

Berikut ini merupakan agenda rapat dan kehadiran masing-masing anggota Direksi :

The following is the agenda of the meeting and the presence of each member of the Board of Directors:

No.	TANGGAL Date	MATERI BAHASAN Discussion Material	DIREKSI Board of Directors				
			Silmy K.	Oksarlidady A.	Yoyok Hadi S.	Tony Budi S.	Bobby S. A
1.	8 Januari 2018 <i>Jan 8, 2018</i>	"Penguatan Bidang Usaha Pembangkit Listrik (Pembelian Saham GE & Siemens), Struktur Organisasi & SDM, Perubahan Kebijakan Operasional (Keuangan, Pemasaran & Pengadaan). <i>Strengthening Power Plant Business Field (purchasing GE & Siemens Shares), Organizational Structure & HR, Changes in Operational Policies (Finance, Marketing & Procurement)."</i>	✓	n/a	✓	✓	n/a
2.	23 Februari 2018 <i>Feb 23, 2018</i>	"Tindaklanjut Perubahan Kebijakan Operasional (Keuangan, Pemasaran & Pengadaan), Penanganan Divisi Konstruksi, PMN, Aset Non-Produktif dan Modal Kerja. <i>Follow-up to Amendment to Operational Policies (Procurement, Marketing, Finance & HR). Discussion on Handling of the Construction Division, PMN, Non-Earning Assets and Working Capital."</i>	✓	n/a	✓	✓	✓
3.	5 Maret 2018 <i>March 5, 2018</i>	"Tindak lanjut Pengajuan kembali pelepasan asset non produktif. Topik Personel & Struktur Organisasi, Pengelolaan Pabrik Cilegon, Pembahasan prospek proyek-pyek, GR & Siemens, Modal Kerja, PLTU NTB. <i>Follow-up Submission of the release of non-productive assets. Topic of Personnel & Organizational Structure, Cilegon Pebrik Management, Discussion of project prospects, GR & Siemens, Working Capital, NTB PLTU"</i>	✓	n/a	✓	✓	✓
4.	10 April 2018 <i>Apr 10, 2018</i>	"Pembahasan prospek order dan proyek,PMN TA 2018, Modal Kerja, Organisasi dan Tim-tim Penunjang <i>Discussion of prospects & projects, PMN TA 2018,Working Capital, Organizations and Supporting Teams."</i>	✓	n/a	✓	✓	✓
5.	25 April 2018 <i>Apr 25, 2018</i>	"Modal Kerja disepakati untuk mencairkan fasilitas Murabahah sebesar Rp 25 Milyar untuk Proyek PG Rendeng (Kudus). <i>Working Capital was agreed to disburse the Murabahah facility in the amount of Rp 25 billion for the PG Rendeng (Kudus) Project."</i>	✓	n/a	✓	✓	✓
6.	27 April 2018 <i>Apr 27, 2018</i>	"Permasalahan Gangguan Sosial pada Proyek Tanki Blok A - Aceh, Aspek Legal & Komersial. <i>Problems with Social Disruption in the Block A - Aceh Tank Project, Legal & Commercial Aspects."</i>	✓	n/a	✓	✓	✓
7.	8 Mei 2018 <i>May 8, 2018</i>	"Tindak lanjut Tim Penunjang Kebijakan Perusahaan, Keuangan. Topik Baru tentang Modal Kerja, Inkas 2017, Prospek Order, Evaluasi Proyek, Bonus Karyawan, Struktur Organisasi Divisi, SAP dan Akuisi GEPSI & Siemens. <i>Follow-up of the Corporate Policy Support Team, Finance. New Topics on Working Capital, Inkas 2017, Prospect Orders, Project Evaluation, Employee Bonuses, Division Organizational Structure, SAP and Acquired GEPSI & Siemens."</i>	✓	n/a	✓	✓	✗
8.	5 Juni 2018 <i>June 5, 2018</i>	"PMN, SDM, Evaluasi kondisi BKA & Prospek Pasar 2018. <i>PMN, HR, Evaluation of BKA conditions & Market Prospects 2018."</i>	✓	n/a	✓	✓	✓
9.	18 Juli 2018 <i>July 18, 2018</i>	"Aksi Korporasi Siemens dan Modal Kerja. <i>Siemens Corporate Action and Working Capital."</i>	✓	n/a	✓	✓	✓
10.	16 Agustus 2018 <i>Aug 16, 2018</i>	"Sumber Daya Manusia. <i>Human Resource."</i>	✓	n/a	✓	✓	✓
11.	3 September 2018 <i>Sep 3, 2018</i>	"Tindak lanjut SDM & Modal Kerja, Operasional Cilegon dan Lahan eksekusi sewa ke KIEC. <i>Follow-up of HR & Working Capital, Cilegon Operations and Execution Land lease to KIEC."</i>	✓	n/a	✓	✓	✓

No.	TANGGAL Date	MATERI BAHASAN Discussion Material	DIREKSI Board of Directors				
			Silmy K.	Oksarlidady A.	Yoyok Hadi S.	Tony Budi S.	Bobby S. A
12.	16 Oktober 2018 Oct 16, 2018	"Pabrik Eks Siemens dan lahannya. Aksi Korporasi Akuisi GE, Progres BITEK, Fasilitas Modal Kerja, RKAP 2019, Investasi RJPP 2017 – 2022, Pengembangan Produk, Proyek Bombana, pemanfaatan lahan sebelah masjid. <i>Ex-Siemens factory and land. GE Acquisition Corporate Action, BITEK Progress, Working Capital Facility, 2019 RKAP, 2017 - 2022RJPP Investment, Product Development, Project Bombana, usage of the land next to the mosque.</i> "	n/a	n/a	✓	✓	✓
13.	15 Nopember 2018 Nov 15, 2018	"Aksi Korporasi akuisi aset GEPSI, RKAP 2019, Kondisi Keuangan , Pengolahan Proyek Turnkey, PLTU Nusa Tenggara Barat dan SDM. <i>Corporate Action acquisition of GEPSI assets, 2019 RKAP, Financial Conditions, Management of Turnkey Projects, West Nusa Tenggara Steam Power Plant and HR.</i> "	n/a	n/a	a	✓	✓
14.	21 Desember 2018 Dec 21, 2018	"Proyek Balongan , Struktur Organisasi & Business Process, Proyek PG Gempolkrep & RKAP 2019. <i>Balongan Project, Organizational Structure & Business Process, PG Gempolkrep & RKAP 2019 Projects.</i> "	n/a	✓	a	✓	✓
Jumlah Kehadiran (total attendance)			11	1	14	14	12
% Kehadiran (% attendance)			100%	100%	100%	100%	92%

Catatan (Notes) :

1. n/a : tidak dapat diterapkan (not applicable)
2. Dalam 3 (tiga) pertemuan akhir Direksi, Silmy Karim sudah tidak ikut lagi karena telah pindah menjadi Direktur Utama Krakatau Steel (pindah sejak 6 Sep 2018).
3. Oksarlidady Arifin sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero) dan pertemuan pada tanggal 21 Des 2018 merupakan awal keikutsertaan beliau dalam pertemuan (meeting) Direksi.
4. Bobby Sumardiat baru bergabung dengan PT Barata Indonesia (Persero) per 22 Januari 2018 sebagai Direktur Operasi.
5. Ketidakhadiran Bobby Sumardiat pada pertemuan (meeting) Direksi pada tanggal 8 Mei 2018 dikarenakan beliau sedang bertugas di Proyek Bombana.

Notes:

1. not applicable
2. In the 3 (three) the Board of Directorsfinal meetings, Silmy Karim not attended any other meeting due to his appointment as President Director of Krakatau Steel (since 6 Sep 2018).
3. The meeting on December 21, 2018 was Oksarlidady Arifin first meeting as President Director of PT Barata Indonesia (Persero) ain the Board of Directors' meetings.
4. Bobby Sumardiat joined PT Barata Indonesia (Persero) as of January 22, 2018 as Director of Operations.
5. The absence of Bobby Sumardiat at the Board of Directors' meeting on May 8, 2018 because he was on duty at BombanaProject.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remuneration Policy For Board Of Commissioners And Board Of Directors

Dasar Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kewenangan Pemegang Saham dan ditetapkan dalam RUPS yang formulasinya berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

PROSEDUR KEBIJAKAN REMUNERASI

Kebijakan dan prosedur penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris terdiri dari beberapa tahapan yang mencakup proses penyusunan, analisis, pengajuan, dan penetapan. Penyusunan kebijakan dan usulan remunerasi dilaksanakan oleh Direksi. Rekomendasi remunerasi tersebut kemudian diteruskan pada Dewan Komisaris untuk dibahas dan dianalisis. Pada tahapan terakhir, rekomendasi remunerasi diajukan dalam RUPS.

Penetapan Penghasilan yang berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan dan faktor-faktor lain yang relevan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Penetapan Penghasilan yang berupa Tantiem/Insentif Kinerja yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja Perseroan serta faktor-faktor lain yang relevan

STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor:SK-148/MBU/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 serta berdasarkan keputusan agenda ke-5 RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 PT Barata Indonesia (Persero) tanggal 25 April 2018 maka telah ditetapkan penghasilan (gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif kinerja) tahun 2018 Direksi sebagai berikut :

- Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp 100.000.000,- dan tunjangan rumah sebesar Rp 22.500.000,- per bulan.
- Direktur Anggota ditetapkan sebesar 85% dari gaji Direktur Utama
- Penetapan Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 (satu) kali Gaji.
- Total Insentif Kinerja (IK) untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017 ditetapkan sebesar Rp 2.220.360.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), dengan ketentuan :

The Determination of Board of Commissioners and Directors basis is the authority of the Shareholders and determined in GMS which its formulation is based on SOE Minister Regulation No. PER-04 / MBU / 2014 dated March 10, 2014 regarding Guidelines for Determining Income of Directors, Board of Commissioners and BUMN Supervisory Board.

Remuneration Policy Procedure

Remuneration policy and procedure for the Board of Commissioners consists of several stages including preparation, analysis, submission and stipulation process. Formulation of remuneration policy and proposal are carried out by the Board of Directors. The remuneration recommendation is forwarded to the Board of Commissioners to be discussed and analyzed. At the final stage, the remuneration recommendation is submitted in the GMS.

Stipulation of Remuneration as Salary or Honorarium, Allowance and Facilities that are fixed is done by considering business scale factor, business complexity factor, inflation rate, the Company's financial condition and capacity and other relevant factors as well as not violating the Law. Stipulation of Remuneration as Bonus/ Performance Incentive that is variable (merit rating) is done by considering the Company's performance facotr and other relevant factors.

Board of Directors' Remuneration Structure

Based on the Minister of BUMN Decree No. SK-148/MBU/05/2018 dated May 31, 2018 and based on the Annual General Meeting of Shareholders 2017 of PT Barata Indonesia (Persero) fifth agenda decision dated April 25, 2018, remuneration has been determined (salary / honorarium , allowances, facilities and incentives) of the Board of Directors in 2018 was as follows:

- *President Director's salary is Rp 100,000,000, and house allowance is Rp 22,500,000 per month.*
- *The Board of Directors' Members is set at 85% of the salary of the Main Director*
- *Determination of Religious Holidays Allowance of 1 (one) time Salary.*
- *Total Performance Incentives (IK) for the Board of Directors and Commissioners for 2017 Financial Year were Rp 2,220,360,000 (two billion two hundred twenty three million six hundred sixty thousand rupiahs), by considering:*

- a. IK Direktur Utama, Anggota Direksi Lainnya, Komisaris Utama masing-masing sebesar 100%, 90% dan 45% dari IK Direktur Utama.
- b. IK Anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari IK Komisaris Utama.
- c. Besaran IK dihitung proporsional sesuai dengan masa jabatan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris dalam Tahun Buku 2017.
- d. Pajak penghasilan (PPh) atas IK menjadi beban penerima dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya perusahaan.
- Asuransi purna jabatan diberikan pada setiap masa jabatan Direksi berakhir yang diberikan dalam bentuk pengikutsertakan dalam program asuransi yang preminya ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun.
- Penetapan tunjangan dan fasilitas Direksi tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 dan peraturan perubahannya, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor:SK-148/MBU/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 serta berdasarkan keputusan agenda ke-5 RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 PT Barata Indonesia (Persero) tanggal 25 April 2018 maka telah ditetapkan penghasilan (gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif kinerja) tahun 2018 Dewan Komisaris sebagai berikut :

- Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari Direktur Utama.
- Komisaris Anggota ditetapkan sebesar 90% dari Komisaris Utama
- Penetapan Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 (satu) kali Honorarium.
- Total Insentif Kinerja (IK) untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017 ditetapkan sebesar Rp 2.220.360.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), dengan ketentuan :
 - a. IK Direktur Utama, Anggota Direksi Lainnya, Komisaris Utama masing-masing sebesar 100%, 90% dan 45% dari IK Direktur Utama.
 - b. IK Anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari IK Komisaris Utama.
 - c. Besaran IK dihitung proporsional sesuai dengan masa jabatan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris

- a. President Director, Board of Directors members, President Commissioner IK amounting to 100%, 90% and 45% of President Director IK respectively.
- b. Board of Commissioners' members IK is 90% of President Commissioner IK.
- c. The amount of IK is proportionally calculated according to each of Board of Directors and Commissioners office term in 2017.
- d. Income tax (PPh) on IK is paid by the recipient and is not permitted to be charged as a company expense.
- After-term insurance is granted in the end of the Board of Directors office term in the form of participation in an insurance program whose premium is paid by the company at 25% of salary within 1 year.
- Determination of Directors' allowances and facilities in 2018 was in accordance with SOE Minister Regulation No. PER-04 / MBU / 2014 dated March 10, 2014 and its amendments, as last amended by SOE Minister Regulation Number: PER-06 / MBU / 06/2018 dated June 4, 2018 regarding Guidelines for Determining Income of Directors, Board of Commissioners and BUMN Supervisory Board .

Board of Commissioners Remuneration Structure

Based on the Minister of SOE Decree No. SK-148 / MBU / 05/2018 dated 31 May 2018 and based on the decision of the fifth agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2017 PT Barata Indonesia (Persero) dated 25 April 2018, income has been determined (salary / honorarium , 2018 Board of Commissioners' performance allowances, facilities and incentives as follows:

- President Commissioner's honorarium is set at 45% from the President Director.
- Board of Commissioners' members remuneration are 90% of the President Commissioner
- Determination of Religious Holidays Allowance of 1 (one) time Honorarium.
- Total Performance Incentives (IK) for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2017 were Rp 2,220,360,000 (two billion two hundred twenty three million six hundred sixty thousand rupiahs), considering by:
 - a. President Director, Board of Directors members, President Commissioner amounted to 100%, 90% and 45% of President Director IK respectively.
 - b. the Board of Commissioners IK is 90% of President Commissioner IK.
 - c. The amount of IK is proportionally calculated according to each of Board of Directors and Commissioners office

dalam Tahun Buku 2017.

d. Pajak penghasilan (PPH) atas IK menjadi beban penerima dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya perusahaan.

- Asuransi purna jabatan diberikan pada setiap masa jabatan Direksi berakhir yang diberikan dalam bentuk pengikutsertakan dalam program asuransi yang preminya ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun.
- Penetapan tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 dan peraturan perubahannya, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

ASSESSMENT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Barata Indonesia (Persero) No: K 17 157a tentang Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) Tahun 2017.

Seluruh anggota Direksi yang menjabat pada periode tahun 2018 telah lulus dalam fit & proper test dan memperoleh persetujuan dari Kementerian BUMN sebelum diangkat menjadi Direksi PT Barata Indonesia melalui RUPS untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.

term in 2017.

d. Income tax (PPH) on IK is paid by the recipient and is not permitted to be charged as a company expense.

- After-term insurance is granted in the end of each the Board of commissioners' office term in the form of participation in an insurance program whose premium is paid by the company at 25% of salary within 1 year.
- Determination of the Board of Commissioners' allowances and facilities in 2018 in accordance with Minister of SOEs Regulation No. PER-04 / MBU / 2014 dated March 10, 2014 and its amendments, as last amended by Minister of SOEs Regulation Number: PER-06 / MBU / 06/2018 dated June 4, 2018 regarding Guidelines for Determining Income of Directors, Board of Commissioners and SOESupervisory Board .

Assessment of the Board of Commissioners and Directors

Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Barata Indonesia (Persero) No: K 17 157a regarding the Guidelines for Directors and Board of Commissioners (Board Manual) in 2017.

All of the Board of Directors members who serve in 2018 have passed fit & proper test and obtained approval from ministry of state-owned enterprise before appointed as bright PT Barata Indonesia of Directors through GMS to perform duty and function in their position.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Affiliation Of Board Of Commissioners And Board Of Directors

	HUBUNGAN KEKELUARGAAN Family Relationship			HUBUNGAN BISNIS Business Relationship		
	Dewan Komisaris BOC	Direksi BOD	Pemegang Saham	Dewan Komisaris BOC	Direksi BOD	Pemegang Saham
DEWAN KOMISARIS BOC						
TRIYOGI YUWONO	X	X	X	X	X	X
KATNO	X	X	X	X	X	X
SAM HERODIAN	X	X	X	X	X	X
ADRIANSYAH	X	X	X	X	X	X

	HUBUNGAN KEKELUARGAAN <i>Family Relationship</i>			HUBUNGAN BISNIS <i>Business Relationship</i>		
	Dewan Komisaris BOC	Direksi BOD	Pemegang Saham	Dewan Komisaris BOC	Direksi BOD	Pemegang Saham
DIREKSI <i>BOD</i>						
OKSARLIDADY ARIFIN	X	X	X	X	X	X
YOYOK HADI SATRIYONO	X	X	X	X	X	X
TONY BUDI SANTOSO	X	X	X	X	X	X
BOBBY SUMARDIAT A.	X	X	X	X	X	X

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal kekeluargaan dan bisnis dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Seluruh anggota Dewan Komisaris juga tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal kekeluargaan dan bisnis dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham.

All members of the Board of Directors have no affiliation both family and business relation with other members of the Board of Directors, Commissioners members and Shareholders. All of Board of Commissioners members also have no affiliation both family and business relation with other Board of Commissioners, Board of Directors members and Shareholders.

INFORMASI RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Information On Concurrent Positions Of Board Of Commissioners And Board Of Directors

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada satu lembaga/perusahaan, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada satu anak perusahaan.

Namun, jabatan rangkap diperbolehkan apabila anggota Dewan Komisaris non-independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.

Per 31 Desember 2018, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki jabatan rangkap pada Badan Usaha lain atau Badan Usaha Milik Negara.

Disclosure Of The Board Of Commissioners Concurrent Positions

The Board of Commissioners members may only hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners, Directors, or Executive Officers in one institution / company, or members of the Board of Commissioners, Directors, or Executive Officers who perform supervisory functions in one subsidiary.

However, concurrent positions are permitted if non-independent members of the Board of Commissioners perform functional duties from shareholders in the form of legal entities in its business groups; and / or members of the Board of Commissioners occupy positions in non-profit organizations or institutions, as long as the relevant not neglect its duties and responsibilities implementation as the Board of Commissioners members.

As of December 31, 2018, all of the Board of Commissioners members have no concurrent positions in other Business Entities or State-Owned Enterprises.

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Per 31 Desember 2018, tidak terdapat anggota Direksi PT Barata Indonesia yang memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris pada Badan Usaha lain dan anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara.

Disclosure Of The Board Of Directors Concurrent Positions

As of December 31, 2018, there were no members of PT Barata Indonesia Board of Directors of who held concurrent positions as Commissioners in other Business Entities and members of the Board of Commissioners in State-Owned Enterprises.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Diversity Of Composition Of Board Of Commissioners And Board Of Directors

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DIREKSI & KOMISARIS

Penetapan komposisi Direksi & Komisaris mengacu pada kebijakan keberagaman. Pertimbangan aspek keberagaman pendidikan dan pengalaman kerja dilakukan dalam rangka menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat baik untuk menangkap peluang maupun meminimalisir risiko dan menghormati dan menghargai hak setiap warga negara terkait aspek keberagaman usia dan gender. Namun kebijakan tersebut tetap memperhatikan prioritas kebutuhan terkait bidang usaha yang dijalankan Perusahaan. PT Barata Indonesia menetapkan komposisi Direksi & Komisaris dengan memperhatikan keberagaman yang mencakup :

Board of Directors & Commissioner Diversity Policy

Stipulation of the Board of Directors & Commissioner composition refers to the diversity policy. Consideration of aspects of diversity of education and work experience is carried out in the context of facing tighter business competition both for seizing opportunities and minimizing risks and respecting the rights of every citizen related to aspects of age and gender diversity. However, this policy still prioritizes the of needs related to the business sector that is run by the Company. PT Barata Indonesia establishes the composition of the Board of Directors & Commissioner by considering diversity that includes:

ASPEK KEBERAGAMAN <i>Diversity Aspect</i>	KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS <i>Board Of Commissioners Diversity</i>
PENDIDIKAN <i>Education</i>	Komposisi Dewan Komisaris terdiri dari berbagai macam latar belakang Pendidikan, yaitu: 1. S3 (DEA) & Doktor Teknik Mesin dari Ecole Nationale Supérieure d'Hydraulique et de Mécanique de Grenoble (ENSHMG) pada Institute National Polytechnique de Grenoble Prancis 2. S1, Teknis Mesin Universitas 17 Agustus Surabaya. 3. S2, Tokyo University for Agriculture & Technology Labor Science. 4. S2, Magister Manajemen Universitas Krisnadipayana. <i>Board of Commissioners composition consists of various Educational background, such as:</i> 1. DEA & Doctor of Mechanical Engineering from Ecole Nationale Supérieure d'Hydraulique et de Mécanique de Grenoble (ENSHMG) at the National Institute of Polytechnique de Grenoble France 2. bachelor , Mechanical Engineering University August 17 Surabaya. 3. Master, Tokyo University for Agriculture & Technology Labor Science. 4. Master in Management, Krisnadipayana University.

PENGALAMAN KERJA <i>Career Experience</i>	Komposisi Dewan Komisaris terdiri dari berbagai macam latar belakang pengalaman kerja yaitu sebagai: 1. Rektor ITS 2011-2015 & Anggota Dewan Riset Nasional 2019-2022 2. Pengadministrasi Teknik Perancangan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan II Surabaya 3. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, IPB & Staf ahli UPSUS Kementerian Pertanian. 4. Direktur Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI <i>Board of Directors composition consists of various career experience background, such as:</i> 1. Rector of ITS 2011-2015 & Member of the National Research Council 2019-2022 2. Administration of Technical Design for Work Unit Implementation of the Metropolitan National Road II Surabaya 3. Dean of the Faculty of Agricultural Technology, IPB & UPSUS Expert Staff at the Ministry of Agriculture. 4. Director of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
USIA <i>Age</i>	Keberagaman komposisi usia Komisaris sampai dengan tahun buku berakhir, yaitu: 1. 59 Tahun (1960) 2. 48 tahun (1971) 3. 51 tahun (1968) 4. 57 tahun (1962) <i>The Board of Directors age composition diversity as end of fiscal year is as follows:</i> 1. 59 Years old (1960) 2. 48 years old (1971) 3. 51 years old (1968) 4. 57 years old (1962)
JENIS KELAMIN <i>Gender</i>	Komisaris PT Barata Indonesia terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan belum terdapat anggota dari perempuan. <i>PT Barata Indonesia's Board of Commissioners consists of 4 (four) males without female members.</i>

ASPEK KEBERAGAMAN <i>Diversity Aspect</i>	KEBERAGAMAN DIREKSI <i>Board of Directors</i>
PENDIDIKAN <i>Education</i>	Komposisi Direksi terdiri dari berbagai macam latar belakang Pendidikan, yaitu: 1. Dirut : Teknik Mesin Universitas Trisakti 2. DKSDM : Magister Management STIE IPWIJA 3. Dirops : Teknik Mesin ITB 4. Dirpem : Teknik Mesin ITS <i>Board of Directors composition consists of various Educational background, such as:</i> 1. President Director: Mechanical Engineering Trisakti University 2. HR Director: Master of Management STIE IPWIJA 3. Operational Director: Mechanical Engineering ITB 4. Business Development Director: ITS Mechanical Engineering.
PENGALAMAN KERJA <i>Career Experience</i>	Komposisi Direksi terdiri dari berbagai macam latar belakang pengalaman kerja yaitu sebagai: 1. Dirut : Direktur Operasi di PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi. 2. DKSDM : Manajer Keuangan & Human Capital, Departemen Investasi Power PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 3. Dirops : Direktur Operasi PT Pindad (Persero) 4. Dirpem : Direktur Operasi dan Pemasaran PT Barata Indonesia <i>Board of Directors composition consists of various career experience background, such as:</i> 1. President Director: Operations Director at PT Wijaya Karya Industri & Construction. 2. HR Director: Financial & Human Capital Manager, Power Investment Department PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 3. Operational Director: Operational Director of PT Pindad (Persero) 4. Business Development Director: Operational and Marketing Director PT Barata Indonesia
USIA <i>Age</i>	Keberagaman komposisi usia Direksi sampai dengan tahun buku berakhir, yaitu: 1. Dirut : 54 Tahun 2. DKSDM : 56 Tahun 3. Dirops : 54 Tahun 4. Dirpem : 52 Tahun <i>The Board of Directors age composition diversity as end of fiscal year is as follows:</i> 1. President Director: 54 years old 2. HR Director: 56 years old 3. Operational Director: 54 years old 4. Business Development Director: 52 years old
JENIS KELAMIN <i>Gender</i>	Direksi PT Barata Indonesia terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan belum terdapat anggota dari perempuan. <i>PT Barata Indonesia's Board of Directors consists of 4 (four) males without female members.</i>

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Supporting Organs Of Board Of Commissioners

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Penunjang, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Resiko. Organ dan Komite di bawah Dewan Komisaris tersebut diuraikan sebagai berikut :

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris berhak mendapatkan bantuan Sekretaris Dewan Komisaris atas biaya Perseroan. Sekretaris Dewan Komisaris melakukan tugas dan kewajiban untuk membantu Dewan Komisaris dalam fungsi kesekretariatan, memastikan tugas-tugas Dewan Komisaris telah dijalankan dan semua informasi yang diperlukan Dewan Komisaris telah tersedia dan tugas lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahun 2018 telah terjadi pergantian Sekretaris Dewan Komisaris, dimana memberhentikan dengan hormat Ahmad Dafis (Sekretaris Dewan Komisaris) dan Slamet (staf Sekretaris Dekom) yang di angkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris nomor KEP-030/DEKOM/ IX/2012 tanggal 6 September 2012, kemudian komposisi baru dengan mengangkat Wiratmoko (Sekretaris Dewan Komisaris) dan Asdi (staf Sekretaris Dekom) melalui surat keputusan Dewan Komisaris PT Barata Indonesia (Persero) dengan nomor SK-05/DEKOM/BRT/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018.

PERSYARATAN DAN KETENTUAN YANG MENGIKAT SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas :

Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Pasal 6 Permen BUMN Nomor 12 tahun 2012) :

- Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan BUMN;
- Memiliki integritas yang baik;
- Memahami fungsi kesekretariatan;
- Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Ketentuan Yang Mengikat Sekretaris Dewan Komisaris :

- Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan saran tertulis dari Pemegang Saham dan atas menjadi beban (biaya)

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Penunjang, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Resiko. Organ dan Komite di bawah Dewan Komisaris tersebut diuraikan sebagai berikut :

Board Of Commissioners Secreatry

To help to smooth the implementation of its duties, the Board of Commissioners has the right to be assisted by the Board of Commissioners Secretary at the Company's expense. The BOC Secretary performs the duties and obligations to assist the Board of Commissioners' secretarial functions, ensures the duties of the Board of Commissioners have been conducted and all information needed by the Board of Commissioners is available and other duties as stipulated in the prevailing laws and regulations.

In 2018 there was a change in the Board of Commissioners secretary, who honorably dismissed Ahmad Dafis (the BOC Secretary) and Slamet (the BOC Secretary who was appointed based on the Board of Commissioners Decree No. KEP-030 / DEKOM / IX / 2012 dated September 6, 2012, and new composition by appointing Wiratmoko (the BOC Secretary) and Asdi (the BOC Secretary) through PT Barata Indonesia (Persero) Board of Commissioners decree No. SK-05 / DEKOM / BRT / VIII / 2018 dated 1 August 2018.

Requirements for the Secretary of the Board of Commissioners / Supervisory Board:

The Secretary of the Board of Commissioners / Supervisory Board must fulfill the following requirements (Article 6 of State-Owned Enterprises Regulation Number 12 of 2012):

- Understanding the management, supervision and guidance system of SOE;*
- Have good integrity;*
- Understanding secretarial functions;*
- Having the ability to communicate and coordinate well.*

Provisions That Bind the Secretary of the Board of Commissioners:

- The Secretary of the Board of Commissioners is appointed and dismissed by the Board of Commissioners based on written advice from the Shareholders and upon being a*

Perseroan (Pasal 15 Ayat (10) Tahun 2008 Anggaran Dasar PT Barata Indonesia (Persero));

- b. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar Perusahaan (Pasal 3 Ayat (3) Permen BUMN Nomor 12 tahun 2012) ;
- c. Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu (Pasal 5 Permen BUMN Nomor 12 tahun 2012).

TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, berupa (Pasal 4 Ayat (1) Permen BUMN Nomor 12 tahun 2012):

- a. mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
- b. membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggarandasar Perusahaan;
- c. mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
- d. menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
- e. menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris;
- f. melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Selain tugas diatas, Sekretaris Dewan Komisaris juga memiliki tugas lain diantaranya sebagai berikut (Pasal 4 Ayat (2 dan 3) Permen BUMN Nomor 12 tahun 2012) :

- a. memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
- b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
- c. mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
- d. sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Dalam rangka tertib administrasi dan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris wajib

burden (expense) of the Company (Article 15 Paragraph (10) of 2008 Articles of Association of PT Barata Indonesia (Persero));

- b. The Secretary of the Board of Commissioners is from outside the Company (Article 3 Paragraph (3) State-Owned Enterprise Regulation Number 12 of 2012);*
- c. c. The term of office of the Secretary and the Secretary Staff of the Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years without reducing the right of the Board of Commissioners to terminate them at any time (Article 5 of BUMN Regulation Number 12 of 2012)*

Duties Of Board Of Commissioners' Secretary

The Secretary of the Board of Commissioners is assigned to carry out activities to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties, in the form of (Article 4 Paragraph (1) State-Owned Enterprises Regulation Number 12 of 2012):

- a. preparing meetings, including briefings of the Board of Commissioners;*
- b. make minutes of the Board of Commissioners meeting in accordance with the terms of the budgetary basis of the Company;*
- c. administer the Board of Commissioners documents, both incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;*
- d. drafting the Draft Work Plan and Budget of the Board of Commissioners;*
- e. compile the Draft Reports of the Board of Commissioners;*
- f. carry out other duties of the Board of Commissioners.*

In addition to the above assignments, the Secretary of the Board of Commissioners also has other duties including the following (Article 4 Paragraph (2 and 3) SOE Regulation Number 12 of 2012):

- a. ensure that the Board of Commissioners complies with laws and regulations and applies the principles of GCG;*
- b. provide information needed by the Board of Commissioners periodically and / or at any time when requested;*
- c. coordinating Committee members, if needed in order to facilitate the duties of the Board of Commissioners;*
- d. as the Board of Commissioners' liaison officer and other parties.*

In the context of good governance and good corporate governance, the Board of Commissioners Secretariat must

memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik di Perusahaan.

Masa jabatan sekretaris dan staff sekretaris Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu (Permen BUMN No. 12/MBU/2012 Pasal 5).

ensure that the documents for holding activities are properly stored in the Company.

The term of office of the secretary and staff secretary of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years without prejudice to the right of the Board of Commissioners to terminate them at any time (SOE Regulation No. 12 / MBU / 2012 Article 5).

KOMITE AUDIT

Fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam pengurusan Perusahaan serta memberi nasihat kepada Dewan Komisaris, terutama dalam hal sistem pengendalian intern Perusahaan, proses pelaporan keuangan, proses pemeriksaan dan pelaksanaan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugas dan dalam pelaporan, serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan dan instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Piagam Komite Audit ditetapkan/dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Barata Indonesia (Persero) Nomor: KEP-02/DEKOM/BRT/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 yang berisi tentang Pemutakhiran atau Penetapan Piagam (Charter) Komite Audit PT Barata Indonesia (Persero).

Piagam tersebut berisikan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota, Tugas, Kewenangan, Persyaratan Keanggotaan, Tanggung Jawab, Rapat, Laporan, Akses Kerahasiaan Informasi, Rencana Kerja dan Anggaran, Penghasilan Anggota, Pendidikan dan Tenaga Penunjang, Penilaian Kinerja, dan lain-lain.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Struktur & keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut :

- a. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi dalam mengelola Perseroan sesuai dengan prinsip tata kelola

Audit Commitee

The main function of the Audit Committee is to assist the Board of Commissioners in supervising the policies of the Board of Directors in managing the Company and providing advice to the Board of Commissioners, especially in terms of the Company's internal control system, financial reporting process, inspection and implementation of applicable laws and regulations.

The Audit Committee is independent both in the implementation of duties and in reporting, and is responsible to the Board of Commissioners and performs its functions in accordance with the regulations and instructions received from the Board of Commissioners.

Charter Of The Audit Committee

The Charter of the Audit Committee is established / updated based on the Decision of the Board of Commissioners of PT Barata Indonesia (Persero) Number: KEP-02 / DEKOM / BRT / XII / 2017 dated December 18, 2017 which contains the Update or Determination of Audit Committee Charter of PT Barata Indonesia (Persero)

The Charter contains the Appointment and Dismissal of Members, Tasks, Authorities, Membership Requirements, Responsibilities, Meetings, Reports, Access to Secrecy of Information, Work Plans and Budgets, Income of Members, Education and Supporting Personnel, Performance Assessment, etc.

Structure And Membership Of The Audit Committe

The structure and membership of the Audit Committee are as follows:

- a. *The Audit Committee was formed by the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners in supervising the implementation of the functions of the Board of Directors in managing the Company in accordance*

perseroan yang baik.

- b. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit terdiri dari ketua dan 2 (dua) anggota, ketua dan anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, pengangkatan dan pemberhentian anggota komite audit dilaporkan kepada RUPS/Pemilik Modal.
- d. Ketua Komite Audit adalah salah satu anggota Dewan Komisaris, sedangkan untuk anggota komite audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar perusahaan.

Komite Audit Dewan Komisaris adalah organ yang membantu tugas Komisaris dan diangkat sesuai dengan SK Dewan Komisaris NO : KEP-07/DEKOM/BRT/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Adriansyah hingga November 2018 lalu
digantikan oleh Sam Herodian
Anggota : Yudha Andrian Saputra
Anggota : Bambang Willianto

Rencana Kegiatan dan Pelaksanaan Program Kerja Untuk melaksanakan tugas Komite Audit Tahun 2018 adalah :

- a. Memonitor dan mengevaluasi proses penyelesaian Laporan Keuangan Perusahaan Untuk Tahun Buku 2018;
- b. Melakukan evaluasi atas efektivitas Satuan Pengawasan Internal (SPI);
- c. Melakukan evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal kegiatan tertentu;
- d. Melakukan evaluasi dan memonitor atas laporan Direksi tentang progres pelaksanaan arahan RUPS;
- e. Melakukan evaluasi atas Laporan Manajemen Triwulan Direksi;
- f. Melakukan evaluasi atas Laporan Kinerja bulanan Grup Unit Usaha dan Unit Usaha tertentu;
- g. Melakukan evaluasi atas rencana dan realisasi cash flow perusahaan;
- h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program PKBL dan CSR;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta Komisaris;
- j. Ketentuan Pelaksanaan Program Kerja Komite Audit;
- k. Pelaksanaan kegiatan tersebut di atas disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan waktu yang tersedia, untuk itu dalam pelaksanaan kegiatan tertentu dapat dilakukan secara uji petik (*sampel*).

with the principles of good corporate governance.

- b. The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners.*
- c. The Audit Committee consists of the chairman and 2 (two) members, the chairman and members of the audit committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners, the appointment and dismissal of the audit committee members are reported to the GMS / Stockholder.*
- d. The Chairman of the Audit Committee is one of the members of the Board of Commissioners, while the members of the audit committee can come from members of the Board of Commissioners or from outside the company.*

Audit Committee The Board of Commissioners is an organ that assists the duties of the Commissioner and is appointed according to the Board of Commissioners' Decree NO: KEP-07 / DEKOM / BRT / XII / 2018 dated December 19, 2018 with the following composition:

*Chair : Adriansyah until November 2018 then replaced by Sam Herodian
Member : Yudha Andrian Saputra
Member : Bambang Willianto*

The Plan of Activities and Implementation of the Work Program To carry out the duties of the Audit Committee in 2018 are:

- a. Monitor and evaluate the process of resolving the Company's Financial Statements for the 2018 Book Year;*
- b. Evaluating the effectiveness of the Internal Audit Unit (SPI);*
- c. Conduct an evaluation of the Internal Control System for certain activities;*
- d. Evaluate and monitor the Directors' reports regarding the progress of implementing the GMS directives;*
- e. Conduct an evaluation of the Board of Directors Quarterly Management Report;*
- f. Evaluate the monthly Performance Report of Business Units Group and certain Business Units;*
- g. Evaluate the plan and realization of the company's cash flow;*
- h. Monitor and evaluate the implementation of PKBL and CSR programs;*
- i. Carry out other duties requested by the Commissioner;*
- j. Implementation Provisions of the Audit Committee Work Program;*
- k. The implementation of the aforementioned activities is adjusted to the ability of the staff and time available, for this reason in the implementation of certain activities can be carried out by sampling*

- l. Hasil pelaksanaan kegiatan Komite Audit tersebut secara periodik disampaikan kepada Komisaris untuk digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tugasnya.
- m. Pembagian tugas kegiatan tersebut kepada masing-masing anggota Komite Audit ditetapkan oleh Ketua Komite Audit sesuai dengan kemampuan dan kesediaan waktu masing-masing anggota;
- n. Pelaksanaan tugas Komite Audit dilakukan bekerja sama dengan Satuan Pengawasan Internal Perusahaan. Data dan informasi yang diperlukan terlebih dahulu diminta dari Satuan Pengawasan Internal (SPI), apabila tidak ada, baru diminta kepada unit kerja atau pejabat yang bersangkutan.
- o. Pelaksanaan tugas dari anggota Komite Audit didasarkan pada surat penugasan dari Ketua Komite Audit. Informasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas tersebut hanya disampaikan kepada Komisaris melalui Ketua Komite Audit;
- p. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia dan sesuai dengan Piagam Komite Audit.

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor. PER-10/MBU/2012 dan Piagam Komite Audit disebutkan bahwa persyaratan bagi anggota Komite Audit adalah independensi, integritas dan bekerja secara profesional dengan rasa tanggung jawab. Kriteria independensi yang ditetapkan adalah:

- a. Anggota Komite Audit dipilih melalui *fit and proper test*;
- b. Pihak ekstern yang diangkat menjadi anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha maupun hubungan afiliasi dengan Perseroan, Direktur atau Komisaris.
- c. Tidak menerima kompensasi apapun dari PT Barata Indonesia (Persero) atau dari anak perusahaan atau afiliasinya selain penghasilan yang diterima dalam kaitannya dengan penugasannya sebagai Anggota Komite Audit Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Barata Indonesia (Persero) No : KEP-01/DEKOM/BRT/IV/2016 Tentang Tugas Komite Audit PT Barata Indonesia (Persero).

- l. *The results of the implementation of the Audit Committee activities are periodically submitted to the Commissioner to be used as input in carrying out their duties.*
- m. *The division of tasks of the activity to each member of the Audit Committee is determined by the Chair of the Audit Committee in accordance with the ability and willingness of each member;*
- n. *The implementation of the duties of the Audit Committee is carried out in collaboration with the Company's Internal Control Unit. The data and information needed is first requested from the Internal Audit Unit (SPI), if it is not there, then it is requested from the work unit or official concerned.*
- o. *Implementation of duties of members of the Audit Committee based on the assignment letter from the Chair of the Audit Committee. Information and reports on the results of the implementation of these tasks are only submitted to the Commissioner through the Chairman of the Audit Committee;*
- p. *Implementation of activities in accordance with the available budget and in accordance with the Audit Committee Charter.*

The Audit Committee Member Independency

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number. PER-10 / MBU / 2012 and the Audit Committee Charter stated that the requirements for members of the Audit Committee are independence, integrity and work professionally with a sense of responsibility. The independence criteria specified are:

- a. *Audit Committee members are selected through a fit and proper test;*
- b. *External parties appointed as members of the Audit Committee have no business relationship or affiliation with the Company, Director or Commissioner.*
- c. *no compensation received from PT Barata Indonesia (Persero) or from subsidiaries or affiliates other than income received in connection with his assignment as a Member of the Audit Committee Based on the Decision of the Board of Commissioners of PT Barata Indonesia (Persero) No: KEP-01 / DECOM / BRT / IV / 2016 concerning the Tasks of the Audit Committee of PT Barata Indonesia (Persero).*

BIOGRAFI ANGGOTA KOMITE AUDIT

ADRIANSYAH

Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Enim, 07 Juni 1956. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Brawijaya pada tahun 1982. Beliau menjabat sebagai Komisaris PT Barata Indonesia (Persero) sejak tahun 2011 hingga sekarang. Sebelum menjabat sebagai Komisaris di PT Barata Indonesia (Persero), Beliau sudah aktif di Kementerian Keuangan RI sejak tahun 1987. Atas prestasi kinerja beliau maka beberapa posisi Direktur di Kementerian Keuangan telah diemban sejak 2001 hingga 2008 diantaranya berturut-turut menjabat sebagai Direktur Evaluasi Pembiayaan dan IKD – DJAPK, Direktur Pembiayaan dan IKD DJAPK, dan sebagai Direktur Pinjaman, Hibah dan Kapasitas Daerah DJPK serta sebagai

Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah DJPK. Setelah periode tersebut, Pemegang Saham BUMN mempercayai beliau untuk juga menjadi Komisaris PT Barata Indonesia (Persero) guna memberikan masukan & pengawasan atas kinerja PT Barata Indonesia (Persero) dari tahun 2013 hingga sekarang.

SAM HERODIAN

Lahir di Cirebon, 29 Mei 1962. Beliau memperoleh gelar Sarjana Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Bidang Mekanisasi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Pelatihan di University of Tokyo Labor Science (Human Factor Engineering), Master - Fakultas Teknologi Pertanian – IPB Bidang Keteknikan Pertanian, dan Doktor - Tokyo University of Agriculture and Technology Labor Science. Sebelum menjabat sebagai Komisaris di PT Barata Indonesia (Persero), Beliau sudah aktif di Kementerian Pertanian RI sejak tahun 2015. Atas prestasi kinerja beliau maka beberapa posisi strategis telah diemban sejak 2000-2015 yaitu Ketua Jurusan Mekanisasi Pertanian Fateta-IPB, Wakil Dekan Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Ketua Laboratorium Ergonomika Fateta-IPB, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Tim Pakar UPSUS Kementan/ Staf Khusus Menteri. Setelah periode tersebut, Pemegang Saham BUMN mempercayai beliau untuk juga menjadi Komisaris PT Barata Indonesia (Persero) guna memberikan masukan & pengawasan atas kinerja PT Barata Indonesia (Persero) dari tahun 2018 hingga sekarang.

Audit Committee Member Biography

Adriansyah

Indonesian citizen, born in Tanjung Enim, June 7, 1956. He obtained a Bachelor of Economics from Brawijaya University in 1982. He has served as Commissioner of PT Barata Indonesia (Persero) since 2011 until now. Prior to serving as a Commissioner at PT Barata Indonesia (Persero), he had been active in the Ministry of Finance of Indonesia since 1987. For his performance achievements, several Director positions at the Ministry of Finance have been carried out from 2001 to 2008 including serving as Director of Financing Evaluation and IKD - DJAPK, Director of Financing and IKD DJAPK, and as Director of Loans, Grants and Regional Capacity of DGT and as Director of Financing and Regional Capacity of DGT. After this period, SOE Shareholders trusted him to

also be a Commissioner of PT Barata Indonesia (Persero) to provide input & supervision on the performance of PT Barata Indonesia (Persero) from 2013 to the present.

Sam Herodian

Born in Cirebon, May 29, 1962. He obtained a Bachelor of Agriculture degree from the Faculty of Agricultural Technology in the Field of Agricultural Mechanization, Bogor Agricultural Institute. Training at the University of Tokyo Labor Science (Human Factor Engineering), Masters - Faculty of Agricultural Technology - IPB in Agricultural Engineering, and Doctorate - Tokyo University of Agriculture and Technology Labor Science. Before serving as Commissioner at PT Barata Indonesia (Persero), he has been active in the Indonesian Ministry of Agriculture since 2015. For his performance achievements, several strategic positions have been carried out since 2000-2015, namely Chair of the Agriculture Mechanization Department Fateta-IPB, Deputy Dean of the Faculty of Technology IPB Agriculture, Chair of the Fateta-IPB Ergonomics Laboratory, Dean of the IPB Faculty of Agricultural Technology, Expert Team UPSUS Ministry / Minister Special Staff. After this period, SOE Shareholders trusted him to also be a Commissioner of PT Barata Indonesia (Persero) to provide input & supervision on the performance of PT Barata Indonesia (Persero) from 2018 to the present.

YUDHA ANDRIAN SAPUTRA

Lahir di Mojokerto, Jawa Timur pada tanggal 12 Maret 1982. Sejak tahun 2004 aktif sebagai Management Development Program di PT Telkom Indonesia. Pada tahun 2005 hingga saat ini aktif sebagai Dosen Jurusan Teknik Industri di Institut Teknik Sepuluh Nofember (ITS) Surabaya. Pada tahun 2013-2018 menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko, Dewan Komisaris PT Barata Indonesia (Persero). Dan pada tahun 2018-sekarang menjabat sebagai Anggota Komite Audit, Dewan Komisaris PT Barata Indonesia (Persero).

BAMBANG WILLIANTO

Lahir di Banyumas 20 Mei 1960, bekerja sebagai Auditor di Perwakilan BPKP Prov Maluku pada tahun 1983-1987, Auditor di Perwakilan BPKP Prov DKI Jakarta pada tahun 1988-2003, Auditor di Perwakilan BPKP Prov KalTim pada tahun 2004-2005, Auditor di Deputy Polsoskam BPKP Jakarta pada tahun 2006-2007, Auditor di Perwakilan BPKP Prov Nusa Tenggara Timur pada tahun 2008-2011, Dipekerjakan di BLU RS Jiwa Dr Soeharto Heerdjan Jkt (Ketua SPI) pada tahun 2011-2014, Narasumber bimtek peningkatan kompetensi aparatur desa, Dosen PTS (Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis Akrua, Akuntansi Sektor Publik, Audit Keuangan Negara) pada tahun 2015-sekarang, Partner Kantor Jasa Akuntan Rudy Hartono & Rekan Bekasi; Direktur Accounting Services Kantor Akuntan Publik Panata & Rekan Jakarta Selatan pada tahun 2017-sekarang. Dan pada tahun 2018-sekarang menjabat sebagai Anggota Komite Audit, Dewan Komisaris PT Barata Indonesia (Persero).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris;

- Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;
- Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
- Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
- Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemenserta pelaksanaannya;

Yudha Andrian Saputra

Born in Mojokerto, East Java on March 12, 1982. Since 2004 he has been active as a Management Development Program at PT Telkom Indonesia. In 2005, he is currently active as a Lecturer in the Industrial Engineering Department at the Sepuluh Nofember Institute of Technology (ITS) Surabaya. In 2013-2018 he served as a Member of the Risk Management Committee, the Board of Commissioners of PT Barata Indonesia (Persero). And in 2018, he is currently a Member of the Audit Committee, Board of Commissioners of PT Barata Indonesia (Persero).

Bambang Willianto

Born in Banyumas on May 20, 1960, working as an Auditor at the Maluku Provincial BPKP Representative in 1983-1987, the Auditor at the Jakarta Provincial BPKP Representative in 1988-2003, the Auditor at the East Kalimantan BPKP Representative in 2004-2005, the Auditor at the Deputy Police Department BPKP Jakarta in 2006-2007, the Auditor at the Representative Office of the East Nusa Tenggara BPKP in 2008-2011, was employed at the Dr Soeharto BLU Psychiatric Hospital Heerdjan Jkt (SPI Chair) in 2011-2014, bimtek resource persons to improve village apparatus competence, PTS Lecturers (Accrual-Based Government Financial Accounting, Public Sector Accounting, State Finance Audit) in 2015-present, Partner of Accountant Services Office Rudy Hartono & Rekan Bekasi; Accounting Services Director of Panata & Rekan Jakarta Selatan Public Accountants in 2017-present. And in 2018, he is currently a Member of the Audit Committee, Board of Commissioners of PT Barata Indonesia (Persero).

Duties And Responsibilities Of Audit Committee

The Audit Committee works collectively in carrying out its duties to assist the Board of Commissioners;

- The Audit Committee is independent both in carrying out its duties and in reporting, and is directly responsible to the Board of Commissioners;*
- Assist the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the implementation of external auditor and internal auditor duties;*
- Assess the implementation of activities and the results of audits carried out by the International Supervisory Unit and external auditors;*
- Provide recommendations on improving management control systems and their implementation;*

e. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan; f. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya; g. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai perusahaan, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan Manajemen, dan informasi lainnya; h. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan.	<i>e. Ensure that there are satisfactory evaluation procedures for all information released by the Company;</i> <i>f. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners / Board of Trustees as well as the duties of the Board of Commissioners / other Supervisory Board;</i> <i>g. Reviewing information about the company, as well as the Long Term Plan, Work Plan and Company Budget, Management reports, and other information;</i> <i>h. Reviewing complaints relating to the company.</i>

FREKUENSI PERTEMUAN DAN TINGKAT KEHADIRAN KOMITE AUDIT
Audit Committee's Frequency Of Meetings And Attendance

No.	NAMA KOMITE AUDIT (Name Audit Committee's)	JABATAN (Position)	TINGKAT KEHADIRAN (Attendance)
1.	Sam Herodian	Ketua <i>Chair</i>	100%
2.	Yudha Andrian Saputra	Anggota <i>Member</i>	100%
3.	Bambang Willianto	Anggota <i>Member</i>	100%

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan usaha Perseroan yang penuh dengan risiko memberikan peran penting terhadap keberadaan Komite Pemantau Manajemen Risiko. Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam usaha mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan penerapan dan pengawasan manajemen risiko pada perusahaan.

Fungsi dari komite pemantau manajemen risiko ini antara lain dibentuk sebagai upaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi pemetaan risiko dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, seperti halnya evaluasi atas rancangan RJPP yang disampaikan Direksi, evaluasi pelaksanaan Risk Assessment dan Risk Mapping pada semua unit dalam korporasi.

Dasar Hukum Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko didasarkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara.

Risk Management Monitoring Committee

The Company's business activities that are full of risks play an important role in the existence of the Risk Management Monitoring Committee. The Risk Management Monitoring Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners in an effort to support the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners related to the implementation and supervision of risk management in the company.

The function of the risk management monitoring committee was formed as an effort to monitor and evaluate risk mapping in relation to the implementation of the Board of Commissioners' duties, as well as evaluating the RJPP designation submitted by the Board of Directors, evaluating the implementation of Risk Assessment and Risk Mapping for all units within the corporation.

Legal Basis of Establishment of the Risk Management Monitoring Committee is based on State Minister of State Regulation No.PER-01 / MBU / 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

PIAGAM KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko ditetapkan atau dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Barata Indonesia (Persero) Nomor: KEP-02/DEKOM/BRT/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 yang berisi tentang Pemutakhiran atau Penetapan Piagam (Charter) Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Barata Indonesia (Persero).

Piagam tersebut berisikan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota, Tugas, Kewenangan, Persyaratan Keanggotaan, Tanggung Jawab, Rapat, Laporan, Akses Kerahasiaan Informasi, Rencana Kerja dan Anggaran, Penghasilan Anggota, Pendidikan dan Tenaga Penunjang, Penilaian Kinerja, dan lain-lain.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Struktur & keanggotaan Komite Pemantau Manajemen adalah sebagai berikut :

- a. Ketua dan anggota komite pemantauan manajemen resiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, pengangkatan dan pemberhentian anggota komite pamantauan manajemen resiko dilaporkan kepada RUPS/Pemilik Modal;
- b. Komite Pemantau Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- c. Komite Pemantau Manajemen Risiko terdiri dari Ketua dan 2 (dua) orang Anggota.
- d. Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, sedangkan untuk anggota komite pemantau manajemen risiko dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar perusahaan.

Sesuai Keputusan Dewan Komisaris PT Barata Indonesia (Persero) Nomor : KEP-06/DEKOM/BRT/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia, maka susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :

1. Ketua	: Katno
2. Anggota	: Sam Herodian
3. Anggota	: Bambang Sampurno

Charter Of The Risk Management Committee

The Risk Management Monitoring Committee Charter is stipulated or updated based on the Decision of the Board of Commissioners of PT Barata Indonesia (Persero) Number: KEP-02 / DEKOM / BRT / XII / 2017 dated December 18, 2017 which contains the Update or Determination of the Risk Management Monitoring Charter of PT Barata Indonesia (Persero).

The Charter contains the Appointment and Dismissal of Members, Tasks, Authorities, Membership Requirements, Responsibilities, Meetings, Reports, Access to Information Secrecy, Work Plans and Budgets, Income of Members, Education and Supporting Personnel, Performance Appraisals, and others.

Structure And Membership Of The Risk Management Committee

The structure & membership of the Management Monitoring Committee are as follows:

- a. The chairman and members of the risk management monitoring committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners, the appointment and dismissal of members of the risk management monitoring committee are reported to the GMS / Stockholder;*
- b. The Risk Management Monitoring Committee is responsible to the Board of Commissioners;*
- c. The Risk Management Monitoring Committee consists of a Chairperson and 2 (two) Members.*
- d. The Chairperson of the Risk Management Monitoring Committee is a Member of the Board of Commissioners / Supervisory Board, while the members of the risk management monitoring committee may come from members of the Board of Commissioners or from outside the company.*

In accordance with the Decision of the Board of Commissioners of PT Barata Indonesia (Persero) Number: KEP-06 / DEKOM / BRT / VII / 2018 dated July 30, 2018 concerning the Dismissal and Appointment of Members of PT Barata Indonesia's Company Risk Management Committee, the composition of Committee membership Risk Management is as follows:

1.Chair	: Katno
2. Members	: Sam Herodian
3. Members	: Bambang Sampurno

PROGRAM KERJA KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO :

- Melakukan evaluasi dan monitoring pengelolaan risiko.
- Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan GCG.
- Mengevaluasi pemetaan risiko dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- Evaluasi terhadap rancangan RJPP yang disampaikan Direksi.
- Evaluasi pelaksanaan *Risk Assessment* dan *Risk Mapping* pada semua unit dalam Korporasi.
- Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan arahan RUPS dibidang manajemen risiko dan GCG.

REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO DAN GCG DEWAN KOMISARIS

- Evaluasi dan monitoring pelaksanaan manajemen risiko di PT Barata Indonesia (Persero);
- Evaluasi dan monitoring pelaksanaan GCG di PT Barata Indonesia (Persero);
- Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG telah melakukan evaluasi analisis risiko yang menjadi dasar pengambilan keputusan Dewan Komisaris;
- Selain itu Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG telah melakukan penugasan khusus dari Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG telah meminta Direksi (melalui Dewan Komisaris) untuk menyampaikan laporan progres arahan RUPS dan arahan Dekom, dan telah disampaikan pada rapat Dekom dan Direksi.

BIOGRAFI ANGGOTA KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

KATNO

Lahir di Surabaya, Jawa Timur pada Tanggal 13 November 1971, memulai karir di PNPM Mandiri sebagai Pengawas pada tahun 2004, dan pada tahun 2008 berpindah profesi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Pengadministrasi Umum (Pengadaan) Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan II Surabaya. Pada tahun 2015 hingga saat ini menjabat sebagai Pengadministrasi Teknik Perencanaan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan II Surabaya. Setelah periode

Risk Management Monitoring Committee Work Program:

- Evaluate and monitor risk management.*
- Carry out evaluation and monitoring of GCG implementation.*
- Evaluating risk mapping in relation to the implementation of the duties of the Board of Commissioners.*
- Evaluation of the RJPP draft submitted by the Directors.*
- Evaluate the implementation of Risk Assessment and Risk Mapping for all units in the Corporation.*
- Evaluate and monitor the implementation of GMS directives in the field of risk management and GCG.*

Realization of the Board of Commissioners' GCG and Risk Management Monitoring Committee Work Program

- Evaluating and monitoring the implementation of risk management at PT Barata Indonesia (Persero);*
- Evaluation and monitoring of GCG implementation at PT Barata Indonesia (Persero);*
- The Risk Management and GCG Monitoring Committee has conducted a risk analysis evaluation that forms the basis of the decision of the Board of Commissioners;*
- In addition, the Chairman of the Risk Management and GCG Monitoring Committee has made special assignments from the Board of Commissioners.*

The Risk Management & GCG Monitoring Committee have asked the Board of Directors (through the Board of Commissioners) to submit progress reports directed by GMS and directed by Board of Commissioners, and have been submitted at the Board of Commissioners and Directors' meeting.

Risk Management Committee Member Biography

Katno

Born in Surabaya, East Java on November 13, 1971, began his career at PNPM Mandiri as Supervisor in 2004, and in 2008 moved professions at the Ministry of Public Works and Public Housing as General Administration (Procurement) of the Surabaya Metropolitan II National Road Implementation Unit. In 2015 until now he served as Planning Administrative Engineering for the Implementation of Metropolitan II National Road Implementation Unit Surabaya. After this period, SOE Shareholders trusted him to also be a Commissioner of PT

tersebut, Pemegang Saham BUMN mempercayai beliau untuk juga menjadi Komisaris PT Barata Indonesia (Persero) guna memberikan masukan & pengawasan atas kinerja PT Barata Indonesia (Persero) dari tahun 2015 hingga sekarang

SAM HERODIAN

Lahir di Cirebon, 29 Mei 1962. Beliau memperoleh gelar Sarjana Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Bidang Mekanisasi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Pelatihan di University of Tokyo Labor Science (*Human Factor Engineering*), Master - Fakultas Teknologi Pertanian – IPB Bidang Keteknikan Pertanian, dan Doktor - Tokyo University of Agriculture and Technology Labor Science. Sebelum menjabat sebagai Komisaris di PT Barata Indonesia (Persero), Beliau sudah aktif di Kementerian Pertanian RI sejak tahun 2015. Atas prestasi kinerja beliau maka beberapa posisi strategis telah diemban sejak 2000-2015 yaitu Ketua Jurusan Mekanisasi Pertanian Fateta-IPB, Wakil Dekan Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Ketua Laboratorium Ergonomika Fateta-IPB, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Tim Pakar UPSUS Kementan/ Staf Khusus Menteri. Setelah periode tersebut, Pemegang Saham BUMN mempercayai beliau untuk juga menjadi Komisaris PT Barata Indonesia (Persero) guna memberikan masukan & pengawasan atas kinerja PT Barata Indonesia (Persero) dari tahun 2018 hingga sekarang.

BAMBANG SAMPURNO

Lahir di Jember, 19 September 1965, memulai karir sebagai Dosen Tetap Departemen Teknik Mesin Industri Fak Vokasi – ITS Surabaya pada tahun 1990-sekarang, Sekretaris SPIU TPSDP (Block Grant ADB) Program D3 Teknik Mesin FTI ITS tahun 2004-2005, Kalab. Perancangan dan Otomasi Program Studi D3 Teknik Mesin FTI – ITS tahun 2006-2008, Kasie Lab. Mekatronika Program D3 Teknik Mesin FTI ITS tahun 2009-2012, Kepala Badan Kemahasiswaan ITS tahun 2011-2013, Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan, Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni ITS tahun 2014-2015, Sekretaris Komisi Akademik dan Kemahasiswaan Senat Akademik ITS periode 2015-2020. Dan pada tahun 2018-sekarang menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko, Dewan Komisaris PT Barata Indonesia (Persero).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

- a. Komite Pemantau Manajemen Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membentuk Dewan Komisaris;

Barata Indonesia (Persero) to provide input & supervision on the performance of PT Barata Indonesia (Persero) from 2015 to the present

Sam Herodian

Born in Cirebon, May 29, 1962. He obtained a Bachelor of Agriculture degree from the Faculty of Agricultural Technology in the Field of Agricultural Mechanization, Bogor Agricultural Institute. Training at the University of Tokyo Labor Science (Human Factor Engineering), Masters - Faculty of Agricultural Technology - IPB in Agricultural Engineering, and Doctorate - Tokyo University of Agriculture and Technology Labor Science. Before serving as Commissioner at PT Barata Indonesia (Persero), he has been active in the Indonesian Ministry of Agriculture since 2015. For his performance achievements, several strategic positions have been carried out since 2000-2015, namely Chair of the Agriculture Mechanization Department Fateta-IPB, Deputy Dean of the Faculty of Technology IPB Agriculture, Chair of the Fateta-IPB Ergonomics Laboratory, Dean of the IPB Faculty of Agricultural Technology, Expert Team UPSUS Ministry / Ministry of Special Staff. After this period, SOE Shareholders trusted him to also be a Commissioner of PT Barata Indonesia (Persero) to provide input & supervision on the performance of PT Barata Indonesia (Persero) from 2018 to the present.

Bambang Sampurno

Born in Jember, September 19, 1965, began his career as a Permanent Lecturer in the Industrial Mechanical Engineering Department of Vocational School - ITS Surabaya in 1990-present, Secretary of SPIU TPSDP (FTI IT3 Mechanical Engineering Block Grant Program) 2004-2005, Kalab. Design and Automation of the FTI - ITS D3 Mechanical Engineering Study Program in 2006-2008, Kasie Lab. FTI ITS Mechanical Engineering D3 Program 2009-2012, Head of ITS Student Agency 2011-2013, Chair of ITS Education, Student and Alumni Relations Development Institute 2014-2015, Secretary of Academic and Student Commission of ITS Academic Senate for the period 2015-2020. And in 2018, he is currently a Member of the Risk Management Committee, the Board of Commissioners of PT Barata Indonesia (Persero).

Duties And Responsibilities Of Risk Management Monitoring Committee

- a. *The Risk Management Monitoring Committee works collectively in carrying out its duties to form the Board of Commissioners;*

- b. Komite Pemantau Manajemen Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- c. Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko perusahaan yang mencakup berbagai manajemen risiko yang dihadapi oleh perusahaan, strategi, sistem, dan kebijakan manajemen risiko perusahaan, pengendalian internal perusahaan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur.
- d. Melakukan evaluasi terhadap berbagai model pengukuran risiko yang digunakan perusahaan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut.
- e. Memantau kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.
- f. Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam perusahaan.
- g. Mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang diterapkan di perusahaan.
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. The Risk Management Monitoring Committee is independent both in carrying out its duties and reporting, and is directly responsible to the Board of Commissioners.*
- c. Obtaining an understanding of company risk management that covers a variety of risk management faced by companies, strategies, systems, and risk management policies of the company, internal control of the company, including policies, methodologies and infrastructure.*
- d. Evaluate various risk measurement models used by the company and provide further refinement recommendations.*
- e. Monitor the suitability of various policies and implementation of company risk management.*
- f. Coordinate the implementation and supervision of the existence and level of effectiveness of each component of Enterprise Risk Management (ERM) within the company.*
- g. Measuring the effectiveness of each component of ERM applied by the company.*
- h. Carry out other duties assigned by the Board of Commissioners based on the provisions of the legislation.*

FREKUENSI PERTEMUAN DAN TINGKAT KEHADIRAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
Risk Management Committee's Frequency Of Meetings And Attendance

No.	NAMA KOMITE AUDIT (Name Audit Committee's)	JABATAN (Position)	TINGKAT KEHADIRAN (Attendance)
1.	KATNO	Ketua <i>Chair</i>	100%
2.	SAM HERODIAN	Anggota <i>Members</i>	100%
3.	BAMBANG SAMPURNO	Anggota <i>Members</i>	100%

ORGAN PENDUKUNG DIBAWAH DIREKSI

Supporting Organs under the Board of Directors

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan adalah salah satu organ Direksi dalam mendukung penerapan GCG di PT Barata Indonesia (Persero) yang dibentuk, diangkat dan diberhentikan oleh Direksi yang kedudukannya berada langsung di bawah Direktur Utama serta bertanggung jawab kepada Direksi (Pasal 29 Ayat (1 dan 3) Permen No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011). Sekretaris Perusahaan mempunyai fungsi untuk memastikan ketaatan perusahaan terhadap seluruh persyaratan dari perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG.

PEDOMAN PELAKSANAAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

1. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor K 18 074 tertanggal 15 Februari 2018, berikut merupakan struktur organisasi sekretariat perusahaan :



Sekretariat Perusahaan	: Sari Sutjahjani
Humas & Kesekretariatan	: Tri Pangrukti S. P
Hukum	: Wahyu Hagono
Umum	: Sumarno

Corporate Secretary

The Corporate Secretary is one of the organs of the Board of Directors in supporting the implementation of GCG at PT Barata Indonesia (Persero) which is formed, appointed and dismissed by the Directors who are directly under the President Director and responsible to the Directors (Article 29 Paragraph (1 and 3) PER-01 / MBU / 2011 August 1, 2011). The Corporate Secretary has a function to ensure the compliance of the company with all the requirements of applicable laws and regulations and to encourage the application of GCG principles

Corporate Secretary Guidelines

1. (Organization Structure Of The Corporate Secretary)

In accordance with the Directors Decree Number K 18 074 dated February 15, 2018, the following is the organizational structure of the corporate secretary :

Corporate Secretary	: Sari Sutjahjani
Public Relations & Secretary	: Tri Pangrukti S. P
Legal	: Revelation of Hagono
General	: Sumarno

2. FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Fungsi dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut (Pasal 29 Ayat (4) Permen No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011) :

- a. memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;

2. Corporate secretary function

- a. The functions of the Corporate Secretary, as follows (Article 29 Paragraph (4) Permen No. PER-01 / MBU / 2011 dated 1 August 2011):
- b. ensure that the Company complies with the regulations regarding disclosure requirements in line with the application of the principles of Good Corporate Governance;

- b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
- c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan masyarakat (*public relation*) dan hubungan investor (*investor relation*);
- d. Sebagai penghubung antara Direksi dengan Dewan Komisaris dan RUPS (*liaison officer*);
- e. Bekerjasama dengan fungsi yang menangani pelayanan hukum Perseroan. Memberikan masukan kepada Direksi terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan;
- f. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Triwulanan atau Semesteran dan Laporan Tahunan (*Annual Report*)
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama setiap tahun.
- h. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
- i. Direksi memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan (Pasal 29 Ayat (5) Permen No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011).

3. TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

- a. Sekretaris perusahaan dalam menjalankan fungsinya untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - Menelaah ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang baru dan mendistribusikan serta mensosialisasikan kepada yang terkait.
 - Melakukan kajian hukum (*legal opinion*) atas setiap rencana tindakan strategis dan permasalahan yang terjadi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
 - Melakukan kajian dan upaya penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi sesuai dengan ketentuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
 - Mengkoordinasikan penyusunan laporan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menyusun dan menerbitkan Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) perusahaan terbaru setiap awal tahun untuk memberikan kesempatan kepada semua Badan Usaha/ Hukum yang berminat menjadi rekanan di perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perusahaan

- c. *provide information needed by the Board of Directors and Board of Commissioners / Supervisory Board periodically and / or at any time when requested;*
- d. *Carry out activities related to the functions of public relations and investor relations;*
- e. *As a liaison between the Board of Directors and the Board of Commissioners and the GMS (liaison officer);*
- f. *Cooperating with functions that handle the Company's legal services. Provide input to the Board of Directors regarding compliance with laws and regulations that apply to the Company;*
- g. *Coordinating the Preparation of Quarterly or Semester Report and Annual Report*
- h. *Take responsibility for carrying out their duties to the President Director every year.*
- i. *Organizing and storing company documents, including but not limited to the List of Shareholders, Special Lists and minutes of Board of Directors meetings, Board of Commissioners meetings and GMS.*
- j. *The Board of Directors has the obligation to maintain and evaluate the quality of the functions of the company secretary (Article 29 Paragraph (5) Permen No. PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011).*

3. Corporate Secretary's Tasks

- a. *The corporate secretary in carrying out its functions to ensure that the company complies with the regulations regarding disclosure requirements in line with the application of GCG principles, has the following tasks:*
 - *Reviewing the new rules and regulations and distributing and disseminating them to the relevant parties.*
 - *Conducting legal opinions on each strategic action plan and problems that occur as stipulated in company regulations and legislation.*
 - *Conducting studies and efforts to resolve litigation and non-litigation cases in accordance with company regulations and legislation;*
 - *Coordinate the preparation of reports on the level of company compliance with applicable laws and regulations;*
 - *Compile and publish the latest List of Selected Associates (DRT) companies every year to provide opportunities for all Business / Legal Entities who are interested in becoming partners in the company in accordance with the requirements set in accordance with the laws and regulations and distribution to the Work Unit which is related;*

serta mendistribusikannya kepada Unit Kerja yang terkait;

- Memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam website perusahaan maupun website perusahaan online secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 - Mengkoordinasikan penyiapan dan penyediaan bahan-bahan untuk “Proses Release” atas setiap pernyataan dalam tingkatan Direksi.
 - Pelayanan pemberian informasi yang dibutuhkan oleh stakeholders mengenai data atau performance dari perusahaan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Protokol Informasi yang ditetapkan perusahaan.
 - Penyampaian informasi dan laporan-laporan lainnya yang kepada stakeholders sesuai peraturan perundang-undangan.
 - Melakukan survey secara berkala atas kecukupan keterbukaan informasi perusahaan kepada stakeholders, dapat dilakukan melalui website atau melalui kuesioner.
- b. Sekretaris Perusahaan dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta, mempunyai tugas sebagai berikut:
- Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen Triwulanan, Laporan Manajemen Tahunan dan Laporan Tahunan yang akurat dan dapat diandalkan.
 - Menyampaikan Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Laporan Manajemen Triwulanan ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Laporan Manajemen Tahunan ditandatangani oleh seluruh Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan yang akurat dan dapat diandalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Laporan Tahunan ditandatangani oleh seluruh Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - Mengkoordinasikan penyusunan dan menyampaikan informasi dan laporan lainnya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham sewaktu-waktu apabila diminta.
- c. Sekretaris Perusahaan dalam menjalankan fungsinya

- *Updating information material that is presented on the company's website and online company website regularly in accordance with the provisions and laws and regulations;*
- *Coordinate the preparation and provision of materials for the “Release Process” for each statement at the Board of Directors level.*
- *Services to provide information needed by stakeholders regarding data or performance of companies within the boundaries stipulated in the Information Protocol established by the company.*
- *Submission of information and other reports to stakeholders in accordance with the laws and regulations.*
- *Conduct regular surveys of the adequacy of company information disclosure to stakeholders, can be done through the website or through questionnaires.*

b. *The Corporate Secretary in carrying out its functions to provide information needed by the Board of Directors and the Board of Commissioners periodically and / or at any time when requested, has the following tasks:*

- *Coordinate the preparation of accurate and reliable Quarterly Management Reports, Annual Management Reports and Annual Reports.*
- *Deliver Quarterly Management Reports and Annual Management Reports to the Board of Commissioners and Shareholders on time in accordance with applicable regulations.*
- *Quarterly Management Reports are signed by all Directors and the Annual Management Report is signed by all Directors and members of the Board of Commissioners.*
- *Coordinate the preparation of accurate and reliable Annual Reports in accordance with applicable regulations.*
- *Submitting an Annual Report to the Board of Commissioners and Shareholders on time in accordance with applicable regulations.*
- *The Annual Report is signed by all Directors and members of the Board of Commissioners.*
- *Coordinate the preparation and delivery of information and other reports to the Board of Commissioners and Shareholders at any time when requested.*

c. *The Corporate Secretary in carrying out his function as*

sebagai Pejabat Penghubung, mempunyai tugas sebagai berikut:

- Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris, RUPS dan Kegiatan lainnya dengan stakeholders a.l press conference, dengar pendapat dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebagainya;
 - Menyusun jadwal dan tahapan kegiatan menjelang RUPS/RUPS LB, Rapat Direksi, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris dan rapat lainnya;
 - Membuat undangan RUPS/RUPS LB, Rapat Direksi, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris dan rapat lainnya dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu, tempat rapat dan ketersediaan bahan-bahan rapat dan menyampaikan kepada peserta rapat tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Sekretaris perusahaan dalam menjalankan fungsi untuk menata usahakan serta menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, RUPS, dan rapat Direksi, mempunyai tugas sebagai berikut:
- Membuat, memelihara, dan menyimpan Daftar Pemegang Saham;
 - Membuat, memelihara, dan menyimpan Daftar Khusus;
 - Membuat, memelihara, dan menyimpan Risalah RUPS;
 - Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Risalah Rapat Direksi dan Risalah Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.
- e. Sekretaris perusahaan menjalankan fungsi untuk menatausahakan serta menyimpan arsip perusahaan;
- f. Tugas lain dari Sekretaris Perusahaan adalah menyelenggarakan program pengenalan bagi Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat:
- Terdapat program pengenalan perusahaan bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat;
 - Terdapat rencana kerja mengenai program pengenalan perusahaan kepada Direksi dan anggota Dewan komisaris yang baru diangkat.

4. KEWAJIBAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

- a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka mematuhi ketentuan yang berhubungan dengan UU BUMN, UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, peraturan pemerintah, peraturan menteri/instansi terkait dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Membantu dan memberikan saran kepada direksi

the Liaison Officer, has the following tasks:

- *Organizing and coordinating Board of Directors Meetings, Directors and Board of Commissioners Meetings, GMS and other Activities with stakeholders a press conference, hearings with members of the House of Representatives, and so on;*
 - *Compile schedules and stages of activities ahead of the GMS/EGMS, Directors' Meetings, Board of Directors and Commissioner' Joint Meetings and other meetings;*
 - *Prepare invitations of EGMS/GMS, Board of Directors Meetings, Board of Directors and Commissioners' Joint Meetings and other meetings by stating the event, date, time, location and availability of meeting materials and reminding meeting participants to be on time in accordance with applicable provisions*
- d. *The corporate secretary in carrying out the functions to organize the business as well as keep a list of Shareholders, Special Lists, GMS, and Board of Directors meetings, have the following duties:*
- *Composing, maintaining and storing the List of Shareholders;*
 - *Create, maintain and store Special Lists;*
 - *Create, maintain and store Minutes of GMS;*
 - *The Corporate Secretary makes, maintains and maintains the Minutes of Directors' Meetings and Minutes of Joint Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners.*
- e. *The corporate secretary carries out functions to administer and store company archives;*
- f. *Another task of the Corporate Secretary is to hold an introduction program for newly appointed Directors and / or members of the Board of Commissioners:*
- *There is a corporate introduction program for newly appointed Directors and Board of Commissioners members;*
 - *There is a work plan regarding the company's introduction program to the newly appointed Directors and Board of Commissioners.*

4. Corporate Secretary's Obligation

- a. *Advise the Board of Directors in order to comply with the provisions relating to the Law on SOE, Limited Liability Company Law, Capital Market Law, government regulations, regulations of ministers / relevant agencies and the implementing regulations.*
- b. *Assist and provide advice to directors in making fast,*

dalam pengambilan keputusan yang cepat, akurat dan strategis.

- c. Membuat dan/atau meneliti konsep surat keputusan/surat edaran Direksi baik untuk kepentingan internal maupun eksternal.
- d. Membangun citra perusahaan yang positif dengan jalan membina hubungan yang baik dengan pihak luar perusahaan atau dengan mengikuti pameran yang ada kaitannya dengan korporasi.
- e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama.

5. WEWENANG SEKRETARIS PERUSAHAAN

- a. Berhak meminta data/informasi dari masing-masing Bagian/Grup Unit Usaha/Unit Usaha, yaitu data/informasi yang relevan untuk disampaikan dan dipublikasikan kepada *Stakeholders*.
- b. Berwenang menanggapi pertanyaan *stakeholders*, sepanjang tidak ada pembatasan dari Direksi.

6. AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Sesuai dengan Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perseroan menyediakan akses informasi dan data perusahaan kepada *stakeholder* melalui sarana dan prasarana yang disediakan oleh perseroan yaitu :

ALAMAT PERUSAHAAN

Kantor Pusat

Jl. Veteran No. 241 Gresik 61123, Jawa Timur – Indonesia
Telp. : +62 31 3990555
Fax. : +62 31 3990666
Email : info@barata.com

Kantor Perwakilan Jakarta

Menara MTH, Lt. 10, Ruang 1001
Jl. MT Haryono Kav. 23, Jakarta Selatan 12320, Indonesia
Telp. : +62 21 83788533
Fax. : +62 21 83788534
Email : jakarta@barata.com

WEBSITE DAN EMAIL PERUSAHAAN

Website : www.barata.com
Email : info@barata.com

PORTAL KEMENTERIAN BUMN

Website : <http://www.bumn.go.id/barata/>

accurate and strategic decisions .

- c. *Make and / or examine the concept of decrees / circular letters of the Directors for both internal and external interests.*
- d. *Build a positive company image by building good relationships with parties outside the company or by taking part in exhibitions related to the corporation.*
- e. *Report the implementation of their duties to the President Director.*

5. Corporate Secretary's Authority

- a. *Eligible to request data / information from each Division / Group of Business Units / Business Units, namely relevant data / information to be submitted and published to Stakeholders.*
- b. *Authorised to respond to stakeholders' questions, as long as there are no restrictions from the Directors*

6. (INFORMATION AND COMPANY DATA ACCESS)

In accordance with Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Openness, the Company provides access to company information and data to stakeholders through the facilities and infrastructure provided by the company, namely:

Company's address

Headquarter

Jl. Veteran No. 241 Gresik 61123, East Java - Indonesia
Tel. : +62 31 3990555
Fax. : +62 31 3990666
Email : info@barata.com

Jakarta Representative Office

Menara MTH, Lt. 10, Room 1001
Jl. MT Haryono Kav. 23, South Jakarta 12320, Indonesia
Tel. : +62 21 83788533
Fax. : +62 21 83788534
Email : jakarta@barata.com

Company Website and Email

Website : www.barata.com
Email : info@barata.com

SOE Ministry Portal

Website: <http://www.bumn.go.id/barata/>

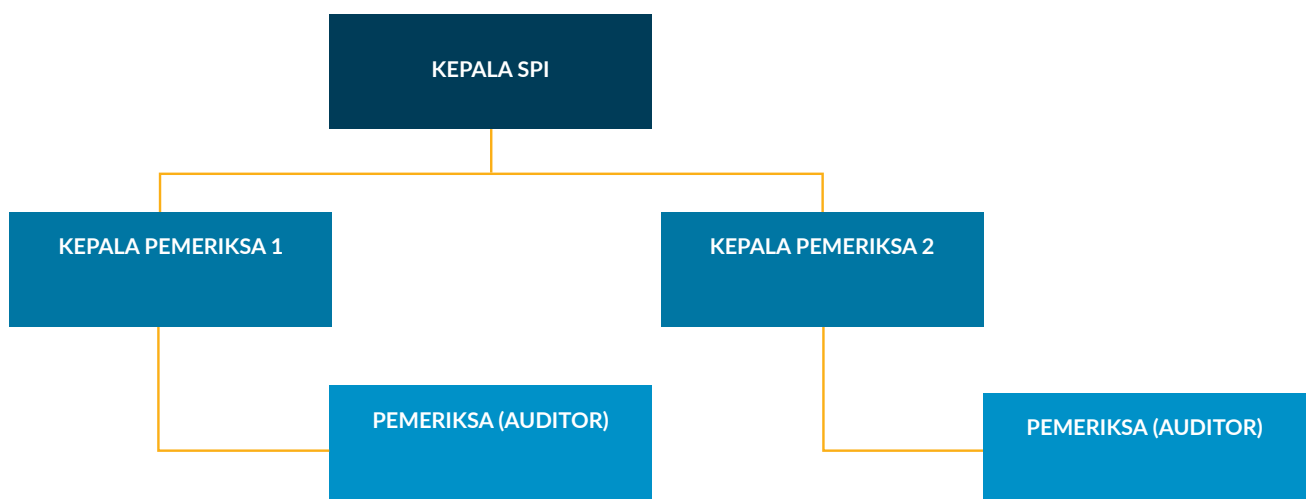
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan aparat atau unit kerja yang dibentuk yang bertugas untuk membantu Direktur Utama dalam melaksanakan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan usaha (kinerja) serta menyampaikan saran atau rekomendasi perbaikannya dan sekaligus melakukan monitoring atas tindak lanjut saran atau rekomendasi tersebut. Dasar hukum atas keberadaan Satuan Pengawasan Intern yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2003 tentang “Badan Usaha Milik Negara”, pada bab.IV, pasal 67, ayat ke 1.

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN SATUAN PENGAWASAN INTERN

Satuan Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas (Pasal 28 Permen No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 atau Pasal 67 UU No.19 Tahun 2003).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Barata Indonesia (Persero) Nomor : K 18 074 tanggal 15 Februari 2018 tentang Penyempurnaan Organisasi PT Barata Indonesia (Persero), telah ditetapkan Struktur Organisasi, termasuk didalamnya struktur organisasi, fungsi, tugas dan wewenang SPI sebagai berikut :



Internal Audit Unit

The Internal Audit Unit (SPI) is an apparatus or work unit formed that is tasked with assisting the President Director in carrying out assessments of the control system, managing the business (performance) and submitting recommendations or recommendations for improvements and at the same time monitoring the follow-up suggestions or recommendations. The legal basis for the existence of the Internal Audit Unit, namely the Law of the Republic of Indonesia number 19 of 2003 concerning “State-Owned Enterprises”, in chapter IV, article 67, paragraph 1.

Internal Audit Unit organization and membership structure

Internal Audit Unit (SPI) is led by a head appointed and dismissed by the President Director based on the company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners / Supervisory Board (Article 28 of Regulation No. PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011 or Article 67 of Law No. .19 of 2003).

Based on the Decree of the Board of Directors of PT Barata Indonesia (Persero) Number: K 18 074 dated February 15, 2018 concerning the Improvement of the Organization of PT Barata Indonesia (Persero), Organizational Structures, including the organizational structure, functions, duties and authorities of SPI have been established as follows:

Per 31 Desember 2018, Unit SPI didukung oleh 5 (lima) personil dengan kualitas dan kompetensi sesuai yang dipersyaratkan dalam uraian tugasnya dengan komposisi sebagai berikut :

Kepala SPI	: Rushadi
Kepala Pemeriksaan	: Musfiroh
Pemeriksa (Auditor)	: 1. Wisnu Ramadhani R 2. Sella Pritalova P.B 3. Moch. Nanang Adriansyah

As of December 31, 2018, the SPI Unit is supported by 5 (five) personnels with the quality and competence as required in the job description with the following composition:

<i>Head of SPI</i>	<i>: Rushadi</i>
<i>Chief Examiner</i>	<i>: Musfiroh</i>
<i>Auditor</i>	<i>: 1. Wisnu Ramadhani R 2. Sella Pritalova P.B 3. Moch. Nanang Adriansyah</i>

PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERN

Sebagai landasan legal formal semua tugas pemeriksaan, Satuan Pengawasan Internal PT Barata Indonesia memiliki Piagam Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) yang ditanda tangani oleh Kepala SPI, Direktur Utama dan Komisaris Utama pada tanggal 22 November 2016.

Adapun isi dari Piagam Satuan Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) PT Barata Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :

1. Umum
 2. Maksud dan Tujuan Piagam Satuan Pengawasan Intern
 3. Visi dan Misi
 4. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang
 5. Kode Etik
 6. Penutup
1. Maksud dan tujuan piagam satuan pengawasan intern
 - a. Sebagai landasan legal formal & pedoman bagi Satuan Pengawasan Internal dalam menjalankan tugas & wewenangnya;
 - b. Agar semua tugas Satuan Pengawasan Internal dapat diterima dan dipertanggung jawabkan secara professional oleh semua pihak yang berkepentingan.
 2. Visi dan Misi
Visi :
Berperan aktif dalam menciptakan pengawasan secara berkesinambungan.
Misi :
 - a. Menjadikan SPI sebagai mitra yang berperan aktif dalam mendorong terselenggaranya pengendalian internal yang efektif dan tata kelola yang baik.
 - b. Meningkatkan kompetensi & profesionalisme auditor melalui pelatihan & pengembangan secara professional.
 3. Tugas, Tanggung jawab dan wewenang
Tugas dan Tanggung jawab :

Internal Audit Unit Awards

As a formal legal basis for all audit tasks, PT Barata Indonesia's Internal Monitoring Unit has an Internal Audit Unit Charter signed by the Head of SPI, President Director and President Commissioner on November 22, 2016.

The contents of the Charter of the Internal Audit Charter of PT Barata Indonesia (Persero) are as follows:

1. General
 2. The Purpose and Objectives of the Internal Audit Unit Charter
 3. Vision and Mission
 4. Tasks, Responsibilities, and Authorities
 5. Code of Ethics
 6. Closing
1. The purpose and objectives of the charter of the internal audit unit :
 - a. As a formal legal foundation & guidance for the Internal Supervision Unit in carrying out its duties & authority;
 - b. So that all tasks of the Internal Control Unit can be accepted and accounted for professionally by all interested parties.
 2. Vision and Mission
Vision:
Take an active role in creating continuous supervision.
Mission:
 - a. Making SPI a partner who plays an active role in encouraging the implementation of effective internal control and good governance.
 - b. Improve auditor competency & professionalism through professional training & development.
 3. Duty, responsibility and authority
Duties and responsibilities :

- a. Menyusun & melakukan Program Kerja Pemeriksa Tahunan (PKPT) yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan.
- b. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama berupa Laporan Hasil Pemeriksaan .
- c. Melakukan pemantauan serta mengevaluasi tindak lanjut atas permasalahan untuk memastikan apakah perbaikan telah dilaksanakan oleh auditee.
- d. Memberikan jasa konsultasi atas permasalahan yang dihadapi oleh manajemen.
- e. Dalam menjalankan tugasnya Satuan Pengawasan Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

WEWENANG :

- a. Melakukan pemeriksaan di setiap unit lingkungan perusahaan.
- b. Memeriksa seluruh dokumen atau catatan yang dianggap perlu yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perusahaan.
- c. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, untuk kepentingan perusahaan
- d. Satuan Pengawasan Internal tidak mempunyai wewenang dalam pelaksanaan aktifitas yang diaudit.

4. Kode Etik

Para Auditor Internal harus memegang teguh & mematuhi kode etik auditor PT Barata Indonesia (Persero) sebagai berikut :

- a. Auditor wajib bersikap jujur, objektif, hati-hati dan mampu bertindak secara independen dalam menjalankan tugas maupun kewajibannya.
- b. Auditor harus mampu memelihara kepercayaan oleh pemberi tugas.
- c. Auditor harus mampu memegang rahasia jabatan.
- d. Auditor harus menggunakan semua kemampuannya untuk memperoleh bukti – bukti yang memadai guna mendukung pernyataannya.
- e. Auditor harus berusaha meningkatkan keahlian dan keefektifan dalam melakukan pekerjaannya memelihara kompetensi, moralitas dan menjunjung tinggi kehormatan korporasi.
- f. Auditor harus membangun komunikasi untuk kepentingan perusahaan & tugasnya.
- g. Auditor harus berpedoman pada norma – norma pemeriksaan dalam melaksanakan tugasnya;
- h. Auditor harus menghindari diri untuk mengambil bagian dalam aktivitas ilegal atau yang tidak pantas dilakukan.
- i. Auditor harus berusaha untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang dapat menimbulkan konflik

- a. Compile & carry out the Annual Audit Work Program (PKPT) which covers all company activities.
- b. Report the results of the examination to the President Director in the form of an Audit Report.
- c. Monitor and evaluate follow-up on problems to ascertain whether the repairs have been carried out by the auditee.
- d. Providing consulting services on problems faced by management.
- e. In carrying out its duties the Internal Supervision Unit is directly responsible to the President Director.

Authority:

- a. Conduct checks in each company environmental unit.
- b. Check all documents or records that are deemed necessary that are related directly or indirectly to the activities of the company.
- c. Verify and test reliability of information obtained, for the benefit of the company.
- d. The Internal Audit Unit does not have the authority to carry out audited activities.

4. Code of Ethics

Internal Auditors must uphold & adhere to the ethical code of auditors of PT Barata Indonesia (Persero) as follows:

- a. The auditor must be honest, objective, careful and able to act independently in carrying out his duties and obligations.
- b. The auditor must be able to maintain trust by the assignor.
- c. The auditor must be able to hold the job confidentiality.
- d. The auditor must use all of his abilities to obtain sufficient evidence to support his statement.
- e. The auditor must strive to improve expertise and effectiveness in carrying out his work to maintain competence, morality and uphold corporate honor.
- f. The auditor must establish communication for the benefit of the company & its duties.
- g. Auditors must be guided by audit norms in carrying out their duties;
- h. The auditor must avoid taking part in illegal or inappropriate activities.
- i. Auditors must try not to involve themselves in activities leading to conflicts of interest of the assignor or prejudice

kepentingan pemberi tugas maupun prasangka yang dapat meragukan kemampuannya dalam bertindak independen.

- j. Dalam menerima perintah / penugasan diluar kegiatan pemeriksaan auditor harus mampu meninggalkan identitasnya selaku auditor.

that can doubt their ability to act independently.

- j. In receiving orders / assignments outside of the audit activities, the auditor must be able to leave his identity as the auditor.*

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SPI

PT Barata Indonesia (Persero) senantiasa melakukan program peningkatan kompetensi personil Satuan Pengawasan Internal dengan melakukan program pengembangan kompetensi auditor secara sistematis dan berjenjang.

Secara umum kebijakan pengembangan kompetensi ditempuh dengan 2 cara, yaitu pengembangan kompetensi pada lembaga eksternal dan pengembangan kompetensi secara internal. Selama tahun 2018, personil SPI telah mengikuti pelatihan audit sebagai berikut :

IAU Competencies Development

PT Barata Indonesia (Persero) always conducts programs to increase the personnel competency of the Internal Audit Unit by conducting auditor competency development programs in a systematic and tiered manner.

In general, the competency development policy is carried out in two ways, namely the development of competencies in external institutions and internal competency development. During 2018, SPI personnel attended audit training as follows:

FREKUENSI PERTEMUAN DAN TINGKAT KEHADIRAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Risk Management Committee's Frequency Of Meetings And Attendance

No.	PELATIHAN (SEMINAR)	PESERTA	PENYELENGGARA	TANGGAL
1.	Workshop Probity audit – pengadaan barang dan jasa	Musfiroh, Wisnu	Forum Komunikasi Satuan Pengawasa Intern (FKSPI) Jawa Timur	31 Oktober 2018
2.	Sosialisasi peran BEI dan Pasar Modal terhadap pertumbuhan Perseroan	Musfiroh, Wisnu, Rushadi	Bursa Efek Indonesia	16 Oktober 2018
3.	Training Manajemen Risiko	Nanang	PT Barata Indonesia & PT Media Edutama Indonesia	20 – 21 Oktober 2018
4.	Pengelolaan SDM Kekinian	Rushadi	Biro Human Capital	8 Mei 2018
5.	Sosialisasi eLHKPN	Rushadi	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	31 Januari 2018
6.	Kader Bela Nega Negara dan Wawasan Kebangsaan	Sella	Rindam V Brawijaya - Malang	10 – 15 September 2018

PELAKSANAAN KEGIATAN SPI TAHUN 2018

Pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) tahun 2018 sebagai berikut :

A. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. Komplek Gresik : 9 Kali
2. Proyek : 2 Kali
3. Pabrik (Cabang) : 4 Kali

B. PENERBITAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

1. Komplek Gresik : 9 LHP
2. Proyek : 1 LHP
3. Cabang (Unit Usaha Mandiri) : 5 LHP

IAU Activities Implementation in2018

The implementation of the 2018 Annual Inspection Work Program (PKPT) is as follows:

A. IMPLEMENTATION OF INSPECTION

1. Gresik Complex : 9 Times
2. Project : 2 times
3. Factory (Branch) : 4 Times

B. PUBLISHING REVIEW OF INSPECTION RESULTS (LHP)

1. Gresik Complex : 9 LHP
2. Project: 1 LHP
3. Branch (Independent Business Unit) : 5 LHP

PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUNAN (PKPT), KEGIATAN PEMERIKSAAN, SASARAN PEMERIKSAAN & TINDAK LANJUT SPI PT BARATA INDONESIA (PERSERO)

1. KEGIATAN PEMERIKSAAN

Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) meliputi pemeriksaan umum (yaitu pemeriksaan keuangan & pemeriksaan operasional) dan pemeriksaan khusus. Alur proses kegiatan pemeriksaan tertuang dalam Operating Procedure Agreement (OPA) SPI nomor IT PO 1100 01 tentang "Kegiatan Pemeriksaan" hingga proses akhir yaitu penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah catatan tertulis yang berisi informasi hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Direktur Utama & Auditee yang diperiksa.

2. SASARAN PEMERIKSAAN

a. Pemeriksaan Keuangan

Berikut ini merupakan sasaran yang dicapai dalam pemeriksaan keuangan :

- A.1 - Penilaian Sistem Pengendalian Manajemen
- A.2 - Pemeriksaan Kelengkapan & Kewajaran Pertanggung Jawaban Keuangan
- A.3 - Pemeriksaan Ketaatan Terhadap Ketentuan Yang Berlaku
- A.4 - Pemeriksaan Terhadap Pengamanan Kekayaan Perusahaan
- A.5 - Pengkajian Ulang Analisa Laporan Keuangan

b. Pemeriksaan Operasional

Berikut ini merupakan sasaran yang dicapai dalam pemeriksaan operasional :

- B.1 - Kelancaran Pelayanan Kepada Pemesan
- B.2 - Ketaatan Terhadap Ketentuan Yang Berlaku
- B.3 - Peningkatan Penghematan Pengeluaran Daya Guna dan Hasil Guna

c. Pemeriksaan Khusus

Kegiatan pemeriksaan atas dasar kejadian yang berindikasi fraud atau kecurangan dari hasil pemeriksaan rutin maupun informasi yang diterima.

3. PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUNAN (PKPT) SATUAN PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2018

Untuk menunjang pelaksanaan kerja dan pencapaian visi dan misi SPI tersebut, maka dalam anggaran tahun 2018 diajukan Program Kerja Pemeriksaan (PKPT) dari Satuan Pengawasan Intern (pada gambar 1.0 PKPT SPI Barata Indonesia)

Annual Inspection Work Program (Pkpt), Inspection Activities, Inspection Targets & Follow-Up Of Iau Pt Barata Indonesia (Persero)

1. Inspection Activities

Inspection activities carried out by the Internal Audit Unit (IAU) include general checks (i.e. financial checks & operational checks) and special examinations. The flow of the inspection activity process is contained in the IAU Operating Procedure Agreement (OPA) PO number 1100 01 regarding the "Audit Activity" until the final process, namely the issuance of the Audit Result Report (LHP).

Inspection Results Report (LHP) is a written record containing information on the results of inspection submitted to the President Director & Auditee examined.

2. Target Of Inspection

a. Financial Audit

The following are the objectives achieved in the financial audit:

- A.1 - Management Control System Assessment
- A.2 - Examination of Completeness & Fairness of Financial Accountability
- A.3 - Compliance Check on Applicable Conditions
- A.4 - Inspection of Security of Company Assets
- A.5 - Review of Financial Statement Analysis

b. Operational Audit

The following are the objectives achieved in the operational inspection:

- B.1 - Smooth Service to Customers
- B.2 - Compliance with Applicable Conditions
- B.3 - Increased Savings Expenditures for Use and Use

c. Special Inspection

Inspection activities on the basis of events that indicate fraud or fraud from the results of routine checks and information received.

3. Internal Audit Unit Annual Inspection Work Program (AIWP) Internal audit Unit In 2018

To support the implementation of the work and achievement of the vision and mission of the IAU, then in the 2018 budget submitted the Work Program of Examination (PKPT) from the Internal Audit Unit (in Figure 1.0 PKPT SPI Barata Indonesia)

Mekanisme atas pembuatan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) ini tertuang dalam *Operating Procedure Agreement (OPA)* SPI nomor IT PA 1110 01 tentang "Pembuatan Program Kerja Pemeriksaan (PKPT)".

The mechanism for the creation of the Annual Examination Work Program (PKPT) is contained in the Operating Procedure Agreement (OPA) SPI number IT PA 1110 01 on "Creation of Work Inspection Program (PKPT)".

4. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah kewajiban dari auditee yang diperiksa untuk menanggapi dan menyelesaikan tindak lanjut LHP dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) dengan didukung data atau dokumen.

4. Follow Up On Reporting Of Inspection Results (LHP)

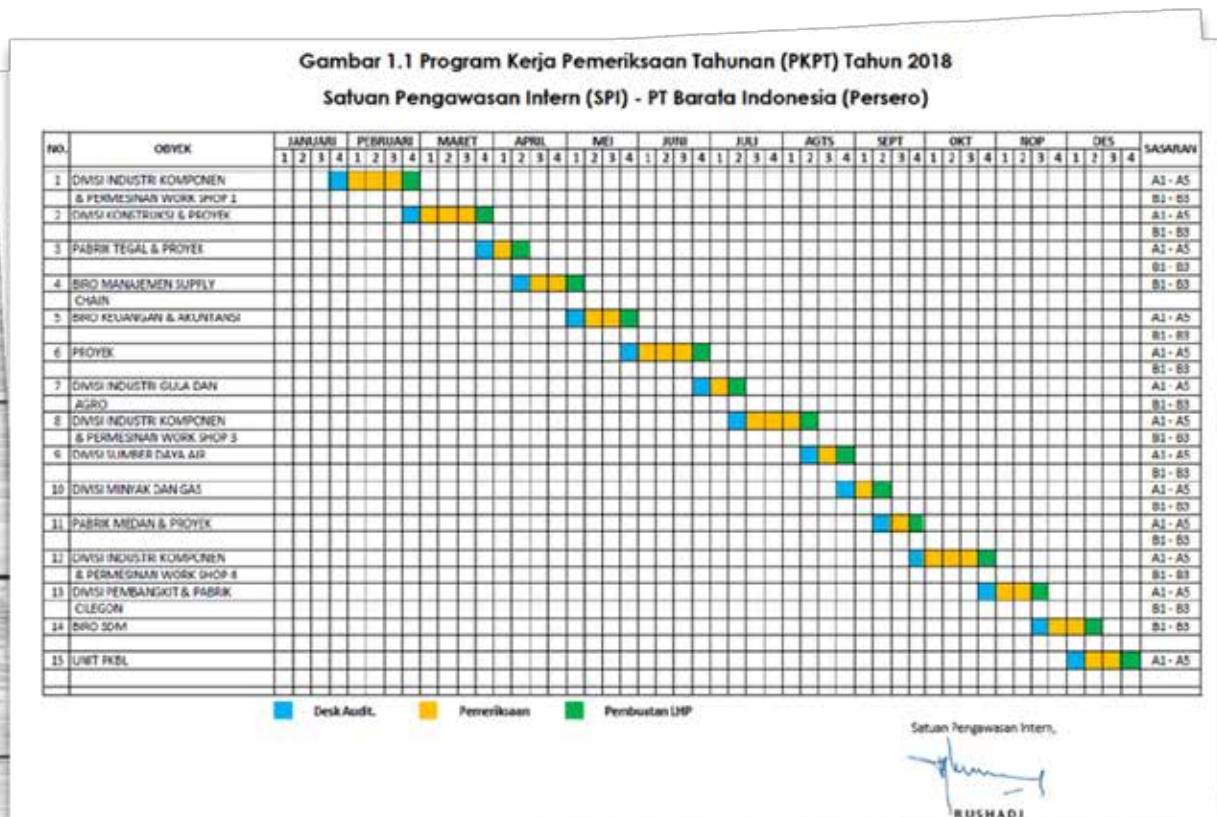
Follow-up on the Audit Result Report (LHP) is the obligation of the auditee to be examined to respond to and complete the follow-up of LHP from the Internal Audit Unit (IAU) supported by data or documents.

Berdasarkan OPA nomor IT PO 1100 03 tentang "Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI", auditee yang diperiksa wajib :

Based on the OPA number IT PO 1100 03 regarding "Follow-Up on the SPI Inspection Report (LHP)", the auditee examined must:

- menyampaikan penyelesaian tindak lanjut atas LHP kepada SPI sesuai dengan batasan waktu yang sudah ditetapkan, yaitu 30 hari kalender sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterbitkan oleh SPI.
- Tanggapan secara tertulis didukung dengan bukti relevan ditujukan kepada Direktur Utama (tanpa lampiran) dan Satuan Pengawasan Intern (termasuk lampiran penyelesaian tindak lanjut).

- submit the completion of the follow-up action on the LHP to the SPI in accordance with the stipulated time limit, which is 30 calendar days from the Inspection Report issued by SPI.*
- The written response is supported by relevant evidence addressed to the President Director (without attachments) and the Internal Audit Unit (including attachments for completion of follow-up)*



Gambar 1.0 – PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUNAN (PKPT) SATUAN PENGAWASAN INTERN PT BARATA INDONESIA (PERSERO) TAHUN 2018

REALISASI PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan Umum

Audit Realization

1. Pemeriksaan Umum

No.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2018	
			RKAP	Realisasi
1.	Pemeriksaan	Kali	15	14
2.	Penerbitan Laporan	LHP	15	14

- Selama tahun 2018, realisasi pemeriksaan sebanyak 14 kali atau 93,33% dari target RKAP;
- Untuk realisasi atas penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selama tahun 2018 sebanyak 14 kali atau 93,33% dari target RKAP.
- Sebesar 6,67% laporan hasil pemeriksaan tidak tercapai dikarenakan adanya pemeriksaan yang dilakukan pada akhir tahun 2018 namun untuk pelaporan masuk di tahun 2019.

- In 2018, the realized inspection was 14 times or 93.33% of the RKAP target;
- For the realization of the issuance of the Audit Result Report (LHP) during 2018 was 14 times or 93.33% of the RKAP target.
- As much as 6.67% of the results of the audit report were not achieved due to an examination conducted at the end of 2018 but for incoming reports in 2019.

2. Pemeriksaan Khusus

Selama tahun 2018 tidak ada permintaan atas audit khusus yang dilakukan.

2. Special Inspection

During 2018 there were no requests for special audits conducted

3. Realisasi Tindak Lanjut atas Lapora Hasil Pemeriksaan (LHP)

3. Realisasi Tindak Lanjut atas Lapora Hasil Pemeriksaan (LHP)

Status LHP		Status Temuan Dan Tindak Lanjut		
Jumlah LHP yang diterbitkan	Total Temuan Pada LHP (dari LHP yang terbit)	Sudah Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi	Ditindaklanjuti Namun Belum Sesuai Rekomendasi	Belum Ditindaklanjuti
14	103	95	0	8

- Realisasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dari hasil temuan sebanyak 138 temuan, sebanyak 95 temuan sudah diselesaikan sesuai rekomendasi SPI, sebanyak 19 temuan saat ini masih dalam proses monitoring karena belum sepenuhnya diselesaikan sesuai rekomendasi SPI dan 24 temuan yang akan ditindak lanjuti di bulan Januari 2019.
- Pada tahun 2018 telah dilaksanakan pemeriksaan (audit internal) dengan target penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 15 LHP dan hanya terealisasi 14 LHP atau 93,33 % dari target.

- Realization of follow-up of the Audit Report from the findings of 138 findings, 95 findings have been completed according to IAU recommendations, 19 findings are currently still in the monitoring process because they have not been fully completed according to SPI recommendations and 24 findings that will be followed up in January 2019 .
- In 2018 an audit (internal audit) was carried out with the target of issuing an Audit Result Report (LHP) of 15 LHP and only realized 14 LHP or 93.33% of the target.

AKUNTAN PUBLIK (*Public Accountant*)

Kantor Akuntan Publik melaksanakan pemeriksaan kewajaran pencatatan transaksi dan posisi keuangan Perseroan secara independen. Auditor Independen Eksternal yang ditunjuk tidak boleh berada di bawah kendali Dewan Komisaris, Direksi atau pihak-pihak berkepentingan lainnya dalam bentuk apapun.

Auditor Independen Eksternal yang ditunjuk bertanggung jawab untuk menyampaikan opininya atas posisi dan ketaatan laporan keuangan konsolidasian yang diaudit berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. MEKANISME PENUNJUKKAN AKUNTAN PUBLIK INDEPENDEN

- a. Mekanisme Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dilakukan dengan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP). Penunjukan KAP tersebut diputuskan dalam RUPS berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris melalui Komisaris Independen selaku Ketua Komite Audit yang bertugas melaksanakan proses penunjukan KAP sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit. Jasa audit yang diberikan oleh KAP meliputi audit laporan keuangan konsolidasian dan audit laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan tahun buku 2018.
- b. Auditor Independen Eksternal yang ditunjuk bertanggung jawab untuk menyampaikan opininya atas posisi dan ketaatan laporan keuangan konsolidasian yang diaudit berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- c. Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktek Akuntan Publik ditentukan bahwa pemberian jasa audit atas laporan keuangan historis terhadap suatu entitas oleh Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, sehingga berakhir pula pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT Barata Indonesia (Persero) untuk tahun buku 2017.
- d. Dengan berkembangnya usaha PT Barata Indonesia (Persero), maka pada tahun 2018 telah dilakukan proses pengadaan jasa untuk Kantor Akuntan Publik yang baru sesuai dengan kebijakan pengadaan yang berlaku di perusahaan. Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan seleksi dengan

Public Accountant

The Public Accountant Office carries out fairness checks independently of the Company's transactions and financial position. The appointed External Independent Auditor may not be under the control of the Board of Commissioners, Directors or other interested parties in any form.

The appointed External Independent Auditor is responsible for expressing his opinion on the position and compliance of the audited consolidated financial statements based on generally accepted accounting principles in Indonesia.

1. INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTING appointment mechanism

- a. *Appointment Mechanism of the Independent Public Accountant to conduct the audit of the Company's financial statements and the Annual Report on the Implementation of the Partnership and Community Development Program, is executed by appointing a Public Accounting Firm (KAP). The appointment of the KAP is decided at the GMS based on the recommendations of the Board of Commissioners through the Independent Commissioner as Chair of the Audit Committee who is assigned the process to appoint the KAP as stipulated in the Audit Committee Charter. The audit services provided by KAP include the audit of consolidated financial statements and audits of the financial statements of the Partnership Program and the Company's Community Development 2018.*
- b. *The appointed External Independent Auditor is responsible for expressing his opinion on the position and compliance of the audited consolidated financial statements based on generally accepted accounting principles in Indonesia.*
- c. *Based on Government Regulation No.20 of 2015 regarding Public Accountants Practice stipulated that the provision of audit services to historical financial statements of an entity by a Public Accountant is limited to a maximum of 5 (five) financial years, thus ending the audit of PT Barata Indonesia (Persero) financial statements for the 2017 financial year.*
- d. *With the development of PT Barata Indonesia (Persero) business, then in 2018 procurement of services process for the new Public Accounting Firm has been conducted in accordance with the prevailing procurement policies in the Company. The Board of Commissioners through Audit Committee has conducted a selection (evaluation) of the*

penilaian (evaluasi) atas penawaran jasa audit atas KAP yang di seleksi meliputi aspek administrasi, teknis dan harga penawaran. Hasil akhir penilaian dimenangkan oleh KAP Hadori, Sugiarto Adi & Rekan, dimana disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham atas PT Barata Indonesia (Persero) melalui surat nomor S-09/Dekom/BRT/III/2018 tanggal 23 Maret 2018.

- e. Berdasarkan risalah RUPS nomor : RIS-002/RUPS/IV/2018 tanggal 25 April 2018, telah ditetapkan bahwa KAP Hadori, Sugiarto, Adi & Rekan untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan Bina Lingkungan PT Barata Indonesia (Persero) untuk tahun buku 2018.

audit service offerings on Public Accountant Firm, several aspects to be evaluated are administrative, technical and bid prices. The final results of the assessment were won by Hadori, Sugiarto Adi & Partners Public Accountant Firm, which was conveyed by the Board of Commissioners to Minister of SOEs as shareholders of PT Barata Indonesia (Persero) by letter No.S-09 / Dekom / BRT / III / 2018 dated March 23, 2018.

- e. Based on GMS minute No. RIS-002 / GMS / IV / 2018 dated April 25, 2018, stipulated that Hadori, Sugiarto, Adi & Partners Public Accountant Firm to conduct a general audit of the Company's Financial Report and PT Barata Indonesia (Persero) Community Development Partnership Program) Financial Report for fiscal year 2018.*

2. PERIODE PEMERIKSAAN AKUNTAN PUBLIK

Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan selama 5 (lima) tahun terakhir :

2. PERIOD OF PUBLIC ACCOUNTANT EXAMINATION

The following is the Public Accountant that conducts Audit of Financial Statements for the past 5 (five) years:

TAHUN BUKU	AKUNTAN	KANTOR AKUNTAN PUBLIK	OPINI AUDIT
2014	Drs. Tjahjo Nurwantoro, CPA.	KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan.	Wajar Tanpa Pengecualian
2015	Drs. Tjahjo Nurwantoro, CPA.	KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan.	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	Drs. Tjahjo Nurwantoro, CPA.	KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan.	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	Drs. Tjahjo Nurwantoro, CPA.	KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan.	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	Gunarto, CPA	KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Wajar Tanpa Pengecualian

Eksternal Auditor (Auditor Independen) yang ditunjuk telah menyatakan independensinya terhadap Perseroan dan bertanggung jawab untuk menyampaikan pendapat secara independen atas kesesuaian laporan keuangan yang diaudit berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

The appointed External Auditor (Independent Auditor) has declared its independence towards the Company and is responsible for expressing opinions independently of the conformity of audited financial statements based on generally accepted accounting principles in Indonesia.

Besarnya fee audit untuk tahun buku 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah termasuk PPN 10%, sedangkan besarnya fee audit untuk tahun buku 2018 sebesar Rp 270.215.000,- (tidak termasuk PPN 10% dan sudah termasuk PPh 2%).

The amount of the audit fee for the 2017 financial year is IDR 100,000,000 (one hundred million rupiah) including 10% VAT, while the amount of the audit fee for the 2018 financial year is IDR. 270,215,000, - (excluding 10% VAT and includes 2% income tax).

KEBIJAKAN PEDOMAN PERILAKU

Untuk terciptanya image Perusahaan yang baik dan bersih ditentukan oleh perilaku bisnis Perusahaan dalam berinteraksi atau berhubungan dengan sesama para *stakeholder*, pembentukan citra yang baik terkait erat dengan perilaku Perusahaan dalam berinteraksi atau berhubungan dengan para *stakeholder*. Perilaku perusahaan secara tercermin pada perilaku bisnisnya. Dalam mengatur perilaku inilah, Perusahaan perlu menyatakan secara tertulis nilai – nilai etika yang menjadi kebijakan dan standar perilaku yang diharapkan atau bahkan diwajibkan bagi setiap pelaku bisnisnya. Pernyataan dan pengkomunikasian nilai – nilai tersebut dituangkan dalam *Code Of Conduct*. Pada tahun 2017 Barata Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap pedoman perilaku (*Code of Conduct*) melalui Surat Keputusan bersama Direksi No. SKB 17 001 tanggal 4 Januari 2017 tentang pedoman perilaku (*Code of Conduct*).

Code Of Conduct disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi :

- a. Pemegang Saham
- b. Dewan Komisaris
- c. Direksi
- d. Karyawan Pimpinan
- e. Karyawan Pelaksana
- f. Mitra Bisnis dan pihak yang berkepentingan dengan perusahaan

Code Of Conduct merupakan pedoman bagi seluruh pelaku bisnis di PT Barata Indonesia (Persero) dalam bersikap dan berperilaku untuk melaksanakan tugas sehari – hari serta dalam berinteraksi dengan rekan sekerja, mitra usaha dan pihak – pihak lainnya yang berkepentingan. PT Barata Indonesia (Persero) dalam hal ini telah menyampaikan dan mensosialisasikan buku pedoman perilaku kepada seluruh Karyawan. Bagi pihak luar yang berkepentingan dengan Perusahaan dapat mengakses melalui website Perusahaan yaitu www.barata.com

Manakala manajemen menerima informasi yang berisi tentang adanya indikasi penyimpangan terkait *Standar Operating Procedure* Perusahaan, baik yang berasal dari pihak internal maupun pihak luar, manajemen bersikap terbuka dan menindaklanjuti dengan prinsip kehati-hatian. Seluruh informasi tersebut akan diteliti kebenarannya oleh bagian Satuan Pengawasan Internal (SPI) melalui langkah – langkah sebagai berikut:

Code Of Conduct Policy

A good and clean company image is determined by the Company's business behavior in interacting or dealing with fellow stakeholders, the formation of a good image is closely related to the Company's behavior in interacting or relating to stakeholders. Company behavior is reflected in its business behavior. In regulating this behavior, the Company needs to declare in writing ethical values that are policies and standards of behavior that are expected or even required for each business person. The statement and communication of these values is stated in the Code of Conduct. In 2017 Barata Indonesia made improvements to the Code of Conduct through a Decree with the Directors No. SKB 17 001 dated January 4, 2017 concerning Code of Conduct.

The Code of Conduct is structured to be a reference for behavior for:

- a. Stockholders*
- b. Board of Commissioners*
- c. Board of Directors*
- d. Leadership Employees*
- e. Executing Employees*
- f. Business Partners and parties with an interest in the company*

The Code Of Conduct is a guideline for all stakeholders at PT Barata Indonesia (Persero) in having good attitude and behaving to carry out daily tasks and in interacting with fellow workers, business partners and other interested parties. PT Barata Indonesia (Persero) in this case has delivered and socialized the behavioral guidebook to all employees. External parties with an interest in the Company can access through the Company's website, www.barata.com

When management receives information that contains indications of misconduct related to the Company's Standard Operating Procedures, both from internal and external parties, management is open and follows up with the principle of prudence. All information will be examined by the Internal Audit Unit (SPI) through the following steps:

- a. Melakukan identifikasi informasi untuk membedakan fakta & opini.
- b. Melakukan konfirmasi kepada bagian fungsional terkait.
- c. Melakukan penelitian baik secara administrasi maupun fisik.
- d. Menindaklanjuti temuan secara berjenjang sesuai peraturan Perusahaan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

PELANGGARAN TERHADAP PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

Dalam upaya penegakan terhadap pedoman perilaku, Perseroan telah membuat mekanisme Pelaporan sebagai berikut :

1. Terkait dengan tindakan Korupsi Kolusi & Nepotisme, mengacu pada SK No. 13 345a Mengenai Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System/WBS*).
 - Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku
 - Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain diluar perusahaan
 - Pemerasan
 - Perbuatan curang
 - Benturan kepentingan
 - Gratifikasi
2. Terkait Gratifikasi mengacu pada SK No. 13 344 a SOP Mengenai Pedoman Pengendalian Gratifikasi terdapat Bab didalamnya yang secara rinci mengatur sebagai Berikut:
 - Penerima/ Pemberi Gratifikasi Yang Dianggap Suap
 - Batasan Pemberian Gratifikasi
 - Gratifikasi (Yang Tidak Diperbolehkan) Dalam Kedinasan
 - Gratifikasi Yang Tidak Perlu Dilaporkan
 - Yang Perlu Dilakukan Apabila Menerima Gratifikasi
 - Mekanisme Pelaporan
 - Pemantauan Atas Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi
 - Sanksi Atas Penyimpangan Ketentuan Gratifikasi
3. Terkait dengan pelanggaran disiplin mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bab XIII Tata Tertib Kerja Perusahaan:
 - Pasal 68 – Kewajiban Perusahaan
 - Pasal 69 – Kewajiban Pimpinan
 - Pasal 70 – Kewajiban Karyawan
 - Pasal 71 – Larangan Karyawan
 - Pasal 72 – Hukuman Disiplin
 - Pasal 73 – Peringatan Lisan Tercatat
 - Pasal 74 – Peringatan Tertulis
 - Pasal 75 – Demosi

a. Identify information to distinguish facts & opinions.

b. Confirming the relevant functional section.

c. Conduct research both administratively and physically.

d. Follow up on findings in stages according to Company regulations and applicable laws and regulations.

Code Of Conduct Violation

As an effort to enforce the code of conduct, the Company has made the Reporting mechanism as follows:

1. *Related to Corruption, Collusion & Nepotism, referring to Decree No. 13 345a Regarding Whistleblowing System (WBS).*
 - *applicable rules and regulations misconduct*
 - *Abuse of job position for other purposes outside the company*
 - *blackmail*
 - *Cheating actions*
 - *Conflict of interest*
 - *Gratification*
2. *Related to Gratification refers to Decree No. 13 344 a SOP Regarding the Guidelines for Gratification Control, there is a Chapter in it which sets out in detail as follows:*
 - *Gratification Recipients / Providers which is considered Bribery*
 - *Limitation of Gratification*
 - *Prohibited Gratification in official term*
 - *Undeclare Gratifications*
 - *What To Do When Receiving Gratification*
 - *Reporting mechanism*
 - *Monitoring of the Implementation of Gratification Control*
 - *Sanctions for Misconduct of Gratification Provisions*
3. *Related to disciplinary violations referring to the Collective Labor Agreement (PKB) Chapter XIII Company Work Rules:*
 - *Article 68 - Company Obligations*
 - *Article 69 - Obligations of the Chairperson*
 - *Article 70 - Obligations of Employees*
 - *Article 71 - Prohibition of Employees*
 - *Article 72 - Disciplinary Punishment*
 - *Article 73 - Recorded Oral Warning*
 - *Article 74 - Written Warning*
 - *Article 75 - Demotion*

- Pasal 76 – Pembebasan Jabatan
- Pasal 77 – Pemberhentian Sementara (Skorsing)
- Pasal 78 – Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
- Pasal 79 – Pemberitahuan Pengenaan Hukuman Disiplin
- Pasal 80 - Penggabungan, Pengulangan Pelanggaran Disiplin
- Pasal 81 – Hukuman Disiplin Terhadap Calon Karyawan Tetap
- Pasal 82 – Tindakan Sela
- Pasal 83 – Ketentuan Lain

PERLINDUNGAN TERHADAP MENGACU PADA SK NO. 13 345A BAB IX TENTANG KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PELAPOR

Dewan Komisaris atau Direksi atau Pimpinan Unit Kerja atau bagian yang menerima laporan pelanggaran tersebut wajib melindungi kerahasiaan si pelapor untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan terjadi kepada si pelapor.

SANKSI ATAS PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

Kepada pelaku bisnis yang terbukti melakukan pelanggaran dalam tingkatan apapun, maka akan diberikan sanksi disiplin atau sanksi lainnya sesuai peraturan perundang – undangan dan ketentuan perusahaan. Terbukti atau tidaknya suatu pelanggaran terhadap pedoman perilaku (*code of conduct*) harus ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Pengenaan sanksi dilakukan secara tertulis oleh :

1. RUPS/Pemegang Saham apabila pelanggaran dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Menteri BUMN.
2. RUPS/Pemegang Saham apabila pelanggaran dilakukan oleh Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
3. Direktur apabila pelanggaran dilakukan oleh Karyawan Pimpinan dan Pelaksana .

Untuk membangun paradigma bisnis yang terintegrasi dengan visi dan misi Perusahaan yang telah ditetapkan dalam RJP Perusahaan tahun 2017 – 2021, Perseroan telah menetapkan tata nilai perusahaan yang harus diikuti oleh setiap insan Perseroan.

- Article 76 - Exemption from position
- Article 77 - Suspension (Suspension)
- Article 78 - dismissal unrespectedfully
- Article 79 - Notification of Imposing Disciplinary Penalties
- Article 80 - Merger, Repetition and violation of Discipline
- Article 81 - Disciplinary Penalty Against Prospective Permanent Employees
- Article 82 - Intermediate action
- Article 83 - Other Provisions

Protection On Reference Of Sk No. 13 345A Chapter Ix Concerning Witness Protection Policy

The Board of Commissioners or the Board of Directors or the Head of the Work Unit or the part that receives the report of the violation must protect the confidentiality of the witness to safeguard unwanted things from happening to the witness

Sanctions On Violation Of Code Of Conduct

To business practitioner who are proven to have committed violations at any level, they will be given disciplinary sanctions or other sanctions according to the laws and regulations and company provisions. Proven or not a violation of the code of conduct must be determined based on the results of the examination. Imposition of sanctions is carried out in writing by:

1. *GMS / Stockholders if violations are committed by the Board of Commissioners with a copy to the Minister of SOE.*
2. *GMS / Stockholders if violations are committed by the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners.*
3. *Director if the violation is carried out by Employees of Leaders and Executors.*

To build a business paradigm that is integrated with the Company's vision and mission as stipulated in the Company's RJP 2017 - 2021, the Company has established a corporate value system that must be followed by every member of the Company.

BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST)

Untuk mendukung dalam penerapan *good corporate governance* (GCG) serta sebagai upaya untuk meminimalkan terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*), setiap anggota Direksi maupun Dewan Komisaris wajib membuat Daftar Khusus yang memuat informasi mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya di PT Barata Indonesia (Persero) maupun di perusahaan lain dan wajib menandatangani Pakta Integritas terkait Jabatan. Daftar tersebut disimpan dan diadministrasikan oleh Sekretariat Perusahaan. Dalam kurun waktu tahun 2018 di PT Barata Indonesia tidak ada kejadian atau transaksi material yg melanggar peraturan benturan kepentingan

Conflict Of Interest

To support the implementation of good corporate governance (GCG) and as an effort to minimize conflicts of interest, each of the Board of Directors and Commissioners members shall prepare a List Specifically for information on share ownership and / or his family in PT Barata Indonesia (Persero) and other companies and shall sign an Integrity Pact related to its Position. The list is kept and administered by Corporate Secretary. During 2018 at PT Barata Indonesia there were no material events or transactions that violated the conflict of interest regulations

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

- SALURAN PENGADUAN LAPORAN PELANGGARAN**
Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System (WBS)) merupakan suatu sistem yang memberikan sarana kepada para pemangku kepentingan untuk membuat pengaduan mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi di Perseroan. Tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang tidak semestinya atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh insan Perusahaan atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini dilakukan secara rahasia (*confidential*).

Untuk mendukung atas sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG), maka telah dibuat dan disahkannya *System Operating Procedure* (SOP) melalui SK Direksi No.K 13 345a tanggal 25 November 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Pedoman tersebut dapat di akses secara publik pada website Barata yaitu www.barata.com

Whistleblowing System

- Channels for Whistleblowing**
The Whistleblowing System (WBS) is a system that provides a means for stakeholders to make complaints about alleged violations that occur in the Company. Acts of violation or acts that are against the law, improper conduct or other actions that can harm the Company or stakeholders, carried out by Company personnel or other institutions that can take action on these violations. This disclosure is done confidentially.

To support the internal control system in preventing practices of misconduct and fraud and strengthen the application of Good Corporate Governance (GCG) practices, the System Operating Procedure (SOP) has been made and passed through the Directors Decree No. K 13 345a dated November 25, 2013 signed by the Director Main. These guidelines can be accessed publicly on the Barata website, www.barata.com

2. MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

Mekanisme penyaluran pengaduan atas pelanggaran, sebagai berikut :

- Pelapor melaporkan pengaduan pelanggaran kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Satuan Pengawasan Intern (SPI), dengan ketentuan yaitu Pelapor disarankan untuk memberikan informasi mengenai identitas diri, yang sekurang-kurangnya

2. Whistleblowing Mechanism

The mechanism for channeling complaints for violations is as follows:

- The whistleblower reports a complaint of violation to the President Director with a copy to the Internal Audit Unit (SPI), under condition that the whistleblower is advised to provide information on identity, at least contains the name, address, telephone number and handphone /*

memuat nama, alamat, nomor telepon dan handphone/ email dan fotokopi identitas diri.

- b. Pelaporan pelanggaran harus disertai dokumen pendukung seperti: dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau Pelaporan Pelanggaran yang akan disampaikan.
- c. Apabila Pelaporan Pelanggaran diajukan oleh perwakilan pemangku kepentingan, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:
 - a. Fotokopi bukti identitas pemangku kepentingan dan perwakilan pemangku kepentingan,
 - b. Surat Kuasa dari pemangku kepentingan kepada perwakilan pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa *stakeholders* memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama pemangku kepentingan,
 - c. Jika perwakilan pemangku kepentingan adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan Pelaporan Pelanggaran berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum Tersebut.
- d. Pelapor wajib memberikan data pendukung / indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :
 - a. Pelanggaran yang diadukan atau sampaikan;
 - b. Pihak yang terlibat;
 - c. Lokasi pelanggaran;
 - d. Waktu pelanggaran;
 - e. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran;
 - f. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain.
 - g. Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.
- e. Penyampaian Pengaduan oleh Pelapor, prinsip dasar :
 - a. Dalam melakukan pelaporan atas suatu pelanggaran harus dilakukan dengan itikad baik bukan karena kepentingan pribadi atau balas dendam;
 - b. Mengedepankan manfaat untuk kepentingan bersama seluruh insan Perusahaan dan para pemangku kepentingan.
 - c. Pelapor membuat pengaduan dan mengirimkannya kepada pengelola Sistem Pelaporan. Pelanggaran yang dapat disampaikan kepada Direktur Utama atau Kepala SPI (apabila terlapor selain Direksi) melalui sarana/media, seperti *website* (www.barata.com) atau email

e-mail and photocopy of identity .

- b. Whistleblowing must be accompanied by supporting documents such as: documents relating to transactions carried out and / or Violation Reporting to be submitted.*
- c. If the Violation Report is submitted by a stakeholder representative, then other documents above are also submitted, namely:*
 - a. Photocopy of proof of identity of stakeholders and stakeholder representatives,*
 - b. Power of Attorney from stakeholders to stakeholder representatives stating that stakeholders have the authority to act for and on behalf of stakeholders,*
- c. If the stakeholder representative is an institution or legal entity, then it must be accompanied by a document which states that the party submitting the Violation Report is authorized to represent the said institution or legal entity.*
- d. Whistleblower must provide supporting data / initial indications that can be accounted for, including:*
 - a. Violations that are complained or conveyed;*
 - b. Parties involved;*
 - c. Location of violation;*
 - d. Time of violation;*
 - e. How the violation occurred and whether there is supporting evidence of the violation;*
 - f. Have these violations been reported to other parties.*
 - g. Have these violations ever happened before.*
- e. Submission of Complaints by whistleblower basic principles:*
 - a. In reporting on a violation, it must be done in good intention, not based on personal interests or revenge;*
 - b. Prioritizing benefits for the mutual benefit of all employees and stakeholders.*
 - c. The whistleblower reports a complaint and sends it to the reporting system manager. Violations can be submitted to the President Director or SPI Head (if the whistleblowed is other than the Board of Directors) through means / media, such as the website (www.barata.com) or email (wbs@ptbarata).*

(wbs@ptbarata.com)

- d. Atau dapat juga disampaikan melalui amplop tertutup dengan memberi kode "WBS" pada bagian kanan atas amplop tersebut, yang ditujukan kepada Direktur Utama atau Kepala SPI dalam hal terlapor selain Direksi dan bila terlapor SPI ditujukan ke Direktur Utama, dengan alamat :
PT Barata Indonesia (Persero)
Jl. Veteran Nomor 241
Gresik - 61123
- e. Sedangkan apabila yang terlapor Direksi, maka dapat ditujukan kepada Komisaris Utama dengan alamat:
PT Barata Indonesia (Persero)
Menara MTH. Lantai 10 Ruang 1001
Jl. MT Haryono Kav. 23
Jakarta - 12320
- f. Penanggungjawab Tindak Lanjut :
 - a. Direktur Utama, jika terlapor adalah Insan Perusahaan selain Direksi;
 - b. Dewan Komisaris, Jika yang terlapor Direksi;
 - c. Direktur Utama, jika yang terlapor Dewan Komisaris.

3. PROSES TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN

Tindak lanjut atas pengaduan ini dilakukan mulai diterimanya pengaduan tersebut dengan proses sebagai berikut :

- a. Direktur Utama atau Kepala SPI atau Komisaris Utama menerima pengaduan, mencatat dan menuangkan ke dalam format standar. Apabila penerima pengaduan Direktur Utama maka Direktur Utama dapat mendisposisikan proses selanjutnya kepada Kepala SPI. Sedangkan apabila penerima pengaduan Komisaris Utama dalam hal ini terlapor Direksi maka Komisaris Utama dapat menugaskan Komite Audit untuk proses selanjutnya.
- b. Apabila pelaporan yang diterima memenuhi persyaratan sesuai Bab V ayat 3 dan 4 diatas, maka Direktur Utama atau Kepala SPI atau Komisaris Utama melakukan penelaahan awal atau investigasi atas Indikasi Awal selama 14 (empat belas) hari kerja. Bila "TIDAK" proses Sistem Pelaporan Pelanggaran dianggap selesai.
- c. Berdasarkan hasil tersebut, Direktur Utama atau Komisaris Utama memutuskan tindak lanjut:
 - Dihentikan, jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal;

com)

- d. Or it can also be delivered through a sealed envelope by giving the code "WBS" on the right side of the envelope, which is addressed to the President Director or SPI Head in the case of the whistleblowed is other than the Board of Directors and if the whistleblowed is SPI, it can be addressed to the President Director at :
PT Barata Indonesia (Persero)
Jl. Veteran Number 241
Gresik - 61123
- e. Whereas if the whistleblowed is Board of Directors, it can be addressed to the President Commissioner at :
PT Barata Indonesia (Persero)
MTH Tower. 10th Floor Room 1001
Jl. MT Haryono Kav. 23
Jakarta - 12320
- f. Responsible for Respond:
 - a. The President Director, if the whistleblowed is the Company employees other than the Board of Directors;
 - b. The Board of Commissioners, if the whistleblowed the Board of Directors;
 - c. The President Director, if the whistleblowed is the Board of Commissioners.

3. Follow up Process of Complaints

Follow-up on this complaint is carried out from the receipt of the complaint with the following process:

- a. The President Director or Head of the SPI or the President Commissioner receives complaint, make some notes and archive it into a standard format. If the recipient is the President Director, he/she can dispose the next process to the SPI Head. Whereas if the recipient is the President Commissioner in this case of the whistleblowed is the Board of Directors, the President Commissioner can assign the Audit Committee to the next process.
- b. If the report received meets the requirements in accordance with Chapter V paragraphs 3 and 4 above, then the President Director or Head of SPI or the President Commissioner conducts an initial review or investigation of the Initial Indication for 14 (fourteen) working days. If the "NO" , process of the Violation Reporting System is considered finished.
- c. Based on these results, the President Director or President Commissioner decides the following :
 - Terminated, if it does not meet the initial indication requirements;

- Melakukan investigasi lanjutan, jika substansi pengaduan terkait dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan satu tingkat di bawah Direksi atau citra/reputasi Perusahaan dan/atau menimbulkan kerugian yang besar, akan dilakukan oleh Internal investigator dan bila perlu dapat melibatkan Eksternal Investigator.
- d. Laporan Hasil Investigasi Internal maupun External diselesaikan dalam waktu selambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan untuk melakukan investigasi diterima dari/oleh Tim Investigasi dan kemudian dilaporkan oleh Tim Investigasi kepada Direktur Utama atau Komisaris Utama.
- e. Berdasarkan hasil laporan sebagaimana diatas, Direktur Utama atau Komisaris Utama Memutuskan:
 - Laporan pengungkapan ditutup, jika tidak terbukti
 - Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika terbukti dan terkait dengan tindakan Administratif.
 - Laporan hasil investigasi dapat diselesaikan melalui mekanisme internal dan/atau eksternal, yaitu meneruskan kepada penyidik untuk proses lebih lanjut, jika terbukti dan terkait dengan tindak pidana umum atau korupsi. Dalam hal ini Penanggung Jawab melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Legal guna memastikan adanya bukti permulaan yang cukup dan jika bukti-bukti cukup maka Penanggung Jawab merekomendasikan kepada Direktur Utama untuk persetujuan.
 - Poin 2 dan 3, dilakukan melalui rapat Direksi dan Dewan Komisaris
- f. Satuan Pengawas Intern (SPI) membuat laporan secara periodik kepada Direktur Utama, minimal 6 (enam) bulan sekali, antara lain meliputi jumlah pengaduan dan tindak lanjut penyelesaian.
- g. Komite Audit membuat laporan secara periodik kepada Komisaris Utama, minimal 6 (enam) bulan sekali, antara lain meliputi jumlah pengaduan dan tindak lanjut penyelesaian.

4. INVESTIGASI

- a. Prinsip dasar Investigasi
 - 1. Proses investigasi atas suatu laporan harus dilakukan dengan tetap memegang asas praduga tidak bersalah dan objektivitas;
 - 2. Proses investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari siapa yang melaporkan ataupun siapa yang terlapor;
 - 3. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemui, termasuk pembelaan bila diperlukan;

- *Further investigations, if the substance of the complaint is related to the Board of Directors, Board of Commissioners and Employees one level below the Board of Directors or the Company's image / reputation and / or causing a large loss, it will be carried out by internal investigators and if necessary can involve External Investigators.*

- d. *Internal and External Investigation Reports are completed within no later than 90 (ninety) working days from the decision to conduct an investigation received from / by the Investigation Team and then reported by the Investigation Team to the President Director or President Commissioner.*
- e. *Based on the results of the report as above, the President Director or President Commissioner Decides:*
 - *Disclosure reports are closed, if not proven*
 - *Give sanctions in accordance with applicable regulations, if proven and related to Administrative actions.*
 - *Reports on the results of investigations can be completed through internal and / or external mechanisms, namely forwarding to investigators for further processing, if proven and related to general criminal acts or corruption. In this case the Responsible Person coordinates with the Legal Work Unit to ensure sufficient initial evidence and if the evidence is sufficient, the Responsible Person recommends to the President Director for approval.*
- *Points 2 and 3, conducted through the Board of Directors and Board of Commissioners meetings*
- f. *IAU reports periodically to the President Director, at least 6 (six) months, including the number of complaints and follow-up solutions.*
- g. *The Audit Committee periodically reports to the President Commissioner, at least 6 (six) months, including the number of complaints and follow-up solutions.*

4. Investigation

- a. *Basic Principles of Investigation*
 - 1. *The process of investigating a report must be carried out while maintaining the prejudice of innocence and objectivity;*
 - 2. *The investigation process must be free from bias and carried out regardless who are the whistleblower and whistleblown ;*
 - 3. *The whistleblown must be given a full opportunity to provide an explanation of the evidence found, including defense if necessary;*

4. Apabila terlapor adalah Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan satu tingkat di bawah Direksi, maka dapat menggunakan Tim Investigasi dari pihak eksternal;
 5. Diluar kriteria tersebut, maka Investigasi dilakukan oleh Tim Investigasi Internal.
- b. Tim Investigasi**
1. Investigasi dapat dilakukan baik oleh External Investigator maupun oleh Tim Investigasi Internal. Tim Investigasi Internal berasal dari SPI.
 2. Tim investigasi harus bersifat independen, bebas dari tekanan pihak manapun untuk menjaga proses investigasi dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan penilaian hasil temuan secara obyektif.
- c. Laporan Hasil Investigasi**
1. Seluruh proses Investigasi atas Pengaduan wajib dibuatkan Berita Acara dalam bentuk laporan serta ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses investigasi.
 2. Proses investigasi harus didokumentasikan dengan baik, sehingga jika diperlukan untuk peninjauan ulang dapat dengan mudah dilakukan penelaahan kembali atas sasaran yang ingin dicapai dan juga keputusan-keputusan penting yang diambil selama proses berlangsung.
 3. Laporan hasil investigasi disertai beberapa bukti pendukung yang merupakan bukti fisik serta bukti non fisik. Hasil laporan investigasi tidak berupa opini atau pendapat tapi berupa kesimpulan akhir mengenai hasil investigasi yang akan digunakan sebagai dasar putusan pengambilan tindakan.
- 5. PERLINDUNGAN PELAPOR**
- Perusahaan wajib memberikan perlindungan bagi Pelapor dan menjamin atas kerahasiaan identitasnya. Informasi terkait Pelapor terdokumentasikan dengan baik dan hanya boleh diketahui oleh Direktur Utama atau Kepala SPI dan Komisaris Utama atau Komite Audit, dalam hal ini penerima pengaduan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindak lanjut pelaporan pelanggaran.
- 6. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PELAPOR**
- Kebijakan perlindungan Pelapor dimaksudkan pula untuk mendorong setiap Insan Perusahaan dan Pelapor lainnya untuk berani melaporkan pelanggaran dan menjamin keamanan Pelapor maupun Keluarganya.
- 4. If the whistleblowers are the Board of Directors, Board of Commissioners and Employees one level below the Board of Directors, then it can be done through the Investigation Team from an external party;**
- 5. Apart from these criteria, the investigation is carried out by the Internal Investigation Team.**
- b) Investigation Team**
- 1. Investigation can be carried out both by External Investigator and by the Internal Investigation Team. The internal investigation team came from the IAU.**
 - 2. The investigation team must be independent, free from the pressure of any party to guarantee the investigation process is based on the principle of justice and objective assessment of findings.**
- c) Investigation Report**
- 1. The entire investigation process on Complaints must be documented in the form of a report and signed by the parties involved in the investigation process.**
 - 2. The investigation process must be well documented, so that if necessary for review it can be easily carried out a review of the objectives to be achieved and also important decisions taken during the process.**
 - 3. Report on the results of the investigation is accompanied by some supporting both physical evidence and non-physical evidence. The results of the investigation report are not in the form of opinions but in the form of final conclusions regarding the results of the investigation that will be used as the basis for the decision to take action.**
- 5. Whistleblower Protection**
- The company must provide a whistleblower protection and guarantee the identity confidentiality. Information related to the whistleblower is well documented and may only be known by the President Director or Head of the SPI and the President Commissioner or Audit Committee, in which case are the recipient of the complaint as the party responsible for the follow-up to the reporting of violations.*
- 6. Whistleblower Protection Policy**
- The Whistleblower Protection Policy is also intended to encourage each member of the Company and other whistleblower to dare to report violations and guarantee the safety of the whistleblower and their Family.*

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi Pelapor yang beritikad baik dan Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem penyelenggaraan perlindungan Pelapor”.

Perusahaan memberikan perlindungan kepada Pelapor sebagai berikut:

- Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.
- Pemecatan yang tidak adil.
- Penurunan jabatan atau pangkat atau konduite.
- Pelecehan dan/atau diskriminasi dan/atau tekanan dan/atau intimidasi dalam segala bentuknya atau tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun;
- Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan tersebut.

Selain perlindungan di atas, untuk Pelapor yang beritikad baik, Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur Undang Undang No.15 tahun 2002 jo Undang Undang No.25 tahun 2003 pada Pasal 43 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 13 Undang Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2003 tentang Tata Cara Periindungan Khusus bagi Petapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu :

- a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
- b. Perlindungan atas keamanan pribadi, daniatau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
- c. Perlindungan terhadap harta Pelapor; dan/atau
- d. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan”.

Dalam hal Pelapor merasa perlu, ia juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai Undang Undang No.13 tahun 2006.

7. PENGHARGAAN DAN SANKSI

- a. Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan;
- b. Perusahaan juga memberikan sanksi bagi Pelapor yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan ini, misalnya fitnah atau pelaporan palsu;
- c. Penghargaan diberikan kepada Pelapor apabila kasus yang dilaporkan mengandung kebenaran dan Perusahaan mendapat dampak positif dari adanya

The company is committed to protecting the whistleblower with good intentions and the Company will comply with all relevant laws and regulations and best practices that apply in the implementation of the whistleblower protection system. “

The company provides protection to the whistleblower as follows:

- *Whistleblower identity is guaranteed confidential by the Company.*
- *Unfair dismissal.*
- *Decline in position or rank or condition.*
- *Harassment and / or discrimination and / or pressure and / or intimidation in all its forms or unpleasant actions from any party;*
- *Protection of the whistleblower also applies to parties who carry out investigations as well as those who provide information related to the Complaint.*

In addition to the above protection, for the whistleblower with good intentions, the Company will also provide legal protection, in line with what is stipulated in Law No. 15 of 2002 in conjunction with Law No. 25 of 2003 in Article 43 concerning Money Laundering and Article 13 of the Law. No.13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, and Article 5 of Government Regulation No.57 of 2003 concerning Special Protection Procedures for whistleblower and Witnesses in Money Laundering Crimes namely:

- a. Protection from criminal charges and / or civil law;*
- b. Protection of personal security, and / or the family of the whistleblower from physical and / or mental threats;*
- c. Protection of the whistleblower's assets; and / or*
- d. Information handover without face to face appointment with the whistleblowed, at each level of case investigation in the event that the violation falls into the court dispute*

When whistleblower feels the need, he/she can also request assistance from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), in accordance with Law No. 13 of 2006.

7. Appreciation and Sanctions

- a. The form of sanctions for the whistleblowed that has been proven to have committed a violation is determined in accordance with the applicable rules and regulations in the Company;*
- b. The company also imposes sanctions on whistleblower who are not in accordance with the aims and objectives of this policy, such as defamation or false reporting;*
- c. Appreciation are given to the whistleblower whose case contains the truth and the Company benefits a positive*

laporan tersebut. Jenis dan besarnya penghargaan akan ditetapkan lebih lanjut dan akan diberikan pada saat pemberian penghargaan dan merupakan dokumen tidak terpisahkan dari kebijakan WBS ini.

Selama tahun 2018 tidak terdapat laporan (bersifat NIHIL) terkait pelanggaran sistem yang berarti, sehingga dengan demikian tidak terdapat sanksi yang diberikan.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI (Commitment Of Gratification Control)

Sebagai bentuk komitmen PT Barata Indonesia (Persero) dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta sebagai suatu bentuk penanganan terhadap praktik gratifikasi, maka PT Barata Indonesia (Persero) membuat sistem pengendalian intern dengan telah disetujuinya SK Direksi Nomor K 13 344a tertanggal 21 Nopember 2013 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

SOP atau pedoman ini diberlakukan bagi seluruh insan Perusahaan dan para pemangku kepentingan Perusahaan (*stakeholders*) lainnya.

Gratifikasi adalah suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Selama tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran (bersifat NIHIL) terkait gratifikasi, sehingga dengan demikian tidak terdapat sanksi yang diberikan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN

- Sebagai acuan bagi insan Perusahaan untuk memahami, mengetahui serta menyikapi apabila berhadapan dengan gratifikasi;
- SOP ini sebagai salah satu bentuk untuk mengendalikan praktik gratifikasi sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan dapat berjalan dengan baik.

2. LANDASAN HUKUM

- Undang undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

impact of it. The type and amount of the appreciation will be further determined and will be given at the time of awarding and is a document inseparable from this WBS policy.

In 2018 there were no reports (nihil) related to significant system violations, so that there were no sanctions given.

Commitment Of Gratification Control

As a form of PT Barata Indonesia (Persero) 's commitment in implementing good corporate governance and as a form of handling gratification practices, PT Barata Indonesia (Persero) established an internal control system with the approval of the Board of Directors Decree Number K 13 344a dated November 21, 2013 concerning Guidelines for Gratification Control.

This SOP or guideline applies to all member of the Company and other stakeholders.

Gratification is a gift in a broad sense, which includes the provision of money, goods, discounts, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, travel, free medical treatment, and other facilities. The gratification is either done using electronic means or without electronic means.

In 2018 there were no violations (NIHIL) related to gratifications, so that there were no sanctions given.

1. Purpose and Objectives

- As a reference for Company personnel to understand, know and respond when dealing with gratification;*
- This SOP is one form of controlling the practice of gratification so that the principles of openness and accountability in running the Company's operations can run be smooth.*

2. Legal Basis

- Indonesian Republic Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime, Article 12B and Article*

Korupsi, Pasal 12B dan Pasal 12C.

- b. Sesuai dengan Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 12 C ayat (2) juncto Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa penerima gratifikasi wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- c. Konsekuensi Hukum dari tidak melaporkan gratifikasi yang diterima, yaitu Sanksi pidana yang ditetapkan pada tindak pidana ini cukup berat, yaitu pidana minimum 4 (empat) tahun, dan maksimum 20 (dua puluh) tahun atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp 200,000,000.00 (dua ratus juta rupiah), maksimum Rp1,000,000,000.00 (satu milyar rupiah).

3. BATASAN PEMBERIAN GRATIFIKASI

Insan Perusahaan dapat memberikan hadiah, cinderamata, jamuan, hiburan kepada pihak lain dengan syarat :

- a. Untuk menunjang kepentingan perusahaan dalam rangka interaksi sosial dan membina hubungan yang baik antar perusahaan dan mitra bisnis secara sehat dan wajar serta dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan dengan batas-batas wajar ditempat yang terhormat yang tidak menimbulkan citra negatif terhadap perusahaan dan tanpa menimbulkan benturan kepentingan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atau yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan.
- b. Tidak dilakukan untuk menyuap
- c. Telah di anggarkan oleh perusahaan.
- d. Hadiah dan cinderamata yang diberikan tidak dalam bentuk uang dan/atau setara uang (termasuk tapi tidak terbatas pada *voucher*, cek, dan giro) kecuali dalam rangka pemberian dana sponsorship yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
- e. Untuk hadiah cinderamata harus mencantumkan logo nama Perusahaan.

Pengeluaran untuk pemberian hadiah, cinderamata, jamuan bisnis dan hiburan, hanya dapat dilakukan setelah mendapat otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang.

4. GRATIFIKASI (YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN) DALAM KEDINASAN

Gratifikasi (yang tidak diperbolehkan)dalam kedinasan adalah pemberian gratifikasi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada insan Perusahaan dalam

12C.

- b. *In accordance with Law Number 31 Year 1999 Article 12 C paragraph (2) in conjunction with Law Number 20 Year 2001 that the recipient of gratification must be reported to the Corruption Eradication Commission (KPK) no later than 30 working days from the date the gratification is received.*
- c. *Legal consequences of not reporting gratification received, namely the criminal sanctions stipulated in this crime are quite severe, namely a minimum of 4 (four) years, and a maximum of 20 (twenty) years or imprisonment for life, and criminal penalties of at most a little Rp 200,000,000.00 (two hundred million rupiah), a maximum of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah).*

3. Limitation of Gratification

Company employees can provide gifts, souvenirs, entertainment, entertainment to other parties with the following conditions:

- a. *To support the interests of the company in the context of social interaction and fostering good relations between companies and business partners in a healthy, reasonable and accountable manner, carried out with reasonable limits in a respectable place that does not create a negative image of the company and without causing conflicts of interest contrary to obligations or duties or that can influence decision making and affect the business activities of the company.*
- b. *Not for bribery*
- c. *budgeted already*
- d. *Gifts and souvenirs are not in the form of money and / or money equivalent (including but not limited to vouchers, checks, and demand deposits) except in the context of providing sponsorship funds equipped with other supporting documents;*
- e. *For souvenir gifts, the Company logo must be printed*

Expenditures for gifts, souvenirs, business and entertainment entertainment can only be done after obtaining authorization from authorized company officials.

4. Gratification (which is not allowed) within official frame

Gratification (which is not permitted) within official frame is the gratification from the organizers of activities to Company employees in a particular activity, or as an

suatu kegiatan tertentu, atau sebagai penghargaan atas keikutsertaan dan/atau kontribusi dalam suatu kegiatan.

Pemberian gratifikasi dalam kedinasan yang tidak termasuk dalam kategori gratifikasi yang dianggap suap dapat diterima. Setiap gratifikasi dalam kedinasan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Satuan Pengawasan Intern (SPI).

5. MEKANISME PELAPORAN

Perlu menjadi perhatian dan dilakukan apabila menerima gratifikasi, yaitu :

- Insan Barata perlu membaca pedoman pengendalian gratifikasi, karena pada pedoman tersebut berisi tentang mana saja yang tergolong gratifikasi dan mana yang bukan gratifikasi, serta gratifikasi mana yang perlu dilaporkan dan tidak dilaporkan;
- Apabila Insan Perusahaan dan keluarga intinya menerima gratifikasi, maka langkah yang harus diperhatikan adalah mengidentifikasi apakah motif pemberian itu adalah gratifikasi, dan bila termasuk gratifikasi agar menolak secara baik, sehingga sedapat mungkin tidak menyinggung perasaan pemberi.
- Apabila Insan Perusahaan terpaksa harus menerima gratifikasi tersebut, misalnya pemberian terlanjur dilakukan melalui orang terdekat atau ada perasaan tidak enak karena dapat menyinggung pemberi, maka sebaiknya gratifikasi yang diterima segera dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Tata cara pelaporan penerimaan gratifikasi diatur dalam Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi, yang mana laporan harus disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- KPK akan memproses laporan gratifikasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi.
- Selain membuat laporan ke KPK sebagaimana ketentuan diatas, Insan Perusahaan berkewajiban untuk membuat laporan tertulis atas penerimaan, pemberian dan penolakan yang disampaikan ke KPK kepada Satuan Pengawasan Intern (SPI).

6. PEMANTAUAN ATAS PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

appreciation for participation and / or contribution in an activity.

Granting gratification within official frame which is not included in the category of bribery gratification, is acceptable. Every gratification within official frame must be reported written to the IAU.

5. Reporting Mechanism

What needs to be taken care of and done when receiving gratifications are :

- The Company personnel need to read the gratification control guidelines, because it contains information on what are/are not classified as gratifications and which are not gratuities, and which gratification need to be reported and not reported;*
- If the Company personnel and their family members receive gratifications, then the first step is to identify whether its motive is gratification, and if it is considered as gratification , it has to be rejected politely to avoid hard feeling*
- Under condition the company personnel is forced to accept the gratification, for example when it is already done through the closest person or to avoid the offensiveness, then the gratification received should be reported immediately to the Corruption Eradication Commission (KPK).*
- The reporting procedure for receiving gratifications is regulated in Article 16 letter a of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Crime Commission, in which the report must be submitted in writing by filling in the form as determined by the Corruption Eradication Commission by attaching documents relating to gratification*
- The KPK will process the report on gratification in accordance with the provisions stipulated in article 17 of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Crime Commission.*
- In addition to making reports to KPK as stated above, the Company is obliged to make a written report on the receipt, giving and rejection submitted to the KPK to the IAU).*

6. Monitoring of the Implementation of Gratification Control

Perusahaan melakukan sosialisasi atas pedoman ini kepada insan Perusahaan, pemantauan atas pelaksanaan ketentuan pengendalian gratifikasi dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern.

Satuan Pengawasan Intern (SPI) ditugaskan memonitor dan membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Utama mengenai implementasinya dan laporan yang diterima terkait dengan gratifikasi.

7. SANKSI ATAS PENYIMPANGAN KETENTUAN GRATIFIKASI

Pelanggaran atas SOP ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan berpotensi dikenakan pasal tindak pidana suap sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

The company socialized this guideline to Company personnel, monitored the implementation of gratification control provisions carried out by the IAU

The IAU is tasked with monitoring and making regular reports every 6 (six) months to the President Director regarding their implementation and reports received related to gratifications

7. Sanctions for Violation in Gratification Provisions

Violations of this SOP will be subject to sanctions in accordance with applicable regulations in the Company and potentially subject to bribery in accordance with the applicable laws and regulations

MANAJEMEN RISIKO *Risk Management*

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara makro dan mikro yang terus meningkat, berpengaruh secara langsung pada PT Barata Indonesia untuk berkembang agar bisa berperan di persaingan bisnis khususnya dibidang manufaktur, Foundry dan EPC. Dalam persaingan tersebut, PT Barata Indonesia dihadapkan kondisi yang penuh ketidak pastian atau risiko – risiko bisnis, sehingga untuk menangani hal tersebut PT Barata Indonesia menerapkan Manajemen Risiko.

Tujuan penerapan Manajemen Risiko adalah:

1. Melindungi dan Menambah Nilai Perusahaan dengan menganalisa risiko – risiko yang akan timbul dan melakukan mitigasi (mengendalikan dan menekan) terhadap risiko yang akan timbul.
2. Membantu Pengambil Keputusan dalam mengambil keputusan yang terbaik.
3. Menangani Ketidakpastian, karena bisnis selalu diiringi dengan berbagai macam ketidak pastian. Sehingga, dengan diterapkannya Manajemen Risiko akan membuat ketidakpastian tersebut menjadi kepastian meskipun bukan kepastian yang mutlak.

Dalam menerapkan Manajemen Risiko, PT Barata Indonesia membentuk bagian Manajemen Risiko. Dimana, bagian tersebut merupakan Satuan Organisasi yang berperan dalam pelaksanaan Manajemen Risiko baik secara korporat maupun di setiap unit kerja.

Indonesia's economic growth in macro and micro which continued to increase, affected PT Barata Indonesia directly to develop in order to play a bigger role in business competition, especially in manufacturing, foundry and EPC. In such competition, PT Barata Indonesia is faced with uncertain conditions or business risks, thus to handle this PT Barata Indonesia implements Risk Management.

The objectives of implementing Risk Management are:

1. *Protect and Add Company Value by analyzing the risks that may arise and mitigate (control and suppress) the risks that may arise.*
2. *Helping Decision Makers in making the best decisions.*
3. *Handling Uncertainty, because business is always accompanied by various kinds of uncertainties. Thus, with the implementation of Risk Management, this will make uncertainty a certainty, although not absolute certainty.*

In implementing Risk Management, PT Barata Indonesia establish Risk Management unit. Where, this section is an Organizational Unit that plays a role in the implementation of Risk Management both corporate and in each work unit.

Manajemen risiko merupakan bagian dari Biro Manajemen, Risiko & Teknologi Informasi, dimana ditetapkan melalui SK Direksi No K 18 074 (R1) dan Struktur Organisasi Manajemen Risiko seperti bagan dibawah ini:

The establishment of Risk Management section is determined by the Directors Decree No. K 18 074 (R1) and Risk Management Organization Structure as below:



Manajer Biro Sistem Manajemen

Risiko & Teknologi Informasi

Sistem Manajemen

Manajemen Risiko

Teknologi Informasi

: Djarno Adrijanto

: Dedi Wiweko Adi

: Agus Hartono

: Supriyono

Risk Management & Information Technology

Systems Bureau Manager

Management System

Risk Management

Information Technology

: Djarno Adrijanto

: Dedi Wiweko Adi

: Agus Hartono

: Supriyono

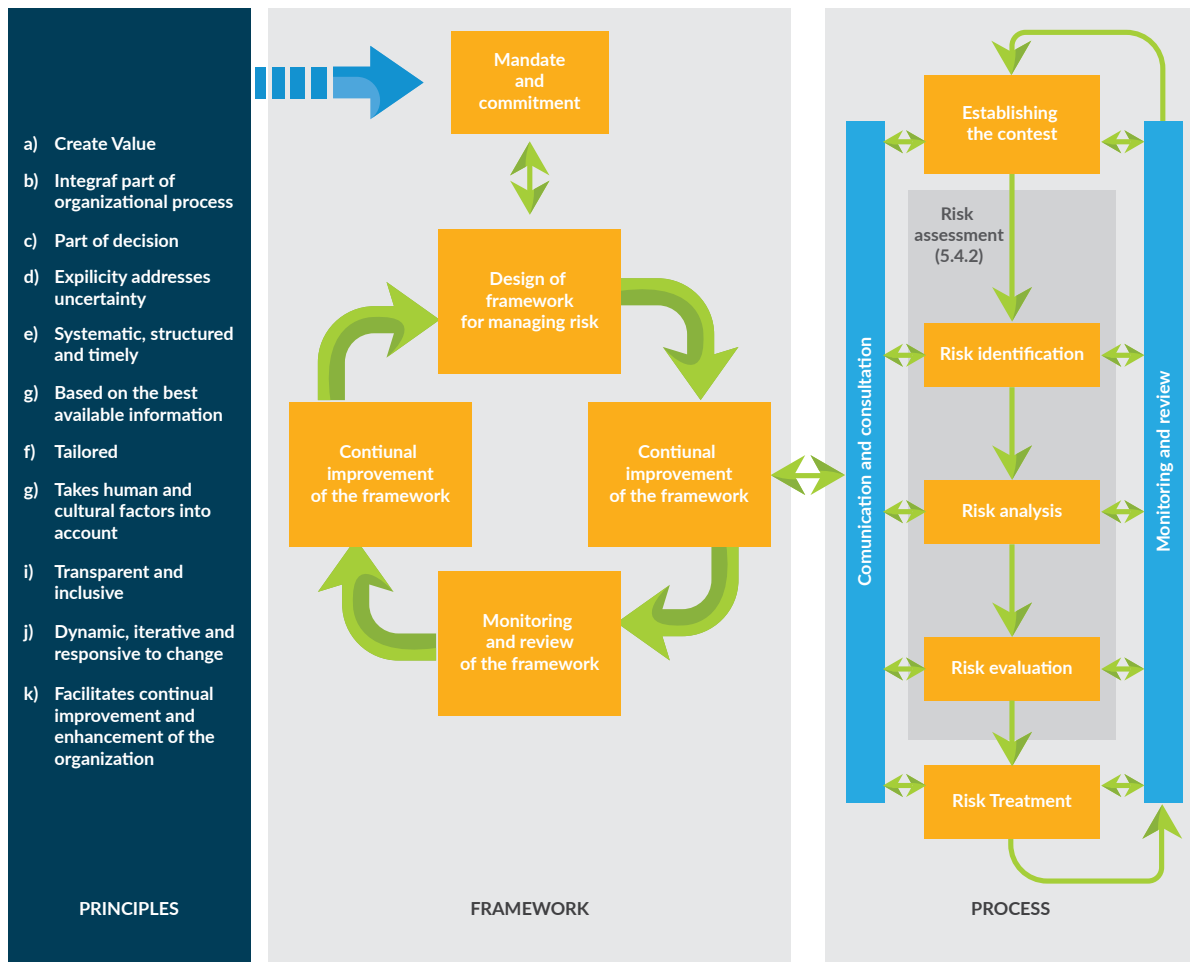
ACUAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Implementasi Manajemen Risiko di PT Barata Indonesia (Persero) mengacu pada "ISO 31000: 2009 "Risk management – Principles and guidelines". Pada standar tersebut terdapat tiga komponen utama, yaitu: Prinsip (Principle), Kerangka Kerja (Frame Work), dan Proses (Process) Manajemen Risiko. Ketiga komponen tersebut digambarkan pada bagan berikut ini:

Risk Management Implementation Reference

Risk Management implementation at PT Barata Indonesia (Persero) refers to "ISO 31000: 2009" Risk management - Principles and guidelines ". In these standards there are three main components, namely: Risk Management Principles, Framework, and Process. The three components are illustrated in the following chart:

Acuan Pelaksanaan Manajemen Risiko
Risk Management Implementation Reference



1. PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Prinsip manajemen risiko merupakan dasar/filosofi pelaksanaan Manajemen Risiko. Manfaat pelaksanaan Manajemen Risiko yang mengacu pada 11 prinsip tersebut adalah Manajemen Risiko terstruktur, tersistem, dan berulang (*timely*).

2. KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

Supaya implementasi/ penerapan manajemen risiko Terstruktur dan Tersistem, maka perlu dibuatkan kerangka kerja. Dimana kerangka kerja terdiri dari:

a. Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan Manajemen Risiko merupakan komitmen Direksi untuk pelaksanaan Manajemen Risiko di seluruh unit kerja PT Barata Indonesia (Persero).

1. Risk Management Principles

Risk management principle is the basis/philosophy in implementing Risk Management. The benefits of implementing Risk Management which referred to these 11 principles are structured, systemized, and timely Risk Management.

2. Risk Management Framework

In order to implement Structured and Systematic risk management, a framework is needed. Where the framework consists of:

a. Risk Management Policy

Risk Management Policy is a commitment of the Board of Directors to conduct Risk Management in all work units of PT Barata Indonesia (Persero).

- b. Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko
Merupakan aturan pelaksanaan Manajemen Risiko agar terstruktur dan tersistem. Serta petunjuk dan aturan pengisian kertas kerja Manajemen Risiko (Register Risiko)
- c. Kertas Kerja Manajemen Risiko
Kertas kerja Manajemen Risiko atau Register Risiko merupakan alat untuk Identifikasi Risiko, Analisa Risiko, Evaluasi Risiko dan Penanganan Risiko. Dimana hal tersebut merupakan Proses Pelaksanaan Manajemen Risiko.
Kertas kerja yang digunakan, yakni:

- b. *Risk Management Implementation Guidelines*
It is a rule for implementing Risk Management to be structured and systemic. As well as instructions and rules for filling in Risk Management working papers (Risk Register)
- c. *Risk Management Working Paper*
Risk Management or Risk Register working paper is a tool for Risk Identification, Risk Analysis, Risk Evaluation and Risk Management. Where this is a Risk Management Implementation Process.
Working paper used, namely:

Profil Proyek

Order

Unit		No Dokumen
Fungsi	Rev	Tanggal
1	Nama Pekerjaan / Proyek	
2	No Order / PL	
3	No Kontrak	
4	Jenis Pekerjaan	
5	Pemilik Pekerjaan	
6	Nilai Pekerjaan	
7	Sistem Pembayaran	
	- Uang Muka	
	- Skema Pembayaran	
	- Cara Pembayaran	
8	Jaminan Pelaksanaan	
9	Denda Keterlambatan	
10	Retensi	
11	Masa Garansi / Masa Pemeliharaan	
12	Durasi Pekerjaan (hari kalender)	
	- Kontrak di Mulai (tgl-bln-th)	
	- Kontrak Berakhir (tgl-bln-th)	
14	Skema Pelaksanaan	
15	Progress Pekerjaan	
	- Target (%)	
	- Realisasi (%)	
16	Dokumen	
	- RAB	
	- S Curve	
	- Kontrak / SPK	
17	Rencana CM (%)	

Mitigation Plan

Mitigation Plan

Diversity just often

SOSIALISASI DAN PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO

Pada tahun 2018, PT Barata Indonesia (Persero) melaksanakan berbagai kegiatan guna mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko. Yakni, Bagian Manajemen Risiko mengadakan “Refresh dan Sosialisasi Manajemen Risiko” secara rutin setiap 2 minggu sekali dan melakukan pendampingan ke setiap unit kerja yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan Manajemen Risiko. Selain itu, bagian Manajemen Risiko juga mengadakan “In House Training Manajemen Risiko” (IHT).

Manfaat dari dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah tingkat pemahaman dan kesadaran karyawan terhadap potensi risiko sesuai standar ISO 31000 : 2009 pada saat bekerja semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Risk Management Socialization and Training

In 2018, PT Barata Indonesia (Persero) conducted various activities to support Risk Management implementation. Namely, the Risk Management Unit conducted “Refresh and Socialization of Risk Management” regularly every 2 weeks and provided assistance to each work unit that has difficulties in implementing Risk Management. In addition, Risk Management unit also held “In House Training for Risk Management” (IHT).

The benefits of conducted these activities are the level of understanding and awareness of employees regarding the potential risks according to the ISO 31000: 2009 standards when working increases from year to year.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

Dalam kaitannya dengan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) mengharuskan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menetapkan sistem pengendalian intern Perusahaan yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset BUMN.

Sistem Pengendalian Intern merupakan instrumen penting dalam manajemen suatu Perusahaan. Penerapan Sistem Pengendalian Intern yang tepat dapat membantu manajemen dalam mengelola bisnisnya secara efisien, efektif, dan ekonomis (3E), mengamankan investasi dan aset Perusahaan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang handal, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan oleh Barata Indonesia berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 26.
2. Surat Keputusan Bersama Nomor K 17 194a tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Di Lingkungan PT Barata Indonesia (Persero).
3. Sistem Pengendalian Intern yang dirancang, ditetapkan dan diterapkan pada PT Barata Indonesia (Persero)

In relation to the Implementation of Good Corporate Governance, the Commissioners and Directors of State-Owned Enterprises (SOEs) are required to set an effective internal control system for the Company to secure SOE investments and assets.

The Internal Control System is an important instrument in the management of a Company. The proper implementation of the Internal Control System can assist management in managing their business efficiently, effectively and economically (3E), securing Company investments and assets, ensuring reliable financial reporting, increasing compliance with applicable laws and regulations, and reducing risk of loss.

The implementation of the Internal Control System carried out by Barata Indonesia is guided by:

1. *Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises Number: PER-01 / MBU / 2011 concerning Application of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises Article 26.*
2. *Joint Decree Number K 17 194a concerning General Guidelines for Internal Control Systems at PT Barata Indonesia (Persero).*
3. *The Internal Control System designed, established and applied to PT Barata Indonesia (Persero) includes five*

meliputi lima unsur (komponen) pengendalian yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*);
5. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern (*Monitoring Activities*).

RUANG LINGKUP

1. Pengertian dan Tujuan Sistem Pengendalian Intern

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian intern adalah suatu proses yang terintegrasi dan melekat pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai PT Barata Indonesia (Persero) untuk memberi keyakinan akan keberhasilan dalam usaha mencapai tujuan perusahaan.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Tujuan Sistem Pengendalian Intern adalah sebagai kerangka organisasi dan prosedur kerja operasi keuangan dan non keuangan yang dapat memberi jaminan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan dilingkungan perusahaan dapat:

1. Menjaga dan mengamankan aset perusahaan;
2. Mengurangi dampak keuangan atau kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan atau fraud;
3. Menjamin pelaksanaan semua kegiatan bisnis PT Barata Indonesia (Persero) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyediakan informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu;
5. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan dalam kegiatan operasional PT Barata Indonesia (Persero);
6. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh.

2. Pihak-pihak yang berkepentingan

Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam manajemen pengelolaan PT Barata Indonesia (Persero), antara lain : Dewan Komisaris, Direksi, Satuan Pengawasan Intern, Pejabat dan karyawan Barata Indonesia, Pihak Eksternal

3. Faktor Pertimbangan Dalam Penyusunan Sistem Pengendalian Intern PT Barata Indonesia (Persero)

Untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan pencapaian tujuan perusahaan serta memiliki sistem pengendalian intern yang efektif, maka penyusunannya perlu mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

elements (components) of control, namely:

1. *Environmental Control (Control Environment);*
2. *Risk Assessment;*
3. *Control Activities (Control Activities);*
4. *Information and Communication (Information & Communication);*
5. *Monitoring of Internal Control Systems (Monitoring Activities).*

Scope

1. Definition and Purpose of the Internal Control System

a. Definition of the Internal Control System

Internal Control System is a process that is integrated and attached to activities and actions carried out continuously by the leadership and all employees of PT Barata Indonesia (Persero) to give confidence in the success in achieving the company's goals.

b. Purpose of the Internal Control System

The aim of the Internal Control System is as an organizational framework and work procedures for financial and non-financial operations that can guarantee that every activity carried out within the company can:

1. *Maintain and secure company assets;*
2. *Reducing financial impacts or losses, irregularities including fraud or fraud;*
3. *Ensure the implementation of all business activities of PT Barata Indonesia (Persero) in accordance with applicable provisions and laws;*
4. *Providing true, complete and timely financial and management information;*
5. *Increase efficiency, effectiveness and economy in the operational activities of PT Barata Indonesia (Persero);*
6. *Increasing the effectiveness of risk culture in the organization as a whole.*

2. Stakeholders

The implementation of a reliable and effective Internal Control System is the responsibility of all parties involved in the management of PT Barata Indonesia (Persero), including: Board of Commissioners, Directors, Internal Control Unit, Barata Indonesia Officials and employees, External Parties

3. Consideration Factors in Preparation of PT Barata Indonesia (Persero) Internal Control System

To create a conducive working atmosphere and the achievement of company goals and have an effective internal control system, the preparation needs to consider the following factors:

- a. Total aktiva dan kewajiban yang dimiliki;
- b. Jenis produk usaha yang ditawarkan;
- c. Kompleksitas operasional, termasuk cabang dan anak perusahaan;
- d. Profil risiko dari setiap kegiatan usaha;
- e. Metode yang digunakan untuk pengolahan data dan teknologi informasi serta metodologi yang diterapkan untuk pengukuran, pemantauan (monitoring), dan pembahasan (limit) risiko;
- f. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEBIJAKAN

1. Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan;
2. Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud, antara lain mencakup hal – hal sebagai berikut :
 - a. Lingkungan pengendalian internal (*Control Environment*) dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari :
 1. Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan ;
 2. Filosofi dan gaya manajemen ;
 3. Cara yang ditempuh manajemen kewenangan dan tanggung jawabnya;
 4. Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 5. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
 - b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
 - c. Aktivitas pengendalian (*Control Activities*), yaitu tindakan – tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan.
 - d. Sistem informasi dan komunikasi (*Information & Communication*), yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan oleh BUMN.
 - e. *Monitoring (Monitoring Activities)*, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

- a. *Total assets and liabilities held;*
- b. *Types of business products offered;*
- c. *Operational complexity, including branches and subsidiaries;*
- d. *Risk profile of each business activity;*
- e. *The method used for data processing and information technology and the methodology applied for measurement, monitoring, and risk limits;*
- f. *Provisions and applicable laws and regulations.*

Policy

1. *The Board of Directors must establish an effective internal control system to secure investment and company assets;*
2. *The Internal Control System as intended, includes but is not limited to the following:*
 - a. *The internal control environment (Control Environment) in the company is carried out in a disciplined and structured manner, which consists of:*
 1. *Integrity, ethical values and employee competencies;*
 2. *Management philosophy and style;*
 3. *The way in which the management of authority and responsibility is taken;*
 4. *Organizing and developing human resources; and*
 5. *Attention and direction made by the Directors.*
 - b. *Assessment of business risk management (risk assessment), which is a process for identifying, analyzing, assessing the management of relevant risks.*
 - c. *Control activities, namely actions carried out in a process of control of company activities at each level and unit within the SOE organizational structure, including authority, authorization, verification, reconciliation, assessment of work performance, division of tasks , and security of company assets.*
 - d. *Information and communication systems (Information & Communication), namely a process of presenting reports on operational, financial, and compliance and compliance with the provisions of laws and regulations by SOEs.*
 - e. *Monitoring Activities, namely the process of evaluating the quality of the internal control system including the internal audit function at each level and unit in the BUMN organizational structure, so that it can be implemented optimally.*

Undang – Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Bab. VI “ Satuan Pengawasan Internal, Komite Audit, & Komite Lain “ diwajibkan untuk :

1. Setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Internal yang merupakan aparat pengawas internal perusahaan;
2. Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

EVALUASI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Perseroan meyakini bahwa sistem pengendalian internal yang efektif dimulai dengan kepatuhan terhadap standar standar perilaku etika yang berlaku di Perseroan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Mengingat pentingnya sistem pengendalian internal dalam kelangsungan usaha suatu bisnis, maka Perseroan mewajibkan adanya sistem pengendalian internal yang efektif guna mengamankan aset dan investasi Perseroan serta melakukan pengujian secara berkala.

Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning Chapter State-Owned Enterprises. VI “Internal Supervision Unit, Audit Committee & Other Committees” are required to:

1. *Every SOE formed by an Internal Control Unit, which is the company’s internal supervisory apparatus;*
2. *The Internal Control Unit as referred to in paragraph (1) is led by a head responsible to the President Director.*

Internal Control System Effectiveness Evaluation

The Company believes that an effective internal control system starts with compliance with applicable ethical behavior standards in the Company, both in oral and written form. Considering the importance of the internal control system in the business continuity of a business, the Company requires an effective internal control system to secure the Company’s assets and investments and conduct periodic testing

FUNGSI KEPATUHAN Compliance Function

Fungsi kepatuhan pada PT Barata Indonesia (Persero) melekat pada penanggung jawab atas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), dimana dilaksanakan melalui :

1. **Penilaian dan Evaluasi Penerapan GCG**
Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk peningkatan atas kualitas penerapan GCG, dimana untuk penilaian dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali oleh penilai independen (eksternal). Sedangkan evaluasi dilakukan secara *self assessment* pada tahun berikutnya setelah penilaian (*assessment*) tersebut. Tim evaluasi dibentuk berdasarkan SK Direksi yang di koordinatori oleh Satuan Pengawasan Indikator penilaian sesuai dengan SK Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012.
2. **Dokumentasi atas penerapan GCG**
Sebagai bentuk *monitoring* atas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), setiap 3 (tiga) bulan

Compliance function at PT Barata Indonesia (Persero) is attached to the responsible individual on Good Corporate Governance (GCG) implementation, which is conducted through:

1. **Assessment and Evaluation of GCG Implementation**
Measurement of Good Corporate Governance (GCG) implementation in the form of assessment and evaluation. Where for the assessment program for the GCG implementation is conducted every 2 (two) years by an independent (external) assessor. While the evaluation is conducted through self-assessment in the following year after external assessment. The evaluation team is formed based on the Board of Directors’ decree which is coordinated by Internal Audit Unit Assessment indicators are in accordance with the Ministry of SOEs Decree Number SK-16 / S.MBU / 2012).
2. **Documentation on GCG implementation**
As a form of Good Corporate Governance (GCG) implementation supervision, each 3 (three) months

sekali melakukan koordinasi dengan lembaga terkait atas pemenuhan dokumen pendukung atas penerapan tersebut.

3. *Sosialisasi atau Edukasi serta Program Corporate Compliance*

Melakukan sosialisasi atas *standart operating procedure* (SOP) yang dimiliki seperti *Whistle Blowing System* (WBS), *Pengendalian Gratifikasi* (*Gratification Control Procedure*), *Pedoman Perilaku* (*Code of Conduct*), termasuk pengenalan atas visi, misi, dan budaya perusahaan, pengawalan atas transaksi penting, penelaahan *soft structure*, serta kegiatan lain yang mendukung dalam penerapan prinsip-prinsip GCG.

4. *Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS)*

Program ini meliputi pengelolaan atas Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) secara keseluruhan di PT Barata Indonesia (Persero), yaitu dengan diterbitkannya *Standart Operating Procedure* (SOP) mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran. Dimana SOP ini sebagai acuan dalam tata cara pengelolaan penanganan pengaduan bagi Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan serta pihak yang berkepentingan dalam berhubungan dengan Perusahaan, agar setiap laporan yang dikirimkan terjaga kerahasiaannya dan kasus yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat ditindaklanjuti. Pelapor dapat membuat pengaduan dan mengirimkannya kepada pengelola sistem pelaporan pelanggaran yang dapat disampaikan kepada Direktur Utama dan Kepala SPI (apabila terlapor selain Direksi).

5. *Pengendalian Gratifikasi (Gratification Control)*

Program lainnya untuk mendukung praktek *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu pengendalian gratifikasi, dengan cara :

- a. Membangun sarana pelaporan gratifikasi
- b. Memberlakukan Pedoman Gratifikasi yang telah dimiliki dan disahkan oleh Direktur Utama melalui SK Direksi Nomor K 13 344a tentang *Standart Operating Procedure* (SOP) mengenai Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Untuk Pedoman Pengendalian Gratifikasi tersebut dapat dilihat dan di akses pada website resmi PT Barata Indonesia (Persero) : www.barata.com

coordinates with relevant institutions on the fulfillment of supporting documents for its implementation.

3. *Socialization/Education and Corporate Compliance Program*

Socialization on the Company's standard operating procedure (SOP) such as Whistle Blowing System (WBS), Gratification Control Procedure, Code of Conduct, including the introduction of the Company's vision, mission and culture, overseeing important transactions, evaluation of soft structure, and other activities which support GCG principles implementation.

4. *Management of the Whistle Blowing System (WBS)*

This program includes overall Whistle Blowing System management at PT Barata Indonesia (Persero), namely with issuance of a Standard Operating Procedure (SOP) regarding Violation Reporting System. Where this SOP become the reference in managing complaints handling procedures for the Board of Commissioners, Directors, Employees and interested and related parties in the Company, so that all the delivered reports are kept confidential and reported cases may be accounted and followed up. The reporter may make a complaint and send it to the manager of the violation reporting system that can be submitted to the President Director and the Head of IAU (if the reporter is other than the Board of Directors).

5. *Gratification Control*

Other programs to support Good Corporate Governance (GCG) practice, namely controlling embezzlement/ gratification, by:

- a. *Forming a means of reporting gratification*
- b. *Enacting the Company's Gratification Guidelines which has been ratified by the President Director through the Directors Decree No. K 13 344a regarding Standard Operating Procedure (SOP) on Guidelines for Gratification Control.*

Guidelines for Gratification Control can be seen and accessed on PT Barata Indonesia (Persero) official website : www.barata.com

PERKARA PENTING Important Cases

No.	PERKARA Cases	PARA PIHAK Parties	TAHUN Year	STATUS Status
1.	"SENGKETA TANAH DI GRESIK (SELUAS 21 HA) PADA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK) No. PUTUSAN : 700 PK/Pdt/2018 TGL. 08 OKTOBER 2019 " <i>"Land Disputes In Gresik (21 Ha) At Judicial Review Level (Pk) With Decision No.700 Pk/Pdt/2018 Dated October 08, 2019 "</i>	SUJONO Cs.	2013-2018	BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIMENANGKAN OLEH PT BARATA INDONESIA (PERSERO) DITINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK) DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA <i>Binding That Won By PT Barata Indonesia (Persero) Reinforced By Judicial Review (Pk) In The Supreme Court Of The Republic Of Indonesia</i>
2	SUBKONTRAKTOR PROYEK PLTU 2 X 25 MW DI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT), DI SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRASE COURT (SIAC), SINGAPORE <i>Subcontractor Project 2 X 25 Mw Pltu In Nusa Tenggara Timur (Ntt), In Singapore International Arbitrase Court (Siac), Singapore</i>	JIANGXI JIANGLIAN INTERNATIONAL ENGINEERING CO., LTD	2016-2017	1. PROSES ACARA MASING-MASING SUDAH MEMBERIKAN JAWABAN DENGAN ALAT-ALAT BUKTI 2. MENUNGGU PROSES SIDANG YANG DIRENCAKANAN PADA BULAN AGUSTUS 2019 3. TERDAPAT INISIATOR DARI MASING-MASING PIHAK UNTUK PENAWARAN PERDAMAIAN <i>1. Each Parties Have Gave Answers With Evidence 2. Awaiting For The Hearing In August 2019 3. There Are Initiators From Each Party For Compromise</i>

AKSES INFORMASI DAN DATA PERSEROAN Access to Company Information and Data

Dalam rangka memudahkan komunikasi dan akses para pemangku kepentingan termasuk informasi terbaru mengenai laporan kondisi keuangan, non keuangan, dan data perusahaan lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban transparansi serta akuntabilitas perusahaan, PT Barata Indonesia senantiasa melakukan pembaharuan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi.

WEBSITE

Perseroan memiliki website Perusahaan (www.barata.com) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang menyajikan informasi yang lengkap tentang Perseroan seperti profil Perusahaan, layanan bisnis, kegiatan perusahaan serta kebijakan dan pelaksanaan GCG. Website PT Barata Indonesia menampilkan informasi terkini secara transparan, konsisten dan tepat sasaran sehingga dapat membentuk pemahaman publik mengenai Perseroan dengan baik. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui website tepat waktu, akurat, lengkap dan tidak melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku.

In order to ease communication and access for the stakeholders, including recent information about financial and non-financial conditions, and other corporate data related to accountability of the Company's transparency and accountability, PT Barata Indonesia always updates information disclosure supporting facilities and infrastructures.

Website

The Company has corporate website (www.barata.com) in Bahasa and English presenting complete information about the Company such as Company Profile, business services, corporate activity as well as GCG policy and implementation. Website of PT Barata Indonesia presents up-to-date information transparently, consistently and effectively to shape public understanding on the Company appropriately. Corporate Secretary is incharge to ensure that the information presented via website are always be timely, accurate, complete and not vioalting prevailing Law.

SIARAN PERS

Press Release

Jumlah Release Berita Tahun 2018

Number of News Releases for 2018

No.	JUDUL BERITA News Title
1	Barata Indonesia Lantik Sembilan Pejabat Eselon I <i>Barata Indonesia Appoints Nine Echelon Offices I</i>
2	Barata Indonesia Akan Bangun Dua PLTM di Sumatera Utara <i>Barata Indonesia Will Build Two PLTM in North Sumatra</i>
3	Barata Indonesia Fokus Garap Pembangkit Listrik Energi Terbarukan <i>Barata Indonesia Focuses on Developing Renewable Energy Power Plants</i>
4	Barata Indonesia Lakukan Sinergi Dengan PTPN X <i>Barata Indonesia Synergizes with PTPN X</i>
5	Barata Indonesia Menjadi Mitra Strategis Siemens AG <i>Barata Indonesia Becomes Siemens AG's Strategic Partner</i>
6	Sinergi PTPN III (Persero) Holding Dengan PT Barata Indonesia (Persero) <i>PTPN III (Persero) Synergy Holding with PT Barata Indonesia (Persero)</i>
7	Pacu Performa Perusahaan, Barata Indonesia Siap Terapkan Aplikasi SAP – ERP <i>Spurring Corporate Performance, Barata Indonesia Ready to Apply SAP - ERP Application</i>
8	Pengangkatan Komisaris Baru di PT Barata Indonesia (Persero) <i>Appointment of New Commissioner at PT Barata Indonesia (Persero)</i>
9	Duro Felguera menandatangani perjanjian komersial dengan Barata Indonesia <i>Duro Felguera signed a commercial agreement with Barata Indonesia</i>
10	Barata Akuisisi Pabrik Siemens Turbine di Indonesia <i>Barata Acquires Siemens Turbine Plant in Indonesia</i>
11	Kementerian Sambut Baik Akuisisi Yang Disambut Oleh Barata Indonesia <i>The Ministry Welcomes Acquisitions Welcomed By Barata Indonesia</i>
12	Barata Indonesia Bawa Pulang Dua Penghargaan di Anugerah BUMN Awards 2018 <i>Barata Indonesia Bring Home Two Awards at Anugerah SOE Awards 2018</i>
13	Barata Indonesia Resmikan Divisi Komponen Turbin <i>Barata Indonesia Inaugurates the Turbine Components Division</i>
14	BUMN Industri Strategis Dalam IBD Expo 2018 <i>Strategic BUMN Industry in the 2018 IBD Expo</i>
15	Site Visit Ke BUMN-BUMN Dalam Rangka IBDExpo 2018 <i>Visit Site To SOEs In The IBD Expo 2018</i>
16	Barata Indonesia Lakukan Ekspor Perdana Komponen Pembangkit Listrik ke Taiwan <i>Barata Indonesia Makes First Export of Power Plant Components to Taiwan</i>
17	PT Barata Indonesia (Persero) Akan Produksi Mobile Power Plant <i>PT Barata Indonesia (Persero) Will Produce Mobile Power Plant</i>
18	Barata Indonesia Dukung Fabrikasi Crane Makassar New Port <i>Barata Indonesia Supports Fabrication of Makassar New Port Crane</i>
19	14 BUMN Industri Strategis Genjot Penjualan Produk Pertahanan <i>14 Strategic Industrial SOEs Boost Defense Product Sales</i>
20	Barata Indonesia Dapatkan Proyek PLTM Sisira (2X4,9) MW Senilai Rp. 216 M <i>Barata Indonesia Receives a Sisira (2X4.9) MW PLTM Project Worth Rp. 216 M</i>
21	Barata Indonesia Rebut Best Local Content Company Dalam IBEA 2018 <i>Barata Indonesia Wins Best Local Content Company in 2018 IBEA</i>
22	Konsistens Lakukan Ekspor, Barata Indonesia Peroleh Penghargaan BUMN Heroes <i>Consistently Performing Exports, Barata Indonesia Receives BUMN Heroes Award</i>
23	Barata Indonesia Dukung Percepatan Industri Gula Nasional <i>Barata Indonesia Supports the Acceleration of the National Sugar Industry</i>
24	Oksarlidady Arifin, Nakhoda Baru PT Barata Indonesia (Persero) <i>Oksarlidady Arifin, New Head of PT Barata Indonesia (Persero)</i>
25	Barata Indonesia, Raih Penghargaan BUMN Industri Strategi Terbaik <i>Barata Indonesia, Wins Best BUMN Industry Strategy Award</i>

EMAIL

Perseroan secara terbuka menyiapkan jalur komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui email perusahaan untuk mengakomodir berbagai pertanyaan terkait dengan Perusahaan, yaitu dengan menghubungi *Corporate Secretary* pada email: info@barata.com.

Media Sosial

Dalam rangka mempermudah pelayanan dan akses kepada pelanggan, PT Barata Indonesia juga melakukan sosialisasi mengenai perusahaan melalui media sosial, diantaranya :

Instagram : @barataindonesia
Twitter : @barata_ina
Facebook Fanpage : PT Barata Indonesia
YouTube : Barata Indonesia

SARANA LAINNYA

Selain dari pada akses informasi yang telah disebutkan di atas, Perseroan juga senantiasa menyampaikan informasi-informasi penting dalam forum-forum tertentu, seperti RUPS, *non- deal roadshow*, *conference call*, *site visit*.

Selain itu informasi tentang bright Perseroan dapat diperoleh pada *communication & external relation* PT Barata Indonesia yang beralamat di Kantor PT Barata Indonesia, Jl Veteran No. 241, Gresik 61123.

Telepon : +62 31 3330555
Fax : +62 31 3330666
Email : info@barata.com

Email

The Company transparently prepares communication channel with the stakeholders via corporate e-mail to accomodate various inquiries related to the Company by contacting Corporate Secretary at email: info@barata.com.

Social Media

In order to ease service and access to the customers, PT Barata Indonesia also socializes about the Company via social media, among others:

Instagram : @barataindonesia
Twitter : @barata_ina
Facebook Fanpage : PT Barata Indonesia
YouTube : Barata Indonesia

Others

Aside from access to information mentioned above, the Company also continues to deliver important information in certain forums, such as RUPS, non-deal roadshows, conference calls, site visits.

In addition, information about PT Barata Indonesia is also available at PT Barata Indonesia communication & external relation at PT Barata Indonesia office, Jl Veteran No. 241, Gresik 61123.

Tel : +62 31 3330555
Fax : +62 31 3330666
Email : info@barata.com

BENTURAN KEPENTINGAN

Conflict Of Interest

Perseroan telah memiliki pedoman kerja yang mengatur mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan dituangkan dalam dokumen Code of Conduct yang harus dipatuhi oleh seluruh insan Perseroan. Khusus untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Eselon I juga diwajibkan menandatangani Pakta Integritas yang diantaranya berisi tentang hal-hal berikut:

The Company has work guideline which governing transactions that contain conflicts of interest which is stipulated in the Code of Conduct document which shall be obeyed by all the Company's personell. For the Board of Commissioners, Directors and Echelon I are required to sign an Integrity Pact which includes the following matters:

1. Melaksanakan setiap tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip yang baik, dengan kecermatan tinggi, dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan serta pengaruh dari pihak lain (*independency*).
2. Mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang tersebut diatas dengan kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) demi Perusahaan, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan serta telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya pihak profesional dalam posisi yang sama seperti halnya mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri sendiri (*prudent person rule*).
3. Dalam mengambil keputusan, tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait, atau pihak yang terafiliasi, sehingga tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*), termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat.
4. Melaksanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait dan mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan *best practice*, yang dipandang perlu, penting dan kritikal dalam proses tersebut (*duty abiding the laws*).

Selama tahun 2018, tidak terdapat kejadian atau transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha Korporasi, sebagaimana telah didefinisikan dalam dokumen *Code of Conduct*.

1. *Perform all duties in accordance with the authority granted by the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations based on good principles, with high accuracy, in a free, independent or not under pressure and influence from other parties (independency).*
2. *Make decisions in relevant with the matters as mentioned above with caution (duty of care and loyalty) to the Company, by considering various information sources, description and made sufficient comparison, as a professional in the same position as well as implementing prudent person rule.*
3. *In making decisions, have no personal interests or goals to do something for its own benefits, or the relevant, or affiliated parties, thus not in the position that may contains conflict of interest, including with all parties involved.*
4. *Conduct the process with an adequate understanding of the various rules and other normative obligations related to and comply with all the prevailing laws and regulations, including considering best practices, which are deemed necessary, important and critical in the process (duty abiding the laws).*

During 2018, there were no events or transactions with relevant parties, either directly or indirectly related to the Corporation's business activities, as defined in the Code of Conduct document.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN *Whistleblowing System*

1. **SALURAN PENGADUAN LAPORAN PELANGGARAN**
Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System* (WBS)) merupakan suatu sistem yang memberikan sarana kepada para pemangku kepentingan untuk membuat pengaduan mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi di Perseroan. Tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang tidak semestinya atau perbuatan lain yang dapat merugikan

1. *Channels for Whistleblowing*
The Whistleblowing System (WBS) is a system that provides a means for stakeholders to make complaints about alleged violations that occur in the Company. Acts of violation or acts that are against the law, improper conduct or other actions that can harm the Company or stakeholders, carried out by Company personnel or other institutions that can take action on these violations. This

Perusahaan maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh insan Perusahaan atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini dilakukan secara rahasia (*confidential*).

Untuk mendukung atas sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG), maka telah dibuat dan disahkannya *System Operating Procedure* (SOP) melalui SK Direksi No.K 13 345a tanggal 25 November 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Pedoman tersebut dapat di akses secara publik pada website Barata yaitu www.barata.com

2. MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

Mekanisme penyaluran pengaduan atas pelanggaran, sebagai berikut :

- a. Pelapor melaporkan pengaduan pelanggaran kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Satuan Pengawasan Intern (SPI), dengan ketentuan yaitu Pelapor disarankan untuk memberikan informasi mengenai identitas diri, yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, nomor telepon dan handphone/ email dan fotokopi identitas diri.
- b. Pelaporan pelanggaran harus disertai dokumen pendukung seperti: dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau Pelaporan Pelanggaran yang akan disampaikan.
- c. Apabila Pelaporan Pelanggaran diajukan oleh perwakilan pemangku kepentingan, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:
 - a. Fotokopi bukti identitas pemangku kepentingan dan perwakilan pemangku kepentingan,
 - b. Surat Kuasa dari pemangku kepentingan kepada perwakilan pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa stakeholders memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama pemangku kepentingan,
 - c. Jika perwakilan pemangku kepentingan adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan Pelaporan Pelanggaran berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum Tersebut.
- d. Pelapor wajib memberikan data pendukung / indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :
 - a. Pelanggaran yang diadukan atau sampaikan;
 - b. Pihak yang terlibat;
 - c. Lokasi pelanggaran;

disclosure is done confidentially.

To support the internal control system in preventing practices of misconduct and fraud and strengthen the application of Good Corporate Governance (GCG) practices, the System Operating Procedure (SOP) has been made and passed through the Directors Decree No. K 13 345a dated November 25, 2013 signed by the Director Main. These guidelines can be accessed publicly on the Barata website, www.barata.com

2. Whistleblowing Mechanism

The mechanism for channeling complaints for violations is as follows:

- a. *The whistleblower reports a complaint of violation to the President Director with a copy to the Internal Audit Unit (SPI), under condition that the whistleblower is advised to provide information on identity, at least contains the name, address, telephone number and handphone / e-mail and photocopy of identity .*
- b. *Whistleblowing must be accompanied by supporting documents such as: documents relating to transactions carried out and / or Violation Reporting to be submitted.*
- c. *If the Violation Report is submitted by a stakeholder representative, then other documents above are also submitted, namely:*
 - a. *Photocopy of proof of identity of stakeholders and stakeholder representatives,*
 - b. *Power of Attorney from stakeholders to stakeholder representatives stating that stakeholders have the authority to act for and on behalf of stakeholders,*
 - c. *If the stakeholder representative is an institution or legal entity, then it must be accompanied by a document which states that the party submitting the Violation Report is authorized to represent the said institution or legal entity.*
- d. *Whistleblower must provide supporting data / initial indications that can be accounted for, including:*
 - a. *Violations that are complained or conveyed;*
 - b. *Parties involved;*
 - c. *Location of violation;*

- d. Waktu pelanggaran;
- e. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran;
- f. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain.
- g. Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.
- e. Penyampaian Pengaduan oleh Pelapor, prinsip dasar :

- a. Dalam melakukan pelaporan atas suatu pelanggaran harus dilakukan dengan itikad baik bukan karena kepentingan pribadi atau balas dendam;
- b. Mengedepankan manfaat untuk kepentingan bersama seluruh insan Perusahaan dan para pemangku kepentingan.
- c. Pelapor membuat pengaduan dan mengirimkannya kepada pengelola Sistem Pelaporan. Pelanggaran yang dapat disampaikan kepada Direktur Utama atau Kepala SPI (apabila terlapor selain Direksi) melalui sarana/media, seperti website (www.barata.com) atau email (wbs@ptbarata.com)
- d. Atau dapat juga disampaikan melalui amplop tertutup dengan memberi kode "WBS" pada bagian kanan atas amplop tersebut, yang ditujukan kepada Direktur Utama atau Kepala SPI dalam hal terlapor selain Direksi dan bila terlapor SPI ditujukan ke Direktur Utama, dengan alamat :

PT Barata Indonesia (Persero)
Jl. Veteran Nomor 241
Gresik – 61123

- e. Sedangkan apabila yang terlapor Direksi, maka dapat ditujukan kepada Komisaris Utama dengan alamat:
PT Barata Indonesia (Persero)
Menara MTH. Lantai 10 Ruang 1001
Jl. MT Haryono Kav. 23
Jakarta - 12320
- f. Penanggungjawab Tindak Lanjut :
 - a. Direktur Utama, jika terlapor adalah Insan Perusahaan selain Direksi;
 - b. Dewan Komisaris, Jika yang terlapor Direksi;
 - c. Direktur Utama, jika yang terlapor Dewan Komisaris.

- d. Time of violation;
- e. How the violation occurred and whether there is supporting evidence of the violation;

f. Have these violations been reported to other parties.

g. Have these violations ever happened before.

- e. Submission of Complaints by whistleblower basic principles:

a. In reporting on a violation, it must be done in good intention, not based on personal interests or revenge;

b. Prioritizing benefits for the mutual benefit of all employees and stakeholders.

c. The whistleblower reports a complaint and sends it to the reporting system manager. Violations can be submitted to the President Director or SPI Head (if the whistleblowed is other than the Board of Directors) through means / media, such as the website (www.barata.com) or email (wbs@ptbarata.com)

d. Or it can also be delivered through a sealed envelope by giving the code "WBS" on the right side of the envelope, which is addressed to the President Director or SPI Head in the case of the whistleblowed is other than the Board of Directors and if the whistleblowed is SPI, it can be addressed to the President Director at :

PT Barata Indonesia (Persero)
Jl. Veteran Number 241
Gresik - 61123

e. Whereas if the whistleblowed is Board of Directors, it can be addressed to the President Commissioner at :

PT Barata Indonesia (Persero)
MTH Tower. 10th Floor Room 1001
Jl. MT Haryono Kav. 23
Jakarta – 12320

- f. Responsible for Respond:

a. The President Director, if the whistleblowed is the Company employees other than the Board of Directors;

b. The Board of Commissioners, if the whistleblowed the Board of Directors;

c. The President Director, if the whistleblowed is the Board of Commissioners.

3. PROSES TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN

Tindak lanjut atas pengaduan ini dilakukan mulai diterimanya pengaduan tersebut dengan proses sebagai berikut :

- a. Direktur Utama atau Kepala SPI atau Komisaris Utama menerima pengaduan, mencatat dan menuangkan ke dalam format standar. Apabila penerima pengaduan Direktur Utama maka Direktur Utama dapat mendisposisikan proses selanjutnya kepada Kepala SPI. Sedangkan apabila penerima pengaduan Komisaris Utama dalam hal ini terlapor Direksi maka Komisaris Utama dapat menugaskan Komite Audit untuk proses selanjutnya.
- b. Apabila pelaporan yang diterima memenuhi persyaratan sesuai Bab V ayat 3 dan 4 diatas, maka Direktur Utama atau Kepala SPI atau Komisaris Utama melakukan penelaahan awal atau investigasi atas Indikasi Awal selama 14 (empat belas) hari kerja. Bila "TIDAK" proses Sistem Pelaporan Pelanggaran dianggap selesai.
- c. Berdasarkan hasil tersebut, Direktur Utama atau Komisaris Utama memutuskan tindak lanjut:
 - Dihentikan, jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal;
 - Melakukan investigasi lanjutan, jika substansi pengaduan terkait dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan satu tingkat di bawah Direksi atau citra/reputasi Perusahaan dan/atau menimbulkan kerugian yang besar, akan dilakukan oleh Internal investigator dan bila perlu dapat melibatkan Eksternal Investigator.
- d. Laporan Hasil Investigasi Internal maupun External diselesaikan dalam waktu selambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan untuk melakukan investigasi diterima dari/oleh Tim Investigasi dan kemudian dilaporkan oleh Tim Investigasi kepada Direktur Utama atau Komisaris Utama.
- e. Berdasarkan hasil laporan sebagaimana diatas, Direktur Utama atau Komisaris Utama Memutuskan:
 - Laporan pengungkapan ditutup, jika tidak terbukti
 - Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika terbukti dan terkait dengan tindakan Administratif.
 - Laporan hasil investigasi dapat diselesaikan melalui mekanisme internal dan/atau eksternal, yaitu meneruskan kepada penyidik untuk proses lebih lanjut, jika terbukti dan terkait dengan tindak pidana umum atau korupsi. Dalam hal ini Penanggung Jawab melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Legal guna memastikan adanya bukti permulaan yang cukup dan jika bukti-bukti cukup

3. Follow up Process of Complaints

Follow-up on this complaint is carried out from the receipt of the complaint with the following process:

- a. The President Director or Head of the SPI or the President Commissioner receives complaint, make some notes and archive it into a standard format. If the recipient is the President Director, he/she can dispose the next process to the SPI Head. Whereas if the recipient is the President Commissioner in this case of the whistleblowned is the Board of Directors, the President Commissioner can assign the Audit Committee to the next process.
- b. If the report received meets the requirements in accordance with Chapter V paragraphs 3 and 4 above, then the President Director or Head of SPI or the President Commissioner conducts an initial review or investigation of the Initial Indication for 14 (fourteen) working days. If the "NO", process of the Violation Reporting System is considered finished.
- c. Based on these results, the President Director or President Commissioner decides the following :
 - Terminated, if it does not meet the initial indication requirements;
 - Further investigations, if the substance of the complaint is related to the Board of Directors, Board of Commissioners and Employees one level below the Board of Directors or the Company's image / reputation and / or causing a large loss, it will be carried out by internal investigators and if necessary can involve External Investigators.
- d. Internal and External Investigation Reports are completed within no later than 90 (ninety) working days from the decision to conduct an investigation received from / by the Investigation Team and then reported by the Investigation Team to the President Director or President Commissioner.
- e. Based on the results of the report as above, the President Director or President Commissioner Decides:
 - Disclosure reports are closed, if not proven
 - Give sanctions in accordance with applicable regulations, if proven and related to Administrative actions.
 - Reports on the results of investigations can be completed through internal and / or external mechanisms, namely forwarding to investigators for further processing, if proven and related to general criminal acts or corruption. In this case the Responsible Person coordinates with the Legal Work Unit to ensure sufficient initial evidence and if the evidence is sufficient, the Responsible Person

maka Penanggung Jawab merekomendasikan kepada Direktur Utama untuk persetujuan.

- Poin 2 dan 3, dilakukan melalui rapat Direksi dan Dewan Komisaris

- f. Satuan Pengawas Intern (SPI) membuat laporan secara periodik kepada Direktur Utama, minimal 6 (enam) bulan sekali, antara lain meliputi jumlah pengaduan dan tindak lanjut penyelesaian.
- g. Komite Audit membuat laporan secara periodik kepada Komisaris Utama, minimal 6 (enam) bulan sekali, antara lain meliputi jumlah pengaduan dan tindak lanjut penyelesaian.

4. INVESTIGASI

a. PRINSIP DASAR INVESTIGASI

1. Proses investigasi atas suatu laporan harus dilakukan dengan tetap memegang asas praduga tidak bersalah dan objektivitas;
2. Proses investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari siapa yang melaporkan ataupun siapa yang terlapor;
3. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemui, termasuk pembelaan bila diperlukan;
4. Apabila terlapor adalah Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan satu tingkat di bawah Direksi, maka dapat menggunakan Tim Investigasi dari pihak eksternal;
5. Diluar kriteria tersebut, maka Investigasi dilakukan oleh Tim Investigasi Internal.

b. TIM INVESTIGASI

1. Investigasi dapat dilakukan baik oleh External Investigator maupun oleh Tim Investigasi Internal. Tim Investigasi Internal berasal dari SPI.
2. Tim investigasi harus bersifat independen, bebas dari tekanan pihak manapun untuk menjaga proses investigasi dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan penilaian hasil temuan secara obyektif.

c. LAPORAN HASIL INVESTIGASI

1. Seluruh proses Investigasi atas Pengaduan wajib dibuatkan Berita Acara dalam bentuk laporan serta ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses investigasi.
2. Proses investigasi harus didokumentasikan dengan baik, sehingga jika diperlukan untuk peninjauan ulang dapat dengan mudah dilakukan penelaahan kembali atas sasaran yang ingin

recommends to the President Director for approval.

- *Points 2 and 3, conducted through the Board of Directors and Board of Commissioners meetings*

- f. *fIAU reports periodically to the President Director, at least 6 (six) months, including the number of complaints and follow-up solutions.*
- g. *The Audit Committee periodically reports to the President Commissioner, at least 6 (six) months, including the number of complaints and follow-up solutions.*

4. Investigation

a. Basic Principles of Investigation

1. *The process of investigating a report must be carried out while maintaining the prejudice of innocence and objectivity;*
2. *The investigation process must be free from bias and carried out regardless who are the whistleblower and whistleblowed ;*
3. *The whistleblowed must be given a full opportunity to provide an explanation of the evidence found, including defense if necessary;*
4. *If the whistleblowed are the Board of Directors, Board of Commissioners and Employees one level below the Board of Directors, then it can done through the Investigation Team from an external party;*
5. *Apart from these criteria, the investigation is carried out by the Internal Investigation Team.*

b. Investigation Team

1. *Investigation can be carried out both by External Investigator and by the Internal Investigation Team. The internal investigation team came from the IAU.*
2. *The investigation team must be independent, free from the pressure of any party to guarantee the investigation process is based on the principle of justice and objective assessment of findings.*

c. Investigation Report

1. *The entire investigation process on Complaints must be documented in the form of a report and signed by the parties involved in the investigation process.*
2. *The investigation process must be well documented, so that if necessary for review it can be easily carried out a review of the objectives to be achieved and also important decisions taken during the process.*

dicapai dan juga keputusan-keputusan penting yang diambil selama proses berlangsung.

3. 3Laporan hasil investigasi disertai beberapa bukti pendukung yang merupakan bukti fisik serta bukti non fisik. Hasil laporan investigasi tidak berupa opini atau pendapat tapi berupa kesimpulan akhir mengenai hasil investigasi yang akan digunakan sebagai dasar putusan pengambilan tindakan.

5. PERLINDUNGAN PELAPOR

Perusahaan wajib memberikan perlindungan bagi Pelapor dan menjamin atas kerahasiaan identitasnya. Informasi terkait Pelapor terdokumentasikan dengan baik dan hanya boleh diketahui oleh Direktur Utama atau Kepala SPI dan Komisaris Utama atau Komite Audit, dalam hal ini penerima pengaduan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindak lanjut pelaporan pelanggaran.

6. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PELAPOR

Kebijakan perlindungan Pelapor dimaksudkan pula untuk mendorong setiap Insan Perusahaan dan Pelapor lainnya untuk berani melaporkan pelanggaran dan menjamin keamanan Pelapor maupun Keluarganya. Perusahaan berkomitmen untuk melindungi Pelapor yang beritikad baik dan Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem penyelenggaraan perlindungan Pelapor”.

Perusahaan memberikan perlindungan kepada Pelapor sebagai berikut:

- Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.
- Pemecatan yang tidak adil.
- Penurunan jabatan atau pangkat atau konduite.
- Pelecehan dan/atau diskriminasi dan/atau tekanan dan/atau intimidasi dalam segala bentuknya atau tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun;
- Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan tersebut.

Selain perlindungan di atas, untuk Pelapor yang beritikad baik, Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur Undang Undang No.15 tahun 2002 jo Undang Undang No.25 tahun 2003 pada Pasal 43 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 13 Undang Undang No.13

3. *Report on the results of the investigation is accompanied by some supporting both physical evidence and non-physical evidence. The results of the investigation report are not in the form of opinions but in the form of final conclusions regarding the results of the investigation that will be used as the basis for the decision to take action.*

5. Whistleblower Protection

The company must provide a whistleblower protection and guarantee the identity confidentiality. Information related to the whistleblower is well documented and may only be known by the President Director or Head of the SPI and the President Commissioner or Audit Committee, in which case are the recipient of the complaint as the party responsible for the follow-up to the reporting of violations.

6. Whistleblower Protection Policy

The Whistleblower Protection Policy is also intended to encourage each member of the Company and other whistleblower to dare to report violations and guarantee the safety of the whistleblower and their Family.

The company is committed to protecting the whistleblower with good intentions and the Company will comply with all relevant laws and regulations and best practices that apply in the implementation of the whistleblower protection system. “

The company provides protection to the whistleblower as follows:

- *Whistleblower identity is guaranteed confidential by the Company.*
- *Unfair dismissal.*
- *Decline in position or rank or condition.*
- *Harassment and / or discrimination and / or pressure and / or intimidation in all its forms or unpleasant actions from any party;*
- *Protection of the whistleblower also applies to parties who carry out investigations as well as those who provide information related to the Complaint.*

In addition to the above protection, for the whistleblower with good intentions, the Company will also provide legal protection, in line with what is stipulated in Law No. 15 of 2002 in conjunction with Law No. 25 of 2003 in Article 43 concerning Money Laundering and Article 13 of the Law. No.13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and

tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu :

- a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
- b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
- c. Perlindungan terhadap harta Pelapor; dan/atau
- d. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan".

Dalam hal Pelapor merasa perlu, ia juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai Undang Undang No.13 tahun 2006.

7. PENGHARGAAN DAN SANKSI

- a. Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan;
- b. Perusahaan juga memberikan sanksi bagi Pelapor yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan ini, misalnya fitnah atau pelaporan palsu;
- c. Penghargaan diberikan kepada Pelapor apabila kasus yang dilaporkan mengandung kebenaran dan Perusahaan mendapat dampak positif dari adanya laporan tersebut. Jenis dan besarnya penghargaan akan ditetapkan lebih lanjut dan akan diberikan pada saat pemberian penghargaan dan merupakan dokumen tidak terpisahkan dari kebijakan WBS ini.

Selama tahun 2018 tidak terdapat laporan (bersifat NIHIL) terkait pelanggaran sistem yang berarti, sehingga dengan demikian tidak terdapat sanksi yang diberikan.

Victims, and Article 5 of Government Regulation No.57 of 2003 concerning Special Protection Procedures for whistleblower and Witnesses in Money Laundering Crimes namely:

- a. Protection from criminal charges and/ or civil law;*
- b. Protection of personal security, and/ or the family of the whistleblower from physical and/ or mental threats;*
- c. Protection of the whistleblower's assets; and / or*
- d. Information handover without face to face appointment with the whistleblowed, at each level of case investigation in the event that the violation falls into the court dispute*

When whistleblower feels the need, he/she can also request assistance from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), in accordance with Law No. 13 of 2006.

7. Appreciation and Sanctions

- a. The form of sanctions for the whistleblowed that has been proven to have committed a violation is determined in accordance with the applicable rules and regulations in the Company;*
- b. The company also imposes sanctions on whistleblower who are not in accordance with the aims and objectives of this policy, such as defamation or false reporting;*
- c. Appreciation are given to the whistleblower whose case contains the truth and the Company benefits a positive impact of it. The type and amount of the appreciation will be further determined and will be given at the time of awarding and is a document inseparable from this WBS policy.*

During 2018 there was no report regarding significant system violation, thus there was no sanction given



A man with dark hair, wearing a teal polo shirt, is leaning over a body of water. He is carefully placing a small mangrove seedling into the water. The background shows a natural setting with trees and a fence. A large, stylized number '17' is overlaid on the right side of the image. The text 'TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN' is written in bold, dark blue capital letters, and 'Corporate Social Responsibility' is written in a smaller, green, italicized font below it.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

PENDAHULUAN

Preliminary

PT Barata Indonesia (Persero) sebagai suatu entitas bisnis diwajibkan untuk dapat mematuhi asas - asas tata kelola perusahaan yang baik (Good Governance) di dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk dapat menunjang kelancaran dan keamanan operasi maka perusahaan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas diwajibkan untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan atau yang sering diinterpretasikan dewasa ini dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Agar kegiatan ini tidak hanya merupakan kewajiban Perusahaan semata tetapi dapat menjadi suatu kegiatan yang memiliki dampak pada masyarakat, maka kegiatan tersebut perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan baik oleh PT Barata Indonesia (Persero).

Dalam kaitannya dengan *Good Corporate Governance* (GCG) yang menerapkan prinsip-prinsip *Transparency* (keterbukaan informasi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian) dan *Fairness* (kesetaraan & kewajiban), maka terdapat benang merah yang menghubungkan GCG dengan CSR. Prinsip *responsibility* merupakan prinsip yang salah satunya diaplikasikan dalam CSR dimana ada penekanan signifikan yang diberikan kepada *stakeholders* perusahaan karena dalam kegiatan operasional Perusahaan seringkali menimbulkan dampak eksternal yang harus ditanggung oleh para *stakeholders*. Karena itu dengan CSR yang merupakan penerapan GCG bisa merupakan perwujudan bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungannya dan sebagai upaya Perusahaan dalam memenuhi tuntutan beretika bisnis yang baik.

Di sisi lain, Barata adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional dan mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik. Pada waktu bersamaan BUMN dituntut untuk berfungsi sebagai alat pembangunan nasional dan berperan sebagai institusi sosial. Dua fungsi tersebut maka implementasi CSR merupakan hal yang *mandatory* bagi BUMN. Peran sosial tersebut diterapkan dalam program Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Terkait dengan hal tersebut Barata telah mengaplikasi program PKBL secara terprogram dan terstruktur serta secara khusus menjadikan satu aktifitas Bina Lingkungan dengan program CSR.

MAKSUD DAN TUJUAN

Latar belakang diterapkannya *Corporate Social Responsibility*

PT Barata Indonesia (Persero) ("Barata") as a business entity is required to comply with good corporate governance principles in conducting its business activities. To be able to support operations smoothness and security, the Company based on the Law on Limited Liability Companies is required to conduct corporate and environmental social responsibility activities or Corporate Social Responsibility (CSR). To make CSR not only as a fulfillment of the Company's obligation but can be an activity which has impacts on the community, then PT Barata Indonesia (Persero) CSR shall be implemented in a well-integrated manner.

Regarding Good Corporate Governance (GCG) which is implemented Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness principles, there is a link between GCG and CSR. Responsibility principle is implemented in CSR where there is a significant emphasis given to the Company's stakeholders due to its activities often has external impacts that shall be borne by stakeholders. Therefore, CSR, which is one of GCG aspects implementation, is the manifestation of the Company's responsibility towards the community and its environment as well as the Company's efforts to fulfill ethical business demands.

On the other hand, Barata as a State-Owned Enterprise (BUMN) which is one of the economic actors in the national economy and has a strategic role as the executor of public services. At the same time, SOEs are required to function as national development tools and act as social institutions. These two functions, CSR implementation is a mandatory for SOEs. This social role is implemented in Partnership and Community Development Program (PKBL) programs. Regarding this, Barata has implemented programmed and structured PKBL programs which specifically merged Community Development activity with CSR programs.

Purpose And Objectives

PT Barata Indonesia (Persero) Corporate Social Responsibility

(CSR) oleh PT Barata Indonesia (Persero) ("Barata") diantaranya adalah bahwa :

1. Perusahaan menyadari bahwa Perusahaan adalah bagian dari masyarakat, karenanya Perusahaan berkepentingan memperhatikan kebutuhan masyarakat, khususnya lingkungan disekitar domisili Perusahaan.
2. Perusahaan perlu menjaga kondisi simbiosis mutualisma dengan lingkungan untuk mendapatkan dukungan ijin beroperasi dari masyarakat sekitar. Kontribusi positif masyarakat secara tidak langsung bisa menanamkan citra dan performa yang baik Perusahaan.
3. Perusahaan perlu meredam potensi konflik yang berasal dari dampak operasional Perusahaan ataupun yang disebabkan oleh kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat sekitar dan komponen Perusahaan.

Dilatarbelakangi hal-hal diatas, Perusahaan kemudian menetapkan program CSR dan memasukan rencana pelaksanaannya sebagai salah satu unsur Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dimintakan persetujuan kepada Pemegang Saham. Pemantapan program CSR dalam RKAP menunjukkan niat baik Perusahaan dalam ikut membangun lingkungan sekitar di berbagai sektor sebagai bentuk partisipasi Perusahaan dalam pembangunan daerah pada khususnya.

Program CSR ini ditujukan bagi masyarakat / instansi / lembaga pada radius operandi yang telah ditentukan Perusahaan melalui mekanisme pengajuan rencana kerja (proposal) dan evaluasi sesuai kriteria tertentu yang ditentukan oleh Perusahaan.

(CSR) implementation background is as follows:

1. *The Company realizes that it is part of the community, therefore the Company has an interest in paying attention to the community needs, especially in the Company's surrounding community.*
2. *The Company needs to maintain mutual symbiosis with the environment to get permission to operate from the surrounding community. Community's positive contribution can indirectly instill the Company's good image and performance.*
3. *The Company needs to reduce the potential conflict from the Company's operational impacts or caused by structural and economic gaps which arise between the surrounding community and the Company's components.*

With the background above, the Company established CSR programs which includes its implementation plan as one of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) elements which then requested for approval from the Shareholders. CSR programs strengthening in the RKAP shows the Company's good intentions in participating in building the surrounding community in various sectors as the Company's participation in regional development in particular.

CSR programs is intended for the community/agency/ institution at the operational radius determined by the Company through the mechanism of proposal submission and evaluation according to certain criteria determined by the Company.

DASAR KEBIJAKAN Policy Basis

DASAR HUKUM

Walaupun secara khusus belum ada dasar hukum secara langsung yang mendasari aktifitas CSR, namun secara tidak langsung terdapat aturan yang dipegang dalam pelaksanaan CSR ini, yaitu :

1. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN.
2. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-BUMN/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance (GCG).
4. Anggaran dasar PT Barata Indonesia (Persero) beserta perubahannya, khususnya yang membahas tentang Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan.

LEGAL BASIS

Although there is no specifically direct legal basis underlying CSR activities, there are indirect rules that are used as basis in implementing CSR, namely:

1. *Law No.19 of 2003 regarding SOEs.*
2. *Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies.*
3. *Minister of SOEs decree No. KEP-117 / M-BUMN / 2002 dated July 31, 2002 regarding Good Corporate Governance (GCG) Practices Implementation.*
4. *PT Barata Indonesia (Persero) Articles of Association and its amendments, especially those discussing the Company's Work Plan & Budget.*

RUANG LINGKUP

Scope

Komitmen Perseroan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial diwujudkan dalam berbagai kegiatan CSR yang meliputi bidang-bidang. Realisasi kegiatan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja fungsi CSR Barata, baik melalui kantor pusat maupun kantor cabang. Dalam aplikasinya, pemberian bantuan dana CSR didasarkan kepada 2 (dua) kelompok kegiatan yaitu CSR terprogram dan CSR tidak terprogram. Penggolongan mengikuti koridor :

1. CSR terprogram adalah kegiatan CSR yang disusun/dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun Perusahaan.
2. CSR tidak terprogram adalah kegiatan CSR yang dilaksanakan berdasarkan proposal yang diajukan oleh pihak ketiga yang tidak sesuai dengan program kerja dan kriteria atau kegiatan dari adanya kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya bencana alam.

Secara garis besar, strategi program CSR Barata diarahkan kepada 5 (lima) pilar utama, yaitu:

1. SOSIAL

Program bidang sosial terwujud dalam bentuk kegiatan gizi balita, penyuluhan kanker serviks, pemeriksaan kesehatan dan donor darah sembako murah, bingkisan lebaran HIPBI, desa Segoromadu dan Tenggulungan serta berbagai kegiatan *sponsorship* dan pemberian bantuan di berbagai wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lainnya.

2. PENDIDIKAN

Program CSR pendidikan diwujudkan dalam bentuk program vokasi, dimana melalui kerjasama dengan beberapa SMK di Jawa Timur ini, perusahaan memfasilitasi alat bantu pendidikan bagi siswa termasuk menerima siswa dalam program magang yang dicanangkan oleh sekolah. Selain itu perseroan juga memberikan bantuan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan baik SMA/ sederajat serta tingkat Universitas.

3. AGAMA

Program CSR agama diwujudkan dalam bentuk kegiatan Barata mengaji, kegiatan ramadhan bersama pesantren dan panti asuhan serta bantuan pembangunan sarana ibadah.

4. TANGGAP BENCANA

Program CSR tanggap bencana diwujudkan dalam bentuk bantuan Bencana Gempa Nusa Tenggara Barat serta bantuan bencana tsunami Banten.

The Company's commitment in implementing Social Responsibility is realized in CSR activities which covering various scopes. Realization of activities conducted by all Barata Indonesia's CSR work units' functions, both through the head office and branch offices. In its implementation, the provision of CSR funds is based on 2 (two) groups of activities namely programmed and non-programmed CSR. The classification follows these corridors:

1. *Programmed CSR is CSR activities compiled/implemented based on work plans that have been prepared by the Company.*
2. *Unprogrammed CSR is CSR activities that are implemented based on proposals submitted by third parties that are not in accordance with the work program and criteria or activities of events that cannot be predicted beforehand, such as natural disasters.*

Broadly speaking, Barata's CSR program strategy is directed to the 5 (limat) main pillars, namely:

1. Social

Social programs are realized in the form of toddler nutrition activities, affordable basic commodities, HIPBI Eid parcels in Segoromadu and Tenggulungan villages as well as various sponsorship and assistance activities in various regions of East Java, Central Java, and others.

2. Education

CSR education program is realized in the form of vocational programs, through collaboration with several vocational schools in East Java, the Company facilitates educational aids for students including accepting students in the apprenticeship program launched by the school. In addition the Company also provides educational assistance at various levels of education both high school / its equivalent and university level.

3. Religious

Religious CSR program is realized in the form of Koranic Barata activities, Ramadhan activities with Islamic boarding schools and orphanages and religious facilities.

4. Disaster Response

Disaster relief CSR program is realized in the form of West Nusa Tenggara Earthquake Disaster assistance and Banten tsunami disaster assistance.

5. LINGKUNGAN

Program CSR lingkungan berkesinambungan telah dicanangkan dalam bentuk tanam pohon mangrove di pesisir utara Gresik sejak tahun 2015, sarana air bersih serta kegiatan untuk menjaga kesehatan lingkungan.

5. Environment

Sustainable environmental CSR programs have been launched in the form of mangrove trees planting on the north coast of Gresik since 2015, clean water facilities and activities to maintain environmental health.

ANGGARAN DAN REALISASI Cost Of CSR Program

SERAPAN DANA CSR

Serapan dana CSR pada tahun 2018 sebesar Rp 486.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah)

CSR Funds Absorption

CSR funds absorption in 2018 was Rp 486,000,000, - (Four Hundred Eighty Six Million Rupiah)



2018 CSR BUDGETS RP 500 MILLIONS 2018 REALIZATION RP 486 MILLIONS/97.2%

Adapun pembagian dana tersebut dikelompokkan sebagai berikut :

The distribution of funds is categorized as follows:

PROGRAM	NOMINAL	PERSENTASE Percentage
SOSIAL SOCIAL	254,755,000	52,4%
PENDIDIKAN EDUCATION	90,734,000	18,6%
AGAMA RELIGIOUS	25,000,000	5,2%
BUMN HADIR UNTUK NEGERI SOES FOR THE COUNTRY	0	0%
BENCANA ALAM NATURAL DISASTER	100,000,000	20,6%
LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL	15,511,000	3,2%
TOTAL	486,000,000	100%

PENGUKURAN

Pengukuran keberhasilan program CSR Barata masih cukup sederhana yaitu melalui besaran serapan dana CSR yang dianggarkan Perusahaan pada setiap tahun berjalan.

Adapun penentuan ukuran penyerapan dana tersebut dikelompokkan sebagai berikut :

Measurement

Barata Indonesia's CSR programs success measurement still using simple method, namely through CSR fund absorption that the Company budgeted every year.

Funds absorption measurement determination grouped as follows:

No.	Besarnya Serapan Dana Tahun Berjalan <i>Current Year Funds Absorption</i>	Ukuran CSR <i>CSR Assessment</i>
1.	Serapan Dana > 95% <i>Fund Absorption > 95%</i>	Baik Sekali (BS) <i>Very Good</i>
2.	95% ≤ Serapan Dana ≤ 85% <i>95% ≤ Absorption of Funds ≤ 85%</i>	Baik <i>Good</i>
3.	Serapan Dana < 85% <i><85% Fund Absorption</i>	Cukup <i>Satisfactory</i>

Untuk tahun 2018 dana CSR yang terserap adalah sebesar 97 % atau RP 485.000.000,00 terhadap anggaran Rp 500.000.000,00 dan masuk ke dalam kategori "Baik Sekali".

In 2018 the absorbed CSR funds was 97% or Rp 485,000,000.00 against Rp 500,000,000.00 budget which fall into "Very Good" category.

CAPAIAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2018

2018 Corporate Social Responsibility Achievement

No.	PROGRAM <i>Program</i>	ANGGARAN <i>Budget</i>	Realisasi <i>Realization</i>	Keterangan <i>Description</i>
1.	Sosial <i>Social</i>	48%	51%	
2.	Pendidikan <i>Education</i>	15%	18,1%	
3.	Agama <i>Religious</i>	14%	5%	
4.	Tanggap Bencana <i>Disaster Response</i>	10%	20%	
5.	Lingkungan <i>Environment</i>	13%	3,1%	
		100%	97,2%	

**DOKUMENTASI KEGIATAN CSR PT
BARATA INDONESIA (PERSERO) TAHUN
2018 :**

**DOKUMENTASI KEGIATAN CSR PT BARATA
INDONESIA (PERSERO) TAHUN 2018 :**



Barata Mengajar
Barata Lecturing



Bedah Rumah
House Renovation



Bakti Sosial Panti Asuhan
Orphanage Social Service



Donor Darah
Blood Donor



Bingkisan Lebaran Warga
Eid's Parcels



Bingkisan Lebaran HIPBI
HIPBI Eid's Parcel



Tanam Pohon
Trees Planting



Bantuan Tandon Air Desa Tenggulunan
Assistance for Tenggulunan Village Water Reservoir

PROGRAM KEMITRAAN & BINA LINGKUNGAN BARATA INDONESIA

Barata Indonesia Partnership & Development Program

PROGRAM KEMITRAAN :

Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, dan pemberdayaan masyarakat, PT Barata Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara, turut berperan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Negara BUMN PER-02/MBU/7/2017, tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

PT Barata Indonesia (Persero) sebagai BUMN Pembina telah melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sejak tahun 2011 sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap usaha kecil menengah dan kondisi sosial dengan memanfaatkan sebagian laba bersihnya untuk dikelola oleh Tim Pengelolaan PKBL.

Jumlah penyaluran dana Program Kemitraan pada tahun 2018 sebesar Rp100.000.000. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2018 PT Barata Indonesia (Persero) telah memiliki 15 (lima belas) Mitra Binaan yang tersebar di wilayah Jawa Timur dengan jumlah total piutang sebesar Rp. 96.658.914,- (Sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah). Pada periode ini dana lebih dikonsentrasikan pada mitra binaan sektor perdagangan dan jasa. Mitra binaan Barata tersebar di Provinsi Jawa Timur yaitu Lamongan, Gresik, Surabaya, Malang dan Bangkalan. Bidang usaha Mitra Binaan bervariasi antara lain Sektor Industri, Perdagangan, Perikanan, Usaha Jasa dan Usaha lain. Dari jumlah mitra binaan tersebut semua tergolong pinjaman lancar.

Tingkat Efektivitas Penyaluran Dana dan Kolektabilitas Pinjaman

Partnership Program:

As an effort to encourage people economic growth, and community empowerment, PT Barata Indonesia (Persero) as a State-Owned Enterprise, plays an important role through the Partnership and Community Development Program (PKBL), as mandated in the Minister of State Owned Enterprises Decree No.PER-02 / MBU / 7 / 2017, July 5, 2017 regarding the Second Amendment to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09 / MBU / 07/2015 regarding Partnership Program and the Environmental Development Program of State-Owned Enterprises.

PT Barata Indonesia (Persero) as a Governing SOE has been implemented Partnership and Community Development Program since 2011 as a form of the Company's concern for small and medium businesses as well as social conditions by utilizing part of its net-profit to be managed by the PKBL Management Team.

Total disbursement of Partnership Program funds in 2018 was Rp 100,000,000. Up to 4th Quarter of 2018, PT Barata Indonesia (Persero) had 15 (fifteen) Fostered Partners spread across East Java with a total receivable amounted to Rp. 96,658,914, - (ninety six million six hundred fifty eight thousand nine hundred fourteen rupiah). During this period funds disbursement were more concentrated in the trade partners and the service sectors. Barata fostered partners are spread in East Java Province, such as Lamongan, Gresik, Surabaya, Malang and Bangkalan. Business fields of the Fostered Partners were vary, among others, Industrial, Trade, Fisheries, Services and other Businesses. All of the fostered partners are classified as current loans.

Fund Disbursement Effectiveness level and Loan Collectibility

Tingkat Efektivitas Penyaluran Dana dan Kolektabilitas Pinjaman

Level of Effectiveness of Fund Distribution and Loan Collectibility

TINGKATAN KOLEKTIBILITAS PINJAMAN *Loan Collectability Level*

$$\frac{\text{Rata-rata tertimbang kolek. Pinjaman} \\ \text{Average Loan Collectibility}}{\text{Jumlah pinjaman yang disalurkan} \\ \text{Total of disbursed loans}} \times 100\%$$

$$\frac{96.658.914}{100.000.000} \times 100\%$$

$$= 96,66\%$$

Skor | *Score* : 3

EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA : *Funds Disbursement effectivity :*

$$\frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan} \\ \text{Total of disbursed funds}}{\text{Jumlah dana yang tersedia} \\ \text{Available funds}} \times 100\%$$

$$\frac{100.000.000}{101.335.637} \times 100\%$$

$$= 98,68\%$$

Skor | *Score*: 3

Penyaluran Dana Program Kemitraan Kepada Mitra Binaan Baru Tahun 2018

Distribution of Partnership Program Funds to New Fostered Partners in 2018

KOTA PENYALURAN <i>Disbursement Cities</i>	SEKTOR USAHA <i>Business Scope</i>	JUMLAH UNIT MITRA BINAAN <i>Total of Fostered Partners</i>	(Rp) (million)
Lamongan	Perdagangan <i>Trading</i>	1	5.000.000
Gresik	Perdagangan <i>Trading</i>	1	10.000.000
Gresik	Perikanan <i>Fishery</i>	1	15.000.000
Gresik	Jasa <i>Services</i>	1	7.500.000
Malang	Perdagangan <i>Trading</i>	1	15.000.000
Malang	Jasa <i>Services</i>	1	15.000.000
Surabaya	Perdagangan <i>Trading</i>	4	32.500.000
TOTAL <i>Total</i>		10	100.000.000

BINA LINGKUNGAN :

Sesuai Rencana Kerja dan Anggaran PKBL PT Barata Indonesia (Persero) tahun 2018 tidak ada dana yang dianggarkan untuk Program Bina Lingkungan, dan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan disalurkan melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Environmental Development:

In accordance with PT Barata Indonesia (Persero) 's PKBL Work Plan and Budget in 2018 no funds were budgeted for the Envirônmental Development Program, and for social activities disbursed through Corporate Social Responsibility (CSR).

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Corporate Social Responsibility In The Employment, Occupational Health and Safety Field

CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan sebuah konsep dimana telah menjadi kewajiban perusahaan untuk peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal di perusahaan tersebut berdomisili dan atau menjalankan aktivitas operasionalnya. Menyadari hal tersebut, kami turut berpartisipasi aktif melaksanakan CSR dalam bentuk terlaksananya 2 kegiatan CSR yang telah kami lakukan dalam bidang lingkungan dan kesehatan. Adapun program yang telah kami lakukan dalam bidang lingkungan adalah penanaman bibit pohon mangrove dan cemara di Desa Ujung Pangkah, Gresik dalam satu rangkaian memperingati HUT Barata Indonesia dan juga sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kelestarian lingkungan alam. Dalam kegiatan tersebut kami bekerja sama dengan masyarakat dan komunitas penggiat lingkungan setempat. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Kepala Desa Ujung Pangkah dan mendapat respon sangat positif pada Barata yang setiap tahun secara rutin mengadakan CSR penanaman mangrove di Desa tersebut.

Pada Bidang Kesehatan, kami telah melakukan kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional. PT Barata Indonesia bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Gresik dalam memfasilitasi kegiatan ini sebagai wujud partisipasi aktif dari perusahaan untuk menolong sesama dengan memberikan tetesan darah bagi kehidupan orang lain yang membutuhkannya. Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari Perusahaan kepada perwakilan PMI Gresik.

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3LH)

PT Barata Indonesia (Persero) bertekad penuh dalam mengutamakan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai Undang-Undang, Peraturan Dan Norma yang berlaku di Bidang K3. Terdapat 3 pokok tujuan K3 yang hendak dicapai oleh Perusahaan yakni tercapainya Zero Accident (tidak terjadi kecelakaan kerja) di lingkungan perusahaan, mencegah timbulnya penyakit akibat kerja (PAK) serta tercapainya tempat kerja yang aman, efisien

CSR (Corporate Social Responsibility) is a concept that became the Company's obligation to give concern regarding local community's progress and welfare in the Company domicile and/or conduct its operational activities. Realizing this, we actively participated in implementing CSR in the form of 2 CSR activities implementation that we have implemented in environment and health fields. The programs that we have been conducted in the environmental field is planting mangrove and cypress trees in Ujung Pangkah Village, Gresik in a series to commemorate the Barata Indonesia Anniversary and also as a form of corporate concern for the preservation of the natural environment. In this activity we collaborated with the community and local environmental activists. This activity was also attended by the Head of Ujung Pangkah Village and received a very positive response to Barata who annually held a CSR mangrove planting in the Village.

In the Health Sector, we have implemented blood donation activities to commemorate National Occupational Health and Safety Month (OHS). PT Barata Indonesia in collaboration with the Indonesian Red Cross Gresik facilitated this activity as a manifestation of the Company's active participation in helping others by donating blood to the save lives of people who need them. This activity ended with the handover of souvenirs from the Company to PMI Gresik representatives.

Safety, Work Health And Environment (K3LH)

PT Barata Indonesia (Persero) is fully committed to prioritizing Occupational Safety and Health in accordance with the prevailing Law, Regulations and Norms in the OHS Field. There are 3 main OHS objectives to be achieved by the Company, namely the achievement of Zero Accident in the Company's environment, preventing work-related illnesses (PAK) and achieving a safe, efficient and productive workplace. Not only related to OHS, PT Barata Indonesia is also determined

dan produktif. Tidak hanya terkait K3 saja, PT Barata Indonesia juga bertekad selalu berupaya menjaga lingkungan yang sehat dengan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan meminimalkan dampak lingkungan yang negatif. Dalam perkembangannya, komitmen tersebut semakin diperkuat oleh manajemen dengan adanya perubahan struktur organisasi yang sebelumnya posisi K3LH berada pada naungan dan bertanggungjawab kepada Biro Enjiniring, Mutu dan K3LH, kini berubah menjadi Biro yang independent dan bertanggung jawab langsung kepada direktur (termuat dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : K 19 044). “Never Compromising On Quality and Safety” adalah ikrar sebagai bentuk nyata perhatian pihak manajemen terhadap pentingnya K3 bagi perusahaan.

Sejalan dengan kebijakan dan komitmen kuat perusahaan terkait K3, Perusahaan mengikutsertakan seluruh personil untuk berperan aktif dalam partisipasi dan konsultasi mengenai penerapan K3 di tempat kerja. Partisipasi secara internal yang dilakukan adalah terlaksananya rapat BK3 (Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang melibatkan jajaran manajemen terkait pembahasan isu K3 yang berada di lingkungan perusahaan serta keikutsertaan seluruh elemen pekerja dalam mengidentifikasi bahaya dan memberikan rekomendasi pengendaliannya sebagai upaya menanamkan budaya K3 secara personal. Partisipasi eksternal yang telah dilakukan terwujud dalam pemenuhan terhadap Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan standar OHSAS 18001 : 2007, Sistem Manajemen Lingkungan dengan standar ISO 14001 : 2015, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) dengan peringkat biru serta penghargaan instansi lain seperti meraih peringkat ke 3 Best HSE Performance (National) dari PT Pertamina Refinery Unit 6.

to always strive to maintain a healthy environment by preventing environmental pollution and minimizing negative environmental impacts. In its development, this commitment was further strengthened by management with a change in organizational structure that previously K3LH position was under and responsible to Engineering, Quality and K3LH Bureau, now changed into an independent Bureau and directly responsible to directors (stipulated in Directors’ Decree No. K 19 044). “Never Compromising On Quality and Safety” is the Company’s pledge as management’s concern to the importance of OHS in the Company.

In line with the Company’s strong policy and commitment regarding OHS, the Company includes all personnel to play an active role in participation and consultation regarding the OHS implementation in the workplace. The internal participation conducted were BK3 (Occupational Safety and Health Agency) and P2K3 (Occupational Safety and Health Development Committee) meetings implementation which involved management regarding OHS issues discussion within the Company and the participation of all workers in identifying hazards and providing recommendations control as an effort to foster OHS culture personally. External participation has been realized in fulfilling Occupational Safety and Health Management System with OHSAS 18001: 2007 standard, Environmental Management System with ISO 14001: 2015 standards, the Company Performance Rating Program in Environmental Management (PROPER) with blue ratings and other agency awards such as won the 3rd place for Best HSE Performance (National) from PT Pertamina Refinery Unit 6.

DOKUMENTASI
Documantation

1. Kegiatan Tanam Pohon



2. Kegiatan Donor Darah



3. Rapat HSE



RAPAT BK3 PIA



RAPAT BK3 PIB



RAPAT BK3
FOUNDRY

4. Deklarasi Komitmen “Never Compromising On Quality and Safety”



KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) *Occupational Health And Safety (K3)*

KUESIONER KATEGORI ORGANISASI MENENGAH DAN BESAR BARANG Bidang QHSE.

Questionnaire Category Organization Of Medium And Large Qhse Field.

1. Bagaimana organisasi menetapkan pendekatan dan metode untuk mewujudkan lingkungan kerja (kesehatan, keselamatan, keamanan, ergonomik) yang kondusif termasuk tanggap darurat, untuk meningkatkan produktivitas, kepuasan karyawan dan pelanggan?

Penjelasan:

Organisasi diminta untuk menjelaskan program pengelolaan lingkungan kerja dengan memperhatikan aspek regulasi dan standar terkait, yang dapat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Organisasi juga diminta untuk menguraikan sistem penanggulangan kondisi darurat, dengan memperhatikan aspek regulasi dan standar yang relevan.

2. Bagaimana organisasi melakukan secara konsisten penerapan metode untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif?

Penjelasan:

Organisasi diminta untuk menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan penerapan metode yang digunakan secara konsisten dalam mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, dengan memperhatikan aspek regulasi dan standar yang relevan.

3. Bagaimana pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut pendekatan dan metode yang dikembangkan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif?

Penjelasan:

Organisasi diminta untuk menjelaskan proses pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut pendekatan dan metode yang dikembangkan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan karyawan dan pelanggan.

4. Bagaimana organisasi melakukan penyelarasan hasil evaluasi pelaksanaan program pengelolaan lingkungan kerja yang kondusif?

Penjelasan:

Organisasi diminta untuk menjelaskan proses penyelarasan hasil evaluasi mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, terhadap pengelolaan proses produksi.

1. How does the organization establish approaches and methods to create a conducive work environment (health, safety, security, ergonomics) including emergency response, to increase productivity, employee and customer satisfaction?

Explanation:

The organization is asked to explain occupational environment management program by considering regulatory aspects and relevant standards, which may affect products quality. The organization is also asked to describe emergency response systems, by considering relevant regulatory and standard aspects.

2. How does the organization consistently implement methods to create a conducive occupational environment?

Explanation:

The Organization is asked to explain how the process of implementing the method used consistently in creating a conducive occupational environment, by considering relevant regulatory aspects and standards.

3. How do monitoring, evaluation and follow-up approaches and methods developed in creating a conducive occupational environment?

Explanation:

The Organization is asked to explain monitoring, evaluation and follow-up approaches process and methods developed in creating a conducive occupational environment, to increase productivity, employee and customer satisfaction.

4. How does the organization aligning the results of evaluating conducive occupational environment management program implementation?

Explanation:

The Organization is asked to explain aligning process of results evaluation to create a conducive occupational environment, to the management of the production process.

5. Bagaimana organisasi melakukan pendekatan dan metode pengembangan sistem operasi untuk memenuhi seluruh persyaratan pemegang saham, SNI pelanggan, regulasi, masyarakat, dan pasar?

Penjelasan:

Organisasi diminta untuk menjelaskan tahapan pendekatan dan metode pengembangan sistem operasi untuk memenuhi persyaratan pemegang saham, pelanggan, regulasi, masyarakat, dan pasar, dan jika perlu mempertimbangkan hasil-hasil inovasi serta hasil pembelajaran organisasi

6. Bagaimana organisasi memanfaatkan secara konsisten standar/SNI yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem operasi?

Penjelasan:

Organisasi diminta untuk menjelaskan standar/SNI yang dimanfaatkan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem operasi sehingga dapat memenuhi persyaratan produk.

7. Bagaimana organisasi melakukan penyelarasan hasil evaluasi pelaksanaan pendekatan dan metode pengembangan sistem operasi?

Penjelasan:

Organisasi diminta untuk menjelaskan proses penyelarasan hasil evaluasi pelaksanaan pendekatan dan metode pengembangan sistem operasi dan seluruh sistem operasi untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan standardisasi/SNI.

8. Bagaimana organisasi melakukan secara konsisten penerapan metode dan penerapan persyaratan SNI serta regulasi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa?

Penjelasan:

Organisasi diminta untuk menjelaskan penerapan persyaratan SNI dan peraturan perundangan yang berlaku dalam proses pengadaan barang dan jasa secara konsisten.

9. Bagaimana organisasi melakukan penyelarasan hasil evaluasi pelaksanaan program edukasi pemasok terkait dengan penggunaan standar/SNI?

Penjelasan:

Organisasi diminta untuk menjelaskan proses penyelarasan hasil evaluasi pelaksanaan program edukasi/awareness standardisasi kepada pemasok

5. How does the organization take the approach and method of operating system development to fulfill all the requirements of shareholders, customers, regulations, society, and markets?

Explanation:

The Organization is asked to explain approach stages and method of developing the operating system to meet shareholders, customers, regulations, society, and markets requirements, and if necessary consider the results of innovation and organizational learning outcomes

6. How does the organization consistently use the benefit of standards/SNIs to develop and implement operating systems?

Explanation:

The Organization is asked to explain standards/ SNIs that are used to develop and implement operating systems to meet product requirements.

7. How does the organization synchronize evaluating results of the operating system development approaches and methods implementation?

Explanation:

The Organization is asked to explain the process of aligning the results of evaluating the implementation of operating system development approaches and methods and the entire operating system to meet customer requirements and standardization / SNI.

8. How does the Organization consistently implement SNI methods, requirements and regulations in goods and services procurement contracts?

Explanation:

The Organization is asked to explain SNI requirements and the prevailing laws and regulations implementation in the process of procurement of goods and services consistently.

9. How does the Organization align evaluation results of supplier education programs implementation related to usage of standards / SNI?

Explanation:

The Organization is asked to explain the process of aligning evaluation results of standardization awareness programs of implementation to suppliers

KESIAGAAN DAN PENANGANAN KEADAAN DARURAT DI PT BARATA INDONESIA

Setiap industri tentunya tidak dapat terhindarkan dari segala bentuk risiko bahaya, baik disebabkan bencana alam atau kegiatan manusia. Untuk itu, dalam rangka meminimalisasi kerugian baik materi maupun nonmateri, maka diperlukan adanya sistem konkret sebagai bentuk persiapan awal dalam rangka menangani keadaan darurat.

PT Barata Indonesia telah memiliki mekanisme penanganan serta tim tanggap darurat untuk keadaan darurat secara umum dan khusus. Mekanisme keadaan darurat secara umum yakni apabila terjadi kasus kebakaran, huru-hara serta bencana alam dan secara khusus apabila terkait lingkungan dalam hal pengelolaan limbah B3. Mekanisme penanganan keadaan darurat tersebut telah disosialisasikan agar diketahui oleh seluruh pekerja.

Berikut ini adalah mekanisme apabila terjadi keadaan darurat di PT Barata Indonesia :

Setiap pekerja yang menemukan suatu kondisi bahaya dan memiliki potensi timbulnya kondisi darurat seperti api kecil, kebocoran gas atau tumpahan bahan maka harus melaporkannya pada penanggung jawab area (*supervisor*). Penanggung jawab area akan menentukan apakah kondisi tersebut masih dapat ditangani secara internal atau tidak, namun apabila tidak bisa maka segera menghidupkan alarm peringatan dan melaporkannya kepada koordinator umum tanggap darurat. Koordinator lapangan akan memimpin kegiatan penanggulangan dan mengkoordinir tim tanggap darurat. Selanjutnya pihak koordinator komunikasi akan menghubungi pihak eksternal (dinas pemadam, polisi) apabila diperlukan. Bilamana alarm peringatan keadaan darurat berbunyi maka setiap pekerja berhenti melakukan aktifitasnya untuk mengikuti komando dari tim evakuasi menuju ke titik berkumpul dan sebelum meninggalkan area kerja, tiap pimpinan lembaga terkait memastikan semua peralatan atau sumber energi dimatikan.

Pada tempat berkumpul (*assembly point*), petugas evakuasi akan menghitung jumlah karyawan pada masing-masing lembaganya dan apabila kurang maka akan segera diinformasikan kepada koordinator umum tanggap darurat. Koordinator umum melaporkan kejadian tersebut kepada direksi dan apabila sudah dinyatakan aman maka seluruh pekerja dapat melanjutkan pekerjaan pada bagiannya masing-masing.

Emergency And Handling Of Emergency In Pt Barata Indonesia

Each industries are certainly inevitable from all forms of hazard risk, whether caused by natural disasters or human activities. For this reason, to minimize material and non-material losses, a concrete system is needed as a form of initial preparation in dealing with emergencies.

PT Barata Indonesia already has an emergency response mechanism and team for general and special emergencies. Emergency mechanism in general, such as in the case of fire, riots and natural disasters and specifically related to the environment in B3 waste management. The emergency response mechanism has been socialized to be known by all workers.

The following are the mechanisms in the event of an emergency at PT Barata Indonesia:

All workers who encounters a hazard condition which has potential for emergencies such as a small fire, gas leak or material spill shall report it to the area supervisor, area supervisor will determine whether the condition can still be handled internally or not, but if it cannot, it shall immediately turn on the warning alarm and report it to the emergency response general coordinator. The field coordinator will lead the response activities and coordinate the emergency response team. Furthermore, the communication coordinator will contact external party (fire department, police) if necessary. When an emergency warning alarm sounds, all workers stops its activities to follow the evacuation team command to the assembly point and before leaving work area, each head of the relevant units ensures that all equipment or energy sources are turned off.

At the assembly point, evacuation officer will count the number of employees in each units and if it still incomplete it will be immediately informed to the emergency response general coordinator. The general coordinator reports the incident to the Board of Directors and if it has been declared safe then all workers may continue the work in its respective units.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP PELANGGAN

Corporate Social Responsibility To Customer

Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial ketika menghasilkan produk dan menjual produknya. Konsekuensi perusahaan terhadap hasil produksinya adalah menjamin keselamatan pelanggan, dan memberi peringatan yang baik untuk mencegah efek samping terhadap keselamatan pelanggan saat menggunakan produk tersebut. Sementara dalam lingkup penjualan Perusahaan bertanggung jawab untuk menyampaikan harga, mempromosikan produk dan melakukan survey terhadap kepuasan pelanggan. Untuk mendapatkan umpan balik atas kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan purna jual Perusahaan memiliki *Standard Operation Procedure* dalam hal Pengukuran Kepuasan Pelanggan, Analisa dan Tindakan Perbaikan serta Pelayanan Perbaikan dalam Masa Garansi. Berbasis prosedur ini Perusahaan dapat menentukan seberapa besar kepuasan pelanggan terhadap produk-produk yang dihasilkan sekaligus menilai tingkat keterikatan pelanggan terhadap Perusahaan apabila dibandingkan dengan perusahaan serupa yang menjadi pesaing.

Di luar itu, Perusahaan memberi sarana kepada Pelanggan dalam menyampaikan masukan ataupun komplain secara langsung melalui media website, telepon, faksimili dan email. Seluruh masukan dan komplain ini akan diolah oleh Perusahaan untuk meminimalisir timbulnya cacat produk dan lambatnya pelayanan atas komplain pelanggan.

Dalam hal tanggung jawab keselamatan di lingkungan pabrik, Perusahaan mulai menerapkan peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh pelanggan tidak terkecuali, yaitu dengan mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa helm, rompi dan sepatu safety. Hal ini dilakukan semata-mata demi memenuhi rasa aman pelanggan di lingkungan pabrik.

Tanggung jawab sosial terhadap Pelanggan juga dilakukan oleh Perusahaan dengan mendukung kegiatan-kegiatan perusahaan Pelanggan baik kegiatan formal maupun non formal.

The Company has social responsibility when producing products and selling its products. The company's consequences for its products are to guarantee customer safety, and give a good warning to prevent side effects on customer safety when using these products. While in the sales scope the Company is responsible for conveying prices, promoting products and conducting surveys on customer satisfaction. To get feedback on customer satisfaction with products and after-sales services, the Company has a Standard Operation Procedure in Customer Satisfaction Measurement, Analysis and Actions of Repair and Service Repairs in Warranty Period. Based on this procedure the Company may determine customer satisfaction level on the products while assessing customers' engagement level with the Company if compared to similar competitors companies.

Beyond that, the Company provides facilities for customers in submitting input or complaints directly through the website, telephone, facsimile and e-mail media. All of these inputs and complaints will be processed by the Company to minimize the number of product defects and slow service of customer complaints.

In safety responsibilities in the factory environment, the Company begins to implement regulations that shall be obeyed by all customers, including wearing personal protective equipment (PPE) such as helmets, vests and safety shoes. This is solely to fulfill the customer's sense of security in the factory environment.

Corporate social responsibility is also conducted by the Company by supporting the Company's customers activities, both formal and non-formal activities.





108

**LAPORAN
KEUANGAN**
Financial Reports

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)

LAPORAN KEUANGAN/
FINANCIAL STATEMENTS

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT/
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND FOR THE YEAR THEN ENDED

BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

barata indonesia

PT. BARATA INDONESIA (Persero)

Jl. Veteran 241 Gresik, East Java – Indonesia

Telp. +62 31 3990555, Fax +62 31 3990666, info@barata.com, www.barata.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017

PT. BARATA INDONESIA (Persero)

DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2018 AND DECEMBER 31, 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018 AND 2017

PT. BARATA INDONESIA (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini / We, the undersigned :

1. Nama / Name	: Oksarlidady Arifin
Alamat Kantor / Office address	: Jl. Veteran No. 241 RT 02 RW 01 Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik 61123
Nomor Telepon / Telephone Number	: 031 - 3990555
Jabatan / Position	: Direktur Utama / President Director
2. Nama / Name	: Yoyok Hadi Satriyono
Alamat Kantor / Office address	: Jl. Veteran No. 241 rt 02 rw 01 Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik 61123
Nomor Telepon / Telephone Number	: 031 - 3990555
Jabatan / Position	: Direktur Keuangan dan Human Capital / Finance and Human Capital Director

Menyatakan bahwa :

Declare that :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan.	1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company financial statements.
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.	2. The Company financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian of Financial Accounting Standart.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar.	3. a. All information in the Company financial statements are complete and correct.
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.	b. The Company financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam perusahaan.	4. We are responsible for the company internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi / For and on behalf of the Board of Director

Jakarta, 25 Februari 2019 / February 25, 2019

OKSARLIDADY ARIFIN
Direktur Utama / President Director



YOYOK HADI SATRIYONO
Direktur Keuangan dan Human Capital / Finance and Human Capital Director

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

Halaman
Pages

SURAT PERNYATAAN DIREKSI / *DIRECTOR'S STATEMENT LETTER*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDENT / <i>INDEPENDENT AUDITORS' REPORT</i>	1
LAPORAN KEUANGAN / <i>FINANCIAL STATEMENTS</i>	3
• Laporan Posisi Keuangan / <i>Statements of Financial Position</i>	4
• Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain / <i>Statements Of Profit or Loss and Others Comprehensive Income</i>	6
• Laporan Perubahan Ekuitas / <i>Statements of Changes in Equities</i>	7
• Laporan Arus Kas / <i>Statements of Cash Flows</i>	8
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN / <i>NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS</i>	10

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
*INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***



Hadori Sugiarto Adi & Rekan

Certified Public Accountants

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00022/2.0768/AU.1/04/1611-1/1/II-2019

Kepada:
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Barata Indonesia (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Barata Indonesia (Persero) ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri atas laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar atas laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan kepatuhan terhadap kontrak perjanjian, undang-undang dan peraturan sesuai kegiatan usaha.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No.: 00022/2.0768/AU.1/04/1611-1/1/II-2019

The Shareholders, Board of Commissioners
and Directors
PT Barata Indonesia (Persero)

We have audited the accompanying financial statements of PT Barata Indonesia (Persero) ("the Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2018, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and its compliance to contractual agreements, laws and regulations applicable to the businesses.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.

KANTOR PUSAT JAKARTA

Wisma Staco, 3rd Floor, Suite D, Jl. Casablanca Kav. 18, Jakarta 12870, Indonesia
Tel.: +62 21 8317046 - 49, 83701104, Fax.: +62 21 8317050 Email: hlbjakarta@hadori.co.id
HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan is a member of International, A world-wide organization of accounting firms and business advisers

Nomor Izin Usaha KAP: KEP-116/KM.1/2009



Hadori Sugiarto Adi & Rekan

Certified Public Accountants

Laporan No. 00022/2.0768/AU.1/04/1611-1/1/II-2019

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Dalam melakukan penilaian atas risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Barata Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan keuangan PT Barata Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan opini tanpa modifikasi.

Report No.: 00022/2.0768/AU.1/04/1611-1/1/II-2019

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amount and disclosure in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

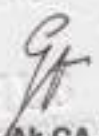
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Barata Indonesia (Persero) as of December 31, 2018, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

The financial statements of PT Barata Indonesia (Persero) as of December 31, 2017 and for the year then ended were audited by other independent auditor with unmodified opinion.


Gunarto Ak, CA, CPA

Izin Akuntan Publik / Public Accountant License AP. 1611

25 Februari 2019 / February 25, 2019

LAPORAN KEUANGAN /
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

	Catatan/ Notes	2018	2017 *)	2016 *)	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4	757.289.796.966	1.006.644.602.876	599.630.268.646	Cash and cash equivalent
Piutang Usaha - setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai piutang pada : Pihak berelasi Pihak ketiga	5	171.504.218.053 140.743.540.576	162.192.953.155 96.811.552.603	77.870.643.119 105.660.647.520	Trade receivables - net of accumulated allowance for impairment of : Related parties Third parties
Piutang Retensi - setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai piutang pada : Pihak berelasi Pihak ketiga	6	58.236.669.817 6.442.960.102	59.351.091.086 6.747.391.444	2.094.575.700 2.843.359.433	Retention receivables - net of accumulated allowance for impairment of : Related parties Third parties
Tagihan Bruto Pemberi Kerja Pihak berelasi Pihak ketiga	7	322.277.604.785 1.479.306.491.038	418.050.422.350 196.429.570.743	245.683.249.901 142.963.573.690	Due from customer Related parties Third parties
Piutang lain-lain	8	1.430.238.828	602.953.194	1.815.028.939	Other receivables
Persediaan	9	416.389.992.923	167.935.167.220	107.870.312.555	Inventories
Uang muka	10	186.691.135.657	63.967.046.221	40.586.353.454	Advances
Pajak dibayar dimuka	21	33.497.517.082	248.203.450	12.594.772.018	Prepaid taxes
Biaya dibayar dimuka	11	87.293.468	4.490.755.553	2.370.957.877	Prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar		3.573.897.459.295	2.183.471.709.895	1.341.983.742.852	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Aset keuangan lainnya	12	99.724.800	99.724.800	99.724.800	Others financial assets
Properti Investasi	13	709.810.480	726.232.034	733.548.031	Investment property
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp138.821.760.174 tahun 2018 dan Rp127.721.607.638 tahun 2017	14	924.877.293.268	722.000.352.356	710.008.260.397	Fixed Assets net of accumulated depreciation of Rp138.821.760.174 year of 2018 and Rp127.721.607.638 year of 2017
Aset tetap tax amnesty	15	3.220.884.000	3.220.884.000	-	Tangible asset as tax amnesty
Aset tak berwujud	16	8.497.121.781	2.297.579.187	2.263.499.891	Intangible assets
Investasi pada ventura bersama	17	16.722.367.823	3.250.000.000	-	Investment in joint ventures
Aset Pajak Tangguhan	21	15.941.656.690	34.057.992.326	35.841.650.902	Deferred tax assets
Aset lain-lain	18	3.395.468.383	4.180.405.892	22.895.007.800	Other Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		973.464.327.225	769.833.170.595	771.841.691.821	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		4.547.361.786.520	2.953.304.880.490	2.113.825.434.673	TOTAL ASSETS

*) Reklasifikasi (Catatan 40)

*) Reclassification (Notes 40)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

	Catatan/ Notes	2018	2017 *)	2016 *)	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Pinjaman jangka pendek	19	404.721.207.382	244.419.058.230	219.101.096.055	Short term loans
Utang usaha	20				Trade payables
Pihak berelasi		75.370.115.941	8.041.034.845	6.727.367.792	Related parties
Pihak ketiga		524.470.896.111	403.293.224.947	252.177.559.039	Third parties
Utang pajak	21	138.395.463.693	57.593.150.218	38.427.323.371	Tax Payables
Uang muka dari pelanggan	22				Advance From Customers
Pihak berelasi		244.293.464.572	3.488.250.103	16.728.903.254	Related parties
Pihak ketiga		887.019.825.646	3.370.608.123	17.882.982.237	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	23	566.740.621.750	681.109.906.588	258.565.882.989	Accrued Expenses
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					Long term liabilities current maturities
Utang sewa pembiayaan	24	32.040.200	320.890.300	11.712.700	Finance lease liabilities
Jumlah liabilitas jangka pendek		2.841.043.635.295	1.401.636.123.354	809.622.827.437	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					LONG TERM LIABILITIES
Utang bank kredit investasi		-	-	4.843.460.700	Bank Loan Facility of Investment
Pinjaman jangka menengah	25	300.000.000.000	200.000.000.000	-	Medium term notes
Utang jangka panjang lainnya	26	38.511.368.400	38.511.368.400	40.731.927.810	Investment Fund Payable
Utang rekening dana investasi	27	80.363.439.868	84.363.439.868	86.863.439.868	Other long term liabilities
Liabilitas imbalan paska kerja	28	92.418.123.386	96.501.517.653	88.067.023.291	Post-Employment Benefits
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					Long term liabilities - net of current maturities
Utang sewa pembiayaan	24	-	32.040.200	320.890.300	Finance lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		511.292.931.654	419.408.366.121	220.826.741.969	Total Long Term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		3.352.336.566.949	1.821.044.489.475	1.030.449.569.406	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Modal Saham	29				Share Capital
Modal Dasar 3.000.000 saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham, modal ditempatkan dan disetor 762.915 saham.		762.915.000.000	762.915.000.000	143.203.000.000	Authorised capital 3.000.000 shares with par value of Rp.1.000.000 per share issued with fully paid 762.915 shares
Tambahan modal disetor	30	3.221.268.990	3.221.268.990	619.712.384.990	Increment in shares payment
Selisih penilaian kembali aset tetap		528.790.531.612	528.790.531.612	528.790.531.612	Excessive in fixed asset revaluation
Pengukuran kembali Imbalan Kerja		(48.416.471.791)	(43.374.644.099)	(37.423.267.753)	Post-employment benefit-remeasured
Cadangan		-	-	1.574.281.752	Reserved
Saldo laba tak Dibagi		-	-	42.599	Undistributed profit
Saldo laba (rugi)		(51.485.109.240)	(119.291.765.488)	(172.481.107.933)	Retained earnings
Jumlah Ekuitas		1.195.025.219.571	1.132.260.391.015	1.083.375.865.267	Total Shareholders Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		4.547.361.786.520	2.953.304.880.490	2.113.825.434.673	TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

*) Reklasifikasi (Catatan 40)

*) Reclassification (Notes 40)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Years Ended On December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	Catatan/ Notes	2017	
PENDAPATAN BERSIH	2.176.895.533.560	32	1.193.277.447.932	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(1.976.461.595.809)	33	(1.073.232.696.704)	COST OF REVENUES
LABA KOTOR	200.433.937.751		120.044.751.228	GROSS PROFIT
Beban administrasi dan umum	(43.039.916.723)	34	(30.394.599.126)	General and administrative expenses
Beban penjualan	(4.197.042.841)	35	(10.128.565.403)	Selling expenses
Bagian laba pada investasi ventura bersama	16.722.367.823	17	-	Share in profit joint venture
Selisi Kurs	12.637.627.774		2.336.242.956	Gain on foreign exchange
Pendapatan bunga	26.596.934.718		25.460.041.015	Interest and monetary income
Beban pajak final	(54.032.837.811)		(10.822.444.071)	Final tax expenses
Beban dari pendanaan	(42.657.668.095)		(27.015.483.115)	Finance cost
Lain-lain bersih	(18.571.491.070)		(10.824.804.198)	Others - net
LABA SEBELUM PAJAK	93.891.911.526		58.655.139.286	PROFIT BEFORE TAX
Beban pajak penghasilan	(26.085.255.279)	21	(7.040.121.191)	Income tax expenses
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	67.806.656.247		51.615.018.095	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPERHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Account unclassified to Profit or Loss
Kerugian aktuarial atas program imbal pasti	(5.746.603.282)	2r	(7.935.168.462)	Actuarial loss of defined benefit plan
Pajak tangguhan terkait dengan				Deferred tax related to
pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi	704.775.589		1.983.792.116	unclassified account to profit or loss
Jumlah penghasilan komperhensif lain setelah pajak	(5.041.827.693)		(5.951.376.346)	Total of Other Comprehensive Income
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-		-	Account subjected to Profit or Loss
Jumlah laba komperhensif periode berjalan	62.764.828.554		45.663.641.749	Total of current comprehensive income
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada :				Net Income attributable to:
Pemilik entitas induk	67.806.656.247		51.615.018.095	Parent Entity Owner
Kepentingan non pengendali	-		-	Non controllable Interest
Jumlah	67.806.656.247		51.615.018.095	Total
Laba Komperhensif yang dapat diatribusikan kepada :				Comprehensive Income attributable to:
Pemilik entitas induk	62.764.828.554		45.663.641.749	Parent Entity Owner
Kepentingan non pengendali	-		-	Non controllable Interest
Jumlah	62.764.828.554		45.663.641.749	Total
Laba bersih per saham dasar	88.878	31	67.655	Basic earnings per share

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan 2017
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
 For The Years Ended On December 31, 2018 and 2017
 (expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor/ <i>Paid up capital</i>	Tambahkan modal disetor/ <i>Additional paid-in capital</i>	Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap/ <i>Excessive in fixed asset revaluation</i>	Pengukuran Kembali Imbalan Kerja/ <i>Remeasurement of employee benefits</i>	Saldo laba/ <i>Retained earnings</i>			Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i>	
					Cadangan lainnya/ <i>Other reserves</i>	Cadangan bertujuan/ <i>General reserves</i>	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated retained earnings</i>		
Saldo per 1 Januari 2017	143.203.000.000	619.712.384.990	528.790.531.612	(37.423.267.753)	1.574.281.752	42.599	(172.481.107.933)	1.083.375.865.267	<i>Balance as of January 01, 2017</i>
Pemindahan tambahan modal disetor	619.712.000.000	(619.712.000.000)	-	-	-	-	-	-	<i>The transfer of additional paid-in capital</i>
Tax Amnesty	-	3.220.884.000	-	-	-	-	-	3.220.884.000	<i>Tax Amnesty</i>
Kerugian aktuarial atas program imbalan kerja	-	-	-	(5.951.376.346)	-	-	-	(5.951.376.346)	<i>Actuarial loss of defined benefit plan</i>
Cadangan	-	-	-	-	(1.574.281.752)	(42.599)	1.574.324.351	-	<i>Reserve</i>
Laba bersih periode berjalan	-	-	-	-	-	-	51.615.018.095	51.615.018.095	<i>Total comprehensive income</i>
Saldo tanggal 31 Desember 2017	762.915.000.000	3.221.268.990	528.790.531.612	(43.374.644.099)	-	-	(119.291.765.488)	1.132.260.391.015	<i>Balance as of December 31, 2017</i>
Kerugian aktuarial atas program imbalan kerja	-	-	-	(5.041.827.693)	-	-	-	(5.041.827.693)	<i>Actuarial loss of defined benefit plan</i>
Laba bersih periode berjalan	-	-	-	-	-	-	67.806.656.247	67.806.656.247	<i>Total comprehensive income</i>
Saldo tanggal 31 Desember 2018	762.915.000.000	3.221.268.990	528.790.531.612	(48.416.471.791)	-	-	(51.485.109.240)	1.195.025.219.571	<i>Balance as of December 31, 2018</i>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Years Ended On December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATIONS ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	2.026.398.652.279	710.941.554.029	Receipt from customers
Pembayaran kepada pemasok	(1.808.705.113.702)	(446.832.461.542)	Payment to suppliers
Pembayaran kepada direksi dan karyawan	(77.483.305.006)	(57.598.256.112)	Payment to director and employee
Penerimaan bunga	26.602.050.945	25.314.594.598	Interest received
Pembayaran pajak	(136.764.678.199)	(2.430.555.509)	Tax paid
Arus kas bersih diperoleh dari (Digunakan untuk) aktivitas operasi	30.047.606.317	229.394.875.464	Net cash provided by (Used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan penjualan aset tetap	577.150.000	263.500.000	Receipt from fixed assets sold
Perolehan aset tetap	(148.658.877.737)	(19.898.528.214)	Acquisition of property, plant and equipment
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(148.081.727.737)	(19.635.028.214)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pinjaman jangka pendek			Short term loans
Penerimaan pinjaman	647.094.939.114	277.931.479.798	Proceeds from loans
Pembayaran pinjaman	(874.415.623.604)	(285.566.792.818)	Payment of loans
Pinjaman jangka menengah			Medium term notes
Penerimaan pinjaman	100.000.000.000	200.000.000.000	Proceeds from medium term notes
Pinjaman jangka panjang			Long term loans
Pembayaran pinjaman	(4.000.000.000)	(2.500.000.000)	Payment of long term loans
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(131.320.684.490)	189.864.686.980	Net cash provided by (used in) financing activities
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(249.354.805.910)	399.624.534.230	NET INCREASING/(DECREASING) CASH AND CASH EQUIVALENT
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	1.006.644.602.876	607.020.068.646	BEGINNING BALANCE CASH AND CASH EQUIVALENT
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	757.289.796.966	1.006.644.602.876	ENDING BALANCE CASH AND CASH EQUIVALENT

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN /
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

1. GAMBARAN UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Barata Indonesia (Perusahaan) didirikan oleh seorang Belanda bernama Mr. Braat. Perusahaan bergerak di bidang Maintenance pabrik gula, dengan nama NV. Braat dan berkantor di daerah Krembangan. Pindah di jalan Ngagel tahun 1924, dan tahun 1958 Perusahaan dinasionalisasikan dengan nama Bappit Barata. Berdasarkan PP No. 125 tahun 1961 namanya diubah menjadi PN Barata.

Pada tahun 1971 dengan PP No. 3/1971 digabungkan 3 Perusahaan yaitu: PN Barata, PN Peprida dan PN Sabang Merauke, dan kemudian disahkan dengan Akte Notaris E. Pondaag No. 35/1971 tanggal 19 Mei 1971 dengan nama PT Barata Metalworks & Engineering. Dengan akte Notaris Mochamad Ali No. 29 tanggal 23 Nopember 1981 nama Barata diubah menjadi PT Barata Indonesia sampai dengan sekarang.

Dengan Keppres No. 44 tahun 1989, Perusahaan masuk dalam jajaran BUMNIS bersama 10 BUMN lainnya, dibawah pengelolaan Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS). Sesuai dengan Inpres No. 15 tahun 1989 tanggal 6 Mei 1989 dialihkan menjadi dibawah pembinaan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN No. Kep-036/M-PBUMN/98 tanggal 7 Agustus 1998, pemilihan sahamnya dialihkan kepada PT Pakarya Industri. Berdasarkan RUPS luar biasa PT Pakarya Industri tahun 1999 nama PT Pakarya Industri dirubah menjadi PT Bahana Pakarya Industri Strategis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 tahun 2003 tanggal 23 September 2003 tentang Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Inka, PT Inti, PT LEN Industri dan Pembubaran BPIS serta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan tanggal 31 Oktober 2003 telah diputuskan pengalihan saham PT BPIS (Dalam Likuidasi) dan saham minoritas lainnya kepada Menteri Negara BUMN Republik Indonesia.

1. GENERAL INFORMATION

a. Company Establishment

PT Barata Indonesia, as a national company, herein after referred to as Company, established by a former dutch man, Mr Braat. The Company deals with maintainance of sugar factory/manufacturer, known as NV. Braat, and having its office in Krembangan regional. In year of 1924 the office moved to Jalan Ngagel, and in year 1958 was nationalised and well-known as Bappit Barata. Base upon the Government's regulatory of 1961-PP No. 125- its name was altered to PN Barata.

In year 1971, subjected to the Government's regulatory- PP No. 3/1971, the 3(three) of Company, that is, PN Barata, PN Peprida dan PN Sabang Merauke were merged into one Company with the name; PT Barata Metalworks & Engineering, established by notary deed No. 35/1971 dated on 19th of May 1971, Notary Public, E. Pondaang. And since on November 23 th 1981 up to present, the name of PT Barata Metalworks & Engineering was changed to PT Barata Indonesia.

With subjected to the presidential decision- Keppres No. 44 year 1989, together with 10(ten) other National Company (BUMN), the Company went into strata of BUMNIS under management of BPIS. And base upon presidential instruction- Inpres No. 15 of 1989 dated 6th of May 1989, the management of the Company is under direction of Ministry of Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.

Based upon ministrial decision of state's Ministry of Pendayagunaan BUMN- No. Kep-036/M-PBUMN/98 dated 7th of August, 1998. The ownership of share was rendered to PT Pakarya Industri. With respect to the extra ordinary of shareholders' meeting of PT Pakarya Industri in 1999 (RUPS), the name of PT Pakarya Industri was changed to, known as PT Bahana Pakarya Indutri Strategis.

Based upon the Government's Regulatory of No. No.52 year of 2003, dated 23th of September, 2003 as to Capital Investment of the State of Republic of Indonesia into National Company: PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Inka, PT Inti, PT LEN Industri and as to the Termination of BPIS and aswell the decision of the extra ordinary of shareholders' meeting(RUBSLB) of the Company as of 31th of October 2003 was already determined that the share of PT BPIS (in the process of Liquidation) and of others' minorities was rendered to ownership of State Ministry of BUMN of Indonesian's Republic.

1. GAMBARAN UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan

Jika ada Pengalihan saham, akan diikuti dengan perubahan pasal-pasal dalam anggaran dasar Perusahaan yaitu pasal nama perusahaan, pasal susunan modal, pasal direksi, pasal komisaris dan pasal pembagian laba.

Berdasarkan RUPS PT Barata Indonesia (Persero) tanggal 15 Desember 2005 dan Tambahan Berita Negara RI No. 36 tanggal 5 Mei 2006, tempat kedudukan PT Barata Indonesia (Persero) semula "Surabaya" berubah menjadi "Gresik".

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akte Notaris Ranti Nursukma Handayani, SH No. 148 tanggal 26 Juni 2008, yang mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU 39405, AH 01.02 tahun 2008.

b. Kegiatan Operasi

Sesuai pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perseroan ialah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya penyelenggaraan pusat keunggulan dalam memproduksi peralatan industri berat, permesinan, pengecoran dan suku cadang serta usaha-usaha lain yang dapat menunjang usaha tersebut diatas, yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Secara garis besar, kegiatan operasi / usaha PT Barata Indonesia (Persero) bergerak dalam bidang berikut :

1. Industri Pangan

Meliputi pekerjaan manufaktur dan proyek-proyek konstruksi untuk sarana & fasilitas produksi industri pangan / agro, termasuk didalamnya sarana & fasilitas produksi pabrik gula dan derivatnya, pabrik kelapa sawit dan derivatnya, pabrik bioethanol, pabrik sagu, alat & mesin pertanian serta industri pangan/agro lainnya. Peluang order dibidang Agro Industri sangat besar, apalagi bisnis eksisting Perseroan sangat berkaitan dengan program Swasembada Gula pada tahun 2019 yaitu entity yang mendukung pengadaan peralatan-peralatan pabrik gula.

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

a. Company Establishment

In case the transferring of shares incurred, alterations or amendments of provisions in the Company's article are to be adjusted, namely, provision of company's name, provision of capital structure, provision of directors, provision of board of commissioners, and provision of profit sharing.

Based upon Shareholders' meeting of PT Barata Indonesia (Persero) dated on December 15, 2005 and as well was listed in state gazette No.:36 dated on May 5, 2006. The residence of PT Barata Indonesia (Persero) was previously located in Surabaya by present is located in Gresik.

The articles of Company have amended several times, and the most recent was legally strengthened before notary Public, Ranti Nursukma Handayani, SH, the deed No. 148 dated 26th of June 2008, and officially having an approval from Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia under No.AHU.39405.AH.01.02 in year of 2008.

b. The Company's Activities

With reference to company's article provision 3, the aim and goal of Company is to participate in, performing and supporting the policy of Government's program mainly in national development and economic, and especially in maintaining high prime quality as a central of manufacturing or fabricating of heavy duty machinery, foundry, related parts and other activities related to supportable to such a business mentioned above in order to achieve a highly and strong product for facing hard competition, and as well to make a good profit for increasing Company's value with consistently adopting the principles of corporate's business.

In a more detail, the business' activities of the Company deals with the following activities:

1. Food Related Product

Includes manufacturing work and construction projects for food / agro industry production facilities & facilities, including production facilities and facilities for sugar mills and derivatives, palm oil mills and derivatives, bioethanol plants, sago mills, agricultural machinery & equipment and food / agro industries others. The opportunity for orders in the field of Agro-Industry is very large, moreover the Company's existing business is closely related to the Sugar Self-sufficiency program in 2019 namely the entity that supports the procurement of sugar factory equipment.

1. GAMBARAN UMUM (Lanjutan)

b. Kegiatan Operasi (Lanjutan)

2. Industri Energi

Meliputi manufaktur dan proyek-proyek konstruksi sarana & fasilitas produksi industri energi, termasuk didalamnya sarana & fasilitas produksi pembangkit tenaga listrik (PLTU, PLTA, PLTG, PLTGU & PLTMH) serta minyak dan gas.

3. Industri Pengairan

Meliputi manufaktur dan proyek-proyek konstruksi sarana & fasilitas produksi industri pengairan, termasuk didalamnya sarana & fasilitas produksi industri pengairan yang bisa terdiri dari produk-produk hidromekanikal bendung dan bendungan.

4. Industri Pendukung (+)

Perusahaan juga menangani manufaktur sarana dan fasilitas produksi diluar sektor pangan, energi & pengairan, yaitu untuk industri transportasi, industri alat angkat dan angkut pelabuhan serta industri proses lainnya.

c. Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Dewan Komisaris

Sesuai Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Barata Indonesia (Persero) Nomor : 378/MBU/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Barata Indonesia (Persero), telah diangkat Bapak Adriansyah sebagai Komisaris.

Berdasarkan Akta Notaris Herawati, SH No. 03 pada tanggal 11 Juli 2018 dan SK Menteri BUMN No : SK-194/MBU/06/2018 tanggal 8 Juni 2018 Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Penetapan Komisaris Independen Perusahaan (Perseroan) PT Barata Indonesia :

1. Mengangkat Sdr. Dr. Ir. Sam Herodian, MS sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia
2. Menetapkan Sdr. Katno, Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-165/MBU/09/2015 tanggal 2 September 2015, sebagai Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dimaksud.

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

b. The Company's Activities (Continued)

2. Energy Related Product

Includes manufacturing and construction projects for energy industry production facilities & facilities, including facilities & production facilities for power plants (PLTU, PLTA, PLTG, PLTGU & PLTMH) as well as oil and gas.

3. Water Related Product

Includes manufacturing and construction projects for irrigation industrial facilities & production facilities, including irrigation industrial facilities & facilities which can consist of hydromechanical products for dams and dams.

4. Supporting Industry (+)

The company also handles manufacturing facilities and production facilities outside the food, energy & irrigation sectors, namely for the transportation industry, lifting equipment and port transport and other process industries.

c. Composition of Board of Commissioners and Directors

Board of Commissioners

With respect to decision letter of Minister of State Owned Company (BUMN) acting as Share holders' meeting of PT Barata Indonesia (Persero), No.SK-169/MBU/2013dated 01st of March, 2013 and No. 378/MBU/2013 dated 11th of November 2013 as to Retiring and Appointing of Membership of Commissioners has appointed Mr Adriansyah as Commissioner.

Based on Herawati, SH No. Notarial Deed 03 on July 11, 2018 and SOE Ministerial Decree No: SK-194 / MBU / 06/2018 dated June 8, 2018 As the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) of PT Barata Indonesia concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioners and Determination of Independent Commissioner of the Company (The Company) PT Barata Indonesia:

1. Bringing up Dr. Ir. Sam Herodian, MS as Commissioner of Limited Liability Company (Persero) PT Barata Indonesia
2. Establishing Mr. Katno, Commissioner of PT Barata Indonesia (Persero) Company which was appointed based on the Minister of State-Owned Enterprises Decree Number SK-165 / MBU / 09/2015 dated 2 September 2015, as Independent Commissioner of PT Barata Indonesia (Persero) Company with a term of office the remaining term of office as decree of said Minister of State-Owned Enterprises.

1. GAMBARAN UMUM (Lanjutan)

c. Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi (Lanjutan)

Sehingga susunan Dewan Komisaris PT Barata Indonesia (Persero) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

	2018
Komisaris Utama	Triyogi Yuwono
Komisaris Independen	Katno
Komisaris	Adriansyah
Komisaris	Sam Herodian

Dewan Direksi

- Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Barata Indonesia No. SK-305/MBU/12/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PT Barata Indonesia, memberhentikan dengan hormat Bapak Silmy Karim sebagai Direktur Utama dan mengangkat Bapak Oksarlidady Arifin sebagai Direktur Utama untuk periode 19 Desember 2018.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Barata Indonesia No. SK-261/MBU/11/2017 tanggal 28 Nopember 2017 tentang mengubah jabatan Direksi PT Barata Indonesia, menjadi Direktur Keuangan dan SDM dan Direktur Operasi dan Pemasaran.

Berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S-34/Dekom/BRT/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Penunjukan Pengganti Sementara Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero) bahwa Dewan Komisaris menunjuk Sdr. Tony Budi Santosa sebagai Direktur Utama merangkap sebagai Direktur Pemasaran PT Barata Indonesia (Persero).

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Barata Indonesia (Persero) No. 89 Notaris Herawati, SH. tanggal 21 Desember 2017 tentang Pemberhentian dengan hormat Tony Budi Santoso sebagai Direktur, mengubah nomenklatur jabatan anggota direksi PT Barata Indonesia (Persero) menjadi Direktur Keuangan dan SDM serta Direktur Operasi dan Pemasaran, mengangkat Saudara Tony Budi Santoso sebagai Direktur Operasi dan Pemasaran.

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

c. Composition of Board of Commissioners and Directors
 (Continued)

And hence the composition of Board of Commissioner as of December 31, 2018 and December 31, 2017 can be set out as follows:

2017	
Triyogi Yuwono	President Commissioner
Katno	Commissioner Independent
Adriansyah	Commissioner
-	Commissioner

Board of Director

- Based upon the Decision Letter of Minister of State Owned Company (BUMN) No. SK- 177/MBU/08/2016 in respect of Retiring and Appointing to Director of PT Barata Indonesia (Persero), are to retire with honor Mr Zakky Gamal Yasin to be President Director and to appoint Mr Silmy Karim to President Director of PT Barata Indonesia (Persero) for a period of December 31, 2016.

Based on the decision of the Minister of State Owned Company (BUMN) acting as PT Barata Indonesia No. SK- 261/MBU/11/2017 date, November 28, 2017 about changing the position of the Board of Directors of PT Barata Indonesia (Persero), become Director of Finance and Human Resources and The Director of Operations and Marketing.

Based on the Decree Number S-34 / Dekom / BRT / IX / 2018 dated September 7, 2018 concerning the Subsequent Appointment of the President Director of PT Barata Indonesia (Persero) that the Board of Commissioners appointed Br. Tony Budi Santosa as President Director concurrently as Marketing Director of PT Barata Indonesia (Persero).

Based on deed of Statement meeting of PT Barata Indonesia (Persero) No. 89 Notary Herawati, SH. December 21, 2017 about Dismissal with respect Mr. Tony Budi Santoso as Director, change the nomenclature of the office of the Board of Directors of PT Barata Indonesia (Persero) became Director of Finance and Human Resources as well as the Director of operations and marketing, raised his Mr. Tony Budi Santoso as the Director Operation and Marketing.

1. GAMBARAN UMUM (Lanjutan)

c. Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Herawati, SH Nomor 01 Tanggal 06 Februari 2018, Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-28/MBU/01/2018 tertanggal 22 Januari 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia bahwa :

- Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia dari Direktur Operasi dan Pemasaran menjadi Direktur Operasi dan Direktur Pemasaran
- Mengalihkan penugasan saudara Tony Budi Santosa yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-261/MBU/11/2017 tanggal 28 Nov 2017 yang sebelumnya Direktur menjadi Direktur Operasi dan Pemasaran menjadi Direktur Pemasaran dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya.
- Mengangkat Saudara Bobby Sumardiat Atmosudiro sebagai Direktur Operasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia

Susunan anggota Direksi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

	2018
Direktur Utama	Oksarlidady Arifin
Direktur Keuangan dan SDM	Yoyok Hadi Satriyono
Direktur Pemasaran	Tony Budi Santosa
Direktur Operasi	Bobby Sumardiat

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Berikut ini adalah beberapa kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

- Pernyataan Kepatuhan**
Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Indonesia - Ikatan Akuntan Indonesia.

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

c. Composition of Board of Commissioners and Directors

Based on Notarial Deed No. 01 Notary Herawati, SH. Februari 06, 2018, Decision of The Minister of State Owned Company (BUMN) No SK-28/MBU/01/2018 January 22, 2018 about Dismissal, Change the Nomenclatur of the Board, Task Shifting and Appointment of The Board of Director PT Barata Indonesia (Persero) that is :

- Change Nomenclature of PT Barata Indonesia (persero) Board of Director from Operation and Marketing Director position into separated Operation Director and Marketing Director.
- Based on Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-261/MBU/11/2017 dated November 28, 2017 stated change of assignment Mr. Tony Budi Santosa from Operation and Marketing Director to become Marketing Director with status to continuing it's previous position duration time.
- Raised Mr Bobby Sumardiat Atmosudiro as the Director Operation PT Barata Indonesia (Persero).

Composition of Board of Directors on December 31, 2018 and December 31, 2017 is as follows:

	2017	
Silmy Karim		President Director
Yoyok Hadi Satriyono		Director of Finance and Human Resources
Tony Budi Santosa		Director Marketing
-		Director of Operations

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The following are the significant accounting policies adopted by Company in preparing of financial statement with respect to Financial Accounting Standard in Indonesia

- Compliance Statement**
The financial statements have been prepared in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia (PSAK) and Financial Accounting Standards Intrepretation (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

b. Dasar Penyajian dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual dan harga perolehan historis, kecuali beberapa akun tertentu yang diukur dengan cara sebagaimana yang diuraikan dalam kebijakan akuntansi di akun yang bersangkutan.

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia memerlukan penggunaan estimasi tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga mengharuskan manajemen untuk menggunakan pertimbangannya dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan atau kompleksitas yang tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan, diungkapkan dalam Catatan 3

Laporan arus kas, disajikan dengan menggunakan metode langsung, yang mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari uang kas dan bank, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, dikurangi dengan cerukan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan dan disajikan dalam Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Standar yang telah diterbitkan dan efektif pada tahun buku 2018, namun tidak menimbulkan efek signifikan terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- PSAK 13 (Amandemen 2017) : Properti Investasi
- PSAK 15 (Penyesuaian 2017) : Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 16 (Amandemen 2015) : Aset Tetap
- PSAK 46 (Amandemen 2016) : Pajak Penghasilan
- PSAK 53 (Amandemen 2017) : Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 67 (Penyesuaian 2017) : Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain

Standar dan interpretasi yang akan berlaku efektif pada tahun 2019 dan 2020

Berikut ini adalah standar dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif pada tahun 2018:

- PSAK 62 (Amandemen 2017) : Kontrak Asuransi
- PSAK 71 : Instrumen Keuangan
- PSAK 72 : Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73 : Sewa
- ISAK 33 : Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Basis of Presentation and Measurement of Financial Statements

The financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept, except for several certain accounts measured by using as stated and disclosed in note of the related individual account.

Preparation of Financial Statement in accordance with Financial Accounting Standard in Indonesia require the use of specified estimation. And the preparation of Financial Statement also compell management to make some assumptions in implementing Company's Accounting Policies. Areas required for high attention on complexity and judgment, or the areas in which the assumptions and estimations are significant on Financial Statement, are disclosed in Note 3.

The statement of cash flow is prepared based on the direct method by classifying incoming and out going cash flows and cash and equivalent into the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of presentation of the statement of cash flow, cash and deposits held at any time can be withdrawn and other short term highly liquid investments with original maturities of three months or less, lessened by bank draft.

All the figures in this financial report are rounded and presented in Rupiah, unless otherwise stated.

The standards issued and effective in 2018 but did not result in a significant effect on the financial statements are as follows:

- PSAK 13 (Amendment 2017) : Investment Property
- PSAK 15 (Annual Improvements 2017) : Investment in Associates and Joint Ventures
- PSAK 16 (Amendment 2015) : Fixed Assets
- PSAK 46 (Amendment 2016) : Income Taxes
- PSAK 53 (Amendment 2017) : Share-based Payment
- PSAK 67 ((Annual Improvements 2017) : Disclosure of Interests in Other Entities

Standards and interpretation which will be effective in 2019 and 2020

The following standards and interpretation issued but not yet effective in 2018:

- PSAK 62 (Amendment 2017) : Insurance Contract
- PSAK 71 : Financial Instrument
- PSAK 72 : Revenue from Contracts with Customers
- PSAK 73 : Leases
- ISAK 33 : Foreign Currency Transactions and Advance

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerbitan standar akuntansi keuangan tersebut.

c. Penjabaran Mata Uang Asing

i. Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan entitas diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan entitas, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos non moneter diukur dalam biaya historis dalam valuta asing yang tidak dijabarkan kembali.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :

- i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Entitas Induk, Entitas Anak, dan Entitas Anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

The Company is evaluating the possible impact on the issuance of these financial accounting standards.

c. Conversion of Foreign Currency

i. Presentation and functional currency

The financial statements of each entity are measured and presented in the currency of the primary economic environment in where the entity operates (its functional currency). The financial statements are presented in Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Company and the presentation currency for the financial statements.

In preparing the financial statements of entity, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

d. Transactions with related parties

A related party is a person or entity that is related to the reporting entity:

a. A person or a close member of the person's family is considered has relationship with reporting entity if that person:

- i. Has control or joint control over the reporting entity;
- ii. Has significant influence over the reporting entity; or
- iii. Key management personnel of the reporting entity or parent of the reporting entity.

b. An entity is considered having relationship to a reporting entity if any of the following conditions applies:

- i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others.
- ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan)

- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau Entitas Induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

e. Instrumen Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai berikut:

Aset Keuangan

Aset keuangan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

- Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba atau Rugi (FVTPL).

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Transactions with related parties (Continued)

- iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- v. The entity is a post employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity manages such a plan, hence the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in point (a).
- vii. A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All transactions made by the related parties, either conducted by or not conducted under interest rate or price, similar requirements and conditions as conducted by the third party shall be disclosed in financial statements.

e. Monetary instrument

The company makes as classification of monetary instruments are as follows :

Monetary Assets

Monetary assets are grouped into 4(four)categories, that is, (i) monetary asset which is measured at fair value through profit or loss (ii) lend account and receivable, (iii) investment owned up to maturity date and (iv) monetary assets which is available for sale. The classification depend on intention of acquisition of the monetary assets. The managemen determines such a classification of monetary assets as of initial recognition.

- Monetary assets measured at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)
Aset Keuangan (Lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi (FVTPL) adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali telah ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui pada nilai wajarnya. Biaya transaksi sehubungan dengan perolehannya diakui pada laporan laba rugi periode berjalan. Selanjutnya, aset keuangan FVTPL disajikan pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2018 serta 31 Desember 2017, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada FVTPL.

- Pinjaman yang Diberikan dan Piutang.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2018 serta 31 Desember 2017, aset keuangan yang dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang adalah kas dan setara kas, deposito berjangka, piutang usaha, piutang retensi, aset keuangan lancar lainnya, piutang pihak berelasi non-usaha dan aset keuangan tidak lancar lainnya.

- Investasi yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain:

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Monetary instrument (Continued)
Monetary Assets (Continued)

Monetary assets measured at fair value through Profit or Loss (FVTPL) are monetary assets designated to be traded. Monetary assets are classified as commercial goods, if the assets acquired especially intend to be sold, or repurchased within short time, and indicate that there is any evidence in respect of profit taking characteristic in short term manner. Derivative is classified as assets are ready for sale except has been determined and effective as hedging value

As of initial recognition, monetary assets measured at fair value through profit or loss are recognized at its fair value. The cost of transactions pertaining to its acquisition are recognized as expenses in profit or loss in current period. And monetary assets of FVTPL are presented at fair value with gain or loss and changes in fair value are recognized in profit or loss.

As of December 31, 2018 and December 31, 2017, the Company did not hold monetary assets being measured at FVTPL

- Loan being assigned and Receivables.

Loans being rendered and Receivables are non- derivatives monetary asset with regular payment or fixed amount payment and not dealing with the quotation in active market. As of initial recognition, the loan being rendered and receivable are recognized at its fair value added with transaction cost and further, measured at its cost acquisition, and amortized with the use of effective interest rate method.

As of December 31, 2018 and December 31, 2017, monetary asset categorized as loan assigned and receivables are cash and cash equivalent, time deposit, account receivables trade, retention receivables, other current assets, receivables due to related party's non-business transaction, and others non current monetary

- Investment held up to maturity.

Investment held up to fall due is a non-derivative monetary asset with regular payment or fixed amount payment and its due date has been exactly ascertained, in which the management has an positive intention and capability to possess such a monetary asset up to falling due, other than:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan) Aset Keuangan (Lanjutan)

- Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, Perusahaan tidak memiliki investasi yang dimiliki hingga jatuh temponya.

- Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivative yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan kedalam tiga kategori sebelumnya.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana laba atau rugi diakui pada penghasilan komprehensif lain kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi dari selisih kurs hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba rugi yang sebelumnya diakui pada bagian ekuitas akan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Penurunan nilai, bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter diakui sebagai laba atau rugi.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Monetary instrument (Continued) Monetary Assets (Continued)

- Investment as of initial recognition are recorded as monetary asset measured at fair value through profit or loss;
- Investment intended in the group ready for sale; and
- Investment fulfilling the definition of loan being rendered and receivables.

As of initial recognition, investment held up to fall due are recognized at its cost added cost of transactions, and subsequently measured at its acquisition cost, and further amortized with use of effective interest rate method.

As of December 31, 2018 and December 31, 2017, the Company did not hold such investment owned up to its fall due.

- Monetary Assets Ready for Sale (AFS).

Monetary Assets ready for sale (AFS) are non-derivative monetary asset intended ready to be sold or unclassified into previous category.

At the first of initial recognition, the monetary asset ready for sale are recognized at its fair value added cost of transaction and subsequently measured at its fair value whereat profit or loss recognized in other comprehensive income, except for loss of impairment and gains or losses from exchange rate difference until monetary asset quitted its recognition. If the monetary asset ready for sale undergo impairment of it, accumulative profit or loss that previously recognized in equity, and further recognized in profit or loss and other comprehensive income.

Subsequent to initial recognition, monetary asset of AFS measured at its fair value. Gains or losses arising from changes in fair value are recognized in other comprehensive income, except for loss of impairment, and gains or loss arising from exchange rate of foreign currencies, until such a monetary asset quitted its recognition. At the time of its recognition quitted, the accumulative gains or losses that previously recognized in other comprehensive income are reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustment.

Impairment on asset, interest computed by using effective interest rate, and gains or loss of exchange rate on monetary asset are recognized as profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)
Aset Keuangan (Lanjutan)

Investasi yang diklasifikasi sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut:

- Investasi pada saham yang tidak tersedia nilai wajarnya dengan kepemilikan kurang dari 20% dan investasi jangka panjang lainnya dicatat pada biaya perolehannya.
- Investasi dalam ekuitas saham yang tersedia nilai wajarnya dengan kepemilikan kurang dari 20% dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, dicatat pada nilai wajar.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah Investasi Tersedia untuk Dijual.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Monetary instrument (Continued)
Monetary Assets (Continued)

Investment reclassified as monetary asset ready for sale are as the following:

- Investment on shares unavailable for its fair value with the ownership of it lower than 20%, and its other long term investment are recorded at its acquisition cost.
- Investment on share's equity available at its fair value with the ownership of it lower than 20% and reclassified as a monetary asset ready/available for sale are recorded at its fair value.

As of December 31, 2018 and December 31, 2017, the Company did not own such monetary asset ready or available for sale are true to Investment Available or Ready for Sale.

Impairment of Monetary Asset

At every closing of reporting period, the Company made reviews and evaluation on monetary asset or group whether or not there are objective evidence for those of assets having experience of impairment. Those monetary assets or group are reduced their value, and or the loss of impairment occurred, if and only if finding objective evidence of the impairment as the result of one event or more taking place subsequent to initial recognition of those assets (the losses of event's impact), and such those events have impact on prediction of future cash value of monetary asset or group being capable to be precisely projected.

The following are characterically objective evidence that monetary asset or group experiencing the impairment:

- a. Financial deficiency in significance experienced by the debtors, or the parties who borrows money;
- b. Violating in contract agreement, as in payment failure or payment delay of principal loan or interest income;
- c. There are potentiality that the debtors or the parties who borrows money states or, are on the point of bankruptcy or make a reorganisation of other financial structure;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

- d. Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomik yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan, setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi, dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Monetary instrument (Continued)

Impairment of Monetary Asset (Continued)

- d. Finding several observable data that indicate there is an impairment on the prediction of future cash flow from the group monetary assets starting from initial recognition of asset, such as inability to badly failure payment of debtors or state and condition of economic being relevant to payment failure.

As for investment on equity instrument, significant decrement or long term at fair value of equity instrument recorded lower than at acquisition cost is as an objective evidence on occurrence of decrement value.

If there is an indication that objective evidence of decrement value having occurred on the loan rendered and receivables or investment held within maturity or through falling due date being recorded at acquisition, then the total of loss measured as differences between the amount of assets recorded with present value of future cash flow being discounted by using initial effective of interest rate on those assets, and recognized in profit or loss.

If a decrease in the fair value of available-for-sale financial assets is recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment even though the financial asset has not been discontinued. The amount of cumulative loss reclassified is the difference between the acquisition cost, net of principal redemption and amortization, and the present fair value, less any impairment losses on the financial asset previously recognized in profit or loss.

Financial Liability and Equity Instrument

Classification as liability and equity

Monetary liability and instrument equity as stated by the Company are classified according to substance of contractual agreement and the definition of monetary liability and equity instrument.

Equity Instrument

Equity instrument is a every contract providing a residual right on the company's asset after being deducted with all of its liabilities. Equity instrument are recorded at net income after deducted by direct cost of emission.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (Lanjutan)

Perolehan kembali modal saham yang telah diterbitkan oleh Perusahaan dicatat dengan menggunakan metode biaya. Saham yang dibeli kembali dicatat sesuai dengan harga perolehan kembali dan disajikan sebagai pengurang modal saham.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, Perusahaan tidak memiliki instrumen ekuitas.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

- Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba atau Rugi (FVTPL)
- Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diakui pada nilai wajarnya. Biaya transaksi sehubungan dengan penerbitannya diakui pada laba rugi tahun berjalan. Kenaikan atau penurunan nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan dalam kategori ini.

- Liabilitas Keuangan yang Diukur Dengan Biaya Perolehan Diamortisasi
- Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Monetary instrument (Continued)

Financial Liability and Equity Instrument (Continued)

Reacquisition of shares published and emitted by Company are recorded by using cost method. Those shares repurchased are recorded at reacquisition cost and presented as deduction of capital shares of capital.

As of December 31, 2018 and December 31, 2017, the Company did not hold any equity instrument.

Monetary Liability

Monetary liabilities are categorized into (i) monetary liability measured at fair value through profit or loss, and (ii) monetary liability measured at acquisition cost and being amortized

- Monetary Liability is measured at fair value through profit or loss (FVTPL)
- Fair value of monetary liability measured at its fair value through profit or loss are monetary liabilities intended to be traded. Monetary liability reclassified as traded if they are mainly acquired for purpose of being sold, or repurchased within short term treatment, and found the proof as to profit-taking manner in most present short term. Derivatives are reclassified as liabilities being traded except appropriated to and effective as hedging value instrument.

As of initial recognition, monetary liabilities measured at FVTPL recognized at its fair value. Cost of transaction relating to its publishing and emitting recognized in current profit or loss. Increment or decrement in fair value is subsequently recognized in profit or loss.

As of December 31, 2018 and December 31, 2017, Company did not hold monetary liability such these categories.

- Monetary Liability Measured With Acquisition Cost be Amortized.
- Monetary liability unreclassified as monetary liability measured at its fair value through profit or loss are categorized and reclassified measured with acquisition cost amortized.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (Lanjutan)

- Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai dan pembayaran atau pengurangan pokok. Perhitungan tersebut memperhitungkan premium atau diskonto pada saat akuisisi dan mencakup biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.
- Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, liabilitas keuangan yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi adalah utang bank, utang usaha, beban akrual dan utang lain-lain.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Perusahaan mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Perusahaan secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut.

Jika Perusahaan secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Perusahaan mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Perusahaan secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Monetary instrument (Continued)

Financial Liability and Equity Instrument (Continued)

- The acquisition cost amortized are computed by using effective interest rate, deducted with decrement value and payment of principal. The computation also include premium or discount when the acquisition occurred, added with transaction cost and the unparted cost relating with, of effective interest rate.
- As of December 31, 2018 and December 31, 2017, monetary liability categorized as monetary liability measured by acquisition being amortized are bank loan, account payable trade, accrued expenses and other payable.

Derecognition of Monetary Asset and Liability

The Company quits recognition of monetary asset, if and only if, the contractual right on cash flow derived from monetary asset come to an end, or The Company takes the place of contractual rights to receive cash derived from monetary asset, or is steady in owning contractual rights to receive the cash but also takes contractual obligatory to pay cash flow of which is received to one payee or more by tying an agreement. If the Company substantially takes the place of all risks and benefits on ownership of monetary asset, then The Company put an end to recognition of monetary asset and separately recognize as asset or liability for any right and obligatory arising or being still owned in those taking the place of it.

If the Company substantially does not take the place of it, and does not own all the risks and benefits on ownership of those monetary asset, and has a control, therefore the Company recognizes the monetary asset in amount of going concern involvement with those monetary asset. If the Company substantially does still own all the risks and benefits on ownership of those monetary asset, then the Company still recognizes those monetary asset.

The Company discontinues the recognition of monetary liability, if and only if, the monetary liability comes to an end, that is, when the obligation specified in the contract released or cancelled or expire by itself.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan secara saling hapus dan nilai bersihnya disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK No. 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1).
- Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2), dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Monetary instrument (Continued)

Mutual Elimination inter Financial Instrument

Monetary asset and liability are presented in mutual elimination, and the net amount of it is presented in consolidated financial position, if they has a legal power of rights to mutually eliminate on those amounts recognized, and has a deliberation to settle in net amount manner, or realize those assets and settle those liabilities simultaneously.

Effective interest rate method

Effective interest rate method is a method used for computing acquired cost being amortized of monetary asset or liability (or group monetary asset or liability) and a method used for allocating interest income or interest charge during the relevant period. Interest rate method is the interest rate discounting precisely the estimation of future value of cash payment or cash receipt during the age predicted of financial instrument, or if more precisely, utilized the shorter period to obtain a yield of net amount of monetary asset and liability. In the course of computing by using effective interest rate, the Company estimates the cash flow by judging all contractual requirement in those financial instrument., such as accelerated settlement, purchase option or other option alike, but not judging the future credit loss. This computation copes with all commissions and other form being paid or received by the parties as specified in the contract which form unseparated part from effective rate, cost of transaction, and all the premiums and other discounts.

Defining Fair Value

Fair value of monetary asset and liability is estimated to obtain the requirement of recognition and measurement or requirement of disclosure.

PSAK No. 60 "Financial Instrument: Disclosure" required for the disclosure on measuring fair value with degree of hierarchies on fair value, are as follows:

- Quotation price (unadjusted) in active market for identical asset and liability (degree 1).
- Input price other than quotation including the degree 1 observable for asset or liability, either directly (e.g the price) or indirectly (e.g derivative price) (degree 2), and
- Input price for asset and liability are not based on market price being capable to be observed (unobservable input price) (degree 3).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)
Penentuan Nilai Wajar (Lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (bid price), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (ask price). Instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin tidak mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam Tingkat 3. Ini berlaku untuk surat-surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- Teknik lain, seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

g. Piutang Usaha dan Lainnya

Piutang usaha dan lainnya pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan untuk penurunan nilai. Jika piutang diharapkan tertagih dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika lebih, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Monetary instrument (Continued)
Defining Fair Value (Continued)

Fair value of financial instrument traded in active is specified upon quotation of market price prevailing on the reporting date. the quotation of market price applied by the company for monetary asset is bidding price. As for monetary liabilities applied is selling or asking price. This financial instrument fall into degree 1.

Fair value of financial instrument not traded in active market are determined by using a specified technique of valuation. The technique use market data being capable to be observed as long as available, and as minimum as possible do not refer to estimation. If all the significant input toward fair value are able to be observed, these financial instrument include in degree2.

If one significant input or more do not base upon, or refer to, observable market data, then those instrument went into degree3. These treatment are applied for certificate of equity security which are not marketable securities.

A specified technique of valuation is used for determining a monetary instrument comprising:

- Application of the price acquired from market or securities broker for homogeneous instrument; and
- Other technique, such as analysis of cash flow discounted are applied for determining other value of monetary instrument.

f. Cash and Cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, deposits held at any time be withdrawn and other short term highly liquid investments with original maturities of three months or less and not to be used as pledge/secure or tied on its application.

g. Account Receivable and Others Debtors

Account Receivables Trade and Others are initially recognized at fair value, and subsequently measured at cost value being amortized by using effective interest rate method, and being less by depreciation of decreasing of value. When Account Receivables Trade and Others are expected to collect in 1 (one) year period or less (or in normal operation cycle of business, if longer). The Related Account Receivables Trade and Others are grouped in Current Assets. And when longer, The Related Account Receivables Trade and Others are presented in Non Current Assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Piutang Usaha dan Lainnya (Lanjutan)

Kolektibilitas piutang usaha ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa Perusahaan tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan gagal bayar atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap dapat menunjukkan adanya penurunan nilai piutang. Jumlah penurunan nilai adalah sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan pada tingkat suku bunga efektif awal. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

h. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang perusahaan yang ditahan oleh pemberi kerja, yang akan dibayar setelah masa pemeliharaan berakhir. Piutang retensi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai.

i. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan untuk pemberi kerja namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi, ditambah laba yang diakui, dikurangi dengan jumlah kerugian yang diakui dan termin.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara progres fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal posisi keuangan.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Account Receivable and Others Debtors (Continued)

Review on collectibility of account receivables trade are made regularly. When the receivables were found uncollectible immediately to write off directly to lessen the value of its individual record. Receivables Doubtful account is applicable when objectivity of evidence is strongly found that Company is unable to collect of all its receivables with respect of initial or original term and condition. The Financial difficulties experienced by the debtor having a potential for him to declare that his or her Company goes Bankruptcy or the debtor take an action to reorganise financial structure and or failure and delay in payment, all of these are an indication that there is an impairment in Receivables. The amount of impairment is a different amount between asset value in record and present value of future cash flow at the initial effective interest rate. Cash flow in relation with current receivables-short term were not discounted when the impact of discount is immaterial.

h. Retention receivables

Retention receivables are a partial receivables retained by consumer, which will be paid by consumers subsequent to sales services ended. Retention receivables are initially recognized at its fair value, and further recognized measured at acquisition cost amortized after being deducted accumulated impairment.

i. Gross Receivables to Consumers

Gross recivables to consumers are receivables resulting from contractual work of costruction being taken for the benefit of consumers, however such works of construction is still in perfomance. The gross receivables are presented with a different amount between cost as incurred, added by the amount of profit recognized, less by the amount of loss recognized and receipts.

Gross recivables are recognized as revenue according to percentage of completion method as stated in the notification of work completion at the date of financial position, and hence no invoice issued since there is a time difference between date of the notification of physical work and invoices of work rendered as of financial position.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

j. Persediaan

Persediaan barang jadi dan bahan setengah jadi diakui berdasarkan harga pokok produksi, sedangkan bahan baku/pembantu diakui berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan biaya penjualan.

Perusahaan menetapkan penyisihan untuk keusangan dan/atau penurunan nilai persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai bersih persediaan. Persediaan barang yang tidak terpakai karena tipe, bentuk atau model tidak sesuai kebutuhan, dipindahkan ke asset lain-lain. Persediaan yang tidak terpakai ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

k. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka untuk biaya usaha, biaya produksi/order, akan dibebankan secara proporsional dengan pendapatan yang diakui setiap periode.

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Properti Investasi

Properti investasi terdiri dari tanah dan bangunan dan prasarana yang dikuasai Perusahaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti investasi diukur sebesar nilai perolehan biaya transaksi setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi; dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.

Properti investasi kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Inventory

Finished goods and work in process are completely recognized according to production cost, the work in process is recognized according to production cost, while main and ancillary substances are recognized according to which one of the lower cost between acquired cost value and net of realization value. The acquired cost is determined with average weighted method. The net of realization value is an estimation of price of sales, in normal operating activity, less by cost of completion and marketing/sales.

The company set up the allowance for damage, obsolescence or inventories impairment base upon the result of regular review on their physical condition and net-inventory value. The stock of product inapplicable owing to its type, shape or model are inappropriate to the requirement, are posted to other asset. The stock of product inapplicable are defined by use of estimation or sales of individual stock of product in the future.

k. Prepaid Expenses

Prepaid Expenses in related to business expenses, production and order costs, will be charged to profit or loss in proportion to revenue earned and recognized in each period

Prepaid expenses are amortized in length of useful life of its individual cost by using straight line method.

l. Investment on Properties

Investment on properties consist of land rights, building and infrastructures for earning rent or incremental value or for the both of them., and not for being employed in production or providing goods or services for administrative purposes or being sold as daily normal operating activity. Investment on properties are measured by in an amount of transactional cost of acquisition after being deducted by accumulative depreciation and impairment, except for land rights is not depreciated. The total of costs presented were inclusive of replacement cost of investment on properties existed as at cost incurred, if the criteria of recognition are fulfilled; and not inclusive of daily use of the properties. Investment on properties, except for land rights, are depreciated by using declining balance method base upon estimation of economic useful life of such properties.

Investment on properties other land rights are depreciated by using the balance declining method in the basis of economic useful lives estimated of those investment on properties.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

l. Properti Investasi (Lanjutan)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laba rugi dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang dibuktikan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik atau dimulainya sewa operasi ke pihak lain. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang dibuktikan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

m. Aset Tetap

Perusahaan telah memilih model revaluasi untuk tanah berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015 dan memilih model biaya untuk aset tetap lainnya.

Tanah dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Penilaian dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar dari aset yang dinilai kembali tidak berbeda material dari nilai tercatatnya.

Perusahaan mengakui jumlah kenaikan nilai akibat revaluasi sebagai kredit ke akun surplus revaluasi aset tetap di bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan kecuali kenaikan tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi. Penurunan nilai akibat revaluasi diakui dalam laporan laba rugi kecuali penurunan nilai akibat revaluasi tersebut mengurangi jumlah selisih revaluasi yang ada untuk aset yang sama yang diakui di akun surplus revaluasi aset tetap dalam laporan perubahan ekuitas.

Pada saat penghentian aset, surplus revaluasi untuk aset tetap yang dijual dipindahkan ke saldo laba.

Dalam laporan keuangan surplus revaluasi aset tetap diakui sebagai pendapatan komprehensif lain.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

l. Investment on Properties (Continued)

Investment on properties are quitted its recognition as of releasing or when such properties are not longer employed permanently and do not possess economic usefulness in future which are expectable at the time of its release. Profit or loss arising from quitting or releasing investment on properties are recognized in profit or loss statement in the period of occurrence of its quitting or releasing.

The transfer made to investment on properties are treated, if and only if, finding the changes in function/utilisation, which are proved with the ending of its employment by the owner or the initializing of rent commercial to other party(user). finding the changes in function or utilisation, which are proved with the initializing of its utilisation by the owner or the initializing of developing for sale.

m. Fixed Assets

The Company has selected a revaluation model for land effective January 1, 2015 and chooses a cost model for other fixed assets.

Land rights are presented at fair value less the loss impairment incurred subsequent to revaluation's date.

The review on those revaluation of assets are regularly made to ascertain that fair value of those assets revaluated immaterially different to their.

The Company recognize the increment due to revaluation assets treatment as credited to account of surplus of revaluation on fixed assets under caption of equity in those of financial statement except for those increment are liable to be recognized in profit or loss statement in amounting to impairment on assets due to those revaluation prior to being recognized in profit or loss statement. The decrement value due to revaluation treatment were recognized in profit or loss statement except for those decrement value due to revaluation treatment less the excessive amount of revaluation existing at the relevant asset being recognized at account of surplus of revaluation on fixed assets in Statement of Changes in Equity.

As of derecognition of asset, revaluation's surplus of the fixed assets sold are moved to balance of profit.

In the financial statement surplus of fixed assets' revaluation were recognized as other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

m. Aset Tetap (Lanjutan)

Aset tetap selain tanah pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, dan akumulasi kerugian penurunan nilai aset tetap.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun berdasarkan tarif sebagai berikut:

Bangunan gedung	5%
Rumah dinas	5%
Mesin-mesin	10%
Peralatan dan alat angkut	25%
Instalasi listrik	10%
Inventaris kantor dan peralatan logam	25%
Meubel dan peralatan kayu	50%
Kendaraan bermotor	50%
Aset tak berwujud	25%

Khusus untuk mesin-mesin dan peralatan, alat angkut ex P2SP disusutkan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 5% - 20%. Prosentase tersebut adalah sebagai berikut :

- Mesin - mesin :	
Bubut besar, milling, Boring dan Drilling, Grinding, Press, Mesin Khusus, Mesin Roll, Heat Treatment.	5%
Bubut kecil, Gear Marking, NC, CNC, Cetak inti, Las automatic, Penyelesaian akhir, Mesin penunjang.	6%
Las semi automatic, Las manual, Peleburan	10%
- Peralatan dan alat angkut :	
Peralatan	
Kelompok I	10%
Kelompok II	10%
Kelompok III	6%
Alat Angkut	
Crane	5%
Forklift	20%

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

m. Fixed Assets (Continued)

Fixed assets other than land rights initially were recognized in amount of acquisition cost consisting of acquiring cost, and additional cost directly attributable to bring those assets to proper place and be ready to use and function well.

Subsequent to initial recognition, fixed assets other than land rights presented in the amount of acquisition cost less accumulated depreciation, and the loss of accumulated impairment of fixed assets.

Depreciation of fixed assets are taken up as of those assets being ready to be properly applied to its intention, and computed by using the declining balance method in the basis of rate, as the following:

Building
Housings
Machineries
Apparatus and Carrier Equipment
Electricity installation
Office equipment and Metalware
Furniture and wood tools
Vehicles
Intangible Asset

Especially for Machineries and Apparatus and Carrier Equipment ex P2SP were depreciated according to the basis of declining balance method at rate of 5% - 20%. Percentage of those depreciation are as follows:

- Mesin - mesin :
Huge Bubut, Milling, Boring, and Drilling, Grinding, Press, Specific Machine, Roll Machine, Heat Treatment.
Small Bubut, Gear Marking, NC, CNC, Mouldmaster, Automatic Welding Machines, Ending works, Ancillaries Machines.
Semi automatic welding, Manual Welding, Peleburan.
- Apparatus and Carrier Equipment :
Apparatus
Group I
Group II
Group III
Carrier equipment
Crane
Forklift

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan dalam laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika, dan hanya jika, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan netto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

Aset dalam konstruksi

Aset tetap dalam konstruksi disajikan sebagai bagian dalam aset tetap dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan pembangunan aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian. Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

n. Investasi pada ventura bersama

Perseroan melakukan perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak sebagaimana tersebut pada perjanjian, berupa penyerahan dana kepada pengelola dengan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerjasama menurut porsi yang ditetapkan. Pengelola proyek dibentuk dengan anggota yang berasal dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Pengelola proyek ini melaksanakan kegiatan pembangunan proyek yang berasal dari pemberi kerja (owner) dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan tersebut termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan dan proyek kepada masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerja sama. Penyerahan dana kepada pengelola proyek dicatat dan diberlakukan sebagai investasi pada ventura bersama. Bagian partisipasi dalam ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Cost of repairs and maintenances were charged to profit or loss at the time of transaction incurred. The other cost incurred, other than repairs and maintenance, occurring to amend or rectify, change or improve fixed asset recorded at cost acquired if, and only if, the potential of useful economic in the future related to those assets are inflowing to entity and the acquisition cost are accurately measurable.

The value recorded on a fixed assets are quitted its recognition when the fixed assets has no longer economic usefulness in future of expectability of its use and release. Gains or losses arising from quitting or releasing of those recognition (determined by the amount of difference the amount of net release earned and the amount of its recorded) are inputted to profit or loss at the time of quitting or releasing of the recognition are performed.

On ending of reporting period, Company make a regularly review on economic useful lives of assets,, residual value, depreciation method, and the balance of usage lives base upon technical codition.

Assets in construction/building

Asset in construction were presented as a part of fixed assets and stated at acquisition cost. All the cost including cost of borrowing, incurred in relation to building the assets are capitalized as a part of acquisition cost in construction. The total of aquisiton cost are posted to the respect of fixed assets concerned when the assets fully completed in construction or ready for being operated, and being depreciated when the assets put into operation.

n. Investment in joint venture

The Company entered into Joint Venture Agreement with various parties as set out in the agreement, that is , rendering the required fund to the management of Joint Venture with the obligation as set forth in Joint Venture Agreement in appropriate to the portions/ requirements designated..The project management is organized out of members of each parties which participate in the Joint Venture.This project managemet of Joint Venture perform and carry out activities of erecting building or construction project or projects dealing with civil works, deriving from owner / principal, and the project management is fully responsible for all activities including financial statement accountability to each participant of joint venture. The funds rendered to the project management of joint venture are recorded, and treated as investmen on joint venture by applying equity method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

o. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Setiap setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset (unit penghasil kas) lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

p. Utang Usaha dan Utang Lain-lain

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui pada nilai wajar dan kemudian diukur dengan harga perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Utang dikelompokkan sebagai liabilitas lancar apabila pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas tidak lancar.

q. Uang muka order dari pemberi kerja

Uang muka dari pemberi kerja merupakan uang muka yang diterima dari pemberi kerja. Jumlah tersebut secara proporsional akan dikompensasikan dengan tagihan/termin yang didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai.

r. Liabilitas Imbalan Paska Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar. Imbalan kerja jangka pendek termasuk upah, gaji, bonus dan insentif.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

o. Impairment on Non Monetary Assets

Upon every ending of reporting period, Company make assessment on whether or not there are the indication that the assets undergo an impairment. If such those indications are found, then Company will estimate cost of recovery assets. If they are impossible to estimate cost of recovery on individual asset, the Company make an estimation on recovery amount from cash earning power on this asset.

A recovery amount is a higher amount between fair value less releasing cost and its utility value.

If, and only if, asset amount recovery (cash earning power unit) lower than its recorded amount, then asset recorded amount (cash earning power unit) are decreased up to amount recovery. The decrease is a loss of impairment and liable to be recognized in profit or loss.

Loss of impairment having been recognized in previous period are reversed if, and only if, found changes in estimation applied to determine the asset amount recovery ever since the latest loss of impairment recognized. If such as that, the assets recorded amount are increased (up) to its amount recovery. These increases are as a reversal loss of impairment.

p. Trade payables and Other Payables

Trade payables and Other Payables firstly are recognized at fair value, subsequently measured at acquisition being amortized by using effective interest rate method. The payables are grouped as current liabilities if the payments are falling due within one year or less (or longer than one year depend on a normal operation of business cycles). Otherwise those payables are presented as non-current liabilities.

q. Advance received from the principal

Advances received from the principals are advances received as required in contractual basis between the principal and company. The advances will be proportionally compensated with the installment billed to principal under physical progress completed.

r. Provision for employee service entitlements

Current Employees' Services

Current Employees' benefits are recognized when the employees have rendered their services, in the amount-not-discounted of current employment benefit which are expectable to be paid. Current employment benefit are including: wages, salaries, bonuses and incentives.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

r. Liabilitas Imbalan Paska Kerja (Lanjutan)

Imbalan Paska Kerja

Imbalan paska kerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang- Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Perusahaan mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti netto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Biaya jasa kini, setiap biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan bunga netto atas liabilitas (aset) imbalan pasti netto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti netto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan pajak penjualan (PPN).

a. Metode Pengakuan Pendapatan

i. Atas order Multi Years Contract / penyelesaian lebih dari satu tahun (umumnya order pekerjaan konstruksi, pekerjaan sipil dan permesinan) pendapatan diakui untuk setiap tahap penyelesaian didasarkan pada metode persentase penyelesaian (Percentage Completion Method) yang dihitung berdasarkan persentase penyelesaian secara phisik.

ii. Order-order yang sifatnya serial produk (Produk Cor dan alat berat) menggunakan Completion Method, yaitu pendapatan diakui pada saat barang telah diserahkan kepada pembeli, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan (BAP).

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

r. Provision for employee service entitlements (Continued)

Post Employees' Services

Post Employees' Services such as pensions, severance payments, appreciation/reward of time life dedications are defined and determined based upon Man Power Bill No. 13/2003 ("UU 13/2003").

The company recognized a liabilities of net post employees' services at the ascertained present value of employees' services in ending reporting period minus fair value of program assets being computed in actuarial assumption by using Projected Unit Credit Method. The present value of employees' services liabilities are determined by discounting those employees' services.

Present value of services's cost, any past cost of service, gains or losses on completion, and net interest of liabilities (assets) of post-employees'service-net are recognized in profit or loss.

Remeasurement on liabilities (assets) of post-employees'service-net consisting of actuarial gains or losses, return (yield) on asset program and any of the impact on changes in assets limitation are recognized as other comprehensive income.

s. Recognition of Revenue and Expense

Revenues are recognized if the most possibility of economic's benefit will be definitely earned and its amount are accurately measurable. Revenues are measured at fair value of return received, not including discount, rebate and value added tax (VAT).

a Method of Recognizing Revenue

i. For the Multi Years Contract of work services/(time consumption required for more than one-year work services-extending to subsequent year (mainly work services contract of: construction assembling, civil works, and plant & machineries) , revenue is recognized at the basis of any stage/phase of work service completion (Percentage Completion Method), computed according to physical completion progress of work services.

ii. The work order services, serial product in nature (Product of Cor and heavy duty machinery) applying Completion Method, that is, revenue is recognized as of its product (out put) delivered to purchaser, accompanied with memorandum of delivery (BAP).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

iii. Order-order yang penyelesaiannya kurang dari satu tahun, pendapatan diakui :

- Untuk order-order yang penyelesaiannya masih dalam satu periode akuntansi (tahun anggaran) maka pendapatan diakui untuk setiap tahap penyelesaiannya sampai pekerjaan selesai pada tahun yang bersangkutan.
- Untuk order (Konstruksi, Sipil dan Permesinan) yang penyelesaiannya melewati satu periode akuntansi (periode anggaran) maka pendapatan diakui sesuai dengan kemajuan pekerjaan pada saat berakhirnya periode akuntansi (tutup buku).

b. Metode Pengakuan Beban

- Order yang sifatnya Multi Years (order yang penyelesaiannya melewati beberapa periode akuntansi), bilamana dalam tahun berjalan order tersebut telah selesai seluruhnya (difaktur 100%) maka beban pokok penjualan dihitung jumlah biaya order seluruhnya dengan memperhitungkan biaya order yang pendapatannya telah diakui dalam tahun sebelumnya.
- Untuk order yang penyelesaiannya dapat diklasifikasikan kedalam unit penyerahan, beban pokok penjualan dihitung berdasarkan unit barang / jasa yang diserahkan.
- Untuk order yang penyelesaiannya masih dalam satu periode akuntansi maka seluruh beban order tersebut menjadi beban pokok penjualan tahun yang bersangkutan.
- Untuk order-order yang penyelesaiannya melewati satu periode akuntansi, beban pokok penjualan dihitung sebesar jumlah beban yang telah dikeluarkan untuk mencapai persentase penyelesaian pekerjaan tersebut.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

s. Recognition of Revenue and Expense (Continued)

iii. The work order services which their completion are within one year or less, the recognition of revenue are as follows :

- For the work order services which their completion are within one year accounting period (annual budgetary) hence the revenue is recognized at any of its completion phase until the work order services completed in the relevant year.
- For the work order services (Constructions Assembling, Civil Works and Plant & Machineries) which their completion are extending to subsequent a accounting period (annual budgetary) hence the revenue is recognized at the physical work progress as of the date of closing books.

b Method of Recognizing Expenses

- The work order services which its nature and work to complete take much time, and or elapse several accounting period, if in the current year, those work order services had fully completed, and had been billed 100%, therefore the cost of sales are computed out of their aggregate cost of work order services by compensating with their cost of work order services at which its revenues had been recognized (percentage completion method) in preceding accounting period- preceding year.
- For work order services which its completion may be reclassified into work services delivery unit, the cost of sales were computed at the basis of its work service unit rendered/delivered.
- For work order services which its completion incur within or in one accounting period, the whole cost of those work orders were charged as the cost of sales for the relevant year.
- The work order services which its completion elapse one accounting period, the cost of sales are computed at the cost incurred to reach the percentage of work-to-complete.

Expenses are recognized cost as incurred by using accrual basis.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

t. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Perusahaan mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

t. Income Tax

Tax expenses are the aggregated amount of current tax and deferred, and are calculated in determining profit or loss in an accounting period. Current tax and deferred are recognized in profit or loss, except for income tax arising out of the transactions or occurrences recognized in other comprehensive income or recognized directly in equity. In this respect, the taxes are recognized in other comprehensive income, and or equity respectively.

Total current income tax for the current and preceding period which are still unsettled are recognized as liability. If the amount of income tax had already paid for the current and preceding period in excess of the proper amount of income tax payable in those of period, then its excess is recognized as assets. Current tax liability (asset) for the current and preceding period are measured at the amount projected to be paid to, or refunded/returned from tax authority are computed by using tax-rate, and tax statute in effect or substantively put into enactment in the end of reporting period.

The benefit that is related to tax losses returnable to recover current income tax of preceding period are recognized as asset. Deferred tax assets are recognized at accumulation of tax losses uncompensated and tax credit unexpired as long as the most probability of future availability of taxable income to be set off with tax losses uncompensated and tax credit unexpired.

Deferred taxes are measured by using tax-rate as estimated in effect when assets recovered or liability settled, base on tax-rate (and tax regulatory) in enactment or substantively put into enactment in the end of reporting period.

The measurement of deferred tax asset and liability reflect the tax consequence in the way the company assess, as of reporting period, to recover or settle the presented amount of its asset and liability.

The presented amount of deferred tax assets were repeatedly reviewed in ending period of report. The company reduced the presented amount of deferred tax assets if the most probability of taxable income is not longer available in adequate amount to set off a part of, or all of amount of those deferred tax asset. Any of the reducing is made reversal treatment on deferred tax asset coming to reach the most probability of taxable income amount is adequately available.

3. SUMBER KETIDAKPASTIAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan akuntansi

Menentukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan
Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2e.

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Menilai jumlah terpulihkan dari akun piutang
Perusahaan mengevaluasi akun piutang tertentu yang diketahui bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2g dan 5.

3. THE UNCERTAINTY OF ESTIMATION SOURCES AND SIGNIFICANT ACCOUNTING CONSIDERATION

In the preparation of financial statements the company compell its management to determine assessment, consideration, estimation and assumption having impact on the amount claimed in financial report with respect to revenues, expenses, asset and liability, and disclosure on contingent liability, in the end of reporting period. The uncertainty of assumption and estimation will certainly give arise to material adjustment on assets and liabilities in the subsequent reporting period.

Future essential assumption and major sources of estimation of other uncertaintys of the reporting date are liable to significant risk for treating material adjustment to the presented amount of assets and liability in subsequent are set out in the following discourse. The company determines consumption and estimation on available parameter at the date of consolidated financial report are prepared. Assumptionand circumtances with respect of future developoment or growth are likely to changes owing to market changes or the condition and circumstances are out of the company's control. Those shanges are reflected in assumption relevant to its occurence.

Sound Judgment in determining accounting policies.

*Determining group of monetary asset and liability
The company determines the classification of certain asset and liability as monetary asset and monetary liability by considering wether or not the definition specified and required in PSAK No. 55 (Revised 2014) are fulfilled. Accordingly, the monetary asset and liability are recognized in pursuant to Company's accounting policy as disclosed in Note 2e.*

Significant Accounting Assumption and Estimation

*Assessing recovery amount of account receivable
The company make an evaluation the certain account receivables which are identified that the certain consumers are incapable of settling their monetary liabilities. In this respect, the Company uses judgment, base on the facts and circumstances existing, including but not limited to, regarding coverage time relationship with consumers and credit status of consumers, base on available track record of third parties and market factor having already noticed, to record specific amortization on consumer's liability of the amount payable so as to reduce the amount receivable are expected to be received by Company. This Specific amortization are reevaluated an make any adjustment on, whenever the new or additional information obtained have an impact on amount of amortization on decrementing receivables value. The explanatory in detail are disclosed in Note 2.h, and 5.*

**3. SUMBER KETIDAKPASTIAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING** *(Lanjutan)*

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting *(Lanjutan)*

Menentukan metode penyusutan dan estimasi umur manfaat properti investasi dan aset tetap
Estimasi dari masa manfaat properti investasi dan aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Perusahaan secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Biaya perolehan properti investasi dan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun.

Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Estimasi beban pensiun dan imbalan kerja

Penentuan liabilitas biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas didalam pendapatan komprehensif lainnya diperiode dimana biaya ini timbul. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 28.

Estimasi pajak tangguhan

Pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah pajak tangguhan yang diakui sebagai laba atau rugi serta jumlah yang dicatat sebagai aset pajak tangguhan.

**3. THE UNCERTAINTY OF ESTIMATION SOURCES AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING CONSIDERATION** *(Continued)*

Significant Accounting Assumption and Estimation
(Continued)

*Determining depreciation method and useful lives estimation on fixed assets and investment on properties
Estimation on useful lives of fixed assets and investment on properties are based on the result of collective reviews on industrial practices, internal technique and experiences for the similar assets. The acquisition cost of fixed assets and investment on properties are depreciated or amortized by using declining balance method.*

The estimation on useful lives are made reviews at least in every year-end reporting, and made amends or revisions if the expected estimations differ from those of previous caused by usage and physical damage, technically defective/obsolescence or commercial and legal, and or other limitation on usage of assets. However, it is possible that the future proceeds out of operation may be materially affected by the changes in estimation caused with the factors as mentioned above.

**Estimation on pension allowances and post-employees's
benefits/services.**

Determination of pension allowances payable and post employees's services depends on assumptions selected by independent actuarial estimation in assessing those of amount. Those assumptions include discount rate, annual rate of salaries increment, annual ratios of employees' resignation, ratio of disabilities, ratio of mortality. Realization differing from the Company's assumption is charged to or credited to equity in other comprehensive income in the period when the expenses incurred. Meanwhile the Company believe that those assumptions are reasonable and appropriate, considerable differences on actual result or significant changes in assumptions applied by Company may materially influence the liability estimated on pension allowances post employees' services and net of post-employees' services. Disclosures in more detail is described in Note 28.

Estimation of deferred tax.

The management's judgment is required to make assessment on amount of deferred tax which is recognized as profit or loss, and amount recorded as deferred tax assets.

3. SUMBER KETIDAKPASTIAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

Estimasi pajak tangguhan (Lanjutan)

Pengakuan tersebut dilakukan hanya jika besar kemungkinan aset tersebut akan terpulihkan dalam bentuk manfaat ekonomi yang akan diterima pada periode mendatang, dimana perbedaan temporer dan akumulasi rugi fiskal masih dapat digunakan. Manajemen juga mempertimbangkan estimasi penghasilan kena pajak di masa datang dan perencanaan stratejik perpajakan dalam mengevaluasi aset pajak tangguhnya agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku maupun perubahannya. Sebagai akibatnya, terkait dengan sifat bawaannya, ada kemungkinan bahwa perhitungan pajak tangguhan berhubungan dengan pola yang kompleks dimana penilaian memerlukan pertimbangan dan tidak diharapkan menghasilkan perhitungan yang akurat.

u. Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

4. KAS DAN SETARA KAS

Terdiri dari :

	2018	2017
Kas	1.455.993.767	652.079.183
Bank		
Pihak berelasi		
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	154.373.556.559	106.928.499.493
PT Bank Syariah Mandiri	9.500.741.916	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9.131.496.183	6.653.087.202
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.931.512.591	40.474.798.009
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	41.617.972	9.187.441
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	151.433.544.673	240.050.736.809
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	230.948.491	241.080.563
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	135.969.784	393.442.184
Euro		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14.425.653.618	-
Sub jumlah	342.205.041.787	394.750.831.702

3. THE UNCERTAINTY OF ESTIMATION SOURCES AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING CONSIDERATION (Continued)

Significant Accounting Assumption and Estimation
(Continued)

Estimation deferred tax (Continued)

Those recognition are treated if only the most probability of the assets are recoverable in the form of economic benefit which is receiving in subsequent period, whenever the temporary differences and accumulation of fiscal loss are still able to be utilized. Management also judges to estimate the future taxable income and design strategic taxation in evaluating its deferred tax assets in order to comply with tax regulatory and its amendment in effect. Consequently, due to its inherent nature, there are possibility that the computation of deferred tax closely relate with a complicated scheme, when the assessment require judgment, and hence the estimated amount obtained are not expected to be precise and accurate.

u. Earning per Share

Basic earnings per share is computed by dividing profit or loss with the weighted average number of shares outstanding during the year.

4. CASH AND CASH EQUIVALENT

Consists of :

	2018	2017
Cash	1.455.993.767	652.079.183
Bank		
Related parties		
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	154.373.556.559	106.928.499.493
PT Bank Syariah Mandiri	9.500.741.916	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	9.131.496.183	6.653.087.202
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	2.931.512.591	40.474.798.009
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	41.617.972	9.187.441
United State Dollar		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	151.433.544.673	240.050.736.809
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	230.948.491	241.080.563
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	135.969.784	393.442.184
Euro		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14.425.653.618	-
Sub total	342.205.041.787	394.750.831.702

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 SERTA UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENT (Continued)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Pihak ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.	34.372.606.484	32.688.200.792	PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
PT Bank CIMB Niaga, Tbk.	16.059.821.536	167.941.653.280	PT Bank CIMB Niaga, Tbk.
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	626.108.309	-	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
PT Bank Worry	45.596.563	-	PT Bank Worry
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk	10.635.076	10.612.584	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	2.719.961	353.987.017	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Mestika Dharma, Tbk.	-	16.947.106	PT Bank Mestika Dharma, Tbk.
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan	-	5.682.093	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan
Dolar Amerika Serikat			United State Dollar
PT Bank CIMB Niaga, Tbk.	30.389.775.772	-	PT Bank CIMB Niaga, Tbk.
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.	3.676.697.372	2.320.172.630	PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
PT Bank Worry	14.481.000	-	PT Bank Worry
Sub Jumlah	<u>85.198.442.072</u>	<u>203.337.255.503</u>	Sub total
Deposito			Time Deposite
Pihak berelasi			Related party
Rupiah			Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	220.000.000.000	300.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	100.000.000.000	100.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	465.769.340	453.036.488	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Pihak ketiga			Third parties
Dolar Amerika Serikat			United State Dollar
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	7.964.550.000	7.451.400.000	PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Sub Jumlah	<u>328.430.319.340</u>	<u>407.904.436.488</u>	Sub total
Jumlah	<u><u>757.289.796.966</u></u>	<u><u>1.006.644.602.876</u></u>	Total
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			Interest rate on time deposits
Rupiah	4,25% - 6,75%	4,25% - 6,75%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	17%:83%	17%:83%	United States Dollar

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 SERTA UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan piutang usaha dari penyerahan pekerjaan dan barang hasil industri yang telah diterbitkan fakturnya, dengan rincian sebagai berikut :

5. ACCOUNT RECEIVABLES

These accounts are receivables deriving from rendering work services and industrial product which were billed/invoiced, the detail of receivables are as follows:

	2018	2017	
Pihak berelasi			Related parties
PT Pertamina (Persero)	31.206.835.933	33.775.960.322	PT Pertamina (Persero)
PT Industri Kereta Api (Persero)	27.985.272.553	28.578.226.347	PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Rekayasa Industri	15.489.739.235	5.523.148.282	PT Rekayasa Industri
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	14.755.855.936	3.412.389.214	PT Wijaya Karya (Persero), Tbk
PTPN IX	13.059.049.651	10.283.106.425	PTPN IX
PT Rajawali	11.719.204.499	8.740.868.139	PT Rajawali
PTPN XI	10.568.160.740	6.924.507.132	PTPN XI
PT PLN (Persero)	8.652.459.425	17.502.617.494	PT PLN (Persero)
PTPN VII	7.243.166.664	4.815.485.762	PTPN VII
PT Pelindo IV	5.620.495.594	5.620.495.594	PT Pelindo IV
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	7.704.490.000	10.467.200.000	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Hutama Karya (Persero)	3.778.255.146	4.317.755.752	PT Hutama Karya (Persero)
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	3.048.513.100	3.048.513.100	PT Adhi Karya (Persero), Tbk
PT Aneka Tambang (Persero), Tbk	2.106.810.001	3.655.620.001	PT Aneka Tambang (Persero), Tbk
Perum Jasa Tirta	1.760.521.810	2.646.846.221	Perum Jasa Tirta
PT Pelindo II	1.613.675.946	1.613.675.946	PT Pelindo II
PT Boma Bisma Indra (Persero)	1.468.901.848	1.504.162.848	PT Boma Bisma Indra (Persero)
PT PAL Indonesia	376.687.380	1.626.207.800	PT PAL Indonesia
PT Indonesia Power	59.998.000	3.015.898.290	PT Indonesia Power
PT Krakatau Semen Indonesia	-	3.647.709.074	PT Krakatau Semen Indonesia
PT Perum Perindo	-	2.128.876.433	PT Perum Perindo
Lainnya (kurang dari 1 milyar)	20.031.961.274	11.601.796.046	Other (less than 1 billion)
Jumlah pihak berelasi	188.250.054.735	174.451.066.222	Total of related parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(16.745.836.681)	(12.258.113.067)	Allowance for impairment losses
Jumlah piutang usaha pihak berelasi	171.504.218.053	162.192.953.155	Total of receivables related parties
Pihak ketiga			Third parties
PT Siemens AG (Jerman)	30.015.915.102	-	PT Siemens AG (Jerman)
Standar Car Truck	27.826.497.136	41.321.372.136	Standar Car Truck
KSO Wika-Barata	22.313.896.626	-	KSO Wika-Barata
Adhi-Nindya KSO	8.898.269.386	-	Adhi-Nindya KSO
PT Geolink Nusantara	7.191.810.428	7.264.722.332	PT Geolink Nusantara
PT Dharma Agung Sejati	6.162.810.582	6.162.810.582	PT Dharma Agung Sejati
PT Daikin Air Conditioning	3.713.524.540	-	PT Daikin Air Conditioning
Kementerian Pertanian	3.521.972.364	-	Kementerian Pertanian
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.514.820.674	197.761.800	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PT Edwag Mitra Sukses	2.402.203.240	677.020.000	PT Edwag Mitra Sukses
PT Pembangkit Listrik Induring	2.262.200.000	-	PT Pembangkit Listrik Induring
PT JGC Indonesia	2.044.052.283	2.530.123.867	PT JGC Indonesia
PT Waskita Brantas JO	2.043.608.843	2.043.608.843	PT Waskita Brantas JO
PT Indocement Tunggal	1.026.905.380	21.280.508.000	PT Indocement Tunggal
Saldo dipindahkan	122.938.486.584	81.477.927.559	Carried forward

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 SERTA UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

5. ACCOUNT RECEIVABLES (Continued)

	2018	2017
Saldo pindahan	122.938.486.584	81.477.927.559
Balai Besar Wilayah Sungai	1.930.807.331	1.802.943.992
Nindya Karya Barata Jo.	1.800.766.866	761.041.720
Konsorsium IKPT- Adhi	1.708.622.793	1.708.622.793
PT Geo Putera Perkasa	1.647.300.437	1.647.300.437
Prambanan Purut KSO	875.889.912	1.424.577.912
PT Siskem Aneka Indonesia	589.428.523	837.220.443
PT Sempalan Tehnologi Nasional	535.338.588	1.230.080.090
PT Inogren Jakarta	300.000.000	1.593.396.630
PT Gunung Madu Plantation	222.444.359	1.654.285.950
PT Sentana Adidaya Pratama	50.160.000	1.832.160.000
PT Istana Putra Agung	-	1.701.782.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp.1.000.000.000)	22.879.773.367	12.653.222.662
Jumlah pihak ketiga	155.479.018.760	110.324.562.189
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.735.478.184)	(13.513.009.586)
Jumlah piutang usaha pihak ketiga	140.743.540.576	96.811.552.603
Jumlah piutang usaha	312.247.758.629	259.004.505.758

Brought forward
Balai Besar Wilayah Sungai
Nindya Karya Barata Jo.
Konsorsium IKPT- Adhi
PT Geo Putera Perkasa
Prambanan Purut KSO
PT Siskem Aneka Indonesia
PT Sempalan Tehnologi Nasional
PT Inogren Jakarta
PT Gunung Madu Plantation
PT Sentana Adidaya Pratama
PT Istana Putra Agung
Others (each below Rp.1.000.000.000)
Total of third parties
Allowance for impairment losses
Total of receivables third parties
Total trade account receivables

Manajemen telah membentuk cadangan penurunan nilai piutang berdasarkan penilaian individual atas masing-masing pelanggan.

The management provided allowance for impairment losses on receivables based on individual assessment of each customers.

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

Movement in the allowance for impairment losses are as follows:

	2018	2017
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang		
Saldo awal	25.771.122.653	15.189.317.106
Mutasi	5.710.192.213	10.581.805.547
Saldo akhir	31.481.314.866	25.771.122.653

Allowance for impairment losses
Beginning balance
Movement
Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang adalah cukup.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

Rincian piutang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut :

The detailed aging schedule of trade accounts receivable are as follows:

	2018	2017
Sampai dengan 3 bulan	118.947.633.588	149.955.965.515
> 3 bulan - 6 bulan	51.685.077.062	41.149.683.680
> 6 bulan - 9 bulan	46.887.022.317	17.898.465.085
> 9 bulan - 12 bulan	30.949.612.376	13.898.242.653
> 12 bulan	95.259.728.152	61.873.271.478
Jumlah	343.729.073.495	284.775.628.411
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	(31.481.314.866)	(25.771.122.653)
Jumlah piutang usaha - bersih	312.247.758.629	259.004.505.758

0 month up to 3 month
>3 month to 6 month
>6 month to 9 month
> 9 month to 12 month
12 month over
Total
Allowance for impairment losses
Total trade account receivables -net

Sebagian piutang usaha dijaminkan untuk fasilitas pinjaman jangka pendek (Catatan 19).

Some trade accounts receivable have been pledged as collateral for facilities from banks (Notes 19).

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 SERTA UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG RETENSI

Akun ini terdiri dari :

	2018	2017
Pihak berelasi		
PT PLN (Persero)	44.235.987.781	44.235.987.781
Perum Perhutani	5.053.399.998	5.053.399.998
Perum Perindo	1.891.660.200	-
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	1.748.587.500	1.748.587.500
PT Indonesia Power	-	1.540.300.000
PTPN XI	1.246.192.291	1.227.721.200
PT Petrokimia Gresik	1.087.500.000	1.087.500.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp. 1.000.000.000)	3.242.464.595	4.663.359.961
Jumlah piutang pihak berelasi	58.505.792.365	59.556.856.440
Cadangan kerugian penurunan nilai	(269.122.548)	(205.765.354)
Jumlah	58.236.669.817	59.351.091.086
Pihak ketiga		
Waskita-Brantas JO	2.124.000.000	2.124.000.000
Waskita-GXED JO	1.706.639.879	1.706.639.879
Konsorsium IKPT-Adhi	1.305.632.762	1.305.632.762
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp. 1.000.000.000)	1.552.591.737	1.832.979.027
Jumlah piutang pihak ketiga	6.688.864.378	6.969.251.668
Cadangan kerugian penurunan nilai	(245.904.276)	(221.860.224)
Jumlah	6.442.960.102	6.747.391.444
Jumlah piutang retensi	64.679.629.918	66.098.482.530

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang		
Saldo awal	427.625.578	442.476.921
Mutasi	87.401.246	(14.851.343)
Saldo akhir	515.026.824	427.625.578

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang retensi adalah cukup.

Piutang Retensi berdasarkan umur adalah sebagai berikut :

	2018	2017
Sampai dengan 3 bulan	45.112.233.523	61.908.711.021
> 3 bulan - 6 bulan	477.893.144	252.758.685
> 6 bulan - 9 bulan	656.579.342	1.134.802.007
> 9 bulan - 12 bulan	15.320.279.310	34.116.328
> 12 bulan	3.627.671.424	3.195.720.067
Jumlah	65.194.656.743	66.526.108.108
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	(515.026.824)	(427.625.578)
Jumlah piutang retensi - bersih	64.679.629.918	66.098.482.530

6. RETENTION ACCOUNT

This account consist of:

Related parties
PT PLN (Persero)
Perum Perhutani
Perum Perindo
PT Adhi Karya (Persero), Tbk
PT Indonesia Power
PTPN XI
PT Petrokimia Gresik
Others (each below Rp. 1.000.000.000)
Total of related parties receivables
Allowance for impairment losses
Total
Third parties
Waskita-Brantas JO
Waskita-GXED JO
Konsorsium IKPT-Adhi
Others (each below Rp. 1.000.000.000)
Total of third parties receivables
Allowance for impairment losses
Total
Total retention receivables

Movement in the allowance for impairment losses are as follows:

Allowance for impairment losses
Beginning balance
Movement
Ending balance

Management believes that the allowance for impairment losses of retention receivable is adequate.

The aging of Retention Accounts were as follows:

0 month up to 3 month
> 3 month to 6 month
> 6 month to 9 month
> 9 month to 12 month
12 month over
Total
Allowance for impairment losses
Total retention receivables -net

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 SERTA UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. TAGIHAN BRUTO PEMBERI KERJA

Akun ini terdiri dari :

	2018	2017
Biaya konstruksi	2.747.146.191.618	1.179.208.619.234
Laba yang diakui	458.937.329.691	343.915.986.272
Sub Jumlah	3.206.083.521.309	1.523.124.605.505
Penagihan	(1.404.499.425.486)	(908.644.612.413)
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	1.801.584.095.823	614.479.993.093
Jumlah tagihan bruto kepada pemberi kerja - bersih	<u>1.801.584.095.823</u>	<u>614.479.993.093</u>

Rincian saldo tagihan bruto pemberi kerja adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Pihak berelasi		
PTPN X	102.445.825.057	1.504.862.823
PT PLN (Persero)	49.178.810.262	63.452.379.296
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	27.735.034.000	6.687.177.115
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	23.516.237.592	34.195.002.824
PT Pertamina (Persero)	19.184.066.439	65.794.244.770
PT Garam (Persero)	15.622.197.000	7.130.400.000
PT Rekayasa Industri (Persero)	10.457.878.686	3.669.184.839
PT Hutama Karya (Persero)	9.441.383.007	10.359.740.412
PT Nindya Karya (Persero)	7.230.387.308	-
PT Rajawali II	6.999.672.894	8.540.054.798
PT Pembangkit Jawa Bali	3.012.888.801	-
PTPN XI	6.694.985.800	91.646.622.121
PTPN VII	5.925.617.616	4.822.575.394
PT Pindad (Persero)	4.115.869.126	6.114.324.118
PT Petrokimia Gresik	3.965.281.352	2.552.236.352
PT Indonesia Power	8.035.935.740	26.835.566.632
PT Perum Jasa Tirta	3.282.324.019	11.152.593.377
PT Rajawali I	6.737.997.289	-
PTPN IX	2.414.108.045	44.033.979.527
PT PAL Indonesia (Persero)	2.297.692.000	2.297.692.000
PT Brantas Abipraya	1.913.738.488	4.190.352.987
PTPN II	1.301.600.000	2.470.000.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp. 1.000.000.000)	768.074.262	20.601.432.965
Sub jumlah	<u>322.277.604.785</u>	<u>418.050.422.350</u>

Pihak ketiga

PT Prima Alam Gemilang	1.098.748.800.000	-
PT Berkah Alam Lestari Energi	45.109.843.014	-
Balai Besar Wilayah Sungai	60.114.335.285	13.285.511.972
PT Kalinusa Agro Nusantara	29.698.454.545	40.090.909.091
Nindya-Rezeki KSO	29.640.000.000	-
PT Truba Jaya Engineering	24.067.859.300	-
Saldo dipindahkan	<u>1.287.379.292.143</u>	<u>53.376.421.063</u>

7. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS

This account consist of:

	2018	2017
Construction cost	2.747.146.191.618	1.179.208.619.234
Recognized profit	458.937.329.691	343.915.986.272
Subtotal	3.206.083.521.309	1.523.124.605.505
Progress billing	(1.404.499.425.486)	(908.644.612.413)
Due from customer	1.801.584.095.823	614.479.993.093
Total due from customer - net	<u>1.801.584.095.823</u>	<u>614.479.993.093</u>

Detail of gross amount due from customers as follow:

	2018	2017
Related parties		
PTPN X	102.445.825.057	1.504.862.823
PT PLN (Persero)	49.178.810.262	63.452.379.296
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	27.735.034.000	6.687.177.115
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	23.516.237.592	34.195.002.824
PT Pertamina (Persero)	19.184.066.439	65.794.244.770
PT Garam (Persero)	15.622.197.000	7.130.400.000
PT Rekayasa Industri (Persero)	10.457.878.686	3.669.184.839
PT Hutama Karya (Persero)	9.441.383.007	10.359.740.412
PT Nindya Karya (Persero)	7.230.387.308	-
PT Rajawali II	6.999.672.894	8.540.054.798
PT Pembangkit Jawa Bali	3.012.888.801	-
PTPN XI	6.694.985.800	91.646.622.121
PTPN VII	5.925.617.616	4.822.575.394
PT Pindad (Persero)	4.115.869.126	6.114.324.118
PT Petrokimia Gresik	3.965.281.352	2.552.236.352
PT Indonesia Power	8.035.935.740	26.835.566.632
PT Perum Jasa Tirta	3.282.324.019	11.152.593.377
PT Rajawali I	6.737.997.289	-
PTPN IX	2.414.108.045	44.033.979.527
PT PAL Indonesia (Persero)	2.297.692.000	2.297.692.000
PT Brantas Abipraya	1.913.738.488	4.190.352.987
PTPN II	1.301.600.000	2.470.000.000
Others (each below Rp. 1.000.000.000)	768.074.262	20.601.432.965
Sub total	<u>322.277.604.785</u>	<u>418.050.422.350</u>

Third parties

PT Prima Alam Gemilang	1.098.748.800.000	-
PT Berkah Alam Lestari Energi	45.109.843.014	-
BBWS	60.114.335.285	13.285.511.972
PT Kalinusa Agro Nusantara	29.698.454.545	40.090.909.091
Nindya-Rezeki KSO	29.640.000.000	-
PT Truba Jaya Engineering	24.067.859.300	-
Carried forward	<u>1.287.379.292.143</u>	<u>53.376.421.063</u>

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 SERTA UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. TAGIHAN BRUTO PEMBERI KERJA

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Saldo pindahan	1.287.379.292.143	53.376.421.063
NK-Barata JO	19.677.171.371	19.888.318.586
KSO Wika-Barata	19.060.752.503	-
Adhi-Nindya KSO	17.131.601.316	27.489.855.015
KSO Wika-Barata-Multinas	16.809.815.777	-
Wika-Basuki KSO	14.681.884.182	-
Thyssenkrup Industrial	11.316.477.822	-
A A F	8.644.403.712	4.082.063.622
Brantas-Sacna KSO	8.125.000.000	-
Waskita-Adhi KSO	7.273.381.408	-
PT Sri Rejeki Fertilizer	6.756.750.000	-
Wika-Bumi-Karsa JO	6.647.965.035	6.517.755.035
PP APL KSO	5.672.061.857	3.241.178.204
WIKA HK NK KSO	5.005.146.607	4.892.426.472
PT Kebon Agung	5.287.370.000	1.428.312.275
Nindya-Hutama KSO	6.008.779.813	7.928.284.469
BAP-Waskita KSO	3.087.821.650	6.644.679.500
Jakon-Bumi-Karsa KSO	2.929.367.175	2.828.302.005
Wika-Nindya KSO	2.428.186.893	5.435.684.897
PP HK KONSORSIUM	2.293.054.758	3.364.567.849
Adhi Karya KSO	2.233.894.985	-
PT Laju Perdana Indah	1.712.300.800	-
Dalle Enegy	1.625.435.700	-
JGC	1.387.909.745	2.240.583.222
Wika-Tribakti KSO	1.355.516.056	1.267.423.566
PT Pembangkit Listrik Induring	1.106.000.000	3.120.000.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp. 1.000.000.000)	13.669.149.730	42.683.714.965
Sub jumlah	<u>1.479.306.491.038</u>	<u>196.429.570.743</u>
Jumlah tagihan bruto	<u>1.801.584.095.823</u>	<u>614.479.993.093</u>

7. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS

Brought forward
NK-Barata JO
KSO Wika-Barata
Adhi-Nindya KSO
KSO Wika-Barata-Multinas
Wika-Basuki KSO
Thyssenkrup Industrial
A A F
Brantas-Sacna KSO
Waskita-Adhi KSO
PT Sri Rejeki Fertilizer
Wika-Bumi-Karsa JO
PP APL KSO
WIKA HK NK KSO
PT Kebon Agung
Nindya-Hutama KSO
BAP-Waskita KSO
Jakon-Bumi-Karsa KSO
Wika-Nindya KSO
PP HK KONSORSIUM
Adhi Karya KSO
PT Laju Perdana Indah
Dalle Enegy
JGC
Wika-Tribakti KSO
PT Pembangkit Listrik Induring
Others (each below Rp. 1.000.000.000)
Sub total
Total gross amount due from customers

8. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

	<u>2018</u>
Piutang karyawan	1.430.238.828
Jumlah	<u>1.430.238.828</u>

8. OTHER RECEIVABLES

This account consist of :

	<u>2017</u>
Employees'receivables	602.953.194
Total	<u>602.953.194</u>

Piutang karyawan merupakan pinjaman yang diberikan kepada karyawan untuk keperluan pengobatan atau kecelakaan dan keperluan lainnya yang pelunasannya dilakukan dengan cara pemotongan gaji karyawan yang bersangkutan.

Employee receivables are loans given to employees for medical or accident purposes and other purposes for which payment is made by deducting the salaries of the employees concerned.

9. PERSEDIAAN

Saldo persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 terdiri atas :

	2018
Barang hasil produksi / Barang jadi	22.861.805.456
Pekerjaan dalam pelaksanaan	246.567.415.805
Bahan baku/pembantu	148.068.229.498
Suku cadang/peralatan	136.844.675
Jumlah	417.634.295.435
Penyisihan penurunan nilai persediaan	(1.244.302.512)
Jumlah	416.389.992.923

Barang hasil produksi antara lain merupakan barang jadi di Divisi Komponen Turbin, sisa produk pengecoran Gresik dan persediaan ex proyek baik di Unit Gresik maupun di pabrik-pabrik. Persediaan barang jadi tahun 2018 diantaranya merupakan persediaan mother station ex Proyek Station Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) senilai Rp17.752.654.325.

Pekerjaan dalam pelaksanaan sebagian besar merupakan pekerjaan dalam proses produk pengecoran di Gresik dan Divisi Komponen Turbin.

Persediaan bahan baku / pembantu merupakan persediaan bahan seluruh unit bisnis dan pabrik.

Suku cadang merupakan spare part peralatan ex Proyek Pengembangan Sarana Produksi (P2SP).

Penurunan nilai persediaan merupakan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan serta harga jual pada saat tanggal pelaporan.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan untuk persediaan usang telah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari persediaan usang.

Sebagian persediaan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka pendek Perusahaan (Catatan 19).

10. UANG MUKA

Akun ini terdiri dari :

	2018
Uang muka pemasok	128.355.126.287
Uang muka operasional	51.553.182.667
Uang muka subkontraktor	6.126.524.602
Uang muka lainnya	656.302.101
Jumlah	186.691.135.657

9. INVENTORIES

Balances of inventories as of December 31, 2018 and December 31, 2017 are as follows:

	2017	
	23.747.685.698	Product as output of production
	78.959.857.748	Work in progress
	65.870.484.295	Raw material and supplementary
	231.096.761	Parts, tools and accessories
	168.809.124.502	Total of inventories
	(873.957.282)	Allowances for obsolesences goods
	167.935.167.220	Total of Inventories-net

Products produced include finished goods in the Turbine Component Division, the remaining Gresik casting products and ex-project supplies both in the Gresik Unit and in factories. The finished goods inventory in 2018 of which is the supply of ex mother station ex Gas Refueling Station (SPBG) Project valued at Rp. 17,752,654,325.

Work in Progress, among most part of them, is the workin procesing performance of foundry in Gresik.

Raw / auxiliary supplies are material inventories for all business units and factories

Parts, tools and accessories is the parts stored exProject of Pengembangan Sarana Produksi (P2SP).

The impairment of inventories is a result of management's review and evaluation on condition of inventories and selling priceas reporting date.

Managemen believe that the allowances of impairment for obsolesences inventories has been adequite to cover the possibility of loss arising from obsolesence inventories.

Some inventories are used as collateral for the management short term loans (Note 19).

10. ADVANCES

This account consist of :

	2017	
	23.033.379.908	Supllier advance
	35.010.348.460	Operational advance
	4.803.821.475	Subcontractors advance
	1.119.496.378	Others advances
	63.967.046.221	Total

11. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini merupakan saldo biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 terinci sebagai berikut :

	2018
Premi asuransi	55.813.568
Beban persiapan proyek	31.479.900
Beban lainnya dibayar dimuka	-
Jumlah	87.293.468

Premi asuransi merupakan uang muka biaya asuransi yang diamortisasi sesuai umur manfaatnya.

Beban lainnya dibayar dimuka tahun 2017 merupakan biaya - biaya yang telah dibayar namun sebenarnya untuk beban tahun berikutnya. Termasuk didalamnya biaya dibayar dimuka atas penerbitan MTN (Medium Term Notes) melalui KSEI.

Beban persiapan proyek merupakan beban dalam rangka meraih order dan akan menjadi beban pekerjaan dalam pelaksanaan atau beban pokok penjualan.

12. ASET KEUANGAN LAINNYA

Saldo aset keuangan lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp 99.724.800 merupakan penyertaan pada PT General Electric Power Solution Indonesia.

Sesuai Akta Notaris Rusdi Muljono, SH N. 104 tanggal 11 Agustus 2008 perusahaan memiliki 94.080 saham pada PT Alstom Power Energy System Indonesia (PT ESI) bernilai Rp. 99.724.800 atau 94.080 saham seri A. PT ESI bergerak dalam bidang industri steam boiler dan penunjang industri kelistrikan dan distributor utama kelistrikan serta importir alat-alat kelistrikan. Penyertaan saham pada PT ESI dinilai berdasarkan metode biaya.

Berdasarkan RUPS Alstom Power Energy System Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2016, terjadi perubahan manajemen dan nama dari Alstom Power Energy System Indonesia (PT ESI) menjadi PT General Electric Power Solutions Indonesia.

Berdasarkan akta pernyataan keputusan para pemegang saham nomor 70 notaris Mala Mukti, SH., LL.M. tanggal 18 Agustus 2017, struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham PT General Electric Power Solution Indonesia adalah sebagai berikut :

11. PREPAID EXPENSES

These accounts are the balances of unexpired expenses paid in advance as of December 31, 2018, and Desember 31, 2017, in detail are as follows:

	2017	
	568.505.553	Insurance premium
	75.450.000	Project preparation expenses
	3.846.800.000	Others expenses paid in advance
	4.490.755.553	Total

Insurance premiums is payment insurance costs in amortization appropriate to useful life.

Others expenses paid in advance are the expenditures occurred in current year for being actually charged to subsequent year. Which included a fee paid in advance for on issuance of MTN (Medium Term Notes) through KSEI.

Project preparation expenses are the expenditures on purpose of obtaining the work order from Consumers and will be recognised in and charged to work in progress or cost of sales.

12. OTHERS FINANCIAL ASSET

The balance of others financial asset as of December 31, 2018 and Desember 31, 2017 in amount of IDR99.724.800 is investment on shares made to PT General Electric Power Solution Indonesia.

In respect of notary deed No. 104 dated August 11, 2008 Public Notary Rusdi Muljono, SH, Company own 94.080 shares in PT Energy System Indonesia (ESI), with value of Rp99.724.800 or 94,080.00 the series A shares. PT ESI deals with in steam boiler industry, and agency of electricity industry and as main distributor of electricity and as an importer of electric equipment/ device. Investment on shares in PT ESI is recorded at cost method.

In respect of Share Holder Meeting of PT Alstom Power Energy System Indonesia held on October 17, 2016 decided to make alteration in management and the former name of Alstom Power Energy System Indonesia (PT ESI) altered to the latter name to PT General Electric Power Solution Indonesia.

Based on statement shareholders number 70 Notary Mala Mukti, SH., LL.M. on August 18, 2017, the capital and composition of shareholders composition PT General Electric Power Solution Indonesia is as follows :

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 SERTA UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET KEUANGAN LAINNYA (Lanjutan)

12. OTHERS FINANCIAL ASSET (Continued)

Nama Pemegang Saham	Kepemilikan/Ownership		The name of the shareholders
	Saham/Shares	%	
Saham Seri A			The series A shares
PT Barata Indonesia (Persero)	94.080	1,11	PT Barata Indonesia (Persero)
PT PAL Indonesia (Persero)	1.700.205	20,10	PT PAL Indonesia (Persero)
Alstom BV	6.665.715	78,79	Alstom BV
Jumlah	8.460.000	100,00	Total
Saham Seri B			The series B shares
Alstom BV	5.000.000	100,00	Alstom BV
Jumlah	5.000.000	100,00	Total

13. PROPERTI INVESTASI

13. INVESTMENT PROPERTIES

Terdiri dari :

Consist of :

Keterangan	2017	Penambahan/ Increasing	Reklasifikasi/ Reclassification	2018	Description
Harga perolehan					Cost Acquisition
Tanah	397.800.986	-	-	397.800.986	Land and right
Bangunan	1.086.466.546	-	-	1.086.466.546	Building
Jumlah	1.484.267.532	-	-	1.484.267.532	Jumlah
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	758.035.498	16.421.554	-	774.457.052	Building
Nilai tercatat	726.232.034			709.810.480	Presented Value
Keterangan	2016	Penambahan/ Increasing	Reklasifikasi/ Reclassification	2017	Description
Harga perolehan					Cost Acquisition
Tanah	397.800.986	-	-	397.800.986	Land and right
Bangunan	1.086.466.546	-	-	1.086.466.546	Building
Jumlah	1.484.267.532	-	-	1.484.267.532	Jumlah
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	750.719.501	7.315.997	-	758.035.498	Building
Nilai tercatat	733.548.031			726.232.034	Presented Value

Properti investasi berupa tanah dan bangunan yang tidak dipakai operasional, berlokasi di Bandung, Sukabumi, Makassar, Surabaya dan Prigen.

The property of investment in the form of land and buildings that were not used operational , located in Bandung , Sukabumi , Makassar, Surabaya and Prigen.

Sebagian properti investasi digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka pendek Perusahaan (Catatan 19).

Some investment property are used as collateral for the management short term loans (Note 19).

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 SERTA UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET TETAP

14. FIXED ASSETS

	1 Januari/ January 1, 2018	Penambahan/ Increasing	Pengurangan/ Decreasing	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember December 31, 2018	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah, Lap dan Jalan	530.040.170.000	81.939.408.760	-	-	611.979.578.760	Land, Yard & Road
Gedung, Pabrik, Kantor, RD	37.621.684.639	28.851.780.515	(58.910.000)	6.227.430.888	72.641.986.042	Build, Plant, Office, RD
Mesin-mesin	213.364.021.658	44.158.328.256	(1.223.446.715)	-	256.298.903.199	Machinery
Perlitan dan Instalasi listrik	20.583.604.269	953.743.756	-	-	21.537.348.025	Electricity inst. and Eq.
Perlitan dan Alt. Angkut	7.446.405.118	3.450.628.702	-	-	10.897.033.820	Eq. and Transp Eq.
Inv. Kntr dan Perl Logam	4.719.096.989	2.470.528.991	-	-	7.189.625.980	Off. Eq and Metal Eq.
Mebel dan Perit. Kayu	540.617.147	192.728.775	-	-	733.345.922	Furnitures and & Fix.
Kendaraan bermotor	7.273.832.435	-	(955.016.041)	-	6.318.816.394	Vehicles
Sub jumlah	821.589.432.255	162.017.147.755	(2.237.372.756)	6.227.430.888	987.596.638.142	Sub total
Aset dalam konstruksi						Construction in progress
Gedung, Pabrik, Kantor, RD	28.132.527.739	27.890.954.744	-	(6.227.430.888)	49.796.051.595	Build, Plant, Office, RD
Mesin-mesin	-	26.306.363.706	-	-	26.306.363.706	Machinery
Sub jumlah	28.132.527.739	54.197.318.450	-	(6.227.430.888)	76.102.415.301	Sub total
Junlah	849.721.959.994	216.214.466.205	(2.237.372.756)	-	1.063.699.053.443	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciated
Gedung, Pabrik, Kantor, RD	12.618.873.225	1.664.888.200	-	-	14.283.761.424	Build, Plant, Office, RD
Mesin-mesin	90.915.776.899	9.504.853.150	(1.062.595.304)	-	99.358.034.745	Machinery
Perlitan dan Instalasi listrik	8.157.869.416	784.685.749	-	-	8.942.555.165	Electricity inst. and Eq.
Perlitan dan Alt. Angkut	6.035.686.424	347.686.429	-	-	6.383.372.853	Eq. and Transp Eq.
Inv. Kntr dan Perl Logam	3.048.214.392	343.615.126	-	-	3.391.829.518	Off. Eq and Metal Eq.
Mebel dan Perit. Kayu	371.286.579	120.658.003	-	-	491.944.582	Furnitures and & Fix.
Kendaraan bermotor	6.573.900.703	340.087.530	(943.726.346)	-	5.970.261.887	Vehicles
Jumlah	127.721.607.638	13.106.474.188	(2.006.321.650)	-	138.821.760.174	Total
Nilai Buku	722.000.352.356				924.877.293.268	Book Value
	1 Januari/ January 1, 2017	Penambahan/ Increasing	Pengurangan/ Decreasing	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember December 31, 2017	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah, Lap dan Jalan	530.040.170.000	-	-	-	530.040.170.000	Land, Yard & Road
Gedung, Pabrik, Kantor, RD	35.763.346.444	1.858.338.195	-	-	37.621.684.639	Build, Plant, Office, RD
Mesin-mesin	213.148.543.792	2.034.200.000	1.818.722.134	-	213.364.021.658	Machinery
Perlitan dan Instalasi listrik	20.583.604.269	-	-	-	20.583.604.269	Electricity inst. and Eq.
Perlitan dan Alt. Angkut	8.296.012.619	88.870.000	938.477.501	-	7.446.405.118	Eq. and Transp Eq.
Inv. Kntr dan Perl Logam	2.749.547.249	355.404.000	(1.614.145.740)	-	4.719.096.989	Off. Eq and Metal Eq.
Mebel dan Perit. Kayu	471.841.414	71.398.887	2.623.154	-	540.617.147	Furnitures and & Fix.
Kendaraan bermotor	7.329.463.587	399.616.848	455.248.000	-	7.273.832.435	Vehicles
Jumlah	818.382.529.374	4.807.827.930	1.600.925.049	-	821.589.432.255	Total

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 SERTA UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET TETAP (Lanjutan)

14. FIXED ASSETS (Continued)

	1 Januari/ January 1, 2017	Penambahan/ Increasing	Pengurangan/ Decreasing	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember December 31, 2017	
Aset dalam konstruksi						Construction in progress
Gedung, Pabrik, Kantor, RD	7.752.369.079	20.380.158.660	-	-	28.132.527.739	Build, Plant, Office, RD
Mesin-mesin	81.824.772		81.824.772	-	-	Machinery
Sub jumlah	7.834.193.851	20.380.158.660	81.824.772	-	28.132.527.739	Sub total
Jumlah	826.216.723.225	25.187.986.590	1.682.749.821	-	849.721.959.994	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciated
Gedung, Pabrik, Kantor, RD	11.355.358.675	1.263.514.550	-	-	12.618.873.225	Build, Plant, Office, RD
Mesin-mesin	81.983.809.714	9.461.245.961	529.278.776	-	90.915.776.899	Machinery
Perltan dan Instalasi listrik	7.338.100.879	819.768.537	-	-	8.157.869.416	Electricity inst. and Eq.
Perltan dan Alt. Angkut	6.091.780.165	370.622.165	426.715.906	-	6.035.686.424	Eq. and Transp Eq.
Inv. Kntr dan Perl Logam	2.484.106.504	145.128.998	(418.978.890)	-	3.048.214.392	Off. Eq and Metal Eq.
Mebel dan Perl. Kayu	264.256.191	109.646.846	2.616.458	-	371.286.579	Furnitures and & Fix.
Kendaraan bermotor	6.691.050.700	328.777.441	445.927.438	-	6.573.900.703	Vehicles
Jumlah	116.208.462.828	12.498.704.498	985.559.688	-	127.721.607.638	Total
Nilai Buku	702.174.066.546				722.000.352.356	Book Value

Penambahan aset tetap per 31 Desember 2018 merupakan rehabilitasi gedung, tanah, mesin, pembelian inventaris perkantoran dan pembelian aset bangunan dan mesin Siemens Cilegon yang sekarang telah menjadi Divisi Komponen Turbin. Di tahun ini juga terjadi reklasifikasi gedung Cilegon dari aset dalam konstruksi menjadi aset tetap. Tahun ini juga terjadi penjualan kendaraan bermotor. Sedangkan penambahan aset tetap per 31 Desember 2017 merupakan rehabilitasi /perbaikan gedung dan permesinan serta pembelian kendaraan, juga terjadi reklasifikasi/pemindahan dari aset nonproduktif yang dapat digunakan lagi dan sebaliknya.

The addition of fixed assets as of December 31, 2018 is the rehabilitation of buildings, lands, machinery, office inventory office and purchase of Siemens Cilegon machinery and building assets and which are now become the Turbine Components Division. This year there was also a reclassification of the Cilegon building from assets in construction to fixed assets. This year there were also sales of motor vehicles. Whereas the addition of fixed assets as of December 31, 2017 is the rehabilitation / improvement of buildings and machinery and the purchase of vehicles, as well as reclassification / transfer of non-productive assets that can be used again and vice versa.

Beban penyusutan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation charges of fixed assets coming to December 31, 2018, and December 31, 2017 respectively allocated to, are as follows:

	2018	2017	
Beban pokok penjualan	12.401.468.020	11.755.990.847	Cost of goods sold
Beban usaha	705.006.168	750.029.665	Operating cost
Jumlah	13.106.474.188	12.506.020.512	Total

14. ASET TETAP (Lanjutan)

Aset tetap berupa mesin dan bangunan di Tegal, Surabaya, Medan, dan Gresik telah diasuransikan dengan polis Standar Kebakaran yang nilai pertanggungsannya adalah sebagai berikut :

Penanggung/Undewiter	Nomor Polisi Policy number
PT BRIngin Sejahtera Makmur	1102010318001176
PT BRIngin Sejahtera Makmur	1102010318001187
Sompo Insurance	SB-FCR-0000023-00016-2018-04
Sompo Insurance	SB-FCR-0000006-00016-2018-04

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas aset tetap yang diasuransikan adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

Aset tetap berupa tanah yang beralokasi di Tegal, Surabaya, Medan, dan Gresik dijamin untuk mendapatkan fasilitas kredit modal kerja pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Muamalat Tbk, PT Bank Negara Indonesia dan PT Bank CIMB Niaga. Lihat catatan 19.

15. ASET TETAP TAX AMNESTY

PT Barata Indonesia Persero telah mengikuti program tax amnesty pada Maret 2017 dengan melaporkan aset tanah yang telah dimiliki namun belum tercatat dalam laporan keuangan perusahaan. Aset tersebut dilaporkan berdasarkan nilai NJOP, sebagai berikut :

	2018
Megamendung, Bogor	1.305.232.000
Kranji, Bekasi	115.072.000
Kranji, Bekasi	1.800.580.000
Jumlah	3.220.884.000

Uang tebusan yang telah dibayar dengan tarif 5% sebesar Rp.161.044.200,00. Atas keikutsertaan tax amnesty, telah diperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor : KET-350/PP/WPJ.19/2017 tanggal 5 April 2017.

14. FIXED ASSETS (Continued)

Machine and Building located in Tegal, Surabaya, Medan, dan Gresik was insured to company insurance with Fire Standard Policy with under value underwriting are as follows:

Jangka Waktu Time Coverage	Nilai Pertanggungan Underwriting value
09-9-18 s/d 09-9-19	14.013.550.000
09-9-18 s/d 09-9-19	4.799.656.000
13-04-18 s/d 13-04-19	123.050.000.000
13-04-18 s/d 13-04-19	123.050.000.000

Management judged that underwriting value over fixed assets insured are adequately eligible to cover the possibility of any loss arising.

Fixed assets of land right, located in Tegal, Surabaya, Medan, and Gresik, are secured as collaterals to obtain working capital credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia Tbk and PT Bank Muamalat Tbk, PT Bank Negara Indonesia dan PT CIMB Niaga. See notes 19.

15. FIXED ASSET AS TAX AMNESTY

In March of 2017 PT Barata Indonesia Persero had taken a participation in tax amnesty program by reporting the asset of land right having been owned by Company, but not claimed yet in financial statement of PT Barata Indonesia Persero. The value of land right asset reported is taken out of NJOP assessment, are as the following:

	2017	
Megamendung, Bogor	1.305.232.000	Megamendung, Bogor
Kranji, Bekasi	115.072.000	Kranji, Bekasi
Kranji, Bekasi	1.800.580.000	Kranji, Bekasi
Jumlah	3.220.884.000	Total

The redemption cost of tax amnesty is specified with 5% rate, and has fully paid for Rp. 161.044.200. In participation in Tax amnesty, the company has received a Statement Letter of Tax Amnesty no: KET-350/PP/WPJ.19/2017 dated 5th of April 2017.

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 SERTA UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. ASET TAK BERWUJUD

Akun ini merupakan aset tak berwujud terinci sebagai berikut :

	2018
Nilai perolehan	10.942.333.065
Akumulasi amortisasi	(2.445.211.284)
Jumlah	<u>8.497.121.781</u>

Aset tak berwujud berupa lisensi yang diperoleh perusahaan untuk memproduksi alat berat berupa Mesin Gilas/Motor Wals, lisensi Microsoft, software dan biaya perpanjangan /pembaharuan hak atas tanah serta hak paten.

16. INTANGIBLE ASSET

This account presented unamortised balance of intangible asset detail as follows:

	2017	
	4.396.876.650	<i>Acquisition cost</i>
	(2.099.297.463)	<i>Accumulated amortization</i>
	<u>2.297.579.187</u>	<i>Total</i>

Intangible assets are a license rights being obtained by Company to produce heavy duty Gilas/Motor Wals machine, Microsoft's license, license of software, certification of HGB, and authorized patent right.

17. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA

Akun ini terdiri dari:

	<i>Proyek/Project</i>	<i>Persentase/ Percentage</i>	2018	2017
KSO Wika, Barata, Multinas	Modernisasi Pabrik Gula Assembagus	25%	12.979.601.188	3.250.000.000
KSO Wika, Barata	Revitaliasi Pabrik Gula Rendeng	30%	3.742.766.635	-
Jumlah/ <i>Total</i>			<u>16.722.367.823</u>	<u>3.250.000.000</u>

Mutasi investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut:

Changes in investments in joint ventures are as follows:

	2018	2017	
Nilai tercatat awal tahun	3.250.000.000	-	<i>Carrying amount at beginning of year</i>
Mutasi invetasi - bersih	(3.250.000.000)	3.250.000.000	<i>Investment movements - net</i>
Bagian laba pada investasi pada ventura bersama	16.722.367.823	-	<i>Share in profit of joint ventures</i>
Nilai tercatat akhir tahun	<u>16.722.367.823</u>	<u>3.250.000.000</u>	<i>Carrying amount at end of year</i>

18. ASET LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

	2018
Uang jaminan	185.734.490
Tanah Hibah	10.091.702
Aset non produktif	19.394.654.240
Penurunan nilai aset non produktif	(16.195.012.049)
Penyertaan non produktif	250.000.000
Penyisihan penyertaan non produktif	(250.000.000)
Jumlah	<u>3.395.468.383</u>

18. OTHER ASSETS

This account consist of:

	2017	
	242.504.490	<i>Deposits tied up</i>
	10.091.702	<i>land grant</i>
	18.270.206.112	<i>Non productive assets</i>
	(14.342.396.412)	<i>Impairment on non productive assets</i>
	250.000.000	<i>Non productive investment</i>
	(250.000.000)	<i>Amortized-non productive investment</i>
	<u>4.180.405.892</u>	<i>Total</i>

18. ASET LAIN-LAIN (Lanjutan)

Uraian akun di atas antara lain sebagai berikut :

- Pada akun tanah hibah adalah hak pakai 1.000 m2 atas tanah jalan Ngagel 109 Surabaya berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 59 tanggal 28 Nopember 2005 oleh Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, SH. Tanah tersebut dicatat proporsional dari total tanah seluas 58.700 m2 dengan nilai perolehan Rp592.382.885,48 sehingga nilai perolehan proporsional yang tercatat adalah sebesar Rp10.091.702.
- Aset non produktif merupakan aset mesin dan persediaan yang tidak digunakan.
- Penyertaan non produktif merupakan penyertaan pada PT Bitek sebesar Rp250.000.000 sesuai Akta Willy Silitonga, SH No. 18 tanggal 8 Februari 1985 dan Surat Menteri Keuangan RI No. 482/MK.011/1986 tanggal 7 Mei 1986. Karena hingga saat ini PT Bitek belum beroperasi, maka manajemen menganggap penyertaan tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis lagi sehingga sejak tahun 2010 penyertaan pada PT Bitek dicadangkan penghapusannya sebesar Rp250.000.000.

19. PINJAMAN JANGKA PENDEK

Pinjaman jangka pendek dapat dirinci sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Pihak berelasi		
PT Bank Syariah Mandiri	148.414.172.693	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	22.865.176.725	22.671.454.806
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	20.094.000.000	1.464.441.264
Sub jumlah	<u>191.373.349.418</u>	<u>24.135.896.070</u>
Pihak ketiga		
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.	151.820.000.000	137.270.000.000
PT Bank CIMB Niaga, Tbk.	35.213.160.886	83.013.162.160
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	26.314.697.078	-
Sub jumlah	<u>213.347.857.964</u>	<u>220.283.162.160</u>
Jumlah	<u><u>404.721.207.382</u></u>	<u><u>244.419.058.230</u></u>

18. OTHER ASSETS (Continued)

Remarks to such item above are among others as the following:

- For deposits tied up, including within them the utilization rights forland of 1.000 (m2) located at jalan Ngagel 109 Surabaya drawn up in the purchase agreement No:59 dated November 25, 2005 before Public Notary-Dyah Ambarwaty Setyoso, SH. The land rights were proportionally recorded out of total land rights in 58.700 square metres at acquisition of Rp592.382.885,48, and hence the acquisition cost of 1.000 sqm are listed proportionally at amount of Rp.10.091.702.
- Non productive assetsare as machinery and inventory asset which were not inuse or out of function.
- Non Productive Investment is an investment on shares of PT Bitek sebesar Rp250.000.000 as pursuant to Willy Silitonga SH's deed, No. 18 dated February 8, 1985 and Letter of Minister of Finance of Indonesia Republic No. 482/MK.011/1986 dated 7th of Mei 1986. Since, coming to this time, PT Bitek failed in putting into commercial operation, then management assess that the investment did not provide economic value any longer, therefore since 2010, investment on PT Bitek is made an allowance for its amortization in amount of Rp250.000.000.

19. SHORT TERM LOANS

The balance as of short term loans in detail as follows:

Related parties
PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Sub total
Third parties
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
PT Bank CIMB Niaga, Tbk.
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
Sub total
Total

19. PINJAMAN JANGKA PENDEK (Lanjutan)

PT Bank Syariah Mandiri

Perseroan melakukan Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank Syariah Mandiri, mengenai kerjasama pemberian fasilitas iB Supplier Financing (ib-SF) dengan nomor perjanjian 20 18 763 dan 20/20391/DIR tertanggal 26 Juni 2018 . Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Limit Supplier Financing (LSF) sebesar Rp.150.000.000.000
Jangka waktu 2 tahun sejak tanggal 26 juni 2018 sampai dengan 26 Juni 2020.
Jaminan berupa saldo minimum di dalam rekening escrow sebesar Rp. 100.000.000.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Berdasarkan surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk-(BRI) nomor: R.II.203-OPK/DKD/08/2018 tanggal 01 Agustus 2018 telah disepakati penambahan plafond fasilitas kredit a.n PT Barata Indonesia (Persero), menjadi sebagai berikut:

- Pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi Rp.75.000.000.000
 - KMK R/C Rp25.000.000.000
 - Fasilitas Bank Garansi Rp65.000.000.000
 - Fasilitas LC USD 767.000
 - Fasilitas SKBDN Rp12.000.000.000
- Jangka waktu 12 bulan sejak 2 Agustus 2018 s/d 2 Agustus 2019.

Tingkat suku bunga sebesar 12 % per tahun.

Jaminan :

- Tanah terletak di Surabaya, Medan, Sukabumi dan Tegal.
- Piutang usaha
- Persediaan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan surat PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk-(BNI) Nomor: BNI/2.3/0138/R tanggal 2 Juli 2018 telah disepakati Perjanjian plafond fasilitas kredit a.n PT Barata Indonesia (Persero), menjadi sebagai berikut:

- Fasilitas Non Cash Loan Rp 450.000.000.000
- Fasilitas Pinjaman KMK/Cash Loan Rp 50.000.000.000

Masa berlaku kredit sampai dengan 19 April 2019
Tingkat suku bunga sebesar 9,75 % per tahun.

Jaminan :

- Tanah, yang terletak di di Kelurahan/Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur.
- Tagihan termin atas proyek-proyek yang dibiayai oleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

19. SHORT TERM LOANS (Continued)

PT Bank Syariah Mandiri

The Company entered into a Cooperation Agreement with PT Bank Syariah Mandiri, regarding cooperation in the provision of iB Supplier Financing (ib-SF) facilities under the agreement number 20 18 763 and 20/20391 / DIR dated June 26, 2018. with term and conditons:

Limit Supplier Financing (LSF) of Rp.150,000,000,000
The validity period is two years from June 26, 2018 to June 26, 2020.
The guarantee is a minimum balance in an escrow account of Rp. 100,000,000.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

According on a letter from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI) number: R.II.203-OPK / DKD / 08/2018 dated August 1, 2018, it was agreed to add a credit facility ceiling to PT Barata Indonesia (Persero), to become following:

- Construction Working Capital Loan of Rp. 75,000,000,000
- Working Capital Loan R/C of Rp. 25,000,000,000
- Bank Guarantee Facility of Rp. 65,000,000,000
- LC facility of USD 767,000
- SKBDN facility of Rp12,000,000,000

The validity period is twelve months from August 2, 2018 to August 2, 2019.

The interest rate is 12% per annum.

Guarantee :

- Land is located in Surabaya, Medan, Sukabumi and Tegal.
- Accounts receivable
- Inventory

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

According on a letter from PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk- (BNI) Number: BNI / 2.3 / 0138 / R dated July 2, 2018, a loan facility agreement for a.n PT Barata Indonesia (Persero) has been agreed to become as follows:

- Non Cash Loan Facility of Rp. 450,000,000,000
- Cash Loan Facility of Rp. 50,000,000,000

The validity period until April 19, 2019

The interest rate is 9,75% per annum.

Guarantee :

- Land is located in Segoromadu, Kebomas, Gresik, East Java
- Term bills for projects financed by credit facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

19. PINJAMAN JANGKA PENDEK (Lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Lanjutan)

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar minimum 1 kali;
- Rasio utang terhadap ekuitas (DER) maksimum 2,5 kali; dan
- Rasio laba utang minimum 1 kali

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Berdasarkan surat dari PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Nomor: 039/B/BMI-SKN/SRT/IV/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Persetujuan Prinsip Pembiayaan (Perpanjangan dan Perubahan).

- Plafon : Rp400.000.000.000
Janga Waktu : s/d tanggal 31 Desember 2020
Biaya Pengikatan : sesuai tagihan dari Notaris
Pengikatan :
- Akad Line Facility dan Jaminan secara Notaril.
 - Akad Realisasi line facility dilakukan secara internal
 - Akad jaminan dilakukan secara notarial
- Fasilitas Pembiayaan yang diberikan meliputi :
- Line Facility Al Kafalah X Revolving LC/SKBDN (Sight/Usance/Upas) dan Bank Garansi).
 - Sublimit Line Facility Al Murabahah XIII Revolving (Trust Receipt).
 - Sublimit Line Facility Al Hawalah I Revolving (Diskonto/ Negosiasi).
- Jaminan :
- Tanah yang dijaminan pada Bank Muamalat terletak di Kelurahan/Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur.
 - Cash collateral 10% (blokir giro atau deposito) dari nilai LC/SKBDN
 - Piutang usaha yang diikat dengan fidusia.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar minimum 1 kali;
- Rasio utang terhadap ekuitas (DER) maksimum 2,5 kali; dan
- Rasio laba utang minimum 1 kali

PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

Berdasarkan Perubahan ke 1 (satu) Perjanjian Kredit nomor :045/CB/JKT/2017 tertanggal 3 April 2017, yang dibuat tanggal 16 April 2018, telah disepakati pemberian fasilitas kredit kepada Perseroan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

19. SHORT TERM LOANS (Continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Continued)

The company is required to comply with certain restrictions to maintain the following financial ratios:

- Current ratio minimum 1 time;
- The maximum debt to equity ratio (DER) is 2.5 times; and
- The minimum debt profit ratio is 1 time

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Based on a letter from PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Number: 039 / B / BMI-SKN / SRT / IV / 2018 dated April 24, 2018 concerning Approval of Principles of Financing (Extension and Amendment).

- Limit : Rp. 400.000.000.000
The validity period : until December 31, 2020
Engagement Fee : according to the bill from the Notary
Binding :
- Line Facility Agreement and Guarantee Notaril.
 - Agreement on Line facility is realization carried out internally
 - Guarantee contract is carried out notarial
- Financing facilities provided include:
- Al Kafalah Line Facility X Revolving LC / SKBDN (Sight / Usance / Upas) and Bank Guarantee).
 - Facility Al Murabahah Sublimit Line XIII Revolving (Trust Receipt).
 - Sublimit Line Facility Al Hawalah I Revolving (Discount / Negotiation).
- Guarantee :
- The land as collateral at Muamalat Bank is located in Segoromadu, Kebomas, Gresik, East Java.
 - Cash collateral 10% (current account or deposit block) from LC / SKBDN value
 - Fiduciary of accounts receivable

The company is required to comply with certain restrictions to maintain the following financial ratios:

- Current ratio minimum 1 time;
- The maximum debt to equity ratio (DER) is 2.5 times; and
- The minimum debt profit ratio is 1 time

PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

According on changes 1 (one) Credit Agreement number: 045 / CB / JKT / 2017 dated April 3, 2017, dated April 16, 2018, it was agreed that credit facilities would be granted to the Company with the following terms and conditions:

19. PINJAMAN JANGKA PENDEK (Lanjutan)

PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (Lanjutan)

- Fasilitas pinjaman Rekening Koran (RK) Rp 10.000.000.000
 - Fasilitas pinjaman Transaksi Khusus (Non RK) Rp 200.000.000.000
- Jangka waktu 12 bulan, sejak 3 April 2018 sampai dengan 3 April 2019
- Tingkat suku bunga sebesar 4,5% per tahun dalam mata uang USD dan sebesar 9,75 % per tahun dalam mata uang Rupiah.
- Jaminan :
- Tanah yang dijaminan pada Bank Cimb Niaga terletak di Surabaya, Bandung, Bogor dan Makassar.
 - Aset tetap berupa mesin
 - Tagihan piutang usaha.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Perseroan mendapatkan fasilitas kredit modal kerja standby loan dari PT Bank Jabar Banten Tbk sesuai dengan surat nomor 48/KOM-KKI/2018 tanggal 30 Mei 2018.

Limit Kredit Modal Kerja Standby Loan sebesar Rp.100.000.000.000

Jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan 3 Mei 2019.

Jamainan berupa piutang usaha dari proyek APBN dan BUMN sebesar 125% dari limit kredit.

20. UTANG USAHA

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut :

	2018
Utang pembelian pemasok	505.468.495.864
Utang subkontraktor	91.879.926.680
Utang expeditur	2.492.589.509
Jumlah	<u>599.841.012.053</u>

Rincian utang usaha berdasarkan suplier adalah sebagai berikut :

	2018
Pihak berelasi	
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon	65.551.527.008
PT Industri Kereta Api (Persero)	6.715.879.874
PT Boma Bisma Indra (Persero)	695.653.523
PT Wijaya Karya Beton Tbk	590.200.180
PT Pindad (Persero)	474.926.103
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp. 100.000.000)	1.341.929.253
Sub jumlah	<u>75.370.115.941</u>

19. SHORT TERM LOANS (Continued)

PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (Continued)

- R/C loan facility of Rp. 10,000,000,000
 - Specific Transaction loan facility (Non R/C) of Rp 200,000,000,000
- The validity period is twelve months, April 3, 2018 until April 3, 2019
- The interest rate of 4.5% per annum is denominated in USD and 9.75% per annum in Rupiah.
- Guarantee :
- The land as collateral at Cimb Niaga Bank is located in Surabaya, Bandung, Bogor and Makassar.
 - Fixed asset of machine
 - Accounts receivable

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

The company obtained a standby loan working capital facility from PT Bank Jabar Banten Tbk in accordance with letter number 48 / KOM-KKI / 2018 dated May 30, 2018.

Limit Standby Loan Working Capital Credit of Rp.100,000,000,000

The validity period is twelve months, since May 3, 2018 until May 3, 2019

The collateral is trade accounts receivable from the APBN project and BUMN is 125% of the credit limit.

20. TRADE PAYABLES

The details amount trade payables detailed as follows :

	2018	2017	
	505.468.495.864	358.718.304.376	Supplier Payable
	91.879.926.680	50.100.482.051	Sub-Contractors Payables
	2.492.589.509	2.515.473.365	Delivery payable
Jumlah	<u>599.841.012.053</u>	<u>411.334.259.792</u>	Total

The more detail of account payables trade grouped in suppliers order are as follows:

	2018	2017	
			Related parties
		-	PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
		6.095.916.239	PT Industri Kereta Api (Persero)
		748.998.483	PT Boma Bisma Indra (Persero)
		51.355.930	PT Wijaya Karya Beton Tbk
		830.161.000	PT Pindad (Persero)
	1.341.929.253	314.603.193	Others (each below Rp. 100.000.000)
Sub jumlah	<u>75.370.115.941</u>	<u>8.041.034.845</u>	Sub total

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 SERTA UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. UTANG USAHA (Lanjutan)

	2018	2017
Pihak ketiga		
Siemens Indonesia	95.237.768.773	-
Sharkara International	85.278.945.360	-
Jiangxi Jialian	34.730.983.509	34.730.983.509
PT Golden Pratama Gemilang	20.271.398.118	177.398.118
Isgec Heavy Engineering Ltd	11.062.988.750	-
Siemens Limited	8.190.000.000	-
CV Saleh Amir	9.235.919.155	4.920.584.160
PT The Master Steel	3.268.155.695	-
PT Sapta Sumber Lancar	2.732.728.132	3.536.230.619
PT Paradise Perkasa	2.445.633.875	73.519.965
Teguh SL	2.323.088.680	3.628.356.195
Edgen Muray PTE LTD	2.191.474.625	-
PT Jotun Indonesia	2.133.434.168	1.950.635.915
Pandan Jaya	2.194.565.806	868.458.541
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp. 2.000.000.000)	243.173.811.467	353.407.057.926
Sub jumlah	524.470.896.111	403.293.224.947
Jumlah	<u>599.841.012.053</u>	<u>411.334.259.792</u>

20. TRADE PAYABLES (Continued)

Third parties
Siemens Indonesia
Sharkara International
Jiangxi Jialian
PT Golden Pratama Gemilang
Isgec Heavy Engineering Ltd
Siemens Limited
CV Saleh Amir
PT The Master Steel
PT Sapta Sumber Lancar
PT Paradise Perkasa
Teguh SL
Edgen Muray PTE LTD
PT Jotun Indonesia
Pandan Jaya
Others (each below Rp. 2.000.000.000)
Sub total
Total

21. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

	2018	2017
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	22.648.552.972	248.203.450
Pajak penghasilan pasal 28A	7.914.440.737	-
Pajak penghasilan Final	2.934.523.373	-
Jumlah	<u>33.497.517.082</u>	<u>248.203.450</u>

a. Prepaid tax

Value Added Tax (VAT)
Income Tax article 28A
Final Tax
Total

b. Utang pajak

	2018	2017
Pajak Pertambahan Nilai :		
PPN Keluaran - WAPU	8.750.481.417	16.415.209.797
PPN Pungut	87.325.663.659	31.303.890.497
Pajak Penghasilan :		
Pajak Penghasilan Pasal 21	418.875.679	280.745.699
Pajak Penghasilan Pasal 22	1.454.628.275	1.184.005.463
Pajak Penghasilan Pasal 23	8.108.457.753	6.290.075.384
Pajak Penghasilan Final	31.275.488.786	-
Pajak Penghasilan 25	-	16.011.227
Pajak Penghasilan Badan	-	1.243.633.445
Pajak Bumi dan Bangunan	1.061.868.124	859.578.706
Jumlah	<u>138.395.463.693</u>	<u>57.593.150.218</u>

b. Taxes payable
Variable Added Tax :
VAT-Out – Withholding
VAT-In- Collecting
Income Tax
Income Tax ,article 21
Income Tax ,article 22
Income Tax ,article 23
Final tax
Income Tax article 25
Corporate Income Tax
Tax on Properties- Land right and Building
Total

21. PERPAJAKAN (Lanjutan)

21. TAXES (Continued)

c. Pajak penghasilan

c. Income tax

	2018	2017	
Beban pajak kini			Current tax
Pajak tidak final	(7.264.141.089)	(3.272.670.500)	Non final tax
Pajak tangguhan	(18.821.114.190)	(3.767.450.691)	Deferred tax
Jumlah	(26.085.255.279)	(7.040.121.191)	Total

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) sebanyak 26 Surat Tagihan Pajak (STP) untuk masa pajak Februari dan Maret 2016 yang di terbitkan pada tanggal 18 Januari 2018 yang jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2018, sebesar Rp.462.282.660,- dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 1 Maret 2018.

The Directorate General of Taxes have issued a Tax Billing Letter (STP) of value added tax (PPN) of 26 Tax Collection Letters (STP) for income taxes in February and March 2016 issued on January 18, 2018 which is due on February 17, 2018, amounting to Rp.462,282,660, - and payment has been made on March 1. 2018.

d. Pajak Tangguhan

d. Deferred tax

	1 Januari 2018 January 1, 2018	Dibebankan Ke Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss	Dibebankan ke Komprehensif lain/ Charged to Other Comprehensive Income	31 Desember 2018 December 31, 2018	
Aset Pajak Tangguhan					Deferred tax assets
Aset tetap	2.025.808.196	(2.025.808.196)	-	-	Fixed Asset
Kewajiban imbalan kerja	23.875.716.463	(9.220.617.203)	704.775.589	15.359.874.849	Post employees benefit
Kompensasi kerugian	7.522.307.468	(7.522.307.468)	-	-	Compensation on Loss
Penurunan nilai piutang	79.624.039	502.157.802	-	581.781.841	Impairment on receivables
Penurunan nilai persediaan	554.536.160	(554.536.160)	-	-	Impairment on inventories
Jumlah	34.057.992.326	(18.821.114.190)	-	15.941.656.690	Total

	1 Januari 2017 January 1, 2017	Dibebankan Ke Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss	Dibebankan ke Komprehensif lain/ Charged to Other Comprehensive Income	31 Desember 2017 December 31, 2017	
Aset Pajak Tangguhan					Deferred tax assets
Aset tetap	801.444.185	1.224.364.011	-	2.025.808.196	Fixed Asset
Kewajiban imbalan kerja	22.016.755.822	(124.831.475)	1.983.792.116	23.875.716.463	Post employees benefit
Kompensasi kerugian	11.892.116.650	(4.369.809.182)	-	7.522.307.468	Compensation on Loss
Penurunan nilai piutang	508.771.186	(429.147.147)	-	79.624.039	Impairment on receivables
Penurunan nilai persediaan	622.563.059	(68.026.899)	-	554.536.160	Impairment on inventories
Jumlah	35.841.650.902	(3.767.450.692)	1.983.792.116	34.057.992.326	Total

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 SERTA UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. UANG MUKA DARI PELANGGAN

Akun ini terdiri dari :

	2018	2017
Pihak berelasi		
PTPN X	168.207.405.000	-
PT PLN (Persero)	42.417.920.419	766.025.000
PT Garam (Persero), Tbk	12.262.000.000	2.400.000.000
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	10.304.935.106	-
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	3.945.867.042	-
PT Pindad (Persero)	3.657.159.180	-
PTPN XI	1.476.437.835	-
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1.360.570.103	-
PT Krakatau Semen Indonesia, Tbk	-	276.228.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp. 1.000.000.000)	661.169.887	45.997.103
Sub jumlah	244.293.464.572	3.488.250.103
Pihak ketiga		
PT Prima Alam Gemilang	840.411.946.419	-
BBWS	15.114.817.571	-
PT Berkah Alam Lestari Energi	7.138.902.713	-
PT Sri Rejeki Fertilizer	6.380.233.773	-
AAF	4.856.153.400	-
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.155.050.311	-
Kementerian Pertanian	2.818.181.818	-
PT Gunung Madu Plantation	701.541.290	601.894.290
PT Edwag Mitra Sukses	498.942.489	277.781.469
PT Kebon Agung	316.366.250	595.966.250
AEK Sumonggo	265.309.091	265.309.090
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp. 1.000.000.000)	4.362.380.521	1.629.657.024
Sub jumlah	887.019.825.646	3.370.608.123
Jumlah	1.131.313.290.218	6.858.858.226

22. ADVANCES RECEIVED FROM CUSTOMERS

This account consist of :

Related parties
PTPN X
PT PLN (Persero)
PT Garam (Persero), Tbk
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk
PT Adhi Karya (Persero), Tbk
PT Pindad (Persero)
PTPN XI
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Krakatau Semen Indonesia, Tbk
Others (each below Rp. 100.000.000)
Sub total
Third parties
PT Prima Alam Gemilang
BBWS
PT Berkah Alam Lestari Energi
PT Sri Rejeki Fertilizer
AAF
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Pertanian
PT Gunung Madu Plantation
PT Edwag Mitra Sukses
PT Kebon Agung
AEK Sumonggo
Others (each below Rp. 100.000.000)
Sub total
Total

23. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari :

	2018	2017
Biaya produksi	520.017.144.165	640.171.987.041
Biaya cadangan insentif dan tantiem	31.015.980.103	22.603.976.892
Biaya lainnya	8.643.824.512	15.146.048.896
Biaya usaha	7.063.672.970	3.187.893.759
Jumlah	566.740.621.750	681.109.906.588

23. ACCRUED EXPENSES

This account consist of :

Charges of work services unpaid
Incentive of work services payable
Other charges payable
Operational expense
Total

- Biaya produksi yang masih harus dibayar merupakan biaya yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga maupun tenaga kerja proyek sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Biaya usaha yang masih harus dibayar merupakan liabilitas yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga sehubungan dengan aktivitas umum dan administrasi.

- Accrued production expenses represents amount outstanding from third parties or project workers regarding to the field work.
- Accrued operating expenses represent obligation which were not yet billed from third party referring to the company activity and administration.

23. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR (Lanjutan)

- Biaya lainnya merupakan biaya cadangan atas karyawan yang sudah purna bakti
- Dana insentif karya merupakan cadangan dana prestasi kerja

23. ACCRUED EXPENSES (Continued)

- Other costs are reserve costs for employees who have retired
- The work incentive fund is a backup of work performance funds

24. UTANG PEMBIAYAAN

	2018	2017
Kurang dari 1 tahun	33.856.371	326.988.136
Antara 1 - 3 tahun	-	49.996.000
Jumlah	33.856.371	376.984.136
Dikurangi bagian bunga	1.816.171	24.053.636
Nilai kini pembayaran sewa	32.040.200	352.930.500
Dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun	32.040.200	320.890.300
Bagian jangka panjang	-	32.040.200

Nilai kini utang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Kurang dari 1 tahun		
PT Astra Sedaya Finance	6.292.500	168.708.469
Maybank Finance	25.747.700	136.042.202
Antara 1 - 3 tahun		
PT Astra Sedaya Finance	-	14.169.278
Maybank Finance	-	34.010.551
Jumlah	32.040.200	352.930.500

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT. Astra Sedaya Finance untuk kendaraan kijang innova sesuai dengan perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 01.300.306.00.170053.0 tanggal 31 Desember 2016, Jangka waktu 24 Bulan, suku bunga 8,5% (flat) p.a.

Nilai aset sewa pembiayaan kijang innova Rp.344.472.000
Pembayaran sewa dimasa yang akan datang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha ini adalah sebesar Rp.14.169.278 untuk pokok pembiayaan dan Rp.183.721 untuk beban bunga pembiayaan.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari Maybank Finance, untuk pengadaan kendaraan Mitsubishi sesuai dengan perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 50301160265 tanggal 31 Maret 2016, Jangka waktu 36 Bulan, suku bunga 5,58%.

Nilai aset sewa pembiayaan kendaraan Mitsubishi Rp.496.000.000
Pembayaran sewa dimasa yang akan datang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha ini adalah sebesar Rp.17.870.922 untuk pokok pembiayaan dan Rp.1.632.449 untuk beban bunga pembiayaan.

24. FINANCING PAYABLES

	Below 1 year
	Between 1-3 year
	Total
	Less amount applicable to interest
	Present value of minimum lease
	Less current maturities
	Long term maturities

The present value of finance lease debt is as follows:

	Below 1 year
	PT Astra Sedaya Finance
	Maybank Finance
	Between 1-3 year
	PT Astra Sedaya Finance
	Maybank Finance
	Total

The company have financing from PT. Astra Sedaya Finance for Innova vehicles in accordance with the Financing Lease Agreement Number 01.300.306.00.170053.0 dated December 31, 2016, Duration 24 Months, 8.5% interest rate (flat) p.a.

The value of Kijang Innova finance lease assets Rp.344,472,000
Future lease payments under this lease agreement amounted to Rp.14,169,278 for financing principal and Rp.183,721 for financing interest expenses.

The company received funding from Maybank Finance, for the procurement of Mitsubishi vehicles in accordance with the Financing Lease agreement Number 50301160265 dated March 31, 2016, a period of 36 Months, an interest rate of 5.58%.

Value of leased assets for Mitsubishi vehicles Rp.496,000,000
Future lease payments under this lease agreement amounted to Rp.17.870.922 for financing principal and Rp.1,632,449 for financing interest expenses.

25. PINJAMAN JANGKA MENENGAH

	2018	2017		
Surat utang jangka menengah	300.000.000.000	200.000.000.000	Medium term notes	
Mutasi pinjaman jangka menengah adalah sebagai berikut			Movements of medium term notes as follows	
Saldo awal	200.000.000.000	-	Beginning balance	
Penambahan ditahun berjalan	100.000.000.000	200.000.000.000	Additions during the year	
Pelunasan ditahun berjalan	-	-	Payments during the year	
Saldo akhir	300.000.000.000	200.000.000.000	Ending balance	
Uraian/ Description	Pokok/ Principal	Wali amanat/ Trustee	Jatuh tempo/ Maturity	Tingkat bunga/ Interest rate
MTN I Barata Indonesia Seri A	200.000.000.000	Bank Bukopin	7 Des/Dec 2020	9,25%
MTN I Barata Indonesia Seri B	100.000.000.000	Bank Bukopin	16 Maret/March 2021	9,15%
Jumlah/Total	300.000.000.000			

Utang MTN merupakan surat hutang berjangka menengah (Medium Term Notes) yang diterbitkan oleh PT Barata Indonesia (Persero) guna mendukung penyediaan dana untuk pengembangan usaha. Dalam melakukan penerbitan ini perusahaan telah mendapat persetujuan dari dewan komisaris berdasarkan surat No. S-32/Dekom/BRT/XII/2017 tanggal 2 Desember 2017 dan surat dari Kementerian BUMN No. S-122/D3.MBU/12/2017. Perjanjian penerbitan dan penunjukan Agen Pemantau MTN 1 Barata Indonesia tahun 2017 telah disahkan oleh Notaris Arry Supratno, SH No. 11 tanggal 6 Desember 2017. Sehubungan dengan adanya penerbitan MTN Seri B maka terbit Addendum I Perjanjian dan Penunjukan Agen Pemantau Medium Term Notes (MTN) I BARATA Indonesia Tahun 2017 No. 58 tanggal 13 Maret 2018.

MTN diterbitkan secara bertahap terdiri dari beberapa seri dengan nilai pokok MTN yaitu sebesar dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 300.000.000.000,- yang diterbitkan secara berseri dengan rincian sebagai berikut :

1. MTN 1 Barata Indonesia tahun 2017 seri A telah disahkan oleh Notaris Arry Supratno, SH No. 12 tanggal 6 Desember 2017 tentang Akta Pengakuan Hutang Medium Term Notes (MTN) I, bahwa PT Barata Indonesia menerbitkan MTN dengan cara penempatan terbatas dengan jumlah sebesar Rp.200.000.000.000,- dengan tenor 3 tahun sejak tanggal penerbitan yaitu tanggal 7 Desember 2017 dengan bunga 9,25%.
2. MTN 1 Barata Indonesia tahun 2018 seri B telah disahkan oleh Notaris Arry Supratno, SH No. 59 tanggal 13 Maret 2018 tentang Akta Pengakuan Hutang Medium Term Notes (MTN) I, dengan nilai pokok MTN sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000 dengan tenor 3 tahun sejak tanggal penerbitan MTN yaitu pada tanggal 15 Maret 2018 dengan bunga 9,15%.

MTN debt is a Medium Term Notes issued by PT Barata Indonesia (Persero) to support the provision of funds for business development. In conducting this issuance, the company has received approval from the board of commissioners based on letter No. S-32 / Dekom / BRT / XII / 2017 dated December 2nd, 2017 and letter from the SOE Ministry. S-122 / D3.MBU / 12/2017. The agreement on the issuance and appointment of the Barata Indonesia MTN Bar 1 Agreement in 2017 has been approved by Notary Arry Supratno, SH. 11 dated December 6, 2017 and in connection for the issuance MTN B serial than do Addendum I Appointment of the Barata Indonesia MTN Bar I Agreement has been approved by Notary Arry Supratno, SH Number 58, dated March 13, 2018.

MTN were issued in gradual scheme comprising several serial notes, with the face value of MTN in maximum amount of Rp. 300.000.000.000, being serially issued as in detail below:

1. MTN 1 Barata Indonesia, year of 2017, A serial notes was legally bound by Public Notary- Arry Supratno, SH, with the deed no.12 dated 6th of December 2017, about Akta Pengakuan Hutang MTN I, in limited placement with the sum of Rp. 200.000.000.000, with term of 3 year, commencing the date of issuance, that is, dated 7th of December 2017, with interest rate 9,25% per annum.
2. MTN 1 Barata Indonesia, year of 2018 serial B was legality bound by Public Notary - Arry Supratno, SH, with deed No. 59 dated March 13, 2018 about Akta Pengakuan Hutang MTN I, with the principal value of MTN with maximum at IDR100.000.000.000 with term of 3 year, commencing the date of issuance that is, dated 15th of March 2018, with interest rate 9,15% per annum.

25. PINJAMAN JANGKA MENENGAH (Lanjutan)

Perusahaan telah menunjuk PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI"), untuk bertindak sebagai Agen Pembayaran.

Perusahaan telah menunjuk PT Bank Bukopin Tbk, untuk mewakili hak-hak dan kepentingan pemegang MTN selaku Agen Pemantau dan Agen Jaminan.

26. PINJAMAN JANGKA PANJANG

Akun ini mencatat utang kepada PT PLN Indonesia (Persero) untuk dana pinjaman jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp38.511.368.400.

Dana tersebut merupakan dana talangan yang diterima dari PT. PLN (Persero) untuk penyelesaian order Proyek PLTU NTB berdasarkan:

1. Perjanjian Dana Talangan/ Bridging Finance Pekerjaan Pembangunan PLTU 2 NTB Lombok (2X25 MW) Nomor: 12931.PJ/KDN.01.02/DIR/2016 tanggal 13 September 2016.

Metode pengembalian dana talangan sebagai berikut :

- a. Angsuran ke 1 s/d 2 sebesar 20% dari setiap tagihan progress yang dibayar dari PT PLN Indonesia (Persero).
- b. Angsuran ke 3 s/d 4 sebesar 45% dari setiap tagihan progress yang dibayar dari PT PLN Indonesia (Persero).
- c. Sisa dari pengembalian angsuran yang belum terbayar akan diselesaikan pada saat pembayaran klaim time kontrak.

2. Surat PT PLN (Persero) No.1081/KDN/01.02/UIP.NUSRA/2016 tanggal 26 September 2016 perihal Persetujuan Pembayaran Bridging PLTU 2 NTB Lombok (2X25MW)

Jumlah dana talangan sebesar Rp51.000.000.000 dan telah digunakan atau diangsur untuk diperhitungkan dengan tagihan sehingga saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 38.511.368.400.

27. UTANG REKENING DANA INVESTASI

Utang RDI merupakan utang kepada Pemerintah berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor : RDI-178/DDI/1987 tanggal 4 September 1987 dalam rangka pembiayaan investasi prasarana fisik P2SP dan Perjanjian Pinjaman Nomor : RDI-195/DDI/1988 tanggal 29 Februari 1988 untuk modal kerja dalam rangka pekerjaan Proyek Peningkatan Kapasitas Giling Pabrik Gula.

25. MEDIUM TERM NOTES (Continued)

The company has assigned to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (herein after referred to as "KSEI"), acting as the agent of payment.

The company has assigned to PT Bank Bukopin Tbk to represent rights and interest of MTN holders serving as Monitoring Agent and Guarantee Agent

26. LONG TERM LOAN

This account presents and records payables as other long term loan to PT PLN Indonesia (Persero) on December 31, 2018 and 2017 to Rp. 38.511.368.400.

The Loan is a bridging finance obtained from PT. PLN (Persero) to procure work order of NTB PLTU Project referring to:

1. Bridging Finance Agreement for the Work of Building of PLTU 2 NTB Lombok (2x25 MW) number: 12931, PJ/KDN.01.02/DIR/2016 date of September 13, 2016.

The method of returning respected bridging finance are as

- a. The first and second installment are at 20% out of each invoice value of work progress paid by PT PLN Indonesia (Persero)
- b. The third and fourth installment are at 45% out of each invoice value of work progress paid by PT PLN (Persero).
- c. The remaining balance of unpaid bridging finance will be settle when the payment of contract time claim are incurred.

1. A letter of PT PLN (Persero) No.1081/KDN/01.02/UIP.NUSRA/2016 dated September 26, 2016 in respect of The Approval of Payment of Bridging Finance PLTU 2 NTB Lombok (2X25MW).

The whole total of original bridging finance was Rp.51.000.000.000. And the bridging has been appropriately applied and been returned by installment firstly compensating with invoice progress billing rendered. The account balance as of December 31, 2018 showing Rp. 38.511.368.400.

27. ACCOUNT OF FUND INVESTMENT PAYABLE (RDI)

The RDI account payable is a loan procured from Government bound with Loan Agreement no: RDI-178/DDI/1987 dated 4th of September 1987 for purpose of financing investment of physical infra structure (P2SP) and Loan Agreement no: RDI-178/DDI/1988 dated 29th of February 1988 used for working capital of work services project to augment the grinding capacity on Sugar Manufacture.

27. UTANG REKENING DANA INVESTASI (Lanjutan)

Berdasarkan kesepakatan dengan Departemen Keuangan, nilai tersebut merupakan cut off date per 15 Mei 2007 dan sejak itu tidak lagi diperhitungkan bunga sampai dengan adanya penyelesaian lebih lanjut.

Penyelesaian utang RDI mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.05/2007 tanggal 19 Februari 2007. Restrukturisasi utang RDI ini juga telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sesuai surat No. S - 865/MK.05/2015 tanggal 29 Oktober 2015 dengan skema penyelesaian total hutang pokok dan bunga diangsur dengan suku bunga 0% mulai tahun 2016 hingga lunas tahun 2026. Dengan telah disetujuinya restrukturisasi utang RDI maka telah dibuat amandemen perjanjian yaitu Perjanjian Amandemen No. : AMA-176/RDI-178/DSMI/2016 dan AMA-177/RDI-195/DSMI/2016 tanggal 26 April 2016 dan dicantumkan jadwal angsuran.

Rincian utang RDI, angsuran dan saldo per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

No. Perjanjian Contract no :	Utang Pokok Principal Loan	Angsuran Installment	Saldo 2018 Balance 2018
Pokok / Principal			
RDI-178/DDI/1987	4.422.113.491	209.669.662	4.212.443.829
RDI-195/DDI/1988	6.541.840.781	310.174.208	6.231.666.573
Jumlah utang pokok / Principal amount of debt	10.963.954.272	519.843.870	10.444.110.402
Bunga dan denda			
RDI-178/DDI/1987	22.488.338.666	1.066.259.920	21.422.078.746
RDI-195/DDI/1988	50.911.146.930	2.413.896.210	48.497.250.720
Jumlah utang bunga	73.399.485.596	3.480.156.130	69.919.329.466
Jumlah Utang RDI / Total Utang RDI	84.363.439.868	4.000.000.000	80.363.439.868
No. Perjanjian Contract no :	Utang Pokok Principal Loan	Angsuran Installment	Saldo 2017 Balance 2017
Pokok / Principal			
RDI-178/DDI/1987	4.553.157.031	131.043.540	4.422.113.491
RDI-195/DDI/1988	6.735.699.661	193.858.880	6.541.840.781
Jumlah utang pokok / Principal amount of debt	11.288.856.692	324.902.420	10.963.954.272
Bunga dan denda			
RDI-178/DDI/1987	23.154.751.116	666.412.450	22.488.338.666
RDI-195/DDI/1988	52.419.832.060	1.508.685.130	50.911.146.930
Jumlah utang bunga	75.574.583.176	2.175.097.580	73.399.485.596
Jumlah Utang RDI / Total Utang RDI	86.863.439.868	2.500.000.000	84.363.439.868

27. ACCOUNT OF FUND INVESTMENT PAYABLE (Continued)

Under agreement made with Finance Department of Indonesia Republic, the total presented above indicated was the position of Account of Fund Investment Payable (RDI) as of May 15, 2007 (referred to as cut-off date) and ever since there was no computation of interest charges made to the loan, coming to the further settlement.

The settlement of RDI payable are to refer to the subject stated in Regulatory of Minister of Finance No: 17/PMK.05/2007 dated February 19, 2007. The restructuring of RDI payable has an approval from Ministry of Finance according as a letter of No. S-865/MK.05/2015 dated October 29, 2015 with using a scheme of settlement on principal and interest payable-no interest bearing-by installment being in effect in year of 2016 through 2026. Having been approved the restructuring of RDI payable, subsequently agreement of amendment drawn up as set forth in Amendment Agreement of Number:AMA-176/RDI-178/DSMI/2016 and AMA-176/RDI-178/DSMI/2016 dated April 26, 2016 and included schedule of installment within them.

The balance of RDI payable and its installment in detail are as follows:

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perseroan setiap tahun mencadangkan donasi kepada peserta/pegawai yang akan pensiun guna memberikan kompensasi atas hak ganti rugi, pesangon dan penghargaan masa kerja sesuai UU No. 13 tahun 2003.

Perhitungan atas imbalan paska kerja Tanggal 31 Desember 2018 dihitung oleh konsultan PT Binaputera Jaga Hikmah tanggal 28 Desember 2018 dengan No. 595/PSAK-BJH/XII-2018 dilakukan oleh Konsultan Aktuaria PT Binaputera Jaga Hikmah dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Asumsi dan metode aktuarial yang digunakan dalam perhitungan adalah sebagai berikut :

Umur pensiun	56 tahun/ years	Pension age
Mortalita	TMI III - 2011	Mortality
Tingkat pengunduran diri	18-44 tahun/years : 0,6% p.a 45-55 tahun/years : 0,01% p.a	Resignation rate
Kenaikan gaji yang diharapkan	4% pertahun / per year	Future salary increment rate
Tingkat diskonto	8,26% per year	Discount rate
Metode	Projected Unit Credit	Method

Kewajiban imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut :

The Company reserves the donation each year to participants / employees who will retire in order to provide compensation for the right to compensation, severance and gratuity according to Law no. 13 of 2003.

Calculation of post-employment remuneration Date December 31, 2018 by PT Binaputera Jaga Hikmah on December 28, 2018 with No. 595/PSAK-BJH/XII-2018, while conducted by the Actuarial Consultant PT Binaputera Jaga Hikmah using the projected unit credit

Assumption and method of the actuarial calculation :

The employee benefits obligation recognized in the statements of financial position is determined as follows :

	2018	2017	
Imbalan kerja jangka panjang	92.418.123.392	96.501.517.653	Long-term employee benefits
Jumlah	92.418.123.392	96.501.517.653	Total

Biaya bersih yang diakui di laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

Net expenses recognized in the statement of comprehensive income is as follows :

Beban imbalan kerja jangka panjang	11.153.872.130	11.449.387.094	Long-term employee benefits expense
Jumlah	11.153.872.130	11.449.387.094	Total

Kewajiban imbalan kerja yang diakui di laporan keuangan adalah sebagai berikut:

The employee benefits obligation recognized in the statements of financial position is determined as follows :

Nilai kini dari kewajiban	92.418.123.392	96.501.517.653	Present value of obligations
Nilai wajar dari aset program	-	-	Fair value of plan assets
Jumlah	92.418.123.392	96.501.517.653	Total

Mutasi kewajiban imbalan kerja yang diakui di laporan keuangan adalah sebagai berikut:

The movement of employee benefits obligation recognized in the statements of financial position are as follows :

Pada awal tahun	96.501.517.653	88.067.023.292	At the beginning of the year
Beban tahun berjalan	11.153.872.130	11.449.387.094	Expense for the year
Pembayaran manfaat	(20.983.869.673)	(10.950.061.195)	Payment of benefit
Pendapatan komprehensif lainnya	5.746.603.282	7.935.168.462	Other Comprehensive Income
Jumlah	92.418.123.392	96.501.517.653	Total

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 SERTA UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

28. POST-EMPLOYEES' SERVICES LIABILITY (Continued)

Biaya bersih yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

Net expenses recognised in the profit or loss is as follows :

	2018	2017	
Biaya jasa kini	5.227.811.874	4.166.244.268	Current service cost
Biaya bunga	5.926.060.256	7.283.142.826	Interest cost
Hasil aset program yang diharapkan	-	-	Expected return on plan assets
Keuntungan aktuarial ditahun berjalan	-	-	Actuarial gain during the year
Jumlah	<u>11.153.872.130</u>	<u>11.449.387.094</u>	Total

Mutasi nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

The movement in the present value of obligations are as follows :

Pada awal tahun	96.501.517.653	88.067.023.292	At beginning of the year
Biaya jasa kini	5.227.811.874	4.166.244.268	Current service cost
Biaya bunga	5.926.060.256	7.283.142.826	Interest cost
Imbalan yang dibayarkan	(20.983.869.673)	(10.950.061.195)	Benefits paid
Keuntungan aktuarial bersih	5.746.603.282	7.935.168.462	Net actuarial gain
Jumlah	<u>92.418.123.392</u>	<u>96.501.517.653</u>	Total

Analisa sensitivitas adalah sebagai berikut:

Sensitivity analysis is as follows:

Nilai kini kewajiban imbalan pasti	92.418.123.392	96.501.517.653	PV defined benefits obligations
Asumsi tingkat diskonto:			Discount rate assumptions
-1,00%	95.792.545.405	100.230.057.312	-1,00%
+1,00%	89.286.489.285	93.045.610.432	+1,00%
Asumsi kenaikan gaji			Salary increment assumptions
-1,00%	89.117.542.559	92.889.409.171	-1,00%
+1,00%	95.924.622.555	100.348.185.124	+1,00%

29. MODAL SAHAM

29. CAPITAL STOCK

Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Authorized capital, issued and paid in capital of the company as of December 31, 2018, 2017 and 2016 are as follows:

	2018	2017	2016	
Modal dasar				Authorized capital
3.000.000. Saham, nilai nominal				3.000.000 common shares
Rp 1.000.000 per saham. Modal				Rp. 1.000.000 per share. Issued
ditempatkan dan disetor 762.915				and paid up capital 762.915 as of
per 31 Desember 2018 dan 2017				December 31, 2018 and 2017
150.000. Saham, nilai nominal				150.000 common shares
Rp 1.000.000 per saham. Modal				Rp. 1.000.000 per share. Issued
ditempatkan dan disetor 143.203				and paid up capital 143.203 as of
per 31 Desember 2016				December 31, 2016
	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	150.000.000.000	
Saham yang belum ditempatkan	(2.237.085.000.000)	(2.237.085.000.000)	(6.797.000.000)	Shares that haven't yet been placed
Saham yang ditempatkan dan				
disetor penuh	<u>762.915.000.000</u>	<u>762.915.000.000</u>	<u>143.203.000.000</u>	Shares issued and fully paid

29. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Berdasarkan Surat Kementerian BUMN sebagai Pemegang Saham Nomor S-312/MBU/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 dan Akta Notaris Herawati, SH Nomor 07 Tanggal 15 Juni 2017, Modal Dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah) yang terbagi atas 3.000.000 saham, masing-masing saham dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000. Modal dasar telah ditempatkan / disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak Rp. 762.915.000.000 dengan cara sebagai berikut :

- Sebesar Rp. 143.203.000.000 merupakan setoran modal lama sesuai dengan Akta Nomor 9 tanggal 29 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Herawati, Sarjana Hukum, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-07890.40.21.2014 tanggal 29 Oktober 2014.
- Sebesar Rp. 500.000.000.000 berasal dari penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam saham Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016.
- Sebesar Rp. 119.721.000.000 berasal dari penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam saham Perseroan berupa pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perindustrian.

30. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan Modal Disetor terdiri dari :

- 1 Pada bulan Maret 2017, PT Barata Indonesia (Persero) telah melaporkan Aset Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan seluruhnya dicatat pada Tambahan Modal Disetor sesuai dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) Nomor : KET-350/PP/WPJ.19/2017 tanggal 5 April 2017 sebesar Rp.3.220.884.000.
- 2 Selisih penambahan Penyertaan Modal Negara dan Hibah Mesin Kementerian Perindustrian yang menjadi Modal Dasar sebesar Rp. 384.990.

31. LABA BERSIH PER SAHAM

	2018	2017
Laba yang digunakan dalam perhitungan		
laba per saham dasar	67.806.656.247	51.615.018.095
Jumlah rata-rata tertimbang saham	762.915	762.915
Laba bersih per saham	<u>88.878</u>	<u>67.655</u>

29. CAPITAL STOCK (Continued)

Base upon the letter of BUMN ministry acting as shares holder no: S-312/MBU/05/2017 dated 26th of May 2017, and Notary Deed of Herawati, SH no: 07 dated June 7, 2017, the authorized capital shares of company are determined in amount of Rp. 3.000.000.000.000 (three triliun) constituting of 3.000.000 shares, with par value of Rp.1.000.000 per share. The capital shares have been placed and fully paid by The State of Republic of Indonesia in amount of Rp. 762.915.000.000 as the following detail:

- Amount of Rp.143,203.000.000 is an initial capital shares paid according to notarial deed no.9 dated October 29, 2014 being drawn up before Public Notary-Herawati, SH, and having an approval of Minister of Law and Human Right of Republic of Indonesia, with no. AHU-07890.40.21.2014 dated 29th of October 2014
- Amount of Rp. 500.000.000.000 is an additional capital shares of the State of Indonesian Republic invested on capital shares of the company as instructed in Government Order/Regulatory no.68, year of 2016 dated December 29, 2016.
- Amount of Rp. 119.721.000.000 is an further additional capital shares of the State of Indonesian Republic invested on capital shares of the company in the form of capital goods owned by State at Industrial Ministry

30. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL

Additional paid-up capital consists of:

- 1 In March of 2017, PT Barata Indonesia (Persero) has reported the assets owned by company to take participation in Tax Amnesty program, and total value of those asset in amount of Rp. 3.220.884.000 are recorded in the additional paid capital account. And this treatment is according to the descriptive letter of tax amnesty (SKPP)no: KET-350/PP/WPJ.19/2017 dated April 5, 2017.
- 2 Difference in the addition of State Equity Participation and the Ministry of Industry's Mechanical Grant which became the Authorized Capital of Rp. 384,990.

31. BASIC EARNING PER SHARE

Earnings used in the calculation
of basic earnings per share
Weighted average number of shares
Basic earnings per share

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 SERTA UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. PENDAPATAN BERSIH

Rincian penjualan bersih adalah sebagai berikut :

	2018	2017
Pihak berelasi		
PT Pertamina (Persero)	173.258.579.992	145.734.371.800
PTPN X	103.917.788.506	7.384.306.022
PT Rekayasa Industri (Persero)	25.533.830.000	3.307.990.000
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	23.028.540.000	4.642.000.000
PT Garam (Persero)	20.290.047.000	7.130.400.000
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	20.738.290.000	25.219.615.000
PT Indonesia Power	18.366.827.950	25.128.119.223
PT Industri Kereta Api (Persero)	14.882.425.000	26.729.980.000
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	12.250.777.734	40.966.325.023
PT Rajawali	15.761.426.184	10.798.768.433
PT Nindya Karya (Persero)	9.877.864.808	-
PT PLN (Persero)	9.555.587.113	54.065.386.975
PT Pembangkit Jawa Bali	8.849.945.484	77.000.000
PT Hutama Karya (Persero)	8.729.601.496	7.254.211.131
PTPN VII	6.434.924.578	6.371.675.795
PT Pindad (Persero)	5.459.432.798	6.204.896.850
PT Petrokimia Gresik	5.301.965.000	197.925.000
PT Aneka Tambang (Persero)	4.080.900.000	5.884.450.001
PTPN IX	3.903.202.494	42.906.888.727
PTPN XI	3.457.737.594	153.104.499.337
PT Inka Multi Solusi Service	2.636.000.000	2.404.600.000
PTPN II	1.404.600.000	2.470.000.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp. 1.000.000.000)	1.391.982.888	76.896.103.142
Jumlah pihak berelasi	499.112.276.619	654.879.512.459

Pihak ketiga		
PT Prima Alam Gemilang	935.598.600.000	163.150.200.000
Standard Car Truck	166.212.169.625	102.062.095.761
KSO Wika-Barata	84.404.468.146	-
BBWS	92.840.061.400	28.151.631.700
Siemens AG	60.692.792.139	-
PT Berkah Alam Lestari Energi	50.583.625.554	-
KSO Wika-Barata-Multinas	33.568.492.611	-
KSO Nindya-Rezeki	29.640.000.000	-
PT Truba Jaya Engineering	24.067.859.300	-
PT Daikin Air Conditioning	22.920.623.694	-
KSO Wika-Basuki	16.500.066.000	-
PT Indocement Tunggul	15.910.500.000	39.049.160.000
Kementerian Pertanian	14.090.909.091	-
KSO Nindya-Barata	13.190.740.905	7.275.527.066
KSO Waskita-Adhi	11.773.381.408	-
Thyssenkrup Industrial	11.316.477.822	-
A A F	9.351.390.116	4.966.947.468
PT Kebon Agung	8.584.992.500	2.420.367.500
KSO Brantas-Sacna	8.125.000.000	248.000.000
PT Kalinusa Agro Nusantara	7.127.272.727	40.090.909.091
KSO Nindya-Hutama	8.280.561.317	8.055.052.891
PT Sri Rejeki Fertilizier	6.756.750.000	-
KSO Adhi-Nindya	6.462.261.000	9.923.250.000
PT Edwag Mitra Sukses	5.474.892.600	1.178.217.000
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.789.722.590	2.447.302.275
Saldo dipindahkan	1.648.263.610.546	409.018.660.752

32. REVENUES

Net sales in detail are as follows:

Related parties	
PT Pertamina (Persero)	
PTPN X	
PT Rekayasa Industri (Persero)	
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	
PT Garam (Persero)	
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	
PT Indonesia Power	
PT Industri Kereta Api (Persero)	
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	
PT Rajawali	
PT Nindya Karya (Persero)	
PT PLN (Persero)	
PT Pembangkit Jawa Bali	
PT Hutama Karya (Persero)	
PTPN VII	
PT Pindad (Persero)	
PT Petrokimia Gresik	
PT Aneka Tambang (Persero)	
PTPN IX	
PTPN XI	
PT Inka Multi Solusi Service	
PTPN II	
Others (each below Rp. 1.000.000.000)	
Total related parties	

Third parties	
PT Prima Alam Gemilang	
Standard Car Truck	
KSO Wika-Barata	
BBWS	
Siemens AG	
PT Berkah Alam Lestari Energi	
KSO Wika-Barata-Multinas	
KSO Nindya-Rezeki	
PT Truba Jaya Engineering	
PT Daikin Air Conditioning	
KSO Wika-Basuki	
PT Indocement Tunggul	
Kementerian Pertanian	
KSO Nindya-Barata	
KSO Waskita-Adhi	
Thyssenkrup Industrial	
A A F	
PT Kebon Agung	
KSO Brantas-Sacna	
PT Kalinusa Agro Nusantara	
KSO Nindya-Hutama	
PT Sri Rejeki Fertilizier	
KSO Adhi-Nindya	
PT Edwag Mitra Sukses	
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
Carried forward	

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 SERTA UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. PENDAPATAN BERSIH (Lanjutan)

32. REVENUES (Continued)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Saldo pindahan	1.648.263.610.546	409.018.660.752	Brought forward
KSO BAP-Waskita	2.892.389.900	8.598.997.000	KSO BAP-Waskita
KSO PP-APL	2.430.883.653	3.241.178.204	KSO PP-APL
KSO PP-HK	2.023.974.510	4.851.648.032	KSO PP-HK
PT Non Ferindo Utama	2.008.500.000	1.982.000.000	PT Non Ferindo Utama
PT Universal Suryaprima	1.994.990.241	4.259.751.350	PT Universal Suryaprima
PT Laju Perdana Indah	1.712.300.800	-	PT Laju Perdana Indah
Dalle Enegy	1.625.435.700	-	Dalle Enegy
Dinas PU & PR Cirebon	1.190.909.092	-	Dinas PU & PR Cirebon
PT Komatsu Indonesia	1.043.000.000	19.320.000	PT Komatsu Indonesia
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp. 1.000.000.000)	12.597.262.499	106.426.380.135	Others (each below Rp. 1.000.000.000)
Jumlah pihak ketiga	1.677.783.256.941	538.397.935.473	Total third parties
Jumlah	<u>2.176.895.533.560</u>	<u>1.193.277.447.932</u>	Total

Rincian pemberi kerja dengan nilai kontribusi pendapatan melebihi 10% dari pendapatan usaha Perusahaan untuk tahun-tahun yang 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Details of the project owners with contribution value exceeding 10% of the company revenues for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
PT Prima Alam Gemilang	935.598.600.000	163.150.200.000	PT Prima Alam Gemilang

33. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari :

33. COST OF REVENUES

This account consist of :

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Pemakaian bahan	861.445.499.451	492.912.919.645	Material in use
Beban tenaga langsung	22.962.624.364	18.211.623.522	Wages/labor
Beban mesin	13.281.126.734	18.933.359.457	Mechineries charges
Beban operasional lapangan/order	336.455.266.970	149.338.711.319	Operational charges/order(placement)
Beban sub kontrak	629.237.849.955	282.479.449.846	Sub contract cost
Beban produksi tak langsung	113.079.228.335	111.356.632.915	Production cost-indirect
Jumlah	<u>1.976.461.595.809</u>	<u>1.073.232.696.704</u>	Total

34. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Akun ini terdiri dari :

34. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

This account consist of :

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Beban pegawai	19.171.311.550	15.936.422.363	Employees expenses
Beban rumah dinas dan gedung	1.103.383.179	973.398.303	Building and housing staff expenses
Beban kendaraan	3.409.250.544	2.287.628.002	Vehicles charges
Beban administrasi lainnya	10.145.792.847	7.927.390.686	Office and other administrative expenses
Beban diestimasi imbalan kerja	2.691.775.996	461.801.849	Post-employees'services- estimated
Beban Insentif karya	6.518.402.608	2.807.957.923	Work incentives
Jumlah	<u>43.039.916.723</u>	<u>30.394.599.126</u>	Total

35. BEBAN PENJUALAN

Akun ini terdiri dari :

	2018	2017	
Beban pegawai	3.294.803.705	5.988.473.429	Employees expenses
Beban administrasi dan umum	581.463.313	1.385.222.418	General and administrative expenses
Beban kendaraan	281.700.822	772.303.124	Vehicles charges
Beban promosi dan tender	39.075.000	1.467.325.117	Bid, tender and promotion
Beban rumah dinas dan gedung	-	515.241.315	Building and housing staff expenses
Jumlah	4.197.042.841	10.128.565.403	Total

36. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat pihak berelasi

- Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan adalah pemegang saham Perusahaan.
- Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Perusahaan.
- Entitas yang merupakan perusahaan asosiasi dari Perusahaan.
- Entitas yang merupakan ventura bersama dari Perusahaan.
- Manajemen kunci yang meliputi anggota dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Ikhtisar pihak-pihak yang berelasi dengan Perusahaan adalah sebagai berikut:

35. SELLING EXPENSES

This account consist of :

36. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of relationship

- The Government of the Republic of Indonesia represented by Ministry of Finance, is the stockholder of the Company.
- All entities that are owned and controlled by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia including entities where the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia has significant influence: Stateowned Enterprise (SOE).
- Related parties which main shareholder is the same with Company.
- The entities which part of the investment in associates.
- The entities which part of joint ventures.
- Key management personnel includes Commissioners and Directors of the Company.

The summary of parties having the special relations with the Company is as follows:

Pihak berelasi/Related parties	Sifat pihak berelasi/The nature of relationship	Transaksi/Transactions
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Rekening koran / Account
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Rekening koran, pinjaman dana / Account, loan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Rekening koran, pinjaman dana / Account, loan
PT Bank Syariah Mandiri	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Rekening koran, pinjaman dana / Account, loan
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Rekening koran / Account
PT Pertamina (Persero)	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Penjualan / Sales
PTPN	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Penjualan / Sales
PT Rekayasa Industri (Persero)	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Penjualan / Sales
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Penjualan / Sales
PT Garam (Persero)	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Penjualan / Sales
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Penjualan / Sales
PT Indonesia Power	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Penjualan / Sales
PT Industri Kereta Api (Persero)	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Penjualan / Sales

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 SERTA UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (Lanjutan)

36. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

Pihak berelasi/Related parties	Sifat pihak berelasi/The nature of relationship	Transaksi/Transactions
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Penjualan / Sales
PT Rajawali	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Penjualan / Sales
PT Nindya Karya (Persero)	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Penjualan / Sales
PT PLN (Persero)	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Penjualan / Sales
PT Utama Karya (Persero)	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Penjualan / Sales
PT Pindad (Persero)	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Penjualan / Sales
PT Petrokimia Gresik	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Penjualan / Sales
PT Aneka Tambang (Persero), Tbk	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Penjualan / Sales
PT Boma Bisma Indra (Persero)	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Penjualan / Sales
PT Kimia Farma (Persero), Tbk	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Penjualan / Sales
PT PAL Indonesia	Kepemilikan sama terikat / Common ownership	Penjualan / Sales

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut adalah antara lain sebagai berikut :

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut adalah antara lain sebagai berikut :

		% terhadap jumlah Aset/Liabilitas % on total Aset/Liabilities		
	2018	2017	2018	2017
Kas dan setara kas				Cash and cash equivalents
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	540.232.754.850	646.979.236.302	11,88%	21,91% PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	9.500.741.916	-	0,21%	0,00% PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	109.362.444.674	106.894.167.766	2,40%	3,62% PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	3.533.251.715	41.321.276.681	0,08%	1,40% PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	41.617.972	9.187.441	0,00%	0,00% PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Jumlah	662.670.811.127	795.203.868.190	14,57%	26,93% Total

		% terhadap jumlah Aset/Liabilitas % on total Aset/Liabilities			
2018	2017	2018	2017		
Piutang usaha				Trade account receivables	
PT Pertamina (Persero)	31.206.835.933	33.775.960.322	0,69%	1,14%	PT Pertamina (Persero)
PT Industri Kereta Api (Persero)	27.985.272.553	28.578.226.347	0,62%	0,97%	PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Rekayasa Industri	15.489.739.235	5.523.148.282	0,34%	0,19%	PT Rekayasa Industri
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	14.755.855.936	3.412.389.214	0,32%	0,12%	PT Wijaya Karya (Persero), Tbk
PTPN IX	13.059.049.651	10.283.106.425	0,29%	0,35%	PTPN IX
PT Rajawali	11.719.204.499	8.740.868.139	0,26%	0,30%	PT Rajawali
PTPN XI	10.568.160.740	6.924.507.132	0,23%	0,23%	PTPN XI
PT PLN (Persero)	8.652.459.425	17.502.617.494	0,19%	0,59%	PT PLN (Persero)
PTPN VII	7.243.166.664	4.815.485.762	0,16%	0,16%	PTPN VII
PT Pelindo IV	5.620.495.594	5.620.495.594	0,12%	0,19%	PT Pelindo IV
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	7.704.490.000	10.467.200.000	0,17%	0,35%	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Utama Karya (Persero)	3.778.255.146	4.317.755.752	0,08%	0,15%	PT Utama Karya (Persero)
Saldo dipindahkan	157.782.985.376	139.961.760.463	3,47%	4,74%	Carried forward

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 SERTA UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (Lanjutan)

36. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

	2018	2017	% terhadap jumlah Aset/Liabilitas % on total Aset/Liabilities		
			2018	2017	
Piutang usaha (Lanjutan)					Trade account receivables (Continued)
Saldo pindahan	157.782.985.376	139.961.760.463	3,47%	4,74%	Brought forward
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	3.048.513.100	3.048.513.100	0,07%	0,10%	PT Adhi Karya (Persero), Tbk
PT Aneka Tambang (Persero), Tbk	2.106.810.001	3.655.620.001	0,05%	0,12%	PT Aneka Tambang (Persero), Tbk
Perum Jasa Tirta	1.760.521.810	2.646.846.221	0,04%	0,09%	Perum Jasa Tirta
PT Pelindo II	1.613.675.946	1.613.675.946	0,04%	0,05%	PT Pelindo II
PT Boma Bisma Indra (Persero)	1.468.901.848	1.504.162.848	0,03%	0,05%	PT Boma Bisma Indra (Persero)
PT PAL Indonesia	376.687.380	1.626.207.800	0,01%	0,06%	PT PAL Indonesia
PT Indonesia Power	59.998.000	3.015.898.290	0,00%	0,10%	PT Indonesia Power
PT Krakatau Semen Indonesia	-	3.647.709.074	0,00%	0,12%	PT Krakatau Semen Indonesia
PT Perum Perindo	-	2.128.876.433	0,00%	0,07%	PT Perum Perindo
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp. 1.000.000.000)	20.031.961.274	11.601.796.046	0,44%	0,39%	Others (each below Rp. 1.000.000.000)
Jumlah pihak berelasi	188.250.054.735	174.451.066.222	4,14%	5,91%	Total related parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(16.745.836.681)	(12.258.113.067)	(0,37%)	(0,42%)	Allowance for impairment losses
Jumlah piutang usaha pihak berelasi - bersih	171.504.218.054	162.192.953.155	3,08%	4,35%	Total account receivable related parties - net
	2018	2017	% terhadap jumlah Aset/Liabilitas % on total Aset/Liabilities		
			2018	2017	
Piutang retensi					Retention receivables
PT PLN (Persero)	44.235.987.781	44.235.987.781	0,97%	1,50%	PT PLN (Persero)
Perum Perhutani	5.053.399.998	5.053.399.998	0,11%	0,17%	Perum Perhutani
Perum Perindo	1.891.660.200	-	0,04%	0,00%	Perum Perindo
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	1.748.587.500	1.748.587.500	0,04%	0,06%	PT Adhi Karya (Persero), Tbk
PT Indonesia Power	-	1.540.300.000	0,00%	0,05%	PT Indonesia Power
PTPN XI	1.246.192.291	1.227.721.200	0,03%	0,04%	PTPN XI
PT Petrokimia Gresik	1.087.500.000	1.087.500.000	0,02%	0,04%	PT Petrokimia Gresik
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp. 1.000.000.000)	3.242.464.595	4.663.359.961	0,07%	0,16%	Others (each below Rp. 1.000.000.000)
Jumlah piutang pihak berelasi	58.505.792.365	59.556.856.440	1,29%	2,02%	Total related parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(269.122.548)	(205.765.354)	(0,01%)	(0,01%)	Allowance for impairment losses
Jumlah piutang retensi pihak berelasi - bersih	58.236.669.817	59.351.091.086	1,28%	2,01%	Total retention receivable related parties - net

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 SERTA UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (Lanjutan)

36. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

	2018	2017	% terhadap jumlah Aset/Liabilitas % on total Aset/Liabilities		
			2018	2017	
Tagihan bruto					Gross amount due from customer
PTPN X	102.445.825.057	1.504.862.823	2,25%	0,05%	PTPN X
PT PLN (Persero)	49.178.810.262	63.452.379.296	1,08%	2,15%	PT PLN (Persero)
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	27.735.034.000	6.687.177.115	0,61%	0,23%	PT Adhi Karya (Persero), Tbk
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	23.516.237.592	34.195.002.824	0,52%	1,16%	PT Wijaya Karya (Persero), Tbk
PT Pertamina (Persero)	19.184.066.439	65.794.244.770	0,42%	2,23%	PT Pertamina (Persero)
PT Garam (Persero)	15.622.197.000	7.130.400.000	0,34%	0,24%	PT Garam (Persero)
PT Rekayasa Industri (Persero)	10.457.878.686	3.669.184.839	0,23%	0,12%	PT Rekayasa Industri (Persero)
PT Hutama Karya (Persero)	9.441.383.007	10.359.740.412	0,21%	0,35%	PT Hutama Karya (Persero)
PT Indonesia Power	8.035.935.740	26.835.566.632	0,18%	0,91%	PT Indonesia Power
PT Nindya Karya (Persero)	7.230.387.308	-	0,16%	0,00%	PT Nindya Karya (Persero)
PT Rajawali II	6.999.672.894	8.540.054.798	0,15%	0,29%	PT Rajawali II
PT Rajawali I	6.737.997.289	-	0,15%	0,00%	PT Rajawali I
PTPN XI	6.694.985.800	91.646.622.121	0,15%	3,10%	PTPN XI
PTPN VII	5.925.617.616	4.822.575.394	0,13%	0,16%	PTPN VII
PT Pindad (Persero)	4.115.869.126	6.114.324.118	0,09%	0,21%	PT Pindad (Persero)
PT Petrokimia Gresik	3.965.281.352	2.552.236.352	0,09%	0,09%	PT Petrokimia Gresik
PT Perum Jasa Tirta	3.282.324.019	11.152.593.377	0,07%	0,38%	PT Perum Jasa Tirta
PT Pembangkit Jawa Bali	3.012.888.801	-	0,07%	0,00%	PT Pembangkit Jawa Bali
PTPN IX	2.414.108.045	44.033.979.527	0,05%	1,49%	PTPN IX
PT PAL Indonesia (Persero)	2.297.692.000	2.297.692.000	0,05%	0,08%	PT PAL Indonesia (Persero)
PT Brantas Abipraya	1.913.738.488	4.190.352.987	0,04%	0,14%	PT Brantas Abipraya
PTPN II	1.301.600.000	2.470.000.000	0,03%	0,08%	PTPN II
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp. 1.000.000.000)	768.074.263	20.601.432.965	0,02%	0,70%	Others (each below Rp.1.000.000.000)
Jumlah	322.277.604.785	418.050.422.350	7,09%	14,16%	Total

	2018	2017	% terhadap jumlah Aset/Liabilitas % on total Aset/Liabilities		
			2018	2017	
Utang bank					Bank payables
PT Bank Syariah Mandiri	148.414.172.693	-	4,43%	-	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	22.865.176.725	22.671.454.806	0,68%	1,24%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	20.094.000.000	1.464.441.264	0,60%	0,08%	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
Jumlah	191.373.349.418	24.135.896.070	5,71%	1,33%	Total

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 SERTA UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (Lanjutan)

36. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

	2018	2017	% terhadap jumlah Aset/Liabilitas % on total Aset/Liabilities		
			2018	2017	
Utang usaha					Trade payables
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon	65.551.527.008	-	1,96%	0,00%	PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
PT Industri Kereta Api (Persero)	6.715.879.874	6.095.916.239	0,20%	0,33%	PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Boma Bisma Indra (Persero)	695.653.523	748.998.483	0,02%	0,04%	PT Boma Bisma Indra (Persero)
PT Wijaya Karya Beton, Tbk	590.200.180	51.355.930	0,02%	0,00%	PT Wijaya Karya Beton, Tbk
PT Pindad (Persero)	474.926.103	830.161.000	0,01%	0,05%	PT Pindad (Persero)
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp. 100.000.000)	1.341.929.253	314.603.193	0,04%	0,02%	Others (each below Rp. 1.000.000.000)
Jumlah	75.370.115.941	8.041.034.845	0,29%	0,44%	Total
	2018	2017	% terhadap jumlah Aset/Liabilitas % on total Aset/Liabilities		
			2018	2017	
Uang muka dari pelanggan					Advance from customers
PTPN X	168.207.405.000	-	5,02%	-	PTPN X
PT PLN (Persero)	42.417.920.419	766.025.000	1,27%	0,04%	PT PLN (Persero)
PT Garam (Persero), Tbk	12.262.000.000	2.400.000.000	0,37%	0,13%	PT Garam (Persero), Tbk
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	10.304.935.106	-	0,31%	-	PT Wijaya Karya (Persero), Tbk
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	3.945.867.042	-	0,12%	-	PT Adhi Karya (Persero), Tbk
PT Pindad (Persero)	3.657.159.180	-	0,11%	-	PT Pindad (Persero)
PTPN XI	1.476.437.835	-	0,04%	-	PTPN XI
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1.360.570.103	-	0,04%	-	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Krakatau Semen Indonesia, Tbk	-	276.228.000	0,00%	0,02%	PT Krakatau Semen Indonesia, Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp. 1.000.000.000)	661.169.887	45.997.103	0,04%	0,00%	Others (each below Rp. 1.000.000.000)
Jumlah	244.293.464.572	3.488.250.103	7,30%	0,19%	Total
	2018	2017	% terhadap jumlah Aset/Liabilitas % on total Aset/Liabilities		
			2018	2017	
Penjualan					Sales
PT Pertamina (Persero)	173.258.579.992	145.734.371.800	7,96%	12,21%	PT Pertamina (Persero)
PTPN X	103.917.788.506	7.384.306.022	4,77%	0,62%	PTPN X
PT Rekayasa Industri (Persero)	25.533.830.000	3.307.990.000	1,17%	0,28%	PT Rekayasa Industri (Persero)
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	23.028.540.000	4.642.000.000	1,06%	0,39%	PT Adhi Karya (Persero), Tbk
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	20.738.290.000	25.219.615.000	0,95%	2,11%	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Garam (Persero)	20.290.047.000	7.130.400.000	0,93%	0,60%	PT Garam (Persero)
PT Indonesia Power	18.366.827.950	25.128.119.223	0,84%	2,11%	PT Indonesia Power
PT Industri Kereta Api (Persero)	14.882.425.000	26.729.980.000	0,68%	2,24%	PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	12.250.777.734	40.966.325.023	0,56%	3,43%	PT Wijaya Karya (Persero), Tbk
Saldo dipindahkan	412.267.106.182	286.243.107.068	18,94%	23,99%	Carried forward

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 SERTA UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (Lanjutan)

36. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

	2018	2017	% terhadap jumlah Aset/Liabilitas % on total Aset/Liabilities		
			2018	2017	
Penjualan (Lanjutan)					Sales (Continued)
Saldo pindahan	412.267.106.182	286.243.107.068	18,94%	23,99%	Brought forward
PT Rajawali	15.761.426.184	10.798.768.433	0,72%	0,90%	PT Rajawali
PT Nindya Karya (Persero)	9.877.864.808	-	0,45%	0,00%	PT Nindya Karya (Persero)
PT PLN (Persero)	9.555.587.113	54.065.386.975	0,44%	4,53%	PT PLN (Persero)
PT Pembangkit Jawa Bali	8.849.945.484	77.000.000	0,41%	0,01%	PT Pembangkit Jawa Bali
PT Utama Karya (Persero)	8.729.601.496	7.254.211.131	0,40%	0,61%	PT Utama Karya (Persero)
PTPN VII	6.434.924.578	6.371.675.795	0,30%	0,53%	PTPN VII
PT Pindad (Persero)	5.459.432.798	6.204.896.850	0,25%	0,52%	PT Pindad (Persero)
PT Petrokimia Gresik	5.301.965.000	197.925.000	0,24%	0,02%	PT Petrokimia Gresik
PT Aneka Tambang (Persero)	4.080.900.000	5.884.450.001	0,19%	0,49%	PT Aneka Tambang (Persero)
PTPN IX	3.903.202.494	42.906.888.727	0,18%	3,60%	PTPN IX
PTPN XI	3.457.737.594	153.104.499.337	0,16%	12,83%	PTPN XI
PT Inka Multi Solusi Service	2.636.000.000	2.404.600.000	0,12%	0,20%	PT Inka Multi Solusi Service
PTPN II	1.404.600.000	2.470.000.000	0,06%	0,21%	PTPN II
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp. 1.000.000.000)	1.391.982.888	76.896.103.142	0,06%	6,44%	Others (each below Rp.1.000.000.000)
Jumlah	499.112.276.619	654.879.512.459	22,93%	54,88%	Total

37. ASET MONETER DALAM MATA UANG ASING

37. MONETARY ASSET DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Akun ini terdiri dari :

This account consist of :

		2018		2017		
		Mata Uang Asing/ Foreign Currency Currency	Ekuivalen Rp/ Equivalent in Rp	Mata Uang Asing/ Foreign Currency Currency	Ekuivalen Rp/ Equivalent in Rp	
Aset	Kas dan setara kas	USD	13.386.227,96	193.845.967.091,24	18.486.627,71	250.456.832.187
		EURO	871.127,50	14.425.653.618	-	-
	Jumlah aset		14.257.355,46	208.271.620.709,37	18.486.628	250.456.832.187

38. INSTRUMEN KEUANGAN

38. FINANCIAL INSTRUMENT

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan keuangan dicatat sebesar nilai wajar atau pada biaya perolehan diamortisasi. Selain itu, instrumen keuangan disajikan sebesar jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Nilai tercatat (berdasarkan jumlah nasional) kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang retensi, utang usaha dan lain-lain serta biaya masih harus dibayar kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena instrumen keuangan tersebut berjangka pendek.

Financial instrument being reflected in financial statements are recorded at amount of plausible value or at the acquisition cost amortized. Apart from, financial instrument are reflected in amount of its record, either because the record are in the approximate amount of its fair value or because its fair value are unmeasurable accurately.

The value recorded (in amount of face value) such as: cash and cash equivalent; account receivable trade and retention; account payables trade and accrued expenses are recorded more or less at its fair value, in that those financial instruments are in short term of accounting cycle.

38. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

38. FINANCIAL INSTRUMENT (Continued)

Klasifikasi dan nilai wajar instrumen keuangan

Classifications and fair value of financial instrument

31 Desember 2018	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang/ <i>Loan delivered and Account Receivables</i>	Liabilitas Pada Biaya Perolehan Diamortisasi/ <i>Liabilitie atacquisition amortized</i>	Jumlah/ Amount	December 31, 2018
Aset keuangan				Monetary asset:
Kas dan setara kas	757.289.796.966	-	757.289.796.966	Cash and cash equivalent
Piutang usaha	312.247.758.629	-	312.247.758.629	Trade account receivables
Piutang retensi	64.679.629.918	-	64.679.629.918	Retention receivables
Tagihan bruto	1.801.584.095.823	-	1.801.584.095.823	Gross amount due from customers
Piutang lain-lain	1.430.238.828	-	1.430.238.828	Others receivable
Jumlah	2.937.231.520.165	-	2.937.231.520.165	Total
Liabilitas keuangan				Monetary liability
Utang bank	-	404.721.207.382	404.721.207.382	Bank loan/Credit facility
Utang usaha	-	599.841.012.053	599.841.012.053	Trade account payables
Beban yang masih harus dibayar	-	566.740.621.750	566.740.621.750	Accrued expenses
Jumlah	-	1.571.302.841.185	1.571.302.841.185	Total
31 Desember 2018	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang/ <i>Loan delivered and Account Receivables</i>	Liabilitas Pada Biaya Perolehan Diamortisasi/ <i>Liabilitie atacquisition amortized</i>	Jumlah/ Amount	December 31, 2018
Aset keuangan				Monetary Asset:
Kas dan setara kas	1.006.644.602.876	-	1.006.644.602.876	Cash and cash equivalent
Piutang usaha	259.004.505.758	-	259.004.505.758	Trade account receivables
Piutang retensi	66.098.482.530	-	66.098.482.530	Retention receivables
Tagihan bruto	614.479.993.093	-	614.479.993.093	Gross amount due from customers
Piutang lain-lain	602.953.194	-	602.953.194	Others receivable
Jumlah	1.946.830.537.451	-	1.946.830.537.451	Total
Liabilitas keuangan				Monetary Liability
Utang bank	-	244.419.058.230	244.419.058.230	Bank loan/Credit facility
Utang usaha	-	411.334.259.791,92	411.334.259.791,92	Trade account payables
Beban yang masih harus dibayar	-	681.109.906.588	681.109.906.588	Accrued expenses
Jumlah	-	1.336.863.224.610	1.336.863.224.610	Total

39. MANAJEMEN RESIKO

Pendahuluan dan Gambaran Umum

Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan sebagai berikut:

- Risiko kredit
- Risiko pasar
- Risiko likuiditas
- Risiko operasional

Catatan ini menyajikan informasi mengenai eksposur Perusahaan terhadap setiap risiko di atas, tujuan dan kebijakan yang dilakukan oleh Perusahaan dalam mengukur dan mengelola risiko.

Resiko kredit

Risiko kredit adalah risiko utama Perusahaan, yaitu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan konsumen untuk mengembalikan utangnya kepada Perusahaan. Apabila utang yang tidak dapat dikembalikan jumlahnya banyak dan signifikan, maka hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan Perusahaan.

Manajemen risiko yang telah diterapkan Perusahaan adalah diversifikasi portofolio menurut wilayah, sektor ekonomi dan industri, dan tipe barang.

Resiko pasar

Risiko pasar adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh adanya perubahan variabel-variabel pasar seperti perubahan tingkat bunga dan nilai tukar mata uang.

Manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Perusahaan adalah membatasi eksposur dalam investasi yang memiliki harga pasar yang fluktuatif.

Resiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian atau potensi kerugian yang merupakan akibat adanya kesenjangan antara penerimaan dan pembayaran. Terjadinya kesenjangan yang cukup besar akan menurunkan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo.

Manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Mendapatkan pinjaman dengan skedul pembayaran kembali pokok dan bunga yang sesuai.
- Menjaga agar posisi kas dan bank Perusahaan selalu dalam posisi likuid.
- Memonitor posisi kas dan bank Perusahaan secara periodik, baik tahunan, bulanan, mingguan maupun harian, guna memastikan agar selalu terdapat surplus kas yang memadai.
- Menjaga agar jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode tertentu lebih besar dibanding dengan utang yang jatuh tempo pada periode yang sama.

39. RISK MANAGEMENT

Introduction and General Notes

The company owns the exposure inherent are apt to be affected the risks of financial instrument, as follows:

- Credit risk
- Marketing Risk
- Liquidity Risk
- Operating Risk

The following notes present the information as to Company's exposure toward any of the purposed risk above, objectives and policies are pertinently maintained by Company in measuring and managing the risk

Credit Risk

Credit Risk is a main risk of Company, that is, the risk of loss caused by inability of consumers to make payments of their liabilities to the Company. If their unreturnable liabilities are in considerable and significant in amount, then these matters may cause decrement in revenue, productivity and degree of liquidity of Company.

Risk management having been adopted by company is port folio diversification cl classified by regional, industry and economy sector, and types of goods.

Marketing Risk

Marketing risk is a risk of loss suffered from the changes in factors of market variables such as rate of interest and exchange rate of foreign currency

To maintain such as this risk, Management has prudently made restrictions or avoidances on exposure in investments liable to be fluctuative in market price.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk of loss or potentiality in loss resulted from a time elapse between the transaction of cash inflow and cash outlay. The time elapse occurred too longer will decrease the company in ability to fulfill its liability on maturity date.

To maintain this risk, the management takes appropriate actions such as the following:

- Obtaining loan/credit facility with repayments schedule of principal and interest are suitable to company's capability.
- Securing the cash on hand and in bank are always in liquid position.
- Monitoring periodically the cash on hand and in bank, either annually, monthly, weekly or daily in order to ascertain that the cash surplus is always in adequate amount.
- Maintaining the total of receivables falling due in certain period is always higher than payables in those of same period.

39. MANAJEMEN RESIKO (Lanjutan)

Resiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan sistem teknologi informasi, kesalahan karena faktor manusia, maupun kelemahan prosedur operasional dalam suatu proses. Risiko ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian pada Perusahaan sehingga akan mempengaruhi kinerja dan tingkat kesehatan Perusahaan.

Manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Menerapkan sistem yang tersentralisasi sehingga proses bisnis dapat dan terkontrol secara sistematis dan dimonitor dari waktu ke waktu.
- Menyiapkan backup dan Disaster Recovery Plan yang memadai bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atas sistem aplikasi utama Perusahaan, baik dari sisi hardware dan software.
- Menerapkan aturan kerja yang jelas dan sanksi yang tegas atas penyimpangan yang terjadi, sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat.
- Adanya penanaman nilai-nilai dasar Perusahaan sejak dini kepada karyawan, sehingga dapat menghindarkan potensi penyimpangan.
- Adanya penilaian kinerja yang wajar dan transparan serta adanya kesempatan untuk pengembangan karir.

40. REKLASIFIKASI

Beberapa Akun dalam laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

	Sebelum/ Before	Reklasifikasi/ Reclassification	Sesudah/ After	
31 Desember 2017				December 31, 2017
Aset				Asset
Piutang usaha	258.942.461.232	62.044.526	259.004.505.758	Trade account receivables
Ase tetap	693.867.824.617	28.132.527.739	722.000.352.356	Fixed asset
Aset dalam konstruksi	28.132.527.739	(28.132.527.739)	-	Construction in progress
Aset pajak tangguhan	-	34.057.992.326	34.057.992.326	Deferred tax asset
Aset lain-lain	4.242.450.418	(62.044.526)	4.180.405.892	Others asset
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	202.128.377.045	209.205.882.747	411.334.259.792	Trade payable
Utang pajak	50.119.069.372	7.474.080.846	57.593.150.218	
Utang lain-lain	216.679.963.593	(216.679.963.593)	-	Others payable
Kewajiban pajak tangguhan	98.139.640.577	132.197.632.903	(34.057.992.326)	Deferred tax liabilities
Ekuitas				Equity
Selisih penilaian kembali aset tetap	396.592.898.709	132.197.632.903	528.790.531.612	Excessive in fixed asset revaluation

39. RISK MANAGEMENT (Continued)

Resiko operasional

Operating risks the risk of loss caused by the failure of information technology system. Such a failure may arise from either by error or mistakes of human being's factor, or by the weakness of operating procedure in a process. This risk may give rise to a loss for the company, and consequently will influence the work performance and degree of soundness of the the company.

To maintain this risk, the management takes decisive actions such as the following:

- Implementing the system centralizing so as to enable the processing business may well be controlled in systematic manner, and may be monitorized in day-to-day basis.
- Preparing adequately Backup and Disaster Recovery Plan, if a matter or thing undesired going bad happen to the vital system of application either from hardware-wise or software-wise.
- Applying the obvious rule of work and firm punishment for whoever making of disobedience or violation over the rule, and the punishment shall be in conformity with degree of the mistakes.
- Early treatment as to disseminating the underlying values of Company to employees is to purportedly avoid the potential disobedience.
- Assessing adequately and transparently the work productivity of employees, and giving a chance for career development.

40. RECLASSIFICATION

Certain accounts in the financial statements for the years ended December 31, 2017 and 2016 have been reclassified to conform with the presentation of the financial statements for the year ended December 31, 2018.

40. REKLASIFIKASI (Lanjutan)

40. RECLASSIFICATION (Continued)

	Sebelum/ Before	Reklasifikasi/ Reclassification	Sesudah/ After	
31 Desember 2016				December 31, 2016
Aset				Asset
Kas dan setara kas	607.020.068.646	(7.389.800.000)	599.630.268.646	Cash and cash equivalent
Piutang usaha	183.469.246.113	62.044.526	183.531.290.639	Trade account receivables
Ase tetap	702.174.066.546	7.834.193.851	710.008.260.397	Fixed asset
Aset dalam konstruksi	7.834.193.851	(7.834.193.851)	-	Construction in progress
Aset pajak tangguhan	-	35.841.650.902	35.841.650.902	Deffered tax asset
Aset lain-lain	15.567.252.326	7.327.755.474	22.895.007.800	Others asset
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	206.208.652.461	52.696.274.370	258.904.926.831	Trade payable
Utang lain-lain	52.696.274.370	(52.696.274.370)	-	Others payable
Kewajiban pajak tangguhan	96.355.982.001	132.197.632.903	(35.841.650.902)	Deffered tax liabilities
Ekuitas				Equity
Selisih penilaian kembali aset tetap	396.592.898.709	132.197.632.903	528.790.531.612	Excessive in fixed asset revaluation

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

41. SUBSEQUENT EVENT

Tidak terdapat kejadian setelah tanggal neraca, yang mempengaruhi laporan keuangan tanggal 31 Desember 2018.

There are no financial transactions or events occurred after balance which influence or affect the presentation of financial statement as of December 31, 2018.

42. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

42. MANAGEMENT RESPONSIBILITY TO FINANCIAL STATEMENT

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan isi laporan keuangan yang di otorisasi untuk terbit tanggal 25 Pebruari 2019

Management is responsible for preparation and contain of financial statement authorized to issued and published as of February 25, 2019.